

# **Strategi dan Program ADB untuk Indonesia 2006-2009**

Oktober 2006

## NILAI TUKAR

(per 29 September 2006)

Nilai – rupiah (Rp)

Rp1.00= \$0.000110

\$1.00 = Rp9,226

## SINGKATAN

ADB	–	Asian Development Bank/Bank Pembangunan Asia
ADF	–	Asian Development Fund/Dana Pembangunan Asia
ASEAN	–	Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
AusAID	–	Australian Agency for International Development/Lembaga Bantuan Pemerintah Australia untuk Pembangunan Internasional
Bappenas	–	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BIMP-EAGA	–	Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina – Wilayah Pertumbuhan di ASEAN Timur
CAPE		Country Assistance Program Evaluation/Evaluasi Program Bantuan Untuk Negara
CIDA	–	Canada International Development Agency/Lembaga Bantuan Pemerintah Kanada Untuk Pembangunan Internasional
CSP	–	Country Strategy and Program/Strategi dan Program Nasional
DFID	–	Department for International Development of the United Kingdom/Lembaga Bantuan Pemerintah Inggris Untuk Pembangunan Internasional
DPSP	–	Development Policy Support Program/Program Bantuan Pengembangan Kebijakan
DSF	–	Decentralization Support Facility/Fasilitas Pendukung Desentralisasi
GDP	–	Gross Domestic Product/Produksi Domestik Bruto (PDB)
GTZ	–	Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit/Lembaga Jerman untuk Kerjasama Ekonomi
IMT-GT	–	Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle/Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand
IRM	–	Indonesia Resident Mission/Kantor Perwakilan ADB di Indonesia
JBIC	–	Japan Bank for International Cooperation
KPK	–	Komisi Pemberantasan Korupsi
MDG	–	Milennium Development Goal/Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium
MTS	–	Medium-term Strategy/Strategi Jangka Menengah
NGO	–	Non Government Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat
PKPS-BBM	–	Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
PSOD	–	Private Sector Operation Department/Departemen Operasi Sektor Swasta
RPJM	–	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SMEs	–	Small and Medium-sized Enterprises/Badan Usaha Kecil dan Menengah
SOE	–	State-Owned Enterprise/Badan Usaha Milik Negara
TA	–	Technical Assistance/Bantuan Teknis

- UN – United Nations/Perserikatan Bangsa-bangsa
- UNDP – United Nations Development Programme/Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa

**CATATAN**

In this report, "\$" refers to US dollars.

Wakil Presiden Direktur Jendral Direktur	C. Lawrence Greenwood, Jr. Grup Operasi 2 R.M. Nag, Southeast Asia Department (SERD) E. Cua, Country Director, Indonesia Resident Mission (IRM), SERD
Ketua Tim Tim Anggota	B. Frielink, Principal Programs Coordinator, IRM, SERD SERD penasihat dan direktur Direktur-Direktur dari Private Sector Operations Department (PSOD) Team ADB untuk Indonesia, termasuk staff dari SERD, PSOD, dan departemen-departemen lain



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
I. TREN DAN ISU PEMBANGUNAN SAAT INI	3
A. Gambaran Situasi Politik	3
B. Pertumbuhan Ekonomi	4
C. Kemiskinan	6
D. Tata Kelola, Desentralisasi, dan Kapasitas Kelembagaan	6
E. Sektor Swasta	7
F. Kajian Jender	8
G. Masyarakat Sipil	8
H. Lingkungan	9
I. Kerja Sama Regional	10
J. Kendala-Kendala Pembangunan	10
II. STRATEGI PEMBANGUNAN PEMERINTAH	13
A. Tujuan dan Strategi Pembangunan	13
B. Mobilisasi Sumber Daya dan Investasi	14
C. Peran Bantuan Eksternal	14
D. Kajian ADB Mengenai Strategi Pembangunan Pemerintah	15
III. PENGALAMAN PEMBANGUNAN ADB	15
A. Bantuan di Masa Lalu	15
B. Kinerja dan Status Portfolio	17
C. Pelajaran yang Dipetik	18
D. Kesimpulan dan Pelajaran Bagi Strategi dan Program ADB di Indonesia	20
IV. STRATEGI ADB	20
A. Ringkasan Tantangan-Tantangan Utama Pembangunan	20
B. Strategi ADB di Indonesia	20
C. Bidang Kerja Sama Strategis	22
D. Pertimbangan Operasional	22
V. PROGRAM BANTUAN ADB	27
A. Tingkat Bantuan Secara Keseluruhan	27
B. Bantuan ADB Untuk Prioritas Strategis	28
C. Koordinasi Pendanaan Eksternal dan Pengaturan Kemitraan	34
D. Indikasi Kebutuhan Sumber Daya Internal	35
VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI RESIKO DAN KINERJA	35
A. Resiko-Resiko	35
B. Proses dan Rencana Pemantauan	36

## LAMPIRAN

1.	Indikator Negara dan Portfolio Serta Penyaluran Bantuan	44
	Tabel A1.1: Kemajuan Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Milenium	
	Tabel A1.2: Indikator Ekonomi Negara	
	Tabel A1.3: Indikator Kemiskinan dan Sosial Negara	
	Tabel A1.4: Indikator Lingkungan Negara	
	Tabel A1.5: Matriks Koordinasi Pembangunan	
	Tabel A1.6: Indikator Portofolio–Jumlah dan Penilaian Portofolio	
	Tabel A1.7: Indikator Portofolio–Penyerapan dan Transfer Bersih Sumber Daya	
	Tabel A1.8: Indikator Portofolio–Penilaian Evaluasi per Sector	
	Tabel A1.9: Status Pelaksanaan Portofolio	
	Tabel A1.10: Rencana Bantuan untuk Produk Pinjaman, 2006-2009	
	Tabel A1.11: Rencana Bantuan untuk Produk Non Pinjaman, 2006-2009	
2.	Proses Persiapan Strategi dan Program ADB untuk Indonesia	73
3.	Penilaian Kapasitas Manajemen Hasil di Indonesia	79
4.	Penilaian Kemiskinan di Indonesia	83
5.	Operasi Sektor Swasta	195
6.	Plafon Dana Pendamping dan Parameter Pendanaan Lainnya	208
7.	Kertas Kerja Konsep untuk Produk-Produk Pinjaman	209
8.	Kertas Kerja Konsep untuk Produk-Produk Non Pinjaman	259



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada awal tahun 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penurunan angka kemiskinan. Namun kemudian sejak tahun 1997-2000 akibat krisis keuangan Asia, secara tiba-tiba Indonesia mengalami kemunduran ekonomi dan peningkatan kemiskinan. Krisis tersebut telah menyingkap tidak adanya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Sejak terjadinya krisis tersebut, pemerintah fokus pada ekonomi makro dan pengurangan pinjaman yang menyebabkan menurunnya belanja pembangunan. Sementara itu, konsumsi sektor swasta menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kemajuan menuju Millenium Development Goal (MDG) belum merata.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Indonesia tahun 2005-2009 terlihat upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mempercepat pencapaian Millenium Development Goal. Iklim investasi saat ini kurang mendukung investor domestik maupun asing yang menyebabkan Indonesia kehilangan daya saingnya. Tingkat kemiskinan kembali ke situasi sebelum krisis, walaupun akhir-akhir ini terjadi peningkatan. Banyak rumah tangga yang sangat rentan terjerumus kembali ke dalam kemiskinan. Meskipun pemerintah sekarang merupakan pemerintahan koalisi, namun memiliki agenda pembaruan yang kuat di bidang infrastruktur, iklim investasi dan sektor keuangan, serta telah memperkenalkan sistem manajemen anggaran yang baru.

Penilaian oleh Asian Development Bank (ADB) berhasil mengidentifikasi beberapa kendala dalam pembangunan. Program dan strategi untuk negara-negara anggota (*Country strategy and program/CSP*) ADB bertujuan membantu pemerintah Indonesia menangani hambatan-hambatan tersebut. Tidak adanya iklim hukum dan perundang-undangan yang stabil dan konsisten serta meningkatnya pajak dan jumlah peraturan daerah merupakan dua faktor yang menghambat investasi. Pengadaan infrastruktur di Indonesia merupakan yang terendah di kawasan Asia Pasifik. Pasar modal dan lembaga-lembaga keuangan non-perbankan di Indonesia juga relatif kecil. Otonomi Daerah telah menciptakan banyak ketidakpastian dalam hubungan antar tingkat pemerintahan, dan membuat lemahnya kapasitas daerah. Di Indonesia, rendahnya belanja untuk pembangunan dibarengi dengan lemahnya manajemen sektor publik. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, belanja pembangunan ini harus ditingkatkan, disertai dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan percepatan pencapaian MDG.

Dari tahun 1998 hingga 2005, jumlah pinjaman ADB kepada Indonesia turun cukup besar. Setelah 2002, mutu portofolio proyek ADB di Indonesia membaik, dan rasio pencairan pinjaman meningkat menjadi lebih tinggi dari angka rata-rata pinjaman ADB. Masalah-masalah yang ada masih berkisar pada tahap permulaan dan pelaksanaan proyek. Sesuai dengan rekomendasi oleh hasil evaluasi program bantuan, analisis CSP kali ini berfokus pada penyelesaian kendala. Sementara itu, cakupan CSP adalah penyesuaian yang lebih baik antara sumber daya ADB dan Pemerintah Indonesia, dengan lebih menekankan pada sistem. Pada tahun 2005, operasi ADB di Indonesia mengalami perubahan haluan dengan mendukung reformasi kebijakan untuk memfasilitasi transisi dan terus fokus pada manajemen portofolio. Tahun 2005, ADB juga menghidupkan kembali kegiatan bantuan untuk sektor swasta.

Strategi ADB untuk tahun 2006 - 2009 adalah membantu Pemerintah Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi yang berkesinambungan dan berpihak pada kaum miskin. Strategi ADB tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sosial, dengan

fokus pada tata kelola dan tindakan anti korupsi pada semua kegiatan operasional. ADB telah menetapkan lima bidang fokus kerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah utama: perbaikan infrastruktur serta pelayanan infrastruktur, pendalaman sektor keuangan, perbaikan sistem otonomi daerah, percepatan pencapaian MDG, dan penguatan manajemen lingkungan dan sumberdaya alam. ADB telah menyetujui program pinjaman dan nonpinjaman kepada pemerintah berkaitan untuk lima bidang kerja sama tersebut, dengan memfokuskan pada prioritas-prioritas kelompok I dan beberapa prioritas kelompok II dari Strategi Jangka Menengah ADB.

CSP menggunakan pendekatan yang inovatif. ADB akan memberikan pinjaman program menggunakan pendekatan *single-tranche cluster* untuk mendukung agenda reformasi jangka menengah pemerintah Indonesia. Sedangkan pinjaman untuk proyek-proyek investasi akan mempergunakan fasilitas pendanaan yang bersifat *multi-tranche* di beberapa sektor untuk memastikan adanya investasi dan komitmen kebijakan jangka panjang. Bidang kerja sama ini didukung melalui kelompok bantuan teknis untuk menyelaraskan bantuan dengan kebutuhan-kebutuhan yang muncul dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Diharapkan operasional pinjaman untuk sektor swasta juga akan meningkat. Agar rancangan dan pelaksanaan operasi ADB ini sejalan dengan prakarsa inovasi dan efisiensi, interen ADB akan melakukan koordinasi yang erat dan secara aktif melibatkan Risk Management Unit.

Tata kelola dan pembangunan kapasitas merupakan tantangan utama pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan lebih jauh praktek manajemen yang baik. Pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia agar segera dapat memberikan hasil segera. ADB telah memberikan dukungan yang besar untuk pembangunan kapasitas melalui bantuan teknis dan pinjaman, terutama untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Di bawah CSP dukungan tersebut akan terus dilanjutkan. Upaya pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia telah didukung oleh ADB melalui serangkaian bantuan teknis, dan terus akan diarusutamakan ke dalam program dan proyek ADB.

Saat ini pemerintah Indonesia semakin kuat dalam melakukan koordinasi dengan badan-badan eksternal yang berusaha lebih menyelaraskan diri dengan prioritas-prioritas yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Koordinasi antar lembaga donor terasa sangat erat dalam menanggapi keadaan darurat pascatsunami, dengan fokus pada tata kelola pengawasan keuangan dan upaya pemberantasan korupsi. Dalam beberapa tahun belakangan ini, harmonisasi antara lembaga-lembaga donor melalui dialog mengenai kebijakan telah mencapai kemajuan penting. Harmonisasi ini dimulai pada program reformasi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi, infrastruktur dan sektor keuangan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, desentralisasi dan korupsi telah membuat operasi ADB di Indonesia menjadi intensif sum berdaya. Perluasan program pinjaman memerlukan dialog berkelanjutan di negara ini. Saat ini kemampuan staf ADB regional dan di departemen-departemen sektor swasta cukup memadai, namun untuk kantor perwakilan ADB di negara-negara anggota masih memerlukan tambahan. Kebutuhan penambahan sumber daya di kantor perwakilan ini mendesak sehingga perlu dipenuhi segera.

Terdapat beberapa beberapa risiko yang mungkin muncul dalam implementasi CSP yang diusulkan ini. Reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah mungkin akan ditentang oleh mereka yang memiliki kepentingan untuk mendominasi perusahaan-perusahaan milik negara atau oleh mereka yang memiliki kaitan dengan kepentingan sektor swasta yang kuat. Publik dan lembaga perwakilan rakyat perlu memberi pemahaman bahwa manfaat jangka panjang

perubahan memerlukan biaya jangka pendek. Bencana alam dan perubahan lingkungan keamanan dapat menguras energi pemerintah dan menghambat investasi. Kelemahan manajemen sektor swasta yang terus berlanjut dan penundaan klarifikasi mengenai kebijakan desentralisasi, serta kegagalan untuk menyelaraskan berbagai keahlian di dalam ADB, dapat mempengaruhi pelaksanaan program ini.

Kini Indonesia dalam posisi kritis dalam upaya pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan berbagai kerentanan yang ada. Indonesia dapat terus maju apa apabila memilih visi yang jelas, pragmatis, dan memiliki komitmen untuk menjalankan reformasi berkelanjutan. CSP ini dirancang untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menjalankan pilihannya untuk mengatasi berbagai kendala pembangunan secara realistis dan penuh keyakinan. Konsolidasi berbagai prakarsa reformasi pada beberapa tahun belakangan ini dan mulainya pelaksanaan program investasi baru di bidang infrastruktur sosial dan fisik harus memastikan bahwa Indonesia berada pada jalur yang benar untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi sebelum tahun 2009.

## I. TREN DAN ISU PEMBANGUNAN SAAT INI

1. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 221 juta orang dari beragam etnis. Indonesia juga memiliki sejumlah besar sumber daya alam (kayu, ikan, minyak, gas alam, dan berbagai logam) serta keragaman hayati. Pada awal tahun 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penurunan kemiskinan. Namun akibat krisis keuangan yang melanda Asia, sejak tahun 1997 hingga tahun 2000 negara ini tiba-tiba mengalami penurunan angka Produk Domestik Bruto (PDB) dan peningkatan kemiskinan. Sebagai dampak dari krisis keuangan Asia tersebut, istem pengambilan keputusan yang semula terpusat-otoriter dan telah berlangsung lama akhirnya digantikan oleh sebuah sistem pengambilan keputusan yang demokratis dan terdesentralisasi, yang memberi masyarakat untuk berperan lebih besar. Krisis keuangan ini juga telah menyingkap lemahnya koordinasi antar berbagai tingkatan pemerintah dan merajalelanya korupsi. Walaupun setelah krisis pertumbuhan ekonomi mulai pulih dan kemiskinan menurun, namun kemajuan dalam pencapaian Millenium Development Goal (MDG).masih belum merata dan beberapa kabupaten bahkan masih sangat tertinggal (Lampiran 1, Tabel A1.1).

2. Indonesia kini berada di posisi kritis. Indonesia membutuhkan kebijakan-kebijakan yang proaktif untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi, yaitu 17,8%. Kebijakan pembangunan harus dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 7,0% setiap tahunnya guna menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengurangi angka pengangguran yang sekarang mencapai 10,4%. Indonesia juga memerlukan investasi substansial dalam bidang infrastruktur, dengan sektor swasta sebagai mitra potensial yang penting. Reformasi, termasuk perbaikan iklim investasi dan sektor keuangan yang lebih responsif, harus dilanjutkan untuk mendorong partisipasi sektor swasta. Negara ini perlu meningkatkan belanja pembangunannya dan memperkuat kapasitas kelembagaan serta manusia guna mencapai MDG sebelum 2015.

### A. Gambaran Situasi Politik

3. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia telah mengalami pergantian pemerintahan sebanyak 4 kali. Pemerintah sekarang mulai berkuasa pada Oktober 2004 setelah memenangkan pemilihan presiden langsung yang diselenggarakan pertama kali di Indonesia. Sebelumnya, pada tahun yang sama, pemilihan langsung juga diselenggarakan untuk memilih

550 anggota parlemen. Pemerintahan baru ini berbasis koalisi dan oleh karena itu menyebabkan proses pembuatan perundang-undangan kadang-kadang berlarut-larut.

4. Pemerintah telah memulai sebuah program reformasi menyeluruh, termasuk menurunkan secara substansial subsidi bahan bakar di bulan Maret dan Oktober 2005. Pemerintah telah memprakarsai langkah besar pemberantasan korupsi dan meluncurkan reformasi bidang infrastruktur yang dimulai dengan Indonesia Infrastructure Summit pada Januari 2005. Kepercayaan investor mulai meningkat. Meskipun demikian, penciptaan lapangan pekerjaan, menurunnya upah riil dan meningkatnya kasus-kasus kemiskinan baru masih tetap menjadi masalah. Para aktivis dari masa sebelum reformasi di Parlemen dan kepentingan yang kuat dari masa sebelum krisis mungkin akan menghambat laju reformasi.

5. Prakarsa desentralisasi tahun 1999 adalah prakarsa yang benar-benar baru di Indonesia, baik dari segi cakupan maupun skala. Sejumlah otonomi politik memang telah diberikan kepada pemerintah daerah, namun pengalihan ini tidak dilakukan dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah terlebih dahulu. Fungsi berbagai tingkatan pemerintahan masih tidak jelas dan alokasi dana tidak sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut. Masih banyak hal yang perlu dikerjakan dalam bidang ini.

## **B. Pertumbuhan Ekonomi**

6. Konsolidasi fiskal telah membawa sejumlah kemajuan. Pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto (PDB) riil meningkat stabil dari 0,8% pada tahun 1999 menjadi 5,6% pada tahun 2005 (Gambar 1); defisit pembelanjaan keseluruhan menurun dari sekitar 4,0% menjadi 0,5% dari PDB. Pemerintah juga telah mengurangi jumlah tunggakan utangnya yang semula di atas 100% dari PDB menjadi 46,2% dari PDB. Walaupun demikian, angka pertumbuhan yang lebih tinggi ini tidak dapat dijadikan patokan mengingat beberapa faktor seperti masih adanya kendala fiskal, kurangnya investasi, dan turunnya daya saing.

7. Salah satu keprihatinan utama adalah bahwa pemulihan ekonomi bertahap pascakrisis digerakkan terutama oleh konsumsi. Selain itu, pemulihan ekonomi ini berlangsung tanpa adanya peningkatan kembali investasi di sektor swasta maupun pemerintah atau tanpa penciptaan lapangan pekerjaan secara signifikan. Pada tahun 1996, besarnya investasi hampir mencapai 30% GNP, termasuk di dalamnya 7% investasi pemerintah. Sampai dengan tahun 2000, investasi sektor swasta telah turun menjadi 16%. Setelah pada tahun 2003 mencapai tingkat yang sangat rendah yaitu hanya 13%, investasi sektor swasta ini kembali membaik dan diperkirakan pada tahun 2006 akan menjadi sekitar 17%. Namun investasi sektor pemerintah yang pada tahun 2000 turun hingga 4% dari GDP, hingga tahun 2005 tetap sama tanpa peningkatan. Kerugian (*opportunity cost*) karena tidak mendukung pembangunan sangat tinggi. Pembelanjaan pembangunan rendah<sup>3</sup> dan sejak krisis belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan (Gambar 2); pada tahun 2005 angkanya tetap 3 Milyar dolar. Khusus untuk belanja sektor kesehatan di bawah 3% dari total anggaran belanja pemerintah. Sementara itu, belanja untuk sektor pendidikan sebesar 6% dari total anggaran belanja pemerintah (padahal undang-undang mengamanatkan 20%). Sebelum krisis, belanja di sektor infrastruktur mencapai 5% dari PDB (10 milyar dolar per tahun, termasuk 2 milyar dari sektor swasta). Sekarang, pembelanjaan infrastruktur hanya 2% dari GDP, terutama difokuskan untuk pemeliharaan.

---

<sup>3</sup> Belanja pembangunan mencakup investasi dan beberapa belanja rutin (recurrent expenditure) dalam beberapa kategori, dan juga belanja pertahanan. Mulai tahun 2005 diperkenalkan sebuah sistem penganggaran terpadu di tingkat pemerintah pusat (nasional), yang menghapus perbedaan antara belanja pembangunan dan belanja rutin.

8. Belanja pembangunan oleh pemerintah provinsi telah meningkat secara perlahan dari titik awal yang rendah, tetapi tetap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial dan infrastruktur. Sebagai akibatnya, Indonesia tertinggal di belakang negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam hal jumlah siswa yang terdaftar di sekolah menengah pertama, tingkat kematian balita, tingkat kematian ibu, dan akses ke sanitasi yang lebih baik.<sup>4</sup> Masih ada sekitar 20 juta orang yang belum memiliki akses ke air yang telah diolah, 90 juta orang masih belum mendapatkan fasilitas listrik, dan hampir 200 juta orang belum mendapatkan akses langsung ke telekomunikasi atau koneksi ke suatu jaringan telekomunikasi. Kaum miskin sangat menderita akibat kurangnya akses ke pelayanan infrastruktur dasar semacam itu.

9. Karena pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap dua juta angkatan kerja baru yang setiap tahun masuk ke pasar, pengangguran di Indonesia terus meningkat. Angka pengangguran saat ini mencapai 10,4%. Pada masa sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 4%-5% sudah memadai untuk menyerap tenaga kerja baru. Bukti menunjukkan bahwa pada tahun 1998-2004 pertumbuhan antara lain disebabkan naiknya produktivitas buruh. Diperkirakan saat ini diperlukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun untuk dapat menyerap tenaga kerja baru.<sup>5</sup> Pada saat yang sama, kesenjangan antara pertumbuhan upah dengan pertumbuhan produktivitas dalam manufaktur meningkat dari -3.5% sebelum krisis menjadi lebih dari 27,0% selama 2000-2003. Hal ini disebabkan oleh cepatnya kenaikan upah minimum rata-rata.<sup>6</sup>

10. Setelah tahun 2000 daya saing Indonesia menurun tajam karena tidak memadainya infrastruktur, kurangnya keterampilan, buruknya iklim investasi, dan lemahnya sektor keuangan. Pada September 2006, laporan<sup>7</sup> *Doing Business* menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan 135 dari 175 negara yang ramah untuk usaha, padahal pada tahun 2005 Indonesia menempati urutan ke-131. Indonesia tertinggal dari Thailand (urutan 18), Malaysia (25) dan Republik Rakyat Cina (93), Vietnam (104) dan Filipina (126). Secara umum, gambaran mengenai daya saing Indonesia cukup bervariasi.<sup>8</sup>

11. Prakarsa pemerintah baru-baru ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi cukup menjanjikan. Meskipun penghapusan subsidi bahan bakar minyak telah menaikkan inflasi hingga lebih dari 18% pada Oktober 2005 and kemungkinan akan mengakibatkan pertumbuhan yang lebih lambat dalam jangka pendek, penghapusan subsidi tersebut telah berhasil mengurangi sebagian besar distorsi dalam ekonomi. Sebagai hasilnya, diperkirakan pemerintah telah menghasilkan "ruang fiskal" sekitar \$5 milyar pada 2005 dan sekitar \$10 milyar pada 2006. Pemerintah meluncurkan salah satu program bantuan tunai terbesar dengan sasaran 15,5 juta keluarga miskin akan menerima sekitar \$32 per keluarga setiap tiga bulan. Pemerintah juga telah meningkatkan pengeluaran untuk program kesehatan dan pendidikan.

<sup>4</sup> Sebagai contoh, pada tahun 2004 siswa yang terdaftar menengah pertama di Indonesia tetap berkisar 62% sementara di Thailand 77% dan di Viet Nam 74%; kematian balita di Indonesia 38 per 1000 kelahiran sementara di Thailand 21 dan di Viet Nam 23; di Indonesia angka kematian ibu melahirkan 230 per 100 000 kelahiran hidup sementara di Thailand 44 dan di Vietnam 111; dan angka akses ke sanitasi yang baik di Indonesia adalah 52% sementara di Thailand 99%. Sumber: Global Monitoring Report 2006, UNDP.

<sup>5</sup> World Bank. 2006. *Investing for Growth and Recovery*. Jakarta.

<sup>6</sup> 49% pada 2000 24% pada 2001, dan 38% pada 2002. Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah daerah dan berbeda-beda di seluruh Indonesia.

<sup>7</sup> World Bank and International Finance Corporation (IFC). 2006. *Doing Business*. Washington, DC.

<sup>8</sup> World Economic Forum. 2006. *Global Competitiveness Report 2006*. Geneva. Indonesia ada di posisi 50 dari 125 negara pada 2006, dibandingkan dengan posisi 74 pada 2005 dan 69 pada 2004

### C. Kemiskinan

12. Analisis<sup>9</sup> kemiskinan negara yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa angka kemiskinan telah turun menjadi 16,7% pada awal 2005 (lihat Gambar 3). Namun pada Maret 2006, angka itu naik kembali menjadi 17,8% sebagai dampak dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada 2005. Sekitar 39,5 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 50% penduduk hidup dengan pendapatan kurang dari \$2/hari dan sangat rentan terhadap guncangan di semua tataran – pada tingkat mikro atau rumah tangga (seperti anggota keluarga yang sakit), tingkat menengah atau daerah setempat (seperti misalnya bencana alam), dan makro atau nasional (seperti naiknya harga bahan bakar minyak). Kemiskinan antara lain disebabkan oleh kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan, air yang aman, perumahan, dan sanitasi serta tidak adanya kesempatan ekonomi, dibarengi oleh tidak tersedianya infrastruktur di wilayah-wilayah yang terisolasi dengan kondisi geografi yang sulit dan lemahnya keterkaitan dengan pasar. Hampir satu dari lima desa di pedesaan tidak dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat selama beberapa waktu dalam setahun.

### D. Tata Kelola, Desentralisasi, dan Kapasitas Kelembagaan

13. Indonesia belum memiliki pemerintahan dan peradilan yang sepenuhnya tunduk pada hukum. Indonesia juga belum memiliki ekonomi pasar berdasarkan persaingan terbuka.<sup>10</sup> Pegawai negeri di Indonesia tidak bergairah, bergaji rendah dan tidak memiliki keterampilan.<sup>11</sup> Kebanyakan lembaga publik mendapatkan sebagian besar dana untuk menjalankan operasi mereka dari pendapatan yang tidak terdaftar di dalam anggaran. Kepolisian, pengadilan, auditor, badan-badan pemerintah nasional dan daerah, dan bahkan sekolah-sekolah tidak mampu beroperasi hanya dari anggaran resmi saja, sehingga membuat mereka harus mencari sumber pendapatan lain di luar anggaran. Pemerintah tidak mengembangkan dengan baik kapasitas badan pemerintah dalam persiapan proyek, koordinasi persiapan proyek dan pelaksanaan proyek.

14. Manajemen belanja pemerintah sangat mendasar untuk memerangi korupsi. Undang-Undang No. 17 tahun 2005 tentang Keuangan Negara menyatukan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan yang sebelumnya dipisah, dan menggalakkan evaluasi berbasis kinerja terhadap hasil-hasil yang berkaitan dengan anggaran. Undang-undang tersebut juga menetapkan standar baru untuk pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. Demikian pula, Undang-Undang No. 1/2004 tentang Keuangan Negara mengatur pengelolaan anggaran dan perencanaan keuangan, pengelolaan utang dan properti, serta menetapkan satu rekening keuangan tunggal yang terpadu. Undang-undang tersebut juga berisi pasal-pasal yang jelas tentang pencegahan penggelapan, salah pengelolaan, dan korupsi. Dengan demikian sudah ada kerangka hukum yang kuat untuk manajemen anggaran publik yang sesuai dengan praktek internasional yang baik. Meskipun demikian, untuk dapat melaksanakan sepenuhnya masih memerlukan waktu.

15. Sejak 1999, sejumlah undang-undang anti korupsi telah disahkan: Undang-Undang No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

<sup>9</sup> ADB. From Poverty to Prosperity: A Country Poverty Analysis for Indonesia. Forthcoming. Manila. Ringkasan ada di Lampiran 6.

<sup>10</sup> ADB. 2004. Country Governance Assessment, Indonesia. Manila.

<sup>11</sup> "Pemerintah" mencakup pemerintah pusat, propinsi, kota, dan kabupaten.

Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejumlah badan pelengkap negara telah dibentuk dengan mandat untuk memerangi korupsi, antara lain KPK, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan Komisi untuk Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemberantasan korupsi menempati prioritas penting dalam agenda reformasi Pemerintahan dan Presiden. Meskipun sudah ada peraturan perundangan anti korupsi yang lengkap selama beberapa tahun, penegakannya secara serius baru dilaksanakan mulai tahun 2005.

16. Kecepatan dan kerumitan desentralisasi telah menimbulkan kesenjangan besar dan ketidakkonsistenan dalam kerangka kerja kebijakan.<sup>12</sup> Terlebih lagi, sejak reformasi jumlah pemerintah daerah telah meningkat menjadi 33 provinsi dan 450 kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, terdapat 16 fungsi wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, namun pembagian tanggung jawab di antara berbagai tataran pemerintah tidak jelas. Sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum, yaitu pemberian dana yang besarnya ditentukan berdasarkan suatu rumus<sup>13</sup> bukan berdasarkan kebutuhan. Sejumlah pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan melalui mekanisme pembagian pendapatan dari sumber daya alam. Undang-Undang No. 32/2004 berhasil meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Standar akuntansi baru menurut Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara yang segera diperkenalkan akan semakin memperkuat akuntabilitas. Meskipun demikian, semua peraturan tersebut masih membutuhkan waktu lama sebelum memberi hasil yang diinginkan.

17. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pemerintah daerah untuk memberi pelayanan berkualitas dan cepat tanggap, saat ini masih lemah. Meskipun daerah telah mendapatkan otonomi yang lebih besar, mereka mewarisi satu sistem pemerintahan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prioritas setempat. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya sistem pemindahan pegawai negeri antardaerah.

## **E. Sektor Swasta**

18. Pada tahun 1970-an dan 1980-an terjadi aliran modal asing yang besar ke dalam sektor minyak, gas dan mineral meskipun terdapat kewajiban untuk mengikuti kontrak bagi hasil dan regulasi-regulasi yang membatasi lainnya. Liberalisasi sektor perbankan, asuransi dan distribusi ritel menyebabkan naiknya investasi asing langsung di tahun-tahun menuju krisis keuangan 1997/98. Dengan adanya krisis keuangan dan asumsi pemerintah bahwa kebanyakan aset produktif negara merupakan aset yang harus dijual dalam proses restrukturisasi menyeluruh sektor perbankan, sumbangan sektor swasta terhadap PDB diperkirakan turun menjadi 30% pada tahun 2000 dari 75% pada awal 1997. Putaran privatisasi selanjutnya dari tahun 2001 hingga 2004 telah memindahkan aset ke sektor swasta senilai kurang lebih \$39milyar, sehingga proporsi sumbangan sektor swasta ke PDB pulih kembali ke posisi sebelum krisis.

19. Meskipun kehadiran sektor swasta sangat kuat, sektor pemerintah (publik) tetap menjadi salah satu sektor yang terkuat di Indonesia. Pemerintah memiliki lebih dari 130 badan usaha

<sup>12</sup> Tujuh Undang-Undang, 9 peraturan pemerintah, 5 keputusan presiden, dan 22 keputusan menteri yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah di tingkat nasional dan lokal. Ada sekitar 30 peraturan dan keputusan baru yang sedang dipersiapkan di bawah Undang-Undang 32/2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>13</sup> Variable formula mencakup antara lain jumlah penduduk, wilayah geografis, indeks harga bangunan, dan tingkat kemiskinan.

milik negara (BUMN), beberapa di antaranya merupakan sektor yang mendominasi seperti perbankan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, energi, dan minyak dan gas. Meskipun BUMN memiliki ukuran yang besar dan posisi monopoli di sejumlah sektor, keuntungan mereka kurang dari 5% dari keseluruhan pendapatan Pemerintah.<sup>14</sup> Sekitar 55% dari seluruh pendapatan BUMN dan pendapatan bersih pada 2002 terkonsentrasi di lima BUMN papan atas. Dalam banyak sektor, BUMN memperoleh akses khusus ke pasar, sehingga dapat mengalahkan sektor swasta yang menjadi pesaingnya. Dalam beberapa sektor infrastruktur yang penting, BUMN menjalankan peran sebagai operator sekaligus sebagai regulator.

## F. Kajian Jender

20. Kajian<sup>15</sup> jender di Indonesia melalui proses konsultasi yang dilakukan oleh multi-lembaga berhasil mengidentifikasi empat tema pokok: (i) dampak desentralisasi terhadap jender, (ii) tidak memadainya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, (iii) kekerasan terhadap perempuan, dan (iv) perempuan dan migrasi internasional. Kajian tersebut menemukan bahwa meskipun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah mencapai kemajuandalam kesetaraan jender, ketidaksetaraan tersebut masih ada. Kajian tersebut menemukan tidak tersedianya data yang dipilah berdasarkan jender. Meskipun demikian, indeks pembangunan jender pada tahun 2003 adalah 87, sementara indeks pembangunan manusia adalah 110. Di Indonesia, harapan hidup perempuan yang lebih panjang tertutupi oleh rendahnya angka melek huruf dan dan kecilnya pendapatan kerja mereka. Pada tahun 2003, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hanya 40%, sementara partisipasi laki-laki 79 persen.

Rasio pendaftaran sekolah antara anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki pada tingkat pendidikan dasar dan lanjutan menunjukkan angka yang lebih tinggi pada anak-anak perempuan. Meskipun demikian, proporsi perempuan untuk mendapatkan lapangan kerja yang berupah dalam sektor non-pertanian menurun. Demikian pula, proporsi kursi DPR yang diduduki perempuan juga mengalami penurunan. Kesehatan perempuan perlu mendapat perhatian khusus karena Indonesia memiliki rasio kematian ibu melahirkan yang tertinggi di kawasan tersebut. Kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidikan formal mendorong semakin banyaknya perempuan yang bermigrasi ke luar negeri. Migran resmi disertai migran tidak resmi (diperkirakan 60% dari pekerja Indonesia di Malaysia adalah migran tidak resmi). Para pekerja migran tidak resmi ini sangat rentan karena tidak memiliki jaminan kerja, upah minimum atau kondisi kerja yang baik. Peralihan menuju otonomi daerah telah menunjukkan potensi meningkatnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan daerah, namun desentralisasi kadang-kadang disertai dengan bangkitnya tafsir agama yang konservatif terhadap peran jender.

## G. Masyarakat Sipil

21. Selama 6 tahun terakhir, jumlah organisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah meningkat. OMS sering berperan sebagai fasilitator, pendidik, dan penyelenggara dalam program-program seperti itu dan juga terlibat sebagai peserta perencanaan yang terdesentralisasi dan sebagai penyedia jasa dalam sejumlah sektor. OMS

<sup>14</sup> Pendapatan diartikan sebagai keuntungan bersih BUMN yang diberikan kepada departemen. Kemampuan BUMN untuk menghasilkan keuntungan dikacaukan oleh adanya aktivitas non-komersial yang sering harus mereka lakukan.

<sup>15</sup> ADB. 2006. *Country Gender Assessment: Indonesia*, Asia Foundation, ADB, Canada International Development Agency, National Democratic Institute, and World Bank. Manila.

sering memberi pelayanan social. Mereka juga memberi masukan kepada pemerintah mengenai bagaimana agar pelayanan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Para OMS (termasuk serikat pekerja, organisasi keagamaan, yayasan, dan institusi) telah mendorong kesadaran publik tentang hak-hak perempuan, penduduk asli, hak-hak pekerja, dan perlindungan lingkungan. OMS juga mendorong standar yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya anggaran secara jujur dan bertanggung jawab dalam sektor publik dengan cara mengidentifikasi, mendokumentasikan dan mengejar kasus-kasus dugaan korupsi, dan dengan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif yang diakibatkan oleh praktek korupsi. Dalam sejumlah proyek, LSM telah membantu ADB dalam rancangan dan pelaksanaan proyek. Mereka juga dimintai pendapatnya Strategi dan Program Negara (CSP),<sup>16</sup> dan selama misi-misi program sebelumnya.

## H. Lingkungan

22. Kekayaan lingkungan dan sumber daya alam telah menjadi aset yang penting bagi Indonesia. Namun demikian, tekanan terhadap sumber daya tersebut telah merusak kebanyakan sistem alami. Penggundulan hutan dan pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Tidak ada kejelasan mengenai tanggung jawab di berbagai tataran pemerintahan, penguasaan dan akses terkait dengan hak-hak komunitas dan peran perusahaan swasta, serta penegakan hukum. Saat ini sumber daya pantai mendapat tekanan yang besar karena terbukanya akses ke sumber daya tersebut dan tidak adanya kerangka kerja terpadu untuk perlindungan sumber daya pantai. Pengelolaan sumber daya air penting untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Pengelolaan tersebut terhambat oleh lemahnya kelembagaan dalam pengelolaan aliran sungai, lemahnya tindakan pengendalian polusi air, tidak adanya kerangka kerja untuk alokasi dan penetapan harga air, dan masalah-masalah dalam pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur air, termasuk fasilitas pasokan air dan irigasi. Sejumlah daerah menghadapi risiko banjir dan rendahnya kualitas air.

23. Industrialisasi dan penambahan penduduk telah memperburuk polusi lingkungan, khususnya di wilayah perkotaan dan pinggiran kota. Polusi air permukaan, pencemaran dan berkurangnya air tanah, polusi udara, serta pembuangan limbah padat dan berbahaya secara tidak tepat dan ilegal oleh penduduk maupun industri, kini sudah menjadi permasalahan lingkungan yang sangat serius. Sejumlah pencemar udara di kota-kota besar telah melewati batas standar mutu udara yang aman. Limbah industri yang diperkirakan berjumlah 0,25 juta ton pada 1990, telah mencapai 1,2 juta ton pada 2001. Sekitar 80% dari limbah tersebut merupakan limbah berbahaya. Penegakan undang-undang dan peraturan lingkungan masih lemah. Selain itu, investasi untuk saluran pembuangan dan pengolahan air di perkotaan juga tidak memadai.

24. Selama dua dekade terakhir, kerangka hukum lingkungan di Indonesia berkembang dan secara umum telah memenuhi standar internasional.<sup>17</sup> Namun demikian, sejumlah undang-undang dan regulasi masih perlu disesuaikan dengan situasi kebijakan desentralisasi, di mana tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam ada di tangan pemerintah kabupaten.

---

<sup>16</sup> Lihat Lampiran 2 tentang deskripsi proses CSP.

<sup>17</sup> ADB. 2005. *Country Environment Assessment Indonesia*. Manila.

## I. Kerja Sama Regional

25. Indonesia adalah anggota pendiri Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan juga dua prakarsa kerja sama subregional lainnya, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA); dan Indonesia, Malaysia, Thailand-

Growth Triangle (IMT-GT).<sup>18</sup> Komitmen ASEAN terhadap dan untuk mewujudkan satu pasar tunggal di Asia Tenggara merupakan potensi nyata bagi sektor swasta Indonesia untuk mengamankan skala ekonomi (*economies of scale*) dari sebuah pasar dengan penduduk lebih dari 500 juta. Di tingkat sub-regional, Indonesia dan tetangga-tetangganya memiliki geografi kepulauan yang sama. Hampir semua pulau-pulau besar di Indonesia, kecuali Jawa, tercakup dalam program kerja sama sub-regional untuk BIMP-EAGA dan IMT-GT. Indonesia akan memperoleh manfaat yang besar dengan memperkuat kapasitas kerja sama regionalnya yang, mengingat sebaran geografis dan kepulauannya, akan secara bersamaan meningkatkan integrasi nasional.<sup>19</sup> BIMP-EAGA dan IMT-GT, yang didirikan di awal tahun 1990-an, mengupayakan pembangunan sosial dan ekonomi untuk wilayah-wilayah yang kurang berkembang dan lebih terpencil melalui kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata. Menyusul pemulihan ekonomi dari krisis 1997, para pemerintah di kawasan tersebut, termasuk Indonesia, telah menegaskan kembali pentingnya dan komitmen mereka terhadap dua prakarsa tersebut. Mereka berupaya untuk merevitalisasi dan memfokuskan kembali pada dua prakarsa tersebut. Sebagai mitra utama pembangunan, ADB memfasilitasi proses ini dengan membantu dua prakarsa tersebut untuk meningkatkan pelaksanaan yang berorientasi hasil sesuai dengan peta jalan masing-masing.

## J. Kendala Pembangunan

26. Sasaran Pemerintah adalah mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mempercepat pencapaian Millineum Development Goal (MDGs). Krisis telah membangkitkan kesadaran mengenai risiko yang berkaitan dengan agenda pembangunan yang berorientasi pertumbuhan tanpa sektor keuangan yang kuat. Kendala kemajuan ekonomi makro telah dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Namun demikian, kapasitas Pemerintah untuk mengelola risiko dan melakukan investasi dipertanyakan. Saat ini Pemerintah perlu untuk mengarahkan proses pembangunan yang dipimpin oleh sektor swasta yang lebih otonom. Pemisahan yang lebih besar antara kebijakan pemerintah dan kepentingan swasta antara lain mencakup pembentukan struktur hukum dan peraturan yang baru dan secara langsung menangani isu-isu tata kelola dalam sektor publik dan swasta. Desentralisasi telah menguji kapasitas untuk mengelola fungsi-fungsi di tingkat lokal, dan untuk memantau dan mengelola proses-proses yang terdesentralisasi di pusat. Kendala utama dalam pembangunan akan dibahas berikut ini.

27. **Iklm Investasi yang Tidak Menguntungkan.** Meskipun pasar Indonesia telah terbuka bagi investasi asing selama bertahun-tahun, dan tarif bea masuk perdagangan merupakan yang paling rendah di kawasan ini,<sup>20</sup> negara ini tidak menarik untuk investasi. Sumber kekhawatiran

<sup>18</sup> Anggota BIMP-EAGA adalah lain Brunei Darussalam; Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya dari Indonesia; Sabah, Sarawak, dan Labuan di Malaysia; dan Mindanao dan Palawan di Filipina. IMT-GT terdiri dari delapan propinsi masing-masing di Thailand Bagian selatan dan Semenanjung, dan semua propinsi di Sumatra di Indonesia.

<sup>19</sup> Bantuan teknis oleh ADB membantu untuk membangun kapasitas Sekretariat Nasional untuk Kerjasama Regional di Indonesia (*National Secretariat for Subregional Cooperation in Indonesia*) (INO TA 4555).

<sup>20</sup> Tarif rata-rata adalah 7%

para investor domestik maupun asing adalah tidak adanya kerangka hukum, peraturan dan fiskal yang stabil dan koheren; sangat banyaknya peraturan dan pajak; dominasi BUMN di sejumlah sektor kunci; korupsi sistematis; dan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Kelemahan-kelemahan tersebut ditambah dengan tidak memadainya infrastruktur fisik dan pelayanan infrastruktur serta belum berkembangnya pasar keuangan.

.28. **Infrastruktur Fisik yang Buruk.** Indonesia memiliki beberapa wilayah yang akses ke listrik dan telepon yang terendah di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki tingkat akses terhadap air olahan dan sanitasi yang rendah. Sementara itu Indonesia juga menghadapi masalah berupa semakin padatnya jaringan jalan nasional dan provinsi. Pada dasawarsa sebelum krisis tingkat investasi swasta dan publik dalam infrastruktur memang meningkat. Namun setelah krisis melanda Indonesia, investasi pada infrastruktur menurun tajam. Diperlukan sekitar \$65milyar investasi baru untuk meningkatkan angka pertumbuhan dari 5,5% menjadi 7,6% selama 2005-2009.<sup>21</sup> Pemerintah mungkin bisa berkontribusi S25 milyar atau sekitar 39%. Untuk menutupi kekurangan pendanaan tersebut Pemerintah perlu mengembalikan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian pemerintah perlu melakukan restrukturisasi mendasar dalam sektor-sektor tersebut. Pemerintah terutama berperan sebagai regulator dan fasilitator, untuk merencanakan dan melaksanakan pembaruan kelembagaan dan kebijakan, untuk mengelola peraturan dan risiko lain yang menghambat investasi swasta dan untuk meningkatkan koordinasi antar departemen.

29. **Sektor Keuangan Belum Berkembang.** Setelah krisis, Pemerintah menutup banyak bank, mengurangi jumlahnya dari lebih dari 240 menjadi 135. Dengan tindakan ini, sektor perbankan membaik; pinjaman macet berkurang, rasio kecukupan modal lebih tinggi, dan bank-bank menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, bank-bank masih mendominasi sektor keuangan dengan menyumbangkan aset keuangan sebesar 80%. Sektor ini sangat terkonsentrasi, dengan tiga bank komersial milik negara terbesar mengendalikan lebih dari separuh aset sistem perbankan. Pemerintah telah memfokuskan pada kerangka hukum dan peraturan untuk bank maupun lembaga keuangan non bank dan pengembangan pasar modal. Namun demikian untuk ukuran negara seperti Indonesia, lembaga-lembaga keuangan non bank yang ada termasuk kecil.

30. **Kapasitas Desentralisasi yang Tidak Memadai.** Kelemahan utama desentralisasi terletak dalam kapasitas pemerintahan daerah, teknis, dan manajerial. Besarnya wewenang yang diberikan kepada pemerintah kabupaten melalui berbagai undang-undang telah membuat bagian pemerintah daerah dari anggaran belanja pemerintah meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 17% pada 2000 menjadi lebih dari 30% pada 2003. Sekitar 2 juta pegawai negeri dipindahkan dari pusat badan-badan pemerintah pusat ke daerah. Cepatnya serta rumitnya desentralisasi telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakkonsistenan dalam kerangka kebijakan. Undang-undang baru tidak memecahkan semua masalah yang berkaitan dengan pembagian wewenang, yang banyak di antaranya saat ini diserahkan pada peraturan pendukung yang saat ini sedang disusun. Undang-undang sektor memberi banyak wewenang pada tingkat kementerian terkait, padahal pelayanan dasar diberikan pada tingkat pemerintahan daerah. Berdasarkan standar daerah, secara umum jumlah staf pelayanan masyarakat sudah memadai, tetapi tingkat keterampilan mereka belum mencukupi. Situasi ini diperburuk oleh meningkatnya jumlah kabupaten secara tajam dari 230 di tahun pada tahun 2000 menjadi 450 saat ini.

---

<sup>21</sup> Government of Indonesia. 2006. *Infrastructure Reform Package*. Jakarta. Investasi mencakup tenaga listrik, jalan, telekomunikasi, air dan sanitasi, modernisasi pelabuhan laut dan udara, dan tidak termasuk irigasi.

31. **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lemah.** Sumber daya alam di Indonesia banyak yang menghadapi risiko atau berada dalam tekanan. Pengelolaan yang tidak memadai dan pemanfaatan yang berlebihan telah memicu terkurasnya sumber daya dan kerusakan lingkungan. Karena pemanfaatan sumber daya alam merupakan sumber utama pendapatan daerah (Undang-Undang No. 32/2004 dan 33/2004), pemanfaatan berlebihan yang picik dan cepat dapat menghalangi pengelolaan berkelanjutan jangka panjang. Pengelolaan berkelanjutan jangka panjang juga terhambat dengan adanya insentif yang bertentangan dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan dengan tidak memadainya penegakan hukum dan peraturan yang ada.

32. **Belanja Pembangunan yang Rendah.** Rendahnya belanja pembangunan sejak krisis keuangan disebabkan karena Pemerintah fokus pada kebijakan fiskal untuk mempertahankan stabilitas ekonomi makro. Belanja pembangunan oleh pemerintah daerah<sup>22</sup> hampir tidak ada. Posisi kebijakan seperti ini telah berhasil mengurangi stok hutang pemerintah (menjadi 45% dari PDB pada akhir 2005) dan menciptakan defisit anggaran berkelanjutan (0,5% dari PDB pada 2005). Pemerintah memiliki sasaran untuk memiliki anggaran yang seimbang pada 2009. Namun kebijakan semacam itu dapat menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi. Menurut proyeksi Bank Dunia<sup>23</sup> mengenai turunnya defisit anggaran, semakin turun jumlah hutang dan semakin turunnya subsidi bahan bakar minyak secara bertahap berdampak pada naiknya belanja pembangunan hingga menjadi 5-6% dari PDB, tidak termasuk untuk pertahanan, pada tahun 2009. Departemen Keuangan sedang mempersiapkan amandemen terhadap keputusan-keputusan terkait untuk menetapkan syarat-syarat pinjaman dan prosedur intermediasi pinjaman luar negeri oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

33. **Pengelolaan Sektor Publik yang Lemah.** Terlalu banyaknya regulasi di Indonesia menyebabkan rendahnya mutu regulai tersebut, yang menyuburkan korupsi, membebani warga negara, mendistorsi pasar, dan meningkatkan biaya. Terdapat sebuah undang-undang baru<sup>24</sup> yang mengatur tata cara penyusunan perundangan. Namun undang-undang tersebut terlalu fokus pada proses administrasi dan hukum dan tidak cukup untuk memastikan adanya konsistensi yang memadai antar undang-undang. Kurangnya konsultasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan di dalam maupun di luar pemerintah, termasuk asosiasi bisnis dan LSM, menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penegakan sehingga mengurangi kepatuhan. Rendahnya pendaan dari anggaran untuk lembaga-lembaga negara, merupakan penyebab buruknya kinerja lembaga negara dan korupsi. Banyak instansi pemerintah yang harus membuat pengeluaran lebih besar dibanding anggaran. Kebanyakan dari mereka mendanai sebagian besar operasionalnya dari pendapatan yang tidak terdaftar dalam anggaran. Di luar sumber daya keuangan, sejumlah kajian mengenai kapasitas (termasuk sampel yang diambil untuk Sustainable Capacity Building yang Didanai ADB),<sup>25</sup> dan sebuah studi oleh *German Agency for Technical Cooperation* (GTZ) dan *United States Agency for International Development* (USAID)<sup>26</sup> menunjukkan pemerintah masih membutuhkan sumber daya manusia

<sup>22</sup> Mulai tahun keuangan 2003, pemerintah lokal diminta untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 29. Format baru sangat berbeda dengan format lama, khususnya untuk klasifikasi pengeluaran. Tidak dipakainya format lama ini membatasi perbandingan antara data tahun 2003 dengan data sebelumnya.

<sup>23</sup> World Bank. 2005. *Economic and Social Update*. Jakarta.

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 29/2005 mengenai Tata Cara Penyusunan Perancangan Undang-Undang Baru.

<sup>25</sup> ADB. 2002. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan and Technical Assistance Grants to the Republic of Indonesia for the Sustainable Capacity Building for Decentralization Project*. Manila (Loan 1964-INO, disetujui pada 10 Desember untuk sejumlah \$42,22 juta).

<sup>26</sup> GTZ and USAID. 2000. *Development of National Capacity Building Framework under Decentralization*. Jakarta.

yang cukup banyak termasuk untuk perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

## II. STRATEGI PEMBANGUNAN PEMERINTAH

### A. Tujuan dan Strategi Pembangunan

34. Pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM)<sup>27</sup> untuk tahun 2005-2009. RJPM tersebut fokus pada pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan angka pertumbuhan yang tinggi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pelertarian lingkungan, serta aktivitas dan investasi untuk mencapai MDGs. Pemerintah telah mengidentifikasi lima bidang prioritas untuk mencapai tujuannya: (i) program penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan; (ii) stabilitas ekonomi makro melalui stabilitas harga, keberlanjutan fiskal dan pembaruan sektor keuangan; (iii) percepatan investasi, ekspor dan pariwisata melalui pembaruan iklim usaha yang sehat dan pasar yang fleksibel; (iv) peningkatan mutu dan akses ke pendidikan dan kesehatan; dan (v) pembangunan infrastuktur dengan memperbaiki efisiensi pelayanan yang sudah ada dan partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta. Strategi pengentasan kemiskinan semakin terlokalisir. Pemerintah daerah didorong untuk membentuk komite pengentasan kemiskinan dan mengembangkan strategi mereka. Baru-baru ini, Pemerintah mengumumkan bahwa program pembangunan berbasis komunitas<sup>28</sup> dan program bantuan tunai bersyarat<sup>29</sup> akan menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan.

35. Sasaran RPJM adalah mengurangi hingga separuh dari persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2% pada 2009 melalui program perbaikan ketahanan pangan, penyediaan air dan sanitasi, akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan tempat tinggal. Sasaran ekonomi makro hingga 2009 antara lain adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 5,5% menjadi 7,6% dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,7% pada 2004 menjadi 5,1%. RJPM memproyeksikan pada tahun 2009 akan tercapai pendidikan yang lebih baik dan peningkatan tingkat pendaftaran sekolah, khususnya pada pendidikan dasar wajib 9 tahun, hingga lebih dari 99%. Rencana tersebut juga memproyeksikan kenaikan yang besar dalam pendaftaran di pendidikan lanjutan atau perguruan tinggi dan berkurangnya tingkat buta huruf menjadi 5%. Rencana tersebut mempunyai sasaran naiknya usia harapan hidup dari 66,2 menjadi 70,6 tahun, turunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, turunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 untuk setiap 100.000 kelahiran hidup dan turunnya kekurangan gizi pada anak di bawah lima tahun dari 26% menjadi 20%.

36. Pemerintah bertujuan mengurangi hutang hingga menjadi 31,8% dari PDB pada 2009 dengan mempertahankan posisi fiskal yang konservatif. Pada akhir 2005, hutang luar negeri pemerintah adalah \$65,6 milyar, sementara gabungan hutang dalam negeri dan luar negeri adalah 47% dari PDB. Kebutuhan dana untuk membayar hutang selama 2004-2005 rata-rata sebesar 25% dari anggaran keseluruhan. Dari 144 proyek-proyek yang sedang dijalankan yang

<sup>27</sup> Peraturan Presiden No. 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah yang dikeluarkan pada 19 Januari 2005.

<sup>28</sup> Pendekatan ini memberikan kendali terhadap keputusan perencanaan dan sumber daya investasi untuk proyek-proyek pembangunan lokal untuk kelompok komunitas.

<sup>29</sup> Satu bentuk perlindungan sosial dengan sasaran tertentu yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan saat ini dan masa mendatang dengan memberikan manfaat tunai kepada keluarga miskin, tergantung pada investasi mereka pada aset manusia, misalnya dengan mengirimkan anak-anak ke sekolah atau membawa mereka ke pemeriksaan kesehatan.

didanai dari pinjaman memiliki jumlah yang belum dicairkan sebesar \$8,3 milyar. Pemerintah telah memulai program pembatalan pinjaman,<sup>30</sup> pengalihan hutang dalam kasus pinjaman bilateral, dan lebih berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman untuk proyek-proyek baru.

37. Mencapai tata kelola yang baik merupakan elemen kunci dalam visi Pemerintah dan rencana jangka menengah. Pemerintah baru-baru ini mulai menyusun rencana untuk mereformasi dan memperkuat kepegawaian negara. Program reformasi yang menyeluruh sudah dimulai di berbagai lembaga seperti kantor pajak, imigrasi, dan bea cukai. Restrukturisasi dalam Departemen Keuangan baru-baru ini telah menghasilkan terbentuknya Badan Kebijakan Fiskal dan Kantor Pengelolaan Hutang untuk terus memperkuat manajemen keuangan pemerintah, audit publik dan manajemen keuangan pemerintah daerah.

## **B. Mobilisasi Sumber Daya dan Investasi**

38. Sumber daya terhambat oleh tingginya kebutuhan pembayaran hutang dan subsidi yang tidak produktif. Namun demikian, dengan sasaran memiliki anggaran berimbang pada 2009, ada potensi tersedianya sumber daya untuk meningkatkan belanja pembangunan. Dengan mengurangi subsidi bahan bakar minyak pada 2005, Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan sumber dayanya. Sebuah program kompensasi telah menggunakan sumber daya yang khusus dialokasikan untuk mempercepat pencapaian MDGs. Meskipun demikian, belanja belum meningkat, antara lain karena langkah-langkah anti korupsi. Badan-badan pemerintah dan pemerintah daerah menginvestasikan dana Pemerintah dalam instrumen-instrumen keuangan jangka pendek daripada untuk pertumbuhan dan percepatan pencapaian MDG. Pemerintah daerah tetap tergantung pada transfer fiskal dari Pemerintah pusat, yang telah meningkat dari Rp. 33,5 trilyun (\$3,98 milyar) pada 2000 menjadi Rp. 129,7 trilyun (\$13,2 milyar) pada 2004.

## **C. Peran Bantuan Eksternal**

39. Sejak tahun 2000, Pemerintah telah mengurangi pinjaman luar negerinya dan akibatnya terjadi penurunan pada tingkat bantuan luar.<sup>31</sup> Janji-janji resmi pinjaman dalam Consultative Group for Indonesia<sup>32</sup> telah turun dari lebih dari \$7,0 milyar pada 1998 menjadi sekitar \$3,5 milyar pada 2006. Pengalihan kewajiban pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin menghambat upaya mendapatkan pinjaman karena Pemerintah telah beroperasi tanpa mekanisme yang efektif untuk menyalurkan dana pembangunan resmi ke pemerintah-pemerintah daerah. Pinjaman dari Bank Dunia dan ADB untuk mendukung pembaruan kebijakan mempunyai nilai yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran Pemerintah. Baru-baru ini, bantuan luar telah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan tematik, pemerintah daerah dan komunitas, serta aktivitas-aktivitas tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana berskala besar. Sebagai bagian dari agenda Paris untuk menyelaraskan dan menyesuaikan bantuan luar negeri, Pemerintah telah menyederhanakan prosedur bantuan asing. Melalui dialog kebijakan, badan-badan asing juga semakin menyelaraskan diri dengan tema-tema prioritas dalam kebijakan Pemerintah.

<sup>30</sup> ADB membatalkan pinjaman proyek sebesar \$450 juta dan \$50 juta pinjaman untuk program selama 2003–2005.

<sup>31</sup> Pendanaan hibah untuk bantuan pembangunan resmi mencapai kurang dari 5% dari jumlah keseluruhan.

<sup>32</sup> Consultative Group for Indonesia ke 15 diselenggarakan pada 14 Juni 2006.

#### **D. Kajian ADB Mengenai Strategi Pembangunan Pemerintah**

40. RPJM merupakan dokumen menyeluruh yang menganalisis masalah dan menawarkan solusi. Kendala pembangunan dinyatakan dengan jelas. RPJM memiliki sasaran ekonomi makro, kemiskinan dan sektoral yang ambisius. Banyak dari sasaran tersebut dapat dicapai apabila kendala utama berupa tata kelola yang lemah, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan kapasitas yang lemah diatasi dengan baik. Karena memahami bahwa pembaruan ekonomi makro dan sektor sangat vital untuk menarik investasi sektor swasta yang lebih besar, Pemerintah telah menyampaikan agenda pembaruan jangka pendek dan jangka menengah dalam iklim investasi, infrastruktur, dan sektor keuangan. Program pembaruan perlu memperjelas tugas dan fungsi berbagai lembaga pemerintah yang tak terhitung banyaknya yang saat ini tumpang tindih. Tujuannya adalah agar pemerintah bisa lebih akuntabel dan lebih tanggap pada program-program sektor swasta. Pelaksanaan program seperti itu akan makan waktu. Lampiran 3 menyampaikan kajian mengenai kapasitas manajemen Pemerintah untuk mendapatkan hasil.

### **III. PENGALAMAN PEMBANGUNAN ADB**

#### **A. Bantuan di Masa Lalu**

41. Indonesia tetap menjadi salah satu penerima pinjaman dan bantuan teknis terbesar dari ADB. Dari sekitar \$5 milyar pada tahun 1980-an, komitmen pinjaman pemerintah terhadap Indonesia naik menjadi \$11 milyar pada 1990-an. Menyusul krisis, pinjaman kepada Indonesia secara bertahap turun. Selama 1998-2005, 43 pinjaman telah disetujui dengan total \$6,2 milyar, dengan rincian 11 (26%) pinjaman program berjumlah \$3,73 milyar, dan 32 (74%) pinjaman proyek sejumlah \$2,48 milyar untuk 27 proyek. Pada tahun 2005 terjadi perubahan besar, di mana persetujuan pinjaman sektor pemerintah mencapai \$798 juta dari sebelumnya \$225 juta pada 2004. Pada tahun 1998 sampai 2005, operasi pemberian pinjaman mencatat kenaikan pinjaman program untuk mendukung reformasi kebijakan; proyek-proyek yang lebih terdesentralisasi; dan penyediaan akses yang terbatas pada sumber daya Asian Development Fund (ADF) untuk membantu proyek-proyek pembangunan manusia, termasuk pengembangan kapasitas (Tabel 1). Pendanaan pendamping sebesar \$273 juta digerakkan dari Kanada, Jepang, Belanda, dan Inggris.

42. Indonesia juga merupakan salah satu penerima bantuan teknis terbesar. Sejak tahun 1990 hingga 2005, ADB menyetujui \$127 juta untuk 122 proyek-proyek bantuan teknis penasihan (advisory) dan \$76 juta untuk 135 bantuan teknis proyek persiapan proyek. Menyusul krisis keuangan, pelaksanaan bantuan teknis semakin fokus untuk mendukung agenda pembaruan Pemerintah. Sejumlah proyek bantuan teknis yang didanai dari Japan Fund for Poverty Reduction juga telah diberikan, termasuk lima proyek untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat terkait dengan tsunami. Dari 2000 hingga 2006, operasi bantuan teknis telah menerima pendanaan pendamping sebesar \$25 juta dari Australia, Kanada, Denmark, Komisi Eropa, Perancis, Belanda dan Inggris.

43. Operasi sektor swasta ADB di Indonesia dimulai tahun 1985 dengan kredit \$1 juta dan \$0,4 juta pinjaman investasi kepada Bank Pembangunan Indonesia. Setelah itu, ADB menyetujui pinjaman hingga berjumlah \$169 juta. Selanjutnya, terjadi krisis keuangan yang mengakibatkan mandegnya operasi sektor swasta ADB di Indonesia. Pada akhir 2004, jumlah

tunggakan utama dalam portofolio sektor swasta mencapai \$17,4 juta.<sup>33</sup> Pada Desember 2005, \$350 juta pinjaman sektor swasta, yang merupakan pinjaman terbesar dari ADB hingga saat ini, disetujui untuk membantu mengembangkan proyek gas alam cair Tangguh di Irian Jaya Barat.<sup>34</sup> Pada 2006, disetujui operasi lebih lanjut untuk sekritisasi kendaraan bermotor dan satu jalur pipa gas.<sup>35</sup> Kinerja makro ekonomi akhir-akhir ini dan komitmen terhadap reformasi kebijakan memberikan jaminan bagi perluasan operasi sektor swasta.

**Tabel 1: Komitmen Pinjaman Sektor Publik menurut Sektor, 1998-2005  
(\$ juta)**

Sektor	ADF	OCR	Total
Pertanian dan Sumber Daya Alam	208	158	366
Pendidikan	100	180	280
Energi	0	321	321
Kuangan	0	97	97
Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Gizi	100	465	565
Industri dan Perdagangan	20	153	173
Hukum, Pengelolaan Ekonomi, dan Kebijakan Publik	55	3.730	3.785
Transportasi dan Komunikasi	0	343	343
Pasokan Air, Sanitasi, dan Pengelolaan Limbah	31	34	65
Multi sektor	92	120	212
<b>Total</b>	<b>606</b>	<b>5.601</b>	<b>6.027</b>

Sumber: Asian Development Bank

44. ADB memiliki catatan prestasi yang baik dalam mendukung tata kelola yang baik. Selama 5 tahun terakhir ADB telah memberikan bantuan untuk mendukung program pemberantasan korupsi, termasuk pembaruan dalam praktek pengadaan. Sejumlah aktivitas yang didanai pinjaman yang sedang berjalan memiliki fokus anti korupsi dan peningkatan kapasitas. Peta Jalan Tata Kelola dan Anti Korupsi di Lampiran 4 memberikan rinciannya. Secara umum, pinjaman program yang sedang dipersiapkan memiliki dimensi tata kelola dan anti korupsi yang besar. ADB juga aktif mendukung Partnership for Governance Reform.

45. Sustainable Capacity Building for Decentralization merupakan program yang sedang berjalan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. State Audit Reform Project memperkuat fungsi audit internal semua pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten terpilih. Local Government Finance dan Governance Reform Project mendukung peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah di paling tidak 50 kabupaten. Pinjaman lain yang sedang berjalan memiliki komponen peningkatan kapasitas atau disertai bantuan teknis peningkatan kapasitas.

<sup>33</sup> Kebanyakan adalah pinjaman macet untuk perusahaan manufaktur. Para peminjam yang menunggak telah menunjukkan kesepakatannya untuk membayar hutang, meskipun dengan diskon yang besar.

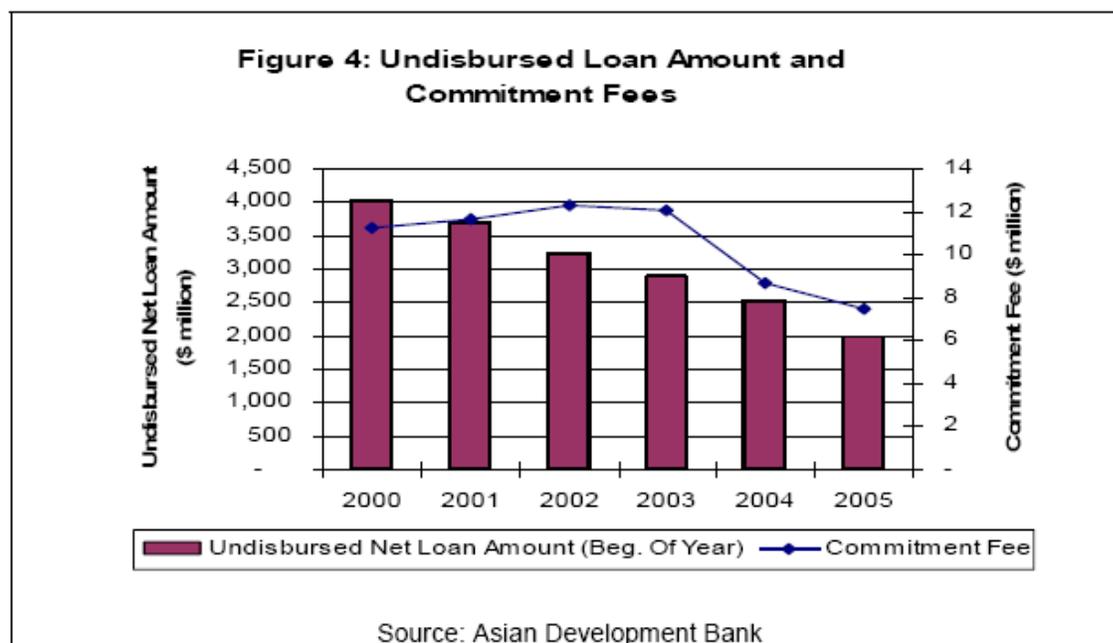
<sup>34</sup> ADB. 2005. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Proposed Loan to the Republic of Indonesia for the Tangguh Liquefied Natural Project*. Manila (disetujui pada 14 Desember 2005, untuk sejumlah \$350 juta). Dari pendanaan ADB, sejumlah \$2,9 milyar berbentuk pinjaman dari sumber lain.

<sup>35</sup> ADB. 2006. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors for Financing and Partial Credit Guarantee Acquisition and Securitization of Motor Loan Portfolios by Deutsche Bank AG*. Manila (Loan 7239-INO, disetujui pada 26 Juli 2006 sejumlah \$10 juta); ADB. 2006. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Private Sector Loan to PT Perusahaan Gas Negara (PGN) for the South Sumatra to West Java Phase II Gas Pipeline Project*. Manila (disetujui pada 10 Agustus 2006 sebesar \$75 juta). Pendanaan ADB mendapatkan \$125 juta dalam bentuk pinjaman dari sumber lain.

46. Indonesia rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, akhir-akhir ini operasi pelaksanaan tanggap darurat telah meningkat. Menyusul tsunami dan gempa bumi yang melanda Aceh dan Nias pada akhir tahun 2004, ADB menyetujui hibah bantuan sebesar \$300 juta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.<sup>36</sup> Menyusul gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006, ADB telah menawarkan bantuan sejumlah \$10 juta dalam bentuk hibah untuk rekonstruksi.<sup>37</sup> Mengingat Pemerintah lebih menyukai dana dalam bentuk hibah untuk merespons bencana alam, penggunaan dana pinjaman yang diprogram kembali untuk Aceh dan Nias selama ini lambat.

## B. Kinerja dan Status Portofolio

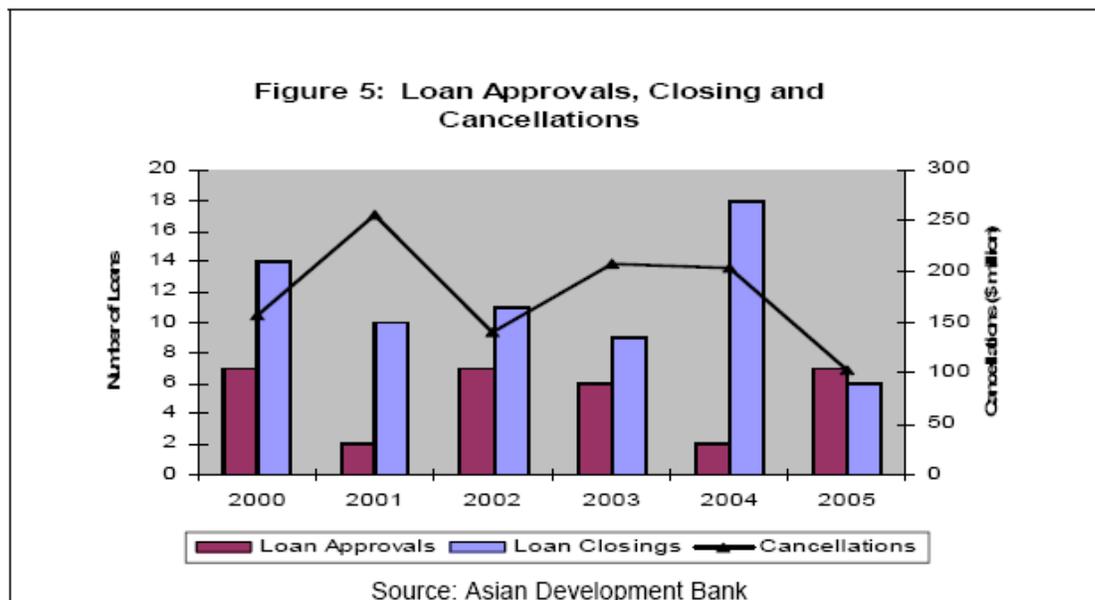
47. Upaya terus menerus dari Pemerintah dan ADB telah membantu memperbaiki portofolio yang ada saat ini dan mengurangi dana yang tidak tersalurkan (Gambar 4). Jumlah bersih pinjaman yang belum tersalurkan turun dari sekitar \$4,0 milyar pada awal 2000 menjadi di bawah \$1,7 milyar pada awal 2006, yaitu 40% dari pinjaman yang dialurakan pada tahun 2000. Oleh karena itu, biaya komitmen juga turun, dari \$11 juta-\$12 juta per tahun selama 2000-2003 hingga di bawah \$8 juta pada 2005. Selama 2000-2005, 68 pinjaman ditutup sedangkan 31 pinjaman baru disetujui (Gambar 5). Pembatalan pinjaman tahunan besarnya 4%-8% dari jumlah bersih pinjaman yang belum tersalurkan pada awal tahun. Hal ini berkaitan dengan kehati-hatian dalam administrasi proyek.



<sup>36</sup> ADB. 2005. *Grant to Republic of Indonesia for Earthquake and Tsunami Emergency Support Project*, Manila (0002-INO, disetujui pada 7 April 2005, sejumlah \$290 juta, plus submbangan \$10 juta kepada Multidonor Fund for Aceh and Nias Reconstruction).

<sup>37</sup> Laporan tentang Bencana Gempa Bumi Yogyakarta-Jawa Tengah, IN:122-06, diedarkan 31 Mei 2006.

48. Kinerja portofolio telah meningkat tajam selama beberapa tahun terakhir. Semua proyek saat ini mendapat peringkat memuaskan dalam hal kemajuan pelaksanaan dan pencapaian sasaran. Tidak ada proyek yang menghadapi risiko<sup>38</sup> namun masalah tetap ada. Mundurnya awal permulaan proyek disebabkan oleh efektivitas pinjaman, lamanya pembentukan manajemen dan kantor pelaksanaan kantor proyek, dan tertundanya perekrutan konsultan. Hal ini diperburuk dengan lambatnya pengeluaran dana pendamping, keterlambatan pengadaan, lemahnya lembaga pelaksanaan, dan ketidakbiasaan dengan prosedur ADB. Kebijakan perlindungan ADB dan pendekatan Pemerintah terhadap isu-isu perlindungan harus diselaraskan melalui koordinasi aktif di lapangan. Semua permasalahan ini akan terus dipecahkan pada tataran proyek, sektor dan negara.



### C. Pelajaran yang Dipetik

49. Evaluasi<sup>39</sup> terhadap program bantuan untuk negara (*country assistance programme evaluation/CAPE*) yang baru-baru ini dilakukan dan pengalaman operasional yang didasarkan pada strategi dan program negara 2002 (CSP 2003-2005) telah memberi banyak pelajaran.

50. **CAPE.** Dari 1997 hingga 2004, CAPE menemukan satu kesamaan yang jelas antara tujuan-tujuan umum Pemerintah Indonesia dan tujuan-tujuan strategis ADB.<sup>40</sup> ADB tetap terlibat ketika Pemerintah berjuang melakukan pemulihan ekonomi dan transisi menuju desentralisasi. Namun demikian, kompromi di antara berbagai agenda, baik yang disebabkan oleh munculnya realitas baru di Indonesia maupun pertimbangan ADB, mengurangi dampak operasi ADB. Strategi yang ada terlalu luas sehingga program tidak begitu terkait dengan strateginya. CAPE merekomendasikan agar tata kelola lebih jauh diurusutamakan ke dalam operasi ADB. CAPE juga merekomendasikan adanya penetapan sasaran geografis untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan keberlanjutan hasil-hasil proyek, khususnya pada tataran

<sup>38</sup> Proyek-proyek yang dinilai ADB memuaskan sebagian, tidak memuaskan, atau memiliki potensi masalah dalam kemajuan pelaksanaan atau kemungkinan mencapai tujuan-tujuan pembangunan mereka.

<sup>39</sup> ADB. 2006. Country Assistance Program Evaluation. Manila.

<sup>40</sup> ADB. 2000. Country Operational Strategy, Manila, and ADB. 2002. Country Strategy and Program. Manila.

pemerintah daerah. Berdasarkan perkembangan terkini, proyek dan program harus bisa lebih diselaraskan dengan prioritas Pemerintah dan sedapat mungkin menggunakan sistem pemerintah. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem pemerintah dalam Proyek Bantuan Infrastruktur Pedesaan.<sup>41</sup> Dalam proyek ini ADB mendukung sebuah program Pemerintah yang sedang berjalan dengan memberi pendanaan tambahan, menggunakan mekanisme pelaksanaan yang ada disertai dengan peningkatan pemantauan.

51. CAPE mencatat, selama 15 tahun terakhir kinerja proyek dan program ADB mengalami fluktuasi, namun akhir-akhir ini membaik. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling tidak berhasil, yaitu terdapat lebih dari 20% proyek yang mendapat penilaian sebagai proyek yang tidak berhasil. Kinerja proyek bervariasi antara proyek yang satu dengan yang lain. Proyek energi – transmisi, distribusi, dan pengembangan energi – umumnya dinilai berhasil seperti halnya proyek-proyek transportasi dan komunikasi. Proyek-proyek dan program-program sektor keuangan juga telah menunjukkan kinerja yang baik. Proyek-proyek multi-sektor umumnya fokus pada pengembangan perkotaan dan telah mendapatkan nilai tinggi. Pendidikan, khususnya proyek-proyek pendidikan dasar dan lanjutan antara lain merupakan proyek-proyek yang dianggap paling berhasil. Proyek-proyek kesehatan menunjukkan kinerja yang lebih beragam.

52. Seperti yang telah direkomendasikan oleh CAPE, CSP menganalisis hambatan-hambatan pembangunan dan memfokuskan pada dukungan untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut di wilayah-wilayah kunci. Cakupan CSP diselaraskan dengan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, baik di ADB maupun di Pemerintah. Meningkatnya penggunaan sistem negara seiring dengan pembangunan kapasitas akan menjadi satu cara untuk mengurangi biaya transaksi. Dalam Lampiran 2 disajikan sebuah matriks yang menunjukkan bagaimana rekomendasi CAPE dan komentar terkait oleh Development Effectiveness Committee ditindaklanjuti dalam CSP.

53. **CSP 2003-2005.** Operasi ADB selama tiga tahun yang lalu diatur oleh CSP 2003-2005. CSP tersebut dibahas oleh Dewan pada November 2002.<sup>42</sup> Banyak keterlambatan ditemukan dalam pelaksanaan program pinjaman 3 tahun tersebut. Pemrosesan proyek-proyek baru menjadi semakin sulit karena beberapa hal, termasuk dampak desentralisasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan lemahnya kapasitas kelembagaan dan manusia. Produk-produk pinjaman ADB semakin dipandang sebagai produk yang ketinggalan zaman dengan biaya transaksi yang tinggi. Dari 11 pinjaman dalam program 2003, 2 disetujui tahun pada tahun tersebut, 3 disetujui di tahun-tahun berikutnya, 3 proyek sedang diproses dan 3 dibatalkan.

54. Rancangan dan implementasi proyek-proyek desentralisasi merupakan tes terhadap kapasitas sistem pemerintah maupun sistem ADB. Proyek-proyek yang sedang dilaksanakan melibatkan sekitar 200 kabupaten. ADB tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mensupervisi dan memantau proyek, dan hasil-hasilnya sulit untuk diukur. ADB dan lembaga-lembaga lain telah melakukan investasi yang sangat besar dalam pengembangan kapasitas namun hasilnya terkadang mengecewakan. Perlu dicari satu pendekatan baru untuk dapat menetapkan sasaran pengembangan kapasitas dengan lebih baik. Selain itu juga perlu

<sup>41</sup> ADB. 2005. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for the Rural Infrastructure Support Project*. Manila (Loan 2221-INO(SF), disetujui pada 19 Desember 2005 sejumlah \$50 juta).

<sup>42</sup> ADB. 2002. *Indonesia Country Strategy and Program 2003–2005*. Manila.

diperoleh pendekatan baru untuk melibatkan pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan bantuan teknis dan dalam merekrut konsultan, serta dalam menggunakan kelompok bantuan teknis yang lebih fleksibel.

#### **D. Kesimpulan dan Pelajaran bagi Strategi dan Program Negara**

55. ADB telah cepat tanggap terhadap kebutuhan Pemerintah namun kurang cepat untuk menyesuaikan dengan munculnya realitas-realitas baru desentralisasi. ADB harus lebih banyak bekerja dengan memanfaatkan sistem Pemerintah yang ada untuk mendukung program-program Pemerintah. Bersama dan melalui para mitra pembangunan lainnya yang mempunyai kapasitas, ADB harus dapat bekerja secara efektif pada tataran daerah. Krisis dan proses demokratisasi dan desentralisasi yang mengikutinya telah menurunkan kapasitas lembaga-lembaga terkait di pusat maupun di daerah. Strategi baru perlu memperhitungkan bahwa produk-produk pinjaman dan non-pinjaman ADB tidak lagi efektif dan bahwa diperlukan pendekatan-pendekatan baru.

### **IV. STRATEGI ADB**

#### **A. Ringkasan Tantangan Utama Pembangunan**

56. Tantangan utama bagi Indonesia masih pengurangan kemiskinan dan penghapusan kerentanan sebagian besar penduduk. Pemerintah harus mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih tinggi, memperbaiki pengelolaan sektor publik, memperbesar belanja pembangunan, dan melakukan percepatan pencapaian MDGs. Memperbaiki iklim investasi, melakukan investasi dalam infrastruktur dan memperluas sektor keuangan diperlukan untuk memperbaiki daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan manusia di semua tataran pemerintahan diperlukan untuk bisa mewujudkan agenda pembangunan dan memperbaiki pelaksanaan layanan sosial. Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam akan menurunkan kerentanan penduduk terhadap kemiskinan yang semakin meningkat.

#### **B. Strategi ADB di Indonesia**

57. Indonesia harus mengambil langkah-langkah pragmatis namun berani untuk memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang efisien, berkelanjutan dan adil dalam lingkungan yang terdesentralisasi. Langkah-langkah kebijakan akhir-akhir ini telah menunjukkan kemauan kuat Pemerintah untuk menuju ke arah tersebut. Untuk mewujudkan dua tujuan umum Pemerintah yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pencapaian MDG, strategi ADB dirancang di sekitar 2 pilar dan satu tema yang menjadi perhatian utama. Tabel 2 meringkas hambatan-hambatan utama terhadap pembangunan tersebut yang perlu ditangani untuk mendukung 2 pilar tersebut. Strategi ADB menggunakan kerangka ini untuk mengidentifikasi lima bidang kunci keterlibatan jangka panjang berdasarkan hambatan-hambatan tersebut. Tujuan utama CSP adalah untuk membantu Pemerintah menangani hambatan-hambatan tersebut.

Tabel 2: Tujuan Umum dan Hambatan

Tujuan Umum:	Pertumbuhan Ekonomi yang Berpihak pada Orang Miskin dan Berkelanjutan	Pembangunan Sosial
Hambatan	Iklim investasi yang merugikan	Kapasitas desentralisasi yang lemah
	Prasaran fisik yang buruk	Pengelolaan sumber daya alam yang lemah
	Sektor keuangan yang kurang berkembang	
	Belanja pembangunan yang rendah	
	Manajemen sektor publik yang lemah	

Sumber: Asian Development Bank

58. Usulan CSP untuk tahun 2006-2009 selaras dengan tujuan umum dan prioritas Pemerintah dalam RPJM yang berakhir pada 2009. CSP ini sejalan dengan kerangka kerja strategi jangka panjang ADB.<sup>43</sup> CSP fokus pada pengembangan kapasitas, yang diperkenalkan sebagai prioritas tematik dalam strategi peningkatan pengentasan kemiskinan ADB.<sup>44</sup> Ia sejalan dengan prioritas strategis dalam strategi jangka menengah II (*medium-term strategy II/MTS II*),<sup>45</sup> termasuk melakukan katalisasi investasi, memperkuat keinklusan, mengelola lingkungan, dan memperbaiki tata kelola dan mencegah korupsi.

59. **Pilar I: Pertumbuhan Ekonomi yang Berpihak pada Orang Miskin dan Berkelanjutan.** ADB akan membantu Pemerintah menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan mengkatalisasi investasi pemerintah dan swasta. Dukungan akan diberikan melalui gabungan antara reformasi ekonomi makro, infrastruktur dan sektor keuangan; investasi dalam proyek infrastruktur yang selektif; dan pengembangan kapasitas. Investasi sektor swasta akan terus fokus pada prakarsa katalitik (*catalytic*) sehingga mendorong pengembangan sektor swasta dan mendorong investasi sektor swasta.

60. **Pilar II: Pembangunan Sosial.** Dukungan ADB akan fokus pada desentralisasi fiskal yang lebih berkelanjutan, transparan dan berkeadilan untuk membantu pemerintah daerah mendapatkan sarana untuk memperbaiki kualitas dan volume pemberian layanan. Hal ini akan memastikan efektivitas penggunaan ruang fiskal yang diciptakan oleh investasi sektor swasta dalam infrastruktur dan juga dilanjutkannya pengurangan subsidi yang tidak produktif. Dukungan akan diberikan kepada pembaruan kebijakan dan kelembagaan, pembiayaan program dan investasi yang selektif, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan kapasitas. Untuk meningkatkan penghidupan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan, perhatian akan diberikan pada isu-isu lingkungan kelautan dan perkotaan. Sejalan dengan prakarsa pendanaan air ADB, pengelolaan sumber daya air akan memainkan peran penting.

61. **Perhatian Tematik Kunci: Tata Kelola dan Upaya Pemberantasan Korupsi.** Semua operasi ADB akan mencakup aktivitas memperkuat tata kelola pemerintah pusat maupun daerah dengan meningkatkan pengembangan kelembagaan dan memperkuat kapasitas untuk memperbaiki manajemen sektor pemerintah. Pinjaman non-negara (*non-sovereign*) untuk BUMN digunakan untuk menangani isu tata kelola korporasi. Pinjaman-pinjaman program ADB

<sup>43</sup> ADB. 2001. *The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank (2001-2015)*. Manila.

<sup>44</sup> ADB. 2004. *Review of the Asian Development Bank's poverty reduction strategy*. Manila.

<sup>45</sup> ADB. 2006. *Medium-Term Strategy II, 2006-2008*. Manila.

akan terus memasukkan komponen tata kelola secara signifikan. Dukungan ADB juga difokuskan pada peningkatan upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan akuntabilitas untuk memperbaiki akuntabilitas fiskal dan administrasi pemerintah daerah dan tata kelola yang lebih baik.

### C. Bidang Kerja Sama Strategis

62. ADB akan bekerja sama dengan Pemerintah dalam lima bidang utama yang berasal dari analisis terhadap hambatan pembangunan, yang terkait dengan tujuh hambatan yang teridentifikasi di bagian I. Bidang kerja sama tersebut juga mempertimbangkan sejumlah sasara utama Pemerintah dalam RPJM dan mencerminkan pelajaran yang dipetik dari pengalaman operasional ADB (Tabel 3). Hasil yang diharapkan dari lima bidang kerja sama tersebut ini dapat diringkas sebagai berikut:

- (i) membaiknya infrastruktur dan pelayanan infrastruktur, termasuk infrastruktur pedesaan, dengan meningkatnya investasi sektor pemerintah dan sektor swasta serta membaiknya regulasi sektor sebagai indikatornya;
- (ii) sektor keuangan yang lebih mendalam, dengan membaiknya mobilisasi sumber daya domestik untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang sebagai indikatornya;
- (iii) membaiknya desentralisasi, dengan meningkatnya belanja daerah dan laporan keuangan yang lebih baik sebagai indikatornya;
- (iv) percepatan pencapaian MDG, dengan membaiknya pasokan air dan sanitasi serta tingkat kesehatan dan pendidikan sebagai indikatornya;
- (v) menguatnya manajemen lingkungan dan sumber daya alam, dengan membaiknya pengelolaan sumber daya air dan kelautan dan berkurangnya polusi sebagai indikatornya.

Bidang (i) dan (ii) diharapkan akan membantu mendorong partisipasi sektor swasta yang jauh lebih besar. Bidang (iii), (iv) dan (v) bersama-sama diharapkan akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Kerja sama dalam bidang-bidang tersebut akan bersifat selektif dan mencerminkan prioritas MTS II ADB dan prioritas Pemerintah. Dalam bidang perhatian tematik kunci tata kelola dan pemberantasan korupsi akan menggunakan berkurangnya korupsi sebagai indikator hasil kuncinya.

### D. Pertimbangan Operasional

63. **Penggunaan Modalitas Inovatif.** ADB akan memberikan pinjaman program dengan menggunakan kelompok operasi satu sumber (*single-tranche operation cluster*). Program ini akan dimasukkan dalam agenda reformasi Pemerintah jangka menengah. Hal ini memerlukan dialog terus menerus dengan pemerintah dan mitra pembangunan lainnya mengenai prioritas dan tindakan. Pemerintah telah menerima pendekatan ini karena memiliki keluwesan untuk menyesuaikan program dan kecepatan pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan negara. ADB akan menggunakan fasilitas keuangan multi sumber (*multi-tranche financial facility/MFF*) dalam sejumlah aktivitas untuk memastikan kerja sama sektor dalam jangka panjang dan berkelanjutan dalam menggabungkan investasi dengan perbaikan kebijakan sub-sektor dan untuk memberi kesempatan untuk menggabungkan pinjaman *negara* pemerintah dengan operasi *non-negara* dan sektor swasta. Kelompok proyek TA akan digunakan untuk mendukung reformasi kebijakan dan investasi di bidang-bidang kerja sama tersebut. Agenda reformasi jangka menengah milik Pemerintah akan membantu menciptakan kondisi untuk pinjaman proyek yang lebih efektif. Diharapkan pinjaman proyek secara bertahap akan beralih dari operasi sektor publik ke pinjaman non-negara dan kemitraan publik-swasta, termasuk fasilitas jaminan jika diperlukan.

Tabel 3: Fokus Strategis Operasi ADB di Indonesia

Hambatan	Sasaran RPJM	Pelajaran dari Operasi ADB	Bidang Kerja CSP		
Infrastruktur fisik yang kurang berkembang	Investasi sebesar \$65 milyar dalam infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lemahnya kapasitas (untuk merancang dan melaksanakan proyek)</li> <li>▪ Kepentingan tersembunyi (mencegah kemitraan pemerintah-swasta)</li> <li>▪ Hambatan terkait anggaran</li> <li>▪ Kinerja ADB yang bagus</li> </ul>	Meningkatkan partisipasi sektor swasta	Infrastruktur dan layanan infrastruktur	Tata kelola
Kurangnya kedalaman sektor keuangan	Pendanaan swasta dalam infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reformasi pascakrisis kurang memadai untuk mencapai diversifikasi yang lebih besar</li> <li>▪ Dukungan jangka panjang ADB terhadap reformasi peraturan</li> <li>▪ Dukungan harus diwujudkan untuk mencapai pasar dan pengembangan produk yang lebih cepat</li> </ul>		Sektor keuangan semakin mendalam	
Kapasitas desentralisasi yang rendah	Pemerintah daerah yang efektif, efisien dan bertanggung gugat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Insentif yang bertentangan pada tataran nasional dan pada tataran daerah</li> <li>▪ Kebutuhan untuk terlibat dalam jangka panjang</li> <li>▪ Reformasi kebijakan harus didukung dengan dukungan untuk pelaksanaan nyata</li> </ul>	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan sektor publik	Desentralisasi	Tata kelola

Pengeluaran untuk pembangunan yang rendah	Meningkatkan akses terhadap pasokan air, layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem fiskal tidak adil dan tidak efisien</li> <li>▪ Kebijakan dan insentif tarif yang mengacukan</li> <li>▪ Pengurusan syarat pinjaman/hibah yang rumit</li> </ul>		Percepatan MDG	
Pengelolaan sumber daya alam yang lemah	Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas pemerintah lokal lemah</li> <li>▪ Koordinasi yang lemah antar tataran Pemerintah</li> </ul>		Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam	

PPP= *public-private partnership* – kemitraan pemerintah-swasta  
 Sumber: Asian Development Bank

64. **Pengembangan Sektor Swasta.** Operasi sektor swasta akan fokus pada infrastruktur dan sektor keuangan (Lampiran 5), termasuk pinjaman potensial untuk badan usaha milik negara yang layak secara keuangan dan tidak perlu megandalkan jaminan pemerintah, untuk pembaruan sektor dan perbaikan tata kelola korporasi. Rancangan dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah dan swasta dalam lingkup prakarsa inovasi dan efisiensi akan dikoordinasikan dengan ketat sehingga sumber daya ADB digunakan secara efisien. Dalam lingkup yang lebih luas, pembangunan sektor swasta sedapat mungkin akan diintegrasikan ke dalam semua operasi ADB karena sektor swasta memainkan peran sangat penting dalam penciptaan lapangan kerja. Hal ini dilakukan melalui program reformasi untuk membentuk ketentuan hukum dan peraturan baru, pelaksanaan tata kelola untuk memperbaiki manajemen sektor pemerintah dan secara langsung menangani korupsi, serta langkah-langkah khusus untuk meningkatkan audit dan proses pengadaan.

65. **Fokus pada Kemiskinan.** CSP menggabungkan serangkaian intervensi yang akan membantu pengurangan kemiskinan dan kerentanan secara berkelanjutan. Memprioritas investasi modal manusia (pendidikan dan kesehatan) dan dalam modal fisik (pelayanan infrastruktur) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan. Dukungan untuk percepatan pencapaian MDG akan fokus pada prioritasasi dan pengarahannya kembali belanja pemerintah untuk kesehatan (termasuk gizi) dan pendidikan, serta pada perbaikan kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan sosial. Desentralisasi fiskal akan memberdayakan pemerintah lokal melalui pengelolaan pengeluaran yang lebih efisien, sedangkan dukungan terhadap program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat akan memungkinkan suatu pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Dukungan terhadap pengelolaan risiko bencana yang lebih baik akan mengurangi kerentanan penduduk miskin dan mereka yang hampir miskin.

66. **Seleksi Sektor dan Sub-Sektor.** Seleksi sektor dan sub-sektor dihasilkan dari (i) pelajaran yang dipetik dari operasi sebelumnya, (ii) sasaran dan prioritas Pemerintah, (iii) hasil keseluruhan dan hasil antara yang sejalan dengan sasaran Pemerintah, dan (iv) kemitraan dengan badan-badan pembangunan lainnya. Ini juga sejalan dengan MTS II. Tidak seperti CSP sebelumnya, ADB tidak akan memberikan pinjaman baru pada sektor pemerintah untuk pelabuhan udara, perikanan, jalur kredit untuk usaha kecil menengah, pendidikan non-formal,

pelatihan teknis dan kejuruan dan pengembangan keterampilan, produksi pertanian, penelitian pertanian, rehabilitasi lahan, pendanaan perumahan atau jalur kredit untuk keuangan mikro. ADB akan memainkan peran kunci dalam aktivitas-aktivitas yang masuk sebagai prioritas kelompok I dalam MTS II melalui program operasi pinjaman untuk meningkatkan reformasi infrastruktur, memperdalam sektor keuangan, meningkatkan program pengeluaran MDG Pemerintah, dan meningkatkan kualitas udara. ADB akan terus memimpin dalam pendidikan, energi dan jalan. Ia akan membantu sejumlah aktivitas yang masuk dalam daftar prioritas kelompok II, termasuk pasokan air dan sanitasi, infrastruktur pedesaan dan daerah, dan pengelolaan sumber daya pesisir (Tabel 4). Jumlah subsektor potensial untuk mendapatkan pinjaman akan dikurangi dari 26 dalam CSP sebelumnya menjadi 16 subsektor.

67. **Pembangunan Kapasitas dan Operasional TA.** ADB akan terus mengarusutamakan pembangunan kapasitas dalam operasinya. Selama periode CSP, dana pinjaman yang telah disetujui sebesar \$95 juta untuk pengembangan kapasitas akan diimplementasikan. Selain itu, selama periode CSP juga akan diimplmentasikan banyak komponen pembangunan kapasitas dalam proyek-proyek dana pinjaman baru dan yang sedang berjalan. Di masa lalu, ADB menggunakan pendekatan jangka pendek<sup>46</sup> dalam alokasi sumber daya TA. Proyek-proyek kelompok TA akan digunakan agar pemberian dukungan *advisory* dan pembangunan kapasitas bisa berkelanjutan dan fleksibel. CSP mengusulkan digunakannya paling sedikit 4 kelompok TA untuk mendukung bidang-bidang kerja tersebut.<sup>47</sup> Sasaran dan lingkupnya akan bersifat jangka menengah dan selaras dengan prioritas RPJM dan CSP.

**Tabel 4: Operasi Program dan Strategi Negara**

<b>Usulan Operasi ADB (2006-009)<sup>a</sup></b>	<b>Prioritas Sektor MTS II</b>
<b>A. MTS II, Kelompok I<sup>b</sup></b>	
▪ Jalan provinsi	▪ Transporta jalan
▪ Efisiensi energi	▪ Energi
▪ Pasokan Air, Sanitasi, dan Pengelolaan Limbah ▪ Pemukiman Terpadu ▪ Peningkatan kualitas pemukiman	▪ Infrastruktur perkotaan (pasokan air, sanitasi, pengelolaan limbah dan transportasi perkotaan)
▪ Infrastruktur pedesaan ▪ Komunitas dan Bantuan Pemerintah Lokal ▪ Pasokan Air dan Sanitasi ▪ Pengelolaan Sumber Daya Air ▪ Pengelolaan Banjir	▪ Infrastruktur pedesaan (jalan, tenaga listrik, irigasi, dan pengelolaan air)
▪ Program Percepatan MDG ▪ Pendidikan Lanjutan dan Madrasah	▪ Pendidikan
▪ Program Reformasi Sektor Keuangan ▪ Pasar Hipotik Sekunder	▪ Sektor Keuangan
<b>B. MTS II, Kelompok II<sup>c</sup></b>	
▪ Pengelolaan Sumber Daya Pesisir	▪ Sumber Daya Pertanian dan Alam

<sup>46</sup> Lembaga-lembaga dana lainnya memiliki dana abadi jangka panjang selama 4-5 tahun atau mekanisme alokasi langsung lainnya yang memungkinkan kesinambungan dan keluwesan.

<sup>47</sup> Pengentasan kemiskinan, percepatan MDG, dan penguatan sektor sosial; iklim investasi; keuanga, dan reformasi kebijakan; pembangunan infrastruktur fisik; dan tata kelola dan pemberantasan kemiskinan

▪ Kualitas Udara Perkotaan	(kecuali perikanan, ternak, irigasi, dan pengelolaan air)
▪ Program Percepatan Pencapaian MDG ▪ Perbaikan Gizi	▪ Kesehatan
▪ Program Bantuan Pengembangan Kebijakan ▪ Program Pembaruan Infrastruktur ▪ Program Pembaruan Keuangan Pemerintah Lokal	▪ Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Publik

<sup>a</sup> Program pinjaman mencakup antara lain Proyek Perikanan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan dan Proyek-Proyek Pelabuhan Laut Antar Pulau, yang tidak masuk ke dalam kelompok I atau II namun sudah pada tahap persiapan lanjut. Kedua proyek tersebut masuk dalam pembaruan CSP tahun 2005.

<sup>b</sup> Kelompok I mencakup sektor-sektor operasi inti ADB

<sup>c</sup> Kelompok II mencakup sektor-sektor operasi non-inti ADB

Sumber: Asian Development Bank

68. **Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi.** ADB akan terus mendukung inisiatif tata kelola melalui operasi pinjaman dan TA untuk memperbaiki manajemen keuangan pada pemerintah daerah, manajemen belanja pemerintah, audit dan pengadaan. Satu dimensi yang penting dalam tata kelola adalah kapasitas kelembagaan dan manusia di tingkat daerah. ADB akan terus memberi bantuan melalui operasinya yang terdesentralisasi. Dalam upaya menyeleraskan upayanya dengan badan pendaan lainnya, ADB akan terus mendukung dialog kebijakan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik desentralisasi.

69. **Mengarusutamakan Jender.** Pada setiap tahapan awal desain proyek ADB akan mengidentifikasi kemungkinan dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan proyek terhadap laki-laki maupun perempuan. Sebagai praktik yang baik, ADB akan mengumpulkan data yang terpisah berdasarkan jender mengenai para pelaksana proyek maupun penerima manfaat proyek. Proyek-proyek tersebut akan mencakup penetapan sasaran dan dukungan bagi perempuan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. ADB akan mendukung upaya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya perempuan sebagai pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan, menggalakkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah.

70. **Kerja Sama dan Integrasi Regional.** RPJM mengupayakan pendekatan yang proaktif terhadap kerja sama regional. Prakarsa kerja sama regional memiliki potensi yang kuat untuk membantu mengatasi kemiskinan yang tidak tertangani dan meluas di daerah-daerah terpencil di Indonesia. ADB akan membantu BIMP-EAGA dan IMT-GT untuk meningkatkan pelaksanaan rencana mereka masing-masing dan menggalakkan peningkatan partisipasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur regional. Rencana IMT-GT mengidentifikasi koridor penghubung yang bisa ditingkatkan di Sumatera dan di seluruh Selat Malaka. Pembangunan koridor-koridor tersebut berpotensi menghubungkan Jawa dengan daratan Asia, dengan potensi dampak pertumbuhan dalam jangka panjang. Dalam BIMP-EAGA, ADB membantu koordinasi upaya-upaya untuk menyelaraskan berbagai aturan, regulasi dan prosedur bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (*custom, immigration, quarantine and security/CIQS*), dan membantu membentuk satu gugus tugas CIQS dengan perwakilan dari negara-negara peserta. ADB akan membantu merencanakan proyek-proyek pembangunan yang penting bagi Indonesia di tingkat nasional dan regional, termasuk transportasi, energi, fasilitasi perdagangan, pariwisata, pengelolaan lingkungan, dan barang-barang publik regional lainnya. Contoh baru-baru ini tentang barang-barang publik regional yang didukung ADB antara lain adalah peningkatan kerja

sama antar pasar-pasar saham negara-negara Asia Tenggara,<sup>48</sup> pengembangan standar untuk jasa keuangan Syariah,<sup>49</sup> dukungan untuk penanganan penyakit menular,<sup>50</sup> dan mengusulkan kerja sama perdagangan di Asia Tenggara. Office of Regional Office Integration akan terus mendukung integrasi ekonomi ASEAN melalui (i) fasilitasi dialog kebijakan regional oleh para menteri ekonomi dan keuangan ASEAN; dan (ii) peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan negara-negara anggota ASEAN dalam isu-isu terkait dengan perdagangan, investasi, uang, dan keuangan. Indonesia merupakan salah satu mitra langsung dan aktif bagi ADB dalam aktivitas-aktivitas ini.

71. **Manajemen Bencana.** Manajemen bencana dapat sangat mengurangi biaya secara signifikan jika strategi-strategi pengurangan risiko dimasukkan ke dalam proyek-proyek pembangunan. Menyusul maksud Pemerintah untuk mengembangkan suatu kerangka pengurangan risiko bencana yang proaktif, ADB akan mendukung kebijakan dan advis dan memasukkan teknik manajemen bahaya ke dalam proyek-proyek yang relevan. Dua usulan proyek khusus – Proyek Sumber Daya Air Citarum Terpadu dan Pengelolaan Pangan di dalam Proyek Daerah Aliran Sungai Terpilih – telah diidentifikasi untuk menggunakan teknik-teknik tersebut, sehingga menambah praktik baru yang sedang dikembangkan di Indonesia.

72. **Kemitraan dan Harmonisasi.** ADB akan terus bekerja erat dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan World Bank untuk menyelaraskan dialog kebijakan dengan Pemerintah, khususnya untuk pembaruan ekonomi makro dan infrastruktur. Kolaborasi dalam pengelolaan portofolio dan pengadaan juga akan ditingkatkan. ADB akan terus menyelaraskan upaya-upayanya dalam memberantas korupsi dengan upaya yang dilakukan oleh lembaga dana lain dan Pemerintah. Koordinasi antar lembaga pendanaan semakin berhasil dalam mendukung upaya desentralisasi Pemerintah. ADB akan terus bekerja erat dengan World Bank, Badan *Australian Government's Overseas Aid Agency* (AusAID), Belanda, Komisi Eropa, Department for International Development of the United Kingdom (DFID), CIDA, GTZ dan lembaga-lembaga dana lainnya untuk menghasilkan pendanaan pendamping. Akhirnya, ADB akan mempersiapkan pinjamannya yang betul-betul sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pemerintah tentang kesiapan proyek untuk meminimalkan penundaan permulaan proyek dan pelaksanaan fisik.

## V. PROGRAM BANTUAN ADB

### A. Tingkat Bantuan secara Keseluruhan

73. Indonesia, sebagai negara yang masuk dalam kelompok B-2, berhak atas gabungan pinjaman sumber daya modal umum (*ordinary capital resources/OCR*) dan ADF. Selama CSP 2006-2009, pinjaman OCR untuk sektor pemerintah diharapkan akan secara bertahap meningkat dari \$550 juta pada 2006 menjadi sekitar \$1 milyar pada 2009, dengan tingkat pinjaman untuk program yang cukup konsisten, dan meningkatnya pinjaman untuk proyek. Tingkat pinjaman OCR yang sesungguhnya akan ditentukan oleh kebutuhan Pemerintah, ketersediaan proyek yang dirancang dengan baik, mencakup operasi sektor swasta dan non-negara (non-sovereign), serta kemauan untuk meminjam dalam konteks strategi Pemerintah

<sup>48</sup> ADB. 2005. *Technical Assistance for Supporting Enhanced Cooperation among Southeast Asian Equity Markets*. Manila (TA 6298-REG, for \$500,000, disetujui pada 22 Desember)

<sup>49</sup> ADB. 2006. *Technical Assistance for Development of International Prudential Standards for Islamic Financial Services*. Manila (TA 6182-REG, for \$400,000, disetujui pada 27 Juli).

<sup>50</sup> ADB. 2006. *Technical Assistance for Strengthening Epidemiological Surveillance and Response for Communicable Diseases in Indonesia, Malaysia, and Philippines*. Manila (TA 6305-REG, untuk \$1,2 juta, disetujui pada 18 Januari).

untuk meminta pinjaman. Alokasi ADF untuk Indonesia adalah \$200 juta untuk setiap periode 2 tahun. Seperti halnya di masa lalu, ADF terutama akan digunakan untuk intervensi langsung yang berkaitan dengan kemiskinan dan pembangunan kapasitas.

74. Pinjaman non-negara (non-sovereign) diharapkan akan dilakukan selama periode CSP ini, namun akan memerlukan waktu untuk menangani isu-isu khusus terkait. Misalnya, peraturan yang ada saat ini tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk meminjam langsung dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Ada peluang untuk memberikan pinjaman non-negara kepada BUMN, namun kesepakatan pembagian risiko harus diselesaikan dulu di masing-masing kasus. Pemerintah tertarik dalam MFF karena akan membantu melembagakan kriteria kesiapan proyek, dan mengurangi beban komitmen peminjaman tahunan. Sejumlah BUMN dan badan usaha swasta telah menyatakan keinginannya untuk mendapatkan pinjaman dengan mata uang dalam negeri. ADB bekerja bersama Pemerintah untuk menyiapkan tawaran ADB yang pertama kali untuk memberikan obligasi daerah (*local bond*). ADB akan terus meningkatkan investasinya dalam sektor swasta, pinjaman, dan produk-produk jaminannya.

75. ADB akan mempertajam fokus program TA-nya agar sejalan dengan prioritas-prioritas CSP. Komitmen akan tetap berjumlah sekitar \$12-15 juta per tahun namun dengan operasional lebih sedikit. Program TA *advisory* akan fokus untuk memberikan dukungan terhadap dialog kebijakan dan dukungan teknis untuk bidang kerja strategis, dalam bentuk kelompok-kelompok TA yang lebih besar. ADB akan tetap proaktif dalam mengamankan pendanaan dampingan dari mitra-mitra bilateral untuk operasional TA-nya.

76. **Pengaturan Pembagian Biaya.** Sampai diperkenalnya kebijakan baru tentang kebijakan pembagian biaya,<sup>51</sup> batas pembagian biaya ADB ditetapkan sebesar 70% untuk pinjaman ADF dan OCR untuk Indonesia sebagai negara kelompok B-2. Batasan pembagian biaya TA ditetapkan sebesar 80%. Untuk CSP ini, batasan pembagian biaya akan tetap 70% untuk pinjaman dan 80% untuk proyek-proyek TA. Kebijakan baru antara lain mencakup kemungkinan untuk mendanai pengeluaran tertentu, termasuk pembebasan lahan, dan pajak dan cukai. Pemerintah beranggapan kebutuhan-kebutuhan ini harus didanai dari anggaran, sehingga tidak bisa dibenarkan pendanaan kebutuhan tersebut dari pinjaman dalam mata uang asing (Lampiran 6). Pembagian biaya akan dipantau melalui proses tinjauan portofolio tahunan.

## **B. Bantuan ADB untuk Prioritas Strategis**

### **1. Pertumbuhan Berkelanjutan yang Berpihak pada Penduduk Miskin**

#### **a. Infrastruktur dan Pelayanan Infrastruktur**

77. Kelompok Program Reformasi Infrastruktur, dengan tiga sub-program selama 2006-2010, akan menjadi sarana utama untuk membantu mengembangkan infrastruktur dan pelayanan infrastruktur. Program ini bertujuan untuk memperkuat iklim investasi, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 6-7%. Hasil yang diharapkan dari kelompok program ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur melalui partisipasi sektor swasta dan investasi tambahan oleh sektor publik.<sup>52</sup> Melalui satu fasilitas penyiapan proyek yang terkait, program akan memungkinkan suatu penyiapan proyek-

<sup>51</sup> ADB. 2005. Cost Sharing and Eligibility of Expenditures for Asian Development Bank Financing: A New Approach. Manila (R193-05, August).

<sup>52</sup> Reformasi yang ada dalam kelompok program berkaitan dengan kerangka kerja hukum, kebijakan dan kelembagaan untuk transportasi (jalan, pelabuhan laut dan udara, dan jalur kereta api); tenaga listrik; minyak dan gas; telekomunikasi; dan pasokan air dan sanitasi.

proyek infrastruktur di dalam pengembangan energi dan listrik, jalan, dan infrastruktur perkotaan untuk kemungkinan pendanaan oleh ADB dari 2008 seterusnya. Program akan membantu penggunaan instrumen-instrumen ADB - termasuk produk-produk inovasi dan inisiatif efisiensi, investasi sektor swasta dan fasilitas jaminan – yang memiliki nilai khusus untuk menggerakkan pendanaan untuk kemitraan publik-swasta, kemungkinan bersama dengan mitra-mitra pembangunan lainnya. Penyediaan dukungan jaminan akan didasarkan pada kerangka Pemerintah tentang pembagian risiko.

78. Efisiensi energi<sup>53</sup> menjadi satu prioritas untuk bisa memenuhi tuntutan pertumbuhan di Indonesia karena Indonesia memiliki intensitas energi paling tinggi di kawasan (sekitar 30% lebih banyak dari Thailand dan Malaysia). Bidang sasaran utama adalah mengurangi kerugian dalam jaringan penyebaran tenaga listrik yang ada saat ini dan menggalakkan penggunaan energi secara efisien oleh pelanggan (pengelolaan sisi permintaan). Inisiatif-inisiatif ini akan segera bermanfaat bagi negara dengan mengurangi pembangkit berbasis minyak. Pada 2007, ADB akan mendukung sebuah proyek efisiensi energi yang mencakup seluruh sistem distribusi Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Indonesia di Jawa-Bali, yang terdiri dari DKI Jakarta dan Tangerang (Jakarta), Jawa Barat dan Banten (Bandung), Jawa Tengah dan Yogyakarta (Semarang), Jawa Timur (Surabaya) dan Bali (Denpasar). Proyek ini akan memungkinkan PLN untuk menyalurkan listrik dari jaringan pembangkit melalui jaringan distribusi yang ada secara lebih efisien.

79. Untuk membantu mempertahankan dan mengembangkan keterampilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ADB akan mendanai Proyek Pendidikan Sekolah Menengah pada 2007. Proyek-proyek lain akan secara langsung membantu membangun fasilitas-fasilitas infrastruktur, termasuk Proyek Pembangunan Jalan Daerah pada 2009. ADB akan terus mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan, wilayah yang tidak menarik bagi sektor swasta, melalui Proyek Bantuan Infrastruktur Pedesaan II. Upaya ini akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan pembangunan sosial dengan membantu menyediakan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin dan terpinggirkan di desa-desa terpencil dan terisolasi, memberdayakan masyarakat untuk memprioritaskan kebutuhan infrastruktur mereka dan merencanakan dan melaksanakan kerja tersebut. Saat ini sedang dipersiapkan satu pendekatan terpadu terhadap pembangunan lokasi, pemberian pelayanan dan pembaruan perkotaan melalui Proyek Pembangunan Permukiman Terpadu (2008) yang dirancang untuk penduduk miskin di perkotaan.

## **b. Pendalaman Sektor Keuangan**

80. ADB akan terus memberi bantuan untuk program reformasi sektor keuangan oleh Pemerintah. Fokusnya adalah pada penguatan supervisi terhadap lembaga-lembaga keuangan non-bank, termasuk industri asuransi dan dana pensiun, serta pengembangan pasar modal. Ini akan dilakukan melalui program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial (2007 dan 2009) kedua dan ketiga. Bantuan juga akan diberikan untuk mengembangkan pasar hipotik sekunder melalui Secondary Mortgage Facility Project. Ini diusulkan sebagai satu MFF dari 2007, yang menggabungkan pinjaman untuk sektor publik dengan operasi non-negara (non-sovereign) dan jaminan. Bantuan untuk pendalaman sektor keuangan akan diberikan melalui sebuah kelompok operasi TA.

---

<sup>53</sup> ADB baru-baru ini mengumumkan tahap kedua dalam inisiatifnya untuk efisiensi energi yang fokus pada perancangan dan pelaksanaan proyek-proyek energi yang bisa diperbaharui dan efisiensi energi, untuk membuat pengembangan energi di Asia berkelanjutan secara lingkungan dan ekonomi.

81. Serangkaian operasi pinjaman program bersama dengan pinjaman kebijakan pembangunan (*development policy loan/DPL*) dari World Bank sedang dipersiapkan untuk membantu iklim investasi jangka menengah berbasis luas dan lintas sektor serta agenda reformasi tata kelola. DPL pertama disetujui oleh World Bank pada 2004. Selama 2004, ADB memberi dukungan paralel terhadap agenda DPL melalui sektor keuangan dan program reformasi BUMN. Pada 2005, atas permintaan Pemerintah, ADB memberi pendanaan dampingan untuk melengkapi operasi DPL melalui Development Policy Support Program I (DPSP I).<sup>54</sup> *Tranche* kedua DPSP sedang disusun untuk mendapat persetujuan tahun 2006. Tahapan berikut dari DPSP selama CSP akan dirancang bersama Pemerintah, World Bank, dan Pemerintah Jepang. DPL dari World Bank dan DPSP dari ADB memberi kerangka pembaruan ekonomi makro dan kelembagaan secara luas dan konteks untuk melakukan reformasi sektor secara lebih mendalam, dengan menghindari tumpang tindih antarsektor. Bidang-bidang di mana ADB secara khusus akan terlibat melalui dialog kebijakan dan keterlibatan langsung antara lain adalah bidang manajemen fiskal yang hati-hati; peningkatan tata kelola korporasi dalam sektor perbankan dan peningkatan kerangka peraturan untuk lembaga keuangan nonbank; upaya pengembangan sistem pendaftaran investasi untuk mengurangi persyaratan pemberian persetujuan, dengan disertai satu daftar negatif yang transparan; dan reformasi kebhendaharaan dan audit.

### c. Operasi Sektor Swasta

82. Operasi sektor swasta secara selektif akan mendukung pengembangan dan pendanaan proyek-proyek infrastruktur penting sektor energi, transportasi, dan pasokan air perkotaan, sanitasi dan pengelolaan limbah. Proyek-proyek sektor swasta akan dipilih yang memiliki dampak yang besar, inovatif dan menjadi perintis, dan dapat direplikasi oleh ADB dan pihak atau di tempat lain di Indonesia. ADB memperkirakan akan memberikan pendanaan pinjaman langsung untuk proyek-proyek berbasis pendanaan-proyek, namun juga mencari kesempatan untuk mendanai investasi infrastruktur melalui pinjaman korporasi tanpa jaminan untuk perusahaan-perusahaan daerah (*sub-sovereign*) yang memiliki unsur kepemilikan swasta atau menunjukkan satu tingkat otonomi manajemen yang tinggi serta keterbukaan keuangan, standar tata kelola korporasi yang tinggi dan falsafah manajemen berbasis komersial. Mengingat pertimbangan bank-bank komersial internasional terhadap risiko negara Indonesia, ADB memperkirakan bahwa produk jaminan risiko politiknya akan memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan pendanaan proyek-proyek yang disponsori swasta. Akhirnya, penyediaan pendanaan jangka panjang dengan mata uang dalam negeri dapat memainkan peran penting bagi proyek-proyek infrastruktur yang disponsori swasta, khususnya proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan dalam mata uang dalam negeri.

83. Investasi oleh PSOD dapat meningkatkan penghematan, memperbaiki alokasi dan memperbaiki penyaluran sumber daya keuangan. Potensi operasi antara lain mencakup bantuan untuk perbaikan regulasi dan supervisi pasar keuangan, pengembangan pasar obligasi, pengembangan dan peningkatan jaminan (*hipotik*), sekuritisasi bantuan untuk perusahaan-perusahaan nonkeuangan, dan pendanaan inovatif untuk infrastruktur. Bantuan ADB untuk memperdalam pasar keuangan antara lain juga mencakup kemungkinan pemberian pinjaman non-negara kepada BUMN, entitas kota, dan lembaga keuangan; penerbitan obligasi

---

<sup>54</sup> ADB. 2005. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for Development Policy Support Program*. Manila (Loan 2228-INO, disetujui pada 21 Desember 2005 sejumlah \$200 juta).

dalam mata uang dalam negeri untuk pendanaan proyek dalam bentuk mata uang dalam negeri; dan peningkatan pasar obligasi rupiah. PSOD akan menjajagi peluang dalam sektor keuangan, seperti misalnya (i) pemberian pinjaman intermediasi keuangan pada bank usaha kecil dan menengah di tingkat daerah atau kepada perusahaan keuangan non-bank yang melayani usaha kecil menengah (seperti misalnya perusahaan *leasing*); (ii) *asset-back securitization* (dalam negeri dan lintas-batas) sebagai cara pendanaan utang terstruktur melalui pasar modal; dan (iii) pengembangan pasar modal utang seperti bantuan ADB untuk menerbitkan obligasi perusahaan melalui peningkatan kredit lewat jaminan kredit parsial atau fasilitas likuiditas.

## **2. Pembangunan Sosial**

### **a. Desentralisasi**

84. ADB akan terus membantu agenda desentralisasi Pemerintah melalui reformasi kebijakan dan pengembangan kapasitas. Melalui kegiatan tindak lanjut dukungan pada reformasi audit negara dan peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi, ADB akan membantu meningkatkan pemberian pelayanan publik di tingkat daerah, khususnya untuk pendidikan dan pasokan air dan sanitasi di sejumlah provinsi dan kabupaten terpilih. Fasilitas Bantuan Desentralisasi (*Decentralisation Support Facility/DSF*)<sup>55</sup> akan menjadi instrumen penting dalam menyesuaikan inisiatif dengan kebutuhan Pemerintah dan menyelaraskan kebijakan dan intervensi dengan lembaga-lembaga lain. Partnership for Governance Reform memiliki pengalaman catatan yang baik dalam memfasilitasi kemajuan pemberantasan korupsi, desentralisasi, reformasi sistem kepegawaian negara, dan reformasi hukum dan peradilan. dan akan terus menjadi pusat penting untuk reformasi pemerintah di seluruh tataran.<sup>56</sup>

85. Pemberian pelayanan sosial tidak dapat diperbaiki tanpa ada upaya pengembangan kapasitas terus-menerus untuk memperkuat kerangka desentralisasi, menempatkan pendanaan pemerintah pada basis yang lebih berkelanjutan, dan memperkenalkan akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah. Menyusul Program Keuangan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Sektor Reformasi Tata Kelola (Local Government Finance and Governance Reform Sector Development Program) pada 2005,<sup>57</sup> bantuan selanjutnya diberikan melalui program kedua pada 2008 untuk memastikan berlanjutnya momentum reformasi kelembagaan dan kebijakan. Program kedua ini juga untuk terus meningkatkan penganggaran yang berpihak pada penduduk miskin dan tanggap jender di tingkat daerah.

### **b. Percepatan Pencapaian MDG**

86. Percepatan pencapaian MDG merupakan bagian penting dalam RPJM Pemerintah. ADB akan mendukung reformasi kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan, dan melakukan investasi dalam intervensi proyek-proyek khusus. Bantuan utama akan diberikan melalui Program Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan MDG, sebuah operasi kelompok program

<sup>55</sup> DSF dibentuk awal 2005 oleh ADB, DFID, Belanda, UNDP, dan World Bank, dan didanai penuh oleh DFID. Dari pelajaran yang dipetik, DFID telah meninjau dan merancang ulang DSF agar menjadikannya lebih efektif dan bisa lebih melibatkan Pemerintah. Fase kedua DSF dimulai pertengahan 2006.

<sup>56</sup> Outcome Evaluation Agenda for Governance Reform in Indonesia, 2000–2005. Dimintakan oleh UNDP, laporan akhir, Jakarta, 5 Mei 2006.

<sup>57</sup> ADB. 2005. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Proposed Loans and Technical Assistance Grant to the Republic of Indonesia for the Local Government Finance and Governance Reform Sector Development Program*. Manila (Loans 2192/2193-INO(SF), disetujui pada 3 November sejumlah \$330 juta).

yang dimulai pada 2007. Program tersebut berupaya membantu Pemerintah memperbaiki efisiensi pembelanjaan pemerintah dan pemberian pelayanan sosial, serta meningkatkan kualitas dan akses ke pelayanan sosial, untuk mencapai sasaran pengentasan kemiskinan jangka menengah. Selain itu, juga banyak investasi proyek akan mendukung pencapaian MDG: Proyek Bantuan Pendidikan Madrasah (2006), Proyek Perbaikan Gizi melalui Pemberdayaan Masyarakat (2007), Proyek Pasokan Air dan Sanitasi (2008), Proyek Pengelolaan Sanitasi Metropolitan dan Kesehatan (2009), Proyek Pelayanan Air dan Kesehatan Masyarakat Kedua (2009). Mengenai Proyek Layanan Air dan Kesehatan Masyarakat yang pertama, lihat uraian dalam kotak. Proyek Bantuan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kedua (2008) akan berinvestasi dalam infrastruktur untuk mengatasi kemiskinan pedesaan. Proyek ini akan dirancang untuk lebih mendorong prakarsa baru Pemerintah dalam pembangunan berbasis komunitas.

### **Contoh Proyek yang Terkait MDG**

Sasaran Proyek Pelayanan Air dan Kesehatan Komunitas<sup>a</sup> (gabungan pinjaman dan hibah untuk tanggap darurat) yang disetujui pada April 2005, adalah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah dengan cara memperbaiki perilaku kebersihan mereka dan mempertahankan akses mereka terhadap air yang aman diminum dan sanitasi yang lebih baik. Proyek ini memiliki empat komponen: (i) memperbaiki kapasitas pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mengatur dan memberikan pelayanan air dan sanitasi yang berkualitas pada masyarakat sasaran; (ii) memperkuat kemampuan masyarakat untuk merancang, memberikan pendanaan dampingan, membangun, menjalankan dan mengelola fasilitas- air dan sanitasi berbasis komunitas; (iii) memperbaiki akses ke pelayanan air dan sanitasi dengan membangun fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan komunitas; (iv) meningkatkan kesadaran mengenai kebersihan melalui kampanye informasi, pendidikan dan komunikasi. Proyek akan mencakup sekitar 1.000 komunitas di 20 kabupaten di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Bengkulu; 400 komunitas lagi di Aceh dan Nias-Sumatra Utara dicakup oleh hibah tanggap darurat Aceh/Nias. Proyek menggunakan pendekatan pembangunan yang berbasis komunitas, di mana komunitas sendiri yang memutuskan jenis fasilitas yang harus dibangun di desa-desa mereka; merencanakan dan melaksanakan – dengan bantuan para fasilitator - rencana aksi komunitas yang berisi rincian tentang peningkatan kapasitas komunitas, aktivitas kesehatan dan kebersihan serta infrastruktur; mengelola dana untuk pelaksanaan rencana aksi komunitas; mengelola operasi dan pemeliharaan infrastruktur sepenuhnya; dan memantu dan mengevaluasi keberlanjutannya. Komunitas harus menunjukkan komitmen mereka dengan menyumbang paling tidak 20% dari seluruh biaya rencana aksi komunitas (16% dalam bentuk non-tunai, 4% tunai. Untuk sumbangan tunai tidak berlaku di Aceh dan Nias) dan dengan mendanai semua biaya untuk operasi dan pemeliharaan.

<sup>a</sup> Pinjaman 2162 dan 2163 (SF)-INO, sejumlah \$65 juta disetujui pada 7 April 2005. Grant 0003-INO: Community Water Services and Health Aceh-Nias and North Sumatra Project, disetujui sejumlah \$16,5 juta pada 7 April 2005.

### **c. Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam**

87. Salah satu elemen kunci dalam operasi ADB untuk manajemen lingkungan dan sumber daya alam adalah manajemen sumber daya air. ADB akan memberi dukungan untuk pengelolaan sumber daya air terpadu, termasuk investasi infrastruktur dan pengelolaan

fasilitas-fasilitas multi fungsi dalam satu aliran sungai. Ada dua proyek yang sedang dipersiapkan. dalam Proyek Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum Terpadu sedang dipersiapkan sebagai satu MFF untuk disetujui pada 2007, dengan permintaan pendanaan berkala untuk 2009 dan selanjutnya. Proyek tersebut akan membantu pelaksanaan rencana pengembangan dan pengelolaan daerah aliran sungai Citarum yang berkelanjutan, yang akan memperbaiki kualitas dan pasokan air untuk kota Jakarta dan Bandung, dan juga para petani di Jawa Barat. Proyek Pengelolaan Banjir di Sejumlah Aliran Sungai Terpilih (*Flood Management in Selected River Basins Project*) juga sedang dikembangkan sebagai MFF untuk disetujui tahun 2008. Proyek ini akan fokus pada sejumlah aliran sungai dan pada peningkatan kapasitas aliran sungai terpilih di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

88. Pengelolaan sumber daya alam juga akan ditingkatkan melalui dua operasi lain. Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Resources Management Project*) (2008) akan membantu sejumlah pemerintah daerah terpilih untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya pesisir dan melindungi lingkungan laut dan keragaman hayati laut yang menjadi tumpuan banyak pihak. ADB juga akan memberi bantuan untuk reformasi dan investasi yang mendorong perbaikan kualitas udara di perkotaan. Program Pengembangan Sektor Kualitas Udara Perkotaan (*Urban Air Quality Sector Development Program*) di 2008 akan meningkatkan penggunaan bahan bakar yang bersih. Proyek ini juga akan mengurangi sumber polusi yang bergerak dan yang tidak bergerak.

89. Water Financing Program (WFP) ADB 2006-2010 memprioritaskan air sebagai bidang usaha inti, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang penting. WFP berupaya untuk meningkatkan investasi di tiga budang kunci: pelayanan air di pedesaan (pasokan air dan sanitasi, irigasi dan saluran air); pelayanan air perkotaan (pasokan air dan sanitasi, pengelolaan air limbah, dan perbaikan lingkungan); pengelolaan air sungai (pengelolaan sumber daya air terpadu, termasuk investasi dalam infrastruktur, pengelolaan banjir, pelestarian kualitas air, pelestarian dan perbaikan daerah aliran sungai, lahan basah dan ekosistem). Program dukungan ADB pada Indonesia selama 2006-2009 mencakup operasi di setiap bidang WFP. Ini akan menjadi dasar untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan Indonesia dalam program Air untuk Semua (*Water for All*) dengan partisipasi lembaga-lembaga donor lain dan masyarakat sipil.

### **3. Tata Kelola, Tindakan Pemberantasan Korupsi, dan Pembangunan Kapasitas**

90. Sejalan dengan MTS dan kebijakan ADB terhadap tata kelola dan pemberantasan korupsi<sup>58</sup>, ADB akan memfokuskan operasinya pada pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk klarifikasi tanggung jawab relatif dan interaksi di antara tiga tataran pemerintahan (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten). Operasi ini harus menghasilkan perbaikan keseimbangan keuangan antar daerah, peningkatan efisiensi dan keseimbangan yang lebih baik dalam pendanaan pemerintah daerah, mekanisme peminjaman yang efektif untuk daerah provinsi, penyusunan dan pelaksanaan standar kinerja fungsi-fungsi desentralisasi, pembangunan kapasitas pemerintah daerah, dan perluasan bertahap sumber-sumber pendapatan asli pemerintah daerah.

91. Dukungan ADB dapat mencakup Kantor Kejaksaan Agung, KPK<sup>59</sup> dan Mahkamah Agung. Bantuan ini akan fokus pada pencegahan dan peningkatan koordinasi, supervisi, dan

<sup>58</sup> ADB. 1994. *Governance: Sound Development Management*. Manila; and ADB. 1998. *Anticorruption*. Manila.

<sup>59</sup> Seorang staf ADB diperbantukan di KPK untuk memperkuat kapasitas KPK.

pemantauan. ADB akan terus melakukan upaya bersama dengan JBIC dan World Bank untuk mengharmoniskan pengadaan melalui perluasan TA untuk harmonisasi, dan untuk memperbaiki pelaksanaan proyek untuk mengurangi korupsi sejalan dengan Deklarasi Paris mengenai Efektivitas Bantuan (*Paris Declaration on Aid Effectiveness*).<sup>60</sup>

92. Pengarusutamaan pengembangan kapasitas, khususnya di tingkat daerah, akan terus menjadi aspek penting dalam operasi ADB. Sejumlah proyek yang direncanakan memiliki komponen yang substansial dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah.<sup>61</sup> Proyek-proyek TA kelompok akan memberikan peningkatan kapasitas dan pelatihan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Akhirnya, program TA akan memberikan dukungan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan sumber daya air dalam konteks desentralisasi, manajemen risiko bencana, dan manajemen hasil dalam perencanaan nasional.

93. ADB mendukung penilaian<sup>62</sup> akuntabilitas keuangan negara yang baru saja dilakukan pada 2001. Dengan dukungan dari mitra pembangunan lain, termasuk World Bank dan AusAID, penilaian tersebut diperbarui selama pemrosesan DPSP pada akhir 2005. Secara umum, Indonesia telah memperkenalkan reformasi penting dalam akuntabilitas, dan membangun sistem pengawasan penggunaan dana publik yang memadai. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan penting dalam pelaksanaan yang hanya bisa ditangani secara efektif pada tingkat masing-masing proyek atau program. Melalui usulan TA kelompok tata kelola (2008), ADB akan membantu Pemerintah untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan keuangan publik dengan menggunakan kerangka akuntabilitas pengeluaran pemerintah dan keuangan.<sup>63</sup> Kerangka ini akan diperbarui secara rutin sehingga menjadi alat monitoring baik untuk Pemerintah maupun ADB. Kerangka ini juga akan menyelesaikan kekhawatiran penggunaan pendapatan dari industri ekstraktif secara transparan untuk mendukung potensi keterlibatan PSOD.

### C. Koordinasi Pendanaan Eksternal dan Pengaturan Kemitraan

94. Pemerintah telah menunjukkan niatnya untuk melakukan koordinasi yang lebih erat dengan lembaga-lembaga pendanaan. Tujuan koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut menyesuaikan dengan prioritas Pemerintah, seperti yang digariskan dalam Deklarasi Paris. Pemerintah saat ini memimpin pertemuan-pertemuan *Consultative Group for Indonesia*. Mengingat rumitnya masalah lingkungan dan kapasitas pada tata pemerintahan pusat dan daerah, koordinasi yang efektif terhadap bantuan eksternal menjadi sangat penting. Lampiran 1, Tabel A1.5 menyajikan matrik aktivitas lembaga dana di berbagai sektor.

95. Harmonisasi di seputar kegiatan dialog kebijakan telah menunjukkan kemajuan penting pada beberapa tahun terakhir ini. DPSP dan Program Reformasi Infrastruktur yang akan datang merupakan contoh bagus tentang bagaimana lembaga pendanaan besar telah

<sup>60</sup> Deklarasi Paris tentang kepemilikan, penyeragaman, penyesuaian, hasil-hasil, dan akuntabilitas bersama yang dihasilkan dari forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development, Development Cooperation Directorate (OECD-DAC), diselenggarakan di Paris pada Maret 2005.

<sup>61</sup> Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah, Proyek Perbaikan Gizi dan Pemberdayaan Komunitas dan Program Percepatan MDG, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu, dan Reformasi Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Lokal SDP.

<sup>62</sup> ADB and World Bank. 2001. *Indonesia Country Financial Accountability Assessment*. Jakarta.

<sup>63</sup> Sebuah inisiatif lembaga pendanaan dari berbagai sumber yang dipimpin oleh World Bank. Pengkajian akan menyusul. World Bank. 2005. *Public Financial Management Performance Measurement Framework*. Washington, DC.

mengembangkan dan mempertahankan dialog kebijakan bersama yang kuat dengan Pemerintah. Contoh bidang lain di mana lembaga pendanaan telah melakukan dialog kebijakan bersama adalah dalam bidang iklim investasi, termasuk tindakan pemberantasan korupsi dan desentralisasi. Pengalaman terakhir dengan DSF menunjukkan adanya potensi untuk mengharmoniskan dan menyelarasakan desentralisasi. GTZ, CIDA, dan AusAID telah bergabung. Karena DFID menyalurkan hampir semua dananya melalui DSF, kemitraan yang berlanjut dengan DFID akan fokus pada pengentasan kemiskinan dengan memperbaiki tata kelola terdesentralisasi. Kemitraan yang sedang berlangsung dengan Belanda, termasuk pendanaan dampingan untuk operasi ADB, lebih jauh akan memperkuat dan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor swasta dan inisiatif yang berkaitan dengan iklim investasi. Kemitraan dengan AusAID sedang diperkuat. Pada tahap awal, kemitraan ini fokus pada pendidikan dan pembangunan infrastruktur, namun ada potensi untuk bidang-bidang lain. Saat ini sedang diupayakan kerja sama berkelanjutan dengan komisi Eropa dalam sektor pendidikan dan sektor-sektor lain.

96. Menyusul bencana tsunami Desember 2004, bantuan eksternal di Aceh dan Nias memiliki peran yang unik. Luar biasanya jumlah komitmen yang dijanjikan oleh masyarakat internasional membutuhkan koordinasi dan supervisi yang ketat terhadap lembaga pendanaan, serta lebih fokus pada akuntabilitas dan tindakan antikorupsi. Pengalaman di Aceh dan Nias menghasilkan pelajaran penting mengenai peran dan sifat bantuan pada umumnya dan manajemen risiko bencana pada khususnya. Pendekatan di Aceh dan Nias direplikasi untuk bantuan penanganan gempa di Yogyakarta-Jawa Tengah.

#### **D. Analisis Kebutuhan Sumber Daya Internal**

97. Pada beberapa tahun terakhir, desentralisasi dan korupsi membuat operasi ADB di Indonesia menjadi padat karya. Besarnya jumlah lembaga dan kantor yang terlibat dalam proyek memerlukan konsultasi yang terus menerus dan tindak lanjut oleh staf ADB untuk memastikan bahwa proyek mengalami kemajuan. Pada saat yang sama, para mitra pembangunan dan masyarakat sipil juga telah menjadi lebih aktif dalam program mereka sendiri. Kekuatan staf yang ada saat ini di SERD dan PSOD tampak memadai untuk memenuhi kebutuhan usulan program, namun diperlukan sejumlah penyesuaian, termasuk kemungkinan penugasan staf ke *Indonesian Resident Mission* (IRM). Pemerintah, para mitra pembangunan dan masyarakat sipil memilih untuk bekerja dengan IRM mengingat aksesibilitas dan pengetahuan IRM tentang negeri ini. Namun demikian, karena IRM didirikan tahun 1987 terutama untuk membantu supervisi proyek-proyek, sumber daya dan keterampilan yang ada saat ini perlu ditinjau ulang dengan memperhatikan perkembangan Indonesia dan MTS II.

## **VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI RISIKO DAN KINERJA**

### **A. Risiko**

98. **Risiko Politik.** Program Pemerintah dan dukungan ADB terhadap program tersebut sangat kuat. Reformasi lingkungan hukum dan perundang-undangan mungkin ditentang oleh mereka yang memiliki kepentingan yang kuat di sektor swasta atau oleh mereka yang ingin mendominasi BUMN. Reformasi dengan manfaat jangka panjang namun dengan biaya jangka pendek mungkin akan menimbulkan perlawanan publik dan sorotan oleh parlemen. Mempertahankan momentum reformasi memerlukan partisipasi luas dan komunikasi mengenai tujuan dan potensi manfaat yang ada.

99. **Bencana Alam Berskala Besar.** Bencana dengan skala besar seperti tsunami yang melanda Aceh dan Nias pada Desember 2004 akan berdampak parah jika melanda satu pusat ekonomi utama. Bencana-bencana alam berskala besar telah menguras kapasitas Pemerintah dan memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan di berbagai wilayah ekonomi. Dalam kasus seperti gempa bumi Mei 2006 di Jawa Tengah dan Yogyakarta, ADB akan segera menyediakan staf dan sumber daya konsultan yang memadai untuk membantu pemerintah menilai kerusakan dan kerugian dan merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

100. **Tata Kelola.** Manajemen sektor publik yang lemah berdampak negatif pada kapasitas Pemerintah untuk memberikan pelayanan. CSP menekankan dukungannya pada reformasi yang memperkuat pengaturan kebijakan dan kelembagaan untuk menghasilkan manajemen sektor publik yang lebih baik (melalui DPSP-DPSP) dan pada sektor-sektor khusus (seperti infrastruktur dan keuangan), disertai dengan investasi dalam pengembangan kapasitas. Pemerintah mungkin tidak mampu untuk mengembangkan kemitraan pemerintah-swasta dalam infrastruktur dengan cara yang transparan dan sesuai dengan praktek terbaik internasional. Hal ini mengakibatkan investor dalam negeri maupun internasional untuk berinvestasi dalam bidang infrastruktur. Permasalahan inilah yang akan menjadi fokus dialog kebijakan ADB dengan Pemerintah dalam konteks Program Reformasi Infrastruktur.

101. **Desentralisasi.** Kemungkinan Pemerintah juga tidak mampu melaksanakan agenda desentralisasi sepenuhnya seperti telah ditetapkan di berbagai undang-undang. Banyak peraturan yang pelaksanaannya ditunda. Banyak pula peraturan yang tidak jelas. Penundaan pelaksanaan dan ketidakjelasan peraturan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah dan mengancam kualitas pemberian pelayanan. Fokus ADB adalah untuk bekerja dengan lembaga pendaan lain dalam DSF dan dalam Kelompok Kerja Donor untuk Desentralisasi (*Donor Working Group for Decentralisation*) untuk melakukan dialog kebijakan terus menerus untuk memajukan desentralisasi dan membangun kapasitas.

102. **Risiko Portofolio.** ADB mengantisipasi adanya suatu peralihan untuk lebih banyak menggunakan fasilitas keuangan yang baru, termasuk operasi sub-negara (*sub-sovereign*) dan sektor swasta. Ini menimbulkan risiko yang lebih besar bagi operasi ADB dan bagi para peminjam yang tidak lagi mengakses jaminan Pemerintah. Operasi seperti itu dapat disertai dengan operasi pemberian jaminan khusus. SERD dan PSOD akan bekerja erat dengan Unit Manajemen Risiko untuk mengatasi risiko-risiko seperti itu.

## **B. Proses dan Rencana Pemantauan**

103. CSP ini menunjukkan niat ADB untuk mengelola aktivitas-aktivitasnya secara lebih proaktif, meningkatkan efektivitas pembangunan, dan mencapai hasil pembangunan berkelanjutan. CSP ini akan berkontribusi pada tujuan RPJM dan hasil spesifik, sasaran dan indikator. Tabel 5 menyajikan kerangka hasil CSP yang memberikan alat manajemen untuk memantau dan memberikan hasil. Kerangka hasil tersebut akan membantu (i) memantau kemajuan yang diperoleh selama pelaksanaan CSP, dilengkapi dengan evaluasi TA dan pinjaman dan CSP jangka menengah; (ii) memberi kerangka menyeluruh untuk merancang operasi-operasi baru; (iii) memperbarui dan menyesuaikan program bantuan untuk memastikan peran ADB dalam mewujudkan hasil yang diinginkan; dan (iv) mengevaluasi dampak CSP. Kerangka hasil juga berfungsi untuk menghubungkan operasi yang sedang berjalan dengan hasil-hasil kunci yang diharapkan, untuk diperbarui selama tinjauan portofolio tahunan. Kerangka hasil dapat diperbarui secara berkala untuk memastikan selalu relevan dengan perubahan situasi pembangunan dan manajemen portofolio yang sedang berjalan. Kerangka

pemantauan proyek akan dikaitkan , melalui rencana sektor, dengan perwujudan hasil yang diharapkan dari CSP.

104. Pemantauan terhadap RPJM sedang diperkuat dengan memperkenalkan rencana kerja tahunan, keterkaitannya dengan anggaran berbasis hasil dan pengenalan bertahap terhadap kerangka pengeluaran jangka panjang. ADB akan memberikan TA kepada Pemerintah untuk membantu membentuk proses konsultatif untuk menghasilkan kerangka hasil untuk rencana jangka menengah berikutnya. Biro Pusat Statistik secara rutin menerbitkan data survey dapat dijadikan sarana untuk secara rinci melacak hasil-hasil yang terkait dengan MDG, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Tindakan pemberantasan korupsi secara rutin diterbitkan oleh LSM-LSM internasional. ADB, World Bank, USAID, dan GTZ sedang menyusun sebuah sistem pengukuran untuk secara rutin mengevaluasi kinerja pemerintah.

105. Pemantauan dan evaluasi CSP akan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja hasil dan rencana (peta jalan). Dalam kerangka hasil dan peta jalan telah dipilih Indikator kemajuan sehingga keduanya bisa diukur tanpa menimbulkan beban tambahan. Penyusunan CSP telah digunakan untuk mengawali diskusi dengan Pemerintah tentang orientasi hasil sebagai alat manajemen, sejalan dengan pengenalan Pemerintah tentang sistem penganggaran berbasis hasil. Masih diperlukan kerja tambahan untuk mempromosikan orientasi hasil dalam CSP. Pemerintah dan ADB akan bersama-sama mengevaluasi kemajuan jangka menengah dan pencapaian hasil akhir CSP. Evaluasi jangka menengah dan akhir terhadap hasil-hasil CSP akan disampaikan kepada lembaga-lembaga lain dan masyarakat sipil.

Tabel 5: Kerangka Hasil untuk Strategi dan Program Negara (2006-2009)

Agenda Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJM)		Fokus Strategi Asian Development Bank		Arah Intervensi
Tujuan Strategis	Hambatan Utama	Hasil CSP	Indikator Pelacak	
<b>Pilar I: Pertumbuhan Ekonomi yang Berpihdk pada Penduduk Miskin dan Berkelanjutan</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui investasi yang lebih besar, termasuk penyediaan infrastruktur yang lebih baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya nvestasi dalam infrastruktur</li> <li>▪ Rendahnya partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur karena iklim investasi yang tidak menguntungkan</li> <li>▪ Lingkungan hukum dan peraturan yang lemah</li> <li>▪ Mekanisme penguasaan lahan yang tidak memadai</li> <li>▪ Tidak adanya infrastruktur dasar di</li> </ul>	<p><b>A. Infrastruktur dan Pelayanan Infrastruktur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerangka hukum dan peraturan yang lebih kuat untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur</li> <li>▪ Percepatan partisipasi sektor swasta</li> <li>▪ Mekanisme pendanaan jangka panjang untuk pendanaan infrastruktur dalam pembangunan</li> <li>▪ Penyediaan infrastruktur dasar dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paling tidak 3 badan pengatur menjadi sepenuhnya independen pada 2009</li> <li>▪ Paling tidak 20% pendanaan sektor swasta diberikan oleh lembaga keuangan dalam negeri pada 2009</li> <li>▪ Penawaran (<i>bidding</i>) 10 proyek kemitraan pemerintah -swata dalam pembangunan infrastruktur selesai pada 2008</li> <li>▪ Investasi tahunan dalam infrastruktur paling tidak mencapai 7% dari GDP pada 2009</li> <li>▪ Mobilisasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur mencapai 40-50% pada 2009</li> <li>▪ Terdapat lebih dari 2000 komunitas yang</li> </ul>	<p><b>Pinjaman untuk Program</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reformasi sektor infrastruktur</li> <li>▪ Reformasi sektor keuangan</li> <li>▪ Reformasi BUMN</li> </ul> <p><b>Investasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pinjaman non-<i>recourse</i> untuk BUMN</li> <li>▪ Pinjaman negara dan <i>non-recourse</i> untuk kemitraan publik-swasta</li> <li>▪ Pinjaman negara untuk proyek-proyek transporasi dan energi</li> <li>▪ Fasilitas pendanaan infrastruktur</li> <li>▪ Pengembangan kapasitas dalam persiapan proyek</li> </ul>

	wilayah terpencil	pelayanan bantuan untuk komunitas sesuai sasaran	menerima bantuan infrastruktur dasar pada 2009	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mobilisasi sumber daya dalam negeri yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intermediasi dan alokasi yang tidak efisien</li> <li>▪ Terbatasnya cakupan dan instrumen keuangan</li> <li>▪ Lemahnya penegakan hukum dan peraturan</li> <li>▪ Lemahnya manajemen risiko dalam lembaga keuangan</li> </ul>	<p><b>B. Pendalaman Sektor Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pilihan-pilihan pendanaan jangka panjang menjadi lebih kuat</li> <li>▪ Lingkungan hukum dan peraturan menjadi lebih kuat dan penegakan hukum menjadi lebih baik</li> <li>▪ Pilihan investasi jangka panjang meningkat</li> <li>▪ Intermediasi sektor keuangan lebih efisien</li> <li>▪ Peran sektor non-bank dalam pelaksanaan keuangan meningkat</li> <li>▪ Kapasitas sektor keuangan untuk memberikan pendanaan jangka panjang meningkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besarnya pasar obligasi daerah meningkat 30% pada 2009</li> <li>▪ Meningkatnya kapasitas di antara para pembuat peraturan untuk memperkuat lingkungan peraturan</li> <li>▪ Jumlah investor kelembagaan yang memberikan pendanaan jangka panjang naik 20% pada 2009</li> <li>▪ Meningkatnya persaingan dalam pasar uang pedesaan dan keuangan mikro menyusul konsolidasi BPR-BPR yang menyebabkan turunnya biaya pinjaman hingga 2 persen pada 2009</li> <li>▪ ADB berhasil menerbitkan 3 obligasi mata uang dalam negeri pada 2009</li> </ul>	<p><b>Pinjaman untuk Program</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reformasi Kebijakan Sektor Keuangan</li> </ul> <p><b>Pinjaman untuk Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pinjaman non-negara untuk BUMN, badan pemerintah kota, perantara keuangan termasuk lembaga-lembaga keuangan mikro</li> <li>▪ Diterbitkannya obligasi mata uang dalam negeri</li> </ul>

<b>Pilar II: Pembangunan Sosial</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya kapasitas fiskal dan manusia untuk pemberian pelayanan yang berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak seimbangnya pendanaan di daerah-daerah</li> <li>▪ Kurangnya kapasitas di tingkat daerah</li> <li>▪ Rapuhnya kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia</li> </ul>	<p><b>A. Desentralisasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendanaan untuk pemerintah lokal terjamin secara berkelanjutan</li> <li>▪ Meningkatnya kapasitas akuntabilitas fiskal di tingkat lokal</li> <li>▪ Hubungan fiskal di dalam pemerintah diperjelas</li> <li>▪ Penugasan fungsional kepada pemerintah di semua tingkat ditetapkan</li> <li>▪ Pendanaan pemerintah pusat untuk pemerintah tingkat daerah berdasar pada kebutuhan</li> <li>▪ Kerangka kerja yang jelas tentang akuntabilitas fiskal pemerintah tingkat lokal tersusun</li> <li>▪ Terjadi percepatan investasi dalam infrastruktur sosial</li> <li>▪ Kapasitas pemerintah daerah diperkuat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naiknya pembelanjaan daerah untuk pembangunan hingga 10% setiap tahun hingga 2009</li> <li>▪ Perbaikan kualitas dan konsistensi pelaporan keuangan pemerintah lokal</li> </ul>	<p><b>Pinjaman untuk Program</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reformasi Pendanaan dan Tata Kelola Pemerintah Lokal</li> </ul> <p><b>Investasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan Kapasitas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuantitas dan kualitas pemberian layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas teknis dalam keuangan dan</li> </ul>	<p><b>B. Percepatan Pencapaian MDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perencanaan dan penganggaran yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengeluaran untuk kesehatan dan</li> </ul>	<p><b>Pinjaman untuk Program</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percepatan MDG</li> </ul>

<p>sosial diperbaiki</p>	<p>manajemen yang rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penganggaran di tingkat lokal tidak selaras dengan perencanaan</li> <li>▪ Rendahnya pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan</li> </ul>	<p>berpihak pada penduduk miskin di tingkat lokal diperbaiki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengeluaran publik di tingkat lokal diselaraskan dengan strategi-strategi pengentasan kemiskinan di tingkat lokal</li> <li>▪ Sistem harga dan subsidi diperbaiki</li> </ul>	<p>pendidikan paling tidak mencapai 3% dari GDP pada 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membaiknya pelaporan situasi kesehatan kabupaten paling tidak di 5 propinsi pada 2009</li> </ul>	<p><b>Investasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasokan Air dan Sanitasi</li> <li>▪ Pemukiman Terpadu</li> <li>▪ Peningkatan Perumahan Perkotaan II</li> <li>▪ Infrastruktur pedesaan</li> <li>▪ Pasokan Air dan Kesehatan Komunitas II</li> <li>▪ Dukungan Komunitas dan Pemerintah Lokal II</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dengan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi penduduk miskin</li> <li>▪ Angka polusi berkurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas untuk pengelolaan sumber daya alam di tingkat nasional dan lokal tidak memadai</li> <li>▪ Tumpang tindihnya mandat serta fungsi badan-badan Pemerintah</li> <li>▪ Rendahnya kesadaran Pemerintah, masyarakat, dan pengguna sumber daya tentang pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan</li> </ul>	<p><b>C. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membaiknya pengelolaan sumber daya air</li> <li>▪ Membaiknya pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan</li> <li>▪ Penciptaan kesempatan penghidupan/ekonomi</li> <li>▪ Pengelolaan berbasis komunitas berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perluasan program irigasi</li> <li>▪ Pasokan air lebih baik</li> <li>▪ Risiko pangan dan kekeringan berkurang</li> <li>▪ 6.000 ha terumbu karang direhabilitasi pada 2009</li> <li>▪ 700 daerah laut yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan pada 2009</li> <li>▪ Produksi perikanan di 6 kabupaten</li> </ul>	<p><b>Investasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>▪ Perlindungan terhadap Banjir</li> <li>▪ Pengelolaan Sumber Daya Pesisir</li> </ul> <p><b>Investasi dan Pinjaman untuk Program</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semakin meningkatnya tekanan pada sumber daya alam untuk penghidupan</li> <li>▪ Lemahnya pengelolaan air terpadu di dalam konteks daerah aliran sungai</li> <li>▪ Lemahnya kontrol terhadap polusi</li> <li>▪ Investasi publik-swasta yang kurang memadai untuk perbaikan kualitas udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diikutinya prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu</li> <li>▪ Wilayah pesisir dan kelautan yang dilindungi dikelola dengan baik</li> <li>▪ Pelaksanaan strategi perbaikan kualitas udara diperkuat</li> <li>▪ Investasi untuk perbaikan kualitas udara dimulai</li> <li>▪ Terbangunnya kapasitas untuk mengelola kualitas udara oleh pemerintah kota yang ikut serta</li> <li>▪ Pemenuhan terhadap batas standar nasional tentang kualitas udara paling tidak 340 hari dalam satu tahun paling lambat pada 2015</li> </ul>	<p>meningkat 30% pada 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naiknya penggunaan gas alam untuk transportasi umum dan sektor industri paling tidak sebesar 5% di sejumlah kota terpilih pada 2009</li> <li>▪ Bensin tanpa timbal dengan muatan sulfur 500 ppm dan bahan bakar diesel dengan muatan sulfur 500 ppm tersedia secara luas pada 2007</li> <li>▪ Berkurangnya emisi udara dari kendaraan bermotor hingga 50% pada 2020 vs. tingkat emisi pada 2007 oleh kota-kota yang turut berpartisipasi</li> <li>▪ Berkurangnya polusi udara dari aktivitas industri hingga 50% pada 2020 vs. Pada tahun 2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas Udara di Perkotaan</li> </ul>
<b>Wilayah Tematik Utama: Tata Kelola dan Anti Korupsi</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan investasi dan pengelolaan sektor publik yang lebih baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angkatan kerja tidak terampil di dalam sektor publik menunjukkan kinerja buruk; tidak adanya standar dan ukuran akuntabilitas dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membainya dan terukurnya kinerja di sektor-sektor kunci</li> <li>▪ Menguatnya mekanisme dan lembaga anti korupsi</li> <li>▪ Membaiknya interaksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transfer DAK dan DAU meningkat hingga 30/70 pada 2009</li> <li>▪ Menguatnya kapasitas pencegahan oleh KPK</li> <li>▪ Semua rekening</li> </ul>	<p><b>Pinjaman untuk Program</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reformasi Pendanaan dan Tata Kelola Pemerintah Lokal</li> <li>▪ Program Sektor</li> </ul>

	<p>kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Korupsi yang sistemik didalam sektor publik</li> </ul>	<p>antar pemerintah berbagai tataran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membaiknya kinerja sektor publik</li> <li>▪ Berkurangnya korupsi</li> </ul>	<p>Pemerintah dipindahkan ke satu rekening keuangan/bendahara tunggal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ranking Indonesia dalam indeks persepsi korupsi oleh Transparency International membaik paling tidak hingga 15 posisi</li> </ul>	<p>Reformasi Audit Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Penghematan dan Pensiun Dini sebagai bagian dari reformasi kepegawaian negara</li> <li>▪ Program Bantuan Kebijakan Pembangunan</li> </ul> <p><b>Lain-lain</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat Kapasitas KPK dalam Pencegahan</li> <li>▪ Reformasi pengadaan secara terus menerus</li> </ul>
--	--	---	---	--

## INDIKATOR NEGARA DAN PORTOFOLIO SERTA PENYALURAN BANTUAN

**Table A1.1: Kemajuan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Milenium**

Tujuan dan Sasaran	Status Negara
<b>Tujuan 1: Pemberantasan Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem</b>	
Sasaran 1: Mengurangi separuh proporsi penduduk yang mempunyai pendapatan kurang dari \$1 per hari antara 1990 dan 2015,	Dengan angka kemiskinan masih di atas 17%, Indonesia masih jauh dari pencapaian sasaran 2015 sebesar 7,5%.
Sasaran 2: Mengurangi separuh proporsi penduduk yang menderita kelaparan antara 1990 dan 2015,	Indonesia tetap tidak bisa memenuhi sasaran. Tingkat kekurangan gizi pada anak balita saat ini adalah 28%, dibandingkan dengan sasaran sebesar 18,3%.
<b>Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar Umum</b>	
Sasaran 3: Memastikan bahwa pada 2015 anak-anak di mana pun, baik laki-laki dan perempuan, akan bisa menyelesaikan sekolah dasar secara penuh.	Mungkin bisa tercapai.
<b>Tujuan 3: Meningkatkan Kesetaraan Jender dan Memberdayakan Perempuan</b>	
Sasaran 4: Menghapuskan kesenjangan jender di pendidikan dasar dan lanjutan, paling tidak pada 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.	Kesetaraan telah tercapai di jenjang pendidikan dasar dan lanjutan pertama, meskipun perlu ada perbaikan di jenjang lanjutan menengah dan tinggi. Yang menjadi isu utama adalah di tempat kerja, di mana tingkat pengangguran pada perempuan lebih tinggi dan mereka mendapat upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, meskipun ketika pendidikan dan pengalaman mereka sama.
<b>Tujuan 4: Mengurangi Kematian Anak</b>	
Sasaran 5: Mengurangi angka kematian anak di bawah lima tahun (balita) hingga dua pertiganya antara 1990 dan 2015.	Indonesia bisa mencapai sasaran.
<b>Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu</b>	
Sasaran 6: Mengurangi rasio kematian ibu hingga tiga perempatnya antara 1990 dan 2015	Meskipun akhir-akhir ini sudah tampak kemajuan dalam hal rasio kematian ibu, pengukuran masih tidak tepat dan dipercaya bahwa angka yang sebenarnya tidak menunjukkan angka yang sebenarnya. Indonesia perlu melakukan upaya terpadu untuk mencapai tujuan ini.
<b>Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit-Perakit Lain</b>	
Sasaran 7: Penyebaran HIV/AIDS telah berhenti dan mulai menurun pada 2015.	Di tahun-tahun belakangan ini, jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia telah meningkat secara berlipat ganda di antara kelompok yang mempunyai perilaku berisiko tinggi. Prevalensi di Indonesia telah melampaui tingkat <i>epidemic</i>

	<i>concentrated</i> 0,1% dan negara ini saat ini sedang di ambang epidemi umum.
Sasaran 8: Kejadian malaria dan penyakit utama lainnya telah terhenti dan mulai turun 2015	Malaria merupakan endemi di banyak daerah di luar wilayah kota dan dilaporkan terjadi di beberapa tempat yang sebelumnya tidak diketahui. Juga dilaporkan adanya kekebalan terhadap obat. TBC juga merupakan pembunuh terbesar orang dewasa setelah penyakit jantung. Jumlah kematian karena flu burung telah mencapai 48, paling tinggi dibandingka negara mana pun. Pemerintah tidak memiliki strategi yang jelas, kemampuan atau sumber daya untuk memerangi peyakit ini.
<b>Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan</b>	
Sasaran 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara dan mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.	Banyak indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerusakan lingkungan yang hebat. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada pemerintah di tingkat daerah, yang menghadapi kendala-kendala serius dan memiliki kapasitas yang lemah.
Sasaran 10: Mengurangi hingga separuhnya pada 2015 proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman,	Data menunjukkan adanya tren yang membaik dalam hal sanitasi dan pasokan air. Namun demikian, seperti halnya kesehatan dan pendidikan, pemerintah daerah perlu melakukan upaya terpadu untuk mencapai sasaran ini pada 2015.
Sasaran 11: Mengurangi hingga separuhnya pada 2015 proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar.	
Sasaran 12: Pada 2020 paling tidak 10 juta penghuni pemukiman kumuh	

Sumber: BPS. 2005. Survei Sosial Ekono. Jakarta; BPS dan Departemen Kesehatan. 2004. *Survei Kesehatan Demografi*. Jakarta

Tabel A1.2: Indikator Ekonomi Negara

	Tahun Fiskal							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
<b>A. Pendapatan dan Pertumbuhan</b>								
1. PDB per kapita (\$, saat ini)	697,6	801,9	787,6	965,5	1.116,2	1.190,6	1.343,3	
2. Pertumbuhan PDB (% dalam harga tetap)	0,8	4,9	3,8	4,3	5,0	4,9	5,6	
a. Pertanian	2,2	1,9	4,1	2,8	4,8	2,1	2,5	
b. Industri	2,0	5,9	2,7	4,4	3,8	3,7	4,4	
c. Jasa	(1,0)	5,2	5,0	4,7	6,5	7,3	8,0	
<b>B. Simpanan dan Investasi</b>				(% PDB)				
1. Investasi Dalam Negeri Bruto	11,4	21,3	23,5	20,4	17,3	21,3	21,3	
2. Simpanan Nasional Bruto	19,5	31,8	31,5	26,4	24,9	24,2	26,3	
<b>C. Uang dan Inflasi</b>			(% perubahan tahunan)					
1. Indeks Harga Konsumen <sup>a</sup>	20,4	3,8	11,5	11,9	9,8	3,1	10,5	
2. Likuiditas Total (M2)	11,9	15,6	13,0	4,7	8,1	8,1	16,4	
<b>D. Keuangan Pemerintah</b>				(% PDB)				
1. Penghasilan dan Hibah	18,2	14,8	17,9	16,1	16,4	15,1	15,0	
2. Pengeluaran dan Pinjaman	21,1	15,9	20,3	18,2	18,1	16,2	15,5	
3. Surplus Fiskal Keseluruhan (deficit)	(2,8)	(1,2)	(2,4)	(2,1)	(1,7)	(1,1)	(0,5)	
<b>E. Neraca Pembayaran</b>								
1. Neraca Perdagangan (% dari PDB)	14,7	15,2	14,1	12,0	10,5	8,5	8,1	
2. Saldo Transaksi Berjalan (% dari PDB)	4,1	4,8	4,2	3,8	3,4	1,2	1,1	
3. Pertumbuhan (% perubahan tahunan) Ekspor	1,72	27,6	(12,3)	3,1	8,4	12,6	20,1	

Barang (\$)							
4. Pertumbuhan (% perubahan tahunan) Impor Barang (\$)	(4,2)	31,9	(14,1)	2,8	10,9	28,0	26,2

**F. Indikator  
Pembayaran  
Eksternal**

1. Gross Foreign Assets Outstanding, termasuk emas, \$ juta <sup>b</sup>	27,1	29,4	28,0	32,0	36,3	36,3	34,7
2. Cakupan impor (jumlah bulan impor yang bisa dibayar dari asset luar negeri)	6,0	5,3	5,7	6,0	6,8	5,9	4,9
3. Pembayaran Utang Luar Negeri (% ekspor barang dan jasa)	65,8	41,3	36,0	32,1	29,8	31,2	38,6
4. Total UtangLuar (% dari PDB)	105,8	85,9	81,1	64,4	56,8	53,9	47,4

**G. Memorandum  
Items**

1. PDB (harga saat ini, trilyun Rp.)	1.099,8	1.389,8	1.684,3	1.879,8	2.045,8	2.273,1	2.729,7
2. Nilai Tukar (Rp/\$), rata-rata)	7,855	8.422	1.026,1	9.314	8.577	8.939	9750
3. Jumlah penduduk (juta) <sup>c</sup>	200,7	205,8	208,4	211,1	213,7	216,4	221,3

( ) = negatif, PDB = produk domestik bruto

<sup>a</sup> berdasar pada tahun 2000

<sup>b</sup> Sejak Januari 1998, posisi resmi cadangan devisa telah digantikan oleh asset luar negeri bruto. Data 1995-1999 diambil dari United Nations, 2001. *Common Country Assessment for Indonesia*. Jakarta

<sup>c</sup> Menggunakan angka 1,35% sebagai rata-rata pertumbuhan per tahun untuk 1990-2000, karena sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia

Tabel A1.3: Indikator Kemiskinan dan Sosial Negara

Item	Periode		
	1985	1990	Tahun terakhir
<b>A. Indikator Jumlah Penduduk</b>			
1. Jumlah Penduduk Seluruhnya (juta) <sup>a</sup>	164,6	179,4	221,3 (2005)
2. Angka Pertumbuhan Penduduk Tahunan (% perubahan) <sup>a</sup>	2,2	2,0	1,25
<b>B. Indikator Sosial</b>			
1. Angka Kesuburan Total (kelahiran/perempuan) <sup>a</sup>	3,1 (1987)	3,0 (1991)	2,8 (1997)
2. Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) <sup>a</sup>	360 (1984-1988)	390 (1990-1994)	307 (2002-2003)
3. Angka Kematian Bayi (di bawah 1 tahun/1.000 kelahiran hidup) <sup>a</sup>	67,4 (1987)	67,8	35 (2003)
4. Usia Harapan Hidup saat Kelahiran (tahun) <sup>b</sup>			
a. Perempuan	61,5	61,5	68,2 (2002)
b. Laki-Laki	57,9	57,9	64,3 (2002)
5. Tingkat melek Huruf (%) <sup>b</sup>	69 (1980)	84	87,3 (2003)
a. Perempuan	66 (1980)	79	82,9 (2003)
b. Laki-Laki	83 (1980)	90	91,8 (2003)
6. Tingkat Pendaftaran Sekolah Dasar Kasar (%) <sup>c</sup>			105,8 (2003)
a. Perempuan	114	110	105,6 (2003)
b. Laki-Laki	120	115	105,6 (2003)
7. Tingkat Pendaftaran Sekolah Lanjutan Pertama Kasar (%) <sup>c</sup>		61,1 (1993)	81,1 (2003)
a. Perempuan	-	60,0 (1993)	82,4 (2003)
b. Laki-Laki	-	62,2 (1993)	79,9 (2003)
8. Kekurangan Gizi pada Anak-Anak (% anak di bawah usia 5 tahun) <sup>d</sup>	51 (1986)	44 (1989)	28,2 (2003)
9. Penduduk dengan Akses terhadap Air yang Aman (%) <sup>c</sup>	-	60,3 (1993)	75,0 (2003)
10. Penduduk dengan Akses terhadap Sanitasi (%) <sup>c</sup>	-	36,9 (1993)	58,8 (2003)
11. Pengeluaran untuk Pendidikan Umum (% dari PDB) <sup>g</sup>	1,5	1,0	0,8 (2004)
12. Indeks Pembangunan Manusia <sup>b</sup>	0,578	0,618	0,692 (2002)
Ranking	81	89	110 (2003)
13. Indeks Pembangunan terkait Gener <sup>b</sup>	-	-	0,685 (2002)
Ranking	-	-	90 (2003)
<b>C. Indikator Kemiskinan</b>			
1. Angka Kemiskinan (garis kemiskinan nasional) <sup>f</sup>	21,6	15,1	17,8 (2006)
2. Kesenjangan Kemiskinan <sup>f</sup>	-	2,68 (1990)	2,89 (2004)
3. Indeks Keparahan Kemiskinan <sup>f</sup>	-	0,74 (1990)	0,78 (2004)
4. Ketidaksetaraan (Rasio Gini)	3 (1984)	0,32 (1990)	0,35 (2004)
5. Nilai Indeks Kemiskinan Manusia <sup>e</sup>	-	27,6	17,8 (2002)
6. Ranking Indeks Kemiskinan Manusia <sup>e</sup>	-	-	33 (2002)

- = tidak ada data, PDB= produk domestik bruto

- <sup>a</sup> Biro Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), United Nations Populations Fund (UNFPA), Proyeksi Penduduk Indonesia, 2000-2005, Jakarta 2005. Data didasarkan pada sensus penduduk tahun 2000.
- <sup>b</sup> UNDP, *Human Development Report 2005*. Tersedia di <http://hdr.undp.org>
- <sup>c</sup> Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) BPS, data dari berbagai tahun.
- <sup>d</sup> Statistik BPS tentang anak dengan berat badan rendah untuk usianya (% di bawah usia 5) mencakup baik kekurangan gizi parah dan sedang; air yang aman artinya sumur atau sumber air yang dialirkan melalui pipa, pompa, atau terlindungi.
- <sup>e</sup> [http://hdr.undp.org/statistics/data/country\\_fact\\_sheets/cty\\_fs\\_IDN.html](http://hdr.undp.org/statistics/data/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html) untuk indeks pembangunan manusia terakhir dan [http://globalis.gvu.unu.edu/indicator\\_detail.cfm?Country=ID&IndicatorID=15](http://globalis.gvu.unu.edu/indicator_detail.cfm?Country=ID&IndicatorID=15) untuk indeks pembangunan manusia pada 1985 dan 1990
- <sup>f</sup> BPS
- <sup>g</sup> Departemen Pendidikan Nasional

Tabel A1.4: Indikator Lingkungan Negara

Indikator	Tahun Awal	Tahun Terakhir
<b>A. Efisiensi Energi dan Emisi</b>		
1. GPD/Unit Penggunaan Energi (PPP\$/kgoe)	4,2 (2000) <sup>a</sup>	4,1 (2002) <sup>a</sup>
2. Penggunaan Bahan Bakar secara Tradisional (% dari total penggunaan energi)	24,8 (2001) <sup>a</sup>	17,6 (2002) <sup>a</sup>
3. Emisi CO <sub>2</sub>		
a. Juta ton	251,5 (2001) <sup>a</sup>	275,2 (2002) <sup>a</sup>
b. Ton per kapita	1,18 (2001) <sup>a</sup>	1,44 (2002) <sup>a</sup>
<b>B. Polusi Air: Air dan Sanitasi</b>		
1. % Penduduk Perkotaan yang Memiliki Akses terhadap Air yang Aman	88,2 (2000) <sup>c</sup>	86,7 (2004) <sup>c</sup>
2. % Penduduk Pedesaan yang Memiliki Akses terhadap Air yang Aman	64,7 (2000) <sup>c</sup>	68,7 (2004) <sup>c</sup>
3. % Pendudukan Perkotaan yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi	64,9 (2000) <sup>c</sup>	70,2 (2004) <sup>c</sup>
<b>C. Penggunaan Lahan dan Penggundulan Hutan</b>		
1. Wilayah Hutan (ribuan km persegi)	978,5 (2000) <sup>a</sup>	884,9 (2005) <sup>a</sup>
2. Wilayah Hutan (% dari seluruh wilayah)	54 (2000) <sup>a</sup>	48,8 (2005) <sup>a</sup>
3. Penggundulan Hutan Tahunan Rata-Rata		
a. Kilometer persegi	13.124 (2000) <sup>a</sup>	0 (2002) <sup>a</sup>
b. % perubahan	1,2 (1999) <sup>a</sup>	0 (2000) <sup>a</sup>
4. Kepadatan Penduduk Pedesaan (orang/km <sup>2</sup> tanah pertanian)	575 (2002) <sup>a</sup>	556,8 (2003) <sup>a</sup>
5. Lahan Pertanian (% dari seluruh luas lahan)	11,3 (2002) <sup>a</sup>	11,06 (2003) <sup>a</sup>
6. Lahan Tanaman Permanen (% dari seluruh luas lahan)	7,3 (2002) <sup>a</sup>	7,4 (2003) <sup>a</sup>
<b>D. Keragamanhayati dan Kawasan Lindung</b>		
1. Kawasan Lindung Nasional		
a. Juta km persegi	35,74 (2001) <sup>a</sup>	37,2 (2005) <sup>a</sup>
b. % dari total luas lahan	19,7 (2001) <sup>a</sup>	20,6 (2005) <sup>a</sup>
2. Mamalia (jumlah spesies yang terancam)	147 (2001) <sup>a</sup>	147 (2005) <sup>a</sup>
3. Burung (jumlah spesies yang terancam)	114 (2001) <sup>a</sup>	114 (2005) <sup>a</sup>
4. Tumbuhan Tingkat Tinggi (jumlah spesies yang terancam)	264 (2002) <sup>a</sup>	384 (2005) <sup>a</sup>
5. Reptil (jumlah spesies yang terancam)	31 (1999) <sup>a</sup>	28 (2003) <sup>a</sup>
6. Amphibi (jumlah spesies yang terancam)	22 (1997) <sup>a</sup>	0 (2003) <sup>a</sup>
7. Ikan (jumlah spesies yang terancam)		68 (2003) <sup>a</sup>
<b>E. Kawasan Perkotaan</b>		
1. Penduduk Perkotaan		
a. Juta	97,7 (2003) <sup>a</sup>	101,61 (2004) <sup>a</sup>

b. % dari seluruh jumlah penduduk	42 (2001) <sup>b</sup>	48,3 (2005) <sup>b</sup>
2. Penggunaan Air Per Kapita (liter/hari)	-	-
3. Pengolahan Air Limbah (%)	-	3 (2006) <sup>a</sup>
4. Limbah Padat yang Dihasilkan Per Kapita (kg/hari)	0,66 (1998) <sup>a</sup>	0,66 (1998) <sup>a</sup>

- = tidak ada data, kg= kilogram, kgo= kilogram setara minyak, km<sup>2</sup>= km persegi, PPP = *purchasing power parity* (kesetaraan daya beli)

Sumber:

<sup>a</sup> Indikator Pembangunan Dunia, di <http://devdata.worldbank.org/wdi2005/cover.htm>.

<sup>b</sup> World Bank. 2005. *The Little Green Data Book*. 2005

<sup>c</sup> United Nations Development Programme. 2005. *Millennium Development Goals Report, 2005*.

<sup>d</sup> Survei Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) 2004

Tabel A1.5: Matriks Koordinasi Pembangunan

Sektor	Strategi ADB	Strategi dan/atau aktivitas utama mitra pembangunan lain	
Energi	Dukungan akan fokus pada pengembangan energi, energi yang dapat diperbaharui, jaringan daerah dan inisiatif efisiensi energi, dengan tujuan untuk mengurangi transmisi daya dan kerugian distribusi secara berarti	Jepang	Mendukung pembangkitan daya listrik dari sumber energi konvensional dan dapat diperbaharui
		Bank Dunia	Memperbaiki kerangka kerja hukum dan kebijakan untuk membantu menarik investor sektor swasta. Melakukan restrukturisasi entitas listrik dan gas. Memperbaiki struktur tarif di sektor gas.
Transportasi dan Komunikasi	Dukungan akan dirancang untuk meningkatkan penyediaan prasarana jalan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.	Australia	Melakukan perbaikan jalan di Indonesia bagian Timur
		Jerman	Fokus untuk mewujudkan mobilitas yang lebih besar pada kelompok penduduk dengan penghasilan lebih rendah melalui pengiriman barang (dengan transportasi kontainer) dan transportasi penumpang daerah (kereta api) di kawasan metropolitan Jakarta.
		Jepang	Membangun prasarana transportasi di Jawa dan Sulawesi
		Bank Dunia	Membangun prasarana transportasi dan komunikasi nasional dan daerah.
Keuangan	Dukungan terhadap reformasi sektor keuangan akan mencakup supervisi yang lebih baik terhadap pasar-pasar keuangan non-bank, pengembangan pasar modal, pengembangan dan peningkatan jaminan dan keuangan mikro, dan pendanaan inovatif untuk prasarana.	Australia	Membantu reformasi audit, kebhendahaan, dan perpajakan.
		Bank Dunia	Memperkuat dan meragamkan sektor keuangan melalui jaringan pengaman keuangan, memperbaiki akses usaha kecil menengah ke pendanaan mikro. Memperkuat sektor perbankan.
Kesehatan, Gizi, dan Perlindungan Sosial	Bantuan akan ditekankan untuk memperbaiki penyediaan layanan daerah	Australia	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, termasuk pencegahan HIV/AIDS, kesehatan perempuan, kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu (Indonesia bagian timur), bantuan kesehatan Bali, pengembangan kapasitas untuk layanan kesehatan yang terdesentralisasi.

		Kanada	Memperbaiki kualitas layanan kesehatan yang terdesentralisasi melalui (i) perbaikan kapasitas pemerintah setempat untuk menghubungkan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, dan untuk mengembangkan rencana fiskal strategis; (ii) memperkuat kapasitas pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan, pedoman, dan sistem untuk memastikan desentralisasi secara efektif; dan (iii) memperbaiki kapasitas pemerintah setempat untuk merencanakan dan melaksanakan strategi konsultasi dan menggunakan hasil-hasil konsultasi.
		Uni Eropa	Memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan kesehatan
		Jerman	Menyusun pendekatan-pendekatan dalam kebijakan kesehatan serta pelaksanaannya dalam proses desentralisasi dan deregulasi. Dukungan juga akan diberikan kepada pihak berwenang di tingkat propinsi, kabupaten, dan daerah untuk bisa melakukan pendanaan otonom dan pelaksanaan kebijakan kesehatan sebagai layanan untuk penduduk yang didorong oleh permintaan.
		Belanda	Membantu pengembangan pendidikan tentang masa kanak-kanak usia dini dan HIV/AIDS.
		UNICEF	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan perawatan anak-anak usia dini dan perempuan secara efektif di rumah dan dalam pencegahan dan pengobatan dini penyakit.</li> <li>▪ Perlindungan sosial dan hukum dari semua bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan pengabaian anak-anak baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, dengan memberikan perhatian khusus pada anak-anak perempuan. Bidang yang ditangani mencakup eksploitasi seks komersial, penjualan dan perdagangan anak-anak, kekerasan terhadap anak, anak-anak yang tinggal dan bekerja di jalanan,</li> </ul>

			<p>pendaftaran kelahiran dan pengadilan anak. Memperkuat badan-badan perlindungan anak di tingkat nasional dan propinsi dan mendukung reformasi hukum dan penegakan hukum yang berlaku dengan lebih baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satu program bantuan darurat untuk merespons pada kebutuhan prioritas anak-anak dan perempuan yang berada dalam situasi darurat. Perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan mendesak anak-anak dan perempuan, termasuk makanan yang diperkaya, fasilitas air dan sanitasi, obat-obatan dan perlengkapan pendidikan, dan intervensi untuk menangani trauma psiko-sosial.</li> </ul>
		Amerika Serikat	Pasokan air dan sanitasi di pedesaan untuk memperbaiki kesehatan dan kebersihan ibu dan anak.
		WHO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat komunikasi, pemantauan, pencegahan flu burung</li> <li>▪ Pemberian layanan kesehatan dasar untuk penduduk yang terkena dampak bencana dan para pengungsi internal.</li> <li>▪ Mengurangi polio dan TBC</li> </ul>
		Bank Dunia	Memperbaiki kualitas dan cakupan layanan kesehatan dasar. Membangun kapasitas kesehatan ibu, kesehatan anak, dan gizi.
Pendidikan	Dukungan akan difokuskan pada perbaikan penyediaan layanan di tingkat daerah	Australia	Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan, dengan menekankan pada pendidikan dasar dan sekolah Islami (termasuk para guru).
		Kanada	Memperbaiki kualitas layanan sosial yang terdesentralisasi
		Uni Eropa	Mendukung pendidikan dasar (propinsi-propinsi Nusa Tenggara) dan memperkuat tata kelola pendidikan.
		Belanda	Mendukung pendidikan dasar, pendidikan kejuruan dan teknik, pelatihan guru.
		Jepang	Mendukung pendidikan ICT (Jogjakarta), pendidikan dasar, pendidikan permesinan/sipil (Sulawesi) dan pendidikan politeknik.
		UNICEF	Program pendidikan akan fokus pada

			masalah-masalah struktural yang menghalangi akses, meningkatkan tingginya angka putus sekolah, dan berdampak negatif pada kualitas sistem pendidikan.
		Amerika Serikat	Memperbaiki kualitas dan relevansi pendidikan dasar di Indonesia di sekolah umum dan swasta, serta sekolah agama dan sekuler, dengan cara bekerja dengan komunitas dan pemerintah setempat untuk memperbaiki manajemen sekolah dan melatih para guru.
		Bank Dunia	Mendukung pendidikan dasar, kejuruan dan teknik
Pasokan Air Sanitasi dan Pengelolaan Limbah	Dukungan akan ditekankan untuk memperbaiki penyediaan pelayanan di tingkat daerah	Australia	Memperbaiki kapasitas perencanaan dan penyelenggaraan, dan layanan penyediaan pasokan air dan layanan sanitasi
		Belanda	Mendukung pengelolaan sumber daya air dan irigasi; membangun kapasitas untuk pengelolaan sektor air.
		Jepang	Memperbaiki pasokan air di daerah perkotaan di Solo, Makasar, Bandar Lampung, Bali Selatan, dan Sumatra. Mengembangkan sistem saluran limbah di Medan dan Denpasar. Mendukung pengelolaan limbah industri
		Bank Dunia	Memperbaiki kualitas dan cakupan penyediaan air dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Pertanian dan Sumber Daya Alam	Dukungan akan ditekankan pada manajemen sumber daya air, terutama melalui pendanaan proyek. Dukungan akan diberikan untuk manajemen sumber daya air terpadu, termasuk investasi dalam prasarana dan pengelolaan fasilitas multi fungsi yang dibangun dalam konteks aliran sungai, serta pengelolaan banjir.	Australia	Mendukung manajemen terumbu karang
		Kanada	Melindungi dan menciptakan kehidupan berkelanjutan melalui akses yang adil terhadap sumber daya alam serta pengelolaannya yang berkelanjutan.
		Uni Eropa	Memperbaiki manajemen sumber daya air (propinsi Nusa Tenggara), pertanian beririgasi (Jawa dan Sulawesi)
		Belanda	Mendukung reformasi sumber daya air dan irigasi, termasuk pengelolaan pangan, dan pengelolaan daerah aliran sungai.
		Amerika Serikat	Mendukung pengelolaan sumber daya air
		UNDP	Mendukung peningkatan lembaga-lembaga kunci dalam tata kelola lingkungan dan menggalakkan revisi

			kebijakan dan regulasi di berbagai tataran tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
		Bank Dunia	Mendukung pengelolaan sumber daya air setempat; penelitian, penyuluhan dan irigasi pertanian; serta pengelolaan ekosistem terumbu karang.
Hukum, Pengelolaan Ekonomi dan Kebijakan Publik	ADB akan mendukung agenda desentralisasi Pemerintah dengan tetap fokus pada pembaharuan kebijakan dan pengembangan kapasitas.	Australia	Meningkatkan bantuan untuk memperkuat tata kelola melalui bantuan untuk pembaharuan ekonomi, pembaharuan hukum dan peradilan, penggalakan dan perlindungan hak asasi manusia dan bantuan yang terus menerus untuk program-program melawan terorisme.
		Kanada	Mendukung pembaharuan kerangka kerja fiskal sistem pengelolaan keuangan, dan administrasi yang terdesentralisasi.
		Kerajaan Inggris	Memperkuat efektivitas pembangunan melalui penyelarasan. Prioritas ini menekankan pada desentralisasi melalui program-program yang berkaitan dengan tata kelola yang terdesentralisasi, mobilisasi masyarakat sipil, dan pengentasan kemiskinan. Mendukung kemitraan untuk pembaharuan tata kelola untuk menggalakkan dan mendukung program-program pembaharuan.
		Uni Eropa	Mendukung pembaharuan peradilan dan langkah-langkah anti korupsi, memberdayakan parlemen daerah dan masyarakat sipil, kebijakan tentang kompetisi, dan tata kelola korporasi.
		Jerman	Memberikan layanan penasehatan tentang desentralisasi dan tata kelola yang baik untuk menciptakan kondisi pembangunan politik, ekonomi dan sosial yang stabil yang mengarah pada pengentasan kemiskinan.
		Belanda	Mendukung penguatan partisipasi sektor swasta dalam prasarana perkotaan; peningkatan pemerintah daerah untuk desentralisasi; pembaharuan hukum dan peradilan.
		UNDP	Mendorong tata kelola yang baik di segala aspek UNDP, termasuk memastikan berlakunya hukum, memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas

			<p>sektor publik dan memberantas praktik-praktik korupsi merupakan elemen yang sangat penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Memperbaiki pengelolaan sumber daya publik dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sektor publik dan menumbuhkan kesadaran publik yang lebih besar tentang perlunya tata kelola yang baik.</p>
		Amerika Serikat	Memperkuat tata kelola demokratis dan terdesentralisasi yang efektif.
		Bank Dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjadikan perencanaan pembangunan lebih tanggap terhadap para konstituen</li> <li>▪ Memperbaiki pengelolaan keuangan publik.</li> <li>▪ Memperkuat akuntabilitas pemerintah di tingkat daerah melalui satu kerangka kerja desentralisasi yang lebih koheren.</li> <li>▪ Meningkatkan kredibilitas pemerintah, ketidakberpihakan dan jangkauan sektor peradilan.</li> </ul>
Industri dan Perdagangan		Australia	Memperkuat usaha kecil menengah (SME) di Indonesia timur.
		Kanada	Meningkatkan pengembangan sektor swasta di tingkat SME melalui (i) menciptakan pertumbuhan SME yang berkelanjutan dan menciptakan lebih banyak pekerjaan yang lebih baik secara adil; dan (ii) memperkuat institusi umum dan swasta untuk mendukung pasar daerah dan nasional yang berdaya saing dan berjalan baik untuk SME.
		Uni Eropa	Dukungan bagi SME dan layanan pengembangan usaha di Jawa Tengah
		Jerman	Memperkuat daya saing SME dan instrumen pendanaan.
		Jepang	<p>Mendukung kebijakan untuk mendorong investasi, kebijakan tentang daya saing dan administrasi, standar baku industri dan hak kepemilikan atas propert;</p> <p>pengembangan sumber daya manusia untuk SME yang berkaitan dengan industri manufaktur.</p> <p>Pengembangan kapasitas untuk menjalankan kebijakan-kebijakan WTO.</p>

Bantuan Kemanusiaan dan Tanggapan Darurat	<p>ADB akan memberikan bantuan prasarana fisik dan sosial serta penghidupan untuk Aceh dan Nias.</p> <p>ADB akan membantu identifikasi risiko, membangun kapasitas pengelolaan bencana dan pengelolaan bahaya di tingkat negara.</p>	Australia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan kembali wilayah-wilayah yang terkena dampak tsunami atau bencana lain melalui Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (<i>Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development</i>).</li> <li>▪ Program rehabilitasi Aceh dengan menekankan pada kesehatan, pendidikan, tata kelola dan pemulihan prasarana umum.</li> <li>▪ Mengembangkan sistem untuk mengelola dan merespons dampak bencana alam.</li> </ul>
		Kanada	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan aktivitas rekonstruksi dan layanan publik.</li> <li>▪ Menciptakan dan memulihkan penghidupan yang berkelanjutan.</li> <li>▪ Memulihkan dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan.</li> </ul>
		Kerajaan Inggris	Mendukung penghidupan dan prasarana komunitas melalui dana multidonor dan badan-badan multilateral.
		Uni Eropa	Mendukung perawatan kesehatan, air dan sanitasi, hunian, dan pemulihan penghidupan di Aceh.
		Jerman	Mendukung rekonstruksi prasarana desa, termasuk fasilitas layanan kesehatan dan sanitasi.
		Belanda	Mendukung prasarana sumber daya air dan pasokan air dan transportasi di Aceh.
		Jepang	Mendukung prasarana transportasi dan sosial di Aceh.
		UNDP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperbaiki kapasitas Indonesia agar bisa pulih secara efektif dari konflik dan mencegah kemunculannya kembali.</li> <li>▪ Mendukung pengelolaan dan mitigasi bencana</li> </ul>
		Amerika Serikat	Mendukung prasarana transportasi dan memperkuat tata kelola daerah di Aceh.
		Bank Dunia	Dukungan multi sektor untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias melalui dana multidonor.

**Tabel A1.6: Indikator Portofolio – Jumlah dan Penilaian Portofolio**  
(pinjaman sektor publik, mulai 31 Juli 2006)

Sektor	Jumlah Pinjaman Bersih		Penilaian														
			Total		Sangat Memuaskan		Memuaskan		Agak Memuaskan		Tidak Memuaskan		Potensi Masalah		Berisiko		
	\$ juta	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Pertanian dan Sumber Daya Alam	531,5	16,6	12	30,8	0	0	12	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendidikan	291,2	9,1	2	5,1	0	0	2	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energi	485,2	15,1	3	7,7	0	0	3	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuangan	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesehatan, Gizi dan Perlindungan Sosial	107,6	3,0	2	5,0	0	0	3	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri dan Perdagangan	85,0	2,6	1	2,6	0	0	1	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hukum dan Pengelolaan Sektor Publik	885,6	27,6	7	17,9	1	14,3	6	85,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multisektor	417,5	13,0	9	23,1	0	0	9	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportasi dan Komunikasi	341,0	10,6	2	5,1	0	0	2	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasokan air, Sanitasi, dan Pengolahan Limbah	65,0	2,4	1,0	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3209,6</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2,6</b>	<b>38</b>	<b>97,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No. = jumlah

Sumber: Perkiraan Bank Pembangunan Asia (ADB)

**Tabel A1.7: Indikator Portofolio – Penyerapan dan Transfer Bersih Sumber Daya**  
(pinjaman sektor publik, mulai 31 Desember 2005)

<b>Penyerapan dan Transfer</b>	<b>OCR</b>	<b>ADF</b>	<b>Total</b>
<b>Penyerapan<sup>a</sup></b>			
Jumlah Total Dana yang Tersedia untuk Ditarik (\$ juta)	3.032,5	575,4	3.607,9
Jumlah yang Disalurkan (\$ juta, kumulatif)	2.163,2	160,3	2.323,5
Persentase yang Disalurkan (jumlah yang Disalurkan /jumlah yang tersedia)	71,3	27,8	64,4
Penyerapan (\$ juta, tahun terakhir)	947,3	67,7	1.015,0
Rasio Penyerapan (%) <sup>b</sup>	50,0	13,0	42,1
<b>Transfer Bersih Sumber Daya (\$ juta)</b>			
2001	(47,9)	4,4	(43,5)
2002	121,6	1,0	122,6
2003	(431,5)	30,1	(401,4)
2004	(282,1)	28,9	(253,2)
2005	107,0	37,6	144,6

( ) = negatif, ADF = *Asian Development Fund* (Dana Pembangunan Asia), OCR = *ordinary capital resources* (sumber daya modal umum)

<sup>a</sup> termasuk pinjaman yang ada saat ini dan pinjaman dengan penyerapan selama 2005

<sup>b</sup> Rasio penyerapan selama tahun tersebut terhadap saldo pinjaman bersih yang tidak tersalurkan pada awal tahun dikurangi pembatalan selama tahun tersebut. Pinjaman efektif selama tahun tersebut juga telah ditambahkan pada saldo awal pinjaman yang tidak tersalurkan.

Sumber: perkiraan Bank Pembangunan Asia.

**Tabel A1.8: Indikator Portofolio – Penilaian Evaluasi per Sektor**  
(1996-2005)

<b>Sektor</b>	<b>Sangat Berhasil</b>		<b>Berhasil</b>		<b>Agak Berhasil</b>		<b>Tidak Berhasil</b>		<b>Tidak ada Penilaian</b>	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Pertanian dan Sumber Daya Alam	0	0	5	55,6	2	22,2	2	22,2	0	0
Energi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
Keuangan	0	0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0
Industri dan Mineral Non-Bahan Bakar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multisektor	0	0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0
Lain-Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prasarana Sosial	1	9,1	7	63,6	3	27,3	0	0,0	0	0
Transportasi dan Komunikasi	3	37,5	5	62,5	0	0,0	0	0,0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>12,5</b>	<b>19</b>	<b>59,4</b>	<b>7</b>	<b>21,9</b>	<b>2</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No. = Jumlah

Sumber: *Operations Evaluation Department* (Departemen Evaluasi Operasi)/*Post Evaluation Information System* (Sistem Informasi Pasca Evaluasi)

**Tabel A1.9: Status Pelaksanaan Portofolio**  
(pinjaman sektor publik, mulai 31 Desember 2005)

Sektor	No. Loan	Seq No.	Nama	Jumlah Bersih Pinjaman		Tanggal Persetujuan (hh/bb/tt)	Tanggal Mulai (hh/bb/tt)	Tanggal Berakhir (hh/bb/tt)		Kemajuan (% selesai)
				OCR	ADF			Awal	Revisi	
AG	1469		Integrated Pest Management for Smallholder Estate Crops Project . [ <i>Proyek Pengendalian Hama Terpadu untuk Perkebunan Rakyat</i> ]	38,2	0,9	26-Sep-96	07-Jan-97	30-Sep-04	31-Des-05	99
AG	1479		South Java Flood Control Sector Project [ <i>Proyek Pengendalian Banjir Jawa bagian Selatan</i> ]	88,2		07-Nov-96	27-Jan-97	30-Sep-03	30-Sep-05	97
AG	1526		Participatory Development of Agriculture Technology [ <i>Pengembangan Teknologi Pertanian Partisipatif</i> ]	56,2		01-Jul-96	27-Agt-97	30-Sep-04	31-Des-05	90
AG	1570		Coastal Community Development and Fisheries Resource Management Project [ <i>Proyek Pengembangan Masyarakat Daerah Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan</i> ]	18,5	17,0	04-Nov-97	21-Apr-98	31-Des-03	31-Des-05	98
AG	1571		Coastal Community Development and Fisheries Resource Management Project [ <i>Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. dan Pengembangan Masyarakat Daerah Pantai</i> ]		14,0	04-Nov-97	21-Apr-98	31-Des-03	31-Des-05	98
AG	1579		Northern Sumatra Irrigated Agriculture Sector Project [ <i>Proyek Sektor Pertanian Beririgasi Sumatra Utara</i> ]	68,2		13-Nov-97	23-Feb-98	31-Okt-04	31-Des-05	83
AG	1605		Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project. [ <i>Proyek Terpadu Pembangunan Kawasan dan Konservasi Sulawesi Tengah</i> ]	23,1		27-Jan-98	15-Mei-98	30-Sep-05	31-Des-05	89
AG	1770		Marine and Coastal Resources Management Project [ <i>Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut</i> ]		55,8	26-Okt-00	27-Sep-01	30-Jun-07		53
AG	1909		Poor Farmer Income Improvement Through Innovation Project. [ <i>Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Miskin melalui Inovasi</i> ]		60,4	15-Agt-02	17-Jul-03	30-Jun-08		29
AG	1962		Coral Reef Rehabilitation and Management II [ <i>Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang</i> ]		35,9	06-Des-02	07-Nov-03	31-Des-09		21
AG	2064		Participatory Irrigation Sector Project. [ <i>Proyek Sektor Irigasi Partisipatif</i> ]		19,0	19-Des-03	02-Jun-05	30-Jun-11		2
AG	2065		Participatory Irrigation Sector Project [ <i>Proyek Sektor Irigasi Partisipatif</i> ]	54,0		19-Des-03	02-Jun-05	30-Jun-11		2
ED	1792		Technological and Professional Skills Development Sector Project. [ <i>Proyek Sektor Pengembangan Ketrampilan Teknologi dan Profesional</i> ]	180,0		29-Nov-00	04-Jun-01	30-Jun-07		82
ED	1863		Decentralized Basic Education [ <i>Pendidikan Dasar Terdesentralisasi</i> ]		111,2	29-Nov-01	20-Mei-02	31-Des-08		59
EN	1271		Power XXIII [ <i>Pembangkit XXIII</i> ]	184,2		25-Nov-93	26-Mei-94	31-Des-00	30-Sep-06	71

ADF= Asian Development Fund (Dana Pembangunan Asia), AG = agriculture and natural resources (pertanian dan sumber daya alam), ED= education (pendidikan), EN = energy (energi), MS = multisektor, No. = jumlah, OCR = ordinary capital resources (sumber daya modal umum)

Sumber: Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)

Sektor	No. Loan	Seq No.	Nama	Jumlah Bersih Pinjaman		Tanggal Persetujuan (hh/bb/tt)	Tanggal Mulai (hh/bb/tt)	Tanggal Berakhir (hh/bb/tt)		Kemajuan (% selesai)
				OCR	ADF			Awal	Revisi	
EN	1982		Renewable Energy Development Sector Project [Proyek Sektor Pengembangan Energi Terbarukan]	161,0		19-Des-02	27-Okt-04	30-Sep-08		13
EN	1983		Power Transmission Improvement Sector Project [Proyek Sektro Perbaikan Transmisi Daya Listrik]	140,0		19-Des-02	27-Okt-04	30-Sep-08		13
HL	1810		Decentralized Health Services Project [Proyek desentralisasi pelayanan kesehatan]		72,7	14-Des-00	25-Jun-01	30-Sep-06		75
HL	2074		Second Decentralized Health Services Project (DHS2)	64,8		19-Des-03	29-Mar-05	31-Des-10		0
HL	2075		[Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Kedua (DHS2)] Second Decentralized Health Services Project (DHS2)		35,0	19-Des-03	29-Mar-05	31-Des-10		0
IN	1978		Small and Medium Enterprises Export Development Project [Proyek Pengembangan Ekspor Usaha Kecil Menengah]	85,0		17-Des-02	18-Mei-04	19-Mei-09		Df/credit
LW	1678		Community and Local Government Support Sector Development Program (CLGSSDP) [Program Pengembangan Sektor Bantuan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (CLGSSDP)]	86,4		25-Mar-99	25-Mar-99	30-Sep-03	31-Mar-03	100
LW	1964		Sustainable Capacity Building for Decentralization [Pengembangan Kapasitas. Berkelanjutan untuk Desentralisasi]		46,0	10-Des-02	05-Sep-03	30-Jun-09		15
LW	2126		State Audit Reform Sector Development Program [Program Pengembangan Sektor Pembaharuan Audit Negara]	200,0		13-Des-04	17-Des-04	31-Des-07		Program
LW	2127		State Audit Reform Sector Development Program [Program Pengembangan Sektor Pembaharuan Audit Negara]		23,9	13-Des-04	17-Des-04	30-Jun-10		10
LW	2192		Local Government Finance and Governance Reform Program [Program Pembaharuan Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah]	300,0		03-Nov-05	29-Des-05	30-Jun-07		Program
LW	2193		Local Government Finance and Governance Reform Sector Development Project [Proyek Pengembangan Sektor Pembaharuan Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah]		29,6	03-Nov-05	29-Des-05	30-Jun-09		0
LW	2228		Development Policy Support Program [Program Bantuan Pengembangan Kebijakan]	200,0		21-Des-05	23-Des-05	31-Des-06		Program
MS	1583	1	Rural Income Generation [Peningkatan Penghasilan Pedesaan]	20,1		25-Nov-97	18-Jun-98	30-Sep-05	31-Dec-06	88
MS	1583	2	Rural Income Generation [Peningkatan Penghasilan Pedesaan]	32,7		25-Nov-97	18-Jun-98	30-Sep-05	31-Dec-06	88
MS	1587		Metropolitan Medan Urban Development Project [Proyek Pengembangan Perkotaan Medan Metropolitan]	82,8		08-Des-97	30-Mar-98	30-Sep-03	31-Dec-06	80

ADF = Asian Development Fund (Dana Pembangunan Asia); EN = energi; FI = keuangan; HL = kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial; HS = sangat memuaskan; IN = perdagangan dan industri; IP = kemajuan pelaksanaan; LW = hukum dan pengelolaan sektor publik; MS = multisektor; No. = nomor; OCR = ordinary capital resources (sumber daya modal umum).  
Sumber: Asian Development Bank

Sektor	No. Loan	Seq No.	Nama	Jumlah Bersih Pinjaman		Tanggal Persetujuan (hh/bb/tt)	Tanggal Mulai (hh/bb/tt)	Tanggal Berakhir (hh/bb/tt)		Kemajuan (% selesai)
				OCR	ADF			Awal	Revisi	
MS	1765		Community Empowerment for Rural Development [Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembungan Desa]		42,7	19-Okt-00	12-Mar-01	30-Jun-07		55
MS	1765		Community Empowerment for Rural Development Project [Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa]	38,0		19-Okt-00	12-Mar-01	30-Jun07		55
MS	2072		Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project [Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman]	68,6		19-Des-03	31-Mar-05	31-Des-09		0
MS	2073		Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project [Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman]		19,9	19-Des-03	31-Mar-05	31-Des-09		0
MS	2163		Community Water Services and Health Project [Proyek Layanan Air dan Kesehatan bagi Masyarakat]	34,1		07-Apr-05	12-Apr-06	31-Des-11		0
MS	2164		Community Water Services and Health Project [Proyek Layanan Air dan Kesehatan bagi Masyarakat]		28,5	07-Apr-05	12-Apr-06	31-Des-11		0
MS	2221		Rural Infrastructure Support Project [Peningkatan Infrastruktur Perdesaan]		50,1	19-Des-05	20-Jun-06	31-Mar-09		0
TC	1798		Road Rehabilitation (Sector) Project [Proyek (Sektor) Rehabilitasi Jalan]	190,0		11-Des-00	28-Sep-01	31-Mar-05	28-Feb-07	60
TC	2184		Road Rehabilitation II [Rehabilitasi Jalan II]	151,0		29-Sep-05		31-Des-10		60
<b>TOTAL</b>				<b>2.565,2</b>	<b>644,3</b>					

ADF = Asian Development Fund (Dana Pembangunan Asia) , MS = multisektor, No. = nomor, OCR = ordinary capital resources (sumber daya modal umum), PS = agak memuaskan, S = memuaskan, Seg = segmen (berkaitan dengan pinjaman dengan lebih dari satu kewenangan penarikan), TC = transportasi dan komunikasi.  
Sumber: Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)

Sektor	No. Loan	Seq No.	Nama	Kontrak/ Komitmen Kumulatif (\$ juta)	Penyerapan Kumulatif (\$ juta)	Penilaian		Potensi Masalah <sup>a</sup>	Berisiko <sup>b</sup>
						IP	DO		
AG	1469		Integrated Pest Management for Smallholder Estate Crops Project. [Proyek Pengendalian Hama Terpadu untuk Perkebunan Rakyat]	25,0	29,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	1479		South Java Flood Control Sector Project [Proyek Pengendalian Banjir Jawa bagian Selatan]	73,8	84,4	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	1526		Participatory Development of Agriculture Technology [Pengembangan Teknologi Pertanian Partisipatif]	39,5	46,7	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	1570		Coastal Community Development and Fisheries Resource Management Project [Proyek Pengembangan Masyarakat Daerah Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan]	14,0	15,5	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	1571		Coastal Community Development and Fisheries Resource Management Project [Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. dan Pengembangan Masyarakat Daerah Pantai]	12,7	12,5	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	1579		Northern Sumatra Irrigated Agriculture Sector Project [Proyek Sektor Pertanian Beririgasi Sumatra Utara]	57,0	56,3	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	1605		Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project. [Proyek Terpadu Pembangunan Kawasan dan Konservasi Sulawesi Tengah]	18,5	20,2	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	1770		Marine and Coastal Resources Management Project [Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut]	29,0	24,4	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	1909		Poor Farmer Income Improvement Through Innovation Project [Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Miskin melalui Inovasi]	13,4	10,5	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	1962		Coral Reef Rehabilitation and Management II [Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang]	7,4	4,9	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	2064		Participatory Irrigation Sector Project. [Proyek Sektor Irigasi Partisipatif]	0,0	0,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
AG	2065		Participatory Irrigation Sector Project. [Proyek Sektor Irigasi Partisipatif]	0,0	0,3	S	S	Tidak ada	Tidak ada
ED	1792		Technological and Professional Skills Development Sector Project. [Proyek Sektor Pengembangan Ketrampilan Teknologi dan Profesional]	127,2	107,6	S	S	Tidak ada	Tidak ada
ED	1863		Decentralized Basic Education [Pendidikan Dasar Terdesentralisasi]	44,9	40,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
EN	1271		Power XXIII [Pembangkit XXIII]	1784,4	158,8	S	S	Tidak ada	Tidak ada
EN	1982		Renewable Energy Development Sector Project [Proyek Sektor Pengembangan Energi Terbarukan]	28,2	7,6	S	S	Tidak ada	Tidak ada

ADF = Asian Development Fund (Dana Pembangunan Asia), AG = pertanian dan sumber daya alam, ED = pendidikan, OCR = sumber daya modal umum

<sup>a</sup> "Ya" untuk pinjaman-pinjaman dengan empat faktor risiko atau lebih yang terkait dengan kinerja yang tidak terlalu memuaskan atau tidak memuaskan.

<sup>b</sup> Sebuah pinjaman dianggap "berisiko" jika mendapat penilaian "PS (agak memuaskan)" atau "U (tidak memuaskan)" baik dalam kemajuan pelaksanaan atau pencapaian tujuan pembangunan, atau jika ia merupakan pinjaman yang mempunyai potensi masalah.

Source: Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)

Sektor	No. Loan	Seq No.	Nama	Kontrak/ KOMitmen Kumulatif (\$ juta)	Penyerapan Kumulatif (\$ juta)	Penilaian		Potensi Masalah <sup>a</sup>	Berisiko <sup>b</sup>
						IP	DO		
EN	1983		Power Transmission Improvement Sector Project. [Proyek Sektro Perbaikan Transmisi Daya Listrik]	4,8	2,5	S	S	Tidak ada	Tidak ada
HL	1810		Decentralized Health Services Project [Proyek desentralisasi pelayanan kesehatan]	40,6	36,4	S	S	Tidak ada	Tidak ada
HL	2074		Second Decentralized Health Services Project (DHS2) [Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Kedua (DHS2)]	0,1	1,9	S	S	Tidak ada	Tidak ada
HL	2075		Second Decentralized Health Services Project (DHS2) [Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Kedua (DHS2)]	0,0	1,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
IN	1978		Small and Medium Enterprises Export Development Project [Proyek Pengembangan Ekspor Usaha Kecil Menengah]	7,7	12,2	S	S	Tidak ada	Tidak ada
LW	1678		Community and Local Government Support Sector Development Program (CLGSSDP). [Program Pengembangan Sektor Bantuan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (CLGSSDP)]	83,0	83,3	S	S	Tidak ada	Tidak ada
LW	1964		Sustainable Capacity Building for Decentralization [Pengembangan Kapasitas. Berkelanjutan untuk Desentralisasi]	8,0	1,4	S	S	Tidak ada	Tidak ada
LW	2126		State Audit Reform Sector Development Program [Program Pengembangan Sektor Pembaharuan Audit Negara]	100,0	100,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
LW	2127		State Audit Reform Sector Development Program [Program Pengembangan Sektor Pembaharuan Audit Negara]	0,0	2,5	S	S	Tidak ada	Tidak ada
LW	2192		Local Government Finance and Governance Reform Program [Program Pembaharuan Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah]	300,0	300,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
LW	2193		Local Government Finance and Governance Reform Sector Development Project [Proyek Pengembangan Sektor Pembaharuan Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah]	0,0	0,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
LW	2228		Development Policy Support Program [Program Bantuan Pengembangan Kebijakan]	200,0	200,0	HS	HS	Tidak ada	Tidak ada
MS	1583	1	Rural Income Generation [Peningkatan Penghasilan Pedesaan]	19,6	20,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
MS	1583	2	Rural Income Generation [Peningkatan Penghasilan Pedesaan]	14,4	6,6	S	S	Tidak ada	Tidak ada
MS	1587		Metropolitan Medan Urban Development Project [Proyek Pengembangan Perkotaan Medan Metropolitan]	57,8	51,1	S	S	Tidak ada	Tidak ada
MS	1765		Community Empowerment for Rural Development [Pemberdayaan Masyarakat untuk Pambungan Desa]	26,7	18,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
MS	1765		Community Empowerment for Rural Development Project [Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa]	24,2	23,6	S	S	Tidak ada	Tidak ada

ADF = Asian Development Fund (Dana Pembangunan Asia); EN = energi; HL = kesehatan, gizi dan perlindungan sosial; HS = *highly satisfactory* (sangat memuaskan); IN = industri dan perdagangan; IP = kemajuan pelaksanaan; LW = hukum dan pengelolaan sektor publik; MS=multisektor; No. = nomor; OCR = sumber daya modal umum; PS = *partly satisfactory* (agak memuaskan); S = *satisfactory* (memuaskan); Seg = segmen (terkait dengan pinjaman dengan lebih dari satu kewenangan penarikan); TC = transportasi dan komunikasi; DO = tujuan pembangunan; HS = *highly satisfactory* (sangat memuaskan); IP = kemajuan pelaksanaan); S = *satisfactory* (memuaskan).

<sup>a</sup> "Ya" untuk pinjaman dengan empat faktor risiko atau lebih yang dikaitkan dengan kinerja yang tidak terlalu memuaskan (agak memuaskan) dan tidak memuaskan.

<sup>b</sup> Sebuah pinjaman akan dinilai "PS (agak memuaskan)" or "U (tidak memuaskan)" baik dalam kemajuan pelaksanaan atau pencapaian tujuan pembangunan jika ia merupakan pinjaman dengan potensi masalah.

Sumber: Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)

Sektor	No. Loan	Seq No.	Nama	Kontrak/ Komitmen Kumulatif (\$ juta)	Penyerapan Kumulatif (\$ juta)	Penilaian		Potensi Masalah <sup>a</sup>	Berisiko <sup>b</sup>
						IP	DO		
MS	2072		Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project [Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman]	0,0	1,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
MS	2073		Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project [Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman]	13,0	0,1	S	S	Tidak ada	Tidak ada
MS	2163		Community Water Services and Health Project [Proyek Layanan Air dan Kesehatan bagi Masyarakat]	0,0	0,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
MS	2164		Community Water Services and Health Project [Proyek Layanan Air dan Kesehatan bagi Masyarakat]	0,0	0,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
MS	2221		Rural Infrastructure Support Project [Peningkatan Infrastruktur Perdesaan]	0,0	0,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
TC	1798		Road Rehabilitation (Sector) Project [Proyek (Sektor) Rehabilitasi Jalan]	114,8	83,5	S	S	Tidak ada	Tidak ada
TC	2184		Road Rehabilitation II [Rehabilitasi Jalan II]	0,0	0,0	S	S	Tidak ada	Tidak ada
<b>TOTAL</b>				<b>1.675,6</b>	<b>1.583,5</b>				

ADF = *Asian Development Fund* (Dana Pembangunan Asia); AG = pertanian dan sumber daya alam; ED = pendidikan; EN = energi; FI = keuangan; HL = kesehatan, gizi dan perlindungan sosial.

HS = *highly satisfactory* (sangat memuaskan); IN = industri dan perdagangan; IP = kemajuan pelaksanaan; LW = hukum dan pengelolaan sektor publik; MS = multisektor; No. = nomor; OCR = sumber daya modal umum; PS = *partly satisfactory* (agak memuaskan); S = *satisfactory* (memuaskan); Seg = segmen (terkait dengan pinjaman yang mempunyai lebih dari satu kewenangan penarikan); TC = transportasi dan komunikasi; WS = pasokan air, sanitasi dan pengelolaan limbah; DO = tujuan pembangunan; HS = *highly satisfactory* (sangat memuaskan); IP = kemajuan pelaksanaan; PS = *partly satisfactory* (agak memuaskan); S = *satisfactory* (memuaskan); U = *unsatisfactory* (tidak memuaskan).

<sup>a</sup> "Ya" untuk pinjaman dengan empat faktor risiko atau lebih yang dikaitkan dengan kinerja yang tidak terlalu memuaskan (agak memuaskan) dan tidak memuaskan

<sup>b</sup> Sebuah pinjaman akan dinilai "PS (agak memuaskan)" or "U (tidak memuaskan)" baik dalam kemajuan pelaksanaan atau pencapaian tujuan pembangunan jika ia merupakan pinjaman dengan potensi masalah.

Sumber: *Asian Development Bank* (Bank Pembangunan Asia)

Tabel A1.10: Bantuan untuk Produk Pinjaman , 2006-2009

Nama Proyek/Program Sektor	Klasifikasi Sasaran	Prioritas Tematik	Divisi	Tahun Bantuan Persiapan Proyek	ADB					
					Total	OCR	ADF	Total	Pemerintah	Dana dampingan
<b>Pinjaman untuk Perusahaan 2006</b>										
<b>Pertanian dan Sumber Daya Alam</b>										
1. Pertanian Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan		SEG	SEAE	2003		0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>						<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Pendidikan</b>										
1. Proyek Pendidikan Madrasah	TIM	ISD	SESS	2004		0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>						<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hukum, Pengelolaan Ekonomi dan Kebijakan Publik</b>										
1. Program Bantuan Kebijakan Pembangunan II	GI	SEG	IRM			200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
2. Program Pengembangan Sektor Pembaharuan Prasarana	GI	SEG	IRM			300,0	30,0	330,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>						<b>500,0</b>	<b>30,0</b>	<b>530,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Transportasi dan Komunikasi</b>										
1. Pelabuhan antar Pulau	GI	SEG/SEID	SEID	2002		47,0	0,0	47,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>						<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>						<b>547,0</b>	<b>120,0</b>	<b>667,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Pinjaman Perusahaan 2007</b>										
<b>Pertanian dan Sumber Daya Alam</b>										
Sumber Daya Air Citrarum Terpadu (MFF, \$500 juta), PFR1	GI	SEG	SEAE	2003		50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>						<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Pendidikan</b>										
1. Pendidikan Lanjutan Menengah	GI	ISD	SESS	2003		50,0	50,0	100,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>						<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Energi</b>										
1. Efisiensi Energi (MFF, \$250 juta), PFR 1	GI	SEG	SEID			100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>						<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Keuangan</b>										
1. Program Tata Kelola Sektor Keuangan dan Pembaharuan Jaminan Sosial II	TI-H	GOV	SEGF			200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
2. Fasilitas Pembiayaan Sekunder ( <i>Secondary Mortgage Facility</i> ), (MFF, \$255 juta), PFRI	TI-M	PSD	SEGF	2005		50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>						<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Kesehatan, Gizi dan Perlindungan Sosial</b>									
1. Perbaikan Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat	TI-M	ISD/GD	SESS	2003	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hukum, Pengelolaan Ekonomi dan Kebijakan Publik</b>									
1. Program Bantuan Kebijakan Pembangunan III	GI	SEG/GD	IRM		200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
2. Program Penguatan Kemiskinan dan Percepatan MDG	TI-IM	SEG/GD	SESS		200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>850,0</b>	<b>100,0</b>	<b>950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Pinjaman Perusahaan 2008</b>									
<b>Pertanian dan Sumber Daya Alam</b>									
1. Pengelolaan Banjir di Sejumlah Daerah Aliran Sungai Terpilih (MFF, \$150juta), PFR1	TI	SEG	SEAE	2003	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
2. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu	TI	SEG	SEAE	2003	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
3. Kualitas Udara Perkotaan SDP	GI	ENV	SEID	2003	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Keuangan</b>									
1. Fasilitas Pembiayaan Sekunder, (MFF dengan nilai \$255 juta) jaminan kredit parsial	TI-M	PSD	SEGF	2005	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hukum, Pengelolaan Ekonomi dan Kebijakan Publik</b>									
1. Program Pembaruan Prasarana II	TI-M	SEG	IRM		300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
2. SDP Pembaruan Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Tingkat Daerah II	GI	SEG	SEGF		250,0	30,0	280,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>550,0</b>	<b>30,0</b>	<b>580,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Multisektor</b>									
1. Bantuan Masyarakat dan Pemerintah Daerah II	TI-G	SEG/GD	SESS	2005	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
2. Proyek Pembangunan Pemukiman Terpadu	TI-H	SEG	SESS	2003	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
3. Proyek Bantuan Prasarana Pedesaan II	TI-G	SEG	SEAE		0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>50,0</b>	<b>90,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Pasokan Air dan Sanitasi</b>									
1. Pasokan Air dan Sanitasi	TI-M	ISD	SEID	2003	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>970,0</b>	<b>120,0</b>	<b>1.090,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Pinjaman Perusahaan 2009</b>									
<b>Pertanian dan Sumber Daya Alam</b>									
1. Pengelolaan Banjir di Sejumlah Daerah Aliran Sungai Terpilih (MFF, \$150 juta), PFR2	GI	SEG	SEAE	2003	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
2. Sumber Daya Air Citarum Terpadu (MFF, \$500 juta), PFR2	GI	SEG	SEAE	2003	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0

<b>Subtotal</b>					<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Energi</b>									
1. Efisiensi Energi (MFF, \$250 juta), PFR2	GI	SEG	SEID	Tanpa catatan	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kesehatan, Gizi dan Perlindungan Sosial</b>									
1. Pasokan Air dan Layanan Kesehatan untuk Masyarakat II	TI-G	ISD-GD	IRM	2008	20,0	30,0	50,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Industri dan Perdagangan</b>									
1. Proyek Peningkatan Lingkungan dan Pemukiman II	TI-H	SEG/GD	SESS	2007	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hukum, Pengelolaan Ekonomi dan Kebijakan Publik</b>									
1. Program Bantuan Pembangunan IV	GI	SEG	IRM		200,0	0,0	200	0,0	0,0
2. Program Pembaharuan Sektor Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial III	TI-H	SEG	SEGF		200,0	0,0	200	0,0	0,0
3. Program Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan MDG II	TI-M	SEG	SESS		200,0	0,0	200	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Transportasi dan Komunikasi</b>									
Proyek Jalan Daerah (MFF, \$250 juta), PFR 1	GI	ISD	SEID	2007	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Pasokan Air dan Sanitasi</b>									
1. Proyek Pengelolaan Sanitasi Metropolitan dan Kesehatan	TI-M	ISD	SEID	2006	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
<b>Subtotal</b>					<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1.000,0</b>	<b>110,0</b>	<b>1.110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

ADB = *Asian Development Bank* (Bank Pembangunan Asia); ADF = *Asian Development Fund* (Dana Pembangunan Asia); ENV = keberlanjutan lingkungan; GD = jender dan pembangunan; GI = intervensi umum; IRM = *Indonesia Resident Mission*; ISD = *inclusive social development* (pembangunan sosial yang menyeluruh); MDG = *Millennium Development Goal* (Tujuan Pembangunan Milenium); MFF = *Multitranchise Financing Facility* (Fasilitas Pendanaan Multitranche); OCR = *ordinary capital resources* (sumber daya modal umum); PFR = *periodic financing request* (permintaan pendanaan berkala); PSD = *private sector development* (pembangunan sektor swasta); SEAE = *Southeast Asia Agriculture, Environment and Natural Resources Division* (Divisi (Pertanian, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam Asia Tenggara); SEID = *Southeast Asia Infrastructure Division* (Divisi Prasarana Asia Tenggara); SESS = *Southeast Asia Social Sector Division* (Divisi Sektor Sosial Asia Tenggara); TI-G = *targeted intervention geographic* ((cakupan geografi sasaran intervensi).; TI-H = *targeted intervention individual/household* (perorangan/rumah tangga sasaran intervensi); TI-M = *targeted intervention support for MDG* (bantuan intervensi terpilih untuk MDG).

Sumber: *Asian Development Bank* (Bank Pembangunan Asia)

Tabel A1.11: Bantuan Untuk Produk dan Jasa Non-Pinjaman, 2006-2009

Nama Bantuan Sektor	Divisi yang Bertanggung Jawab	Jenis Bantuan	Sumber Pendanaan		Total (\$ '000)		
			ADB			Lain-Lain	
			Sumber	Jumlah (\$ '000)		Sumber	Jumlah (\$ '000)
<b>2006</b>							
<b>Pertanian dan Sumber Daya Alam</b>							
1. Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum Terpadu (Supplementary)	SEAE	PPTA		300,0	0,0	300,0	
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Air di bawah Kerangka Kerja Terdesentralisasi	SEAE	ADTA		1.000,0	0,0	1.000,0	
3. SDP Perbaiki Kualitas Udara Perkotaan (Supplementary)	SEID	PPTA		300,0	0,0	300,0	
<b>Subtotal</b>				<b>1.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.600,0</b>	
<b>Pendidikan</b>							
1. Pengembangan Pendidikan Madrasah	SESS	ADTA		1.000,0	0,0	1.000,0	
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	
<b>Hukum, Pengelolaan Ekonomi dan Kebijakan Publik</b>							
1. Kerangka Kerja Hukum dan Administratif untuk Perolehan Lahan dan Pemukiman	SEID	ADTA		400,0	0,0	400,0	
2. Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Penduduk Miskin	SESS	ADTA		1.800,0	0,0	1.800,0	
3. Memperkuat Kapasitas untuk Efektivitas Bantuan	IRM	ADTA		800,0	0,0	800,0	
4. Bantuan untuk Meningkatkan Penyediaan Prasarana	IRM	ADTA		1.800,0	0,0	1.800,0	
<b>Subtotal</b>				<b>4.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.800,0</b>	
<b>Pasokan Air dan Sanitasi</b>							
1. Pengelolaan Sanitasi Metropolitan dan Kesehatan	SESS	PPTA		1.200,0	0,0	1.200,0	
<b>Subtotal</b>				<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>8.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.600,0</b>	
<b>2007</b>							
<b>Pertanian dan Sumber Daya Alam</b>							
1. Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum Terpadu (tambahan) <sup>1</sup>	SEAE	PPTA		600,0	0,0	600,0	
2. Pengelolaan Banjir (tambahan) <sup>1</sup>	SEAE	PPTA		600,0	0,0	600,0	
<b>Subtotal</b>				<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	
<b>Pendidikan</b>							
1. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (dilampirkan)	SESS	ADTA		1.000,0	0,0	1.000,0	
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	
<b>Energi</b>							
1. Proyek Efisiensi Energi	SEID	PPTA		1.000,0	0,0	1.000,0	
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	
<b>Kesehatan dan Gizi</b>							
1. HIV/AIDS di sektor transportasi	IRM	ADTA		800,0	0,0	800,0	
2. Perbaiki gizi melalui Pemberdayaan Masyarakat (dilampirkan)	SESS	ADTA		800,0	0,0	800,0	
<b>Subtotal</b>				<b>1.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.600,0</b>	
<b>Industri dan Perdagangan</b>							
1. Proyek Perbaiki Lingkungan dan Pemukiman Kedua (NUSPP II)	SESS	PPTA		1.000,0	0,0	1.000,0	
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	
<b>Hukum, Pengelolaan Ekonomi dan Kebijakan Publik</b>							

Nama Bantuan Sektor	Divisi yang Bertanggung Jawab	Jenis Bantuan	Sumber Pendanaan				Total (\$ '000)
			ADB		Lain-Lain		
			Sumber	Jumlah (\$ '000)	Sumber	Jumlah (\$ '000)	
1. Pembaharuan Tata Kelola Sektor Keuangan dan Jaminan Sosial	SEGF	PPTA		1.000,0		0,0	1.000,0
2. Program Pembaharuan Prasarana	IRM	PPTA		1.000,0		0,0	1.000,0
3. Kelompok Iklim Investasi, Keuangan, dan Pembaharuan Kebijakan	SEGF	ADTA		2.000,0		0,0	2.000,0
4. SDP Pemerintah Daerah dan Pendanaan Tata Kelola II	SEGF	PPTA		1.000,0		0,0	1.000,0
5. Kelompok Pengembangan Prasarana Fisik	SEID	ADTA		2.000,0		0,0	2.000,0
6. Kelompok Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan MDG	SESS	ADTA		2.000,0		0,0	2.000,0
7. Bantuan untuk Pengelolaan Risiko Bencana yang Lebih Baik	RSDD	ADTA		600,0		0,0	600,0
8. Bantuan untuk Pengelolaan Hasil dalam Perencanaan Nasional	IRM	ADTA		1.000,0		0,0	1.000,0
<b>Subtotal</b>				<b>10.600,0</b>		<b>0,0</b>	<b>10.600,0</b>
<b>Transportasi dan Komunikasi</b>							
1. Pembangunan Jalan Daerah	SEID	PPTA		1.000,0		0,0	1.000,0
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>TOTAL</b>				<b>15.200,0</b>		<b>0,0</b>	<b>15.200,0</b>
<b>2008</b>							
<b>Pertanian dan Sumber Daya Alam</b>							
1. Proyek Irigasi Berbasis Komunitas	SEAE	PPTA		1.000,0		0,0	1.000,0
2. Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Air dan Daerah Aliran Sungai	SEAE	PPTA		2.000,0		0,0	2.000,0
3. Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan	SEID	ADTA		1.000,0		0,0	1.000,0
<b>Subtotal</b>				<b>4.000,0</b>		<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>
<b>Energi</b>							
1. Energi dan Pembangkit Listrik	SEID	PPTA		1.500,0		0,0	1.500,0
<b>Subtotal</b>				<b>1.500,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1.500,0</b>
<b>Kesehatan dan Gizi</b>							
1. Layanan Pasokan Air dan Kesehatan untuk Masyarakat II	SESS	PPTA		1.000,0		0,0	1.000,0
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Hukum, Pengelolaan Ekonomi dan Kebijakan Publik</b>							
1. Kelompok Tata Kelola dan Anti Korupsi	SEGF	ADTA		2.000,0		0,0	2.000,0
2. Pembaharuan Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah	SEGF	ADTA		500,0		0,0	500,0
3. Program Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan MDG	SEGF	PPTA		1.000,0		0,0	1.000,0
<b>Subtotal</b>				<b>3.500,0</b>		<b>0,0</b>	<b>3.500,0</b>
<b>Multisektor</b>							
1. Meningkatkan Dampak Pembangunan Prasarana Pedesaan (melekat pada RISP II)	SEAE	ADTA		600,0		0,0	600,0
<b>Subtotal</b>				<b>600,0</b>		<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
<b>Transportasi dan Komunikasi</b>							
1. Pembangunan Jalan Tol	SEID	PPTA		1.000,0		0,0	1.000,0
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>TOTAL</b>				<b>13.600,0</b>		<b>0,0</b>	<b>13.600,0</b>

	Nama Bantuan Sektor	Divisi yang Bertanggung Jawab	Jenis Bantuan	Sumber Pendanaan		Total (\$ '000)		
				ADB			Lain-Lain	
				Sumber	Jumlah (\$ '000)		Sumber	Jumlah (\$ '000)
<b>2009</b>								
	<b>Pertanian dan Sumber Daya Alam</b>							
	1. Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum Terpadu (Tambahan) <sup>1</sup>	SEAE	PPTA		600,0	0,0	600,0	
	2. Pengelolaan Banjir (Tambahan) <sup>1</sup>	SEAE	PPTA		600,0	0,0	600,0	
	3. Kelompok Perbaikan Tata Kelola dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	SEAE	ADTA		2.000,0	0,0	2.000,0	
	4. Proyek Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Irigasi Terpadu	SEAE	PPTA		1.000,0	0,0	1.000,0	
	5. Kelompok Konservasi Lingkungan dan Keragamanhayati Kelautan	SEAE	ADTA		2.000,0	0,0	2.000,0	
	6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Konteks Desentralisasi	SEAE	PPTA		1.000,0	0,0	1.000,0	
	<b>Subtotal</b>				<b>7.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.200,0</b>	
	<b>Hukum, Pengelolaan Ekonomi dan Kebijakan Publik</b>							
	1. Program Pembaruan Prasarana	IRM	PPTA		1.000,0	0,0	1.000,0	
	2. Kelompok Bantuan Desentralisasi	SEGF	ADTA		2.000,0	0,0	2.000,0	
	<b>Subtotal</b>				<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>	
	<b>TOTAL</b>				<b>10.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.200,0</b>	

ADB = *Asian Development Bank* (Bank Pembangunan Asia); ADTA = *advisory technical assistance* (bantuan nasehat teknis); HIV/AIDS = *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*; IRM = *Indonesia Resident Mission*; MDG = *Millennium Development Goal* (Tujuan Pembangunan Milenium); NUSSP = *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (Proyek Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman); PPTA = *project preparatory technical assistance* (bantuan teknis persiapan proyek); REG = *regional*; SDP = *Sector Development Program* (Program Pengembangan Sektor); SEAE = *Southeast Asia Agriculture, Environment, and Natural Resources Division* (Divisi Pertanian, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam Asia Tenggara); SEID = *Southeast Asia Infrastructure Division* (Divisi Prasarana Asia Tenggara); SESS = *Southeast Asia Social Sector Division* (Divisi Sektor Sosial Asia Tenggara).

Sumber: *Asian Development Bank* (Bank Pembangunan Asia) <sup>1</sup>Untuk menyiapkan *Periodic Financing Request* (Permintaan Pendanaan Berkala) berikutnya.

## Lampiran 2

**PROSES PERSIAPAN STRATEGI DAN PROGRAM ADB UNTUK INDONESIA**

1. Persiapan strategi dan program ADB untuk Indonesia (Country Strategy Program/CSP) melibatkan proses analisis dan konsultasi yang membutuhkan waktu hampir 2 tahun. Permulaan proses ini berbarengan dengan pemilihan presiden secara langsung pertama, dan pembentukan kabinet baru di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias terjadi pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat dalam 100 hari pertama. Bencana ini telah menghabiskan paling banyak dana dari Pemerintah dan ADB untuk jangka waktu yang lama. Diskusi ADB dengan Pemerintah pertama kali terjadi pada bulan Mei 2005. Tujuan Pemerintah adalah untuk memperbaiki perencanaan dan koordinasi bantuan luar negeri, dan untuk menyusun strategi tata kelola hutang dan peminjaman. Semua ini dapat diselesaikan setelah enam bulan pertama tahun 2006, setelah melewati diskusi-diskusi internal yang ekstensif.

2. Konsultasi awal ADB dengan Pemerintah memfokuskan pada pandangan Pemerintah mengenai pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan. Sejak krisis moneter tahun 1997/98, Pemerintah telah memfokuskan pada pengurangan hutang nasional. Akibat dari krisis moneter tersebut, di kalangan pemerintah mulai muncul kepedulian mengenai efektivitas proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman luar negeri. Pertemuan lainnya memfokuskan pada hal-hal yang berhubungan dengan tersedianya bantuan dalam lingkungan yang terdesentralisasi dan pada pembangunan infrastruktur. Konsultasi awal tersebut menjadi dasar dialog lanjutan antara Pemerintah dan misi ADB untuk penyiapan CSP dan juga untuk berbagai program lain. Konsultasi formal selanjutnya diselenggarakan pada awal tahun 2006, berdasarkan strategi pengajuan pinjaman pemerintah yang telah diperbaiki. Setelah penyesuaian kembali Shouteast Asia Department (SERD) dan Mekong Regional Department (MKRD) ADB, Shouteast Asia Tim Management berkumpul selama dua hari di Jakarta pada bulan Juni 2006 yang dilanjutkan dengan diskusi bersama pemerintah di semua tingkatan.

3. Beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten terpilih diajak berdiskusi mengenai kerangka strategis dan sektor fokus yang diusulkan ADB. Ada dua isu yang menonjol yang muncul dalam konsultasi tersebut: kebutuhan investasi infrastruktur, dan ketidakjelasan kerangka fiskal desentralisasi dari pemerintah pusat. Ketidakjelasan tersebut khususnya berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk meminjam dan meminta bantuan kepada ADB. Peraturan yang mengatur pengajuan pinjaman dan bantuan pemerintah daerah kepada ADB tidak jelas. Peranan ADB dalam pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas sangat dihargai, tetapi pelaksanaannya sering tertunda karena penundaan oleh pemerintah pusat. Berlanjutnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan lemahnya kemampuan pemerintah daerah terbukti selama proses konsultasi tersebut.

4. Konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di luar Jakarta menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih lemah, yang disebabkan oleh lemahnya kemampuan kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (anggota dewan). Sering terjadi konflik kepentingan di antara kaum elit di daerah dalam pemilihan proyek pembangunan baru, seperti membangun jalan. Masyarakat sipil belum mampu mempengaruhi pemerintah daerah karena keterbatasan sumber daya dan akses informasi. Pihak LSM mengungkapkan perlunya informasi lebih banyak mengenai kegiatan ADB dan bagaimana mereka melaksanakannya. Keprihatinan mengenai terjadinya penghancuran sumber daya alam, termasuk hutan, laut, dan pantai juga diungkapkan oleh LSM. Pembangunan yang bersifat komersial, seperti pembangunan rumah-rumah mewah dan mal-mal berdampak negatif pada sumber daya alam. Manajemen sumber

daya air yang menjadi masalah di banyak daerah, dengan adanya desentralisasi pengaturan kelembagaan untuk manajemen sumber daya air menjadi semakin rumit. Banyak pihak LSM berpandangan bahwa masyarakat dan pihak swasta memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan, selama ada mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Dalam persiapan CSP ini, ADB juga berkonsultasi dengan lembaga donor yang lain di Indonesia. Beberapa dari diskusi tersebut merupakan bagian dari proses harmonisasi yang sedang berlangsung dengan para mitra ADB, termasuk World Bank, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dan Department for International Development of the UK (DFID). Sebagian lainnya merupakan bagian dari proses diskusi CSP yang sudah ditargetkan. Konsultasi ini menghasikan umpan balik yang berguna. Diskusi ini juga berhasil mengidentifikasi kesempatan pemberian dana bersama yang potensial. Diskusi juga difokuskan pada kemungkinan mengharmonisasikan persiapan strategi. Namun, hal ini mungkin memerlukan usaha jangka panjang, karena situasi yang berkembang di Indonesia, dan kerangka waktu kerja yang berbeda-beda di antara lembaga donor.

6. Diskusi dengan masyarakat sipil merupakan proses lanjutan bagi Indonesia Resident Mission (IRM) ADB. Di masa lampau, banyak LSM yang sangat kritis terhadap peminjaman dana ADB untuk Indonesia karena dianggap sebagai sumber korupsi. Koalisi anti hutang tetap kuat. Selama diskusi dengan masyarakat sipil yang dilaksanakan sejak awal tahun 2004, semakin jelas bahwa ada peningkatan pemahaman oleh banyak pihak LSM (tetapi tidak semua) menyatakan bahwa pinjaman dapat dimanfaatkan secara efektif. ADB berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki efektivitasnya. Kesulitan mendapatkan informasi dari Pemerintah mengenai rencana ADB dalam mendanai proyek-proyek di kabupaten dan provinsi merupakan tema yang berulang bagi para LSM (terutama yang berkantor pusat di luar Jakarta). Kebijakan komunikasi publik ADB yang baru diterangkan kepada para LSM ini, dan hal itu seharusnya dapat membantu memecahkan masalah tadi. Masalah umum lainnya yang dibicarakan adalah anggapan adanya korupsi di pemerintah daerah, dan peranan LSM yang potensial dalam mengurangi kasus korupsi tersebut.

7. Tim CSP diajak berdiskusi selama penyusunan evaluasi program bantuan untuk Indonesia (country assistance program evaluation/CAPE)<sup>118</sup>, yang berlangsung selama tahun 2005. Hasilnya dibicarakan Development Effectiveness Committee pada bulan Januari 2006. Dari diskusi ini tim CSP menjadi semakin paham perlunya operasi ADB di Indonesia yang lebih fokus agar menjadi lebih efektif, perlunya meningkatkan partisipasi sektor swasta dan menurunkan biaya transaksi.

8. Matriks yang menunjukkan rekomendasi CAPE dan masalah yang dibicarakan oleh Development Effectiveness Committee selama konsultasi CAPE disajikan dalam di Tabel A2. Selama persiapan CSP, Pemerintah juga memberikan pandangannya mengenai bagaimana agar operasi ADB menjadi lebih relevan dengan program pembangunannya. Kotak A2 di bawah ini menunjukkan bagaimana CSP memberikan jawabannya terhadap pandangan ini.

---

<sup>118</sup> ADB.2006. *Country Program Evaluation. Manila*

**Kotak A2: Bagaimana Strategi dan Program ADB untuk Indonesia Menjawab Pandangan Pemerintah Untuk Meningkatkan Relevansi ADB di Indonesia**

Evaluasi program bantuan negara (CAPE) untuk Indonesia memasukan pandangan Pemerintah mengenai bagaimana agar ADB dapat menjadi lebih relevan dalam pembangunan di Indonesia (lihat Kotak 14). Inilah langkah yang diambil CSP untuk menjawab usulan Pemerintah.

**Memberikan Waktu yang Lebih Panjang untuk Persiapan Proyek.** Besarnya nilai bantuan teknis persiapan proyek (project preparatory technical assistance/PPTA) telah meningkat mencapai paling tidak setidaknya \$ 1 juta. Menurut peraturan, harus ada jeda waktu 1 tahun antara disetujuinya PPTA dan keluarnya persetujuan.

**Memperbaiki Kualitas Catatan Transaksi dan Kesiapan Proyek.** Pinjaman hanya akan dinegosiasikan apabila pinjaman itu memenuhi kriteria kesiapan proyek dari Pemerintah.

**Memperbaiki Manajemen Portofolio.** Indonesia Resident Mission (IRM) ADB terus berupaya memperbaiki manajemen portofolionya, yang telah berhasil menurunkan jumlah proyek yang berisiko.

**Meningkatkan Kemilikan Pemerintah terhadap Reformasi Kebijakan.** Agenda reformasi yang disepakati dalam CSP sebagian besar didasarkan pada program reformasi Pemerintah sendiri, yang berasal dari berbagai kelompok kerja antar departemen.

**Meningkatkan Efektivitas TA.** Dalam CSP, ADB menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel untuk TA melalui pengelompokan jenis TA. Pendekatan ini memungkinkan ADB untuk lebih responsif terhadap kebutuhan Pemerintah. Selain itu, ADB juga menjadi dapat lebih mempertimbangkan masukan dari Pemerintah dalam seleksi konsultan.

**Meningkatkan Peranan IRM.** IRM yang pada awalnya didirikan untuk membantu mengawasi proyek telah memperluas fungsinya sehingga meliputi perumusan strategi dan program ADB untuk Indonesia, pemrosesan program peminjaman dan bantuan teknis, dan pemberian saran untuk penyusunan kebijakan. Akhir-akhir ini peran IRM ditinjau kembali dalam rangka peninjauan kebijakan misi untuk penduduk Indonesia dan situasi yang berkembang di Indonesia. Peninjauan peran ini berdampak pada penyediaan staf dan bauran keterampilan di IRM.

**Menciptakan Lingkungan Untuk Meningkatkan Partisipasi Swasta.** Peningkatan partisipasi swasta merupakan hasil utama yang diharapkan dari CSP. Hasil ini dimasukkan ke dalam pilar pertumbuhan (bantuan sektor infrastruktur dan keuangan), dan bidang pemerintahan (peningkatan manajemen sektor pemerintah, dan kegiatan pemberantasan korupsi).

**Memperkenalkan Produk Baru dan Penggunaan Pasar Modal.** CSP akan menggunakan sepenuhnya bentuk pendanaan baru ADB, termasuk penerbitan surat obligasi daerah dan pendanaan dengan mata uang lokal.

**Tabel A2: Rekomendasi dari Country Assistance Program evaluation (CAPE) dan Development Effectiveness Committee (DEC) dan Country strategy Program (CSP), 2006-2009**

Rekomendasi CAPE	CSP
<p>1. CSP harus mengidentifikasi ceruk untuk mengurangi hambatan-hambatan utama dalam bidang desentralisasi, tata kelola dan pemberantasan korupsi, peningkatan investasi penyediaan barang publik, dan peningkatan iklim untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta.</p>	<p>CSP memfokuskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi pengembangan sektor swasta, termasuk partisipasi yang lebih besar pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur,</li> <li>• Memperkuat akuntabilitas dan tata kelola operasional lembaga pemerintah dan swasta yang penting— melalui proyek dan program langsung dan khusus (misalnya, Reformasi Sistem Audit Negara dan Sistem Keuangan Pemerintah Daerah serta Reformasi Tata Kelola), juga melalui fokus yang kuat pada <i>fucidiary</i> semua proyek, dan</li> <li>• Meningkatkan kapasitas, terutama kapasitas pemerintah daerah, untuk memperbaiki pemberian pelayanan publik.</li> </ul>
<p>2. CSP harus menentukan bidang fokus utama berdasarkan: catatan prestasi ADB; pengarusutamaan tata kelola, dan operasi geografis.</p>	<p>Proses perumusan CSP melibatkan kerja sama antara departemen-departemen pemerintah dan pihak swasta, dengan menekankan pada sinergi yang potensial.</p> <p>Sesuai dengan catatan prestasi ADB, bidang fokus utama mencakup energi, transportasi, persediaan air bersih dan sanitasi, keuangan, manajemen keuangan publik, pendidikan, kesehatan dan gizi, serta manajemen sumber daya air bersih. Kebanyakan proyek ditujukan pada masalah yang berhubungan dengan tata kelola. Selain itu, perhatian terhadap tindakan pemberantasan korupsi pada masing-masing proyek juga akan ditingkatkan. Pemerintah pusat sangat enggan untuk mengadopsi pendekatan fokus geografis dalam operasi peminjaman dana. Berdasarkan sifat kebutuhan proyek, memang fokus geografis dapat kontraproduktif.</p>
<p>3. Cakupan CSP harus konsisten dengan sumber daya ADB. Pertimbangkan: penempatan kembali; memperkuat bauran keahlian IRM; dan menempatkan staf internasional dalam jumlah yang memadai.</p>	<p>Telah amat jelas bahwa pemerintah memilih bantuan pinjaman program yang lebih besar, dengan bantuan proyek tambahan untuk mencakup sektor dan prioritas yang terbatas. Pemerintah memahami bahwa kualitas paket reformasi yang ditawarkan sangatlah penting. Karena pentingnya paket bantuan ini, ADB harus menyusun rencana stafnya, dan alokasi sumberdayanya pada IRM.</p>
<p>4. Perlunya mengurangi biaya transaksi dengan menggunakan sistem informasi negara yang divalidasi, berkoordinasi dengan mitra pembangunan eksternal, dan membatasi jumlah data yang</p>	<p>Rural Infrastructure Suport Project merupakan proyek pertama yang menggunakan sepenuhnya sistem yang ada di Indonesia, sedangkan proyek lain dalam program ini akan menggunakan sistem yang tepat dari berbagai pilihan yang ada. Bantuan lainnya kepada pemerintah daerah, terutama di sektor sosial, akan diberikan melalui sistem yang sudah ada di Indonesia, karena modalitas proyek tradisional terlalu banyak memakan biaya dan tidak efektif.</p>

Rekomendasi CAPE	CSP
dikumpulkan.	Dalam 2 atau 3 tahun terakhir terdapat penyelarasan yang jauh lebih baik dalam pengumpulan dan analisis data di antara para mitra pembangunan utama. Pendanaan bersama untuk operasi berbasis kebijakan utama telah banyak membantu, terutama kerja sama antara ADB, World Bank, United States Agency for International Development (USAID) dan lainnya dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.
5. ADB harus berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien	Terdapat momentum perubahan dari dua pihak. Sangat jelas Indonesia sedang memunculkan diri sebagai negara yang berpenghasilan menengah. Dari sisi ADB, adopsi produk dan modalitas (bentuk) pendanaan baru memberi alat yang tepat untuk merespon perubahan tersebut. ADB menyadari bahwa mengurangi biaya transaksi dalam berurusan dengan lembaga donor merupakan prioritas pemerintah. Pemerintah menginginkan adanya pengelompokan program peminjaman agar dapat diprediksikan dan dapat berlanjut. Pemerintah juga meminta lebih banyak bentuk-bentuk pendanaan "programatis", yang akan memakai sistem implementasi dan pengadaan Pemerintah sendiri sebagai dasarnya. Selain itu juga terdapat penyelarasan yang lebih besar antara antara sistem, prosedur, dan kebijakan yang dimiliki ADB dan mitra pembangunan lainnya.
6. Partisipasi sektor swasta (PSP) yang lebih besar sangat yang vital: akan diperlukan operasi sektor swasta; pendanaan bersama; dan produk-produk yang lebih menarik.	Meningkatkan partisipasi sektor swasta adalah pokok CSP. Terdapat peluang besar bagi partisipasi sektor swasta dalam pembangunan sektor infrastruktur. Produk-produk baru bermunculan dari inisiatif inovasi dan efisiensi (IEI) ADB juga memungkinkan adanya perubahan yang dibuat dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk memfasilitasi PSP yang lebih besar.

### Rekomendasi dari Komite Keefektifan Pembangunan

Rekomendasi dari CAPE untuk mengidentifikasi empat bidang perbaikan seharusnya tidak peran ADB di mata Pemerintah.	Dalam diskusi dengan Pemerintah, diungkapkan dengan jelas harapan Pemerintah terhadap bantuan dari ADB, dan ini tercermin dalam CSP. Oleh karena itu, CSP meliputi pembangunan sosial (percepatan menuju pencapaian MDG), pembangunan pedesaan dan infrastruktur, serta manajemen lingkungan dan sumber daya alam.
Kotak 14 , yang berisi pandangan Pemerintah mengenai bagaimana agar bantuan ADB menjadi lebih efektif, perlu diatur di awal dalam CSP	Lihat Kotak A2.
CSP perlu memuat bagian yang menerangkan bagaimana strategi tersebut diterjemahkan ke dalam program operasional	Lihat teks utama, Bagian IV.

Rekomendasi CAPE	CSP
CSP perlu memuat bagian yang menerangkan bagaimana pelajaran berharga dari kinerja masa lalu turut dipertimbangkan juga.	Lihat teks utama, Bagian IV, terutama Tabel 2
CSP juga harus memuat Lampiran yang mendokumentasikan rekomendasi dari DEC, berikut penjelasan bagaimana rekomendasi tersebut dipertimbangkan	Lihat lampiran ini.

## Lampiran 3

**PENILAIAN KAPASITAS MANAJEMEN HASIL DI INDONESIA**

1. Lampiran ini menyajikan penilaian ringkas kapasitas manajemen hasil dengan memperhatikan lima unsur utama pembentuk manajemen hasil: (i) komitmen, norma-norma, dan nilai-nilai untuk manajemen hasil; (ii) kejelasan hasil yang diharapkan; (iii) mewujudkan hasil dengan menghubungkan sasaran dan perencanaan; (iv) menentukan kontribusi terhadap hasil melalui pengawasan dan evaluasi; dan (v) membuat hasil menjadi penting dengan menyediakan umpan balik dalam membuat keputusan. Penilaian telah digunakan dalam persiapan CSP ini. Penilaian ini terutama memfokuskan pada pemerintah pusat sebagai penyedia utama sumber daya kepada seluruh tataran pemerintahan. Karena adanya perbedaan dan keragaman antar pemerintah daerah (yang berjumlah sekitar 440), melakukan penilaian di tingkatan pemerintah daerah membutuhkan banyak sumber daya. Meskipun demikian, penilaian terhadap pemerintah daerah di mana terdapat proyek ADB yang relevan akan tetap dilakukan. Penilaian terhadap pemerintah daerah akan tetap dilakukan selama periode CSP pada kabupaten-kabupaten tempat pelaksanaan kegiatan penting Proyek Keuangan Pemerintah Daerah dan Proyek Tata Kelola Pemerintah Daerah. Penilaian seperti itu dapat dicerminkan dalam laporan kemajuan CSP. Meskipun demikian, selama pemerintah daerah kurang leluasa dalam pembelanjaan, manfaat penilaian semacam itu akan tetap terbatas. Jelaslah bahwa pemicu utama hasil dan hasil penilaian adalah proses anggaran. Lembaga-lembaga pemerintah pusat, seperti departemen-departemen yang terkait, memang mulai menggunakan proses anggaran berbasis kinerja tiga tahun. Namun mengingat cara pemerintah daerah mendapatkan pendanaannya, akan sangat sulit untuk mereplikasi proses penganggaran berbasis kinerja tersebut ke tataran pemerintah daerah.

**A. Komitmen, Norma, dan Nilai-Nilai Manajemen Hasil.**

2. Indonesia telah berhasil melewati masa transisi dari negara otoriter dengan manajemen ekonomi terpusat menjadi negara dengan sistem desentralisasi yang menganut demokrasi secara penuh. Karena transformasi ini berlangsung sangat cepat, khususnya dalam hal pengembangan kerangka hukum dan peraturan yang diperlukan, tidaklah mengejutkan jika implementasi reformasi ini, khususnya pembangunan kapasitas yang diperlukan, akan memakan waktu. Namun, saat ini Indonesia telah berada di jalan yang benar dalam memperkenalkan unsur-unsur penting pembentuk manajemen hasil. Komitmen pada manajemen hasil jelas tercermin dalam Undang-Undang Keuangan Negara (Undang-undang No. 17/2003), yang merupakan undang-undang pertama yang memberikan dasar hukum kepada proyek yang berorientasi pada kinerja dalam manajemen sumber daya sektor publik (pemerintah) di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah untuk mengembangkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menggunakan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan makroekonomi dan formulasi kebijakan fiskal, selain untuk memperkuat keseluruhan akuntabilitas proses anggaran. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap departemen terkait dan lembaga yang membuat anggaran untuk menyerahkan rencana kerja bersama dengan proposal anggarannya. Selanjutnya Parlemen juga membuat Undang-undang Kekayaan Negara (Undang-undang No.1/2004) dan Undang-undang Audit Negara (Undang-undang No.15/2004). Ketiga undang-undang ini bersama berpotensi untuk mencakup siklus anggaran penuh. Namun, norma dan nilai untuk implementasi yang efektif atas UU ini pada kenyataannya masih kurang. Hal ini dikarenakan oleh belum terjadinya reformasi pada sebagian sistem pegawai negeri. Sistem pegawai negeri di Indonesia sebagian besar masih menggunakan sistem lama, hanya dengan sedikit insentif perubahan. Selain itu, adopsi sepenuhnya sistem manajemen berbasis kinerja (performance-

based management/PBM) merupakan pekerjaan besar, yang sangat menantang bahkan di negara yang telah maju sekalipun. Suatu kemajuan bagi Indonesia untuk mulai mengadopsi sistem PBM ini. Meskipun setiap departemen terkait menyerahkan rencana kerja tahunan mereka, kualitas dan tingkat kerincian masing-masing rencana kerja tersebut berbeda-beda. Proses transisi menuju ke sistem PBM sepenuhnya tampaknya masih panjang.

## **B. Kejelasan Hasil**

3. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM, 2005-2009) memberikan kejelasan mengenai serangkaian sasaran lebih tinggi yang ingin dicapai pemerintah pusat pada akhir periode. Di antara sasaran tersebut adalah pertumbuhan yang berlanjut lebih dari 6%, penciptaan lapangan kerja yang dapat menyerap 1,5 juta pekerja ke dalam pasar tenaga kerja, pencapaian target MDG, dan pengurangan jumlah hutang sampai 31,8 % dari PDB. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada parlemen dan masyarakat untuk meraih target-target ini. Berdasarkan RPJM, pemerintah pusat menyiapkan rencana kerja per tahun (RKP), yang menetapkan target-target yang lebih spesifik untuk setahun, dan digunakan sebagai masukan dalam proses anggaran. RPJM menetapkan kerangka kebijakan yang baik untuk reformasi dan investasi yang diperlukan pada setiap sektor.

4. Pada tingkat daerah, standar pelayanan minimum (SPM) telah ditetapkan untuk fungsi-fungsi yang didesentralisasikan. ADB sudah membantu proses pengembangan standar-standar ini,<sup>119</sup> yang baru beroperasi kurang dari 5 tahun dalam proses desentralisasi. Undang-undang No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah menetapkan bahwa fungsi-fungsi wajib yang ditugaskan kepada pemerintah daerah perlu dievaluasi terhadap standar pelayanan minimum tertentu. Kurangnya kejelasan dalam penugasan fungsi dan kepedulian atas hambatan fiskal yang dapat menghambat pencapaian SPM menyebabkan tertundanya implementasi standar ini. Hal ini terjadi karena SPM semula dibuat sebagai standar administrasi tanpa dikaitkan dengan anggaran.

## **C. Hubungan Sasaran dengan Perencanaan**

5. Tujuan utama dari Undang-Undang Keuangan Negara juga untuk mengarahkan Indonesia menuju kerangka pengeluaran jangka menengah (medium-term expenditure framework/MTEF, yang berlaku pada tahun 2008). Untuk mendukung proses ini, undang-undang tersebut juga menetapkan transisi menuju akuntansi akrual. Kedua tuntutan tersebut merupakan tantangan utama. PBM perlu secara bertahap dan progresif terintegrasi ke dalam MTEF. Pemerintah pusat secara perlahan mengadopsi pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, berdasarkan sistem proyeksi pengeluaran. Departemen yang terkait sekarang ini diharuskan untuk mengajukan kebutuhan anggaran mereka menurut aturan siklus dua tahunan. Secara perlahan siklus ini perlu dikembangkan menjadi proses tiga tahunan, sebelum menjadi MTEF secara utuh. Namun, kebanyakan anggaran departemen terkait tidak cukup canggih untuk mengidentifikasi biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kebijakan. Akuntansi akrual yang akan diadopsi nantinya dapat membantu memperlancar proses ini.

6. Pada September 2004, DPR/MPR membuat Undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No.25/2004) yang berisi kerangka sistem rencana kerja per tahun di tingkat nasional dan daerah untuk menjamin harmonisasi antara persiapan anggaran tahunan dengan keluaran dan hasil. Untuk membantu pengimplementasian undang-undang ini, Presiden

---

<sup>119</sup> ADB. 2002. *Local Government Provision of Minimum Basic Services for the Poor* (Pengadaan Pelayanan Dasar Minimum untuk Rakyat Miskin oleh Pemerintah Daerah). Manila (TA 3967-INO)

sudah menyetujui dua peraturan pemerintah utama dalam rencana kerja pemerintah (PP No.20/2005) dan Penyusunan Anggaran (PP No.21/2005). Kerangka peraturan mengenai rencana kerja berusaha memberikan definisi mengenai kinerja, meskipun dibutuhkan perbaikan sejak awal. Selanjutnya, pemerintah pusat sudah mengadopsi Sistem Statistik Keuangan Manual Pemerintah (2001), yang membuka jalan untuk menuju ke arah penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang terpadu.

7. Pada tingkat pemerintah daerah, gambarannya ternyata berbeda. Dana Alokasi Umum (DAU), yang menjadi pendanaan utama kebanyakan pemerintah daerah, dimaksudkan sebagai pemberian bantuan untuk mendanai fungsi dan pelayanan yang didesentralisasikan, termasuk gaji pegawai negeri dan pengeluaran lain. Dalam teorinya, mekanisme pemberian dana bantuan tersebut untuk membuat pemerintah daerah dapat memutuskan prioritasnya masing-masing. Namun, kebanyakan pemerintah daerah menerima dana DAU yang hanya cukup untuk membayar gaji pokok dan biaya administrasi. Hal ini tidak memungkinkan mereka untuk menghubungkan sasaran pembangunan mereka dengan perencanaan dan penyusunan anggaran. Permasalahan berikutnya adalah kurangnya akuntabilitas yang melekat dalam jenis bantuan dana ini. Sebagai contoh, pendidikan merupakan prioritas nasional dan pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan dana yang cukup untuk sektor itu. Meskipun banyak pemerintah daerah yang memprioritaskan pendidikan, pemerintah daerah lainnya lebih memprioritaskan yang lain, seperti membangun gedung baru atau membeli mobil baru. Mereka dapat melakukan hal itu tanpa dimintai pertanggung jawabannya selama dana datang dari bantuan yang tak bersyarat. Dengan jenis mekanisme pendanaan untuk pemerintah daerah yang seperti ini, kapasitas untuk mengelola hasil tetap merupakan masalah yang serius.

#### **D. Pemantauan dan Evaluasi**

8. Meskipun sistem statistik secara tradisional sudah mapan, pemantauan dan evaluasi masih merupakan kelemahan utama dalam sistem perencanaan pemerintah. Umpan balik mengenai kemajuan dan hasil yang diperoleh jarang dipenuhi, meskipun banyak sekali persyaratan untuk mengisi dan menyusun formulir. Sebagian besar formulir ini ditujukan hanya untuk disimpan, bukan ditujukan untuk memantau kemajuan dan hasil evaluasi. Pengecualian yang mungkin adalah pemantauan kemajuan terhadap pencapaian MDG, yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat internasional. Selanjutnya, pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk menyiapkan strategi untuk mengurangi kemiskinan, karena kemajuan terhadap MDG dilaporkan pada tingkat daerah. Pemerintah pusat sudah menunjukkan keinginan yang kuat dalam meningkatkan pemantauan dan evaluasi, tetapi untuk melaksanakannya akan memerlukan bantuan teknis yang substansial.

#### **E. Umpan Balik Informasi Hasil untuk Pengambilan Keputusan.**

9. Di Indonesia terdapat kebiasaan bahwa pengambilan keputusan (paling tidak dalam sebagian pengambilan keputusan) didasarkan pada informasi yang tersedia, baik dari sistem statistik maupun melalui kajian khusus. Namun, pengambilan keputusan juga lebih sering didasarkan pada umpan balik informal yang diterima di lapangan melalui sistem pegawai negeri. Ini berarti bahwa ada kesempatan yang baik untuk menggunakan informasi berdasarkan hasil dalam proses pengambilan keputusan, meskipun sekarang ini informasi sejenis itu masih kurang, dan hal ini perlu diperhatikan.

## **F. Kesimpulan**

10. Potensi manajemen hasil yang efektif di Indonesia secara tegas dimasukkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Sejak tahun 2003, pemerintah pusat secara tegas telah menjalankan banyak proses yang pada akhirnya mengarah pada sistem manajemen hasil yang kuat. Tantangan terbesar adalah tidak adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam reformasi pegawai negeri, atau untuk melaksanakan sistem insentif alternatif. Tanpa terjadinya perubahan seperti itu, kapasitas manajemen hasil akan tetap lemah. Pemerintah pusat belum meminta bantuan dana untuk mempelajari dan memulai reformasi pelayanan masyarakat, tetapi jika Pemerintah meminta bantuan tersebut, ADB akan siap memberikan bantuan kepada tempat yang dibutuhkan dan dapat berlangsung efektif.

## PENILAIAN KEMISKINAN DI INDONESIA

### A. Kajian Mengenai Kemiskinan Nasional

#### 1. Profil Kemiskinan Indonesia

1. Angka kemiskinan di Indonesia secara bertahap terus berkurang sejak krisis ekonomi. Pascakrisis ekonomi tercatat 23,4% penduduk miskin dari total penduduk pada tahun 1999. Pada akhir 2004, tingkat kemiskinan yang tercatat secara resmi hanya sebesar 16,7%, yang mewakili lebih dari 36 juta orang, jumlah yang signifikan menurut standar apapun. Pada Maret 2006, tingkat kemiskinan meningkat hingga 17,8%, yang sebagian besar merupakan dampak dari naiknya harga BBM sebagai akibat pengurangan subsidi harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005. Pada tahun 2004, tingkat pendapat nasional adalah Rp122.775 (\$13,73). per orang per bulan. Penduduk miskin terus terpusat di daerah pedesaan (tingkat kemiskinan tercatat sekitar 20,1 % pada tahun 2004). Namun, jumlah orang yang melakukan urbanisasi di Indonesia cepat meningkat. Pada tahun 2000, sekitar 42 % penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Diperkirakan pada tahun 2025, jumlah itu meningkat menjadi 68%.

2. Kesenjangan antar daerah provinsi sangat signifikan. Provinsi dengan angka kemiskinan yang sama bukan berarti jumlah orang miskinnya sama. Jawa timur merupakan provinsi dengan jumlah orang miskin terbanyak (sekitar 7,3 juta pada tahun 2004.), tetapi angka kemiskinan hanya tercatat sekitar 20,1%. Provinsi-provinsi di wilayah timur yang memiliki sedikit populasi, memiliki angka kemiskinan tertinggi, tetapi jumlah orang miskinnya jauh lebih sedikit. Kesenjangan di daerah dapat dikelompokkan dalam tiga kategori umum: antara pulau Jawa dan wilayah Indonesia lainnya, antara wilayah Indonesia timur dan barat, antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun demikian, dengan belajar dari data, gambaran yang didapatkan kurang jelas. Contohnya, kesenjangan antara di pulau Jawa dan Sumatera cukup besar, seperti halnya di antara kabupaten-kabupaten di pulau Jawa.

3. Meningkatnya tingkat kemiskinan dengan cepat selama krisis membuat masyarakat rentan atas segala kegoncangan. Bagian terbesar kelompok miskin dan hampir miskin mengalami kerentanan terhadap fluktuasi harga dan cuaca sehingga mereka tidak mampu mengakumulasi modal untuk memperbaiki kesejahteraan dan melindungi produksi mereka.

4. Tidak semua kemiskinan sama. Kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan berbeda. Tidak ada informasi mengenai dampak krisis terhadap rumah tangga, perbedaan dampak antara laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak, serta orang tua. Beberapa penyamarataan dapat dibuat mengenai perbedaan antara wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendah. Indeks Foster-Greer-Thorbeck, yang memperlihatkan kemiskinan yang kronik, mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah dengan pengaruh kemiskinan tinggi memiliki proporsi yang besar menjadi amat sangat miskin. Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan pengaruh kemiskinan yang rendah secara proporsional rumah tangganya berada di sekitar garis kemiskinan. Beberapa implikasinya adalah jaminan sosial dibutuhkan bagi mereka yang berada dekat garis kemiskinan dan perlindungan sosial bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

## 2. MDG dan Prospeknya

5. Indeks angka kemiskinan hanya merupakan salah satu dari banyak ukuran kemiskinan. MDG memfokuskan pada dimensi yang lebih luas yaitu dimensi kehidupan yang lebih baik, termasuk kelaparan dan akses untuk pendidikan, kesehatan, persamaan gender, air bersih yang aman dan sanitasi, serta tempat tinggal. Secara keseluruhan, Indonesia membuat kemajuan yang baik dalam mencapai MDG, khususnya dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan, pendidikan, persamaan gender, dan pengurangan tingkat kematian anak. Tetapi perkiraan positif secara umum menutupi realitas yang kompleks, karena statistik gabungan nasional tidak berhasil menggambarkan adanya daerah-daerah yang tidak berkembang dan tidak ratanya pencapaian MDG. Tantangan terbesar MDG adalah lingkungan dan kesehatan. Misalnya, diperkirakan terdapat sekitar 582.000 kasus baru tuberkulosis setiap tahunnya, dan tingkat kematian ibu melahirkan rata-rata tetap tinggi. Risiko kematian ibu terkait dengan melahirkan di Indonesia diperkirakan 1 dari 65 orang, dibandingkan dengan di Thailand yang hanya 1 kematian dari 1.100 atau di Jerman yang hanya 1 dari 8.000.

## 3. Lembaga, Pasar, dan Desentralisasi

6. Pasar tenaga kerja di Indonesia sebagian besar bersifat informal dan fleksibel, di mana orang dapat dengan mudah berpindah sektor sesuai keadaan dan tersedianya pekerjaan. Semenjak tahun 1997, pertumbuhan lapangan pekerjaan yang lamban tidak mampu menyerap tenaga kerja baru yang hampir 2,5 juta orang setiap tahunnya. Jumlah pengangguran terus meningkat, sampai 9,9 % atau 10,8 juta pada tahun 2005. Jumlah pengangguran tertinggi meliputi antara lain pemuda, perempuan, dan orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi (SMA dan di atasnya). Para pencari kerja dapat dibagi dalam dua kategori: (i) orang muda dan yang berpendidikan tinggi, yang sedang mencari pekerjaan yang lebih sesuai; dan (ii) orang miskin dan yang tidak mempunyai keterampilan, orang yang tak mampu hidup jika tidak bekerja.

7. Karena rendahnya produktivitas, pekerja formal tidak dapat melepaskan dirinya dari kemiskinan. Hampir 20% pekerja formal miskin. Pekerja formal tergusur oleh rendahnya investasi dan sulitnya menaikkan upah minimum. Kenaikan upah telah melampaui nilai tambah. Secara umum para pekerja mempunyai pendidikan yang rendah dan miskin keterampilan. Rata-rata usia pekerja, 25 sampai 54 tahun, mengenyam pendidikan kurang dari 8 tahun. Meskipun Indonesia telah membuat langkah yang besar, negara tetangga Indonesia telah membuat kemajuan lebih cepat. Hasilnya, pekerja Indonesia harus bersaing dengan pekerja dari Kamboja, India dan PRC.

8. Lebih dari 90% bisnis di Indonesia dijalankan oleh perusahaan kecil. Pertumbuhan mereka, dan lapangan kerja yang mereka ciptakan, sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Namun, usaha kecil baru dan perusahaan kecil yang baru didirikan jarang mampu mendapatkan kredit resmi dari bank karena tidak mempunyai perencanaan usaha yang pasti, tidak terdaftar sebagai badan usaha resmi. Selain itu, kebutuhan dana mereka tidak besar sehingga suku bunga dan biaya modalnya terlalu besar untuk jumlah pinjaman tersebut. Pengusaha kecil terhambat oleh ketidakmampuannya untuk menyediakan jaminan properti untuk melakukan pembayaran. Mereka juga tidak mampu mengumpulkan modal sendiri untuk mendanai sebagian dari keseluruhan investasi. Tidak ada satupun bank yang bersedia mendanai 100% pengajuan investasi baru dan menanggung keseluruhan risiko dari usaha kecil.

9. Keterbatasan jaringan geografis juga mengurangi kemampuan akses perusahaan-perusahaan kecil di pedesaan ke jasa keuangan. Lembaga keuangan nonbank juga

memobilisasi tabungan untuk orang miskin, menjadi intermediasi dengan bank, dan menyalurkan sumber daya keuangan bagi penduduk miskin. Kelompok-kelompok masyarakat mandiri juga menyediakan jaringan pengaman ekonomi bagi anggotanya. Telah dilakukan upaya untuk memperluas lingkup jasa keuangan untuk dengan mencakup penduduk miskin, tetapi terkendala dalam penentuan sasaran dan pelaksanaannya. Kendala penting lainnya bagi usaha kecil di pedesaan adalah ketersediaan bahan mentah, dan pengetahuan mengenai pemasaran, teknik produksi, dan manajemen.

10. Perbaikan akses ke pelayanan yang penting merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai MDG. Desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mendekatkan pelayanan langsung masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Namun, kerangka hukum untuk desentralisasi ini belum jelas, dan standar pelayanan masyarakat tidak dapat dipenuhi dalam sumber daya yang dialokasikan. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawab mereka masih menjadi tantangan utama desentralisasi, khususnya dalam pemberian pelayanan. Masyarakat di daerah juga memerlukan pengembangan kapasitas, karena mereka tidak memiliki informasi mengenai rencana pembangunan, alokasi anggaran, dan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan sosial.

#### **4. Penyebab Kemiskinan**

11. Penyebab kemiskinan menurut PRSP adalah kurangnya akses ke (i) makanan berkualitas yang dapat dibeli; (ii) pelayanan kesehatan yang berkualitas; (iii) pelayanan pendidikan yang berkualitas; (iv) kesempatan kerja dan usaha; (v) pelayanan sanitasi dan permukiman; (vi) air bersih; (vii) sumber daya alam dan rusaknya lingkungan; serta (viii) ketiadaan hak tanah; (ix) konflik dengan kekerasan; dan (x) kurangnya partisipasi. Sebab-sebab ini dapat dilihat dari tidak adanya akses ke berbagai bentuk modal manusia, fisik, keuangan, alam, dan sosial. Tiga faktor lain yang berkontribusi pada munculnya kemiskinan adalah tidak memadainya infrastruktur, tertinggalnya pertanian, dan kerentanan. Lebih dari separuh penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional dengan hanya dari \$2 per hari pada tahun 2002<sup>120</sup>. Perubahan kecil dalam pendapatan dapat berdampak baik terhadap kesejahteraan bagi keluarga yang rentan.

12. Sektor infrastruktur di Indonesia rusak: jumlah wilayah yang dialiri listrik merupakan yang terendah dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara (sebesar 53%) dan kemacetan di jalan semakin meningkat. Ketika pemerintah daerah diberikan kendali atas infrastruktur daerah, mereka tidak mendapatkan dana yang memadai untuk investasi di bidang infrastruktur. Kondisi geografis berdampak besar dalam pelayanan dan kemiskinan. Rendahnya kepadatan penduduk di luar Jawa, kurangnya jaringan transportasi antar pulau dan di dalam pulau, serta terkonsentrasinya industri dan perdagangan menyebabkan tidak adanya pasar yang terintegrasi. Penduduk yang hidup jauh dari pusat-pusat perdagangan menderita karena harga barang yang harus mereka beli untuk kebutuhan hidup jauh lebih mahal dibanding dengan harga barang hasil produksi mereka. Hal ini disebabkan oleh hambatan perdagangan antar wilayah, monopoli lokal, dan informasi pasar yang buruk. Kurangnya akses ke prasarana fisik mengurangi akses ke pelayanan dasar. Dengan perbaikan akses ke infrastruktur fisik, guru-guru akan bersedia mengajar di daerah pedesaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan

<sup>120</sup> Garis kemiskinan internasional dengan biaya hidup \$1 dan \$2 per hari dikonversikan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (purchasing power parity = PPP) persamaan kekuatan pembelian tahun 1993. Penting untuk dicatat bahwa \$2 yang dikonversi dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar PPP tahun 1993 jauh lebih rendah dibandingkan konversi nilai tukar ke dalam rupiah pada tahun 2005. Dalam database Pandangan Ekonomi Dunia IMF (April 2005) pelaksanaan nilai tukar konversi PPP per US dolar hanya Rp 2.535 untuk tahun 2005. Nilai tukar dolar sekarang adalah Rp 9.089.

modal manusia di pedesaan. Perluasan pekerja pertanian dapat menyentuh petani di pedesaan, memberikan nasehat teknis dalam bagaimana cara meningkatkan produktivitas. Jika penduduk desa dapat mencapai puskesmas, kematian anak mungkin dapat berkurang.

13. Pada pertengahan tahun 1990an, keberhasilan dalam pembangunan pertanian menghasilkan kepuasan, dan momentum untuk memperluas varietas hasil panen, irigasi, pupuk, dan masukan lain telah hilang. Prioritas pemerintah berpindah jauh dari pertanian, kualitas manajemen ekonomi sektor publik melemah, dan investasi dalam bidang pertanian dan sektor pedesaan menurun jauh. Rusaknya harga dunia untuk komoditas dasar, seperti beras, kemudian juga mengurangi keuntungan dalam pertanian. Persaingan harga internasional, tingginya nilai tanah dari pertumbuhan populasi dan urbanisasi, meningkatnya tekanan lingkungan, dan kurang terprediksinya perubahan cuaca membuat para pekerja pertanian dan petani goncang. Kerentanan terhadap goncangan adalah kenyataan hidup bagi sebagian besar penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan, dan perubahan kecil dalam pendapatan dapat berdampak besar pada kesejahteraan keluarga yang rentan.

## **5. Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan.**

14. Mengurangi kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintah pusat, tetapi dasar falsafahnya sudah berubah. Pemerintah pusat tidak lagi melihat pertumbuhan sebagai usaha yang dapat mengurangi kemiskinan, melainkan pengembangan sumber daya manusia yang dapat menjadi penyeter pertumbuhan. Naskah Strategi Pengurangan Kemiskinan Pemerintah (PRSP) oleh pemerintah pusat sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJN). Tujuan PRSP adalah untuk (i) membangun komitmen Indonesia dalam mengurangi kemiskinan, (ii) membangun konsensus dalam memberantas kemiskinan, (iii) menekankan komitmen untuk meraih MDG, dan (iv) mensinkronisasi kegiatan pengurangan kemiskinan. Dalam PRSP, strategi pengurangan kemiskinan ditingkatkan di setiap daerah karena pemerintah daerah didorong untuk membentuk komite pengurangan kemiskinan dan untuk menyiapkan strategi pengurangan kemiskinan. Pembangunan kemampuan selanjutnya bagi pemerintah daerah menjadi kunci bagi keberhasilan mereka. Untuk mengimplementasikan PRS, pemerintah bekerja dengan masyarakat dan pihak swasta untuk menyiapkan kontrak sosial yang memfokuskan pada empat hak dasar yang diprioritaskan: jaminan adanya makanan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kohesi sosial dalam menyediakan peta jalan kepada seluruh pemegang saham.

15. Indonesia mempunyai sejarah pelaksanaan strategi untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Permulaan strategi difokuskan pada pentargetan geografis. Target berikutnya adalah pada perorangan dan keluarga tetapi sangat terhambat dalam lingkup dan keakuratan data. Program pentargetan diri, yakni orang miskin mampu menentukan dirinya untuk mendapat keuntungan, telah lebih berhasil. Keuntungan-keuntungan ini adalah barang-barang berkualitas rendah (seperti beras yang berkualitas rendah), rendahnya kesempatan kerja (kerja tanpa keterampilan, dengan upah di bawah rata-rata pasar), atau barang dan pelayanan yang sebagian besar digunakan oleh orang miskin (yang siap ditukarkan dengan barang yang lebih baik ketika pendapatan meningkat). Program pekerjaan umum yang intensif yang dikerjakan buruh, dengan upah di bawah UMR untuk proyek-proyek konstruksi, selama ini efektif dalam mengangkat pendapatan orang miskin.

## 6. Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Memperoleh Kesejahteraan di Indonesia

16. Strategi pengurangan kemiskinan ADB<sup>121</sup> - pertumbuhan ekonomi berpihak pada orang miskin, keikutsertaan pembangunan sosial, dan tata kelola pemerintah yang baik menyediakan kesempatan untuk pengurangan kemiskinan. Akses yang lebih baik untuk pelayanan adalah kunci dalam pengurangan kemiskinan. Memprioritaskan investasi dalam modal sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan) dan dalam modal fisik (pelayanan infrastruktur) akan jauh lebih berhasil dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Program yang ditargetkan akan selalu perlu untuk orang-orang miskin. Program yang ditargetkan dengan dua manfaat adalah pengiriman uang tunai bersyarat, dengan tujuan jangka pendek dalam dukungan pendapatan dan tujuan jangka panjang dalam pengurangan kemiskinan melalui peningkatan modal sumberdaya manusia. Untuk sampai pada yang terakhir, perbaikan data daerah dibutuhkan untuk meningkatkan target sumber daya dan program untuk orang miskin. Hal ini khususnya penting dalam konteks desentralisasi karena pemerintah daerah sekarang harus bertanggung jawab penuh untuk mengurangi kemiskinan.

### B. Penilaian Pemerintahan dan Pemberantasan Korupsi

#### 1. Pendahuluan.

17. Tujuannya adalah untuk menggambarkan masalah-masalah dan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam usahanya memerangi korupsi serta tanggapan pemerintah pusat terhadap tantangan-tantangan ini. Peta jalan mengusulkan cara ADB memfokuskan operasinya dengan pemerintah pusat serta pemegang saham lainnya untuk melawan korupsi.

18. ADB telah berpartisipasi dalam pertemuan tetap dengan kelompok kerja anti korupsi, di antaranya bergabung dengan kelompok kerja di bawah Consultative Group for Indonesia (CGI) dan dikepalai oleh Partnership for Governance Reform, dan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dengan badan pendanaan multilateral dan bilateral. Karena fokus antikorupsi politik baru yang kemudian menjadi momentum yang tepat bagi reformasi, seluruh lembaga donor utama memfokuskan pada korupsi dan pada bagaimana mendukung upaya pemberantasannya secara efektif dan terkoordinasi.

#### 2. Situasi Sekarang- Analisis Rangkuman

19. Melawan korupsi merupakan agenda reformasi pemerintah pusat. Presiden sendiri dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa prioritas pertamanya adalah memberantas korupsi. Meskipun perundang-undangan pemberantasan korupsi baru telah dikeluarkan selama beberapa tahun terakhir ini, baru tahun 2005 mulai ditegakkan secara sungguh-sungguh. Selama masa pemerintah sebelumnya, seperti biasa banyak pejabat yang kurang akuntabel dan melakukan korupsi tidak mendapatkan hukuman. Hakim sering tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan korupsi, kecuali dalam beberapa kasus yang sering dipublikasi media. Namun, sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memfokuskan pada pemberantasan korupsi, ditambah dengan keberhasilan KPK, telah mengubah keadaan. Sekarang korupsi diselidiki dan diteruskan ke pengadilan sampai pada hal-hal yang sebelumnya tidak dilakukan.

<sup>121</sup> ADB.1999. *Poverty Reduction Strategy*. Manila

20. Selain KPK, Presiden telah membentuk suatu komite dengan representasi dari Kepolisian Negara dan Kantor Kejaksaan untuk memfokuskan pada kasus-kasus korupsi. Pada akhir 2004, Presiden mengeluarkan instruksi (Inpres No. 5/2004), dan Rencana Aksi Nasional untuk Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) ditetapkan beberapa bulan kemudian. Di tingkat daerah, kasus korupsi, yang sering mendapatkan dukungan dari Rekanan untuk Reformasi Pemerintahan, telah melakukan penyelidikan dan mengusut beberapa kasus tingkat tinggi terhadap anggota-anggota DPRD atau bahkan terhadap keseluruhan anggota DPRD. Jelaslah bahwa pejabat yang sebelumnya kurang akuntabilitas dan pemberian pengampunan terhadap mereka tidak lagi diterima.

21. Undang-undang dan lembaga antikorupsi umum menghukum para terpidana, tetapi mereka tidak menghilangkan bibit-bibit korupsi atau menghapuskan “budaya korupsi” yang ada. Pemberantasan korupsi merupakan proses yang lebih kompleks dan menuntut daripada menghukum para pelaku korupsi. Agar sepenuhnya efektif, perang melawan korupsi membutuhkan tindakan pencegahan yang ditujukan pada elemen yang mendasar dari sistem pemerintahan dan tingkah laku perorangan yang bekerja di dalamnya atau yang berhubungan dengannya. Indonesia perlu memfokuskan pada mereformasi lintas fungsi pemerintah, seperti manajemen pengeluaran publik, termasuk audit dan biaya pesanan; proses pengaturan, termasuk implementasi dan penegakan hukum yang telah dikeluarkan secara efektif; dan manajemen pegawai negeri, khususnya dalam pemerintah daerah yang otonom.

22. KPK, yang merupakan tempat integritas dalam aparatus negara, telah berhasil selama tahun 2005, dengan banyaknya kasus-kasus tingkat tinggi yang diselidiki dan dimeja-hijaukan. Hal ini jelas menunjukkan keseriusan dari komitmen pemerintah pusat tetapi sedikit dampaknya terhadap tingkah laku para pejabat yang bekerja di kantor pusat serta di 33 propinsi dan 440 daerah administrasi. KPK adalah institusi yang berpusat di Jakarta dengan sedikit jangkauan ke daerah, tempat dimana elit lokal terlibat dalam banyak kasus korupsi seperti biasa. Dampak dari Inpres No. 5/2005 dan RAN-PK sejauh ini terbatas. Beberapa institusi telah mengeluarkan kebijakan baru di bawah Inpres 5/2004, seperti pengumuman aset, evaluasi kinerja, dan usaha melakukan pemberantasan. Tetapi jumlah kebijakan masih sangat sedikit dan dampaknya masih marginal karena semua itu ditetapkan dalam sistem administrasi yang perlu direformasi secara mendasar dan radikal. Fakta bahwa Inpres No. 5/2004 hanya meliputi lembaga eksekutif, membiarkan lembaga hukum, lembaga pembuat perundang-undangan, dan partai politik tidak tersentuh, sehingga membatasi dampaknya.

23. Pada tanggal 26 Maret 2006, DPR meratifikasi Konvensi PBB Memberantas Korupsi. Ini berarti KPK sekarang harus memenuhi perannya sebagai lembaga pusat antikorupsi sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi PBB. KPK harus memfokuskan pada tugasnya untuk mencegah terjadinya korupsi selain tugasnya yang melakukan represi terhadap korupsi, seperti melakukan penyelidikan dan pengusutan. Pada akhirnya, KPK memberikan pengajuan pada Presiden tentang rencana pokok untuk reformasi pemerintahan yang komprehensif, termasuk reformasi pelayanan masyarakat dalam lembaga eksekutif, lembaga hukum, dan lembaga pembuat perundang-undangan. Presiden, dalam rapat kabinet, pada dasarnya sudah menyetujui proposal reformasi. Peran KPK adalah untuk memfasilitasi dan menekan untuk terjadinya reformasi tetapi tidak ikut terlibat dalam implementasinya. Implementasinya akan dipimpin dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja Presiden (UKP). Kepala UKP akan melapor pada Presiden. UKP akan membantu Presiden dalam membuat kesepakatan dalam melaksanakan target dan target reformasi dengan institusi publik terpilih. Kemajuan dalam hubungannya dengan target-target ini akan dipantau oleh UKP.

24. Hanya sedikit pemerintah daerah yang progresif dalam melakukan reformasi atas administrasi mereka, termasuk dalam proses bisnis, staf, dan manajemen sumber daya manusia. Namun, cakupan reformasi tersebut terbatas oleh peraturan pegawai negeri yang kaku, dan reformasi tidak dapat berlanjut kecuali dikombinasikan dengan reformasi peraturan pusat. Menteri keuangan baru-baru ini memulai reformasi direktorat pajak dan bea cukai untuk mengekang kebiasaan korupsi dan memperbaiki kinerja. Beliau juga bermaksud meninjau kondisi gaji para pejabat tinggi untuk meningkatkan transparansi dan memperbesar jumlah gaji mereka agar memadai. Jadi, UKP menjadi mekanisme koordinasi yang penting untuk pelaksanaan reformasi yang sedang berlangsung di berbagai institusi dan pada berbagai tingkatan, dan menjamin kelanjutan dari reformasi itu, karena UKP akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan lembaga pembuat undang-undang dan sistem manajemen yang digunakan oleh pegawai negeri.

### **3. Masalah Pembangunan dan Tantangan Utama**

25. Dalam survei persepsi terhadap korupsi tahunan yang dilakukan oleh Transparency International, Indonesia mendapat peringkat 140 dari 159 negara. Korupsi merebak, terutama dalam lembaga-lembaga negara dan dalam cara lembaga-lembaga itu berurusan dengan bisnis dan masyarakat. Di bawah pemerintahan Orde Baru, lembaga-lembaga negara itu mengabaikan pemerintahan yang baik dan penegakan hukum. Negara mengatur bagian yang penting dalam sektor korporasi, dan kepentingan pribadi diperbolehkan mengatur kepentingan umum. Warisan dari pemerintah otoriter sebelumnya ini masih berlaku sampai sekarang dan belum juga berubah.

26. Kerangka hukum dalam negara yang korup tampak sama dengan kerangka hukum dalam negara yang tidak korup. Dalam negara korup yang sedang dalam masa transisi, seperti Indonesia, kerangka hukum sedang direformasi. Undang-undang baru dibuat, lembaga baru didirikan untuk demokrasi, dan pasar ekonomi akan dibangun sebagaimana yang terjadi di negara yang tidak korup. Meskipun proses reformasi kerangka hukum sedang berlangsung, lembaga baru yang diperlukan untuk demokrasi dan pasar ekonomi baru dibentuk, di Indonesia, praktik lama terus berjalan di bawah permukaan. Proses ini tidak terlihat dan berjalan berdasarkan hukum yang tak tertulis.

### **4. Kebijakan Pemerintah**

27. Sejak tahun 1999, banyak undang-undang yang ditetapkan, termasuk Undang-Undang No. 28/1999 mengenai Kebersihan Lingkungan, Undang-Undang No. 31/1999 mengenai Pemberantasan Tindakan Korupsi, Undang-Undang No. 15/2002 mengenai Pemberantasan Pencucian Uang, dan Undang-Undang No. 30/2002 mengenai Pembentukan KPK. Pemerintah telah mendirikan lembaga-lembaga penting, termasuk lembaga-lembaga untuk membantu negara memerangi korupsi. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Audit Kekayaan Pejabat Negara, yang telah digabung dengan KPK pada tahun 2004; Komisi Ombudsman Nasional; Komisi Undang-Undang Nasional; dan Komisi Pemberantasan Pencucian Uang. Presiden telah membentuk tim kerja yang melibatkan Kantor Kejaksaan Umum dan Kepolisian RI untuk memfokuskan pada penyelidikan dan pengusutan kasus-kasus korupsi. Hukum yang komprehensif dan kerangka kelembagaan untuk menghambat korupsi sudah tepat dibuat. Namun, baru pada tahun 2005 perundang-undangan yang komprehensif ini mulai ditegakkan secara konsisten.

28. Sampai saat ini kebijakan pemerintah memfokuskan pada upaya represi: menyelidiki dan mengusut di pengadilan kasus korupsi perorangan. Meskipun tindakan ini memberi sinyal

politik yang penting kepada seluruh masyarakat, pemberantasan korupsi masih belum lemah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendukung strategi KPK untuk fokus pada pencegahan dan mendorong terjadinya reformasi yang mendasar dalam pemerintahan.

## 5. Pengaturan Kelembagaan

29. Struktur administrasi terfragmentasi; banyak bidang, termasuk pemberantasan korupsi, ditangani oleh beberapa lembaga, sehingga menjadi tumpang tindih dan reformasi berjalan lambat. Mandat KPK tumpang tindih dengan tugas Kepolisian RI dan Kantor Kejaksaan Umum. Presiden baru-baru ini membentuk tim kerja terdiri atas wakil dari Kepolisian RI dan Kantor Kejaksaan Umum untuk memfasilitasi koordinasi di antara keduanya. Keseluruhan mandat tim KPK tidak hanya tumpang tindih dengan mandat polisi dan pihak kejaksaan umum, tetapi juga tumpang tindih sendiri dalam tim kerja itu. KPK dibentuk sebagai jawaban akan kurangnya kinerja polisi dan jaksa. Jaksa dari Kantor Kejaksaan Umum membawa kasus mereka ke sistem pengadilan yang biasa, sedangkan KPK harus membawa pengusutan kasus ke Pengadilan Antikorupsi yang baru didirikan. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus dengan hakim terdiri atas sebagian besar hakim ad hoc (hakim yang terpilih untuk maksud tertentu). Namun, kemampuan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini belum memadai karena tidak dibantu oleh tenaga ahli dari luar negeri. Sangatlah sulit untuk menemukan dan membayar sepentasnya para hakim ad hoc. Sejauh ini, Pengadilan Antikorupsi telah membuat lima keputusan, yang semuanya sangat tegas dan sepenuhnya mengaplikasikan Undang-Undang Antikorupsi. Hal ini menyebabkan masyarakat menghargai pengadilan ini.

30. Selain KPK, Kepolisian RI, Kantor Kejaksaan Umum, dan Pengadilan Antikorupsi, ada beberapa lembaga khusus yang mengurus pemberantasan korupsi dengan mandat tertentu agar tidak tumpang tindih dengan lembaga yang lain. Lembaga-lembaga ini adalah Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Undang-Undang Nasional, dan Komisi Pemberantasan Pencucian Uang.

## 6. Peran Mitra Pembangunan

31. Mendukung upaya pemberantasan korupsi merupakan prioritas hampir seluruh lembaga donor bilateral dan multilateral, termasuk ADB. Banyak lembaga donor, termasuk ADB, mendukung KPK. Lembaga yang lain, termasuk ADB, memfokuskan pada Departemen Keuangan, lembaga-lembaga audit, dan usaha pengadaan barang. Lembaga pemberi dana lain masih mendukung kegiatan anti korupsi dalam pemerintah daerah, sedangkan beberapa yang lain memfokuskan pada lembaga hukum dan pengadilan. Daftar referensi seluruh kegiatan pemberantasan korupsi yang didukung lembaga donor dilampirkan pada peta jalan ini. Refrensi ini selalu diperbarui di [www.kemitraan.or.id/projects.anticorruption.matrixdonor.php](http://www.kemitraan.or.id/projects.anticorruption.matrixdonor.php).

## 7. Keberhasilan dan Pelajaran yang Didapat ADB dalam Memerangi Korupsi

32. Selain banyak kegiatan yang didanai pinjaman ADB untuk memperkuat manajemen pengeluaran pemerintah, termasuk desentralisasi audit dan fiskal, dan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, ADB telah mengimplementasikan beberapa proyek TA pemberantasan korupsi yang penting selama lima tahun terakhir.<sup>122</sup> Seluruh proyek TA

<sup>122</sup> ADB.1999. *Technical Assistance to Republic of Indonesia for Establishment of an Anticorruption Commission* (Bantuan Teknis untuk Negara Republik Indonesia untuk Pembentukan Komisi Anti Korupsi). Manila. TA 3381-INO, disetujui pada 28 Desember 1999 uang sebesar \$1 juta ;ADB. 2000. *Technical Assistance to Republic of Indonesia for Improving Public Sector Procurement* (Bantuan Teknis untuk Negara Republik Indonesia untuk Memperbaiki Sektor Pengadaan Barang Publik). Manila. TA 3471 INO, disetujui pada 21 Juli 2000 sebesar \$780.000;ADB 2000.

memberikan pelajaran yang sama: (i) keberhasilan memerlukan lembaga rekanan yang berkomitmen dan mengetahui bagaimana cara menggunakan hasil dari proyek TA; (ii) hasilnya seharusnya menjadi instrumen untuk digunakan oleh lembaga rekanan dan bukan digunakan dalam laporan konsultan dalam bahasa Inggris; hanya laporan kemajuan milik konsultan yang sebaiknya dibuat dalam bahasa Inggris; (iii) sedapat mungkin konsultan domestik harus ikut dilibatkan dalam banyak hal, dan penggunaan konsultan internasional sebaiknya dibatasi hanya untuk memberikan pengetahuan dan jaringan kerja pembanding yang tidak dimiliki oleh konsultan domestik; dan (iv) Proyek TA seharusnya menyediakan masukan dari berbagai konsultan, perangkat keras, perangkat lunak, dan untuk pembangunan kapasitas. Jika proyek TA hanya menyediakan masukan dari konsultan, kemungkinan tidak akan ada kelanjutan hasil proyek tersebut.

## 8. Operasi ADB

33. ADB mempunyai banyak kegiatan yang didanai pinjaman yang sedang berlangsung dengan fokus pada pemberantasan korupsi dan pembangunan kapasitas<sup>123</sup>. Secara umum, program pinjaman yang sedang disiapkan mempunyai dimensi pemerintahan dan anti korupsi yang sesungguhnya (Tabel A6.1) Selama periode CSP, ADB dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (i) Perlu dilakukan penilaian korupsi terkait dengan MTS II. Penilaian seperti ini seharusnya dilakukan dengan bekerja sama dengan KPK dan donor lain yang memfokuskan pada analisis yang sama.
- (ii). Berdasarkan kerja sama yang baik sebelumnya dengan KPK dan hasil penting yang disediakan oleh proyek Bantuan Teknis TA 4341 INO mengenai Peningkatan Kapasitas

---

*Technical Assistance to Republic of Indonesia for Support for the Government Anticorruption Efforts in Public Relation* (Bantuan Teknis untuk Negara Republik Indonesia untuk Mendukung Usaha Anti Korupsi yang Dilakukan Pemerintah dalam Hubungan Publik). Manila. TA 3608-INO, disetujui tanggal 21 Desember 2000 sebesar \$150.000: ADB 2001. *Technical Assistance to Republic of Indonesia for Support for the Partnership for Governance Reform in Indonesia* (Bantuan Teknis untuk Negara Republik Indonesia untuk Mendukung Rekanan dalam Reformasi Pemerintahan di Indonesia). Manila. TA 3720-INO, disetujui pada tanggal 18 Desember 2001 sebesar 750.000 dolar: ADB.2001. *Technical Assistance to Republic of Indonesia for Strengthening Procurement Policies, Legal Framework and Institutions* (Bantuan Teknis untuk Negara Republik Indonesia untuk Memperkuat Kebijakan Pengadaan Barang, Kerangka Hukum, dan Institusi). Manila. TA 3813-INO, disetujui pada tanggal 19 Desember 2001 sebesar \$500.000: ADB 2002. *Technical Assistance to Republic of Indonesia for Strengthening the Capacity of MSRI to Combat Fraud and Corruption* (Bantuan Teknis untuk Negara Republik Indonesia untuk Memperkuat Kapasitas MSRI untuk Memerangi Penipuan dan Korupsi). Manila. TA 3842-INO, disetujui pada tanggal 12 Maret 2002 sebesar \$625.000: ADB. 2003. *Technical Assistance to Republic of Indonesia for Improvement of the Administration of the Supreme Court* (Bantuan Teknis untuk Negara Republik Indonesia untuk Memperbaiki Administrasi Mahkamah Agung). Manila. TA 4251-INO, disetujui pada tanggal 13 Desember sebesar \$500.000; dan ADB. 2004. *Technical Assistance to Republic of Indonesia for Strengthening the Capacity of the Commission for Eradication of Corruption in Indonesia (KPK)* (Bantuan Teknis untuk Negara Republik Indonesia untuk Meningkatkan Kapasitas KPK). Manila. TA 4341-INO, yang disetujui pada tanggal 21 Mei 2004 sebesar \$250.000.

<sup>123</sup> ADB. 2005. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Loan to the Republic of Indonesia for Local Government Finance and Governance Reform Program* (Laporan dan Rekomendasi dari Presiden untuk Direksi mengenai Pinjaman untuk Republik Indonesia untuk Keuangan Pemerintah Daerah dan Program Reformasi Pemerintahan). Manila. Pinjaman No. 2193-INO, disetujui pada tanggal 3 November 2005 sebesar \$30 juta; ADB. 2004. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Loan to the Republic of Indonesia for State Audit Reform Sector Program (Project Loan)* (Laporan dan Rekomendasi Presiden untuk Direksi mengenai Pinjaman untuk Republik Indonesia untuk Program Sektor Reformasi Audit Negara (Proyek Pinjaman)). Manila. Pinjaman No. 2127-INO, disetujui pada tanggal 13 Desember 2004 sebesar \$25 juta; dan ADB. 2002. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Loan to the Republic of Indonesia for Sustainable Capacity Building for Decentralization* (Laporan dan Rekomendasi dari Presiden untuk Direksi mengenai Pinjaman untuk Republik Indonesia untuk Pembangunan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi). Manila. Pinjaman No. 1964-INO, disetujui pada tanggal 10 Desember 2002 sebesar \$46 juta.

- KPK, proyek Bantuan Teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas KPK seharusnya dipertimbangkan. Cakupannya kerja sama dengan KPK dan lembaga donor lain harus dijelaskan.
- (iii) Perlu dipertimbangkan proyek TA untuk memperkuat kapasitas Pengadilan Anti Korupsi dapat karena pengadilan biasa menghambat pengusutan kasus korupsi oleh KPK.
- (iv) UKP kemungkinan besar akan memfokuskan pada reformasi pajak DG dan bea cukai DG yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan menteri keuangan. UKP juga akan memfokuskan pada reformasi aspek lain administrasi, termasuk lembaga hukum. UKP akan memfokuskan pada reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ADB akan sangat mendukung reformasi ini.
- (v) ADB lebih lanjut dapat mempertimbangkan perlindungan keuangan dan skema pensiun dini sebagai hasil dari usaha reformasi pegawai negeri di bawah program UKP.

**Tabel A4.1 : Dimensi Tata Kelola Pinjaman Program**

Intervensi Kebijakan	Hasil Pemerintahan yang Potensial
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Reformasi Infrastruktur Sektor Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tender yang transparan untuk proyek kemitraan pemerintah-swasta (PPP), baik yang menggunakan sistem permintaan penawaran maupun proposal proyek yang tanpa diminta.</li> <li>• Pengaturan pembagian risiko yang transparan untuk proyek PPP, berdasarkan proyek dan kriteria sektor yang jelas serta kehati-hatian dalam urusan fiskal</li> <li>• Tindakan anti korupsi pada tingkat sektor dan proyek</li> <li>• Memberi kesempatan yang adil dan merata di antara pemain sektor pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Reformasi Sektor Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat tata kelola keuangan dan badan hukum dalam lembaga keuangan nonbank, untuk memastikan terpenuhinya secara penuh rencana pemegang kebijakan</li> <li>• Mengurangi kelalaian dalam tata keola</li> <li>• Mempromosikan kehati-hatian fiskal melalui reformasi sekuritas sosial</li> <li>• Sistem manajemen keuangan pemerintah untuk pemasukan dan pengeluaran yang transparan dalam pemerintah daerah, yang menghasilkan pemberian pelayanan masyarakat yang lebih baik</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Reformasi Pembangunan Keuangan Pemerintah Daerah dan Tata Kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (terhadap penduduknya dan pemerintah pusat, yang memberi sumber daya fiskal yang signifikan)</li> <li>• Membuat proyek percontohan reformasi pegawai negeri di daerah provinsi terpilih, yang bertujuan untuk menguatkan administrasi pemerintah</li> </ul>

- Program Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals
- Mengadopsi tindakan anti korupsi pemerintah daerah tertentu
- Memperkuat sistem pengendalian internal dalam pemerintah daerah
- Orientasi pengeluaran pemerintah yang efisien untuk memastikan bahwa prioritas pengurangan kemiskinan dan percepatan pencapaian MDG terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia, yang menghasilkan berkurangnya kesenjangan antar daerah.

Intervensi Kebijakan	Hasil Pemerintahan yang Potensial
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Bantuan Kebijakan Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat pemberian pelayanan dan akuntabilitas dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya</li> <li>• Membentuk norma-norma minimum pemberian pelayanan berdasarkan metodologi pembiayaan yang sehat dan transparan</li> <li>• Manajemen fiskal yang berhati-hati, berdasarkan orientasi pengeluaran pemerintah yang jelas dan upaya yang konsisten untuk mengurangi utang pemerintah</li> <li>• Mengurangi kelalaian dan menguatkan peraturan pemerintahan dalam sektor keuangan melalui pembentukan jaringan keamanan keuangan yang transparan</li> <li>• Memperbaiki tata kelola korporai dalam sektor perbankan, dan memperkuat kerangka peraturan dalam sektor keuangan nonbank</li> <li>• Beralih dari sistem investasi yang membutuhkan yang menunggu persetujuan ke sistem resgitrasi yang sederhana, dan mengadopsi daftar negatif secara transparan. Kedua hal itu dapat mengurangi birokrasi dan biaya transaksi dalam berbisnis</li> <li>• Memperbaiki manajemen keuangan pemerintah melalui reformasi perbendaharaan dan audit</li> <li>• Transparansi melalui pembentukan sistem <i>Treasury Single Account</i> (TSA), dengan sekitar 30.000 jumlah rekening pemerintah pusat di bank yang berpindah ke rekening terkendali TSA, yang nantinya akan dengan cepat menghasilkan \$1,2 miliar dalam TSA</li> </ul>

PPP=public-private partnership (kemitraan pemerintah-swasta); SDP=sector development program (program pembangunan sektor); TSA=Treasury Single Account

## C. Desentralisasi: Manajemen Keuangan dan Ekonomi Publik

### 1. Pendahuluan

34. Dokumen ini menguraikan masalah dan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam desentralisasi dan manajemen keuangan publik (pemerintah), tanggapan pemerintah pusat atas tantangan ini, dan bagaimana ADB mengusulkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi tantangan tersebut pada tahun 2006-2009. Rencana program tersebut tertuang dalam Rancangan Pelaksanaan Nasional untuk Desentralisasi Fiskal (National Action Plan for Fiscal Decentralization/NAPFD) dan pekerjaan-pekerjaan penting lainnya di bawah berbagai program pinjaman dan proyek Bantuan Teknis ADB.

### 2. Gambaran Latar Belakang Negara dan Sektor

35. Terjadinya 'ledakan besar' desentralisasi pada tahun 2001 (berdasarkan Undang-Undang No.22/1999) secara signifikan menggeser sumber daya dan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan provinsi ke pemerintahan kabupaten dan kota. Karena terjadinya reformasi, pemerintahan kabupaten menjalankan 11 fungsi wajib, sementara pemerintahan provinsi memiliki peranan kedua.<sup>124</sup> Seiring dengan meluasnya tanggung jawab pemerintah daerah sejumlah besar tenaga pegawai (kira-kira terdapat 2,5 juta pegawai negeri, tiga perempat merupakan guru dan pekerja kesehatan) berpindah dari pemerintah pusat dan provinsi ke pemerintah daerah selama periode transisi (2000-2001).<sup>125</sup> Akuntabilitas pemerintah daerah semakin kuat karena tanggungjawab pengelolaan pemerintah daerah tidak lagi berada di tangan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, melainkan hasil pemilihan langsung.

36. Kerangka keuangan antar pemerintah yang baru disusun dalam bentuk dana alokasi umum (DAU). DAU adalah sejumlah dana dari pemerintah pusat guna membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan fungsi desentralisasi (pada maa sebelumnya dana semacam ini diberikan berdasarkan berdasarkan UU no.25/1999). Pada sistem sebelumnya yang terpusat, indikator sosial dan pelayanan masyarakat daerah yang memiliki produksi sumber daya amat lemah. Untuk membenahi ketidakseimbangan ini, daerah-daerah ini mendapatkan bagian dari pajak yang dikumpulkan. UU no.34/2000 memberi kuasa pada pemerintah daerah untuk menetapkan pajak mereka sendiri. Ketentuan ini didukung oleh peraturan yang menetapkan jenis pajak dan retribusi pelayanan yang diizinkan dan tarif maksimum.<sup>126</sup>

37. ADB telah mendukung upaya-upaya desentralisasi pemerintah pusat, menyediakan bantuan teknis untuk membantu mengatasi beberapa kendala yang muncul, berdasarkan program-program desentralisasi yang pernah sukses di negara-negara lain. Dua fase TA dalam Reformasi Pemerintah dan Desentralisasi Berkelanjutan utamanya difokuskan pada upaya untuk

<sup>124</sup> Fungsi wajib dari pemerintah kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan budaya, pertanian, komunikasi, industri dan perdagangan, investasi modal, tanah, koperasi, dan urusan tenaga kerja. Tanggung jawab atas pendapatan potensial yang penting dari tanah dibagi antara pemerintah pusat dan otoritas daerah.

<sup>125</sup> Secara garis besar, pemerintah daerah menanggung kelebihan jumlah pegawai yang menghambat mereka mendanai program-program baru. Peraturan kepegawaian membatasi upaya perbaikan kepegawaian. Terlebih lagi, penyebaran pegawai ke pemerintahan daerah sangat tidak merata. Beberapa daerah menerima jumlah pegawai dalam proporsi yang terlalu besar.

<sup>126</sup> PP no.65/2001 dan PP No.66/2001 memberikan secara rinci tuntunan implementasi untuk pajak daerah. Pemerintah daerah memiliki cara lain untuk 11 pajak dari "daftar positif" tetapi mereka juga dapat mengadakan pajak tambahan jika sesuai dengan kriteria tertentu. Semua proposal pajak daerah yang baru (peraturan daerah) harus dikirim ke pemerintah pusat untuk disetujui, tapi upaya meninjau semua perda ini masih jauh dari tuntas.

membantu mengembangkan lingkungan regulasi yang terpadu bagi desentralisasi fiskal dan National Action Plan on Fiscal Dezentralization (NAPFD) yang akan memberi arah kebijakan desentralisasi untuk jangka menengah. Badan utama pemerintah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

### 3. Masalah dan Tantangan Utama Pembangunan

38. Di beberapa negara sedang berkembang lainnya, program desentralisasi disertai dengan beberapa tantangan besar. Untuk kasus Indonesia, manajemen transisi menuju sistem yang lebih terdesentralisasi ditandai dengan proses transisi yang mendadak. Pemerintah daerah mengalami peningkatan anggaran pembiayaan dari sekitar 15% pada akhir 1990-an menjadi sekitar 30% pada tahun 2002. Awalnya (khususnya pada tahun 2001) pemerintah provinsi dan daerah memiliki surplus anggaran yang sebagian mencerminkan buruknya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang disebabkan oleh masa transisi. Beberapa masalah transisi ini, khususnya mengenai kelebihan jumlah pegawai pada pemerintah daerah, belum benar-benar ditangani.

39. Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya dampak dari desentralisasi pada pelayanan masyarakat dan keadilan (baik aspek intraregional maupun interregional):

- (i) Perubahan fungsi dan tanggung jawab tidak diikuti dengan tersedianya sumber daya yang memadai atau program pembangunan kapasitas yang cukup agar pemerintah daerah mampu menangani tugas-tugas baru mereka.
- (ii) Mengingat perbedaan sumber daya yang dimiliki antardaerah, ketika pemerintah daerah memikul tanggung jawab terhadap sejumlah aspek perpajakan, kesenjangan pendapatan antardaerah meningkat.<sup>127</sup> Karena tidak ada lagi pengiriman persamaan pendapatan dari pemerintah pusat yang besar, kesenjangan pengeluaran per kapita (dan penyediaan pelayanan umum) meluas.

40. Kedua masalah ini muncul di Indonesia, seiring dengan lemahnya kapasitas kelembagaan (kurangnya staf teknis pada tingkat pemerintah daerah) dan memburuknya kesenjangan antardaerah. Kedua masalah tersebut memerlukan tindakan yang menentukan. Dengan memperhatikan kesenjangan antardaerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pusat belum memberi dampak yang berarti dalam menstabilkan kesenjangan. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU), yang jumlahnya lebih besar, secara halus dipaksa melalui sejumlah ketentuan sehingga pemerintah daerah menerima dana minimal sama banyaknya dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini juga menghambat redistribusi sumber daya ini. Risikonya adalah daerah yang kaya akan mampu berinvestasi pada infrastruktur fisik dan sosial, yang pada gilirannya akan menciptakan dasar kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan sosial.

41. Penelitian dan analisis dana proyek bantuan teknis ADB yang sedang berjalan, Desentralisasi Berkelanjutan dan Reformasi Pemerintahan Daerah dan Pembiayaan Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa desentralisasi tampaknya telah memperluas

---

<sup>127</sup> Otoritas daerah memiliki kebebasan yang besar dalam menentukan biaya pelayanan dan perizinan. Pada tahun 2003, Bank Dunia memperkirakan bahwa pendapatan dari sumber daya daerahnya sendiri dihitung satu setengah dari pendapatan pemerintah provinsi tetapi hanya seperduabelas dari pendapatan pemerintah kabupaten. Pendapatan pemerintah provinsi yang relatif besar dihasilkan dari pajak yang menguntungkan atas kendaraan bermotor (registrasi dan pengiriman) sebesar 70% sisanya ditambah dari pemerintah kabupaten.

kesenjangan antardaerah.<sup>128</sup> Pemerintah provinsi yang kaya, misalnya provinsi yang memiliki pendapatan dari sumber daya alam, mampu menikmati anggaran keuangan mereka. Mereka memperoleh keuntungan baik dari lemahnya perubahan kerangka pengucuran dana dari pusat (pengaliran DAU tetap dipertahankan pada jumlah yang sama sebelumnya berdasarkan ketetapan penggantian kerugian sampai tahun 2008), dan sekaligus mendapat sumber baru dari pajak daerah dan bagian yang besar dari sektor sumber pajak lainnya. Kondisi ini menunjukkan fakta bahwa pada tahun 2001, 10% dari provinsi kaya memiliki pendapatan enam kali lebih besar daripada pendapatan 10% provinsi yang miskin.

42. Kesenjangan tersebut tergambar dari beragamnya pengeluaran per kapita antara Kalimantan Timur dan provinsi lainnya. Secara per kapita, pengeluaran total pada 11 faktor lebih tinggi di Kalimantan Timur daripada di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tahun 2003. Kecenderungan belanja pembangunan per kapita mengikuti pola yang sama, bahkan semakin meluaskan kesenjangan. Rasio antara pemerintah provinsi dengan pengeluaran tertinggi (Kalimantan Timur) dengan yang terendah meningkat dari 8 pada tahun 2000 (terendah—Jawa Tengah), menjadi 22 pada tahun 2003 (terendah pengeluaran per kapita—Yogyakarta). Dapat terlihat bahwa kesenjangan yang tajam antara Kalimantan Timur dan provinsi lainnya terjadi sejak reformasi desentralisasi pada tahun 2001.

43. Keterbatasan data fiskal yang diulas dalam studi ini perlu diperhatikan. Perluasan penggunaan anggaran tambahan pada provinsi-provinsi tersebut tetap tidak diketahui karena sistem anggaran Treasury Single Account (TSA) belum diimplementasikan sepenuhnya. Sistem akuntansi anggaran di Indonesia tidak memenuhi akuntabilitas dan transparansi fiskal yang disyaratkan menyeluruh (meliputi semua transaksi pemerintah). Sebelum masalah ini diatasi, analisis penggunaan keuangan pada setiap kegiatan pemerintah tetaplah tidak lengkap. Dana anggaran tambahan per lum menjadi perhatian, karena dapat menjadi sumber penyalahgunaan dana publik dan kompromi integritas proses anggaran, mengingat pengelolaannya tidak termasuk dalam perencanaan normal. Penting bagi badan legislatif untuk meninjau dana anggaran ini supaya ada prioritas pengeluaran yang efisien. Situasi ini menjadi lebih rumit dengan adanya kepemilikan perusahaan-perusahaan negara oleh pemerintah daerah. Sering kali, hubungan antara badan-badan pemerintah daerah dengan perusahaan milik daerah memang rumit..

44. Masalah ketiga adalah tidak adanya perhitungan keuangan atas penggunaan Dana Dekonsentrasi (dana yang disediakan bagi pemerintah provinsi melakukan fungsi-fungsi yang didesentralisasikan kepada mereka). Walaupun dana ini dipergunakan di pemerintah provinsi, tetapi dana ini tidak diperhitungkan dalam anggaran resmi keuangan pemerintah provinsi. Dana ini muncul pada anggaran pemerintah pusat (sumber pendistribusian antarprovinsi sukar untuk dipastikan). Pemerintah pusat masih terus menghabiskan dana dalam jumlah besar untuk pekerjaan-pekerjaan yang harusnya ditanggung pemerintah daerah. Sejumlah pengeluaran, meskipun dikelola oleh pemerintah daerah, tidak masuk ke dalam anggaran daerah.

---

<sup>128</sup> Data pengeluaran fiskal tahun 2001—2003 yang ada untuk 12 provinsi termasuk yang berada di bawah program Daerah Media Inkubator (DMI), dikelola di bawah proyek bantuan teknis, bersama dengan data pertumbuhan pendapatan, dan pola pengeluaran. DMI adalah proyek percobaan MOHA-BAKD yang dimulai tahun 2005 untuk meningkatkan pemerintahan, partisipasi yang transparan, dan akuntabilitas pemerintahan provinsi dan kabupaten. Setiap pemerintah daerah dari 12 provinsi dalam kelompok ini diharapkan menyiapkan laporan keuangan yang benar-benar memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemerintah daerah dari 12 provinsi ini akan diberikan bantuan khusus berupa pelatihan dan pembimbingan untuk mengembangkan FMIS yang lebih efektif sejalan dengan tujuan dari proyek.

45. Besarnya dana dekonsentrasi menunjukkan bahwa secara substansial tanggung jawab pemerintah daerah belum tumbuh. Dalam beberapa lokakarya, pejabat pemerintah daerah ingin penjelasan atas penggunaan dana dekonsentrasi dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam anggaran daerah mereka. Dalam konteks ini mereka mencatat bahwa departemen di pusat berwenang untuk mengendalikan secara penuh penggunaan dana itu, sementara secara hukum jelas dinyatakan bahwa fungsinya telah dipindahkan kepada pemerintah provinsi.

#### **4. Tantangan Utama Desentralisasi**

##### **a. Hukum, Otonomi, dan Tugas Fungsional**

46. Sekarang di Indonesia terdapat 33 pemerintah provinsi dan 450 pemerintah kabupaten dan kota.<sup>129</sup> Berdasarkan standar internasional rata-rata pemerintahan daerah tidak kecil Nmun banyak pemerintah daerah yang baru tersebut minim sumber daya manusia dan administrasi untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Agar pemerintahan dapat terus berjalan, pemerintah pusat harus menyempurnakan kriteria munculnya daerah-daerah baru, dan mencabut insentif fiskal bagi daerah memisahkan diri, termasuk mencabut dana alokasi umum atas wilayah tersebut. Otonomi daerah mendorong ekspansi wilayah, yang terus menambah beban anggaran negara tanpa meningkatkan pelayanan publik.

47. Perubahan peraturan yang sering terjadi menambah tekanan terhadap kerangka kelembagaan yang sebelumnya sudah lebih dulu dibebani oleh pergeseran fungsi selama lima tahun terakhir. Seringkali peraturan yang ada tidak jelas dan ada beberapa kasus di mana penerapan peraturan dan hukum sektoral tidak konsisten dengan inti perundang-undangan desentralisasi. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, di Indonesia perundang-undangan dan peraturan merupakan pendorong dan pendukung utama setiap kebijakan baru, sementara implementasinya pada anggaran hanyalah sebagai pendukung. Hal ini membawa pada kesulitan ketika sebuah anggaran tidak diperhitungkan dalam perundang-undangan (sebagai contoh tiadanya aturan hukum agar anggaran pendidikan menjadi 30%).

48. Penataan dan pengelolaan fungsi dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah belum jelas. UU No.32/2004 belum benar-benar menjelaskan tanggung jawab dan mandat bagi ketiga tingkatan pemerintahan tersebut. Pada tingkat pemerintah provinsi, perannya yang berkenaan dengan fungsi dan tanggung jawab fiskal belum didefinisikan dengan jelas, pembatasan beberapa fungsi tidak mendorong skala ekonomi yang optimal. Untuk meningkatkan efisiensi otonomi daerah, pemerintah perlu mendorong peran provinsi dalam mengadakan beberapa pelayanan, dan dalam berkoordinasi dengan sesama pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang optimal perlu dibahas dalam konteks skala ekonomi dalam rangka menyediakan barang dan jasa bagi publik.

49. Ada kebutuhan untuk menyeimbangkan keuangan dengan otoritas dan memastikan bahwa fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran pemerintah daerah. Dengan keluarnya UU No.32/2004 dan prinsip "uang mengikuti fungsi", ada kebutuhan untuk meninjau ulang fiskal dan hubungan administratif antara pemerintah pusat dan daerah, dan untuk memastikan bahwa pengeluaran publik memang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi standar pelayanan minimum. Aturan pengeluaran di antara berbagai tingkatan pemerintahan masih perlu diperjelas.

---

<sup>129</sup> Pejabat DPOD menginformasikan bahwa saat ini terdapat 92 aplikasi pemerintahan daerah baru yang sedang dievaluasi.

### **b. Merancang Dana Alokasi Umum yang Lebih Seimbang**

50. Di bawah UU No.33/2004, pendapatan pemerintah daerah berasal dari (i) pendapatan sendiri, (ii) kucuran Dana Alokasi Umum, (iii) pendapatan dari pembagian sumber alam, dan (iv) pinjaman daerah. Pada tahun 2005 berdasarkan tingkat keseluruhan hanya 7% pendapatan daerah yang berasal dari sumber sendiri. Kebanyakan pemerintah daerah mengandalkan 90% pendapatannya dari DAU dan pembagian hasil sumber alam. Distorsi dalam setiap aliran dana, DAU, dan banyaknya pemerintah daerah yang tidak memperoleh pendapatan dari sumber daya alam memperparah kesenjangan antardaerah. DAU tidak benar-benar menggambarkan kebutuhan pengeluaran yang sebenarnya (fungsi wajib dan standar pelayanan minimum). Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali pedoman mengenai standar minimum pelayanan yang sejalan dengan realitas anggaran pemerintah daerah.

51. Terdapat tiga kendala yang menghambat dampak DAU terhadap kesetaraan antar daerah: (i) ketentuan yang tidak memperbolehkan pemerintah daerah mengalokasikan DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya, membatasi fungsi redistribusi dana; (ii) gaji pegawai negeri yang dimasukkan sebagai faktor penyeimbang masih dimasukkan dalam perhitungan perpindahan pegawai. Dana tersebut semula merupakan dana kompensasi kepada pemerintah daerah atas perpindahan pegawai dalam skala besar pada tahun 2001; dan (iii) formula dalam menghitung kapasitas fiskal hanya menggunakan 75% pendapatan daerah yang diperoleh dari pembagian hasil sumber daya alam, yang tentu saja mengurangi perhitungan kapasitas fiskal daerah yang kaya sumber alam dan bertentangan dengan upaya penyeimbangan.

### **c. Pengembangan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

52. Sebagai pelengkap pendapatan asli daerah dan DAU, pemerintah perlu mengembangkan sebuah sistem pendanaan khusus untuk mendukung hal-hal yang menjadi prioritas nasional, seperti memerangi HIV/AIDS. Mengingat operasi pemerintah daerah dibiayai dengan anggaran yang tetap, garis pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan hendaknya menerapkan kebijakan dan mendorong standar kinerja tertentu melalui peraturan administrasi seperti MSS. Standar ini dikeluarkan tanpa ada kaitan efektif dengan anggaran dan tidak memperhitungkan kapasitas fiskal pemerintah, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan istilah “uang mengikuti fungsi”. Sejumlah kecil Dana Alokasi Khusus (Rp 3 milyar atau kira-kira seperempat lebih banyak dari DAU) adalah salah satu penyebab utamanya.

53. Mekanisme fiskal antarpemerintahan dapat ditingkatkan, yakni dengan daerah kaya yang tentunya mendapatkan pajak dari pembagian hasil sumber daya alam tidak lagi menerima DAU. Daerah kaya sebaiknya menaikkan sumber pendapatan melalui kombinasi peningkatan pajak daerah, pajak pembagian hasil, dan pinjaman komersial. Daerah miskin harus mendapat dukungan melalui DAU, DAK, dan akses terhadap pinjaman yang dikelola dari pusat dan bantuan fasilitas agar mereka mampu menyediakan pelayanan dengan kualitas yang dapat dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki tingkat pajak yang sama. Biaya gaji dalam DAU tentunya dapat dikurangi.

### **d. Penguatan Daya Pajak Daerah**

54. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap kecil karena otoritas untuk menaikkan pajak dibatasi. Ada dorongan bagi pemerintah provinsi perlu meningkatkan bagian dari pengeluaran yang dibiayai dari pendapatan daerah sendiri. Perundang-undangan yang terbaru mengenai pendapatan asli daerah memungkinkan pemerintah daerah menetapkan pajak daerah selama sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh undang-undang. Sistem ini tidak bekerja

secara efisien: daerah memiliki terdorong untuk menerapkan pajak dan retribusi yang tidak tepat, dan pusat tidak memiliki kapasitas untuk mengawasi atau membatalkannya. Penerapan pajak semacam ini meningkatkan biaya kepatuhan dan administrasi dan berdampak buruk terhadap iklim bisnis di beberapa daerah.

55. Dengan demikian, langkah ke depannya adalah membatasi daftar jenis pajak dan retribusi daerah. Undang-undang tentang Pajak dan Biaya Daerah dan peraturan pemerintah lain yang berkaitan (No.65/2001 dan No.66/2001) mensyaratkan agar setiap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi harus diajukan ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk ditelaah dan dievaluasi guna memastikan apakah perda tersebut sejalan dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi. Perda-perda tersebut harus sudah didaftarkan ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 hari setelah diadopsi oleh DPRD, dan jika dalam 30 hari setelah didaftarkan tidak ada keberatan dari pemerintah maka secara otomatis perda itu dianggap disetujui. Prosedur pemrosesan dan pengaturan yang ada amat membatasi kemampuan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang mengevaluasi begitu banyak perda yang diajukan dalam kurun waktu yang diberikan. Kurang lebih ada 1000 perda yang masuk setiap tahunnya. Perda-perda itu seringkali menumpuk dan sedikit di antaranya yang bisa dievaluasi dalam 30 hari. Program Keuangan Pemerintah Daerah dan Reformasi Pemerintahan yang dilakukan oleh ADB berupaya memantapkan sistem manajemen proses evaluasi sehingga lebih efektif dan cepat.

56. Ada kebutuhan untuk mengevaluasi kinerja Pendapatan Asli Daerah dan menciptakan peraturan dan insentif yang meningkatkan PAD, dengan memperhatikan rasio PAD terhadap anggaran pemerintah daerah. Daerah-daerah sebaiknya diberi tambahan wewenang untuk menarik pajak yang sesuai dengan pemerintah setempat, misalnya pajak bumi dan bangunan. Pajak ini, yang di kebanyakan negara merupakan pajak daerah, masih merupakan pajak terpusat yang dibagi bersama daerah-daerah di Indonesia. Pemerintah sebaiknya memberikan pemerintah daerah otoritas menaikkan tarif, sambil melanjutkan untuk mengatur pajak yang menjadi bagian mereka.

57. Pemerintah pusat juga bisa mempertimbangkan perluasan pajak daerah berdasarkan biaya pajak provinsi. Karena kebanyakan fungsi pemerintah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, seharusnya pemerintah kabupaten menjadi penerima utama dari setiap penambahan pajak. Beberapa pajak daerah yang menguntungkan dikelola oleh pemerintah provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor, transaksi kendaraan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Semuanya diperkirakan mencapai 90% dari pendapatan provinsi. Karena tingginya pajak untuk kegiatan ekonomi yang tinggi (tingginya tarif kenaikan relatif terhadap pertumbuhan GDP regional), pajak-pajak ini mewakili sumber pendapatan provinsi yang besar dan cepat berkembang. Pemerintah provinsi diwajibkan untuk membagi paling tidak 30% pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak pengiriman kendaraan bermotor dan 70% dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air tanah dan air permukaan tanah dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam provinsi.

#### **e. Pinjaman Daerah**

58. Baik UU No. 25/1999 maupun UU No. 33/2004 mengizinkan pemerintah provinsi meminjam dari pasar modal dalam negeri dan internasional. Pinjaman hanya diizinkan untuk investasi yang menghasilkan pendapatan, dan pinjaman dari luar negeri harus disetujui oleh pemerintah pusat. UU No. 33/2004 menetapkan negara tidak memberi jaminan bagi obligasi pemerintah daerah. Di sisi lain, tidak adanya ketentuan pengambil-alihan sementara oleh pemerintah pusat terhadap otoritas daerah yang ditengarai melakukan salah-kelola

(*mismanagement*) keuangan dan administrasi atau membuat kebijakan keuangan dan pinjaman yang tidak dapat berjalan. Tanpa sanksi seperti itu, warga dengan hak hukumnya menghadapi risiko berupa penurunan tajam atas pelayanan publik yang telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

59. Perlu dibangun mekanisme peraturan yang transparan dan akuntabel untuk memberi sanksi terhadap pemerintah daerah yang melakukan kelalaian. Apabila tidak, maka pemerintah daerah dapat melakukan pelanggaran moral. Kerangka pinjaman untuk pemerintah provinsi akan menjamin bahwa daerah akan bertanggung jawab atas pinjamannya, dan mengatur anggarannya seketat mungkin. Kegagalan pemerintah daerah untuk membayar utang-utang masa lalu dan adanya badan usaha seperti PDAM (perusahaan air bersih milik pemerintah daerah) merupakan halangan bagi investasi baru. Di bawah proyek bantuan teknis yang sedang berlanjut, restrukturisasi utang PDAM sedang dipelajari di banyak pemerintah daerah. Akan dibuat rekomendasi untuk merestrukturisasi utang mereka.

60. Sistem peminjaman dari luar negeri melalui pemerintah pusat belum dituntaskan, sehingga membatasi akses daerah ke dana dari lembaga donor. Pemerintah daerah belum berpengalaman melakukan pinjaman jangka panjang untuk investasi modal, dan tidak ada pengalaman meminjam dari institusi keuangan swasta di luar pemerintah pusat. Peraturan baru yang diimplementasikan memperbolehkan pemerintah daerah untuk meminjam dari pasar modal. Tetapi mekanisme pinjaman bagi BUMN daerah provinsi untuk meminjam masih tidak jelas.

61. Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang terkait dengan investasi dari surplus pemerintah daerah masih perlu diperhatikan. Pertama, tampaknya pemerintah daerah mempunyai kebebasan yang besar untuk melakukan investasi komersial. Kebebasan ini memungkinkan pemerintah provinsi menyelewengkan sumber daya manajerial langka dalam fungsi pelayanan untuk investasi komersial. Hal ini menyebabkan rendahnya kinerja aset publik. Hal ini berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat atas investasi dan privatisasi. Kedua, ketetapan bahwa pejabat yang ditempatkan sementara di badan usaha milik pemerintah daerah digaji menggunakan skala gaji non pegawai negeri akan menurunkan moral pegawai negeri di daerah pada umumnya. Mengingat masalah-masalah ini, investasi surplus pada aset keuangan harus dibatasi hanya pada yang memenuhi kriteria risiko dan likuiditas tertentu.

#### **f. Kapasitas Manajemen Daerah**

62. Mungkin salah satu masalah tersulit, mungkin karena tidak dapat diperoleh solusinya secara cepat, adalah lemahnya kapasitas administrasi dan manajerial pada tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten, yang hanya dapat diatasi melalui program jangka panjang melalui pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas kelembagaan. Sumber daya yang lebih besar perlu diberikan investasi melalui pelatihan dan pendidikan, khususnya dalam fungsi manajemen keuangan, termasuk fungsi penyusunan anggaran, perencanaan strategi, perbendaharaan, akuntansi, pembuatan laporan, dan sistem informasi manajemen keuangan (SIMK). Jumlah staf yang dilatih penuh di Standar Akuntansi Pemerintah dilaporkan masih jauh dari cukup dalam banyak kabupaten dan beberapa provinsi. Terdapat kebutuhan pelatihan yang lebih banyak pada semua tingkat pemerintahan (termasuk agen pemerintah pusat) untuk memahami operasi penyusunan anggaran kinerja dan modifikasi terbarunya.

63. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam mengembangkan standar akuntansi yang konsisten untuk seluruh daerah (mencerminkan tidak meratanya implementasi Keputusan Depdagri No. 29/2002), yang menyulitkan tugas pemantauan dan analisis kinerja anggaran

daerah oleh badan-badan di pusat yang terkait. Ada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas daerah dan pusat dalam manajemen, pemantauan, dan evaluasi masalah-masalah keuangan dan fiskal daerah. Selama diskusi, pejabat pemerintah daerah mengungkapkan keprihatinannya atas kapasitas kelembagaan yang membuat sulit terjadinya internalisasi peraturan-peraturan rumit yang disusun pemerintah pusat.

#### **g. Reformasi Pegawai Negeri**

64. Beberapa daerah menghadapi kelebihan jumlah pegawai negeri yang cukup besar sebagai akibat desentralisasi. Sementara itu, daerah lain justru mengalami kekurangan pegawai. Sebesar 2,2 juta pegawai negeri yang didesentralisasikan pada tahun 2000 tidak disebarkan secara merata ke semua daerah. Misalnya, provinsi Yogyakarta memperkirakan bahwa jumlah pegawainya kelebihan 5000 dari 12000 yang ada. Meskipun jumlah pegawai cukup, jumlah mereka yang memiliki keahlian yang diperlukan masih sangat terbatas. Ada konflik antara UU pelayanan masyarakat dan UU desentralisasi karena UU pelayanan masyarakat memfokuskan pada pelayanan masyarakat secara tersentralisasi sedangkan UU desentralisasi memfokuskan pada pelayanan masyarakat yang terdesentralisasi. Peraturan mengenai pegawai negeri yang ditetapkan tampaknya bermuara ke pusat, yakni para pegawai negeri bersatu bertanggung jawab kepada pejabat tinggi pegawai negeri di pusat dan bukan kepada pemimpin daerah.

65. Mengembangkan kapasitas pegawai negeri untuk melaksanakan fungsi manajemen daerah sangat vital, dan merupakan tantangan yang besar. Reformasi pegawai negeri perlu menjamin mobilitas pegawai negeri ke seluruh daerah, menjamin adanya jumlah pegawai negeri yang cukup di daerah terpencil, dan menjaga kesatuan di antara para pegawai negeri. Pelatihan gabungan, standar umum, proses rekrutmen yang terbuka, remunerasi yang kompetitif, dan sistem penempatan sementara yang menggilir para pegawai negeri bekerja di daerah-daerah berdasarkan kebutuhan dapat diterapkan dalam sistem pegawai negeri yang baru.

### **5. Kebijakan Pemerintah dan Kerangka Perencanaan**

66. Kebijakan pemerintah pusat secara keseluruhan ditetapkan dalam Strategi Pembangunan Nasional Jangka Menengah tahun 2004-2009, yang bertujuan agar terbentuk pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Prioritas desentralisasi terdapat dalam kerangka NAPFD. Tugas NAPFD melibatkan diskusi ekstensif di antara para badan pemerintah utama yang terlibat dari September 2005 sampai seterusnya. Pada Februari 2006, Lokakarya Nasional yang didanai ADB mengenai implementasi NAPFD diselenggarakan di Bogor (tanggal 1 & 2 Februari). Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat Depdagri, Dep Keu, BAPPENAS, dan DPOD; pejabat pemerintah daerah, juga para ahli dari universitas terkemuka. Draf acuan direvisi dan berbagai masalah berhubungan dengan langkah selanjutnya dari implementasi dan sosialisasi inisiatif desentralisasi dibahas dalam pleno dan dalam tiga kelompok kerja yang terdiri atas (i) tugas fungsional dan pengembangan kapasitas, (ii) pendapatan dan pengeluaran daerah, dan (iii) manajemen keuangan daerah. Dokumen pemerintah ini mencakup semua aspek signifikan dari desentralisasi yang secara garis besar menjabarkan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Diskusi ini menggambarkan arahan untuk masa depan dari pemerintah pusat dalam wilayah berikut ini:

- (i) **Tugas-tugas fungsional.** Setelah mengelompokkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, Depdagri menyusun draf untuk memperbaiki PP No. 25/2000 mengenai distribusi tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Depdagri juga mencari

solusi terbaik untuk mengurangi ketidakkonsistenan antara UU otonomi daerah dan UU sektoral.

- (ii) **Menyesuaikan pendaan dengan tanggung jawab.** Rencana pelaksanaan akan disusun untuk (a) melaksanakan pemetaan karakteristik daerah sesuai dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas sebagai dasar untuk mengembangkan penyamarataan dan kebijakan yang efisien di daerah-daerah;(b) melaksanakan penilaian untuk menghilangkan peraturan ganti rugi pada akhir 2008 dengan mencari solusi alternatif; (c) menilai peranan DAU, DAK, dan dana Dekonsentrasi pada ekonomi daerah.
- (iii) **Memperkuat DPOD.** Pemerintah pusat akan merekrut ahli-ahli otonomi keuangan dan daerah dan desentralisasi fiskal untuk DPOD untuk (a) melaksanakan penilaian implementasi desentralisasi, otonomi daerah, dan keuangan daerah dan memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal; (b) mengkoordinasi implementasi desentralisasi; (c) mengevaluasi dan memantau pemerintahan daerah; dan (d) memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah.
- (iv) **Standar Pelayanan Minimum (SPM).** Metodologi dan pembiayaan akan disusun untuk mencapai SPM terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Untuk membantu mencapai target sektor, akan dikembangkan indikator untuk menjamin adanya pelayanan minimum. GOI bermaksud mengembangkan instrumen untuk menganalisis perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintah daerah untuk mencapai SPM berdasarkan kapasitas daerah. Akan dikembangkan Standar teknis untuk mendukung SPM dari setiap agen pemerintah termasuk buku panduan dan standar untuk pengeluaran untuk mendukung implementasi SPM di bidang yang diprioritaskan. Akan dikembangkan modul pelatihan untuk perancangan dan implementasi SPM di badan-badan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, akan dikembangkan pula instrumen sistem pemantauan dan evaluasi untuk pengawasan implementasi SPM di provinsi, kabupaten, dan kota-kota akan disusun.
- (v) **Pendapatan daerah dan sistem fiskal.** Pemerintah pusat bermaksud untuk mengevaluasi kinerja PAD dan memberi rekomendasi cara-cara memperbaikinya. Penilaian atas tertundanya distribusi dana akan dilakukan dan prosedur disusun untuk menjamin pengiriman dana yang tepat waktu per tiga bulan. Format yang disesuaikan untuk DAU akan direncanakan agar lebih transparan dan terpercaya dengan merevisi penghitungan komponen yang menyebabkan ketidakseimbangan daerah. Jumlah ideal DAK akan dinilai sesuai dengan prioritas nasional dan rekomendasi diberikan kepada kabinet untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengiriman DAK. Akan direncanakan untuk mengalokasikan kembali anggaran yang disalurkan melalui dana dekonsentrasi ke dalam DAK, sesuai dengan penurunan otoritas fungsional ke daerah dari pusat.
- (vi) **Pinjaman daerah.** Akan dibuat draf peraturan pemerintah mengenai pinjaman untuk pemerintah daerah dan BUMN daerah. Kriteria untuk pinjaman BUMN daerah akan dikembangkan dengan mengidentifikasi jenis-jenis peminjaman yang tidak konsisten dengan kehati-hatian fiskal. Mekanisme peminjaman untuk BUMN daerah juga akan disusun. Ada juga diskusi pembuatan draf mekanisme penahanan pemberian DAU untuk memecahkan masalah utang daerah yang masih ada. Peraturan pemerintah mengenai kepillitan pemerintah daerah sedang disiapkan.

- (vii) **Manajemen keuangan daerah.** Panduan untuk manajemen aset, pemisahan aset-aset pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pembagian aset untuk daerah baru yang sedang dibuat akan disiapkan. Akan diperkuat upaya penyediaan pelatihan untuk mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah dan peraturan tentang manajemen keuangan daerah.

## 6. Peran Mitra Pembangunan

67. Proyek Bantuan Teknis dari berbagai lembaga donor mendukung reformasi pemerintah pusat. IMF (International Monetary Fund) telah mengusulkan kebijakan dan bantuan teknis untuk modernisasi perbendaharaan, klasifikasi anggaran, dan aspek administrasi pajak. AusAid (Australian Agency for International Development) mendukung pelayanan pembayar pajak, audit pajak, restrukturisasi Dep Keu, manajemen utang, persiapan peraturan manajemen perbendaharaan dan pembangunan kapasitas parlemen. Program dari CIDA (Canadian International Development Agency) memfokuskan pada desentralisasi fiskal, dan implementasi peraturan pada kebijakan dan penyusunan anggaran, selain mendanai sebagian dari bantuan teknis yang dipimpin IMF untuk pajak DG. Proyek Manajemen Keuangan dan Administrasi Pendapatan Pemerintah I dan II dari World Bank mendukung reformasi manajemen keuangan publik. Bantuan dari Jerman (GTZ) mendukung reformasi pengadaan barang untuk publik, program UNDP memfokuskan pada dukungan parlemen dan partisipasi masyarakat, dan USAID (United States Agency for International Development) memberikan dukungan untuk investasi dan perdagangan, amandemen UU pajak, dan pengawasan kapasitas DPR.

68. DPOD (Regional Autonomy Advisory Council) berfungsi sebagai forum yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan antara mitra lembaga donor. Koordinasi dalam banyak sektor dan harmonisasi kegiatan di wilayah desentralisasi sedang dilakukan melalui Fasilitas Pendukung Desentralisasi (FPD), inisiatif gabungan dari World Bank, Belanda. Department for International Development (Inggris), United Nations Development Programme, and Asian Development Bank. Kesempatan kolaborasi untuk wilayah dan proyek spesifik lainnya antara lembaga donor akan muncul dengan sendirinya selama masa persiapan program dan proyek yang khusus. Inisiatif World Bank untuk pengukuran kinerja pemerintah daerah di wilayah pengadaan pelayanan, manajemen keuangan publik, kesehatan fiskal, dan iklim investasi telah didukung juga oleh USAID dan lembaga donor lainnya.

## 7. Kapasitas Indonesia dan Pendekatan untuk Mengelola Hasil Sektor

69. Kurangnya kapasitas merupakan masalah utama dalam kebanyakan pemerintah daerah, terutama dalam fungsi inti perencanaan, pembuatan kebijakan, dan manajemen keuangan. Diperlukan dukungan yang ekstensif untuk pengembangan kapasitas, untuk semua tingkatan pemerintahan, tetapi terutama pada tingkat pemerintahan kabupaten dan badan-badan pusat di Depdagri dan Dep Keu yang berinteraksi dengan mereka. Manajemen keuangan dan pengeluaran publik perlu diperkuat berdasarkan prioritas. Sebagai akibat yang wajar dari pengembangan perbendaharaan modern, persiapan dan pelaksanaan anggaran, sistem audit dan pelaporan, pengenalan sistem informasi manajemen keuangan merupakan keharusan. Sistem seperti ini seharusnya dirangkaikan secara tepat dan dapat menyambung dari sistem lama dan bukannya memulai dari nol. Strategi pembangunan kapasitas yang turut mendampingi sistem ini dengan implementasi dan pelatihan sesudahnya menjadi hal yang penting dari program dan proyek semacam itu. Karena BAPPENAS telah menunda pengambilan pinjaman untuk pengembangan kapasitas, ADB perlu memastikan bahwa pemberian dana cukup tersedia untuk melanjutkan pengembangan kapasitas. Pemerintah pusat telah mengadopsi Kerangka Nasional untuk Pembangunan Kapasitas (National Framework for

Capacity Building), yang mengacu pada isu-isu kapasitas daerah. ADB perlu bekerja dengan lembaga donor lainnya untuk mendanai dan mengimplementasikan kerangka ini.

## 8. Operasi dan Komitmen ADB Saat Ini dan Pelajaran Potensial

70. Operasi ADB terkini dalam bidang pendanaan terdesentralisasi adalah sebagai berikut:
- (i) **Program Reformasi Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah** mengimplementasikan reformasi dalam manajemen pengeluaran dan keuangan publik melalui pengembangan dan peningkatan sistem informasi manajemen keuangan di 171 pemerintah daerah dan badan-badan nasional terkait seperti Depdagri dan Dep Keu. Komponen-komponen dengan biaya yang ketat menyebabkan sumber daya menjadi kurang optimal untuk implementasi dan pelatihan sesudahnya. Hal ini telah diperbaiki sebagian dengan menggabungkan komponen dan membebaskan sumber daya untuk pelatihan penting. Proyek ini tidak menganggarkan apapun untuk mengembangkan strategi manajemen dan komunikasi yang berubah untuk mengsosialisasi sistemnya kepada pemangku kepentingan, misalnya pemerintah daerah, Depdagri, dan Dep Keu. Akibatnya, ada isu-isu besar mengenai kepemilikan yang terus berlanjut terhadap proyek ini. Tidak ada penyediaan untuk seorang ahli verifikasi dan validitas independen untuk menandai kemajuan proyek dan memastikan bahwa sistem yang dijalankan telah sesuai dengan spesifikasinya. Pelajaran utama yang dapat diambil dari proyek ini adalah perlunya persiapan proyek yang lebih berhati-hati untuk menghindari defisiensi rancangan. Kompleksitas dan proses yang panjang atas reformasi sektor publik juga perlu diperhatikan. Pinjaman jangka pendek mungkin tidak akan dapat mencapai semua tujuan atau membuat penggunaan sumber daya publik efisien dan efektif dan memperbaiki pelayanan publik. Program ini seharusnya direncanakan dalam berbagai tahap.
  - (ii) **Kerangka Kelembagaan yang Efektif** adalah proyek bantuan teknis yang mendukung kegiatan NAPFD dalam wilayah otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan pembangunan fiskal.
  - (iii) **Dukungan untuk Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah** merupakan bantuan teknis yang hanya memfokuskan pada pengembangan sistem pada 40 pemerintah daerah dengan perhatian kurang memadai pada pembangunan kelembagaan dan kapasitas.
  - (iv) **Desentralisasi dan Reformasi Pemerintahan Daerah Berkelanjutan dan Keuangan Pemerintah Daerah** merupakan dua proyek bantuan teknis yang diberikan untuk mendukung kerja di bidang hubungan fiskal antarpemerintah, otonomi daerah, dan keuangan pemerintah daerah. Bantuan berupa Dukungan untuk Sistem Pinjaman Pemerintah Daerah ditiadakan.

## 9. Kegiatan ADB yang Diajukan dalam Sektor/Tema

71. ADB dan lembaga donor lainnya yang bekerja dalam wilayah sektor dan tema berharap untuk memberikan intervensi mereka dengan beberapa rekomendasi NAPFD. Wilayah-wilayah di bawah ini akan didukung:

- (i) Mungkin akan berguna untuk melakukan tinjauan rinci atas pengeluaran beberapa pemerintah daerah terpilih, dengan beberapa analisis dasar atas perubahan dalam

standar pelayanan sejak terjadinya desentralisasi (yang memfokuskan pada beberapa indikator utama seperti pendidikan dan kesehatan) Analisis data di provinsi Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa biaya pengeluaran untuk personel lebih dari setengah biaya keseluruhan (termasuk yang rutin dan pembangunan) pengeluaran. Besarnya proporsi pengeluaran personel digunakan untuk upah guru dan pekerja kesehatan. Dengan demikian, tanpa tinjauan pengeluaran pemerintah yang rinci dan analisis yang sesuai dengan kebutuhan daerah sangat sulit untuk mengambil kesimpulan yang pasti tentang implikasi pola-pola ini untuk kualitas pengadaan pelayanan secara keseluruhan oleh administrasi daerah. Mungkin juga bermanfaat untuk menggabungkan tinjauan semacam ini dengan survei kepuasan pelanggan dan penilaian perubahan pengguna sejak terjadinya desentralisasi.

- (ii) Reformasi fiskal dan anggaran pada tingkat pemerintah daerah harus didukung. Reformasi fiskal dan anggaran tersebut mencakup kelengkapan anggaran, penghapusan transaksi di luar anggaran, perpindahan menuju *Treasury Single Account*, pengenalan pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium-Term Expenditure Framework/ Modul pelatihan*), survei pelacakan pengeluaran publik (*Public Expenditure Tracking Surveys/ PETS*), dan penyusunan anggaran yang berpihak pada rakyat miskin. Harus dikembangkan Instrumen untuk mengevaluasi pemerintah provinsi, termasuk perencanaan dan keuangan daerah. Kapasitas pengawasan anggaran provinsi perlu diperkuat sehingga dapat memberikan pandangan yang bermanfaat dalam formulasi anggaran dan proses pelaksanaan pemerintah kabupaten. Perlu adanya kerja persiapan secara ekstensif untuk memastikan bahwa pengenalan SPM tidak mengkompromikan manajemen anggaran daerah dengan memasukan tingkat pengeluaran yang secara fiskal tidak berkelanjutan. Sebagaimana pola yang dianut oleh negara Filipina, investasi pemerintah daerah dalam pelayanan dasar dapat ditingkatkan dengan sistem kinerja berbasis pemberian dana melalui DAK untuk peningkatan keseimbangan fiskal antardaerah. Selain itu, penting juga dilakukan pengembangan dan implementasi kinerja standar untuk fungsi yang didesentralisasikan. Reformasi pengadaan barang seharusnya dibahas sebagai bagian dari manajemen pengeluaran daerah provinsi.
- (iii) Pengembangan SIMK dan sistem teknologi informasi pada tingkat pemerintah daerah akan mengintegrasikan akuntansi anggaran, kegiatan implementasi dan pemantauan. Integrasi sistem akuntansi dan penyusunan anggaran akan segera memberi manfaat dalam memfasilitasi implementasi anggaran, manajemen arus kas, dan perencanaan anggaran. Misalnya, menghubungkan sub-perbendaharaan (sebagai titik pengumpulan data pendapatan sementara) pada tingkat sub-kabupaten (kecamatan) akan menghilangkan masalah yang terkait dengan keterlambatan publikasi terbaru, sehingga mempercepat penghitungan pendapatan pemerintah daerah untuk setiap periode.
- (iv) Harus dilakukan diagnosis kebutuhan dan prioritas pembangunan kapasitas pemerintah daerah untuk menilai kebutuhan kapasitas sesuai keadaan. Pelatihan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah di tingkat kabupaten masih kurang, bahkan di tingkat provinsi. Penguatan kelembagaan dan program pelatihan dalam badan-badan yang memantau proses desentralisasi, terutama DPOD dan BAKD, harus dilaksanakan, terutama untuk menganalisis data fiskal daerah dan untuk mengidentifikasi tanda-tanda tekanan fiskal dan munculnya ketidakseimbangan yang memerlukan tindakan koreksi. Reformasi sistem kepegawaian sangat terkait dengan strategi pengembangan kapasitas. Program pembangunan kapasitas harus menjadi bagian dari keseluruhan strategi dengan komitmen jangka panjang.

- (v) Peminjaman kepada pemerintah daerah provinsi harus menjadi bagian dari fokus ADB dan upaya bersama pengembangan peraturan dan mekanisme prosedural. ADB mungkin akan memberi bantuan perbaikan informasi atas aset dan kewajiban pemerintah daerah provinsi dan untuk mengembangkan format yang ramah pengguna untuk penyebaran informasi tersebut. Apa pun rencana pemerintah daerah untuk membuka pasar keuangan daerah, mengharuskan adanya perbaikan kualitas dan perluasan cakupan laporan data keuangan.
- (vi) Ekspansi sumber daya pendapatan pemerintah daerah sendiri, termasuk reformasi administrasi pajak, merupakan wilayah prioritas lainnya. Suatu diagnosa mengenai pendapatan daerah yang potensial harus dilakukan, selain dukungan untuk meninjau proposal pendapatan baru dari otoritas sub-nasional. Pencakupan dan ketepatan waktu tinjauan perlu diperkuat.
- (vii) Ada kebutuhan yang mendesak untuk memperluas dan memperdalam sosialisasi peraturan dan perundang-undangan baru. Karena terbatasnya kapasitas administrasi di banyak pemerintah daerah membuat interpretasi dan operasionalisasi banyak peraturan (dan kadang-kadang saling bertentangan) menjadi beban berat.

**Tabel A4.2: Kerangka Hasil-Hasil Pemetaan**

Tujuan Pembangunan Sektor Jangka Menengah		Hasil-hasil CSP			
Hasil Sektor untuk Indonesia	Kesempatan dan Halangan Utama	Hasil CSP dan Indikator Hasil untuk Sektor	Indikator Tonggak Perubahan (Pelacakan Perubahan)	Intervensi	
Pemerintah daerah yang lebih efektif, efisien, dan terpercaya	Kurangnya kejelasan dalam tugas-tugas fungsional pada tiga tingkat pemerintah	Perbaikan pengadaan pelayanan publik	Kerangka yang diperkuat dan diharmoniskan untuk perencanaan penyusunan anggaran dan manajemen keuangan pada tingkat pemerintah daerah	Yang diajukan: Dukungan untuk tinjauan pengeluaran publik daerah, reformasi fiskal dan anggaran, sistem manajemen keuangan dan informasi, reformasi administrasi pajak, pembangunan kapasitas dan reformasi pelayanan sipil pada tingkat pemerintah daerah	
	DAU yang tidak disamakan	Peningkatan dalam pengeluaran pembangunan daerah sampai 101	Perbaikan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah		
	Rasio pencari DAK yang lebih rendah	Penciri alokasi untuk pemerintah daerah menjadi dua kali lipat untuk meningkatkan akuntabilitas daerah	Kerangka yang diperkuat dan dirasionalkan untuk hubungan fiskal antar pemerintah		
	Daya perpajakan pemerintah daerah yang lemah				
	Kerangka pinjaman pemerintah daerah yang kurang				
	Rendahnya fiskal daerah dan kapasitas manajemen			Kerangka yang diperkuat dan diharmoniskan untuk otonomi daerah	
	Isu-isu reformasi pelayanan masyarakat daerah				

## **D. Sektor Transportasi**

### **1. Pendahuluan**

72. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menjelaskan isu-isu dan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam sektor transportasi, tanggapan pemerintah terhadap tantangan ini dan bagaimana ADB mengusulkan kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini pada periode tahun 2006 – 2009.

### **2. Rangkuman Analisis Situasi**

#### **a. Jalan-jalan**

73. Jalan-jalan yang merupakan bagian besar dari pengangkutan domestik dan perjalanan darat penumpang antar perkotaan di Indonesia, dan pencakupan dan kondisinya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Kepadatan jalan, pada 0,19 km per km persegi atau 1,7 km per 1000 orang, merupakan yang terendah di Asia Tenggara. Sektor pengeluaran telah menurun tajam sejak krisis keuangan di Asia, dari puncaknya pada sekitar 22% dari anggaran publik keseluruhan di pertengahan 1990-an sampai 10% pada tahun-tahun terakhir, sedangkan ada investasi yang substansial dalam peningkatan dan perluasan jaringan jalan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Jalan-jalan penting nasional berada dalam kondisi yang cukup baik, tetapi hampir setengahnya selalu dalam keadaan macet, sehingga meningkatkan biaya untuk industri dan perdagangan. Indonesia hanya memiliki jalan tol sepanjang 600 km yang berkualitas baik. Jalan-jalan di provinsi juga secara umum terpelihara dengan baik, tetapi jalan-jalan di kabupaten dan perkotaan buruk, dengan lebih dari 30% nya tidak diaspal sehingga tidak dapat dilewati kendaraan pada musim-musim tertentu. Pada tingkat nasional, pendanaan digunakan untuk pemeliharaan jalan-jalan penting nasional cukup memadai, tetapi investasi untuk perluasan jalan masih sedikit. Keadaan yang sebaliknya terjadi di tingkat daerah, dengan pendanaan yang rendah untuk pemeliharaan jalan berdampak lebih buruk daripada rendahnya pendanaan untuk pembangunan jalan. Secara keseluruhan, dari persyaratan pendanaan minimum yang diperkirakan, yakni Rp 31 trilyun, hanya Rp 12 milyar yang terpenuhi baru-baru ini. Hal ini menunjukkan perlunya tambahan sumber daya keuangan domestik dan luar negeri. Pajak pembelian dan kepemilikan kendaraan baru, dan pajak bahan bakar dan pajak operasional lainnya dapat menutup sekitar 70% dari biaya pemeliharaan jalan yang penting. Namun, pemasukan dari pendapatan kendaraan dianggap sebagai pendapatan pajak umum pemerintah daerah dan tidak dikhususkan untuk pelestarian jalan. Potensi untuk membiayai pemeliharaan aset jalan berdasarkan biaya sendiri yang berkelanjutan tidak dimanfaatkan.

#### **b. Pelabuhan dan Bandara**

74. Pelabuhan dan bandara merupakan fasilitas yang vital dan signifikan bagi pengembangan kerja sama daerah dan integrasi nasional di Indonesia, sebuah negara kepulauan. Dalam sektor kelautan, pelabuhan dan perkapalan merupakan wahana utama untuk perdagangan domestik dan internasional dan perjalanan penumpang.<sup>130</sup> Lalu lintas kargo laut hampir tidak terpengaruh oleh krisis keuangan di Asia. Diproyeksikan bisnis kargo internasional

<sup>130</sup> Pada tahun 2003, sekitar 600 juta ton kargo dan 10 juta penumpang diakomodasikan oleh 725 pelabuhan publik dan 1478 pelabuhan swasta, yang 141 nya dianggap sebagai pelabuhan internasional. Dua puluh lima pelabuhan publik yang dirancang oleh pemerintah pusat sebagai pelabuhan strategis yang menyediakan pintu gerbang utama bagi penumpang dan kargo menangani hampir semua lalu lintas peti kemas.

tumbuh 6% per tahun dan untuk kargo domestik tumbuh 4% per tahun. Sebaliknya, lalu lintas penumpang di laut benar-benar turun setelah krisis, dan keadaan ini diperkirakan akan berlanjut sampai beberapa tahun ke depan sebelum pertumbuhan yang pelan pada 2% per tahun dimulai.

75. Terdapat defisiensi infrastruktur dasar di pelabuhan dan dalam peralatan penanganan seperti pembatasan *draft* pada beberapa pelabuhan strategis yang menghalangi kemampuan pelabuhan menerima kapal-kapal besar dan berpartisipasi penuh dalam perdagangan daerah. Peralatan yang tidak memadai menjadi penyebab utama rendahnya produktivitas pelabuhan dalam hal rata-rata jumlah kapal yang mendarat, waktu perubahan haluan, dan jumlah kegiatan peti kemas. Secara keseluruhan, kinerja operasional dan penyediaan pelayanan dalam sektor ini belum memenuhi harapan para klien dan standar kinerja internasional. Khususnya, kinerja dalam operasi terminal peti kemas dianggap tidak memuaskan bagi para pengguna pelabuhan. Tarif pelabuhan masih rendah sehingga biaya perbaikan penuh hanya dapat dinikmati oleh pelabuhan yang besar. Dengan pengenalan International Ship and Port Security Cod pada bulan Juli 2004, semua pelabuhan internasional di Indonesia menghadapi tantangan untuk mengimplementasikan tindakan keamanan yang ketat.

76. Bandara juga memainkan peranan yang vital bagi penumpang, kargo bernilai tinggi dan surat dengan memfasilitasi mobilitas, membangkitkan kegiatan ekonomi, dan memberikan akses pengiriman barang-barang kebutuhan dasar ke daerah-daerah terpencil, sehingga membantu mengintegrasikan pulau-pulau di seluruh Indonesia.<sup>131</sup> Industri penerbangan sipil menderita kerugian keuangan setelah krisis keuangan di Asia, tetapi sekarang telah pulih kembali dan mendapatkan 60% lalu lintas lebih banyak dari sebelum krisis. Hal ini disebabkan oleh harga tiket pesawat yang murah karena adanya kompetisi di transportasi udara dan meningkatnya pencakupan geografis pelayanan transportasi udara. Proyeksi jangka panjang mengindikasikan pertumbuhan tahunan 5% untuk lalu lintas penumpang domestik dan 6% untuk lalu lintas penumpang internasional. Kapasitas fasilitas di tempat yang dapat melihat pesawat sudah cukup di bandara-bandara utama, sedangkan terminal dan tempat pemberangkatan atau parkir pesawat di beberapa bandara tidak memadai. Keadaan yang sama juga berlaku di bandara-bandara sekunder dan tersier. Keamanan lalu lintas udara merupakan masalah lainnya yang perlu diperhatikan. Tarif bandara domestik ditekan sebisanya menjadi rendah dan tidak memberikan biaya untuk perbaikan untuk pelayanan yang diberikan kepada penumpang dan awak pesawat. Sebagai dampaknya, keamanan bandara yang strategis perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah-masalah keamanan secara efektif.

77. Kerangka hukum terbaru<sup>132</sup> menjelaskan berbagai kategori pelabuhan dan bandara, menetapkan bahwa manajemen semua pelabuhan umum dan bandara merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang dapat didelegasikan kepada BUMN, dan mengizinkan partisipasi swasta hanya melalui perjanjian kerjasama dengan suatu BUMN. Berdasarkan kerangka ini, pemerintah pusat membatasi kelompok pelabuhan dan bandara, yang dianggap komersial (yang misalnya dapat membangkitkan keuntungan operasi atau mempunyai potensi untuk melakukan hal itu), dan mengalokasikan pelabuhan dan bandara ini untuk manajemen dan pengembangan pada enam BUMN. BUMN memberlakukan hak monopoli atas pelabuhan dan

<sup>131</sup> Pada tahun 2003, pergerakan pesawat di 186 bandara di Indonesia, yang 24 nya merupakan bandara internasional, berjumlah sekitar 500000, dan penumpang pesawat, baik untuk keberangkatan dan kedatangan, berjumlah sekitar 22 juta. Tiga bandara, yakni bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Ngurah Rai di Denpasar, dan Bandara Juanda di Surabaya, mendapatkan lebih dari 60% lalu lintas penumpang.

<sup>132</sup> UU Kelautan No 21/1992, PP No 69/2001, dan Keputusan Menteri No 53, 54, 55, dan 56/2002 yang diimplementasikan untuk pelabuhan; dan UU Penerbangan No 15/1992, PP No 70/2001, dan Keputusan Menteri No 44, 45, dan 48/2002 yang diimplementasikan untuk bandara.

bandara di portfolio-nya. Pihak BUMN inilah yang mengatur semua aspek operasi, pengembangan, dan partisipasi pihak swasta. BUMN juga berlaku sebagai pengatur di wilayahnya, menetapkan tarif untuk penggunaan infrastruktur pelabuhan/bandara dan untuk pelayanan pelabuhan/bandara berdasarkan diskusi dengan Departemen Perhubungan dan Transportasi. Pendekatan yang terpecah belah ini menghadirkan masalah koordinasi dan keamanan.

### **c. Kereta Api**

78. Jaringan rel kereta api terbatas hanya di pulau Jawa dan Sumatera. Total panjangnya hanya kurang dari 6000 km, yang seperempatnya dalam kondisi yang tidak dioperasikan. Sektor ini, yang menanggung kurang dari 10% lalu lintas penumpang di seluruh Indonesia dan kurang dari 1% lalu lintas pengangkutan, didominasi oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang merupakan badan usaha milik negara. Meskipun KAI sejak tahun 2000 menghadapi tingginya permintaan dan kurangnya penggunaan rel dan kereta yang beroperasi karena kompetisi penggunaan kereta api yang rendah jika dibandingkan dengan pelayanan jalan, udara, dan kapal ferry, masih mencatat adanya keuntungan yang kecil. Namun, pemerolehan keuntungan dari transportasi ini sulit diakses, karena KAI beroperasi dalam jaringan subsidi yang kompleks, pengaturan PSO, kontrak dengan BUMN yang lain, dan batasan yang akan terhadap penentuan tarif penumpang, dan kurangnya data yang dapat diandalkan untuk pembiayaan dan alokasi biaya.

79. Berdasarkan UU No. 13/1992 tentang Perkereta-apian dan peraturan terkait yang diimplementasikan, khususnya PP No 69/1998 tentang Lalu Lintas Kereta dan Transportasi, pemerintah pusat melalui Departemen Perhubungan dan Transportasi bertanggung jawab untuk perencanaan sektor ini, pembuatan kebijakan, peraturan, dan penyedia infrastruktur dasar seperti rel kereta dan rambu-rambunya, sedangkan KAI bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur ini, dan memberikan pelayanan untuk transportasi kereta api. Partisipasi pihak swasta diizinkan melalui perjanjian kerja sama dengan KAI, tetapi slama ini belum ada yang terwujud.

## **3. Isu-isu dan Tantangan Pengembangan Utama**

### **a. Investasi yang Tidak Memadai untuk Infrastruktur**

80. Secara keseluruhan, jaringan jalan yang tersedia di Indonesia tidak memadai. Secara relatif, jaringan jalan kabupaten/pedesaan sangat tidak memadai dan kualitasnya sangat buruk. Untuk jaringan jalan nasional, meskipun juga tidak memadai, kualitas jalan-jalan baru atau yang dirawat tidaklah buruk. Masalah kecukupan dan kualitas infrastruktur mengakibatkan kemacetan, penundaan, biaya operasi yang tinggi dan kurangnya keamanan. Masalah utama adalah kurangnya perawatan teratur jaringan jalan. Penyebab lainnya adalah terlalu berat beban kendaraan, ketidakseimbangan permintaan/kapasitas, kurangnya dana, kurangnya produktifitas dan manajemen, dan institusi yang lemah dan tidak terkoordinasi. Krisis keuangan di Asia tahun 1997 menyebabkan terhentinya konstruksi jaringan jalan tol. Ada banyak kekosongan jalan sehingga perlu untuk ditambah. Rendahnya tingkat keamanan jalan, yang merupakan masalah utama pada transportasi jalan, disebabkan terutama oleh faktor-faktor seperti terlalu cepat mengendarai, rendahnya kemampuan para pengemudi, kondisi kendaraan yang buruk, rancangan jalan yang buruk, terlalu berat beban kendaraan, dan terlalu lama menyetir. Namun, tingginya angka kecelakaan dan beratnya beban kendaraan terjadi karena kurangnya penegakan peraturan, yang semakin meningkat ketika pemerintah daerah

menganggap uang denda sebagai sumber pendapatan dan bukannya sebagai alat untuk menghapuskan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan.

81. Anggaran terbaru untuk jalan-jalan nasional adalah sekitar \$400 juta per tahun. Pemerintah pusat telah menentukan target untuk membangun 1500 km jalan tol di Jawa dan Sumatera dalam 10 sampai 15 tahun mendatang yang memerlukan anggaran sekitar \$1 milyar per tahun, yang akan dibagi antara pemerintah pusat dan pihak swasta.

82. Pelabuhan pada umumnya tidak efisien, yang mengakibatkan tambahan waktu dan biaya untuk kargo domestik dan kegiatan ekspor. Keuangan dan kegiatan peti kemas pihak swasta telah lambat berkembang, terutama di luar pelabuhan utama di Jawa. Pengenalan teknologi dan fasilitasi pengiriman antar alat transportasi juga lambat. Walaupun bandara utama berfungsi dengan baik, ada isu-isu mengenai manajemen keamanan udara dan sumber dana untuk pengembangan bandara berukuran sedang dan kecil, terutama yang di daerah terpencil. Meningkatnya permintaan transportasi karena sektor tidak adanya peraturan yang ketat dan rendahnya biaya tiket pesawat memberikan tekanan pada kapasitas bandara berukuran sedang. Dalam urusan peningkatan pendapatan, seperti di pelabuhan dan bandara, kebutuhan investasi susah dipenuhi karena ketidaklulusan anggaran pemerintah pusat, tarif yang rendah, kurangnya investasi pihak swasta, dan permintaan yang rendah, terutama di luar Jawa. Keamanan transportasi udara juga perlu diperhatikan mengingat armada komersial ini berkembang cepat, tidak adanya satu kesatuan kontrol lalu lintas udara, dan kepedulian akan keamanan secara keseluruhan di daerah.

83. Di bawah investasi dan operasi terbaru, anggaran tahunan sektor pelabuhan (pemerintah pusat dan PELINDO) diperkirakan sekitar Rp5 trilyun atau \$500 juta. Sementara itu, pemerintah pusat memperkirakan investasi baru di sektor pelabuhan (publik dan swasta) memerlukan anggaran sekitar \$700 juta dalam 5 tahun mendatang atau sekitar \$140 juta per tahun.<sup>133</sup> Kapasitas pemerintah pusat dalam mendanai sektor pelabuhan (tanpa pinjaman luar negeri) pada tahun 2004 diperkirakan \$20 juta<sup>134</sup> menunjukkan kesenjangan keuangan yang besar antara anggaran yang diperlukan dan kapasitas keuangan pemerintah pusat untuk mendanai sektor pelabuhan.

84. Pemerintah pusat memperkirakan bahwa investasi baru pada sektor bandara (publik dan swasta) memerlukan anggaran sekitar \$830 juta dalam 5 tahun ke depan atau sekitar \$166 juta per tahun.<sup>135</sup> Tingkat investasi ini kira-kira sama seperti yang diperkirakan dalam kajian JICA tahun 2004.<sup>136</sup> Sementara itu, kapasitas keuangan pemerintah pusat dalam mendanai sektor bandara tahun 2004 (tanpa sumber dana dari luar) diperkirakan \$20 juta,<sup>137</sup> menunjukkan kesenjangan keuangan yang sangat besar.

<sup>133</sup> Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi tahun 2005-2009 dari Departemen Perhubungan dan Transportasi. Kajian tentang Strategi Pengembangan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh JICA (tahun 1999) memperkirakan anggaran tahunan yang diperlukan untuk pengembangan pelabuhan sekitar \$100 juta per tahun untuk selama 10 tahun mendatang.

<sup>134</sup> Dengan perkiraan anggaran sektor pelabuhan adalah sekitar 40% dari total sektor transportasi laut tahun 2004 sekitar \$50 juta (Rencana Kerja MOT tahun 2005).

<sup>135</sup> Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi tahun 2005-2009 dari Departemen Perhubungan dan Transportasi. Kajian tentang Strategi Pengembangan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh JICA (tahun 1999) memperkirakan anggaran tahunan yang diperlukan untuk pengembangan pelabuhan sekitar \$100 juta per tahun untuk selama 10 tahun mendatang.

<sup>136</sup> Kajian Rencana Utama tentang Kebijakan Strategis Sektor Transportasi Udara di negara RI. JICA. 2004.

<sup>137</sup> Dengan perkiraan anggaran sektor pelabuhan adalah sekitar 40% dari total sektor transportasi udara tahun 2004 sekitar \$50 juta (Rencana Kerja MOT tahun 2005).

## b. Partisipasi Pihak Swasta dan Kerangka Peraturan

85. Masalah utama dalam sektor transportasi adalah walaupun jumlah investasi pemerintah dalam sektor ini masih rendah, partisipasi penuh pihak swasta terbatas karena larangan yang ditetapkan dalam peraturan. Hal ini mengakibatkan buruknya pelayanan dan kinerja keuangan pada operasi pelabuhan dan bandara.

86. UU Jalan No 38/2004 yang baru dan kemudian PP No 15/2005 tentang Jalan Tol telah mereformasi kerangka hukum dan membuka jalan untuk partisipasi pihak swasta yang lebih besar.<sup>138</sup> Peraturan itu telah membagi-bagi sektor ini dengan memisahkan fungsi peraturan dari BUMN utamanya, Jasa Marga, sehingga memerlukan pembentukan badan pembuat peraturan baru, mengakhiri monopoli Jasa Marga dalam pembangunan jalan tol, dan mengizinkan investor pihak swasta penuh melakukan penawaran untuk proyek membangun-mengoperasikan-mentransfer atau proyek konsesi bersaing dengan Jasa Marga. Pada bulan Agustus 2005, keputusan dikeluarkan oleh Departemen PU,<sup>139</sup> yang memungkinkan tarif jalan tol dinaikkan sekitar 15-50% untuk memastikan tetap adanya dana untuk operasi jalan tol ini. Untuk melengkapi kerangka hukumnya, Dep PU membuat draf PP tentang Jalan dan Jembatan. Sebagaimana ditetapkan oleh kerangka hukum yang baru, BPJT, yang melaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum, didirikan pada bulan Oktober 2005. Tanggung jawabnya meliputi mengembangkan rencana bisnis dan studi kelayakan untuk proyek jalan tol, mengadakan penawaran, memfasilitasi akuisisi tanah, dan merekomendasikan tarif untuk proyek-proyek sejenis, dan mengawasi implementasi konsesi jalan tol.

87. Baik pelabuhan maupun bandara mempunyai berpotensi untuk melibatkan partisipasi pihak swasta, tetapi semua itu hanya tetap menjadi keinginan semata karena kurangnya kesempatan yang adil bagi pihak swasta untuk berusaha dalam sektor ini. Dalam sektor pelabuhan, tiga dari empat PELINDO (Perusahaan Manajemen Pelabuhan Negara) telah membentuk perusahaan *joint venture* dengan operator swasta. Peraturan yang menetapkan PELINDO sebagai pemilik<sup>140</sup> sekaligus sebagai operator, menghalangi partisipasi pihak swasta. Pihak swasta yang merupakan investor potensial di terminal pelabuhan baru tidak dapat mengharakan perlakuan yang adil karena PELINDO menjadi regulator dan operator. Sampai sekarang, partisipasi pihak swasta dalam sektor bandara masih sangat terbatas, dan umumnya hanya ikut terlibat dalam pekerjaan yang kecil untuk pelayanan di wilayah bandara yang diperbolehkan untuk umum. Hambatan lainnya untuk partisipasi pihak swasta adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh perundang-undangan otonomi daerah, yang memberikan otoritas atas pekerjaan umum, termasuk pelabuhan dan bandara, kepada pemerintah daerah.<sup>141</sup> Hal ini menciptakan potensi adanya konflik dengan PELINDO dan Angkasa Pura (perusahaan pengelola bandara).

## c. Struktur Kelembagaan

88. Agen-agen pemerintah yang memainkan peran utama dalam sektor transportasi meliputi Departemen Keuangan, Departemen Badan Usaha Milik Negara, Dep Perhubungan dan

<sup>138</sup> Sampai sekarang, pihak swasta telah dilibatkan dalam pembangunan hanya 24% dari jaringan jalan tol sepanjang 600 km.

<sup>139</sup> 374/KPTS/M/2005.

<sup>140</sup> Fungsi pemilik dalam pelabuhan dan bandara meliputi penugasan di tempat kapal berlabuh/terminal, alokasi bangsal dan gudang, kontrol semua kendaraan yang datang dan meninggalkan pelabuhan dan bandara, pembersihan dan perawatan infrastruktur, dan pengambilan ongkos.

<sup>141</sup> UU tentang Otonomi Daerah No 22/1999, PP No 25/2000, dan UU yang direvisi tentang Otonomi Daerah No 32/2004, PP No 69 dan 70/2001 dikeluarkan untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah daerah.

Transportasi, dan BAPPENAS; pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berbagi tanggung jawab sektor transportasi daerah. Dep Perhubungan dan Transportasi terdiri atas tiga direktorat umum yang mengurus transportasi. Masalah kelembagaan dalam transportasi meliputi kurangnya koordinasi di sektor ini baik secara internal maupun dengan sektor lain, kapasitas dan institusi yang lemah, dan kurangnya UU dan peraturan yang sesuai. Mengatasi atau mengurangi masalah kelembagaan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk memecahkan masalah di sektor ini. Ketimpangtindihan tanggung jawab untuk pembangunan dan perawatan aset jalan antara Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan dan Transportasi perlu diperhatikan. Masalah lainnya adalah mobilisasi kapasitas kelembagaan yang tidak sesuai, yang diperkuat melalui beberapa proyek yang didanai oleh lembaga donor selama beberapa dekade, tetapi tampaknya menghilang.

89. Dampak desentralisasi pada penyediaan dan pelayanan infrastruktur transportasi serta lembaganya belum sepenuhnya dinilai. Sebagai bagian dari proses desentralisasi fiskal dan administrasi, yang berlaku efektif pada tahun 2001, UU No 32/2004 (direvisi menjadi No 22/1999) telah mengalihkan sebagian besar tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah, dengan kabupaten dan kota sebagai titik pusat utama. UU No 33/2004 (direvisi menjadi No 25/1999) menentukan bagaimana tanggung jawab daerah yang baru harus didanai. Misalnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikumpulkan langsung oleh pemerintah provinsi atau kabupaten untuk tujuan daerah itu sendiri. Penggunaan dana di sektor ini yang lambat baik melalui pinjaman atau pemberian dana luar negeri, maupun melalui pihak swasta merupakan masalah yang disebabkan oleh rintangan kelembagaan. Khususnya, ketiadaan kebijakan pendanaan yang jelas, pengaturan keuangan untuk pembangunan infrastruktur harus dilakukan berdasarkan per kasus, dengan memperpanjang diskusi antar agen dan menunda proses pembuatan kebijakan.

90. Kurangnya dana memberikan kontribusi pada banyak masalah dalam sektor ini dan hal ini terkait dengan aspek kelembagaan. Kebutuhan keuangan sektor ini sangat besar, dan memobilisasi sumber daya yang memadai memerlukan dukungan dari institusi sektor ini, perubahan kelembagaan dan peraturan, serta dukungan politik. Selain itu, mekanisme pendanaan yang berkelanjutan seharusnya dibentuk untuk memulai pelayanan transportasi di daerah terpencil. Keterlibatan yang mendalam dari pihak swasta melalui operasi pihak swasta dan partisipasi pihak swasta tertunda oleh rendahnya tarif dan keuntungan, dan berbagai hambatan kelembagaan seperti prosedur penawaran yang lemah.

91. Perencanaan sektor transportasi yang lemah dan berbagai kekurangan yang ada juga berdampak pada rendahnya perhatian pada isu-isu lingkungan dan sosial, terutama jender, kesehatan, dan perdagangan manusia. UU dan peraturan yang memadai seharusnya ditetapkan untuk memperhatikan isu-isu ini sebagai bagian dari tujuan pembangunan, khususnya di daerah terpencil. Memperbaiki lingkungan/mengurangi dampaknya dan menargetkan untuk rakyat miskin merupakan hal-hal yang sangat terbatas dipedulikan oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Perhubungan dan Transportasi, meskipun ada panduan dan perundang-undangan lingkungan yang penting serta kemampuan sebagai tujuan penting.

92. Kapasitas kelembagaan di sektor jalan masih lemah dalam beberapa aspek. Walaupun kapasitas manajemen aset telah dibangun di tingkat nasional, perencanaan pembangunan perlu diperkuat. Agen-agen di daerah bervariasi dalam hal kapasitas dan kinerja, dan koordinasi antar agen lemah. Kendaraan dengan beban berlebihan masih umum terjadi, sehingga meningkatkan biaya pelestarian jalan secara signifikan, dan keamanan jalan masih buruk. Implementasi pekerjaan pembuatan jalan sering mahal dan kualitasnya rendah, dan kolusi di

antara kontraktor merupakan suatu masalah. Praktik dan kinerja bisnis agen-agen nasional dan industri konstruksi perlu diperbaiki, dan kapasitas agen-agen daerah dikembangkan. Penegakan peraturan untuk mengurangi kendaraan dengan beban berlebih perlu diperkuat, dan program keamanan jalan yang lengkap diimplementasikan. Dep PU, bersama dengan Dep Perhubungan dan Transportasi dan bantuan dari World Bank, menyiapkan dua inisiatif dalam wilayah-wilayah ini, yakni program percobaan keamanan jalan di Semarang pada enam bulan kedua tahun 2006 dan percobaan kontrak berdasarkan kinerja untuk pemeliharaan jalan, termasuk pengawasan beban kendaraan, di Jawa Tengah pada awal 2007.

93. DGST memformulasikan dan mengimplementasikan standar kebijakan dan teknis pada subsektor transportasi laut, termasuk pembangunan pelabuhan. Namun, tanggung jawabnya tidak termasuk mengatur kapal ferry dan pelabuhan, yang merupakan tanggung jawab Direktorat Umum Transportasi Darat. Walaupun secara teknis pembangunan pelabuhan di bawah PELINDO harus mengikuti panduan teknis dari Dep Perhubungan dan Transportasi, PELINDO juga berada di bawah pengawasan Departemen Badan Usaha Milik Negara. Peran Dep Perhubungan dan Transportasi dalam operasi pelabuhan adalah melalui kantor administrasi pelabuhan laut (ADPEL) yang didirikan di semua pelabuhan publik. Dalam beberapa kasus, PELINDO dan pemerintah daerah bersama-sama membangun pelabuhan di wilayah wewenang pemerintah daerah.<sup>142</sup> PELINDO sebagai operator pelabuhan menyediakan dan mengatur (i) pelayanan penanganan kapal, seperti nahkoda, penarikan kapal, tempat berlabuh kapal, dan penjangkaran kapal; (ii) pelayanan penanganan kargo; dan (iii) pelayanan lainnya, termasuk penyewaan tanah, gudang, dan ruang kantor. ADPEL mengawasi lalu lintas laut, keamanan pelabuhan, dan keamanan di perairan teritorial dan di pelabuhan.

94. Kerangka hukum dan peraturan untuk pelabuhan dan bandara perlu direvisi untuk mengakhiri monopoli enam BUMN, dan peran ganda mereka sebagai pemilik, pembuat peraturan, otoritas yang membuat kontrak untuk penyediaan pelayanan pelabuhan/bandara, dan operator. Selain itu, penciptaan penyedia pelayanan lalu lintas udara yang terpisah harus dipertimbangkan. Kemajuan yang signifikan telah dibuat dalam merevisi kerangka hukum dan peraturan. Keputusan Presiden No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Perkapalan Domestik mempromosikan terpisahnya peraturan dan fungsi operasi di pelabuhan, dan mengizinkan lebih dari satu operator terminal untuk bersaing. Dep Perhubungan dan Transportasi telah melengkapi draf UU baru untuk transportasi laut dan penerbangan. Sangatlah penting untuk UU baru, termasuk peraturan yang berikutnya diimplementasikan, menyediakan restrukturisasi di sektor ini. Khususnya, kerangka hukum seharusnya mengizinkan pendirian pelabuhan dengan pemilik sesungguhnya dan struktur bandara tempat para pemilik tidak mempunyai taruhan keuangan secara langsung pada penyedia pelayanan apapun, dan harus menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah.

#### **4. Kerangka Kebijakan dan Perencanaan Pemerintah**

95. Rencana pembangunan jangka menengah pemerintah pusat tahun 2004-2009 menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam tujuan yang ditekankan kembali untuk menciptakan kedamaian dan keamanan, menciptakan demokrasi dan keadilan, dan memperbaiki kesejahteraan. Kebijakan pembangunan jalan diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan kualitas jalan di daerah yang sudah maju dengan memperkuat koridor jalan nasional utama berdasarkan pulau dan menyediakan akses yang lebih baik untuk daerah yang kurang maju, termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Pembangunan koridor nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk

<sup>142</sup> Pemerintah Bontang, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Manokwari.

program kerjasama wilayah ASEAN, yang memerlukan implementasi proyek infrastruktur yang diprioritaskan pada tingkat nasional. Memperbaiki integrasi dan hubungan, membangun transportasi darat dan koridor dagang yang menghubungkan Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia merupakan beban berat tujuan ASEAN.

96. Departemen Perhubungan dan Transportasi mengembangkan rencana strategis transportasi tahun 2005-2009, dan DGLC memperbaharui kebijakan dan rencana aksi (*policy statement and action plan/PSAP*) untuk jalan, lalu lintas, dan transportasi secara periodik. PSAP pertama dikeluarkan pada tahun 1989; draf yang terbaru mencakup tahun 2001-2005. Proyek Sektor Rehabilitasi Jalan (PSRJ)<sup>143</sup> - meliputi komponen untuk membantu DGLC memantau kemajuan PSAP dan mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan biaya yang dikeluarkan pengguna, biaya perbaikan, pendanaan perawatan jalan, kendaraan dengan beban berlebih, keamanan jalan, dan partisipasi pihak swasta. Komponen ini membantu memperbaiki jalan dan peraturan transportasi jalan untuk mendorong terciptanya kompetisi dalam pelayanan transportasi jalan, dan memperkuat manajemen dan perencanaan pembangunan jalan.

97. Pemerintah pusat telah menetapkan rencana untuk membangun pelabuhan strategis selama tahun 2005-2009, termasuk di Balikpapan, Bojonegoro, Dumai, Ancol Timur (Jakarta), Jayapura, Muara Sabak, Semarang, dan Teluklamong (Surabaya).<sup>144</sup> Selanjutnya, pemerintah pusat telah berusaha untuk memperbaiki keamanan pelabuhan, khususnya pada pelabuhan utama yang terpilih dengan bantuan United States Trade and Development Agency dan Japan International Cooperation Agency. Dengan melengkapi rencana investasi fisik, pemerintah pusat telah mempersiapkan reformasi kebijakan dan peraturan subsektor pelabuhan yang diikuti oleh aksi-aksi yang pada dasarnya terdiri atas tiga tahap.

## 5. Peran Mitra Pembangunan

98. Dari tahun 1984 hingga tahun 2003, Indonesia telah menerima sekitar \$7,6 milyar bantuan luar negeri untuk pembangunan jalan. Dari jumlah tersebut, 33%-nya berasal dari World Bank dan 33%-nya dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation). Kontribusi ADB atas pinjaman tersebut adalah sebesar 17% dan kontribusi badan-badan pendanaan bilateral dari Australia, Austria, Jerman, Kuwait, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat juga sebesar 17%. ADB juga memberikan hibah sejumlah \$4,3 juta. World Bank selama ini memfokuskan pada sektor jalan (termasuk jalan di kabupaten dan desa) dan sektor kereta api, sedangkan JBIC telah terlibat dalam berbagai sektor transportasi termasuk jalan, rel, pelabuhan, bandara, perkapalan, dan pelayanan dengan kapal ferry; dan baru-baru ini telah mulai mencari kesempatan untuk mendukung transportasi perkotaan.

99. JBIC telah mendanai pembangunan Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Kupang, dan banyak pelabuhan kecil di Indonesia timur. Selain itu, Japan International Cooperation Agency telah sangat aktif memberikan bantuan teknis kepada pemerintah pusat dalam berbagai subsektor transportasi, termasuk ferry dan subsektor transportasi laut. World Bank tidak terlibat dalam sektor pelabuhan. JBIC telah mendanai upaya peningkatan kualitas bandara internasional dan

<sup>143</sup> ADB.2000. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for the Road Rehabilitation Sector Project* (Laporan dan Rekomendasi Presiden kepada Direksi mengenai Pinjaman yang diajukan untuk Negara Republik Indonesia untuk Proyek Sektor Rehabilitasi Jalan). Manila. Pinjaman 1798-INO, disetujui pada bulan Desember 2000 sebesar \$190 juta.

<sup>144</sup> Rencana Strategis Dep Perhubungan dan Transportasi (2005-2009) mengindikasikan sumber pendanaan termasuk anggaran pemerintah, pendanaan BUMN, dan pendanaan pihak swasta diperlukan untuk mengimplementasikan rencana investasi.

daerah (bandara Bali dan Balikpapan telah selesai; dan bandara di Surabaya, Palembang, dan Padang sedang dalam upaya peningkatan kualitas). Lembaga donor bilateral, seperti Australia, Jepang, Jerman, Perancis, Swedia, dan Amerika Serikat memberi bantuan yang signifikan untuk perbaikan bandara, persediaan peralatan, dan penguatan kelembagaan. World Bank tidak terlibat dalam sektor bandara.

100. Dalam beberapa aspek, kapasitas kelembagaan Indonesia dalam sektor transportasi lemah (paragraf 16-22). Kelemahan ini mencakup pula kelemahan kapasitas untuk mengatur hasil. Oleh karena itu diperlukan bantuan teknis untuk memperbaiki kapasitas dan pendekatan.

## **6. Keberhasilan dan Pelajaran yang Diperoleh ADB di Sektor ini**

101. ADB telah membantu sektor transportasi sejak tahun 1975. Total dana yang dipinjamkan ADB untuk sektor jalan adalah sebesar \$1,57 milyar untuk 15 proyek. Dari ke-15 proyek tersebut, 14 sudah selesai. ADB juga telah memberikan dana sebesar \$4,3 juta. Laporan mengenai penyelesaian proyek telah disiapkan untuk 14 proyek jalan yang didanai ADB, dengan anggapan semua proyek ini berhasil kecuali satu proyek yang baru sebagian berhasil. Laporan audit kinerja telah disiapkan untuk sembilan proyek, yang semua dinilai berhasil. Laporan-laporan ini mengidentifikasi beberapa pelajaran utama berikut ini: (i) dalam jangka pendek, proyek harus memfokuskan pada perawatan dan rehabilitasi secara periodik; (ii) prosedur rancangan yang disederhanakan yang digunakan oleh DGH untuk mempersiapkan subproyek berdasarkan jaringan kerja seharusnya diganti dengan metode rancangan yang lebih terperinci; (iii) evaluasi ekonomi seharusnya lebih menyeluruh, terutama proyeksi pertumbuhan lalu lintas; (iv) perhatian yang lebih harus diberikan untuk struktur saluran air; (v) perawatan secara periodik tidak seharusnya menjadi kompensasi atas perawatan rutin yang tertunda atau yang buruk; dan (vi) kapasitas agen yang melaksanakan kegiatan dan hubungannya dengan agen yang mengimplementasikan sangat penting bagi kesuksesan proyek. Pelajaran lainnya adalah pengembangan kapasitas dan institusi harus diimplementasikan secara teratur untuk menghindari hilangnya keahlian karena staf yang pensiun atau dipindahkan tempat kerjanya. Beberapa proyek telah ditunda karena kurang atau terlambatnya sebagian dana, dan karena masalah akuisisi tanah dan pengganti rugi atas pemukiman yang digusur. Isu-isu ganti rugi atas pemukiman yang digusur telah diperkecil dengan adanya PSRJ yang sedang berlanjut, tetapi proyek ini mengalami penundaan. Praktik-praktik penipuan dan korupsi, terutama dalam pengadaan barang, juga dianggap telah menyebabkan buruknya kualitas kerja.

102. ADB telah memberikan tujuh pinjaman, dengan nilai total mencapai \$203,7 juta, untuk mendanai pembangunan subsektor pelabuhan di Indonesia. Proyek-proyek dalam subsektor pelabuhan ini efektif dan diimplementasikan secara memuaskan. Proyek ini berhasil dilaksanakan dengan biaya sesuai anggaran, meskipun penyelesaiannya sedikit tertunda. Penundaan ini terjadi disebabkan oleh prosedur internal yang panjang, khususnya untuk menyeleksi konsultan dan kontraktor. Dengan demikian, setiap proyek perlu dilengkapi dengan kebijakan yang sesuai, perbaikan kerja dan kelembagaan untuk memperbaiki efisiensi dan kelestarian pelabuhan. Untuk menghindari penundaan dalam persiapan proyek, penyiapan desain teknik yang rinci sejak awal akan membantu pemerintah pusat mempercepat pelaksanaan proyek.

## 7. Pekerjaan dan Komitmen Terbaru ADB

103. ADB memiliki dua proyek jalan raya yang sedang dilaksanakan, yaitu Proyek Rehabilitasi Sektor Jalan Raya (Road Rehabilitation (Sektor) Project/RRSSP)<sup>145</sup> dan Proyek Rehabilitasi-2 Jalan Raya<sup>146</sup>.

## 8. Usulan Peran ADB dalam Sektor Transportasi

104. Tujuan ADB dalam sektor transportasi adalah memperbaiki jaringan transportasi di Indonesia dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan pengoperasiannya. ADB akan mengatasi keterbatasan investasi di bidang transportasi, tingkat partisipasi swasta rendah, infrastruktur lembaga yang tidak efisien dan perencanaan yang tidak memadai. ADB akan secara langsung mengatasi keterbatasan investasi dengan melaksanakan proyek untuk meningkatkan kapasitas jalan, pelabuhan, dan bandara terpilih yang memainkan peran penting dalam perdagangan domestik dan regional. Untuk mengatasi lemahnya partisipasi sektor swasta, ADB memilih dua cara. Pertama adalah reformasi di bawah Program Reformasi Infrastruktur (*Infrastructure Reform Program*). Reformasi ini akan meningkatkan daya tarik sektor transportasi bagi investor swasta. Kedua, ADB akan berpartisipasi langsung pada proyek transportasi yang didanai sektor swasta, seperti proyek jalan tol. ADB juga akan meningkatkan efisiensi struktur lembaga dan memperbaiki perencanaan melalui reformasi di bawah Program Reformasi Infrastruktur (*Infrastructure Reform Program*), dialog kebijakan yang berjalan dengan dana pinjaman proyek, dan memberikan *hibah* dalam bentuk bantuan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan reformasi selanjutnya.

## 9. Usulan Hasil yang akan Dibantu ADB

105. Hasil pembangunan sektor transportasi CSP mencakup peningkatan kapasitas sistem transportasi, peningkatan partisipasi swasta dalam sektor transportasi, dan perbaikan struktur dan perencanaan kelembagaan di sektor ini (Tabel A6.1). ADB akan membantu peningkatan kapasitas sistem transportasi subsektor jalan raya, udara dan pelabuhan. Peningkatan kapasitas ini akan diukur dengan indikator-indikator seperti kualitas jalan raya yang baik dalam km, jumlah bandara dalam ukuran khusus, dan kapasitas pelabuhan dan kargo. Peningkatan partisipasi sektor swasta di bidang transportasi akan diukur dengan indikator-indikator seperti jumlah proyek jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang melibatkan partisipasi sektor swasta. Perbaikan struktur lembaga bagi sektor transportasi akan diukur dengan ukuran berjalan dan/atau terlaksananya proyek-proyek perbaikan struktur lembaga subsektor transportasi jalan, laut dan udara.

## 10. Aktivitas ADB yang Diusulkan

106. Program ADB untuk sektor transportasi pada tahun 2006-2009 mencakup lima pinjaman sektor publik untuk jalan, dan subsektor pelabuhan, juga proyek transportasi yang melibatkan partisipasi sektor swasta. Di tahun 2006, Program ADB mencakup Program Reformasi Infrastruktur dan Proyek Pelabuhan Antar Pulau. Program Reformasi Infrastruktur terdiri dari tiga program pinjaman senilai \$300 juta masing-masing pada tahun 2006, 2008 dan 2010.

<sup>145</sup> ADB. 2000. *Report and Recommendation of the President to Board Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for the Road Rehabilitation Sektor Project*. Manila, Pinjaman 1798-INO, disetujui pada bulan Desember 2005 sejumlah \$190 juta.

<sup>146</sup> ADB. 2000. *Report and Recommendation of the President to Board Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for the Road Rehabilitation2 Project*. Manila, Pinjaman 2184-INO, disetujui pada bulan September 2005 sejumlah \$151 juta.

Reformasi yang berlangsung di bawah Program Reformasi Infrastruktur, yang menangani sektor infrastruktur lain disamping sektor transportasi, akan memfasilitasi pembangunan sektor transportasi di masa depan, termasuk mendorong partisipasi sektor swasta. Proyek pembangunan jalan daerah akan menjadi Multitranchise Financing Facility, dengan *tranche* pertama senilai \$100 juta yang diusulkan pada tahun 2009. ADB juga akan berpartisipasi pada proyek-proyek yang didanai swasta pada sektor transportasi, khususnya proyek jalan tol, pelabuhan dan bandara.

**Table A4. 3: Kerangka Hasil Peta Sektor Jalan**

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Untuk Sektor <sup>147</sup>		Hasil CSP		
Hasil Sektor untuk Negara	Peluang dan Kendala Utama	Hasil CSP dan Indikator Hasil Sektor	Indikator Tahapan Utama	Intervensi
Perbaiki sistem transportasi dari segi kuantitas dan kualitas infrastruktur	Investasi yang tidak memadai	Peningkatan kapasitas sistem transportasi	Peningkatan jumlah km jalan yang berkualitas baik	Proyek pembangunan jalan provinsi
			Jumlah bandara dengan landasan pacu lebih dari 2.200 m	Proyek pembangunan bandara
			Peningkatan jumlah kapasitas pelabuhan (berth length m) dan kapasitas pelabuhan kargo (yard area m)	Proyek pelabuhan antar pulau, proyek pembangunan pelabuhan
			Jumlah jalan tol dengan PSP	Program reformasi infrastruktur
	Tingkat partisipasi sektor swasta yang rendah.	Perbaiki kerangka peraturan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam bidang transportasi	Jumlah proyek pelabuhan dengan PSP	Partisipasi ADB pada proyek jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang dilakukan oleh swasta
			Jumlah bandara dengan PSP	Dialog kebijakan mengenai pinjaman proyek
				Hibah dalam bentuk bantuan teknis.

<sup>147</sup> Hanya hasil yang relevan bagi pemetaan yang dibuat ADB dan CSP yang tercatat dalam hasil kerangka kerja ini. Sumber: Asian Development Bank.

	Struktur kelembagaan yang tidak efisien dan perencanaan dalam sektor transportasi yang tidak memadai	Peningkatan efisiensi dan perencanaan kelembagaan	Pengukuran untuk memperbaiki struktur dan perencanaan institusional pada subsektor transportasi jalan raya, laut, dan udara.	
--	--	---	--	--

## E. Sektor Energi

### 1. Pendahuluan

107. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menjelaskan isu dan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam sektor energi, respon pemerintah terhadap tantangan tersebut dan bagaimana cara ADB menawarkan kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan tantangan tersebut pada periode 2006-2009.

### 2. Ringkasan Analisis Situasi

108. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya energi dan mempunyai cadangan minyak, gas alam, dan batubara yang cukup besar (Table A6. 4). Dengan cadangan gas sejumlah 2, 56 triliun meter kubik (m<sup>3</sup>), Indonesia merupakan Negara ke 13 yang memiliki cadangan gas terbesar di dunia dan negara dengan cadangan gas terbesar di Asia dan Pasifik. Cadangan gas yang bisa dibuktikan itu jumlahnya tiga kali jumlah cadangan minyak Indonesia. Cadangan batubara yang bisa dibuktikan diharapkan akan bertahan hingga 38 tahun pada tingkat ekstraksi rata-rata saat ini. Cadangan minyak secara bertahap turun disebabkan keterbatasan investasi eksplorasi. Posisi cadangan minyak di Indonesia hanya tersisa sekitar 5 triliun barel, dan sejak tahun 1990 terus turun. Dengan produksi mendekati 1 juta barel per hari pada tahun 2005, diperkirakan cadangan minyak akan habis sekitar 12 tahun lagi.

**Tabel A4. 4: Cadangan Energi (2004)**

Bahan Bakar		Cadangan	Rasio Produksi
Minyak Bumi	Miliar Barel	4,72	11,5
Gas	Triliun meter kubik	2,56	34,9
Batubara	Juta ton	4.968,00	38,0
- Anthracite	Juta Ton	740,00	
- Sub-bituminous dan lignite	Juta ton	4.228,00	

109. Indonesia memiliki rasio pelistrikan terendah di wilayahnya (Table A6. 5). Meskipun sejak tahun 1974 rata-rata pelistrikan berjumlah 1 juta rumah setiap tahun, pada tahun 2004 rasio pelistrikannya hanya 57%. Sembilan puluh juta penduduk hidup tanpa akses listrik dan 1/3 dari jumlah tersebut berada di wilayah utama Jawa-Bali yang biaya pasokan listriknya tinggi.

**Tabel A4.5: Rasio Pelistrikan Antar Negara (%)**

Negara	1994	2003
Viet Nam	15	83.5
Philippina	87	82.0
Indonesia	39	55.0
China	92	96.0
Thailand	87	

Sumber: Bank Dunia, 2005.

110. Konsumsi energi di Indonesia didominasi oleh minyak dan gas, yaitu mencapai 80% dari total energi (Tabel A6. 6). Sejak tahun 2000, produksi minyak domestik menurun, disebabkan oleh kejenuhan ladang produksi ditambah dengan pengalihan cadangan yang rata-rata lambat. Konsumsi minyak dan produk turunannya secara tajam meningkat. Sebagai akibatnya pada tahun 2004, produksi minyak Indonesia dan konsumsi minyak Indonesia berjumlah sama, dan pada tahun 2005 Indonesia menjadi negara pengimpor minyak. Penggunaan gas alam dalam negeri domestik tetap berada dibawah 30% dari keseluruhan jenis energi yang digunakan di Indonesia karena keterbatasan infrastruktur pasokan gas, semakin tingginya dan semakin menariknya harga gas internasional.

**Tabel A4. 6: Komposisi Berbagai Sumber Energi**

Persentase Komposisi	1990	1995	2000	2001	2002	2003
Minyak Mentah dan Minyak	60.13	53.36	57.79	53.34	53.35	54.28
Batubara	5.60	6.53	10.18	13.80	14.32	14.25
Gas alam, LPG, dan LNG	29.44	44.62	27.64	27.98	28.05	26.46
Hydropower	4.38	3.82	3.22	3.48	2.87	3.58
Geothermal	0.44	0.61	1.18	1.40	1.40	1.44

LNG=Liquid Natural Gas. LPG=Liquid Petroleum Gas

Sumber: Pemerintah Indonesia

111. Secara historis, energi berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia dan terhadap pendapatan ekspor. Sumber energi yang berlimpah memungkinkan pemerintah mensubsidi harga bahan bakar dalam negeri pada masa lalu. Besarnya kisaran subsidi bahan bakar mulai dari 4 – 7 miliar per tahun sejak krisis keuangan. Pada tahun 2005 dengan eskalasi yang tajam pada harga minyak dunia, dan oleh karena Indonesia menjadi negara pengimpor minyak bersih, subsidi bahan bakar terpaksa dikurangi hingga \$12 miliar. Ini memaksa pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak hingga lebih dari 100%.

112. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) telah menetapkan target ekonomi makro untuk tahun 2005-2009, yaitu mempercepat pertumbuhan PDB dari 4,5% menjadi 7,6% (dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6,6%), meningkatkan rasio investasi/PDB dari 20,5% menjadi 28,4%, pengurangan angka pengangguran dari 9,7% menjadi 5,1% dan mengurangi angka kemiskinan hingga setengahnya dari 16,6% menjadi 8,2%. Pasokan energi yang dapat diandalkan dan efisien adalah masukan yang penting untuk mencapai sasaran tersebut. Pemerintah sudah memperkirakan bahwa dibutuhkan dana sebesar \$145 miliar untuk investasi infrastruktur pada tahun 2009, dengan hanya 25% berasal dari anggaran pemerintah dan paling tidak \$80 miliar berasal dari sektor swasta. Untuk memenuhi tuntutan ini diperlukan iklim investasi yang kondusif untuk menarik partisipasi sektor swasta.

113. Kapasitas terpasang PLN saat ini sekitar 21.800 MW, sedangkan kapasitas sebesar 3.400 MW dikontrak dari pemasok tenaga listrik independen (Independent power producer/IPPs). Dengan kapasitas tersebut, PLN masih belum sanggup memenuhi puncak permintaan dan menyisakan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik alternatif yang menarik, kebanyakan diesel<sup>148</sup>. Tetapi biaya pengoperasian alat-alat ini menjadi mahal karena terkena dampak penghapusan subsidi bahan bakar. Permintaan tenaga listrik diproyeksikan tumbuh rata-rata 6,6 % per tahun hingga tahun 2013<sup>149</sup>. Untuk memenuhi angka proyeksi permintaan tersebut, setiap tahun perlu disiapkan pembangkit tenaga listrik alternatif yang menghasilkan 1.000-2000 MW. PLN memiliki program pembangunan pembangkit listrik, terdiri dari tiga proyek dengan total 2.660 MW yang akan disiapkan pada tahun 2006-2007<sup>150</sup> dan delapan proyek dengan total 3.670 MW yang akan ditawarkan dalam melalui tender<sup>151</sup>. Sebenarnya, semua proyek tersebut, kecuali proyek di Cilegon, dilaksanakan oleh produsen tenaga listrik independen (IPP), yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi sektor swasta.

**Tabel A4. 7: Permintaan Tenaga Listrik (2004-2020)**

Item	2005	2010	2015	2020
Penjualan Tenaga Listrik (GWh)	105.828,00	167.382,00	277.037,00	322.278,00
Kapasitas Terpasang (MW)	25.852,00	41.873,00	64.694,00	73.415,00
Jumlah Pelanggan )	36,12	47,07	58,85	Tidak tersedia
Konsumsi Perkapita	483,84	731,48	1.160,54	Tidak tersedia

Catatan: GWh=GigaWatt hours, KWh=KiloWatt hours, MW=Mega Watt  
Sumber: PLN, 2005.

**Tabel A4. 8: Kinerja Operasi PLN**

Item	2000	2001	2002	2003	2004
Generator yang digunakan sendiri (%)	4,05	4,19	4,20	4,35	5,72
Kerugian Transmisi (%)	2,58	2,38	2,59	2,46	2,33
Kerugian Distribusi (%)	9,08	11,14	13,87	14,41	8,96
Total Kerugian	11,65	13,52	16,45	16,88	11,29
SAIFI (kali/pelanggan/tahun)	13,90	13,24	14,35	10,90	9,43
SADI (Jam/Pelanggan/tahun)	18,10	15,12	14,17	12,51	11,78

SAIDI = system average interruption duration index (jam/pelanggan, SAIFI = system average interruption frequency index (kali/pelanggan)

Sumber: Statistik PLN 2004.

114. Pada tahun 2006, pemerintah mengumumkan program besar berupa pembangunan pembangkit listrik berkekuatan 10.000 MW berbahan bakar batubara pada tahun 2009.

<sup>148</sup> Hampir 10.000 perusahaan menyediakan sumber tenaga listrik mereka sendiri, kebanyakan untuk mengurangi resiko kekurangan pasokan jaringan. Gabungan kapasitas terpasang dari pembangkit tenaga listrik perusahaan tersebut diperkirakan mencapai 13.000-15.000 MW, atau hampir mencapai setengah dari total kapasitas.

<sup>149</sup> Direktorat Jenderal Pemanfaatan Energi dan Listrik. 2004. National Electricity Master Plan 2004. Jakarta. Rencana Pengembangan Tenaga Listrik terbaru PLN pada tahun 2006-2015 berdasarkan pada pertumbuhan permintaan tertinggi sebesar 8,5% pertahun.

<sup>150</sup> Cilacap di Jawa Tengah (600 MW, Batubara); Cilegon di Jawa Barat (740 MW, Gas alam, diimplemtasikan oleh PLN dengan JBIC Financing); dan Tanjung Jati B di Jawa Tengan (1.320 MW, Batubara).

<sup>151</sup> Cirebon di Jawa Barat (600 MW, batubara, bidding underway); Jawa Tengah (1.200 MW, batubara); Pasuruan di Jawa Timur (500 MW, Gas Alam); Paiton 3 dan 4 di Jawa Timur (800 MW, batubara); Bali (200 MW, batubara); Sibolga di Sumatra Utara (200 MW, batubara); Amurang di Sulawesi Selatan (50 MW, batubara); dan Kalimantan Timur (120 MW. Gas Alam).

Pembangkit tenaga listrik ini akan menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar minyak yang lebih mahal dan akan mengurangi keseluruhan biaya pembangkit tenaga listrik.

### **3. Masalah dan Tantangan Utama Pembangunan**

115. Pemerintah memiliki komitmen mendesak untuk memenuhi meningkatnya permintaan listrik dan memperbaiki infrastruktur listrik yang rusak. Sektor kelistrikan Indonesia memiliki rasio pelistrikan terendah di Asia Tenggara, yang paling rendah labanya, sangat tergantung pada bahan bakar minyak dan kekurangan investor baru. Pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan rasio listrik hingga 95% pada tahun 2025. Untuk memenuhi kebutuhan instalasi baru yang diperkirakan 42 GW pada tahun 2010, pemerintah membutuhkan investasi baru sebesar \$19 - \$25 miliar pada tahun 2004-2012. Pemerintah mengharapkan agar sektor swasta berkontribusi \$2,6 – \$7,2 miliar, kebanyakan untuk pembangkit tenaga listrik. Perkiraan besarnya investasi untuk sektor listrik ini membutuhkan partisipasi aktif sektor swasta. Agar sektor swasta tertarik untuk berpartisipasi diperlukan iklim investasi sebaik mungkin.

116. Lebih dari 87% cadangan minyak yang dapat dieksploitasi telah jenuh. Sementara itu, 90% minyak Indonesia berasal dari ladang-ladang minyak yang rata-rata produksinya terus menurun. Oleh karena itu dibutuhkan investasi baru untuk eksplorasi, produksi dan pembangunan infrastruktur minyak dan gas. Sampai saat ini, perusahaan –perusahaan menunggu kejelasan implementasi Undang-Undang Minyak dan Gas (UU No 22/2001), dan pelaksanaan insentif bagi investasi di sektor ini.

117. Indonesia memiliki cadangan batubara yang berasal dari methane (CBM) yang diperkirakan mencapai 400 tcf dengan paling tidak 10%-nya dapat diekstrak secara ekonomis, namun tidak ada Proyek CBM yang beroperasi. Dewasa ini CBM berada dibawah hak hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, memperjelas lemahnya kepentingan perusahaan batubara untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang penting ini. Perlu disusun kerangka kebijakan dan peraturan CBM yang mempertimbangkan peran perusahaan batubara, peran pemerintah daerah sebagai pemberi izin pembangunan pertambangan. Selain itu perlu juga dikembangkan pedoman akuntansi untuk alokasi biaya pada CBM dan batubara secara tepat, bagi hasil antara perusahaan pelaksana, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

118. Di luar pulau-pulau besar di Indonesia, tidak tersedia jaringan listrik berskala kecil yang ekonomis. Padahal dalam wilayah yang kepadatan penduduknya rendah dan yang konsumsi rata-rata perkapitanya rendah, biaya pelayanannya cenderung lebih tinggi. Dalam keadaan seperti itu, penggunaan sumber energi yang dapat diperbarui dan dapat disentralisasikan menjadi alternatif yang menarik. Jenis sumber energi semacam itu contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air mini atau generator berbasis biomasa. Penggunaan sumber energi semacam ini juga sesuai dengan mekanisme pembangunan yang bersih (Clean Development Mechanism/CDM) yang telah ditetapkan di bawah Protokol Kyoto. CDM memberi dukungan besar pada penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien melalui akses ke sumber pendanaan tambahan. Oleh karena itu, selain mengembangkan sumber energi konvensional, Indonesia perlu mengembangkan energi yang dapat diperbarui (misalnya, udara, geothermal) dan sumber-sumber CBM.

### **4. Kerangka Kebijakan dan Rencana Pemerintah**

119. Pemerintah sudah membuat Cetak Biru Energi 2005-2025, yang dengan tepat mengenali skenario permasalahan saat ini. Permasalahan sektor energi saat ini adalah besarnya proporsi minyak dalam bauran energi, ketergantungan pada minyak impor, terbatasnya akses

masyarakat ke energi, tidak optimalnya operasi sektor energi karena subsidi energi, dan kurangnya infrastruktur yang memadai.

120. Cetak Biru Energi tersebut menetapkan target sektor yang mencakup pencapaian berikut ini:

- (i) Rasio pelistrikan mencapai 95% pada tahun 2025.
- (ii) Keamanan pasokan energi nasional melalui elastisitas energi kurang dari 1, bauran energi optimal pada tahun 2025. Termasuk dalam bauran energi optimal adalah pengurangan proporsi minyak hingga 26,2%, peningkatan proporsi gas alam hingga 30,6 %, dan peningkatan proporsi batubara hingga 32,7% pada tahun 2025.
- (iii) Infrastruktur yang kuat yang mencakup jaringan pipa minyak dan gas, kilang minyak dan terminal-terminal transit, terminal LNG, infrastruktur transportasi batubara dan jaringan transmisi listrik;
- (iv) Rasionalisasi harga energi; dan
- (v) Implementasi pengukuran efisiensi energi.

121. Rancangan undang-undang energi yang didasarkan pada cetak biru energi memfokuskan pada optimalisasi penggunaan energi melalui perencanaan yang tepat, penggunaan yang efisien, mengurangi ketergantungan penggunaan energi fosil, diversifikasi sumber energi untuk meraup keuntungan secara nasional. Rancangan undang-undang tersebut diharapkan disahkan menjelang akhir tahun 2006 atau awal tahun 2007. Strategi dan kebijakan energi Indonesia harus diarahkan untuk menggunakan sumber energi domestik secara optimal, meningkatkan nilai tambah sumber energi domestik namun dengan meminimalkan dampak lingkungan, memasok energi ke wilayah tertinggal, serta mengembangkan kapabilitas dan kapasitas nasional. Tujuan pengembangan kapabilitas dan kapasitas produksi adalah untuk mencapai kemandirian energi melalui peningkatan kapasitas produksi pasokan energi dalam negeri, optimalisasi produksi energi, dan penghematan sumber energi. Dari sisi penggunaan, akan menekankan pada peningkatan efisiensi penggunaan energi dan diversifikasi sumber energi. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan penetapan harga energi yang hati-hati, dengan pentargetan subsidi warga miskin secara efektif.

122. Pada setiap sambungan pelanggan perumahan di luar pulau Jawa, PLN menderita kerugian. Hal ini karena struktur tarif yang digunakan PLN berlaku umum di seluruh Indonesia. Padahal biaya pasokan listrik di luar pulau Jawa jauh lebih tinggi dibanding tarif yang berlaku.<sup>152</sup> Karena kategori konsumen semacam ini besar jumlahnya, ada keterbatasan untuk disubsidi-silang dari kategori pelanggan lain. Sebagai akibatnya, PLN menjalankan proyek pelistrikan di pedesaan dengan misi yang berseberangan sebagai BUMN yang mencari laba.<sup>153</sup> Implikasinya adalah bahwa target ambisius pemerintah untuk menyediakan pasokan listrik hingga 95% dari jumlah penduduk menjelang tahun 2025 akan sulit diwujudkan dengan pendekatan biasa<sup>154</sup>. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pelistrikan wilayah pedesaan berdasarkan model inovasi desentralisasi untuk design, keuangan, implementasi, dan pelaksanaan. Model pembangunan daerah, baik dalam bentuk kerja sama

<sup>152</sup> Sebagian besar wilayah luar-jaringan dipasok oleh pembangkit tenaga listrik diesel dengan biaya yang lebih besar dari Rp 2.000/kWh dan didominasi oleh pelanggan perumahan berskala kecil yang dikenai biaya pembayaran kurang dari Rp. 600/kWh.

<sup>153</sup> Peraturan Pemerintah no. 19/2003 mengenai BUMN.

<sup>154</sup> Rata-rata pertumbuhan tahunan pada sejumlah pelanggan PLN yang berkisar pada angka 11,1% yaitu selama 30 tahun ini sudah cukup mengesankan. Meskipun demikian, ada dua ragam pola pertumbuhan, yaitu 15,3% per tahun selama masa pra-krisis pada tahun 1994-1997 dan 6,4% setelah itu. Penurunan tajam pertumbuhan pasca-krisis menjadi pelengkap bagi keterbatasan investasi keuangan dan kewajiban PLN sebagai lembaga profit.

ataupun kemitraan antara BUMD dan penyedia jasa swasta, tampaknya menjadi pendekatan yang menjanjikan. Dewasa ini, pemerintah telah mendorong pembangunan dan penggunaan bahan bakar hayati dan energi yang dapat diperbarui.

## 5. Pengaturan Kelembagaan

123. Undang-undang Kelistrikan (20/2002) yang mendukung kebijakan penciptaan pasar listrik yang kompetitif dan pembentukan badan regulator independen telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2004. Ketentuan mengenai pasar listrik yang kompetitif ditetapkan sebagai tidak konstitusional oleh pengadilan. Untuk menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pencabutan undang-undang ini, sudah diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) 3/2005 yang mencakup sebagian besar ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang nomor 20/2002 dengan pengecualian mengenai ketetapan pasar listrik yang kompetitif dan ketidakterbatasan PLN. Di bawah undang-undang yang kembali diberlakukan No. 15/1985, PLN adalah satu-satunya pemegang lisensi penyedia listrik publik di Indonesia. Partisipasi sektor swasta diperbolehkan, tetapi terbatas pada pengadaan pembangkit tenaga listrik. Sebagai konsekuensi terhadap pembatalan undang-undang kelistrikan tahun 2002, diberlakukan pula keputusan menteri yang memungkinkan PLN untuk membeli listrik dari produsen swasta. Pemerintah dan Parlemen, dalam konsultasinya dengan para pemangku kepentingan, sekarang sedang mempersiapkan undang-undang kelistrikan yang baru. Rancangan undang-undang kelistrikan tersebut sekarang berada di DPR dan kemungkinan disahkan pada akhir tahun 2006.

124. Setelah melewati serangkaian kenaikan tarif listrik<sup>155</sup>, negosiasi kembali kontrak dengan IPP<sup>156</sup>, restrukturisasi utang, subsidi pemerintah, perbaikan efisiensi, PLN berhasil keluar dari belitan pengaruh krisis keuangan Asia. Meskipun demikian, pencabutan subsidi bahan bakar tahun 2005 berdampak sangat buruk terhadap kinerja keuangan PLN yang menggunakan minyak diesel untuk hampir 20% pembangkit tenaga listriknya. PLN sudah tidak dapat mengalihkan kenaikan drastis harga minyak domestik terbaru kepada pelanggannya. PLN memperkirakan bahwa tanpa kenaikan tarif listrik, subsidi seharusnya dinaikkan sampai hampir Rp 40 trilyun pada tahun 2006. Pemerintah bermaksud mengaitkan kenaikan tarif dengan perbaikan efisiensi PLN, seperti pengurangan kerugian transmisi dan distribusi dari 11.3% pada tahun 2004 hingga di bawah 10%.

125. Undang-undang Minyak dan Gas (22/2001) yang berlaku sejak tahun 2001 menyebabkan restrukturisasi fundamental pada struktur gas dan minyak. Undang-undang terbaru tersebut mengatakan bahwa pengaturan kegiatan hulu dan hilir dilakukan secara terpisah oleh badan pengatur milik negara dan ketentuan mengenai penggunaan gas alam domestik. Negara kekurangan infrastruktur untuk memanfaatkan gas alam bagi keperluan dalam negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan segera investasi untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

<sup>155</sup> Rata-rata tarif listrik naik hingga 29% pada bulan April 2000, 17% pada bulan Juli/Oktober 2001 dan sebesar 6% per kuartal selama tahun 2002-2003. Kenaikan ini menjadikan rata-rata tarif dari sekitar \$2,5 sen/kWh setelah krisis keuangan menjadi sekitar \$6,8 sen/kWh pada akhir tahun 2003, sebuah penyelesaian besar dan terbukti dengan keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai isu yang sensitif ini. Sejak itu, rata-rata tarif turun hingga \$6.2 sen/kWh disebabkan oleh depresiasi rupiah dan berubahnya struktur konsumsi.

<sup>156</sup> Negosiasi kembali merupakan pekerjaan yang rumit dan berlarut-larut dengan hasil akhir yang memuaskan. Diluar dari ke 27 kontrak IPP dengan total nilai 11.300 MW, 14 kontrak senilai 5690 MW diteruskan untuk dinegosiasi ulang oleh pemerintah dan BUMNnya, 6 kontrak senilai 4.490 MW dihentikan, 6 kontrak senilai 900 MW diambil Pemerintah dan BUMN dan hanya 1 kontrak senilai 220 MW yang berakhir dalam perselisihan hukum.

126. Masa transisi dari negara pengeksport minyak menjadi negara pengimpor minyak, dan tingginya harga minyak dunia memaksa pemerintah menaikkan harga minyak bumi hingga mencapai lebih dari 100% pada tahun 2005. Namun kenaikan ini dibarengi dengan pemberian subsidi tunai kepada keluarga miskin. Pemerintah juga mengumumkan kenaikan penggunaan domestik gas alam dalam negeri untuk melindungi ekonomi dari gejolak harga energi dunia. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan harga yang fleksibel untuk gas. Kebijakan harga tersebut harus dibentuk pedomannya dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti *opportunity cost* gas, nilai ekonomi kontrak bagi hasil, nilai ekonomi substitusi bahan bakar, nilai tambah ekonomi, (misalnya, gas untuk produksi urea), dan biaya distribusi melalui jaringan pipa gas. Meningkatnya penggunaan gas domestik akan membantu pengurangan bahan bakar cair dan subsidiya. Dapat dibangun dengan baik ladang gas kecil dan marjinal untuk memenuhi permintaan wilayah terisolasi.

127. Pemerintah memahami bahwa diperlukan reformasi kebijakan menyeluruh untuk memperbaiki iklim investasi, dengan cara, di antaranya, liberalisasi pasar yang memungkinkan terjadinya kompetisi dan masuknya investor baru, menjamin kepastian hukum dan peraturan, memperkuat mekanisme pengaturan, memperkenalkan model tarif berdasarkan biaya keseluruhan, membuat mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan persengketaan. Pemerintah sudah mengambil serangkaian langkah penting untuk memantapkan reformasi. Pada bulan Februari 2006, pemerintah memperkenalkan sebuah Paket Kebijakan Infrastruktur, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kementerian pada sektor itu, badan-badan pengawas, ADB, JBIC, dan World Bank.

128. Peran Komite Kementerian Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KPPI) telah diperkuat. Tugas KPPI adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan infrastruktur, mengkoordinasikan dan mengawasi pengimplementasian strategi dan kebijakan yang menghubungkan pihak kementerian dan pemerintah daerah, memformulasikan kebijakan PSO untuk bidang jasa, dan menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

129. Mengingat pentingnya partisipasi sektor swasta, baik secara individual maupun yang bermitra dengan sektor pemerintah, Unit PPP Pusat yang berada dibawah Sekretariat KPPI akan bertanggung jawab untuk memastikan konsistensi kebijakan, pengendalian mutu dan transparansi dengan membentuk standar dan prinsip yang harus dipatuhi dalam semua transaksi, dan dengan mengamati kepatuhan dalam pelaksanaannya. Karena diperlukan investasi besar-besaran untuk mengatasi keterbatasan modal, tanggung jawab penting unit PPP pusat adalah memprioritaskan proyek PPP berdasarkan dampak pembangunan proyek dan kesiapan pelaksanaannya. Pemerintah mulai membangun kerangka manajemen risiko untuk sektor infrastruktur sebagai instrumen untuk penilaian, penetapan harga, pengawasan, dan mengatur liabilitas yang kemungkinan muncul dari penjamin tertentu bagi proyek PPP menghadapi risiko yang berhubungan dengan kebijakan dan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaganya. Mengingat hubungannya dengan kondisi keuangan yang ada, keterbatasan fiskal, dan sistem manajemen utang, maka Departemen Keuangan memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengimplementasian kerangka tersebut.

130. Indonesia harus mengatasi berbagai persoalan untuk memudahkan pelaksanaan proyek dan program. Hal ini membutuhkan pedoman formulasi dan implementasi. Isu penting yang harus diselesaikan adalah pembagian sumber daya antara pemerintah propinsi dengan pemerintah pusat, pemenuhan dana yang memadai untuk memastikan keberlangsungan proyek, serta keselamatan lingkungan dan sosial. Perundang-undangan harus secara jelas dan

transparan memaparkan batas kewenangan antara lembaga yang berbeda (antara pemerintah dan swasta), pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

## **6. Peran Mitra Pembangunan**

131. Bank Dunia, ADB, dan JBIC adalah lembaga pembangunan multilateral/bilateral utama yang aktif di Indonesia. Secara historis ketiganya telah memberi dukungan yang besar pada sektor energi. Bersamaan dengan terpaan krisis keuangan Asia, permintaan dan daya serap pemerintah menurun. Sejak percepatan pemulihan ekonomi maka sejak tahun 2000 dan sesudahnya lembaga-lembaga ini menemukan kembali posisi pentingnya. Sejak tahun 1986 JBIC telah menyelesaikan lebih dari 130 proyek sektor energi di Indonesia dengan nilai total 800 juta yen. Sektor energi menerima 20,9% dari total pinjaman JBIC kepada Indonesia.

## **7. Keberhasilan dan Pelajaran Yang Diperoleh ADB dari Sektor Energi**

132. ADB telah memberikan 29 pinjaman dengan nilai total sebesar \$3200 juta dan 36 proyek bantuan teknis dengan nilai setara dengan \$14 juta. Pinjaman tersebut terutama untuk sektor listrik dan hanya satu proyek subsektor gas. Penilaian yang dilakukan oleh OED berdasarkan PCR dan PPAR untuk suatu sektor, menunjukkan bahwa ADB memiliki keuntungan komparatif dalam menyediakan pinjaman proyek sektor energi, transportasi, komunikasi, infrastruktur sosial, dan keuangan. Oleh karena itu, ADB harus melanjutkan operasi pemberian bantuannya dalam porsi yang substansial di Indonesia untuk membantu sektor-sektor tersebut. Sejak krisis, dua pinjaman yang disetujui adalah pinjaman untuk proyek-proyek sektor yang sejalan dengan strategi dan kebijakan reformasi, ditambah beberapa subproyek lain. Strategi bidang energi ADB saat ini difokuskan pada reformasi kebijakan, pendanaan proyek infrastruktur yang kritis melalui operasi sektor pemerintah dan swasta, dan pembangunan kapasitas.

133. Selama krisis keuangan, ADB terus membantu pemerintah dengan cara merevisi lingkup kerja proyek yang sedang dilaksanakan agar sejalan dengan kebutuhan dan dengan mengadopsi pendekatan yang fleksibel. Selama krisis (1998-2000), program pinjaman ADB mencakup dua proyek di sektor energi. Kedua proyek tersebut, yaitu pinjaman Program untuk Restrukturisasi Sektor Pembangkit Listrik (Power Restructuring Program/PSRP) (pinjaman 1673) dan pinjaman bantuan teknis (TA) untuk Pembangunan Kapasitas untuk Pendirian Pelistrikan yang Kompetitif (Capacity Building for Establishment of Competitive Electricity) (Pinjaman 1674) merupakan respon cepat dan komprehensif terhadap krisis keuangan yang menimpa Indonesia pada tahun 1997. Sebuah kemunduran besar pada reformasi sektor terjadi ketika Undang-undang Kelistrikan yang menjadi dasar pinjaman-pinjaman ini, dibatalkan pada bulan Desember 2004.

134. Di subsektor tenaga listrik, dengan beberapa pengecualian, proyek pinjaman yang telah selesai berhasil mencapai hasil dan sasaran yang diharapkan, termasuk penambahan kapasitas untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan, penghilangan kendala sistem transmisi, peningkatan efisiensi dan keandalan sistem, peningkatan penggunaan sumber energi lokal, dan menghasilkan pembangunan sosial ekonomi. Bantuan teknis memberi rekomendasi bermanfaat untuk pemerintah dan PLN dalam penguatan kelembagaan, rasionalisasi harga, dan restrukturisasi sektor. Pada tingkat sektor, pinjaman ini berhasil meningkatkan efisiensi operasi keseluruhan PLN, bukan hanya efisiensi masing-masing proyek. Bantuan teknis dan perjanjian yang mengiringinya ini ampuh untuk membuat PLN mampu meminimalkan biaya pasokan, mengurangi kerugian sistem, meningkatkan gabungan efisiensi dan membuat usulan-tarif yang baik. Khusus bantuan teknis dalam hal usulan tarif, gagal mendapatkan persetujuan pemerintah

dan dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi PLN. Proyek transmisi juga dianggap kurang memuaskan karena ada beberapa bagian yang tidak selesai.

135. ADB telah menyediakan bantuan bagi sektor energi untuk mengimplementasikan transmisi tenaga listrik dan proyek pembangkit tenaga listrik, pengembangan sumber energi yang dapat diperbarui, pembuatan kebijakan, dan pembangunan sistem transmisi gas. Sektor swasta ADB telah membiayai fasilitas pencairan gas alam. Meskipun sektor swasta telah memainkan peran dalam pembiayaan infrastruktur, investasi sektor pemerintah tetap akan dibutuhkan dalam bidang-bidang yang secara sosial relevan tetapi tidak menarik bagi sektor swasta, untuk menciptakan pasar dan mendorong pembangunan sektor swasta.

## **8. Operasi dan Komitmen ADB Yang Sedang Berjalan**

136. Setelah krisis (2001-2005), hanya ada dua proyek ADB di sektor energi, dengan total pinjaman proyek senilai \$301 juta. Kedua proyek sektor tenaga listrik itu adalah Pembangunan Sektor Energi yang Dapat Diperbaharui (Renewable Energy Development Sector) (pinjaman 1982) dan Sektor Perbaikan Transmisi Tenaga Listrik (Power Transmission Improvement Sector) (pinjaman 1983). Proyek Pembangunan Sektor Energi yang Dapat Diperbaharui terdiri dari beberapa subproyek inti dan non-inti yang akan menambahkan pembangkit listrik berkapasitas 82 MW yang menghasilkan 480 GWh energi pertahun. Pelaksanaan subproyek tersebut membantu menyeimbangkan antara pasokan dan permintaan tenaga listrik. Subproyek ini juga akan meningkatkan pasokan listrik untuk konsumen yang ada, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Proyek ini akan memperluas penggunaan energi yang dapat diperbarui dan dengan demikian mengurangi emisi gas rumah kaca.

137. Proyek Sektor Perbaikan Transmisi Tenaga Listrik terdiri dari berbagai subproyek inti dan noninti yang akan menambah 360 mega volt ampere kapasitas transformasi untuk menghilangkan penyumbatan (*bottleneck*) kapasitas substasiun di Jawa-Bali. Proyek ini juga akan menambahkan kabel transmisi sepanjang 276 km berkekuatan 150 kilovolt (KV) untuk menghubungkan jaringan utama listrik di luar pulau Jawa-Bali. Penyumbatan (*bottleneck*) transmisi di Jawa harus dihilangkan. Beberapa jaringan listrik kecil di luar pulau harus dihubungkan satu sama lain untuk menjaga kualitas pasokan dan meningkatkan efisiensi.

138. Meskipun penandatanganan pinjaman dilaksanakan pada tanggal 10 November 2003, namun pinjaman untuk kedua proyek ini berlaku pada bulan Oktober 2004 hanya karena keterlambatan dalam pengajuan perjanjian tambahan (*subsidiary loan agreement/SLA*) kepada Departemen Keuangan dan opini hukum dari Departemen Kehakiman dan penasehat PLN mengenai perjanjian ini. Tanggal penutupan pinjaman ini jatuh pada bulan September 2008. Namun karena penundaan penandatanganan persetujuan, masa berlaku pinjaman ini akan diperpanjang.

139. Operasi sektor swasta dalam sektor energi di Indonesia telah diperbarui dengan disetujuinya proyek pinjaman sebesar \$350 juta untuk proyek Tangguh LNG pada bulan Desember 2005. Proyek pinjaman kepada Tangguh LNG merupakan PSOD pertama ADB di Indonesia sejak tahun 1994 dan juga merupakan pinjaman *single tranche* terbesar oleh PSOD sampai saat ini. Pinjaman sektor swasta lainnya diberikan kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) untuk pembangunan jalur pipa gas dari Sumatra Selatan hingga Jawa Barat sudah disetujui pada bulan Agustus 2006. Ini termasuk pinjaman langsung senilai \$75 juta dan \$125 juta di bawah skema pendanaan pelengkap ADB.

140. Saat ini terdapat 5 proyek bantuan teknis yang sedang berjalan yang mencakup pembangunan jaringan listrik daerah di luar jaringan utama Jawa-Bali, perbaikan akses keluarga miskin ke jaringan listrik utama, penggunaan minyak sawit bekas untuk menghasilkan listrik khususnya di wilayah terpencil, pengembangan proyek kemitraan pemerintah-swasta untuk transportasi gas, pengembangan kapasitas lembaga-lembaga yang relevan untuk memproses proyek CDM.

### **9. Usulan Peran ADB Dalam Sektor/Tema**

141. Strategi ADB untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan sektor energi akan menggunakan instrumen pinjaman sektor pemerintah dan swasta dan mekanisme yang diperkenalkan dibawah prakarsa efisiensi inovasi. Bidang-bidang berikut ini akan menjadi fokus operasi ADB:

- (i) pinjaman berbasis-kebijakan untuk infrastruktur berdasarkan agenda reformasi pemerintah;
- (ii) dukungan penggunaan cadangan bahan bakar domestik yang lebih bersih (gas alam, batubara) dan sumber energi yang bisa diperbarui (*geothermal*, biomasa, cahaya matahari, angin, pembangkit listrik tenaga air kecil);
- (iii) kemitraan pemerintah-swasta dalam proyek-proyek yang memerlukan kepercayaan dan mekanisme berbagi risiko;
- (iv) bantuan untuk infrastruktur transportasi gas alam;
- (v) dukungan proyek pembangkit tenaga listrik termasuk proyek IPP;
- (vi) jalur transmisi untuk meningkatkan keandalan sistem, efisiensi dan untuk menghubungkan pusat-pusat beban yang terisolasi ke jaringan;
- (vii) Peningkatan efisiensi dalam sistem kelistrikan;
- (viii) pembangunan infrastruktur penyimpanan minyak dan transportasi yang efisien;
- (ix) operasi sektor swasta di sektor hulu;
- (x) mempromosikan kerja sama energi regional untuk mengoptimalkan ketersediaan sumber daya; dan
- (xi) koordinasi erat dengan lembaga pemberi pinjaman besar lainnya untuk memaksimalkan dampak pembangunan dari bantuan.

### **10. Usulan Hasil Sektor Yang Didukung ADB**

142. Sasaran utama pemerintah untuk sektor energi adalah rasionalisasi harga energi, pengembangan sumber energi baru yang dapat diperbarui, mandiri dalam bidang energi untuk mengamankan pasokan dan mengurangi gejolak harga, peningkatan efisiensi pembangunan sektor dan infrastruktur energi domestik, dan peningkatan akses mendapatkan energi secara keseluruhan. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan partisipasi aktif sektor swasta. Untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta perlu dikembangkan perundang-undangan yang tepat, berikut peraturan pelaksanaannya. ADB mendukung reformasi dan proses restrukturisasi ini melalui usulan Infrastruktur Reform Cluster Program. ADB juga merencanakan satu pinjaman untuk memperbaiki efisiensi distribusi tenaga listrik dan peningkatan efisiensi melalui prakarsa manajemen sisi permintaan. Proyek potensial lainnya termasuk pembangunan saluran pipa gas, penambangan energi yang dapat diperbarui dan pembangkit listrik tenaga batubara dengan partisipasi pemerintah dan swasta.

### **11. Kaitan Hasil CSP Keseluruhan dengan Sektor/Tematik Lainnya**

143. Sasaran bantuan ADB sepanjang tahun 2006-2009 adalah mendukung kebijakan dan lingkungan usaha untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, efisien, dan merata.

Pelayanan energi merupakan komponen penting bagi pembangunan ekonomi, pencipta lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan sumber daya manusia. Intervensi sektor energi akan berkontribusi pada hal ini dengan cara menyediakan dan meningkatkan infrastruktur energi, termasuk bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan pedesaan, dan penggunaan sumber daya alam secara efektif.

## 12. Peluang Untuk Menyelesaikan Masalah Lingkungan

144. Sektor ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam menyelesaikan masalah lingkungan lokal maupun global. Usulan Undang-undang Energi menekankan pada pengembangan sumber energi yang dapat diperbarui dan peningkatan efisiensi pasokan dan penggunaan energi. Negara dapat mengakses instrumen keuangan internasional seperti mekanisme pembangunan yang bersih dan bantuan dana lainnya yang mempromosikan energi bersih. Disamping mendapatkan akses ke lembaga bantuan internasional, proyek energi bersih juga membawa keuntungan ganda manfaat lingkungan lokal dan akses ke teknologi maju untuk pembangunan berkelanjutan. ADB dapat menyediakan dukungan melalui Carbon Market Initiative, the Asia Pacific Carbon Fund (APFC) dan the Energy Efficiency Initiative.

## 13. Usulan Aktivitas ADB

145. Sepanjang tahun 2006-2009, ADB berencana menyediakan dana untuk enam proyek yang relevan dengan sektor energi dengan nilai total sekitar \$1450 juta. Selama periode yang sama, ADB juga akan menyediakan dana untuk tiga proyek TA dengan total nilai \$4.5 juta.

**Tabel A4. 9: Kerangka Hasil Peta Jalan Sektor Energi**

Arah Pembangunan Jangka Menengah Sektor Energi		Hasil CSP		
Hasil sektor untuk negara <sup>157</sup>	Peluang dan kendala utama	Hasil CSP dan Indikator Hasil sektor	Indikator Kemajuan	Intervensi
Peningkatan dan efisiensi infrastruktur energi	<p>Peluang: Sumber energi lokal yang besar</p> <p>Keterbatasan: Tidak memadainya investasi dan rendahnya partisipasi sektor swasta</p> <p>Kendala: Kejelasan undang-undang dan aturan implementasi</p>	<p>Keberlangsungan Pertumbuhan yang tinggi dan wajar mengarah pada pengentasan kemiskinan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan infrastruktur energi</li> <li>- Mandiri di bidang Energi dan peningkatan akses ke energi.</li> <li>- Perbaikan kerangka peraturan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan mutu dan ketersediaan energi</li> <li>- Investasi yang lebih besar dari sektor swasta di sektor energi</li> <li>- Meningkatnya rasio pelistrikan</li> <li>- Mengurangi ketergantungan pada impor energi.</li> </ul>	<p>Program Restrukturisasi Infrastruktur</p> <p>Proyek Peningkatan efisiensi energi</p> <p>Transportasi Gas melalui kemitraan pemerintah-swasta.</p> <p>Pembangunan pembangkit listrik tenaga air.</p> <p>Pembangunan sumber energi alternatif</p> <p>Pembangunan transmisi dan distribusi tenaga listrik</p>

<sup>157</sup> Hanya hasil yang relevan dengan peta jalan ADB dan CSP yang dimasukkan dalam kerangka hasil ini. Sumber: Asian Development Bank.

## F. Sektor Keuangan

### 1. Gambaran Singkat Sektor Keuangan

146. Sektor keuangan telah mengalami restrukturisasi dan reformasi sejak krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Sektor perbankan telah dikonsolidasikan sehingga jumlahnya menjadi separuhnya. Bank-bank milik negara yang dominan telah direkapitalisasi dan diperkuat. Rasio *nonperforming loan* (NPL) telah berkurang secara substansial hingga 3,4% di bank-bank swasta dan 15,1% di bank-bank pemerintah pada bulan September 2005. Bank-bank milik pemerintah tidak bisa mendapat *haircut* atau mendiskon penjualan NPL mereka sehingga mereka memiliki resolusi NPL yang terbatas. Sektor perbankan tetap mendominasi sistem keuangan dengan hampir mencapai 80% dari total aset. Sektor keuangan nonbank, meskipun kecil, tetap tumbuh. Pemerintah secara aktif mendukung pertumbuhan lembaga keuangan non bank (*nonbank financial institution/NBFI*) untuk mendiversifikasi sektor keuangan dan meningkatkan mobilisasi dan intermediasi.

147. Pasar saham di Indonesia termasuk kecil dari segi kapitalisasi terhadap PDB yaitu hanya sekitar 30% dibandingkan dengan 70% di Thailand dan 150% di Malaysia. Meskipun demikian, selama lima tahun terakhir pasar saham telah mengalami *booming*. Meskipun terdapat 355 perusahaan yang menjual sahamnya di bursa, perdagangan terutama dilakukan pada saham dari 30-40 perusahaan, yang kebanyakan merupakan saham yang *liquid*. Salah satu sebab rendahnya likuiditas adalah kecilnya *free float* dari saham yang tercatat. Lembaga asing memainkan peran lebih dari setengah volume perdagangan, dan diperkirakan telah terjadi 90.000 perdagangan ritel di Indonesia. Pada bulan Maret 2006 penggabungan bursa efek Jakarta dan Surabaya diumumkan.

148. Pasar obligasi didominasi oleh obligasi rekapitalisasi sebesar Rp. 309 triliun untuk bank milik pemerintah. Obligasi pemerintah yang belum dilunasi berjumlah 19% dari PDB pada akhir tahun 2005. Pasar sekunder mulai tumbuh sejak bank-bank menjual dan membeli dana bantuan mutual obligasi rekapitalisasi mengikuti penghapusan pembatasan perdagangan. Umumnya perdagangan terjadi *over-the-counter* dan sedikit terjadi di Bursa Efek Surabaya. Perdagangan obligasi tidak banyak terjadi disebabkan oleh tidak adanya patokan harga dan kurangnya transparansi. Pada tahun 2002 mulai tumbuh penerbitan obligasi korporasi tetapi masih kecil dengan obligasi *outstanding* sebesar 2% dari PDB pada penghujung tahun 2005. Reksa dana mulai tumbuh pada tahun 2000 ketika reksa dana diperbolehkan untuk membeli lebih banyak obligasi rekapitalisasi, dan bank-bank mulai mempromosikan reksa dana kepada depositor mereka. Nilai aset bersih dari reksa dana meningkat secara drastis hingga akhir tahun 2004 meskipun ada penjualan yang besar pada tahun 2003 sebagai '*sticker accounting*' bagi bank-bank yang mungkin kekurangan reksa dana dan menandai diperkenalkannya persyaratan pasar. Pada tahun 2004 reksa dana tumbuh lagi tetapi kemudian turun pada tahun 2005 karena naiknya suku bunga. Pada tahun 2004 dikeluarkan peraturan baru tetapi peraturan ini gagal karena yang dibutuhkan adalah peraturan yang tepat untuk industri tersebut.

149. Industri asuransi masih terbilang kecil dari segi jumlah premi, yaitu sekitar 2% dari PDB. Total aset industri asuransi sebesar 3% dari PDB. Pada bulan September 2005 terdapat 51 perusahaan asuransi jiwa, 91 asuransi non-jiwa dan 4 perusahaan reasuransi. Selain itu, terdapat dua perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan jaminan sosial dan 3 perusahaan bergerak dalam pengelolaan asuransi pegawai negeri dan TNI. Industri asuransi sebagian besar terpusat pada lima perusahaan asuransi non-jiwa, yang menguasai 51% aset dan lima besar perusahaan asuransi jiwa yang menguasai 5% aset. Industri ini tidak sehat

secara keuangan dengan lima perusahaan non-jiwa yang tidak mampu bayar (*insolvent*) dan lima dari perusahaan yang tidak mampu bayar tersebut masih beroperasi. Bumiputera sendiri diperkirakan memiliki guncangan kesulitan dalam membayar utang (*solvency*) senilai \$300 juta pada tahun 2003.

150. Perusahaan asuransi dewasa ini menginvestasikan sekitar 25% asetnya dalam deposito jangka pendek. Industri dana pensiun juga kecil dengan aset setara 4,5% dari PDB. Aset yang dimiliki perusahaan negara yang mengelola dana pensiun pegawai negeri (Taspen), TNI (Asabri), dan pegawai swasta (Jamsostek) sama besarnya. Undang-undang terbaru jaminan sosial tahun 2004 membuka jalan bagi reformasi dana pensiun, meskipun implementasinya agak tersendat. Perusahaan pengelola dana pensiun saat ini menyimpan sekitar 50% dananya dalam deposito jangka pendek.

## **2. Keterlibatan ADB Sejak Krisis Keuangan dan Pelajaran yang Dipetik**

151. Pekerjaan ADB di sektor keuangan bermula dari krisis keuangan yang melanda Indonesia. Bantuan cepat yang diberikan ADB setelah terjadinya krisis merupakan bagian dari paket multi-donor untuk membantu Indonesia merestrukturisasi sektor perbankan, memperbaiki keuangan dan alokasi sumber daya sektor publik dengan memperkuat tata kelola, meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi keuangan, serta memperkuat kerangka hukum dan peraturan sektor keuangan. Setelah negara multi donor mengawali paket bantuannya, ADB bergerak ke depan dengan membantu pembangunan sektor keuangan non-bank (nonbank financial services/NBFS), dan menghentikan keterlibatannya di sektor perbankan.

152. Setelah respon cepat terhadap krisis, perhatian beralih ke isu jangka menengah di sektor keuangan dan korporasi dengan fokus pada penanganan kelemahan pemerintahan yang terlihat selama krisis keuangan. Bidang utama bantuan tersebut mencakup:

- (i) melanjutkan bantuan untuk membangun NBFS untuk mendiversifikasi sumber keuangan. Bantuan teknis dan program-program yang fokus pada penguatan peraturan dan pengawasan terhadap NBFIs dan membantu pembentukan otoritas untuk mengkonsolidasikan sektor keuangan;
- (ii) memperkuat keuangan pemerintahan termasuk kebijakan pemberantasan pencucian uang dan prosedur-prosedurnya;
- (iii) penilaian skema jaminan sosial sesuai tuntutan reformasi dengan mengaudit skema pensiun dan reformasi pada sektor asuransi;
- (iv) membantu reformasi perusahaan milik negara yang mencakup program tata kelola perusahaan, penjualan pemerintah, restrukturisasi, menciptakan praktek perburuhan yang adil dan transparan, dan memperkuat dan menegakan pelaksanaan pedoman pengadaan BUMN; dan
- (v) membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memfokuskan pada daya saing industri dan pengembangan ekspor.

153. Selain itu, manajemen fiskal dan tata kelola juga dibantu melalui

- (i) program reformasi audit negara untuk memperkuat Dewan Audit Negara (State Audit Board); dan
- (ii) program pendanaan pemerintah daerah untuk memperkuat kerangka kebijakan dan hukum untuk desentralisasi dan mengembangkan kapasitas pemerintah daerah.

154. Pelajaran yang bisa adalah perlunya kerja sama erat dengan pemerintah dalam reformasi, pemberian bantuan teknis untuk membantu persiapan dan pelaksanaan aspek-aspek penting reformasi.

### **3. Isu dan Tantangan Utama Pembangunan**

#### **a. Tidak Memadainya Kerangka Peraturan dan Pengawasan**

155. Sejak krisis, banyak upaya telah dilakukan untuk memperkuat peraturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk badan pengatur untuk sektor keuangan yang terpadu, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prakarsa awal dimulai tahun 2003, tetapi kemudian ditunda hingga tahun 2010. Pada bulan November 2004, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan direktorat dana pensiun dan asuransi di bawah Departemen Keuangan dan menugaskan institusi pengawas pasar modal, Bapepam, untuk membentuk badan pengatur sektor keuangan non-bank. Keputusan presiden untuk melaksanakan penggabungan tersebut ditandatangani pada bulan November 2005. Keputusan ini diikuti dengan keputusan menteri untuk menetapkan struktur organisasi dan penyusunan staf badan yang disebut Bapepam LK. Bapepam LK tetap berada di bawah Departemen Keuangan dan tidak memiliki kebebasan seperti yang dimiliki oleh BI. Untuk mendapatkan kebebasan dan fleksibilitas dalam struktur organisasi, staf, dan gaji (misalnya, keluar dari sistem kepegawaian negeri) dan menjadi setara dengan BI, harus dilakukan perubahan dasar hukum. Rekomendasi konsultan hukum untuk membawa rancangan Undang-Undang OJK ke DPR untuk disahkan, mengindikasikan bahwa Bapepam LK adalah cikal bakal bagi OJK, dengan wewenang sebagai penyelia perbankan kemudian. Tampaknya pemerintah akan menerbitkan peraturan untuk menempatkan Bapepam LK setara dengan lembaga asuransi deposito LPS, dengan memberi sejumlah kebebasan.

156. Peraturan dan pengawasan yang diterapkan pada sektor nonbank secara bertahap diperkuat dan disetarakan dengan standar internasional. Meskipun demikian masih diperlukan pekerjaan tambahan untuk memenuhi prinsip dasar IOSCO untuk sekuritas, prinsip inti IAIS untuk asuransi, dan pedoman OECD untuk dana pensiun. Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Asuransi dan Undang-undang Dana Pensiun sedang diamandemen. Masih dibutuhkan beberapa ketentuan yang memungkinkan perubahan beberapa peraturan penting agar sesuai dengan standar internasional. Selain itu, meskipun modal berbasis-risiko tersedia bagi perusahaan asuransi, dana tersebut tidak dimanfaatkan. Ketentuan mengenai tingkat modal minimum tidak diberlakukan secara tegas, yang menyebabkan terfragmentasinya industri ini menjadi kelompok perusahaan kecil-kecil dengan modal dasar yang tidak memadai, dan perusahaan besar yang secara teknis tidak *solven*.

157. Lingkungan hukum dan peraturan untuk reksa dana juga tidak memadai. Undang-undang yang diberlakukan merupakan campuran dari peraturan di Amerika untuk dana korporasi (yang tidak ada di Indonesia) dengan beberapa pedoman dana kontrak, yang menjadi dasar hukum semua reksa dana di Indonesia. Oleh karena itu, bagian dari Undang-Undang Pasar Modal yang berkaitan dengan reksa dana dan peraturan terkait perlu diubah. Rancangan amandemen hukum dan peraturan sudah disiapkan oleh konsultan di bawah TA 3850-INO<sup>158</sup> dan akan diselesaikan pada bulan Mei 2006. Sangat penting untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan untuk mengembalikan kepercayaan investor pada reksa dana dan untuk mengembangkan industri reksa dana.

---

<sup>158</sup> ADB 2002. Technical Assistance to Republic of Indonesia to Support for Non Bank Financial Governance Program. Manila, TA 3850, disetujui pada tanggal 18 Maret 2002, dengan jumlah \$1,5 juta.

158. BI sekarang telah sepenuhnya mengikuti Basel Core Principle for Banking Supervision dan telah mempunyai rencana tahapan implementasi kerangka kerja modal untuk perbankan, yang disebut Basel II. BI juga telah memperkuat kapasitas pengawasannya secara signifikan. Agar BI lebih siap menangani dan mengelola krisis sistemik potensial, maka dibentuklah jaringan pengaman keuangan. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk pada bulan September 2005 untuk memperkenalkan skema jaminan simpanan terbatas. Sebuah ketentuan bagi peminjam fasilitas *last resort* di BI akan diberlakukan. Forum Sektor Keuangan, yang terdiri dari perwakilan BI, LPS dan DepKeu, adalah forum antar lembaga yang bertugas berbagi informasi antara badan pengatur dan mengelola krisis sistemik.

159. Penegakan peraturan dalam sektor keuangan tidak memadai. Khususnya bagi Bapepam LK, konsultan di bawah TA 3850 sudah merekomendasikan penyederhanaan prosedur investigasi dan pembentukan organisasi untuk memastikan aliran informasi yang lebih baik sehingga sanksi administrasi dapat diterapkan lebih mudah. Untuk menangani tersangka pelaku kriminal, perlu diperbaiki koordinasi dan kerja sama dengan pengadilan negeri. Agar perubahan ini berjalan, diperlukan beberapa amandemen Undang-undang Pasar Modal.

160. Jumlah lembaga keuangan mikro (micro finance institution/MFI) di pedesaan diperkirakan sekitar 48.000. Meskipun disebut 'lembaga', sebagian besar lembaga tersebut beroperasi tanpa izin dan tidak diatur. Departemen Koperasi dan UKM mengatur koperasi simpan pinjam, tetapi dalam prakteknya, pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Lembaga keuangan mikro informal dan tidak diatur tersebut sebagian besar bersaing dengan BPR. BPR mendapat izin dari BI dan beroperasi secara komersial. Lembaga keuangan mikro yang tidak diatur tersebut sering menjalankan program pinjaman bersubsidi yang didukung oleh berbagai badan pemerintah dan pemberi sumbangan. Sebagai akibatnya terjadi distorsi pasar keuangan mikro dan pasar keuangan pedesaan, yang merintang bank dan BPR untuk masuk ke pasar lapisan bawah. Saran untuk menyediakan beberapa jenis skema peraturan dan pengawasan yang mencakup lembaga keuangan mikro yang tidak diatur dan tidak terawasi tersebut akan menghadapi dua penghalang. Pertama, secara agregat lembaga keuangan mikro tidak menghadapi ancaman sistemik keuangan. Dari perspektif risiko, sulit untuk melakukan intervensi besar dan intervensi berbiaya besar. Kedua, tidak ada lembaga swasta dan pemerintah yang memiliki kapasitas atau kepentingan untuk meregulasi dan mengawasi lembaga keuangan mikro. Meskipun demikian, lembaga keuangan mikro tetap penting karena mampu melayani lebih banyak orang dibanding lembaga keuangan formal.

161. Kerangka hukum yang berkaitan dengan insolvensi (ketidakmampuan membayar utang) tidak memadai. Selain itu, kapasitas lembaga peradilan menyelesaikan kasus di sektor keuangan masih lemah, yang menghambat penyelesaian aset-aset yang macet. Dilaporkan BPPN kalah dalam 90% kasus yang ditangani di pengadilan. Masalah utama penegakan hukum yang terkait dengan insolvensi yang berhasil diidentifikasi adalah kekurangan dana pengadilan, tidak memadainya kapasitas pengadilan, dan terbatasnya pengetahuan mengenai sektor keuangan, serta kurangnya transparansi kasus dan lemahnya tuntutan pengadilan.

#### **b. Tata Kelola Pemerintahan dan Transparansi**

162. Tata kelola korporasi belum memenuhi prinsip-prinsip OECD tetapi secara bertahap diperbaiki. ADB membantu membentuk aturan tata kelola korporasi perusahaan milik negara, dan persyaratan *listing* bagi Bursa Efek Jakarta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh CLSA, tata kelola korporasi semakin kuat, meskipun mengalami stagnasi pada tahun 2005. Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank milik pemerintah telah menjadikan isu tata kelola sebagai

bukti dalam berbagai skandal. Pengawasan internal dan eksternal terhadap bank-bank milik pemerintah tidak jelas, baik dalam pengaturan pelaporan dari dewan komisaris kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, maupun bagaimana kementerian ini melakukan pengawasan kepemilikan terhadap bank-bank milik pemerintah tersebut. Auditing internal dan eksternal tampak tidak memadai. Di sektor non-bank persyaratan keterbukaan (disclosure) juga tidak memadai dan perlu diperkuat. Penggunaan sepenuhnya International Accounting Standard (IAS), dan khususnya IAS 39 mengenai ketentuan pasar-ke-pasar, dan International Reporting Standar, ditargetkan pada tahun 2008. Penerapan standar internasional akan membantu memperbaiki tata kelola dan transparansi, sepanjang lembaga-lembaga keuangan, akuntan, dan regulator memiliki kapasitas memadai untuk menerapkan standar baru tersebut.

### **c. Pasar Modal**

163. Selain isu peraturan, pengawasan, dan penegakan hukum, isu penting lain dalam bidang pasar modal adalah pengembangan pasar obligasi. Penerbitan surat berharga pemerintah dapat ditingkatkan dengan membuat kebijakan yang jelas mengenai penerbitan surat utang, pengembangan sistem *dealer* yang tepat, dan pembentukan infrastruktur untuk mendukung pasar primer dan sekunder surat utang pemerintah. Perlu dikembangkan pasar sekunder untuk memastikan transparansi dan efisiensi penetapan harga secara elektronik. Saat ini sudah dibuat rencana tindakan pengembangan mekanisme perdagangan dan infrastruktur pasar agar proses transaksi lebih cepat. Meskipun pasar obligasi perusahaan kecil mulai tumbuh, penetapan harga mengalami kesulitan tanpa patokan yang jelas. Tetapi penerbitan obligasi pemerintah yang sudah diperbaiki dapat mengatasi masalah ini. Dengan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur jangka panjang, misalnya, sangat penting untuk meningkatkan fungsi pasar obligasi. Perusahaan dana pensiun dan perusahaan asuransi merupakan investor potensial surat utang jangka panjang.

### **d. Lembaga Keuangan Nonbank**

164. Terdapat kelemahan dalam industri asuransi dan dana pensiun. Meskipun perusahaan asuransi jumlahnya banyak, sektor itu terfragmentasi, di mana aset terkonsentrasi pada lima perusahaan asuransi terbesar, baik asuransi jiwa maupun asuransi nonjiwa. Selain itu banyak perusahaan asuransi kecil yang modalnya tidak memadai dan perusahaan asuransi besar yang tidak solven (jumlah aset lebih kecil dibanding kewajibannya). Sektor ini memiliki potensi untuk tumbuh karena penetrasi asuransi masih rendah. Meskipun demikian, sektor ini perlu dikonsolidasi untuk menyelesaikan masalah perusahaan yang tidak *solvent* dan menerapkan sepenuhnya ketentuan batas minimum modal bagi semua perusahaan. Selain itu, pedoman investasi perlu direvisi untuk mendorong lebih banyak lagi investasi dalam surat berharga yang bernilai tinggi. Untuk industri dana pensiun, perlu penguatan peraturan pengelola dana pensiun swasta, penghilangan kelemahan pengelola dana pensiun milik pemerintah, serta meninjau kembali pedoman investasi bagi pengelola dana pensiun.

### **e. Keuangan Mikro dan UKM**

165. Pertumbuhan usaha mikro dan usaha kecil dan menengah (UKM) terganggu oleh beberapa faktor. UKM sangat dipengaruhi oleh registrasi dan perpajakan (sebagai akibat dari desentralisasi) yang menyebabkan UKM tetap berada dalam sektor informal. Dengan tetap berada dalam sektor informal, akses mereka ke sumber keuangan formal, seperti bank-bank komersial, akan terhalang. Dengan kondisi semacam itu, bank-bank komersial lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya dalam obligasi restrukturisasi dan sekuritas (surat utang) pemerintah daripada meminjamkan ke UKM yang biaya transaksinya lebih besar. Walaupun

sebenarnya, UKM merupakan pasar kredit besar yang belum banyak disentuh, dan berpotensi baik dalam jangka panjang. Selain itu, di Indonesia belum ada biro informasi kredit yang komprehensif yang dapat menyimpan riwayat kredit usaha mikro dan UKM. Pada tahun 2006 BI akan membangun biro informasi kredit. Sistem pendaftaran agunan (jaminan) akan mempermudah akses UKM ke sumber dana. Terdapat kelemahan nyata dalam peraturan untuk transaksi yang aman menghalangi usaha mikro dan UKM. Tanah di wilayah pedesaan dinilai rendah, hal ini menghalangi UKM untuk mendapatkan pinjaman berbasis jaminan. Usaha mikro dan UKM sering menyerahkan rencana bisnis yang tidak memadai ke bank. Oleh karena itu diperlukan jasa pengembangan bisnis untuk mengatasi masalah ini. Namun menurut pengalaman di beberapa negara, jasa pengembangan bisnis untuk usaha mikro dan UKM hasilnya tidak memuaskan. Dalam pengalaman terbukti bahwa sulit untuk menjalankan jasa pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Infrastruktur yang tidak memadai mempengaruhi perkembangan bisnis. Usaha mikro dan UKM di Indonesia sangat informal, tidak tumbuh dan tidak membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, intervensi resmi untuk membantu usaha mikro dan UKM menjadi keharusan. Intervensi ini harus berjangka panjang dengan fokus pada penciptaan kondisi yang memungkinkan usaha mikro dan UKM berpindah dari usaha yang sifatnya informal menuju formal. Intervensi ini juga harus difokuskan pada penciptaan dasar hukum untuk meningkatkan akses mereka ke sumber keuangan formal.

#### 4. Kerangka Kebijakan dan Perencanaan Pemerintah

166. Penguatan dan pengembangan sektor keuangan menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu pada bulan Juni 2006 pemerintah meluncurkan paket kebijakan sektor keuangan. Rancangan paket tersebut yang diterima pada bulan Mei menetapkan serangkaian reformasi dan aksi kebijakan dalam bidang

- (i) stabilitas sistem keuangan,
- (ii) lembaga perbankan
- (iii) lembaga keuangan nonbank,
- (iv) pengembangan pasar modal,
- (v) pendanaan untuk usaha mikro dan UKM,
- (vi) pendanaan infrastruktur,
- (vii) perpajakan, dan
- (viii) pendanaan ekspor, privatisasi BUMN, dan hubungan investor.

167. Rancangan paket kebijakan tersebut menetapkan sejumlah tindakan jangka pendek, tetapi tidak ada visi dan tujuan jangka panjang dalam sektor keuangan. Paket tersebut juga memunculkan beberapa pertanyaan mengenai isu strategis secara keseluruhan seperti strategi atau penilaian sektor-tertentu yang mendukung aksi kebijakan dalam paket itu. Paket tersebut juga memuat sebuah strategi untuk bank-bank milik pemerintah, peran bank pembangunan daerah (BPD), dan BPR, kebijakan pajak untuk keseluruhan jasa keuangan dan kerangka untuk memfasilitasi peminjaman bagi usaha mikro dan UKM. Dalam memfasilitasi pinjaman untuk usaha mikro dan UKM, dokumen itu juga memuat usulan pendekatan atas ke bawah (*top down*) dalam memperkirakan kebutuhan pendanaan UKM, bukan menggunakan pendekatan mekanisme-pasar. Pendekatan *top down*, pemerintah memberi usaha mikro dan UKM akses ke pendanaan formal dengan melakukan tindakan seperti pendirian biro perkreditan, memfasilitasi pendaftaran agunan (jaminan), dan mendorong asosiasi perbankan untuk mengembangkan metodologi penilaian catatan kredit dan *underwriting* bagi UKM. Kerangka hukum dan perundangan bagi UKM harus diperjelas. BPR, BPD, dan bank komersial harus mengembangkan strategi jangkauan secara lebih efektif agar dapat melayani usaha mikro dan UKM. BI harus merevisi beberapa peraturan yang membatasi pembukaan cabang BPR. Ironisnya, meskipun kinerja perbankan komersial telah meningkat secara dramatis akhir-akhir

ini karena sebagian dibantu oleh masuknya modal dan ahli asing, hukum melarang badan asing di luar negeri memberi bantuan dana bagi BPR. Ini merupakan salah satu contoh ketidakjelasan hukum yang berdampak negatif terhadap usaha mikro dan UKM di pedesaan.

168. Dibutuhkan peraturan mengenai reksa dana. Setelah pelaksanaan reksa dana pada tahun 2005 di mana aset turun hingga mencapai 80%, secara aneh reksa dana hilang dari paket kebijakan. Pemimpin Bapepam sebelumnya memprioritaskan reformasi dan melakukan tindakan cepat untuk memperkuat pasar obligasi, khususnya proses penetapan harga. Memperoleh kembali kepercayaan investor dari dalam reksa dana adalah suatu keharusan.

## **5. Peran Mitra Pembangunan**

169. World Bank dan AusAID adalah dua mitra aktif pembangunan utama di sektor keuangan. World Bank mendukung aspek pengembangan produk di sektor keuangan nonbank dan sudah memberikan bantuan dalam pengelolaan utang. AusAID juga memberikan bantuan untuk membentuk kantor pengelolaan utang, dan mendukung Bapepam LK dengan serangkaian proyek magang dan pertukaran staf antara Bapepam dengan otoritas pengawasan Australia. AusAID juga telah memperluas pendanaan untuk bantuan teknis tata kelola ekonomi dan telah menyediakan bantuan untuk tata kelola korporasi serta inisiatif perdagangan. GTZ menyediakan bantuan teknis melalui BI untuk keuangan mikro. Bantuan yang sedang berjalan fokus pada riset, pelatihan, kebijakan dalam hal keuangan mikro dan keuangan pedesaan.

## **6. Kapasitas dan Pendekatan Pengelolaan Hasil Pembangunan Indonesia**

170. Sejak krisis, kapasitas regulator dalam sektor keuangan telah diperkuat. Khususnya BI secara mendasar telah memperbaiki peraturan dan pengawasan. Bapepam-LK akan memiliki posisi yang lebih baik untuk menyelaraskan peraturan dan pengawasan di sektor keuangan nonbank, menyinergikan di antara para stafnya (seperti ahli hukum, pelaksana penegakan), dan secara padu membuat kebijakan untuk sektor tersebut secara menyeluruh. Indonesia menerbitkan rencana pembangunan pasar modal lima tahun yang memberi arah dan tindakan spesifik yang harus dilakukan. Rencana pembangunan tersebut tampaknya akan diikuti. Namun untuk dapat melaksanakannya, rencana tersebut membutuhkan pengesahan dari DPR yang berada di luar kendali badan pengatur. Badan pengatur harus mampu merespon perkembangan pasar.

## **7. Dukungan ADB di Sektor Keuangan yang Sedang Berjalan**

### **a. Kerangka Hukum, Peraturan, dan Kelembagaan di Sektor Keuangan Nonbank**

171. ADB memiliki catatan kerja sama yang baik dengan Bapepam LK di sektor non-bank melalui sejumlah proyek TA dan bantuan reformasi di bawah pinjaman program. ADB sudah membantu penguatan peraturan dan pengawasan sektor dana pensiun, asuransi, dan reksa dana, termasuk meningkatkan manajemen risiko, proses penegakan, rekomendasi amandemen Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Asuransi, Undang-Undang Dana Pensiun untuk memperkuat kerangka hukum.

### **b. Keuangan Pemerintah Daerah dan Desentralisasi**

173. *Local Government Finance and Governance Reform Sector Development Program* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan dasar dengan cara

memperkuat kerangka kebijakan, hukum, dan peraturan untuk desentralisasi dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Fase I dari program ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Program ini akan memberikan lima hasil utama (i) Meningkatnya koordinasi antarpemerintah dan penyusunan rencana tindakan desentralisasi fiskal nasional (NAPFD); (ii) Kerangka kerja yang kuat dan harmonis untuk otonomi pemerintah provinsi; (iii) Kerangka kerja yang kuat, rasional, dan harmonis untuk hubungan fiskal antarnegara; (iv) Kerangka kerja yang kuat dan harmonis untuk perencanaan, penganggaran, dan manajemen keuangan; (v) meningkatnya kesadaran terhadap pengeluaran pemerintah dan reformasi manajemen keuangan (PEFM) dan serta modernisasi sistem informasi manajemen keuangan (financial management information system/FMIS).

174. Sebuah pinjaman proyek yang merupakan bagian dari program, bertujuan untuk mendukung implementasi reformasi dalam PEFM fase 1 melalui pengembangan dan peningkatan FMIS. Proyek ini terdiri dari lima komponen: (i) Meningkatkan dan mengembangkan akses elektronik ke sistem informasi keuangan daerah (SIKD) oleh 100 pemerintah kabupaten; (ii) komputerisasi Direktorat Jenderal Badan Alokasi Keuangan Daerah (DG BAKD), di Departemen Dalam Negeri untuk memperbaiki pengawasan reformasi PEFM; (iii) mengembangkan dan mengimplementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) di 71 pemerintah daerah; (iv) menyederhanakan dan melakukan komputerisasi sistem di Departemen Keuangan untuk meninjau peraturan daerah (perda) dan rancangan perda pajak dan biaya untuk mendapatkan konsistensi dengan hukum atau peraturan yang lebih tinggi; dan (v) mengembangkan program sertifikasi di Departemen Keuangan untuk petugas administrasi keuangan daerah provinsi.

### c. Badan Keuangan

175. Terdapat proyek yang sedang dijalankan untuk mendukung Fasilitas Hipotek Sekunder. Tujuannya adalah untuk mendukung kedalaman dan keleluasaan dari pasar hipotek melalui sekuritisasi. PT. Saranan Multigriya Finansial (PT. SMF) dibentuk pada tahun 2005 dengan modal sebesar Rp. 1 triliun dari pemerintah. PT. SMF akan memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dan mengamankannya ke dalam *mortgage backed securitas* (MBS) untuk dijual di pasar obligasi. Pada tahap awal, PT SMF akan mengajukan pinjaman jangka panjang kepada lembaga-lembaga keuangan yang mengadopsi standarnya dalam hal *underwriting* hipotik dan dokumentasi. Setelah hipotek yang memenuhi syarat terkumpul dan tiba waktunya, PT SMF akan membeli hipotek tersebut dan disekuritisasi. Perusahaan juga bertindak sebagai penjamin bagi MBS. ADB akan menyediakan pendanaan non-negara secara tentatif hingga mencapai \$50 juta melalui Multitranches Finance Facility.

## 8. Usulan Peran ADB untuk Membantu Strategi Sektor Keuangan Pemerintah, 2006-2009

**176. Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR) II dan III.** Program ini akan mengikuti FGSSR I, yang disetujui pada tahun 2002, dan reformasi selanjutnya dimulai dari regulasi dan supervisi sektor keuangan, masalah tata kelola termasuk akunting dan kebijakan anti-pencucian-uang, serta pengembangan sistem jaminan sosial nasional. TA 3850-INO (lihat catatan kaki 42) mendukung penguatan regulasi dan pengawasan sektor keuangan non-bank dan aksi kebijakan dalam Rencana Aksi untuk sektor non-bank, yang merupakan program pinjaman tahap akhir pada FGSSR I pada akhir tahun 2004. Laporan bantuan teknis mengenai dana pensiun, asuransi, manajemen risiko sekuritas, regulasi reksa dana, penegakan, pelatihan, dan reformasi hukum dan peraturan pasar modal termasuk

sejumlah reformasi kebijakan dan aksi masa depan dan action untuk dimasukkan ke dalam FGSSR II. Telah diajukan permintaan secara informal mendukung pengembangan jasa keuangan syariah.

177. Untuk komponen jaminan sosial, tindakan kebijakan tentatif dapat dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang 40 mengenai Jaminan sosial yang diberlakukan pada bulan November 2004. Undang-undang ini menuntut penerbitan sejumlah peraturan. TA untuk mendukung pengimplementasian FGSSR, dapat juga menawarkan rencana tindakan ke depan yang akan dimasukkan ke dalam program tersebut, seperti dukungan pembuatan sistem nomor jaminan sosial, dewan jaminan sosial nasional dengan seluruh tanggung jawabnya dalam membuat program jaminan sosial yang disponsori oleh pemerintah seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 namun belum dibuat, dan potensi reformasi sistem jaminan sosial dan pensiun yang disponsori pemerintah

**178. Pinjaman Non-negara untuk Pendanaan Usaha Mikro dan UKM.** Sasaran dari Rural dan Microfinance Project adalah untuk memperluas jangkauan jasa keuangan mikro ke usaha mikro dan UKM di pedesaan. Dengan menggunakan mata uang lokal, pinjaman dalam kurs Rupiah senilai \$50 juta akan diberikan pada PMN (Permodalan Nasional Madani) sebagai lembaga tertinggi yang mengelola dana untuk bank-bank pedesaan. Melalui komponen bantuan kemanusiaan dan keuangan mikro dalam Proyek Bantuan Darurat Gempa Bumi dan Tsunami (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project/ETESP), ADB telah bekerja sama dengan PNM untuk menyalurkan bantuan dana bagi BPR-BPR di Aceh. Berdasarkan proposal, tujuan kerja sama dengan PNM adalah untuk memperluas akses pendanaan ke bank-bank pedesaan terpilih. Dengan bantuan tersebut, BPR-BPR di Aceh dapat menambah meningkatkan modal kerja dan meningkatkan jumlah peminjamannya ke usaha mikro dan UKM. Diharapkan pemerintah mengeluarkan paket kebijakan keuangan mikro pada bulan Juni yang menetapkan bidang kebijakan utama yang dapat dipertimbangkan untuk dibantu.

**179. Reformasi Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Tahap II.** Untuk melanjutkan agenda reformasi yang disusun dalam Program Reformasi Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahap I, pada bulan November 2005 disetujui Reformasi Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Tahap II. Tujuannya adalah untuk melanjutkan bantuan kerangka kebijakan, hukum, dan peraturan untuk desentralisasi, hubungan fiskal antar negara, dan memperkuat kerangka manajemen pengeluaran dan keuangan pemerintah. Diperlukan diskusi yang lebih rinci mengenai rencana tahapan pencapaian desentralisasi dan administrasi pemerintah daerah.

**180. Keuangan Pemerintah Kota.** Tujuannya adalah untuk mendukung formulasi dan adopsi kerangka keuangan pemerintah kota, penilaian terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk meminjam. Penilaian terhadap kebutuhan telah diselesaikan, namun masih perlu dilakukan kerja tambahan untuk menilai kapasitas pemerintah daerah untuk mengatur keuangan mereka, dan perlu diadopsi obligasi pemerintah daerah.

## **G. Sektor Infrastruktur Perkotaan**

### **1. Pendahuluan**

181. Maksud dari peta jalan ini adalah untuk menjabarkan isu dan tantangan utama dalam infrastruktur perkotaan (persediaan air bersih, sanitasi, manajemen pembuangan sampah, dan pembaharuan perkotaan), tanggapan Pemerintah dan swasta terhadap tantangan ini, dan usulan kerja sama ADB dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk

mengatasi tantangan ini pada tahun 2006-2009. Peta jalan ini dibuat berdasarkan hasil konsultasi dengan berbagai badan pemerintah pusat maupun daerah serta pemangku kepentingan lainnya selama bertahun-tahun, berdasarkan temuan-temuan Bantuan Teknis (TA) ADB, dan proyek pinjaman yang disiapkan dan dilaksanakan. Badan-badan pemerintah untuk sektor ini mencakup terutama BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU), Departemen Perumahan Umum (Dep Perum), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Kesehatan (Dep Kes), dan Departemen Keuangan (Dep Keu).

## 2. Ringkasan Analisis Situasi

182. Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 107 juta, atau sekitar 48% dari jumlah total penduduk, dengan konsentrasi terbesar berada di dan sekitar Jakarta, dan di ibukota provinsi lain, seperti Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), dan Makassar (Sulawesi Utara). Dalam waktu 10 tahun mendatang, penumpukan yang besar ini diprediksikan akan bertambah banyak, yang akan memperburuk keadaan pemukiman penduduk. Di tahun 2001, 23% keluarga di perkotaan tinggal di wilayah perkampungan kumuh, tanpa akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Angka ini menandakan tidak berfungsinya pasar perumahan dan tanah, yang memaksa banyak keluarga mengupayakan tempat tinggal tidak resmi.

183. Di antara berbagai sektor infrastruktur, pasokan air bersih dan sanitasi dalam kondisi teknis dan keuangan yang terburuk, dengan cakupan dan standar yang jauh di bawah negara-negara lain di ASEAN. Penyediaan air bersih di perkotaan didukung oleh sekitar 318 perusahaan air pemerintah daerah (PDAM), sedangkan jasa sanitasi disediakan oleh pemerintah daerah<sup>159</sup> melalui Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK).<sup>160</sup>

184. PDAM menyediakan air bersih melalui hanya sekitar 6 juta saluran di seluruh Indonesia. Pasokan air bersih melalui pipa diperkirakan hanya memenuhi 39% dari penduduk kota, sedangkan 61%-nya dilayani oleh penyedia air bersih skala kecil atau penyediaan secara swadaya oleh keluarga dan masyarakat. Rumah tangga maupun bisnis di banyak kota di Indonesia dapat mengandalkan air tanah, meskipun di kota-kota besar hal ini seharusnya dihindari karena kualitas air tanah rendah dan dapat menyebabkan turunnya permukaan tanah.

185. Kebanyakan PDAM harus berjuang mengatasi kondisi keuangan dan kualitas pelayanan yang memburuk. Sekitar 70% PDAM memiliki utang dalam jumlah besar dan harus merestrukturisasi kredit bermasalahnya segera. Di banyak pemerintah daerah, tarif air bersih berada jauh di bawah tingkat biaya yang dikeluarkan, bahkan sering tidak dapat menutup biaya operasional dan pemeliharaan ditambah bocoran air mencapai tingkat rata-rata 40%.

186. Di beberapa wilayah di kota-kota besar sudah dibangun sistem pembuangan, namun yang diperoleh tidak sesuai rencana. Kebanyakan sistem ini kurang didayagunakan dan kurang dana. Secara umum, sektor sanitasi tidak dikelola dengan baik. Saluran pembuangan hanya mampu melayani kurang dari 1,5% jumlah penduduk perkotaan. Kebanyakan warga kota mengandalkan fasilitas sanitasi yang ada di sekitarnya (*septic tank* bersama, *septic tank* keluarga, dan lubang kakus); sedangkan kebanyakan keluarga berpendapatan rendah yang mengandalkan saluran air yang kotor dan terpolusi untuk buang air. Kotoran dari *septic tank*

<sup>159</sup> Pemerintah daerah adalah yang berada di kota atau kabupaten.

<sup>160</sup> Ada beberapa contoh PDAM yang juga bertanggung jawab membersihkan saluran pembuangan kotoran, seperti di kota Bandung dan Medan.

akan diambil oleh penyedia jasa penyedot tinja, kebanyakan kemudian dibuang ke sungai atau saluran air karena tempat penampungannya tidak tersedia atau terlalu jauh.

187. Mayoritas keluarga di pedesaan menyediakan sendiri air bersih dengan menggali air tanah, menampung air hujan, atau menggunakan air sungai atau mata air terdekat. Hanya sekitar 27% keluarga di pedesaan yang mengaku menggunakan fasilitas toilet secara teratur. Lebih banyak orang miskin yang tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai. Sistem swakelola masyarakat melayani sekitar 30% penduduk pedesaan, yang kebanyakan merupakan upaya mereka sendiri atau dengan dukungan pendanaan pemerintah pusat dan atau dari donor. Masyarakat miskin di perkotaan dapat mencontoh inisiatif partisipasi masyarakat desa mengenai cara mendapatkan air bersih dan menjamin investasi di masa depan adalah baik secara keuangan.

188. Pengelolaan sampah padat, termasuk pengumpulan dan pengolahannya, merupakan masalah lain yang perlu diperhatikan. Secara umum, pengelolaan sampah padat buruk karena (i) rendahnya investasi, (ii) buruknya standar pengumpulan dan transportasi, (iii) sikap masyarakat yang kurang baik terhadap sampah, (iv) pembakaran sampah di lingkungan dan tempat pembuangan akhir sampah turut memperparah polusi udara di banyak kota, (v) hampir semua pembuangan sampah mengabaikan aturan dan norma-norma yang berlaku, dan (vi) tanggung jawab kelembagaan yang terfragmentasi dengan melibatkan beberapa badan pemerintah daerah. Sebagian besar sampah dibuang ke sumber-sumber air kota (sungai, kanal, dan saluran air), yang seharusnya dibersihkan secara menyeluruh melalui program sanitasi. Oleh karena itu perlu dikembangkan solusi yang efektif untuk memastikan perbaikan pengumpulan dan pengolahan sampah air dan sampah padat dalam program yang terpadu.

189. Permintaan perumahan, tanah, dan infrastruktur meningkat cepat. Dengan peningkatan permintaan yang cepat, kebanyakan wilayah perkotaan tidak dapat menyediakan fasilitas, infrastruktur fisik, dan pelayanan sosial yang diperlukan. Kesempatan untuk mendapatkan pendanaan rumah tidak memadai. Saat ini diperkirakan kekurangan sekitar 6 juta unit rumah. Untuk dapat menyediakan tempat tinggal yang terjangkau bagi kelompok miskin dan berpenghasilan rendah harus dikembangkan sistem yang dapat membangun perumahan dan mendanai proses ini. Keikutsertaan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur pemerintah kota masih di bawah harapan, dan dalam jangka menengah sepertinya akan tetap demikian. Karena kurangnya sumber daya, buruknya manajemen dan tata kelola pemerintah kota program pembangunan infrastruktur perkotaan terintegrasi (*urban infrastructure development program/UIDP*) hanya mengalami sedikit kemajuan dalam 15 tahun terakhir. Kebanyakan pemukiman penduduk dibangun oleh swasta, baik atas inisiatif masyarakat secara informal maupun oleh para pengembang perumahan. Peran pemerintah untuk memperbaiki pemukiman informal, memfasilitasi investasi *real estate* swasta dan mengoordinasikan jaringan dan pelayanan infrastruktur (baik yang disediakan pemerintah maupun masyarakat/swasta) masih rendah. Dengan pulihnya Indonesia dari krisis keuangan dan ekonomi tahun 1997-1998, sejak tahun 2003 muncul ledakan pembangunan baru, yang mencerminkan meningkatnya permintaan perumahan.

190. Pendanaan sektor pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan, melalui pinjaman dan kredit perumahan, masih kecil dan terbatas untuk pegawai negeri dan keluarga berpenghasilan menengah. Upaya untuk memperluas pembiayaan perumahan oleh pemerintah untuk menjangkau keluarga berpenghasilan rendah, seperti pembiayaan yang dibantu ADB melalui *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP), masih terbatas. Meskipun demikian dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bank swasta telah mulai menawarkan pembiayaan rumah kepada nasabahnya. Pasar perumahan sedang tumbuh.

### 3. Isu dan Tantangan Pembangunan Utama

191. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 221 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 juta tinggal di perkotaan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia akan bertambah menjadi sekitar 250 juta, dan jumlah penduduk di perkotaan diperkirakan akan bertambah sekitar 60% (mencapai sekitar 140 juta).

192. Di Indonesia kota-kota besar membentuk inti perekonomian daerah regional, menyediakan pelayanan serta berfungsi sebagai pusat jaringan pasar dan transportasi. Meskipun demikian, banyak kota, bahkan kota-kota besar, masih sangat kekurangan fasilitas. Hampir setengah jumlah keluarga di perkotaan rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, ekonomi perkotaan kehilangan daya saing globalnya. Pemerintah daerah masih sangat kekurangan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan. Pasar kredit pemerintah daerah telah gagal. Pemerintah pusat hampir menghentikan seluruh dana bantuan (hibah) kepada pemerintah kota. Sementara itu, partisipasi pihak swasta masih terbatas. Sebagai akibatnya, investasi untuk membangun infrastruktur terhenti dan bidang jasa di kota menurun.

193. Keadaan Sektor Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi (PAS) di Indonesia masih sangat lemah. Kondisi ini telah terjadi sejak sebelum krisis ekonomi tahun 1997/98 dan masih berdampak sampai sekarang. Sebagian karena kondisi keuangan yang buruk, tetapi juga karena berlanjutnya ketidakpastian hukum dan ketidakmenentuan proses desentralisasi, menyebabkan besarnya investasi untuk sektor persediaan air bersih daerah perkotaan tidak signifikan selama 10 tahun terakhir. Selain itu, sistem penyediaan air bersih di perkotaan memburuk karena perawatan dan perbaikan yang tidak memadai. Rendahnya cakupan wilayah penyediaan air bersih melalui pipa dan sanitasi yang memadai, serta polusi pada sumber air merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan.

194. Dengan desentralisasi, pengadaan jasa PAS menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Program desentralisasi disusun berdasarkan premis bahwa penyerahan tanggung jawab pemberian pelayanan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, sasaran tersebut dapat tercapai jika hanya jika pemerintah daerah mendapatkan bantuan teknis yang cukup, memperbaiki tata kelola dan kinerja manajemen keuangan mereka, dan memobilisasi sumber daya keuangan yang dimiliki. Akan tetapi, semua itu tidak dilakukan. Sebelum tambahan sumber daya keuangan dapat menjadi efektif, diperlukan pemisahan kepemilikan dengan manajemen utilitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, disertai dengan penentuan tingkat tarif yang obyektif yang dapat menutup biaya perbaikan.

195. Untuk subsektor penyediaan air bersih dan sanitasi, tantangan terbesarnya adalah mencapai tujuan nomor 7, sasaran nomor 10 dari MDG, yakni menurunkan setengah jumlah orang yang hidup tanpa akses berkelanjutan ke air minum yang aman dan sanitasi dasar. Untuk mencapai target ini diperlukan reformasi besar dan investasi berkelanjutan pada sektor ini. Untuk subsektor pembaruan daerah perkotaan, sasaran nomor 11 MDG bertujuan untuk memperbaiki kehidupan orang yang tinggal di perkampungan kumuh.

196. Sektor pemukiman penduduk memerlukan bantuan dalam dua hal, yakni (i) pengembangan tanah dan skema urbanisasi untuk mengarahkan pemukiman tidak resmi menjadi suatu pengembangan tanah dan perumahan yang terpadu di tempat yang tepat dan (ii) memperkuat pasar primer hipotek (kredit rumah), yang akan menjangkau keluarga dengan penghasilan rendah dan menengah sekaligus. Kedua inisiatif pengembangan tanah dan

pembiayaan kredit rumah tersebut dapat dilaksanakan melalui badan pemerintah maupun swasta.

#### **4. Kerangka Kebijakan dan Perencanaan Pemerintah**

##### **a. Kerangka Kebijakan**

197. Pemerintah pusat mencoba memperbaiki kerangka kebijakan penyediaan jasa infrastruktur di daerah perkotaan. Untuk air bersih dan sanitasi, dimulai dengan mengundang undang-undang baru tentang sumber daya air (UU No.7 tahun 2004) dan peraturan pemerintah (PP no. 16 tahun 2005) tentang air minum pada bulan Maret 2005. Peraturan ini, mewajibkan PDAM untuk menyediakan 'air minum' dan bukan 'air bersih', dan menetapkan tahun 2008 sebagai batas akhir pencapaian sasaran. Pemerintah pusat juga menetapkan garis besar kerangka hukum dan peraturan untuk air bersih dan sanitasi. Peraturan ini menjabarkan dengan lebih baik mengenai pembuatan kebijakan, peraturan, dan penyediaan jasa. Peraturan ini juga menegaskan pentingnya perencanaan, dan memfokuskan pada biaya perbaikan. Pemerintah pusat juga sedang menyusun rancangan peraturan baru mengenai Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD), untuk memberi otonomi manajerial yang lebih besar kepada PDAM ketimbang pemerintah daerah. Pelaksanaan ketentuan lain UU no. 7 dan PP no. 16 akan diselesaikan pada akhir tahun 2006.

198. Pada tahun 2003, pemerintah menandatangani Kebijakan Nasional Penyediaan Air Bersih dan Pelayanan Fasilitas Sanitasi Lingkungan Oleh Masyarakat, yang diprakarsai oleh BAPPENAS dan didukung oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Perumahan, Departemen Kesehatan, Departemen Lingkungan Hidup, dan Departemen Keuangan. Kebijakan kedua mengenai penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan berdasarkan kelembagaan sedang diselesaikan. Kedua kebijakan tersebut akan diterbitkan bersama sebagai keputusan presiden mengenai persediaan air bersih dan sanitasi pada tahun 2007, yang akan berfungsi sebagai cetak biru pengembangan sektor itu.

199. Untuk subsektor pembaruan daerah perkotaan, prakarsa pembangunan pemukiman dari Pemerintah baru-baru ini adalah Gerakan Nasional Satu Juta Rumah, yang bertujuan untuk menyediakan rumah dengan harga terjangkau dan perbaikan infrastruktur yang terkait dengan perumahan. Gerakan ini mencakup program perbaikan akses ke tanah, rumah, pengembangan sistem pembiayaan rumah, dan pembangunan kelembagaan. Program ini memfokuskan pada fasilitasi penyediaan tanah yang terawat (KASIBA LISIBA). Tujuannya adalah mendorong pemerintah daerah mengatur pertumbuhan kota, mengembangkan infrastruktur primer dan sekunder, dan memfasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh pengembang swasta, koperasi, dan masyarakat. Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan Daerah Perkotaan, yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Menteri Departemen Pekerjaan Umum no. 494/PRT/M/2005, mengkonfirmasi kembali komitmen Pemerintah pada Habitat Declaration tahun 1996 PBB, Agenda Daerah UNEP no 21 tahun 2002, dan MDG.

##### **b. Perundang-undangan dan Peraturan**

200. UU no. 5 tahun 1962 merupakan dasar pendirian PDAM melalui peraturan daerah kabupaten atau kota, baik sebagai BUMD maupun sebagai MUMD.<sup>161</sup> Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menentukan tarif. Saat ini pembagian tanggung jawab antara

<sup>161</sup> Perusahaan dengan kewajiban terbatas yang dimiliki pemerintah daerah.

pemerintah daerah dan BUMD tidaklah jelas, yang menyebabkan banyak pemerintah daerah menambah anggaran dengan 'dividen' dari PDAM. Sebagai akibatnya, PDAM tidak mempunyai insentif untuk mengatur sumber dayanya secara efektif karena sumber daya ini dapat diambil oleh pemerintah daerah kapan saja. UU yang direvisi, yang sedang dipersiapkan untuk diajukan kepada Departemen Hukum, memberikan otonomi yang lebih besar bagi BUMD dan memungkinkan untuk menginvestasikan kembali laba yang diperoleh.

201. UU Kesehatan no. 23 tahun 1992 mengatur aspek-aspek kesehatan sanitasi perkotaan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut dijabarkan dalam peraturan yang mengatur syarat-syarat kualitas air bersih dan cakupan sanitasi. UU ini memungkinkan DepKes untuk menetapkan standar minimum kualitas air minum. UU ini menetapkan wewenang DepKes untuk memonitor dan mengatur semua penyediaan air bersih ke masyarakat,<sup>162</sup> baik oleh PDAM, operator swasta, penyedia swasta, dan penyedia penengah lainnya, meskipun aspek tempat pengemasan air dalam botol diatur oleh Departemen Industri.

202. UU No.23/1997 mengenai Manajemen Lingkungan memperkuat peraturan pemerintah terkait dan memberi hak individu untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. UU ini merupakan perundang-undangan utama yang memberi perlindungan lingkungan melalui standar mutu dan membatasi pembuangan air kotor (dari kota, industri, maupun rumah tangga) ke perairan (danau, sungai, dan kanal) dan ke laut. UU memberikan hak individu untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dan mewajibkan pengusaha dan industri bertanggung jawab untuk menaati peraturan terkait. Namun, UU ini tidak secara memadai memberi perhatian pada masalah sanitasi dan tidak memberikan panduan tata kelola para operator dan penyedia pelayanan.

203. UU Sumber Daya Air (No. 7/2004, 18 Maret 2004) menetapkan peraturan mengenai hak untuk menggunakan air, dan secara khusus menetapkan bahwa sumber daya air bukanlah hak milik pribadi. Pernyataan ini menghilangkan masalah klaim kepemilikan sumber daya air oleh pemerintah daerah di wilayahnya. Hak berbagai kelompok masyarakat untuk menggunakan air untuk keperluan dasar sehari-hari dan untuk pengairan skala kecil pertanian melalui sistem irigasi dijamin oleh pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi sumber daya air menjadi tanggung jawab Dewan Sumber Daya Air. UU Sumber Daya Air juga memberikan kesempatan pendirian badan pengatur penyediaan air dan sanitasi, yang cara kerjanya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

204. Peraturan Pemerintah No.16/2005, 21 Maret 2005, menghilangkan perlunya persetujuan DPRD dalam penentuan tarif, menetapkan persyaratan partisipasi swasta, dan menyatakan kembali pendirian badan pengatur baru. Berdasarkan hal ini, Keputusan Menteri PU No. 294/2005 menetapkan berdirinya Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM), yang merupakan lembaga penasehat daripada badan pengatur. Tanggung jawab utama badan ini adalah membantu menyusun kebijakan dan strategi sektor, menetapkan standar operasional penyediaan air bersih, mengevaluasi standar pelayanan dan kinerja PDAM, dan merekomendasikan keterlibatan koperasi dan swasta dalam penyediaan air bersih.

205. Selama bertahun-tahun PDAM menjadi satu-satunya penyedia pelayanan air bersih di wilayahnya (kecuali untuk kegiatan industri utama), tetapi perundang-undangan yang baru

---

<sup>162</sup> Peraturan no. 416/MENKES/PER/IX/1990 (Peraturan Departemen Kesehatan tentang Kualitas Air Bersih).

sekarang juga memberikan alternatif penyedia lainnya.<sup>163</sup> Peraturan Pemerintah No. 23/2005 mengenai Manajemen Keuangan Badan Lembaga Umum (BLU) mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan BLU sebagai badan pemerintah nirlaba, yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang belum ada pelayanan. Peraturan ini baru saja dibuat dan masih belum jelas bagaimana peraturan ini dapat diimplementasikan dalam praktiknya.

206. Departemen Dalam Negeri juga memfinalkan Keputusan Menteri Tentang Kebijakan Tarif Air Minum, yang memberi mekanisme pengembalian biaya dan mengurangi jumlah kategori konsumen untuk menyederhanakan mekanisme penetapan tarif.

207. UU No. 24/1992 mengatur perencanaan tata ruang, dan Peraturan Pemerintah No. 80/1999 mengenai aspek teknis KASIBA/LISIBA terhadap perumahan dan pemukiman.

## 5. Pengaturan Kelembagaan

208. **Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).** Badan ini bertanggung jawab atas perencanaan infrastruktur daerah perkotaan dan pedesaan dan koordinasi proses reformasi nasional, serta memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan untuk penyediaan air, sanitasi, manajemen pembuangan kotoran, transportasi, dan pembaruan daerah perkotaan. Badan ini juga bertanggung jawab untuk meninjau kembali isu-isu utama mengenai sanitasi yang mempengaruhi wilayah perkotaan.

209. **Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU).** Departemen ini terlibat dalam isu-isu sektoral melalui (i) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSA), dan (ii) Direktorat Jenderal Pemukiman Penduduk (DJPP). Departemen ini bertanggung jawab atas pekerjaan umum yang didanai oleh pemerintah pusat dan untuk memastikan pemenuhan standar teknis dan desain di wilayahnya, dan mendukung pembangunan teknis subsektor air bersih, air buangan, sampah padat, transpor, dan pembaruan daerah perkotaan (termasuk infrastruktur lingkungan pemukiman, perumahan, dan pembiayaan pembelian rumah). DJSA memberikan panduan dalam pengalokasian sumber daya air permukaan tanah bagi para penggunanya. Dep PU adalah anggota utama Dewan Sumber Daya Air. DJPP merupakan lembaga pelaksana berbagai proyek penyediaan air dan sanitasi, termasuk Program Pembangunan Infrastruktur Daerah Perkotaan Terpadu (UIDP) dalam banyak sektor pada tahun 1990-an. DJSA telah memainkan peranan penting dalam inisiatif pembangunan perumahan dan pemukiman dari Pemerintah Pusat, termasuk dalam Proyek Peningkatan Lingkungan Sekitar dan Sektor Perumahan (PPLSP) berdasarkan peminjaman dana no. 2073-INO yang sedang berjalan.

210. **Kementrian Negara Perumahan.** Kementrian ini didirikan pada tahun 2005 dari divisi bekas Kementrian Pemukiman dan Infrastruktur Wilayah (KIMPRASWIL). Pembagian ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 9/2005. Pada bulan Oktober 2005, Keputusan Presiden No.62/2005 menugaskan departemen ini untuk mengoperasikan proyek-proyek perumahan yang besar, termasuk infrastruktur fisik dan sosial pendukungnya, tetapi bagaimana koordinasinya dengan tugas Departemen PU tidak jelas.

211. **Departemen Dalam Negeri (Depdagri).** Depdagri mengawasi desentralisasi dan memantau kinerja pemerintah daerah. Departemen ini terlibat dalam aspek non-teknis perusahaan-perusahaan di daerah, termasuk struktur sektor dan kinerja PDAM, dan memberi

---

<sup>163</sup> "Penyedia alternatif" adalah pemasok air selain PDAM termasuk perusahaan swasta, sistem kemasyarakatan dan pedagang (melalui tanker atau penjualan air langsung kepada konsumen).

panduan dalam penetapan tarif serta evaluasi dan pengawasan kinerja keuangan dan operasional PDAM.

212. **Departemen Kesehatan (Depkes).** Selain bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan nasional, Depkes memberikan panduan dan bantuan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat dan mengawasi standar kualitas air minum. Departemen ini memberikan panduan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki cakupan pelayanan sanitasi dan implementasi program hidup sehat. Melalui Direktorat Sanitasi Lingkungan, departemen ini terlibat dalam penyediaan air bersih berbasis komunitas dan pelaksanaan program sanitasi dan cara hidup sehat, melalui berbagai proyek yang didanai lembaga donor.

213. **Kementrian Lingkungan Hidup.** Kementrian ini bertanggung jawab atas UU dan peraturan yang berkaitan dengan semua aspek perlindungan lingkungan, termasuk sumber daya air. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) memandu dan mendukung unit-unit daerah ini berdasarkan kebutuhan. Kementrian Lingkungan menetapkan standar air buangan dan memandu pengawasan dan penegakan standar ini. Walaupun perundang-undangannya sudah memadai, lemahnya penegakan menyebabkan banyaknya masalah serius yang berkaitan dengan air bersih.

214. **Pemerintah Daerah (Pemda).** Di bawah otonomi daerah, pemerintah daerah (pemerintah kota dan kabupaten) secara langsung bertanggung jawab atas pelayanan sanitasi, serta memiliki, mengatur, dan memantau kinerja PDAM dalam menyediakan air bersih. Pemda juga bertanggung jawab untuk mengatur pengumpulan dan pembuangan sampah; dan mengkoordinasi semua pengaturan dan manajemen infrastruktur yang terkait dengan transportasi. Pemda juga bertanggung jawab atas kegiatan pembaruan daerah perkotaan (termasuk perumahan dan perbaikan pemukiman). Karena terbatasnya alokasi anggaran, sistem sanitasi sering terabaikan dan kurang perawatan. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah tidak sepenuhnya memperhatikan besarnya masalah dalam bidang sanitasi. Pemerintah daerah juga tidak begitu memperhatikan solusi yang tersedia untuk mengatasi masalah lingkungan yang serius yang disebabkan oleh jutaan keluarga yang sering membuang tinja dan limbah yang tidak diolah ke sistem pengairan daerah perkotaan atau langsung ke sungai.

215. **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).** PDAM bertanggung jawab atas operasi dan pengelolaan penyediaan air bersih dan, dalam banyak kasus, pelaksanaan sanitasi yang didelegasikan kepadanya. Secara struktural, banyak PDAM kekurangan otonomi manajerial dari pemiliknya (pemerintah daerah). Sering terjadi, pembuatan kebijakan, peraturan, dan implementasinya hampir semuanya menjadi tanggung jawab PDAM. Banyak sistem penyediaan air bersih oleh PDAM buruk karena kurang perawatan, dan kualitas pelayanannya juga menurun. Dalam banyak hal, fasilitas yang dibangun melalui proyek yang didanai lembaga donor tidak beroperasi lagi secara efektif. Kurangnya perawatan sistem dan komitmen lembaga mengakibatkan tingginya biaya untuk kegiatan yang tidak menghasilkan pendapatan.

216. **Komunitas dan Rumah Tangga .** Di daerah dimana PDAM tidak dapat menyediakan air bersih, komunitas mendapatkan air bersih melalui sistem kolektif, atau rumah tangga secara individual mengorganisasi fasilitas mereka sendiri di rumahnya masing-masing. Banyak contoh, khususnya di wilayah berpendapatan rendah, penjual air swasta mendapatkan air dari PDAM dan/atau menyediakan sendiri untuk keluarga dan komunitasnya. Di wilayah pedesaan, lebih dari 90% komunitasnya mengatur sendiri akses ke air bersih melalui berbagai bentuk pengaturan penyediaan air bersih sendiri, yang sering tidak dapat diandalkan dan boros waktu. Hanya sekitar 8% komunitas pedesaan yang dilayani PDAM, baik melalui sistem distribusi menggunakan pipa atau tanki.

217. **Perusahaan Air Bersih Swasta.** Dua konsesi di Jakarta, operator swasta lainnya di Batam, dan perusahaan patungan di Bali merupakan empat perusahaan swasta utama yang turut berpartisipasi dalam sektor air bersih. Beberapa inisiatif lembaga donor untuk mempromosikan partisipasi pemerintah-swasta belum mencapai hasil yang diinginkan, yang kemungkinan memberikan kontribusi terhadap kurangnya ketertarikan para penanam modal asing secara umum. Dalam semua kasus, konsorsium daerah berusaha untuk bersaing, tetapi sering masih belum memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses penawaran (tender) dan tidak mudah untuk menyetujui pembagian risiko dengan pemerintah daerah. Beberapa perusahaan daerah terlibat dalam konsesi untuk persediaan air bersih untuk wilayah industri, tetapi mereka tidak melayani komunitas daerah sekitarnya. Beberapa perusahaan internasional telah mengimplementasikan pabrik perawatan air di bawah skema BOT untuk penjualan air yang telah dikelola kepada PDAM. Tidak ada perusahaan swasta internasional dan domestik yang tertarik dalam operasi dan pengelolaan fasilitas di kota-kota karena kerangka peraturan yang sesuai belum dikeluarkan, dan karena adanya kendala yang muncul dari operator yang ada, PDAM, dan masyarakat pada umumnya.

218. **Pengusaha Perumahan Swasta.** Banyak pengembang perumahan mewah swasta memperluas operasi mereka mencakup perumahan untuk kalangan berpendapatan menengah ke bawah. Perumahan yang sedang dibangun dipasarkan kepada keluarga kalangan menengah. Kelompok pengembang perumahan ini sering bermitra dengan bank swasta yang menawarkan pembiayaan pembelian rumah kepada keluarga yang dapat membuktikan kestabilan pendapatan mereka. Pasar dari pengembang swasta ini tumbuh, tetapi untuk menjangkau masyarakat miskin mereka masih menghadapi keterbatasan.

219. **Lembaga Perbankan Pemerintah dan Swasta dalam Pembiayaan Pembelian Rumah dan Kredit Rumah.** Bank pemerintah yang terutama mengelola kredit perumahan adalah Bank Tabungan Negara (BTN). BTN memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah pegawai negeri yang besar jumlahnya. Banyak bank swasta (seperti Bank Danamon) telah membuka kredit kepemilikan rumah, dan bahkan institusi yang bergerak dalam bidang pemberian kredit kecil (seperti PT Permodalan Nasional Madani)<sup>164</sup> telah mengambil risiko terjun dalam bisnis kredit perumahan. Namun, sektor pembelian rumah dengan cicilan yang utama masih belum dikembangkan, dan pasar pembelian rumah dengan cicilan sekunder<sup>165</sup> hanya baru muncul.

## 6. Peran Mitra Pembangunan

220. **Asian Development Bank.** ADB telah mendanai 27 proyek pinjaman (jumlah totalnya sekitar \$2,1 milyar berdasarkan komitmen pinjaman) pada infrastruktur perkotaan sejak 1972 sampai sekarang. Bantuan untuk memperbaiki penyediaan air bersih dan sanitasi perkotaan dan pedesaan dilakukan melalui 8 proyek pinjaman untuk persediaan air bersih dan sanitasi sebesar \$317 juta, dan 15 proyek bantuan teknis sebesar \$5,9 juta. Pendanaan tambahan untuk perbaikan penyediaan air bersih dan sanitasi disediakan melalui proyek pembangunan perkotaan. Program-program ini telah mengenalkan pelayanan air bersih melalui pipa ke banyak kota menengah dan kecil, megembangkan jaringan air bersih di banyak kota besar, dan berkontribusi pada peningkatan PAS di pedesaan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak 1991, investasi air bersih dan sanitasi membentuk bagian dari pendekatan IUIDP yang

<sup>164</sup> Didukung oleh pinjaman dari ADB No 2072/2073-INO Proyek Peningkatan Lingkungan Sekitar dan Sektor Perumahan (NUSSP).

<sup>165</sup> Didukung oleh ADB melalui TA (Bantuan Teknis) 4715-INO: Fasilitas Pembelian Rumah dengan Cicilan Sekunder.

berkontribusi terhadap partisipasi pemerintah daerah yang lebih besar dalam manajemen pembangunan daerah perkotaan dan infrastrukturnya. Porsi pinjaman IUIDP yang besar diarahkan untuk PAS dan pembaruan daerah perkotaan (seperti perbaikan infrastruktur lingkungan di bawah Program Perbaikan Kampung). Diperkirakan jumlah pinjaman yang diberikan yang digunakan untuk PAS sekitar 37% dari total pinjaman yang diberikan untuk pembangunan daerah perkotaan. ADB juga mendanai sebanyak 47 proyek bantuan teknis sejak 1972 sampai sekarang dalam sektor ini yang berjumlah \$19,7 juta.

221. Proyek yang didanai lembaga donor merupakan sumber utama investasi pendanaan sektor ini, tetapi program pinjaman untuk PAS perkotaan pasca krisis secara efektif dihentikan. Walaupun dukungan PAS daerah pedesaan telah dimulai kembali pada tahun 2005 dengan Proyek Pelayanan Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat, proyek pinjaman baru untuk PAS perkotaan memerlukan berbagai tahap persiapan, termasuk Proyek Persediaan Air Bersih dan Sanitasi, dan Proyek Manajemen Sanitasi dan Kesehatan Metropolitan.

222. **World Bank.** Seperti ADB, World Bank telah terlibat dalam pembangunan di sektor ini melalui berbagai proyek penyediaan air bersih tetapi di wilayah Indonesia lainnya, seperti di Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Bali. Investasi di sektor PAS ini kemudian digantikan oleh banyak program tindak lanjut IUIDP di provinsi tersebut, dan juga mendapatkan pengalaman yang sama dengan ADB di sektor ini. Proyek Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (*Water Supply and Sanitation for Low-Income Communities /WSSLIC-1*) dikenalkan pada tahun 1994 untuk daerah pedesaan, dengan menggunakan pendekatan berbasis-komunitas, yang diikuti oleh proyek kedua (*WSLIC-2*) yang dimulai tahun 2004. Tindak lanjut ketiga, disebut PAMSIMAS, telah dinegosiasikan dengan pemerintah pusat. Proyek Perbaikan dan Perluasan Air Bersih dan Sanitasi Perkotaan (*UWSIEP*), yang sama dalam tujuan dan cakupan dengan WSSP yang diajukan ADB, belum diwujudkan. Rencana tindak lanjut Proyek Penyediaan Air Bersih Perkotaan (*Urban Water Supply Project*) sekarang dalam tahap persiapan. Proyek ini mencakup bidang di luar pelayanan PDAM, dan mencakup konsep merancang-membangun-menyewa (*design-build-lease/DBL*) untuk mengembangkan pelayanan tempat pembuangan kotoran manusia.

223. World Bank bersama ADB membiayai IUIDP pertama Indonesia pada tahun 1987. Setelah itu, dua lembaga mendanai sekitar 15 tahun IUIDP yang terpisah secara geografis. IUIDP terakhir selesai pada tahun 2002 dan 2003, dan pengembangan program telah terhenti sejak krisis dan ketidakpastian desentralisasi. Dukungan sektor perkotaan dari World Bank baru-baru ini merupakan jawaban langsung atas terjadinya krisis keuangan, seperti Proyek Kemiskinan Perkotaan yang turut berpartisipasi langsung, maupun yang khususnya ditargetkan, misalnya untuk PDAM. Proyek pembangunan perkotaan terdesentralisasi pertama mereka, Proyek Reformasi Pembangunan di Sektor Perkotaan (*Urban Sector Development Reform Project/USDRP*), sebesar \$100 juta, jumlahnya lebih kecil daripada yang direncanakan, dan melibatkan sangat sedikit pemerintah daerah.

224. **United States Agency for International Development (USAID).** Proyek Persediaan Air Bersih Pemerintah Daerah (*Local Government Water Supply Project/ LGWS*) menunjukkan bahwa akses air bersih untuk rakyat miskin dapat ditingkatkan dengan mendukung reformasi dalam PDAM dan pemerintah daerah. Proyek LGWS mengembangkan prosedur PDAM untuk dapat menutup seluruh biaya dari pendapatannya dengan mengaplikasikan sistem akuntansi yang transparan. Proyek ini juga mendukung pengembangan rencana perusahaan yang mencakup penyediaan petugas pelayanan pelanggan dan survei kepuasan pelanggan. USAID juga memfokuskan pada dukungan terhadap desentralisasi melalui Program Bantuan

Pemerintah Daerah (Local Government Support Program/ LGSP) yang membantu kegiatan manajemen daerah dan perencanaan investasi perkotaan.

225. **Isu-isu utama dalam Environmental Services Project (ESP)** yang sedang dilaksanakan meliputi (i) akses ke air bersih dan pelayanan sanitasi, (ii) perbaikan manajemen tanggul air, dan (iii) meningkatkan produktivitas air. Mengurangi kematian anak dan mengurangi penyakit yang ditimbulkan oleh air merupakan salah satu dari target program yang utama, yang mulai pada bulan Januari 2005. Kepedulian lainnya adalah mengenai kotoran industri yang solid dan cairan, dan melanjutkan dukungan agen ini untuk pembangunan kapasitas PDAM dalam mengadakan pelayanan.

226. **Australian Agency for International Development (AusAID).** Badan ini telah memainkan peranan utama dalam membantu penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di daerah pedesaan di Indonesia bagian timur termasuk Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Australia telah mendukung sektor ini selama 20 tahun, memberikan dukungan dana untuk proyek yang memfokuskan pada pemberdayaan komunitas, keberlanjutan, jender dan pembangunan, dan lingkungan yang lebih luas.

227. AusAID juga bekerja dengan World Bank pada kerangka kerja yang lengkap untuk penyediaan air bersih dan sanitasi pedesaan melalui berbagai proyek WSLIC, termasuk PAMSIMAS yang baru. Melalui proyek-proyek ini, badan tersebut ini telah membantu implementasi pendekatan Sanitasi oleh Masyarakat (SANIMAS)<sup>166</sup> di daerah pedesaan dan perkotaan. Hikmah yang diambil dari proyek-proyek ini adalah, dibahas pada Community Water Service and Health Project dari ADB.

228. **German Technical Cooperation Agency (GTZ).** Badan Jerman ini bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan dalam banyak isu sektor, terutama (i) pengawasan kualitas air yang bekerja sama dengan Depkes, (ii) perlindungan daerah resapan (hulu sungai), (iii) mendirikan dan mendukung pusat pelayanan pemberian saran akan air bersih yang bekerja secara otonomi dengan PERPAMSI, dan (iv) mempromosikan sistem sanitasi masyarakat di bawah SANIMAS, yakni program yang dilakukan sendiri untuk membangun pipa-pipa saluran pengumpulan air kotor yang dihubungkan dengan reaktor penyaring anaerobik seperti di Yogyakarta (melayani sekitar 100 keluarga per sistem). Melalui kerja sama dengan German Development Bank (KfW), Proyek Kualitas Perkotaan GTZ, yang ditutup pada tahun 2006, akan digantikan dengan program baru yang sedang dalam persiapan untuk mendukung pemerintah daerah.

229. **Japan International Cooperation Agency (JICA).** Badan ini mendukung proyek penyediaan air bersih pedesaan di seluruh Sulawesi, yang melayani kampung-kampung di pedesaan di 20 ibukota kecamatan (IKK) dengan menggunakan skema swa-kelola masyarakat konvensional dan sederhana. Kajian sumber daya air bersih sedang dilaksanakan di hulu sungai Jeneberang di Sulawesi Selatan, dan juga Bali.

230. **Japan Bank for International Cooperation (JBIC).** JBIC telah mendukung sektor penyediaan air bersih dan sanitasi melalui banyak inisiatif meliputi (i) Proyek Pembangunan Saluran Pembuangan di Denpasar (1994), (ii) Proyek Persediaan Air Bersih Ujung Pandang (1993), dan (iii) Proyek Pendistribusian Air Bersih melalui Saluran Pipa di Jakarta (1990). Selain

---

<sup>166</sup> Dukungan untuk masyarakat berpendapatan rendah untuk perbaikan sanitasi yang mempromosikan inisiatif sanitasi yang dilakukan sendiri di daerah pedesaan dan perkotaan.

proyek-proyek ini, JBIC dilibatkan dalam pendanaan Proyek Pembangunan Perkotaan Surabaya bersama dengan World Bank, dan juga Proyek Saluran Pembuangan Yogyakarta.

231. **Pemerintah Belanda.** Belanda mendukung pengembangan kelembagaan dan pembangunan kapasitas di PDAM, bekerja sama dengan World Bank Institute dan Perpamsi, berkontribusi pada efisiensi operasional perusahaan. Pemerintah Belanda juga mendanai Water and Sanitation Program Program Indonesia (WASAP-Indonesia) untuk Water Capacity Building and Sanitation Sector Development yang dikeluarkan oleh Belanda sebesar \$22 juta, diatur oleh World Bank. Kedutaan Belanda juga mendukung *Community Water Service and Health Project* ADB di Aceh dan Nias. Belanda juga mendanai inisiatif swadaya masyarakat di bawah dukungan PBB, misalnya untuk perumahan (proyek BILD bersama), tata kelola yang baik dan dukungan desentralisasi yang juga menargetkan rakyat miskin perkotaan. Kesenjangan program dalam sektor ini adalah perbaikan tempat tinggal dan daerah kumuh.

## 7. Kapasitas dan Pendekatan untuk Mengelola Hasil pada Sektor ini

232. Identifikasi masalah di berbagai lembaga yang terlibat di sektor ini tampaknya berjalan dengan baik. Banyak konferensi, seminar, dan lokakarya telah diselenggarakan selama 5 tahun terakhir, yang dapat mengidentifikasi dengan baik tantangan dan isu utama yang dihadapi sektor ini. Namun, ketika harus menyelesaikan masalah secara nyata, sulit dicapai kesepakatan rencana aksi yang paling sesuai. Kenyataan bahwa banyak departemen yang saling bersaing daripada bekerjasama pada sektor, menurunkan kemampuan pemerintah pusat untuk menghasilkan rencana strategis yang terpadu. Kurangnya pendukung pada level atas (di luar departemen) mengurangi keseriusan dalam memecahkan masalah yang paling serius (seperti pinjaman PDAM).

## 8. Keberhasilan dan Pelajaran yang Diperoleh ADB dalam Sektor Ini

234. ADB telah berkontribusi terhadap peningkatan dan perluasan penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi di banyak wilayah di Indonesia pada awal program penyediaan air, melalui IUIDP di Indonesia Timur, Jawa Tengah dan Sumatera, program PAS pedesaan, dan program pembangunan perkotaan di BOTABEK (Bogor, Tangerang, Bekasi) dan Medan. Program ini juga telah membantu pembangunan saluran pembuangan air di kota Medan dan di Bandung. Semua program ini dilengkapi dengan pengembangan dan penguatan kapasitas lembaga terkait, termasuk perusahaan air minum daerah.

235. Untuk sektor infrastruktur perkotaan, pelajaran utama yang diperoleh dari program dan proyek ini adalah sebagai berikut :

- (i) Dalam 15 tahun terakhir di bawah IUIDP dalam proses perencanaan dan desain proyek telah mengalami kemajuan. Semula hampir tanpa paristipasi masyarakat dalam proses ini. Saat ini melibatkan survei kebutuhan pelanggan potensial. Pertumbuhan produktivitas potensial dalam sektor industri dan jasa dominan di perkotaan, tetapi sering terhambat oleh kurangnya infrastruktur perkotaan, tidak tersedianya tanah yang memadai, lemahnya pelayanan pemerintah kota, dan tidak memadainya informasi pasar.
- (ii) Pendekatan IUIDP mungkin memiliki jangka waktu yang terlalu pendek dan memiliki sumber pendanaan yang terlalu banyak sehingga tidak efektif. Diperlukan perhatian yang lebih besar pada subsektor tertentu.

- (iii) Peningkatan pembaruan perkotaan terpadu hanya dapat berhasil jika dapat menyediakan infrastruktur, mengatur penggunaan tanah dengan tepat, memodernisasikan kegiatan ekonomi, memperbaiki perumahan dan sistem pendanaan perumahan, dan memanfaatkan kemitraan pemerintah-swasta.
- (iv) Melalui penetapan target jasa perkotaan, melalui dukungan mekanisme kredit-mikro dan berbagai cara lain untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah, dan melalui pengaturan standar dan perizinan, pemberian lisensi, transportasi bukan kendaraan bermotor, dan lain-lain, proyek investasi dapat memberi dampak besar terhadap peluang ekonomi masyarakat miskin perkotaan.
- (v) Paket kontrak kecil menyebabkan pengadaan barang yang tidak efisien dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana. Pengaturan ini biasanya mendorong keterlibatan kontraktor dengan kualifikasi yang buruk dan sering menghasilkan standar konstruksi yang rendah.
- (vi) Dalam beberapa kasus telah ditemukan perencanaan yang buruk dan rancangan yang berlebihan di luar kebutuhan, yang disebabkan oleh buruknya perencanaan analisis permintaan masyarakat maupun kegagalan untuk menghubungkan desain teknis dengan hambatan institusional.
- (vii) Perusahaan air bersih kecil tidak mempunyai sumber daya teknis yang memadai untuk mengelola kegiatannya atau berkontribusi dalam implementasi program. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya hasil investasi
- (viii) Kerja sama antar pemerintah daerah dalam manajemen dan operasional terpadu penyediaan air bersih (misalnya, PDAM Medan dan PDAM sekitarnya, dan Lombok Barat) meningkatkan efisiensi pada sektor ini serta meningkatkan kemampuan keuangan dan teknis.

236. Berikut ini adalah pelajaran yang dapat diambil mengenai penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan perbaikan pemukiman:

- (i) Cakupan geografis yang dapat dikelola dalam proyek-proyek berbasis masyarakat sangat penting untuk memastikan efektivitas implementasi.
- (ii) Masyarakat perlu diberi pilihan teknologi yang sederhana. Masyarakat juga memerlukan ruang untuk bereksperimen menggunakan fasilitas yang dapat ditingkatkan.
- (iii) Masyarakat perlu untuk dilibatkan dalam keseluruhan siklus proyek, mulai dari identifikasi masalah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- (iv) Kontribusi masyarakat dalam pembangunan, tanggung jawab penuh masyarakat untuk pengeoperasian dan biaya perawatan, bersamaan dengan penggunaan fasilitator yang berkualitas dari masyarakat setempat akan mendorong kelestarian fasilitas yang disediakan.
- (v) Program perubahan perilaku menuju cara hidup sehat dan sanitasi yang baik harus lebih ditekankan dan diimplementasikan bersamaan dengan pembangunan fasilitas. Selain itu, perlu juga dilakukan intervensi yang ekstensif pasca konstruksi.
- (vi) Diperlukan pemantauan yang ketat terhadap kualitas konstruksi, transparansi administrasi proyek, dan prosedur pengadaan barang.

## 9. Operasi dan Komitmen ADB Saat Ini

237. **Proyek Pelayanan Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat (Community Water Service and Health Project/CWSHP).** Proyek ini, yang disetujui pada bulan April 2005, akan menyediakan fasilitas dan pelayanan persediaan air bersih dan sanitasi daerah pedesaan untuk sekitar 1000 masyarakat dalam 20 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Bengkulu. Proyek ini dilengkapi dengan proyek pembangunan kapasitas pemerintah kabupaten dan masyarakat dan program perubahan perilaku menuju hidup bersih dan sanitasi yang baik. Diperkirakan 1,2 juta orang akan mendapatkan manfaat dari air minum yang aman dan perbaikan fasilitas sanitasi. Program yang didanai pinjaman untuk provinsi – provinsi tersebut dilengkapi dengan komponen pemberian dana untuk daerah yang terkena tsunami di Aceh dan Nias/Sumatera Utara, yang mencakup 400 desa lainnya.

238. **Proyek Sektor Perbaikan Lingkungan Tempat dan Pemukiman (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project/NUSSP).** Proyek, yang disetujui pada 2003 ini, membantu pemerintah pusat dalam strategi mengurangi jumlah orang miskin perkotaan dengan menciptakan mekanisme berkelanjutan untuk (i) menyediakan sumber daya untuk pemerintah daerah, yang bermitra dengan komunitas, untuk pembangunan dan distribusi hak kepemilikan bagi penghuni informal miskin; (ii) dan perluasan akses untuk penghuni informal miskin perkotaan untuk mendapatkan fasilitas kredit tempat tinggal; dan (iii) memfasilitasi rencana swadaya masyarakat dengan penguatan peran dan kemampuan masyarakat yang berpartisipasi, pemerintah daerah, dan DGHS untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Proyek akan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang kondusif, institusional, dan lingkungan peraturan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin perkotaan dalam pemukiman informal.

239. **Proyek Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi (Water Supply and Sanitation Project/WSSP).** Tujuan WSSP, yang dijadwalkan untuk disetujui pada tahun 2007, adalah untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan penduduk perkotaan dengan memberi jasa penyediaan air bersih yang dapat diminum dan sanitasi yang merata untuk kota-kota terpilih dalam menjawab tuntutan desentralisasi, dan sejalan dengan target MDG dalam penyediaan air bersih yang aman dan sanitasi. Selain komponen infrastruktur yang sangat diperlukan, proyek ini akan membantu proses reformasi partisipasi PDAM melalui program perbaikan kinerja keuangan dan operasional.

240. **Fasilitas Pengembangan Partisipasi Sektor Swasta untuk Infrastruktur Perkotaan (Participation Private Sector Development Facility for Urban Infrastructure/PSPDF).** Pinjaman bantuan teknis ini disetujui pada tahun 2006. Proyek ini akan meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur perkotaan berkelanjutan dengan menyediakan pendanaan persiapan proyek untuk pemerintah daerah. Proyek ini akan melibatkan konsultan untuk kegiatan persiapan proyek dan tender peningkatan partisipasi swasta (private sector participation/PSP). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi cara penyelesaian terhadap kendala bagi PSP. Jasa konsultasi akan disediakan untuk pembangunan kapasitas pada badan pelaksana sehingga badan tersebut dapat (i) memilih proyek yang *bankable*; (ii) menggunakan keahlian konsultan yang sesuai untuk bantuan persiapan proyek bagi pemerintah daerah; (iii) menyusun rancangan peraturan pelaksanaan yang sesuai; dan (iv) dukungan partisipasi pihak swasta melalui kampanye informasi, dan kerja sama dengan para investor dan penyedia dana.

241. **Proyek Manajemen Sanitasi dan Kesehatan Kota Metropolitan (Metropolitan Sanitation Management and Health Project/MSMHP).** Proyek ini, yang dijadwalkan untuk

disetujui pada tahun 2008, akan membantu memperbaiki kesehatan masyarakat dan mengurangi polusi lingkungan di wilayah perkotaan. MSMHP akan (i) mengurangi risiko kesehatan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, yang berkaitan dengan pembuangan sampah, yang seluruhnya atau sebagiannya tidak diolah, ke dalam saluran air kota dan sungai-sungai; (ii) berkontribusi terhadap pengurangan secara signifikan terhadap polusi sumber-sumber air; (iii) memperbaiki praktek pengumpulan dan pengolahan sampah; (iv) berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan perkotaan dan pengurangan polusi lingkungan secara keseluruhan; dan (v) mengatasi kendala kelembagaan yang serius yang mempengaruhi sektor ini.

**242. Proyek Pembangunan Pemukiman Terpadu (ISDP).** Proyek ini, yang dijadwalkan untuk disetujui pada tahun 2007, bertujuan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, perumahan untuk kalangan masyarakat berpendapatan rendah di seluruh Indonesia dengan menyediakan tempat tinggal bagi kelompok yang ditargetkan melalui pendekatan terpadu dari pembangunan rumah dan penyediaan pelayanan (KASIBA/LISIBA) dan pembaharuan perkotaan dengan menguatkan pasar hipotek utama. Proyek ini akan memperkuat permintaan dan persediaan pasar perumahan untuk membuat tempat tinggal lebih mudah didapatkan oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah.

**243. Proyek Dukungan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kedua (CLGS II).** Proyek ini, yang dijadwalkan akan disetujui pada tahun 2008, akan memperbaiki akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan infrastruktur publik dasar dan kecil (termasuk air minum, tempat mencuci, tempat mandi, dan fasilitas WC, saluran air, irigasi, pasar, jalan desa dan jalan setapak, jembatan, dermaga dan pelabuhan kapal kecil, sekolah, dan pusat kesehatan) di wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan dan akan (i) meningkatkan kesempatan kerja dan mendapatkan penghasilan, (ii) membentuk dan memperkuat institusi berdasarkan masyarakat, dan (iii) memperbaiki kapasitas pemerintah daerah untuk menangani pembangunan yang berbasis masyarakat (CDD).

## **10. Peran ADB yang Ditawarkan dalam Sektor/Tema Ini**

244. Justifikasi utama keterlibatan ADB dalam sektor perkotaan akan berlanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas perkotaan, dan pengurangan kemiskinan. Untuk menanggapi orientasi strategis ini, program ADB akan ditawarkan mencakup dua agenda utama, seperti pembangunan infrastruktur di seluruh kota, dan pembaharuan perkotaan melalui pembangunan tempat tinggal dan peningkatkan daerah kumuh. Proyek-proyek ini juga akan untung dari pendanaan dengan uang lokal, berbagai pendanaan dan kemampuan untuk secara mandiri melakukan pinjaman. Isu-isu komitmen pemberian dana merupakan hal yang sensitif khususnya ketika masa implementasi diperpanjang karena adanya kegiatan konsultasi dengan masyarakat. Secara bertahap, kegiatan ADB diharapkan meliputi mitra dari pihak swasta dalam persediaan air bersih dan sanitasi, pembiayaan perumahan atau pembelian perumahan dengan cicilan.

## **11. Kesempatan untuk Memperhatikan Isu-Isu Jender dan/atau Kepedulian akan Lingkungan**

245. Subsektor air bersih dan sanitasi, serta kegiatan pembaharuan perkotaan melalui perbaikan tempat tinggal dan pemukiman, hanya dapat terjadi berkat partisipasi aktif perempuan dalam masyarakat. Partisipasi perempuan harus diperhatikan dan menjadi arus utama dalam persiapan, pelaksanaan, serta operasi dan perawatan subproyek.

246. Perempuan terkena dampak paling besar dari kurangnya persediaan air bersih dan pelayanan sanitasi karena mereka yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Perbaikan pengaturan dan operasi persediaan air bersih dan sanitasi akan meliputi perbaikan tanggapan atas isu-isu mengenai jender dari agen-agen pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan-pelayanan ini. Kampanye dan strategi untuk menciptakan permintaan untuk perbaikan persediaan air bersih dan pelayanan sanitasi dan untuk mempromosikan investasi yang terkait dengan urusan rumah tangga akan mempertimbangkan bahwa perempuan mempunyai pengaruh besar dalam investasi yang berurusan dengan rumahtangga.

## **12. Kegiatan ADB yang Ditawarkan**

### **247. Bantuan Teknis**

- (i) Bantuan Teknis Proyek Dukungan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kedua (CLGS), bantuan teknis yang disetujui pada tahun 2005; dan
- (ii) Bantuan Teknis Proyek Peningkatan Lingkungan dan Sektor Perumahan Kedua (NUSSP), yang disetujui pada tahun 2007.

### **248. Proyek Pinjaman**

- (i) Proyek Persediaan Air Bersih dan Sanitasi, dijadwalkan untuk disetujui pada tahun 2008;
- (ii) Fasilitas Pengembangan Partisipasi Pihak Swasta untuk Infrastruktur Perkotaan, yang dijadwalkan untuk disetujui pada tahun 2006;
- (iii) Manajemen Sanitasi dan Kesehatan Kota Metropolitan, yang dijadwalkan untuk disetujui pada tahun 2009;
- (iv) Pelayanan Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat II, yang dijadwalkan untuk disetujui pada tahun 2009; dan
- (v) Proyek Peningkatan Lingkungan dan Sektor Perumahan Kedua (NUSSP), yang akan disetujui pada tahun 2009.

## **13. Kontribusi Sumberdaya yang Ditawarkan ADB dan Kemungkinan Mitra, termasuk Pengaturan Pendanaan Bersama**

- (i) Kedutaan Kerajaan Belanda: \$7.5 juta untuk PSPDF; dan
- (ii) Bantuan dari PBB: \$2 juta untuk WSSP dan MSMHP.

## **H. Sektor Pendidikan**

### **1. Pendahuluan**

249. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menggambarkan isu dan tantangan utama dalam sektor pendidikan, tanggapan pemerintah pusat, dan bagaimana ADB mengajukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut pada tahun 2006-2009. Rencana ini disusun berdasarkan dialog dan diskusi

mengenai kebijakan dengan badan-badan pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya di seluruh pelaksanaan CSP sebelumnya, dan pelajaran yang diambil dari proyek ADB yang telah selesai dan yang sedang berjalan. Badan-badan pemerintah utama yang terkait dengan sektor ini adalah BAPPENAS, dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Agama (Depag), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan Departemen Keuangan (Depkeu).

## 2. Ikhtisar Analisis Situasi/Hambatan dan Pencapaian

250. Dorongan Indonesia untuk memperbaiki tingkat dan kualitas pendidikan berasal dari faktor nasional dan internasional. Dari dalam Indonesia sendiri, terdapat nilai-nilai budaya yang kuat yang menekankan kesetaraan akses untuk memperoleh pendidikan. Hal ini tercermin secara resmi ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban terpenting negara adalah memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat, dan UU Pendidikan Nasional yang telah mewajibkan dan membebaskan biaya pendidikan dasar 9 tahun. Dari dunia internasional, pemerintah telah berkomitmen kepada Education for All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDG) dan juga secara agresif mencoba untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih kompetitif, dengan tenaga kerja yang terdidik, termotivasi, dan sangat terlatih.

251. Selama beberapa dekade, Indonesia telah membuat prestasi signifikan di sektor ini dalam hal partisipasi. Keseluruhan jumlah siswa yang terdaftar pada seluruh tingkat pendidikan meningkat, dan terdapat fokus yang besar pada keadilan. Tingkat partisipasi sekolah dasar (kelas 1-6) tumbuh dari 62% pada tahun 1973 menjadi hampir mencakup semua anak usia sekolah dasar pada saat ini. Tingkat partisipasi untuk Sekolah Menengah Pertama (kelas 1-3) menunjukkan peningkatan yang berarti dari 18% pada tahun 1970 hingga 80% pada tahun 2005. Tingkat partisipasi Sekolah Menengah Atas (kelas 1-3) juga meningkat, meskipun kenaikannya tidak setinggi jumlah pendaftaran SMP dan SD. Angka pendaftaran ini, khususnya pada tingkat SD, hampir sama jika dibandingkan dengan angka pendaftaran di negara lain di Asia Timur yang pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi. Namun, pada tingkat pendidikan tinggi, angka pendaftarannya hanya 13% jauh lebih rendah dari negara ASEAN lainnya.<sup>167</sup>

252. Keberhasilan lainnya adalah adanya diversifikasi kemitraan dalam pendidikan, melalui pihak swasta dan madrasah. Kemitraan antara pemerintah dan swasta yang kuat dan berkembang ini menunjukkan adanya fondasi yang kuat untuk reformasi, terutama untuk pasca pendidikan dasar. Pihak swasta menunjukkan partisipasi yang signifikan di Sekolah Menengah Pertama (sekitar 20% dari sekolah yang ada), 54% dari Sekolah Menengah Atas, dan 60% untuk pendidikan tinggi. Pihak swasta juga mendominasi subsektor madrasah, yang menampung 13% dari total semua siswa pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Banyak madrasah terdapat di daerah pedesaan, yang menampung siswa miskin. Kebanyakan sekolah swasta dibangun oleh yayasan amal, tetapi tetap membebaskan biaya pada orang tua siswa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya sekolah negeri atau madrasah umum.

253. Namun, kesenjangan dalam akses untuk pendidikan berlanjut antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara kaum kaya dan kaum miskin, antara siswa yang sekolah di madrasah dan siswa yang sekolah di sekolah umum, antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin lebih rendah pada tingkat SD daripada tingkat SMP dan SMA. Kesenjangan jender antara siswa laki-laki dan siswa perempuan lebih terlihat pada tingkat SMA, tetapi kesenjangan itu menyempit 1-2% pada pendidikan tinggi. Kesenjangan

<sup>167</sup> Thailand 31,9%, Filipina 29,4%, dan Malaysia 28,3%

sebesar 15-20% dalam akses untuk pendidikan juga terdapat pada tingkat SMP, SMA dan pendidikan tinggi di daerah perkotaan dan pedesaan, yang utamanya disebabkan oleh biaya yang berhubungan dengan pendidikan. Hanya 3% siswa dari keluarga pendapatan rendah yang mendaftar di pendidikan tinggi, sedangkan dari kalangan keluarga berpenghasilan tinggi terdapat 31% yang mampu mendaftar. Kesenjangan akan hak pendidikan lebih jelas terlihat pada tingkat SMP, SMA, dan pendidikan tinggi karena sebagian disebabkan oleh dominasi institusi pihak swasta, yang harus beroperasi dengan biaya sendiri dan mencari keuntungan dari bisnis sekolah sehingga orangtua siswa harus membayar mahal, meskipun institusi itu bukanlah institusi yang mencari keuntungan (nirlaba).

254. Kualitas pendidikan (umumnya diukur berdasarkan nilai kelulusan) ditentukan oleh faktor dalam dan luar sekolah yang kompleks. Pada Ujian Nasional tahun 2005, 13% siswa SMP, 22% siswa sekolah kejuruan, dan 21% siswa SMA tidak lulus (nilai minimal untuk lulus adalah 42%), meskipun ada perbaikan yang perlu dicatat dalam angka rata-rata mereka yang lulus. Kualitas pendidikan juga rendah di sektor pendidikan tinggi, dengan hanya empat lembaga pendidikan tinggi yang menduduki ranking di antara universitas dengan berbagai disiplin ilmu di Asia. Selain itu, Indonesia memerlukan guru yang melakukan persiapan mengajar dengan lebih baik, dan alokasi penugasan guru yang lebih baik menurut keahlian dan minat.

255. Walaupun banyak masalah bermunculan yang tidak dapat dihindari, sistem pendidikan memberikan respon yang signifikan terhadap reformasi desentralisasi yang lebih luas. Pemerintah pusat menyadari perlunya memperhatikan beberapa akses utama dan hambatan kualitas. Mencapai MDG mengharuskan anak-anak dalam usia sekolah SD (masih ada 10% yang belum bersekolah) dan SMP (masih ada 25% yang belum bersekolah) untuk bersekolah. Hal ini ternyata lebih sulit dilakukan daripada dibayangkan. Faktor-faktor utama meliputi halangan biaya yang substansial, cakupan fasilitas yang tidak merata dan terbatasnya pendidikan non-formal dan program belajar jarak jauh. Faktor yang masih terkait adalah respon pihak swasta yang terbatas di wilayah pedesaan yang miskin.

256. Pemerintah pusat sangat menyadari kebutuhan untuk meningkatkan standar pendidikan nasional. Strategi pendanaan pendidikan perlu disusun lebih baik dengan kebijakan sektor dan desentralisasi. Menyalurkan lebih banyak dana melalui pemerintah daerah, bersamaan dengan perbaikan prosedur akuntansi dan audit akan memungkinkan reformasi desentralisasi yang lebih baik.

### **3. Isu dan Tantangan Pembangunan Utama**

#### **a. Menghadapi Tantangan Ekonomi Makro Utama**

257. Indonesia mendapat ranking ketiga paling bawah dalam indeks persaingan ekonomi global<sup>168</sup>. Seperempat perusahaan di Indonesia menganggap bahwa keahlian tenaga kerja yang kurang memadai sebagai halangan utama bagi keuntungan dan persaingan mereka.<sup>169</sup> Tidak adanya tenaga kerja yang memungkinkan terjadinya transisi ekonomi menuju teknologi lebih canggih sebagai nilai tambah, pekerjaan telah dianggap sebagai hambatan utama, bersamaan dengan kebijakan pasar buruh dan prosedur memulai bisnis yang kurang fleksibel.<sup>170,171</sup> Hambatan utama meliputi kurangnya persediaan lulusan sekolah menengah dan

<sup>168</sup> Indeks Forum Ekonomi Dunia, 2003. Malaysia dan Thailand mendapat ranking nomor tiga tertinggi.

<sup>169</sup> PPTA Pendidikan SMA yang Terdesentralisasi, ADB 2005.

<sup>170</sup> Survei Melakukan Bisnis dari World Bank, 2005.

sekolah tinggi yang berpendidikan, terlatih, dan termotivasi dan termasuk rendahnya tingkat keahlian pekerja yang ditingkatkan oleh perusahaan.<sup>172</sup> Ukuran untuk memastikan perbaikan produktivitas tenaga kerja merupakan suatu hal yang kritis untuk menarik investasi domestik dan luar negeri dan mengoptimalkan dampak ekonomi akan program infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang diproyeksikan diperluas.

258. Angka pengangguran di Indonesia tergolong tinggi (9,5% pada tahun 2003) dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan pesaing seperti Republik Korea (3,7%), Thailand (1,5%), dan Malaysia (3,4%). Sekitar 30 juta orang, terutama di pedesaan, menganggur. Sekitar sepertiga dari angkatan kerja berusia 15-24 tahun menganggur. Dua pertiga dari kelompok pengangguran merupakan kelompok orang muda. Tiga tahun belakangan ini kita telah menyaksikan hilangnya hampir satu juta lapangan pekerjaan sektor formal, dan hanya sebagian yang bisa diseimbangkan dengan pertumbuhan lapangan kerja di sektor informal. Sejak tahun 2000, dari lapangan kerja yang hilang sekitar 85% berada di pedesaan. Sementara itu, 70% dari pekerjaan berupah berada di perkotaan, yang hanya dinikmati oleh 40% populasi pasar tenaga kerja.<sup>173</sup> Tidak adanya pendidikan menengah dan tinggi dan kesempatan pelatihan di daerah pedesaan menjadi kendala utama menciptakan pekerjaan yang dibayar di luar pertanian.

259. Sejak tahun 1997 kebanyakan lapangan pekerjaan yang diciptakan merupakan sektor informal dan UKM. Penciptaan lapangan kerja di bidang perdagangan, manufaktur, dan jasa, justru stagnan. Namun di bidang pertanian menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.<sup>174</sup> Kurangnya lulusan sekolah menengah dan sarjana yang berkualitas serta program-program pendidikan bisnis yang memadai di sekolah dan universitas merupakan faktor kunci pembangunan UKM di pedesaan.<sup>175</sup> <sup>176</sup> <sup>177</sup> Bagi Indonesia, penting sekali untuk mengatasi kendala-kendala tersebut jika Indonesia untuk merespon mobilitas pasar tenaga kerja dan liberalisasi perdagangan di ASEAN Free Trade Area(AFTA).

## **b. Menyelesaikan Tantangan Sektor Utama**

260. Pemerintah pusat menyadari urgensi untuk memperkuat landasan sistem pendidikan, dengan mengatasi kendala akses dan kualitas. Untuk mencapai tujuan MDG, Indonesia dituntut dapat menyekolahkan 10% sisa anak-anak usia sekolah ke sekolah dasar dan 25% ke sekolah menengah, yang ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Untuk memenuhi target ini juga berarti Indonesia harus memastikan semua anak paling tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Hambatan-hambatan utama untuk mencapai pendidikan dasar secara umum meliputi hambatan biaya, tidak meratanya pengadaan fasilitas serta terbatasnya jangkauan pendidikan nonformal dan pendidikan jarak jauh. Faktor yang terkait adalah terbatasnya respon sektor swasta di daerah pedesaan yang miskin. Kesenjangan yang besar dalam pengeluaran per siswa di antara kabupaten merupakan hambatan untuk memastikan kesetaraan akses ke pendidikan berkualitas. Sejumlah besar SD yang dibangun pada tahun 1970-an memerlukan

<sup>171</sup> Survei Iklim Investasi Bank Swasta dari ADB & World Bank, 2003/04.

<sup>172</sup> Survei Iklim Investasi Bank dari ADB & World Bank. Hanya 23% perusahaan menawarkan pelatihan formal kepada pegawainya, dibandingkan dengan di negara Cina daratan yang berjumlah 69% dan di Malaysia 42%.

<sup>173</sup> BPS.

<sup>174</sup> Dari SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahunan BPS.

<sup>175</sup> Instruksi Kebijakan Bank Dunia: Mendukung Usaha Kecil dan Menengah. 68% UKM ada di Jawa saja.

<sup>176</sup> Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan, 2003. Remaja Indonesia usia 14 tahun berada pada peringkat 35 dari 39 di bidang matematika dan peringkat di bidang sains.

<sup>177</sup> Survei 2003 untuk remaja Indonesia usia 15 tahun berada di peringkat 39 dalam membaca dan matematika dan peringkat 38 dari 41 negara dalam bidang sains.

rehabilitasi. Sedangkan bangunan gedung sekolah menengah memerlukan rehabilitasi dan perluasan. Pemerintah juga sangat menyadari perlunya meningkatkan standar pendidikan secara nasional, melalui perbaikan kualifikasi pengajar maupun pengadaan buku ajar dan bahan-bahan pelajaran lainnya.

261. Walaupun diperlukan lebih banyak sumber daya untuk mencapai EFA dan MDG, terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformasi struktur dan strategi pendanaan pendidikan. Strategi pendanaan pendidikan perlu diselaraskan dengan kebijakan sektor dan desentralisasi. Menyalurkan lebih banyak dana melalui pemerintah daerah, di samping memperbaiki prosedur akuntansi dan audit, akan mempermudah reformasi desentralisasi, sekaligus mengatasi isu-isu akses dan kualitas pada tingkat kabupaten dan sekolah. Dengan mengenali pentingnya faktor-faktor sosial dalam hal pencapaian sasaran pendidikan, pemerintah pusat kini mencari peranan lebih formal dari orang tua siswa dan masyarakat untuk mendukung sekolah dan hasil pembelajaran di rumah.

262. Pemerintah pusat menyadari perlunya memperbaiki efisiensi dan efektivitas sumber daya masyarakat pada tingkat pendidikan tinggi. Strateginya adalah membangun reformasi pada pendidikan tinggi selama dekade terakhir dengan bantuan ADB dan World Bank, dengan meningkatkan proporsi dana yang disediakan untuk lembaga pendidikan tinggi melalui pemberian dana yang kompetitif. Strategi ini diharapkan memotivasi lembaga pendidikan tinggi untuk memperbaiki kualitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan guna menciptakan angkatan kerja yang produktif dan kompetitif, di pasar formal dan informal serta UKM.

#### **4. Kerangka Kebijakan Pemerintah dan Perencanaan**

##### **a. Strategi Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009**

263. Diperlukan reformasi pendidikan dan pelatihan agar dapat mengimplementasikan Rencana Pembangunan Pemerintah Jangka Menengah tahun 2005-2009, yang dicirikan dengan fokus pada reformasi kebijakan dan kelembagaan dan keterlibatan aktif sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur penyelenggaraan pelayanan. Kebijakan dan program untuk menjamin keadilan sosial, kesetaraan, dan kualitas pelayanan sosial dasar merupakan pilar utama dari rencana tersebut.

264. Pemerintah pusat telah mengidentifikasi lima bidang prioritas untuk mencapai pertumbuhan yang diperlukan untuk mendukung kebijakan dan programnya: (i) mengadopsi program penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan; (ii) mempertahankan stabilitas makroekonomi melalui harga yang stabil, fiskal berkelanjutan, reformasi sektor keuangan; (iii) mempercepat pertumbuhan investasi, ekspor, dan turisme melalui reformasi untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan pasar yang fleksibel; (iv) memperbaiki SDM; dan (v) membangun infrastruktur dengan memperbaiki efisiensi pelayanan dan mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih besar.

265. Rencana tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan lembaga di dalam pemerintah pusat dan daerah dan sektor lembaga, terutama untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas, sangatlah penting. Di dalam sektor pendidikan dan pelatihan, langkah-langkah untuk memperkuat daya tanggap kelembagaan terhadap pasar tenaga kerja dan kondisi-kondisi ekonomi akan sangat penting. Kekuatan dari tanggapan ini akan dioptimalkan dengan langkah-langkah paralel untuk memperbaiki fleksibilitas pasar tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja melalui reformasi peraturan upah dan ketenagakerjaan.

## b. Prioritas Strategis Pendidikan

266. Di bawah Menteri Pendidikan Nasional yang baru, Departemen Pendidikan Nasional telah mengembangkan Rencana Strategis Pendidikan (RSP) 2005-2009.<sup>178</sup> Prioritas-prioritas utamanya meliputi (i) mencapai akses universal bagi pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 2009, (ii) memperluas tingkat penerimaan siswa di tingkat menengah atas dan pendidikan perguruan tinggi,<sup>179</sup> (iii) meningkatkan standar dan relevansi pendidikan pada semua tingkat, termasuk persiapan dan penempatan guru yang efisien, (iv) memperkuat sistem tata kelola dan manajemen pendidikan berorientasi hasil, terutama pada tingkat kabupaten dan sekolah/lembaga dan (v) orientasi hasil yang lebih baik dari sistem perencanaan dan pemantauan sektor. Elemen-elemen lainnya terdiri atas (i) harmonisasi yang lebih baik dalam kemitraan pemerintah/swasta, (ii) memastikan para lulusan lebih kompetitif di tingkat regional dan internasional, (iii) menstimulasi tanggapan dari sisi permintaan dari implementasi program dan (v) memperkuat jaminan kualitas dan sistem pemantauan, khususnya mekanisme akuntabilitas sekolah/kabupaten dan pemerintah pusat/daerah.

267. Selain keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi, pemerintah pusat juga telah mengalami kemajuan dalam mencapai beberapa tujuan lainnya. Sesuai dengan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 20/2003, dua lembaga mandiri baru-baru ini ditetapkan – Badan Nasional Standar Pendidikan dan Badan Akreditasi Nasional – untuk meningkatkan standar pendidikan dan memastikan jaminan kualitas yang lebih baik. Dekrit dan peraturan menteri tentang standar pelayanan minimum untuk standar pendidikan di tingkat kabupaten dan nasional untuk sekolah juga telah dikembangkan. Sebagai langkah pertama rencana reorganisasi yang lebih luas, Depdiknas telah menetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Guru yang baru untuk mengatasi isu-isu yang sering muncul tentang rendahnya kualitas guru.<sup>180</sup> Tujuan reorganisasi yang diajukan tersebut adalah untuk menyelaraskan dengan lebih baik struktur organisasi Depdiknas mengingat meningkatnya tanggung jawab untuk pengembangan kebijakan, bimbingan strategis, penetapan standar, dan pemantauan kinerja. Reorganisasi serupa juga diharapkan terjadi pada tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mencapai keselarasan yang lebih baik dengan tanggung jawab tingkat provinsi untuk pemantauan operasional dan bantuan teknis, dan tanggung jawab tingkat kabupaten untuk manajemen operasional dan strategis serta manajemen dan perencanaan keuangan jangka menengah.

268. Kemitraan pemerintah-swasta pada sektor pendidikan telah mendapat status yang penting di dalam UU Pendidikan Nasional, dengan perlakuan setara sekolah-sekolah negeri dan swasta dalam hal pendanaan.<sup>181</sup>

269. ESP 2005-2009 melakukan upaya serius dalam menetapkan target-target bagi banyak reformasi yang teridentifikasi, yang kebanyakan terikat waktu dan dapat diukur. Namun, pemantauan kemajuan akan terhambat karena kekurangan dalam hal sistem informasi manajemen pendidikan nasional, yang telah dengan jelas runtuh sejak desentralisasi.

<sup>178</sup> ESP 2005-2009 draft proyek tingkat penerimaan bersih pada pendidikan dasar meningkat dari 92% menjadi 100%, pendidikan SMP dari 62% menjadi 100%, pada tahun 2009.

<sup>179</sup> ESP 2005-2009 draft proyek tingkat penerimaan siswa pada pendidikan tingkat SMU dan STM meningkat dari 38% menjadi 70% pada tahun 2009, pendidikan perguruan tinggi dari 12%-14% menjadi 18% pada tahun 2009.

<sup>180</sup> Reorganisasi Kantor Sekretaris Jendral selesai pada pertengahan tahun 2005, dengan memasukkan Unit Fasilitas Pendidikan yang Terdesentralisasi, yang belakangan ini didukung ADB.

<sup>181</sup> Harus dicatat bahwa sekolah-sekolah swasta utamanya melayani kaum miskin, awalnya ditetapkan untuk menyerap kelebihan dari sistem sekolah negeri.

### c. Pendanaan Pendidikan: Strategi dan Pandangan

270. Beberapa reformasi strategi dan manajemen pendanaan yang berdampak luas dimasukkan ke dalam ESP 2005-2009: (i) penghapusan segera biaya dari orang tua murid di pendidikan dasar,<sup>182</sup> (ii) alokasi dana untuk sekolah yang meningkat guna mengimbangi sumbangan orang tua siswa, di bawah program “BOS”,<sup>183</sup> (iii) menyalurkan lebih banyak sumber daya melalui transfer hibah (*block grant*) pendidikan kepada pemerintah daerah melalui program bantuan penyalarsan transisional, (iv) program-program infrastruktur sekolah yang lebih berorientasi pada hasil dan sesuai kebutuhan dan (v) pengembangan dana pembangunan yang sesuai permintaan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.<sup>184</sup>

271. Strategi pendanaan RSP 2005-2009 memasukkan pembayaran uang sekolah bagi tingkat SMU dan pendidikan tinggi serta beasiswa prestasi yang didukung pemerintah pusat bagi siswa yang miskin. Strategi ini juga memproyeksikan bantuan ekstensif pada pengembangan kapasitas, termasuk pemantauan sektor di tingkat pusat dan provinsi serta sistem audit, pengembangan perencanaan dan manajemen keuangan kabupaten dan praktik administrasi pembukuan di sekolah yang diperbaiki.<sup>185</sup>

272. Bertolak belakang dengan rencana-rencana sebelumnya, RSP serius untuk mengaitkan reformasi-reformasi yang direncanakan dengan cara melakukan kalkulasi reformasi tersebut untuk menetapkan kebutuhan dana, mengidentifikasi dana yang diharapkan akan tersedia, dan defisit pendanaan. Anggaran yang ditargetkan juga diberikan untuk subsektor dan aktivitas-aktivitas seperti pembangunan kapasitas.

## 5. Pengaturan Kelembagaan

273. RSP 2005-2009 dibangun di atas kewajiban hukum negara seperti yang disebutkan pada Amandemen ke 4 Pasal 31 tentang Pendidikan; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

274. Undang-undang tersebut dioperasionalkan melalui diterbitkannya Dekrit Menteri dan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan disahkan pada tahun 2005. Dua peraturan lagi direncanakan untuk tahun 2006, tentang pendanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Suatu kelompok kerja telah ditetapkan Menteri Pendidikan untuk mengembangkan Standar Nasional Pendidikan,<sup>186</sup> yang kini telah memenuhi standar di dua dari delapan area yang ditetapkan. Undang-undang tentang pendidikan terbaru yang telah disahkan

<sup>182</sup> Disetujui oleh DPR di bulan Mei 2005.

<sup>183</sup> Alokasi tambahan senilai 11 triliun rupiah pada anggaran pusat Menteri Keuangan, disetujui untuk tahun anggaran 2005/2006, dengan peningkatan yang disetujui hingga sekitar 65 triliun rupiah pada tahun 2009.

<sup>184</sup> Sama dengan dana pembangunan kapasitas di bawah Pembangunan Kapasitas yang Berkelanjutan untuk Proyek Desentralisasi yang didukung ADB.

<sup>185</sup> Draft ESP, Mei 2005 meliputi alokasi lebih dari 2 triliun rupiah per tahun untuk periode rencana.

<sup>186</sup> Standar-standar yang akan dikembangkan untuk (i) kompetensi lulusan (pengetahuan, sikap dan ketrampilan), (ii) isi pendidikan, (iii) proses pendidikan, (iv) kualifikasi guru dan staf pendidikan, (v) fasilitas dan infrastruktur, (vi) dana pendidikan, (vii) manajemen, dan (viii) evaluasi pendidikan.

adalah Undang-undang Guru dan Dosen, yang mengkhhususkan pada persyaratan yang lebih ketat dalam hal pelatihan dan kualifikasi pengajar.

275. Meskipun beberapa undang-undang tersebut telah menetapkan kerangka hukum akan hak warga negara Indonesia atas pendidikan dasar minimum 9 tahun, masih terdapat banyak ketidakkonsistenan dan kesenjangan di dalam kerangka kerja hukum yang mengatur desentralisasi pendidikan. Hal ini mengakibatkan ambiguitas dalam hal peranan dan tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Departemen Dalam Negeri kini memimpin suatu proses untuk menyelesaikan beberapa ketidakkonsistenan kunci yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam tingkatan yang berbeda dengan berdiskusi dengan pemerintah daerah dan jajaran menteri.

276. Dukungan masyarakat pada sektor pendidikan negeri dan swasta sejak dulu memang kuat yakni melalui pengadaan pendanaan dan sumber daya lainnya. Peranan masyarakat dalam hal mengelola sekolah telah diformalkan dengan mengadopsi suatu pendekatan manajemen berbasis sekolah, di mana masyarakat memiliki peranan kunci di dalam mengembangkan rencana pembangunan sekolah dan di dalam menentukan penggunaan dana sumbangan blok di sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan daerah yang spesifik.

277. Lembaga-lembaga kunci pada sektor pendidikan termasuk Departemen Pendidikan Nasional yang berwenang dalam hal sistem pendidikan umum, dan Departemen Agama yang mengelola madrasah. Semua program, dari program pendidikan pra-sekolah, tingkat SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi ditawarkan oleh Lembaga-lembaga pendidikan swasta dan pemerintah di bawah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Kedua departemen tersebut bekerja sama erat dengan BAPPENAS dalam perencanaan dan dengan Departemen Keuangan untuk pendanaan, menggunakan sumber daya pemerintah pusat sendiri serta sumber daya dari mitra pembangunan internasional. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memandatkan sistem pendidikan terpadu yang meliputi sekolah dan universitas negeri maupun swasta dan agama maupun umum, tetapi preseden sejarah dan kondisi politik telah menghasilkan kelanjutan dari dua institusi yang terpisah .

278. Desentralisasi pendidikan pada tahun 2001 telah menimbulkan tekanan yang besar pada penyelenggaraan pendidikan. Meskipun pendelegasian penyelenggaraan pendidikan ke pemerintah tingkat kabupaten memiliki potensi meningkatkan efisiensi, pemerintah pusat dan daerah memiliki tingkat kemampuan yang bervariasi dalam mengimplementasikan berbagai tugas yang datang bersama dengan desentralisasi. Meskipun tidak adanya klarifikasi hukum membuat restrukturisasi kelembagaan menjadi kompleks, pemerintah pusat benar-benar perlu membangun sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas baru mengembangkan dan menganalisis kebijakan, menetapkan standar, dan memantau hasil-hasil pembangunan. Selain itu, pemerintah kabupaten juga perlu mengembangkan kapasitas untuk merencanakan dan mengimplementasikan program, mengelola sumber daya dan menyebarluaskan praktik-praktik inovatif yang berhasil pada sistem tersebut.

## **6. Peranan Mitra Pembangunan**

279. Sejumlah mitra pembangunan telah dengan aktif mendukung Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, termasuk ADB. Sejak tahun 1975, ADB telah mendanai 31 proyek pendidikan dan pelatihan dengan nilai total \$2,217 juta, dan telah menyediakan dana bantuan sebesar \$16 juta untuk 36 proyek bantuan teknis (TA). ADB pada awalnya

memfokuskan pada pendidikan teknik dan/atau kejuruan dan pendidikan tinggi, lalu pada tahun 1990an memperluas dukungannya untuk memasukkan pendidikan dasar, sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mencapai pendidikan dasar umum (UBE) 9 tahun. AusAID telah mendukung baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi melalui beasiswa akademik jangka panjang, bersama dengan CIDA, dan USAID. JICA, UNICEF, UNESCO, dan NZAID mendukung pendidikan dasar, sedangkan GTZ telah mengembangkan kualitas pendidikan sains. Bank Dunia kini sedang mendukung pendidikan dini anak, pendidikan dasar, dan pada tahun 2005 menyetujui pinjaman untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi pendidikan tinggi.

280. Mitra-mitra pembangunan berkoordinasi melalui Kelompok Kerja Sektor Pendidikan, yang menyelenggarakan forum informal untuk mendiskusikan isu-isu kunci. Lembaga-lembaga penting pemerintah seperti Departemen Keuangan, BAPPENAS. Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama telah berinisiatif untuk berpartisipasi di dalam Kelompok Kerja tersebut. Baru-baru ini Uni Eropa telah mengajukan pembentukan forum kebijakan tingkat tinggi untuk sektor ini, *terms of reference* dan komposisi kebijakan tersebut sedang didiskusikan Kelompok Kerja tersebut.

## **7. Kapasitas dan Pendekatan untuk Pengelolaan Hasil Sektor**

281. ESP 2005-2009 merupakan dokumen bermutu, yang didasarkan pada analisis cermat atas masalah dan isu-isu, yang membahas area-area kunci pembangunan pendidikan: (i) akses dan keadilan, (ii) kualitas, relevansi dan daya kompetisi, (iii) tata kelola dan manajemen. Dokumen tersebut menggambarkan dengan jelas tanggung jawab pemantauan dan pengevaluasian di tingkat pemerintahan yang berbeda-beda dan di tingkat masyarakat. Strategi yang digunakan berorientasi hasil dan memiliki target-target yang jelas pada hasil-hasil di tiga area tersebut selama tahun 2004-2006. Namun demikian, dengan adanya desentralisasi, kapasitas sistem pendidikan untuk mengumpulkan dan menganalisis data telah menjadi menurun, dan kabupaten tidak merasa begitu terpacu untuk berbagi informasi dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2000, sensus sekolah tahunan menghasilkan tingkat tanggapan 80%, tetapi sejak saat itu angka tersebut telah menurun dengan signifikan. Hal ini sebagian diakibatkan kapasitas kabupaten yang lemah dalam hal pengumpulan data, dan bahkan lebih lemah lagi dalam hal analisis data. Meskipun kabupaten mewajibkan untuk berbagi data tentang hasil-hasil pendidikan nasional dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama guna alokasi sumber daya, mereka juga memerlukan data untuk manajemen daerah yang lebih baik. DBEP (Pinjaman 1863-INO) kini bekerja dengan lima dinas pendidikan di kabupaten untuk mendampingi mereka dalam hal pengembangan kapasitas jenis tersebut. Uni Eropa berencana memperkuat sistem informasi manajemen pendidikan nasional di bawah bantuan dana yang baru.

## **8. Keberhasilan dan Pelajaran yang Dipetik ADB pada Sektor**

282. ADB telah menjadi lembaga donor pemimpin di bidang pendidikan. ADB telah menyediakan \$2.127 juta dalam bentuk pinjaman untuk 31 proyek dan \$16 juta dana bantuan untuk 36 proyek bantuan teknis. Selama dekade ini, prioritas strategis telah dititikberatkan pada mengusahakan akses yang lebih adil pada pendidikan dasar dan tinggi yang berkualitas tinggi melalui kemitraan pemerintah-swasta. Dalam kasus pendidikan tinggi, fokusnya terletak pada pengembangan keahlian teknologi dan angkatan kerja. Menanggapi kebijakan desentralisasi, lintas prioritas yang pertama adalah manajemen pendidikan yang lebih terdesentralisasi, terutama pada tingkat kabupaten dan sekolah. Pelajaran yang dipetik dari inisiatif ADB dan lembaga donor lainnya, terutama yang berkaitan dengan kemitraan pemerintah-swasta dan

manajemen terdesentralisasi telah berguna dalam menginformasikan dan meneruskan strategi-strategi desentralisasi Departemen Pendidikan Nasional.<sup>187</sup>

283. ADB memimpin dalam hal mendukung pembangunan pendidikan menengah swasta dan agama, terutama dalam menyelaraskan kurikulum dan pengembangan guru serta strategi pendanaan dalam sistem nasional.<sup>188</sup> Sejumlah proyek telah berhasil memperbaiki tingkat tanggapan institusi pendidikan menengah atas dan pendidikan perguruan tinggi pada permintaan pasar tenaga kerja.<sup>189</sup> Dukungan ADB dalam mengurangi risiko tersebut pada pendidikan selama krisis tahun 1997 berguna dalam menginformasikan kebijakan yang lebih luas dan reformasi kelembagaan, termasuk pengembangan strategi pendanaan yang berpihak pada kaum miskin dan terdesentralisasi.<sup>190</sup> Program komprehensif kerja sektor pendidikan dan saran bantuan teknis telah memberi sumbangan yang signifikan pada pengembangan kebijakan dan strategi, termasuk proses ESP 2005-2009.

284. Beberapa pelajaran kunci yang dipetik<sup>191</sup> meliputi (i) pentingnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam perancangan, pengimplementasian, dan pemantauan program-program; (ii) pentingnya pendekatan yang didorong permintaan dan didasarkan pada kinerja; (iii) perlunya fokus yang lebih besar pada pembangunan institusi dan pembangunan kapasitas tingkat pemerintah daerah dan sekolah; (iv) implementasi berorientasi hasil, perencanaan, dan sistem pemantauan yang diterima masyarakat luas; dan (v) fokus yang lebih kuat pada berkelanjutannya input-input proyek.<sup>192</sup> Telah diakui bahwa dampak dialog kebijakan antara pemerintah pusat, ADB, dan lembaga donor lainnya terbatas dikarenakan lingkungan kebijakan dan politik yang tidak menentu dan tidak adanya rangkaian prioritas strategi sektor dan kerangka kerja pemantauan kinerja yang disetujui bersama dan dipimpin oleh pemerintah pusat. Koordinasi antara proyek-proyek yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan dan badan pemerintah lainnya dapat jadi kurang begitu optimal.<sup>193</sup> Ketahanan pendanaan dan kelembagaan yang tidak menentu yang terjadi pada beberapa proyek pendidikan telah menjadi perhatian. Telah diakui bahwa bantuan ADB harus lebih berorientasi hasil, memfokuskan lebih besar pada tingkat pusat dan sektor, dan berdasarkan kepada penilaian yang lebih baik untuk hal-hal seperti kemiskinan, tata kelola pemerintahan, pengembangan kapasitas, peran serta sektor swasta, serta kemampuan menyeleksi yang lebih besar atas hasil yang diantisipasi dan pendekatan tematik.<sup>194</sup>

<sup>187</sup> ADB. 2001. *Report dan Recommendation of the President to the Board of Directors for the Decentralized Basic Education*. Manila. Pinjaman 1863, disetujui pada tanggal 29 November 2001 sejumlah \$100 juta.

<sup>188</sup> ADB, 2005 *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors for the Private Junior Secondary Project*. Manila. Pinjaman 1359, disetujui pada tanggal 18 Juli 2005 sejumlah \$ 49 juta. ADB. 1996. ADB. 1995. *Report dan Recommendation of the President to the Board of Directors for the Basic Education Project*. Manila. Pinjaman 1442, disetujui pada tanggal 6 Juni 1996 sejumlah \$ 85 juta. ADB. 1997. *Report dan Recommendation of the President to the Board of Directors for the Development of Madrasah Aliyah Project*. Manila. Pinjaman 1519, disetujui pada tanggal 25 Maret 1997 sejumlah \$85 juta.

<sup>189</sup> ADB. 1995. *Report dan Recommendation of the President to the Board of Directors for the Senior Secondary Education Project*. Manila. Pinjaman 1360, disetujui pada tanggal 18 Juli 1995 sejumlah \$ 110 juta. ADB. 2000. *Report dan Recommendation of the President to the Board of Directors for the Technological and Professional Skills Development..* Manila. Pinjaman 1792, disetujui pada tanggal 2000 sejumlah \$80 juta.

<sup>190</sup> ADB. 1998. *Report dan Recommendation of the President to the Board of Directors for the Social Protection Sector Development Program*. Manila. Pinjaman 1622/1623, disetujui pada tanggal 9 Juli 1998 sejumlah \$150 juta.

<sup>191</sup> ADB PPARS untuk Proyek-proyek Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Tinggi.

<sup>192</sup> Evaluasi Program Bantuan Negara untuk Indonesia. 2005.

<sup>193</sup> Salah satu contohnya adalah kaitan strategis yang terbatas antara dukungan ADB pada SME (di bawah Depkeu) dan sejumlah program pengembangan ketrampilan lainnya di bawah Departemen Pendidikan Nasional.

<sup>194</sup> ADB CSP Update 2005.

## 9. Berbagai Operasi dan Komitmen ADB Saat Ini

285. Bantuan pinjaman 1863-INO<sup>195</sup> didanai bersama oleh Pemerintah Belanda sebesar \$28 juta. Proyek tersebut mendukung implementasi pendidikan dasar yang terdesentralisasi di Bali, NTB dan NTT, dan telah didesain untuk meningkatkan partisipasi anak-anak miskin dalam menyelesaikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui (i) pembangunan sekolah, yang meliputi pembangunan kapasitas masyarakat setempat dan staf sekolah dalam hal konsep manajemen berbasis sekolah, tercermin di dalam rencana pembangunan sekolah yang pada gilirannya didukung oleh dana pembangunan sekolah; (ii) pembangunan pendidikan dasar di tingkat kabupaten, yang bertujuan membangun kapasitas kabupaten untuk merencanakan dan mengelola pendidikan dasar yang terdesentralisasi seperti yang tercermin dalam rencana lima tahun pembangunan pendidikan di kabupaten dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggunakan Dana Pembangunan Pendidikan Kabupaten; dan (iii) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kemajuan dari (i) dan (ii), melalui pemantauan kepatuhan program dan dana, dan juga dengan memeriksa dampak-dampak desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dasar. Hasil-hasil yang diharapkan termasuk pengenalan manajemen berbasis sekolah di sekitar 4.000 sekolah, implementasi standar pelayanan minimum pada 26 kabupaten, serta pembangunan dan implementasi rencana-rencana pembangunan pendidikan di semua proyek kabupaten.

286. Tujuan keseluruhan TA 4391-INO: Dukungan pada Manajemen Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi II<sup>196</sup> adalah untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk merencanakan, mengelola, dan menyelenggarakan pendidikan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum, melalui (i) desain terbaru dan implementasi strategi-strategi berbiaya efisien dan program-program prioritas untuk mencapai akses yang adil, perbaikan kualitas di tingkat pusat dan distrik; (ii) strategi manajemen pengetahuan yang lebih baik untuk identifikasi, advokasi, dan penyebarluasan, dan penggunaan praktik-praktik yang berkelanjutan dan berdampak besar, terutama pada tingkat sekolah dan kabupaten; dan (iii) memperkuat pengaturan kemitraan untuk perencanaan, pengelolaan, dan pendanaan program pembangunan kapasitas pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan sekolah.

287. Hasil-hasil yang diharapkan meliputi (i) Rencana Strategis Pendidikan (RSP) 2006-2010 yang sudah direvisi dan disetujui serta pedoman strategis yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional; (ii) strategi dan rencana strategis operasional untuk 5 tahun yang dipersiapkan dan dilaksanakan di tingkat kabupaten yang jumlahnya semakin meningkat; (iii) pencatatan praktik berdasarkan pada bukti-bukti dan strategi penyebarluasan; (iv) praktik yang baik semakin banyak digunakan di kabupaten dan sekolah; (v) strategi dan rencana pembangunan kapasitas di tingkat sektor dengan indikator kinerja; dan (vi) desain dan implementasi mekanisme dana pembangunan (CDF) kapasitas untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten serta pengaturan pendanaan bersama.

288. Pinjaman 1792-INO: Proyek Pengembangan Keahlian Profesional dan Teknis<sup>197</sup> ditujukan untuk memperbaiki daya kompetisi internasional dan membantu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna mengurangi kemiskinan, dengan dasar

<sup>195</sup> ADB. 2001. Report and Recommendation of the President to the Board of Directors for the Decentralized Basic Education. Manila. Pinjaman 1863, disetujui pada tanggal 29 November 2001 sejumlah \$ 110 juta.

<sup>196</sup> ADB. 2004. *Technical Assistance to Republic of Indonesia for Support to Decentralized Basic Education Management II*. Manila. TA 4391, disetujui pada tanggal 14 September sejumlah \$500.000 dan didanai bersama oleh Uni Eropa sebesar \$6.030.000.

<sup>197</sup> ADB. 2000. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors for the Technological and Professional Skills Development*. Manila. Pinjaman 1792, disetujui pada tanggal 29 November 2000 sejumlah \$80 juta.

kesetaraan jender, sosial dan geografis. Proyek ini memiliki dua bagian yang saling berkaitan: (i) memperkuat tata kelola dan kapasitas manajemen sistem pendidikan tinggi negeri dan swasta, memperbaiki kesetaraan siswa, mendukung program mempertahankan jumlah siswa dan mendukung pelaksanaan proyek; dan (ii) memperkuat program studi yang sudah ada dan mendukung yang baru dalam disiplin prioritas utama di dalam pendidikan perguruan tinggi, meningkatkan pusat studi untuk wanita dan memperkuat hubungan yang bersifat komunitas dan industri. Hasil-hasil yang diharapkan adalah tingkat akreditasi yang lebih baik bagi institusi proyek, kualitas lulusan yang makin baik, masa studi yang lebih singkat, kemampuan Bahasa Inggris yang meningkat, dan berkurangnya masa menganggur lulusan hingga mendapat pekerjaan.

289. Hibah 0002-INO: Proyek Dukungan Darurat Gempa dan Tsunami <sup>198</sup> (dana hibah ADB senilai \$13 juta untuk komponen pendidikan, \$10 juta diprogram ulang dari Pinjaman 1863-INO), akan membantu membangun kembali kualitas pendidikan di Aceh dan Nias pada tingkat pendidikan menengah atas, dengan mendukung pengadaan bahan-bahan belajar dan mengajar bagi 200 sekolah, dan pengadaan laboratorium komputer dan sains khusus bagi sekitar 20 SMU. Sekitar 50 sekolah pendidikan dasar di Simelue akan dibangun kembali dengan menggunakan dana DBEP yang diprogram ulang.

## **10. Peran ADB yang Diajukan dalam Bidang Pendidikan**

### **a. Mendukung Pendidikan Dasar Universal**

290. ADB akan memperluas dukungan yang ditujukan kepada madrasah negeri/swasta, yang kini sedang banyak dibutuhkan oleh umumnya keluarga-keluarga miskin yang menginginkan kombinasi pendidikan umum dan agama. Fokusnya akan berupa perbaikan kualitas dan upaya membuat madrasah lebih diterima di masyarakat. Kebutuhan akan pendidikan madrasah tinggi dan terdapat hasil-hasil dalam bidang sosial dan non social yang bisa diharapkan. ADB telah memiliki banyak pengalaman sebelumnya pada subsektor ini. Karena pihak swasta banyak berperan, dukungan ini akan terus terbangun atas kerja ADB sebelumnya dalam memperkuat kemitraan swasta-pemerintah, yakni pendanaan dukungan infrastruktur dan dana blok sekolah.

### **b. Memampukan Pelatihan Pasca Pendidikan Dasar dan Pelatihan Ketrampilan agar Responsif terhadap Pasar**

291. Untuk memperbaiki daya saing angkatan kerja, ADB akan memperkuat pendidikan pasca pendidikan dasar dengan memacu daya tanggap pasar yang lebih besar. Untuk menjamin lulusan SMU yang lebih kompetitif di tingkat regional, beberapa SMU yang dipilih akan dijalankan dengan standar regional, melalui model proyek.

292. Bantuan untuk memperbaiki kualitas program-program universitas diajukan untuk melaksanakan proyek lanjutan pada proyek pengembangan keterampilan profesional dan teknologi. Proyek ini akan mempromosikan perbaikan kualitas, termasuk peningkatan infrastruktur, termasuk memperkuat dan memperluas program-program politeknik, dengan memanfaatkan sistem sumbangan blok yang kompetitif. Pendekatan ini dipelopori ADB untuk memacu perbaikan kualitas dan kebijakan pengembangan tata kelola. Pemberian hibah yang meningkat kini digunakan sebagai bagian dari tahapan dalam sistem institusi pendidikan tinggi yang otonomi. Prioritas menyeluruh yang berjangka lebih panjang di dalam pendidikan

<sup>198</sup> ADB. 2005. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors for the Earthquake and Tsunami Emergency Support Project*. Manila. Hibah 0002, disetujui pada tanggal 7 April 2005 sejumlah \$290 juta.

perguruan tinggi adalah untuk mendefinisikan peranan pemerintah pusat sebagai pihak yang memungkinkan terjadinya sesuatu, bukan sebagai penyedia dominan, dalam hal pendidikan pasca pendidikan dasar dan sistem pelatihan ketrampilan yang lebih tanggap pada pasar.

### c. Mendukung Proses Reformasi yang Sedang Berjalan

293. **Pembangunan Kapasitas Pendidikan Dasar.** Desentralisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan memunculkan tantangan-tantangan baru. Tantangan tersebut antara lain menetapkan peranan yang jelas, struktur tata kelola yang tepat, dan pengaturan pendanaan di semua tingkat pemerintahan; mereformasi struktur dan proses-proses di dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas); meningkatkan sumber daya pendidikan bagi pemerintahan kabupaten dan kota; dan membangun kapasitas untuk menyelenggarakan pendidikan yang terdesentralisasi dan efektif. ADB telah membantu Departemen Pendidikan Nasional merumuskan kebijakan pendanaan pendidikan di tingkat kabupaten, tata kelola dan standar pelayanan minimum melalui dukungan bantuan teknis, di samping mendukung pembangunan ESP. Dukungan ADB terhadap pembangunan kapasitas dan desentralisasi akan berlanjut di bawah TA 4391-INO.<sup>199</sup>

294. **Pengembangan Kebijakan untuk Pasca Pendidikan Dasar.** Reformasi pendidikan yang tengah berlangsung memberi kesempatan kepada ADB untuk menjadi yang terdepan dalam memfasilitasi kebijakan reformasi tata kelola dan lembaga pada tingkat SMU dan perguruan tinggi, yang masih belum terbangun. Langkah-langkah yang memperbaiki partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas layanan pasca pendidikan dasar akan mendukung pengembangan daya tanggap pasar yang lebih baik.

295. ESP yang baru memberikan kesempatan bagi ADB dan mitra-mitra pembangunan lainnya untuk mendukung program reformasi pendidikan yang luas, sebagai bagian dari pendekatan tingkat sektor yang akan mendorong perluasan tata kelola, jaminan kualitas, dan pemantauan antikorupsi.

## 11. Usulan Hasil Sektor yang Dibantu ADB

296. Tabel 6.1 menunjukkan target-target sektor pendidikan untuk CSP. Hasil-hasil sektor didapat dari dokumen-dokumen kebijakan dan strategi pemerintah. Hasil-hasil yang dipilih tersebut adalah yang paling relevan untuk program pendidikan ADB yang sedang berjalan dan direncanakan oleh ADB. Karena didapat dari kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan dan sudah direncanakan, indikator keluarannya merepresentasikan kontribusi yang ADB berikan pada hasil-hasil sektor keseluruhan.

## 12. Peluang untuk Menyelesaikan Masalah Gender dan/atau Lingkungan

297. Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama menyadari kebutuhan untuk dan berkomitmen dalam memperhatikan jender berikut semua dimensinya. RSP 2005-2009 menilai kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan dan, walaupun kesenjangan dalam pengertian akses pendidikan dan prestasi tidak separah di negara-negara lain di Asia, kesenjangan tersebut harus diperkecil dengan memperhatikan hak-hak setara bagi semua penduduk yang dijelaskan di UUD 1945, dan komitmen-komitmen internasional lain yang telah

<sup>199</sup> ADB. 2004. *Technical Assistance to Republic of Indonesia for Support to Decentralized Basic Education Management II*. Manila. TA 4391, disetujui pada tanggal 14 September 2004 sejumlah \$500.000 dan didanai bersama oleh Uni Eropa sejumlah \$6.030.000.

ditandatangani Indonesia seperti Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam penilaian ADB, meskipun pemerintah pusat telah berkomitmen untuk memperhatikan isu-isu jender, terdapat kesadaran atas adanya praktik-praktik sosial dan budaya yang dipandang sulit diubah. ADB berkesempatan untuk memperhatikan isu-isu jender pada operasi di sektor pendidikan yang sedang berjalan dengan mengembangkan rencana aksi jender yang sederhana dan realistis dan dengan memastikan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama memimpin dalam inisiatif ini.

### 13. Aktivitas-aktivitas ADB yang Diusulkan

298. Aktivitas-aktivitas yang diajukan terdiri atas pinjaman untuk pendidikan madrasah untuk tahun 2006, rencana tentatif pada pendidikan menengah atas untuk tahun 2007, bantuan teknis yang diajukan tentang kebijakan dan strategi pembangunan pasca pendidikan dasar untuk tahun 2007, dan pinjaman pendidikan tinggi lanjutan untuk tahun 2009 (didiskusikan dengan Departemen Pendidikan Nasional, tetapi belum dengan BAPPENAS).

- (i) **Proyek Pembangunan Pendidikan Madrasah.** Proyek ini akan mempromosikan integrasi lebih dekat antara madrasah negeri dan madrasah swasta pada semua tingkat ke dalam sistem pendidikan nasional, dan memperbaiki kualitas, keadilan, tata kelola dan manajemen madrasah. Proyek ini akan menghasilkan kualitas pendidikan madrasah yang lebih baik melalui sumber belajar dan mengajar yang lebih baik dan guru yang mendapat pelatihan lebih baik; kesetaraan sosial; manajemen madrasah yang mengalami perbaikan dan keberlanjutan pendanaan dengan mengurangi jenjang pembiayaan di antara sekolah umum dan madrasah dan memperkenalkan manajemen keuangan yang transparan dan menetapkan komite sekolah. Proyek ini dijadwalkan untuk disetujui pada tahun 2006, dengan jumlah dana sekitar \$50 juta.
- (ii) **Proyek Pembangunan Pendidikan Menengah Atas.** Proyek ini akan mendukung pembentukan sekolah pendidikan menengah atas berkinerja tinggi pada pendidikan umum dan kejuruan dan teknis. Hasil dari proyek akan berupa lulusan berkualitas tinggi yang siap untuk meneruskan ke pendidikan perguruan tinggi, dan pekerja berkecakupan dengan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan di sektor-sektor ekonomi pertumbuhan tinggi. Proyek ini akan memperlihatkan hasil-hasil belajar yang lebih baik, manajemen sekolah dan jaminan kualitas yang diperbaiki, kesetaraan lebih baik di tingkat pendidikan menengah atas serta pengembangan dan perencanaan kebijakan yang lebih baik. Pengaturan hubungannya yang kuat dengan sektor swasta akan menjadi hal yang terpenting dalam proyek ini. Proyek ini rencananya akan disetujui pada tahun 2007.
- (iii) **Pengurangan Kemiskinan dan Akselerasi Pencapaian MDG (Kebijakan Pinjaman).** Program ini akan meneruskan dukungan ADB pada pemerintah pusat untuk percepatan pencapaian MDG untuk pendidikan dasar. Program tersebut berusaha menemukan keseimbangan di antara ketiga tujuan berikut ini: (a) kebutuhan mendesak untuk mencapai MDG melalui dukungan anggaran untuk program-program sektoral, (b) memperkuat agenda reformasi kebijakan yang sedang ditangani oleh pemerintah dalam hal berbasis kinerja dan alokasi sumber daya yang berpihak pada kaum miskin di dalam lingkungan yang terdesentralisasi, dan (c) memperkuat kemampuan pemerintah kabupaten untuk mengelola dengan lebih baik fungsi-fungsi wajib mereka pada penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum yang sedang dikembangkan. Matrik sektor pendidikan dasar menggariskan area-area kunci

reformasi yang dimulai pemerintah dan yang didukung ADB untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.

Tabel A4.10: Kerangka Kerja Hasil-hasil Peta Sektor untuk 2006-2009

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Sektor			Keluaran-keluaran CSP	
Hasil Sektor untuk Negara	Peluang dan Hambatan Kunci	Hasil dan Indikator Hasil CSP	Indikator Target (Pelacakan)	Intervensi
Pendaftaran meningkat dan bertahannya murid miskin/pedesaan (di kabupaten terpilih) di pendidikan dasar, hal yang sama pada perempuan dan murid lebih miskin di pasca pendidikan dasar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan pengadaan pendidikan dasar di desa dan kota</li> <li>• Biaya pendidikan dasar adalah hambatan bagi keluarga miskin yang bersekolah terutama di tingkat SMP.</li> <li>• Hambatan biaya adalah penghalang akses adil untuk pascca pendidikan dasar.</li> <li>• Pendidikan perguruan tinggi terkonsentrasi pada sejumlah kecil kota-kota provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95% anak menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2009</li> <li>• Tingkat transisi lebih baik dari tingkat SD ke SMP dan pendaftaran ke SMP meningkat.</li> <li>• Partisipasi perempuan pada jurusan prioritas di universitas terkemuka meningkat 50%</li> <li>• Partisipasi siswa miskin di jurusan universitas terkemuka meningkat 20.000</li> </ul>	<p>Data statistik pendidikan tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan kemajuan ETESP.</li> <li>• Statistik pendidikan provinsi tahunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi</li> <li>• Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah</li> <li>• Proyek Pengembangan Sektor Ketrampilan Profesional dan Teknis</li> <li>• Proyek Pendidikan Dasar (AusAID)</li> <li>• Proyek Pembangunan Pendidikan Tinggi (Bank Dunia)</li> <li>• Bantuan Darurat Gempa dan Tsunami</li> <li>• Proyek-proyek lembaga donor lainnya</li> </ul>
Pemulihan akses ke pendidikan dasar dan menengah di Aceh dan Nias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi program rekonstruksi yang lambat</li> <li>• Proses pengambilan keputusan yang rumit dengan adanya pengaturan implementasi yang baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 sekolah dasar direkonstruksi di Simelue.</li> <li>• 200 sekolah menengah ditingkatkan fasilitas dan bahan belajar mengajarnya.</li> </ul>		

Tabel A4.10 - Lanjutan

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Sektor				Hasil CSP
Hasil Sektor untuk Negara	Peluang dan Hambatan Kunci	Hasil dan Indikator Hasil CSP	Indikator Target (Pelacakan)	Intervensi
<b>Kualitas, Relevansi, dan Daya Kompetisi</b>				
Hasil belajar yang lebih baik bagi siswa miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan prestasi siswa di kota dan desa</li> <li>• Kualitas guru yang buruk di desa dan daerah terpencil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% siswa kelas 9 di sekolah umum lulus UAN di tahun 2008.</li> </ul>	Data tahunan dari Dewan UAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi</li> <li>• Proyek Pendidikan Menengah Atas</li> <li>• Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah</li> <li>• Proyek Pendidikan Dasar (AusAID)</li> <li>• Proyek Pendidikan yang Terdesentralisasi (USAID)</li> </ul>
Hasil Sektor untuk Negara	Peluang dan Hambatan Kunci	Hasil dan Indikator Hasil CSP	Indikator Target (Pelacakan)	Intervensi
Meningkatnya relevansi dan daya kompetisi lulusan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan madrasah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada daya kompetisi pasar lulusan pada pasar tenaga kerja nasional dan regional.</li> <li>• Kualitas pendidikan madrasah yang buruk, terutama kualitas guru dan fasilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekitar 100 SMU terpilih mulai proses pembinaan untuk standar internasional</li> <li>• Guru dan fasilitas madrasah di 23 kabupaten sedang dalam proses pembinaan.</li> <li>• Bidang studi prioritas di universitas negeri diperkuat</li> </ul>	Laporan triwulan dari MEDP, DSSE, dan TPSDP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek Pendidikan Menengah Atas</li> <li>• Proyek Pengembangan Ketrampilan Profesional dan Teknis</li> <li>• Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah</li> <li>• MEDP</li> <li>• Program Bantuan Belajar untuk Sekolah Islam (AusAID)</li> <li>• Proyek Pendidikan Dasar (AusAID)</li> </ul>

Tabel A4.10 – Lanjutan

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Sektor				Hasil CSP
Hasil Sektor untuk Negara	Peluang dan Hambatan Kunci	Hasil dan Indikator hasil CSP	Indikator Target (Pelacakan)	Intervensi
<b>Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Pemerintah</b>				
Manajemen yang diperkuat dari pelayanan pendidikan yang terdesentralisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas pemerintah daerah yang lemah untuk merencanakan, mengelola dan memantau perbaikan kinerja pelayanan pendidikan</li> <li>Organisasi fungsi pusat dan daerah dan kewajiban-kewajiban tidak selaras dengan baik dengan kebutuhan perencanaan dan manajemen sektor yang efektif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana dan strategi pendanaan pembangunan pendidikan di kabupaten</li> <li>Kabupaten mengeluarkan laporan kinerja sektor</li> <li>Meningkatkan kapasitas Departemen Pendidikan Nasional pusat dalam mengelola proses kajian sektor, termasuk koordinasi kebijakan sektor luas, perencanaan strategis dan pendanaan</li> </ul>	Rencana pembangunan kapasitas multitahun terbentuk. Rencana aksi untuk implementasi penetapan target yang terkait dengan MSS dan rating kinerja kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyek Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi</li> <li>Dukungan untuk Manajemen Pendidikan yang Terdesentralisasi II</li> <li>Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah</li> <li>Proyek Pendidikan Dasar (AusAID)</li> </ul>

Tabel A4.10 – Lanjutan

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Sektor				Hasil CSP
Hasil Sektor untuk Negara	Peluang dan Hambatan Utama	Hasil CSP dan Indikator Hasil	Indikator Tahpan Utama (Pelacakan)	Intervensi
<b>Ekspansi dan Kesetaraan</b> Tata kelola sekolah/ masyarakat yang diperkuat dan manajemen berbasis sekolah yang diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat yang lebih besar diperlukan di sekolah dan madrasah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dan memperbaiki kualitas dan relevansi</li> <li>Perencanaan, manajemen, dan pemantauan berbasis sekolah dan institusi tetap lemah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70% sekolah DBEP dan 50% madrasah MEDP memiliki komite sekolah yang rapat setiap bulan</li> <li>95% sekolah DBEP dan 95% madrasah memiliki rencana pembangunan sekolah</li> <li>Beberapa universitas terpilih memiliki tata kelola dan manajemen yang kuat, dan memenuhi kriteria status otonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan triwulan kemajuan proyek dan laporan evaluasi mandiri dari DBEP, MEDP, TPSDP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyek Education Dasar yang Terdesentralisasi</li> <li>Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah</li> <li>Proyek Pengembangan Ketrampilan Profesional dan Teknis</li> <li>Program Bantuan Belajar untuk Sekolah Islam (AusAID)</li> <li>Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi (USAID)</li> <li>Proyek Pengembangan Pendidikan Tinggi (Bank Dunia)</li> </ul>

BEP = Program Pendidikan Dasar (AUSAID), DBE = Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi (USAID), DPEB = Pinjaman 1863-INO: Proyek Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi (2002-2006), ETESP = Dana 0002-INO: Proyek Dukungan Darurat Gempa dan Tsunami, HEDP = Proyek Pembangunan Pendidikan Tinggi (Bank Dunia), LAPIS = Program Bantuan Belajar untuk Sekolah Islam (AusAID), MEDP = Proyek Pembangunan Pendidikan Madrasah. SDEM II I =ADTA 4391-INO; Dukungan untuk Manajemen Pendidikan yang Terdesentralisasi II (2003-2008), SSSE = Proyek Pendidikan Menengah Atas Kedua, TPSDP = Pinjaman 1792-INO : Proyek Pembangunan Ketrampilan Profesional dan Teknologi (2001-2007)

Sumber :ADB

## **I. Sektor Kesehatan**

### **1. Pendahuluan**

299. Tujuan dokumen ini adalah untuk menggambarkan isu dan tantangan utama di sektor kesehatan, tanggapan pemerintah pusat terhadap tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana ADB mengajukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan untuk menangani tantangan tersebut di tahun 2006-2009.

300. Sebuah rencana telah dikembangkan dengan menggunakan data sekunder dan tinjauan atas situasi pelayanan kesehatan, dan dari pengetahuan langsung tentang keadaan di Indonesia. Pada saat persiapan, tidak pernah diadakan diskusi antara spesialis sektor ADB dan departemen dan badan pemerintah pusat yang terkait.

### **2. Ikhtisar Analisis Situasi**

301. Hasil di bidang kesehatan meningkat cukup signifikan pada tahun 1970-1990. Pada tahun 1970-an, pemerintah pusat mendukung penanaman modal untuk memperbaiki akses pelayanan kesehatan dasar, saat banyak pusat kesehatan dan fasilitas kesehatan baru dibangun, dan staf dokter dan paramedis ditempatkan dekat dengan masyarakat. Pada saat yang sama, program keluarga berencana yang efektif ditetapkan dan program-program kesehatan masyarakat dipercepat. Pada tahun 1980-an, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sumber daya di bidang pelayanan kesehatan berkembang, berikut tambahan investasi yang ditanamkan di sektor ini.

302. Indonesia mungkin tidak mencapai seluruh MDG yang berkaitan dengan kesehatan. Sejak krisis terjadi di Asia pada tahun 1990-an, peningkatan hasil di sektor kesehatan menjadi lambat sebagai akibat dari menurunnya pendapatan rumah tangga, meningkatnya pengeluaran kesehatan, dan berkurangnya sumber daya sektor pemerintah di bidang kesehatan. Dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki pendapatan serupa di Asia Timur dan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tingkat kematian ibu yang lebih tinggi, kasus anak kekurangan gizi yang lebih tinggi, dan kasus penyakit TBC di kalangan dewasa yang lebih tinggi. Selama dekade belakangan ini, tingkat kematian bayi (IMR) per 1000 kelahiran hidup menurun setengahnya dari 60 di tahun 1990 menjadi 35 di tahun 2002, dan tetap berada di tingkat rata-rata untuk kawasan Asia Timur dan Tenggara. Akan tetapi, status kesehatan wanita masih termasuk yang terburuk pada kawasan tersebut. Pada tahun 2000, rasio kematian ibu (Maternal Mortality Ratio/MMR) adalah 307 kematian per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas rata-rata rasio yang ada di kawasan tersebut. Masyarakat internasional khawatir bahwa Indonesia mungkin tidak memenuhi semua MDG yang berkaitan dengan kesehatan.

**Tabel A4.11: Indonesia, MDG yang Berkaitan dengan Kesehatan**

Sasaran yang Relevan dengan Kesehatan	Tahun			Status Kemajuan	Sasaran 2015
	1988 -	1993 -	1998- 2002		
Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	--	334	307	Perbaikan Lambat	90
Tingkat Kematian Anak (per 1.000 kelahiran hidup)	91	--	45	Sesuai jadwal	30
Tingkat Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	60	46	35	Sesuai jadwal	20
Berat badan kurang pada balita (%)	37		27	Membaik tapi kadang menurun.	
Keterlambatan pertumbuhan pada balita (%)	--		40	Tidak berubah	
Kasus HIV/AIDS, perempuan (% 15-24 tahun)	--	--	0,06		<0,06

Catatan: -- = tidak ada; HIV/AIDS = human immunodeficiency virus / acquired immunodeficiency syndrome

<sup>a</sup> Tahun mengindikasikan periode kalender perkiraan.

Sumber: Survei Kesehatan Demografi (1997 dan 2003) UNICEF. WHO. World Bank.

### 3. Isu Pembangunan dan Tantangan Utama

303. Pengeluaran Indonesia dalam pelayanan kesehatan masih lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara tetangganya – sekitar 3,1% dari PDB pada tahun 2004 dibandingkan dengan rata-rata 5% di Asia Timur dan Asia Tenggara. WHO menyarankan bahwa 5% dari PDB harus dialokasikan untuk kesehatan.

304. Rendahnya alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan berakibat buruk pada kinerja sistem kesehatan. Secara keseluruhan sumber daya di sektor kesehatan meningkat dari 1,6% dari PDB di tahun 1995 menjadi 3,1% di tahun 2004, tetapi kontribusi sektor pemerintah menurun dari 46% menjadi 34%. Sektor pemerintah menyumbangkan 1,1% dari PDB di tahun 2004. Dari total pembelanjaan pemerintah, hanya 2% dialokasikan untuk kesehatan di tahun 2004. Pada tahun 2004 belanja kesehatan per kapita sekitar 30% per tahun.

305. Tidak mencukupinya pendanaan terus menerus terjadi pada infrastruktur dan operasi kesehatan. Penurunan signifikan dalam sumber daya, dan kurangnya pendanaan pemerintah pada dekade yang lalu, berakibat buruk pada pembangunan infrastruktur, biaya operasional fasilitas kesehatan, dan mempertahankan (retention) staf sektor pemerintah. Banyak fasilitas kesehatan pemerintah kini mengalami kerusakan pada gedung-gedungnya, dan lebih dari itu, banyak yang tidak memiliki anggaran operasional untuk pemeliharaan gedung, atau perbaikan perlengkapan dan terutamanya menghadapi kekurangan obat-obatan. Banyak fasilitas kesehatan, terutama yang ada di daerah terpencil, menghadapi kondisi yang lebih parah. Pendanaan eksternal sektor kesehatan secara keseluruhan masih rendah (10% sebelum 1997), tetapi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap investasi pembangunan di sektor pemerintah.

306. Belanja kesehatan pemerintah daerah dalam hal pelayanan kesehatan belum merata. Karena desentralisasi, sumber daya pendanaan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat

dan pemerintah kabupaten: pemerintah pusat menyumbangkan kira-kira 70%,<sup>1</sup> sedangkan pemerintah kabupaten menyumbangkan 30%. Desentralisasi juga telah menyebabkan ketidaksamaan penyediaan sumber daya perawatan kesehatan di daerah. Tidak banyak dukungan keuangan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi untuk mengatasi kendala sumber daya ini.

307. Kapasitas efektif pemerintah dalam desentralisasi lemah. Indonesia mulai proses desentralisasi sejak tahun 2001. Meskipun desentralisasi telah memberikan otonomi pada pemerintah daerah, terutama dalam hal penyediaan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah perlu membangun kapasitas kelembagaan, meredistribusi dan memperbaiki kombinasi ketrampilan penyedia pelayanan kesehatan, perencana dan pengelola kesehatan, dan untuk memperbaiki sistem perencanaan, akuntabilitas dan transparansi.

308. Orang-orang, terutama yang miskin dan hampir miskin (keduanya berjumlah lebih dari 25% dari populasi), memikul beban biaya perawatan kesehatan yang besar. Masyarakat memiliki kesempatan terbatas untuk ikut serta dalam berbagai skema berbagi risiko kesehatan. Sebagai akibatnya mereka harus menanggung biaya tinggi apabila terkena penyakit berat. Mereka menggunakan pelayanan kesehatan sektor swasta dan membeli obat dari apotik swasta yang penetapan harganya tidak diatur oleh pemerintah. Mereka juga harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapat akses perawatan kesehatan. Apabila pelayanan rumah sakit, obat, dan perjalanan untuk mendapatkan akses pelayanan dijumlahkan, semuanya mencapai 70% dari total pengeluaran kesehatan.

#### **4. Kerangka Kebijakan dan Perencanaan**

309. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah prioritas pemerintah pusat, dan telah digariskan pada program-program pembangunan kesehatan untuk dilaksanakan selama 5 tahun. Selanjutnya, Rencana Strategis Departemen Kesehatan untuk tahun 2005-2009 telah menggambarkan aktivitas-aktivitas spesifik untuk didanai Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan telah menyusun rencana kerja dan anggaran yang diperlukan untuk tahun 2005-2006.

310. Pada dokumen-dokumen tersebut, Departemen Kesehatan menekankan beberapa prioritas utama seperti (i) mengurangi kesenjangan pada hasil kesehatan; (ii) memfokuskan pada beban ganda penyakit (kemunculan kembali atau kemunculan baru penyakit yang menular dan tidak menular); (iii) memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan (termasuk distribusi tenaga kesehatan), terutama dalam mengatasi kebutuhan masyarakat di tempat terpencil dan yang belum terlayani; (iv) memperbaiki efisiensi proses perencanaan dan anggaran, terutama di tingkat kabupaten; (v) program berbasis bukti, dan memperbaiki pemantauan dan evaluasi; dan (vi) memperkuat peranan Departemen Kesehatan (dalam hal kebijakan, pendukung, dan fasilitas).

311. Strategi Departemen Kesehatan meliputi empat bidang utama: (i) memobilisasi dan memberdayakan masyarakat; (ii) memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan; (iii) memperbaiki sistem pengawasan kesehatan, pemantauan, dan informasi kesehatan; dan (iv) meningkatkan pendanaan kesehatan. Meskipun strategi tersebut sudah memiliki arah yang tepat, tetapi belum

---

<sup>1</sup> Dana mengalir pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk sumber daya terpadu untuk operasi dan pemeliharaan dan sumber daya terikat untuk infrastruktur. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak dilengkapi dengan pedoman penggunaan sumber daya dan karenanya menciptakan isu-isu kebutuhan sumber daya kesehatan.

tentu SMART.<sup>2</sup> ADB dapat membantu pemerintah pusat untuk menyempurnakan kebijakan kesehatan dan menyederhanakan strategi kesehatan dengan aktivitas, anggaran, dan rentang waktu yang spesifik dan ditargetkan. Departemen Kesehatan mungkin memerlukan bantuan untuk menyusun rencana pengeluaran jangka menengah (MTEF).

312. Pada tahun 2005, Departemen Kesehatan memperkenalkan tiga program utama yang berfokus pada MDG: (i) Inisiatif Nasional untuk Keselamatan Ibu, (ii) Manajemen Terintegrasi untuk Penyakit Anak (IMCI), dan (iii) Rencana Gizi Nasional. Pemerintah juga memfokuskan diri untuk inisiatif mengurangi penyebaran penyakit menular. ADB dapat memberikan bantuan untuk membantu pemerintah pusat mencapai MDG.

313. Pada tahun 2005, sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM, pemerintah pusat memperkenalkan suatu program untuk mensubsidi biaya perawatan kesehatan untuk kaum miskin melalui program Kartu Askes Gankin. Program tersebut juga mendukung program asuransi kesehatan sosial yang dibiayai oleh Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 2004. Pemerintah pusat bertujuan mencakup kaum miskin (hidup dengan biaya di bawah \$ 1 sehari) dan kaum hampir miskin (hidup dengan biaya di bawah \$ 2 sehari) dengan program ini untuk memberikan perawatan kesehatan primer, dan mensubsidi perawatan kesehatan sekunder. Namun, program tersebut perlu memperbaiki metodologi target untuk memastikan kaum miskin terlayani. Program ini masih kekurangan dana dan belum bisa mengatasi biaya perawatan kesehatan kaum miskin. Selain itu, pihak ketiga yakni lembaga asuransi – PT Askes – perlu memperkuat lembaganya melalui kebijakan dan reformasi yang terprogram. ADB dapat memberikan bantuan untuk memperkuat lembaga-lembaga seperti itu.

314. Dana kesehatan nasional tersedia. Namun, karena pemerintah kabupaten dapat menyediakan sedikitnya 30% dana pemerintah untuk bidang kesehatan, dan swasta menyediakan hingga 70% belanja kesehatan, penting untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada untuk mendukung pola pengeluaran yang lebih bijaksana.

## 5. Pengaturan Kelembagaan

315. Pelaksanaan pembangunan oleh tingkat pemerintah yang berbeda-beda mengharuskan mereka mengidentifikasi peranan mereka masing-masing di dalam kerangka kerja yang terdesentralisasi. Adanya devolusi, strategi untuk memperkuat kapasitas manajemen pada administrasi kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten sangat penting. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyusun kebijakan, peraturan, standar dan pedoman, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau, sedangkan pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Fungsi-fungsi pemerintah yang terdesentralisasi tersebut dapat ditingkatkan secara drastis melalui penyusunan kerangka pedoman pusat yang menetapkan dengan jelas tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Desentralisasi juga akan berfungsi dengan baik apabila dikembangkan tata kelola yang lebih baik, dan ketrampilan yang tepat.

316. Lembaga-lembaga pemerintah pusat perlu direformasi. Departemen Kesehatan berjuang untuk memiliki arah yang jelas. Meskipun Departemen Kesehatan telah mengidentifikasi bidang kunci pada strategi nasional, aktivitas-aktivitas reformasi yang terperinci tidak bisa diidentifikasi tanpa data yang tepat atas situasi saat ini (dan oleh karena itu target bisa dicapai), dan karenanya diperlukan sumber daya (karena informasi yang tidak cukup

---

<sup>2</sup> SMART = specific, measurable, achievable, realistic, time bound (spesifik, dapat diukur, dapat diraih, realistis, dan terikat waktu).

terutama dalam hal sumber pendanaan pemerintah daerah). Pasca desentralisasi, Departemen Kesehatan masih berjuang untuk mengidentifikasi peranannya; dan untuk mereformasi lembaga-lembaga pusat supaya mematuhi mandat mereka akan kebijakan, pendudukan, dan pemantauan. Departemen Kesehatan pusat belum mempersiapkan strategi untuk mereformasi dirinya, dalam memperkuat lembaga-lembaga pusat dan mengkombinasikan ketrampilan para staf untuk menghadapi peranan baru mereka. Proyek-proyek yang didanai secara eksternal acap kali memberikan dorongan pada pendudukan dan untuk mendefinisikan dan memperkuat peranan pemerintah daerah, namun hanya sedikit dukungan yang diberikan (atau diterima) reformasi pemerintah pusat untuk menyesuaikan diri pada peranan barunya dalam desentralisasi.

317. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah memerlukan integrasi. Meskipun penyelenggaraan pelayanan kesehatan telah didesentralisasi (oleh Departemen Kesehatan) pada tahap awal desentralisasi, BKKBN baru baru ini mendesentralisasi aktivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan mereka. Aktivitas BKKBN akan diintegrasikan di dalam sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan, stafnya akan dilatih kembali sebagai pemberi pelayanan yang terintegrasi (bukan vertikal), dan staf sektor kesehatan dilatih kembali untuk mengakomodasi pelayanan KB. DHS2 yang didanai ADB merupakan salah satu mitra pembangunan pertama yang mendukung integrasi ini pada tingkat pemerintah daerah, dan berusaha untuk menjembatani hubungan antara lembaga-lembaga pusat (Departemen Kesehatan dan BKKBN saat ini secara vertikal dijalankan pada tingkat pusat).

318. Sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan memerlukan penyaluran kembali dan penguatan kualitas. Sejak devolusi, tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan berada pada pemerintahan daerah (kabupaten). Saat ini sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpisah-pisah, karena manajemen dan pendanaan pelayanan tersebut terbagi-bagi di bawah tingkat-tingkat pelaksana yang berbeda-beda (pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat). Selain itu, Indonesia mengalami beban ganda atas penyakit yang muncul dan memerlukan kombinasi pelayanan yang tepat dengan ketrampilan staf yang cukup untuk memperhatikan hal tersebut. Beberapa proyek yang didanai secara eksternal kini mendukung usaha tersebut, karena devolusi ada hingga tingkat kabupaten (ada sekitar 33 provinsi dan 450 kabupaten di Indonesia). (Peta A.1)

319. Kolaborasi sektor pemerintah-swasta dapat meningkatkan area yang dapat diliput. Akibat menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas pemerintah, saat ini, banyak penduduk yang menggunakan fasilitas kesehatan swasta, dan di beberapa provinsi, sebanyak 70% populasi menggunakan fasilitas kesehatan swasta. Meskipun itu terjadi, tidak ada rencana komprehensif pada perencanaan pelayanan kesehatan (baik sektor pemerintah maupun swasta), dan sedikit upaya yang dilakukan sektor pemerintah untuk memulai dialog untuk mempertimbangkan kombinasi pemerintah-swasta pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan besarnya kapasitas sektor pemerintah (dan LSM) pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan besarnya pemanfaatan fasilitas kesehatan swasta oleh masyarakat, pemerintah pusat dapat bekerja lebih erat dengan sektor swasta dan LSM dalam memperbaiki akses pelayanan kesehatan berkualitas yang tepat dan daya jangkauan masyarakat untuk mendapatkannya. Peraturan-peraturan yang tepat untuk standarisasi dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang baik. Pemerintah pusat selama ini kurang begitu antusias dalam menerima bantuan pada bidang ini.

320. Memperkuat komitmen pada bidang kesehatan di tingkat daerah dapat memperbaiki sumber daya O&M. Isu-isu sistemik dan hambatan-hambatan desentralisasi telah memberikan tantangan bagi Indonesia dalam mengimplementasikan banyak program kesehatan mereka.

Sektor ini secara keseluruhan menghadapi kendala sumber daya yang serius, yang khususnya dirasakan dalam hal anggaran. Desentralisasi telah mengakibatkan kelambanan kinerja beberapa program, karena tanggung jawab pelaksanaan program berada di tangan pemerintah kabupaten, dan bukan di tangan pemerintah pusat; sedangkan komitmen program tersebut dari pemerintah pusat tidak selalu sampai ke tingkat daerah. Tidak tersedia sistem pemantauan, sehingga data tidak bisa diandalkan untuk melacak kelemahan atau dampak program pada penerimanya.

321. Anggaran berbasis kinerja dapat memperbaiki efisiensi. Sumber daya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan terutamanya berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten dan DPRD. Terserah pada Dinas Kesehatan kabupaten untuk menegosiasikan paket sumber daya yang tepat untuk kesehatan. Pada kebanyakan kasus, kekuatan negosiasi, bukannya kebutuhan perawatan kesehatan atau kinerja, yang selama ini menjadi faktor penentu besarnya paket sumber daya kesehatan di setiap kabupaten. Dinas kesehatan kabupaten tidak mempunyai kapasitas untuk merencanakan, membuat anggaran, dan mengelola dana mereka. Pemerintah pusat juga mendukung anggaran berbasis kinerja, yang akan membantu alokasi anggaran berbasis kebutuhan. Namun, harus dibangun terlebih dahulu kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola proses tersebut. Melalui beragam proyek dari dana eksternal, kini kapasitas kabupaten sedang diperkuat agar mampu menyusun perencanaan yang efektif dan penggunaan sumber daya kesehatan yang terbatas secara lebih bijaksana. Selain itu, pemerintah pusat mengharapkan untuk beralih menuju sistem anggaran terpadu agar dapat mencapai efisiensi.

322. Dapat dipertimbangkan pendanaan alternatif untuk mengurangi ketidakmerataan sumber daya. Pengeluaran sektor pemerintah yang rendah di bidang kesehatan lebih dirasakan di beberapa kabupaten dibandingkan di kabupaten yang lain. Propinsi (dibandingkan kabupaten) menerima dukungan anggaran pemerintah pusat yang terbatas, karena tanggung jawab kemudian diteruskan pada tingkat kabupaten. Dana yang mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten berbentuk sumber daya tidak mengikat (DAU) untuk operasional dan pemeliharaan, dan sumber daya mengikat (DAK) untuk pembangunan infrastruktur. DAU tidak dialokasikan untuk kesehatan, tidak dilengkapi dengan pedoman penggunaan sumber daya dan peraturan pemerintah pendukung yang tepat tidak ada. Akibatnya, beberapa kabupaten mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk perawatan kesehatan dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya, tetapi kabupaten dengan surplus sumber daya tidak memiliki fleksibilitas untuk berbagi sumber daya antar kabupaten (tidak ada dana pemerataan). Pemerintah pusat harus memberikan pilihan pendanaan (seperti suatu bentuk dana pemerataan) untuk mengurangi ketidakmerataan sumber daya yang terjadi karena desentralisasi, supaya dana yang cukup dapat mengalir untuk mengatasi kekurangan.

323. Mengurangi pengeluaran yang bisa diganti dapat memperbaiki jangkauan kaum miskin. Daya jangkau untuk mendapat pelayanan kesehatan adalah hal penting, terutama di antara kelompok-kelompok yang lemah. Perawatan kesehatan semua pegawai pemerintah, pensiunan dan keluarga mereka ditanggung melalui skema asuransi kesehatan pegawai negeri (PT-Askes). Pegawai swasta dijamin melalui skema asuransi kesehatan wajib (PT Jamsostek), tetapi besarnya tanggungan masih tetap rendah. Pemerintah pusat baru-baru ini mengeluarkan undang-undang asuransi sosial, yang meliputi skema asuransi kesehatan sosial, namun mekanisme operasionalnya belum jelas. Harus dikembangkan kerangka peraturan tingkat menengah, untuk menciptakan sistem perawatan kesehatan yang dapat diakses oleh kaum lemah, dan harus dilaksanakan dengan segera. Dukungan terbatas diberikan pada bidang ini melalui proyek-proyek yang didanai secara eksternal.

## 6. Peranan Mitra Pembangunan

324. Mitra-mitra pembangunan utama di bidang kesehatan selama 15 tahun ini antara lain ADB, Bank Dunia, USAID, Austria, dan Republik Korea (Tabel. A6.12). Bank-bank multilateral merupakan mitra pembangunan utama yang menyediakan bantuan untuk pembangunan infrastruktur, karena kebanyakan mitra pembangunan lainnya memberikan hanya dana TA (Peta A.1, yang mengindikasikan di mana berbagai mitra memberikan dukungan untuk kesehatan, dan Lampiran 3 ADB. 2003. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors for Proposed Loan to the Republic of Indonesia for the Second Decentralized Health Services*. Manila. Pinjaman 2074-2075, disetujui pada tanggal 19 Desember 2003 dengan jumlah sebesar \$ 100 juta.

**Tabel A4.12: Bantuan Lembaga Donor Internasional untuk Dukungan Sektor Kesehatan di Indonesia (1991-2006)**

Mitra Pembangunan	\$ Juta
ADB	832
IBRD	592
IDA	31
Austria	155
USAID	135
Republik Korea	107
Preancis	75
AusAID	60
JBIC	55
JICA	13

ADB = Asian Development Bank, AusAID = Australian Agency for International Development, IBRD = International Bank for Reconstruction and Development, IDA = International Development Assistance, JBIC = Japan Bank for International Corporation, JICA = Japan International Cooperation Agency, USAID = United States Agency for International Development.

Catatan: ini tidak mencakup proyek dalam rencana dan yang belum disetujui.

325. Pendekatan di tingkat sektor kini sedang dikembangkan di dua provinsi di Indonesia bagian timur (NTT dan NTB), oleh mitra-mitra pembangunan yang mencakup pemerintah daerah dari kedua provinsi, ADB, GTZ, KfW, Perancis, AusAID dan lainnya. Keduanya adalah provinsi di mana DHS-2 yang didanai ADB aktif, dan melalui DHS tersebut ADB berpartisipasi dalam SWAP untuk kesehatan. Kebanyakan mitra pembangunan akan memberikan dukungan keuangan untuk bantuan teknis, dan untuk perlengkapan pelayanan kesehatan dasar. ADB dilihat sebagai mitra pelengkap pembangunan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. ADB juga telah memberikan bantuan pada aktivitas-aktivitas SWAP melalui konsultan dari TA 3579-INO (didanai bersama oleh ADB dan AusAID, dan terlampir pada Proyek Pelayanan Kesehatan yang Terdesentralisasi 1 dan 2).

326. Terdapat forum lembaga donor di sektor kesehatan, yang seharusnya dipimpin oleh Departemen Kesehatan dalam hal koordinasi, tetapi kerap kali pertemuan-pertemuan dikoordinasi oleh mitra-mitra pembangunan (secara bergiliran) dan di mana perwakilan kunci dari Departemen Kesehatan tidak selalu hadir untuk berdialog (yang hadir justru staff level bawah yang ikut serta untuk mencatat). Tidak adanya sektor spesialis ADB di Indonesia sering berarti bahwa ADB tidak bisa berkontribusi secara substansial pada forum-forum ini.

327. ADB memiliki peranan yang penting di Indonesia, tetapi ia perlu bekerja dengan lebih dekat lagi dengan mitra pembangunan lain jika ingin berkontribusi dengan efektif pada agenda reformasi yang substansial, yang memerlukan 20 tahun atau lebih untuk perencanaan dan pengimplementasian. Kepercayaan strategis dan reformasi agendanya merupakan prioritas nyata ADB, sedangkan yang kedua merupakan agenda yang lebih luas dan berjangka panjang, di mana ADB juga berperan dalam beberapa area terpilih yang berkaitan dengan keahliannya dalam tata kelola dan pendanaan, dan ketika kesempatan muncul dengan mitra-mitra pembangunan. Area ini akan memerlukan dokumen lebih lanjut dan dieksplorasi di bulan-bulan mendatang.

## **7. Kapasitas dan Pendekatan Pengelolaan Hasil Pembangunan Sektor ini**

328. Biro Pusat Statistik (BPS) sekarang ini sedang melaksanakan survei SUSENAS tahunan. Survei tersebut memberikan informasi tentang penggunaan pelayanan kesehatan berdasarkan pendapatan masyarakat dan penyedia pelayanan kesehatan. Namun, data tersebut tidak mewakili yang terjadi di tingkat kabupaten, dan karena Indonesia telah terdesentralisasi hingga tingkat kabupaten dan memerlukan data pada tingkat kabupaten untuk pengambilan keputusan, disarankan agar kerangka kerja pengambilan sampel SUSENAS ditinjau ulang.

329. Desentralisasi membuat Sistem Informasi Kesehatan menjadi terfragmentasi, dan data tidak dikumpulkan atau dianalisis untuk pengambilan keputusan. Pusat Pengendalian Penyakit pemerintah pusat telah membangun suatu model sistem pengawasan epidemiologi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dimana epidemi penyakit menular dapat dideteksi secara dini dan situasi dipantau secara seksama di lapangan. Namun, sistem ini tidak berfungsi di seluruh penjuru negeri. WHO dan organisasi-organisasi lain mendukung inisiatif seperti ini.

330. Data kinerja sistem kesehatan tidak dikumpulkan secara sistematis sehingga menyebabkan terbatasnya pengembangan kebijakan berbasis bukti. Pada bidang ini tampaknya upaya bersifat terbatas, meskipun DHS2 yang didanai ADB mendukung penguatan HMIS berbasis fasilitas, terutama dengan Strategi Kesehatan Nasional yang baru-baru ini memprioritaskan penguatan sistem informasi kesehatan.

331. Dengan status basis informasi, Departemen Kesehatan tidak berada pada situasi yang membuatnya mengandalkan pengembangan kebijakan berbasis bukti. Namun, dengan bantuan para mitra pembangunan, dalam beberapa tahun mendatang kita bisa mulai melihat pendataan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan.

## **8. Keberhasilan dan Pelajaran yang Dipetik ADB pada Sektor ini**

332. Proyek-proyek reformasi sektor kesehatan selama ini umumnya sulit diimplementasikan di bawah lingkungan desentralisasi, karena Indonesia belum memiliki kapasitas pada tingkat pemerintah daerah untuk implementasinya, dan pada tingkat pusat belum ada arah kebijakan strategis yang ditawarkan.

333. Departemen Kesehatan belum menjalankan reformasi kelembagaan atau menggunakan/memperkuat kombinasi ketrampilan untuk menghadapi peranan barunya. Oleh karena itu, sulit bagi proyek-proyek untuk menerima bimbingan yang tepat dari staf mereka, atau untuk berdialog dengan mereka untuk menggerakkan agenda reformasi ke depan.

334. Departemen Keuangan telah mendukung penggunaan yang rendah untuk bantuan teknis di bawah proyek pinjaman, dan khususnya ia tidak mau merekrut konsultan internasional. Indonesia adalah negara yang besar, dan memiliki kebutuhan yang tinggi. Namun, itu bukan berarti mudah untuk menemukan konsultan dengan ketrampilan dan keahlian internasional di negara ini.

335. Staf unit implementasi proyek (PIU) pemerintah pusat seringkali tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan, bahkan mengenai prosedur pengadaan dan manajemen keuangan pemerintah mereka sendiri. Meskipun ADB memberikan pelatihan prosedur ADB pada staf PIU, pergantian staf, terutama pada tingkat daerah, cukup sering terjadi.

336. Selain itu, proses dan siklus anggaran di Indonesia selama ini telah sangat menghambat kelancaran pelaksanaan proyek. Sistem manajemen keuangan Departemen Keuangan seharusnya bisa menjamin distribusi sumber daya yang tepat waktu serta transparansi. Namun, pemerintah daerah masih tidak memiliki kapasitas untuk menggunakan sistem yang baru, dan akan membutuhkan beberapa tahun lagi hingga fungsinya berjalan dengan efisien. Hal ini menyebabkan berbagai keterlambatan di dalam implementasi dan pembayaran proyek.

337. Audit eksternal proyek seringkali melaporkan adanya korupsi dan kolusi, terutama pada tingkat pemerintah daerah. Ini bukan lagi hal yang unik pada proyek-proyek sektor kesehatan. Dengan adanya desentralisasi hingga ke tingkat pemerintah kabupaten, pemantauan keberadaan masalah-masalah tersebut secara dini seringkali sulit dilakukan. Namun, dengan bantuan misi penduduk, beberapa langkah telah diambil untuk menciptakan deteksi dini terhadap masalah tersebut, dan membantu membangun sistem dengan akuntabilitas.

338. ADB selama ini telah aktif dalam memberikan dukungan pada sektor kesehatan di Indonesia sejak tahun 1990. Oleh karena itu, ADB memiliki hubungan yang baik dan kuat dengan Departemen Kesehatan dan lembaga terkait lainnya di Indonesia. Banyak reformasi yang dilakukan di bawah proyek-proyek yang didanai ADB yang seringkali dikutip pada banyak referensi, terutama Proyek Jaringan Pengaman Sosial yang ada sejak pertengahan tahun 1990an.

339. ADB, dan dukungannya terhadap sektor kesehatan, telah membantu mengatasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tertinggal dan memperbaiki efisiensi sektor kesehatan. Namun, bantuan tersebut memfokuskan pada akses dan penyelenggaraan pelayanan, daripada berkontribusi pada pendekatan reformasi yang lebih komprehensif yang didukung oleh mitra-mitra pembangunan, untuk menjamin hasil-hasil yang berkelanjutan.

340. Pengalaman awal ADB dengan proyek-proyek kesehatan yang terdesentralisasi telah mengajarkan kepada kita bahwasanya penting bagi pemerintah pusat untuk menetapkan parameter, dan membangun kapasitas pelaksanaan yang kuat pada tingkat daerah. Kedua hal tersebut perlu ditempatkan di dalam keseluruhan konteks reformasi sektor kesehatan. Khususnya, usaha-usaha untuk memperbaiki akses bagi masyarakat tertinggal harus disertai dengan reformasi kebijakan dan pembangunan kapasitas untuk mempertahankan dampaknya. Oleh karena itu, dan juga karena terkadang lokasi-lokasi terpencil masyarakat tertinggal tersebut, suatu modalitas program harus dipilih. Pada kelanjutannya dalam dialog, ADB berhasil menggerakkan agenda ke depan tentang reformasi kebijakan melalui proyek-proyeknya, dan membantu membangun kapasitas pemerintah daerah untuk kinerja sistem kesehatan yang lebih baik.

## 9. Operasi dan Komitmen-komitmen ADB Saat Ini

341. Sejak tahun 1980, ADB telah menyediakan bantuan pada sektor kesehatan melalui bantuan teknis yang pertama pada bulan Juli 1980. Bantuan ADB untuk pinjaman di sektor kesehatan dimulai sejak Oktober 1985. Sejak tahun 1980an, ADB telah memberikan \$853 juta dalam bentuk pinjaman, dan \$9,5 dalam bentuk dana hibah pada sektor kesehatan di Indonesia. Dua proyek pinjaman yang sedang berjalan saat ini membantu pemerintah dalam memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan yang terdesentralisasi. Rangkaian selanjutnya dari proyek-proyek kesehatan yang sedang dipertimbangkan memfokuskan pada area gizi, dan penyakit menular, dan penguatan kebijakan kesehatan. Proyek-proyek pinjaman dan bantuan teknis ADB yang sedang berjalan ditampilkan pada Tabel. A6.13.

**Tabel A4.13: Indonesia, Bantuan ADB pada Sektor Kesehatan (September 2005)**

Item	Bantuan dalam \$ juta	
	Pinjaman	Dana sumbangan
Proyek-proyek		
Pelayanan Kesehatan yang Terdesentralisasi (2001-2006)	75,0	
Pelayanan Kesehatan yang Terdesentralisasi Kedua (2005-2010)	100,0	
ETESP (2005-2008)		17,0
Perbaikan Gizi Melalui Pemberdayaan Masyarakat (2006-2011)	50,0 saluran	
PRMAP (2006-2007)	200,0 saluran	
Bantuan Teknis		
Pelayanan Kesehatan yang Terdesentralisasi Pendukung		1,2
Pencegahan dan Pengendalian SARS (RETA)		0,2
Memperkaya Hidup Kaum Miskin Urban		1,75
Penguatan Makanan (JFPR)		
Gizi Urban (PPTA)		0,4
Inisiatif Kesehatan Masyarakat Pendukung untuk Aceh		2,0
Pendukung PRMAP		3,0 saluran
Total		
	325,00	
	27,75	
- Sedang berjalan	175,00	2,55
- Direncanakan	250,00	5,00

ETESP = Earthquake and Tsunami Emergency Support, JFPR = Japan Fund of Poverty Reduction, PPTA = Project Preparatory Technical Assistance, PRMAP = Poverty Reduction and Millenium Development Goals Acceleration Program, RETA = Regional Technical Assistance, SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome.

Sumber: ADB

## 10. Peran ADB yang Diajukan pada Sektor/Tema

### a. Sasaran Pembangunan Milenium (MDG)

342. Setengah dari MDG dan sepertiga dari indikator berkaitan secara langsung dengan sektor kesehatan. Jika ingin mencapai MDG, perlu dilakukan upaya besar dalam sektor kesehatan. Bantuan ADB bagi sektor kesehatan di Indonesia selama ini secara konsisten menunjukkan dua strategi utama, yaitu (i) memfokuskan pada kaum miskin dan lemah, dan (ii) mendukung reformasi sektor kesehatan. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, kebutuhan kaum terlemah tidak bisa diatasi tanpa reformasi sektor kesehatan pada tingkat tertentu. Selain

itu, terdapat reformasi makro yang ADB telah bantu untuk mengatasi, khususnya desentralisasi pelayanan kesehatan. Namun, kepercayaan/pilar tersebut perlu dibuat menjadi lebih eksplisit dan berorientasi hasil dan secara kuat berdasar pada kebijakan jangka panjang pemerintah dan koordinasi lembaga donor.

#### **b. Ketimpangan yang Meningkat – Mengatasi Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Tertinggal**

343. Berdasarkan analisis lebih lanjut, terutama MDG tidak tercapai karena tingginya kematian residual pada masyarakat yang miskin dan tertinggal – terisolasi oleh air, hutan, gunung, kemiskinan yang parah, konflik, atau isolasi sosial. Masyarakat tersebut, yang tidak memanfaatkan infrastruktur dan pelayanan utama, tidak mempunyai beberapa aset mendasar untuk bertahan bagi petani – kesehatan, gizi, dan pendidikan, yang seharusnya bisa membantu mereka dalam memperbaiki produktivitas. Kebanyakan masyarakat tersebut tinggal di daerah terpencil, tetapi juga meliputi wilayah pemukiman urban kumuh dengan serangkaian masalah yang berbeda lagi.

344. Penyebab utama buruknya indikator kesehatan pada masyarakat tertinggal adalah karena penyakit menular umum (diare, pneumonia, malaria, cacangan, dan infeksi kulit), kekurangan gizi (kekurangan gizi mikro seperti kekurangan zat besi dan yodium, pola dan kebiasaan makan yang buruk) baik bagi masyarakat pedesaan maupun penghuni daerah kumuh di kota-kota. Untuk mencapai MDG, pelayanan kesehatan dasar, gizi dan pendidikan harus menjangkau masyarakat yang terabaikan tersebut.

345. Pemberian pelayanan pada masyarakat tertinggal memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam hal sistem kesehatan masyarakat, dalam hal perencanaan dan manajemen, pemantauan, pengembangan sumber daya manusia (staf setempat), pelayanan-pelayanan yang bisa diakses dengan mudah, dan pendanaan. Menyediakan pelayanan-pelayanan tersebut baru-baru ini merupakan tantangan pada sistem kesehatan masyarakat yang terdesentralisasi. Sistem semacam itu memerlukan waktu untuk membangun kapasitas dan seperti yang terlihat jelas di negara-negara lain, dapat memperburuk ketidakadilan dengan memfokuskan pada pelayanan kesehatan utama dan populer daripada kepada kelompok-kelompok yang terisolasi dan lemah. Perkembangan pelayanan bagi kelompok-kelompok tersebut sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas para perencana daerah, yang, kecuali diberi pelatihan khusus dan dukungan, mungkin akan mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas untuk kelompok tersebut. Menargetkan pada masyarakat yang terisolasi berarti memerlukan tambahan sumber daya untuk mencapai mereka dan masa inkubasi yang lama sebelum hasilnya bisa diwujudkan.

346. Meningkatnya ketidaksetaraan di antara kelompok-kelompok tersebut dan masyarakat utama harus diatasi pada berbagai aspek berikut ini:

- (i) Pembangunan kapasitas para perencana daerah, dan penciptaan lingkungan para perencana agar lebih fleksibel dan inovatif dan memiliki wewenang mengambil keputusan dan akuntabilitas dalam menangani kebutuhan-kebutuhan kelompok tersebut.
- (ii) Memperkenalkan pendanaan berbasis hasil pada pemerintah daerah, dengan insentif khusus bagi masyarakat tertinggal.

- (iii) Kemitraan dengan para pemimpin daerah, penyedia pelayanan kesehatan tradisional, dan pengembang setempat.
- (iv) Memperbaiki pelayanan keuangan untuk masyarakat tertinggal pada indikator kesehatan.
- (v) Pengembangan SDM di masyarakat tertinggal, termasuk pelatihan dan penempatan staf dari masyarakat tersebut, yang dengan begitu juga menciptakan kesempatan kerja.
- (vi) Memperbaiki kualitas pelayanan bagi masyarakat tertinggal, termasuk pengadaan fasilitas yang lokasinya strategis dan bisa diakses oleh masyarakat setempat maupun wewenang kabupaten, dan memiliki jumlah staf dan perlengkapan yang cukup, serta diawasi dengan tepat. Standar dan mekanisme pengawasan yang cukup diperlukan untuk menangani hal ini.
- (vii) Membuat pelayanan yang ada menjadi lebih terjangkau, misalnya melalui pengadaan pelayanan kesehatan gratis bagi kelompok masyarakat tersebut dengan menggunakan dana kesetaraan atau pengaturan lainnya.
- (viii) Mengembangkan kemitraan pemerintah-swasta (termasuk LSM) untuk memperbaiki akses kepada perawatan kesehatan dengan kualitas tepat.

#### **c. Permintaan yang Meningkat – Memperbaiki Efisiensi Sektor Kesehatan**

347. Bertambahnya populasi dan pengangguran, transisi epidemiologi dengan meningkatnya jumlah penyakit kesejahteraan kronis dan kecelakaan di jalan raya, kemunculan penyakit seperti HIV/AIDS dan flu burung, dan semakin tingginya permintaan pelayanan medis dan mahalnya teknologi kedokteran semakin memberikan tekanan pada pemerintah pusat untuk meningkatkan pengeluaran pada pelayanan kesehatan di lingkungan makro ekonomi yang mulai pulih dengan lambat. Walaupun pengeluaran untuk pelayanan kesehatan di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat di antara tahun 1995 dan 2000, dari 1,6% ke 2,7% PDB, pertumbuhan ini sebagian besar terjadi di sektor swasta. Pengeluaran kesehatan pemerintah menurun setengahnya dari proporsi total pengeluaran kesehatan total, dan dengan tingkat biaya \$19 per orang tetap masih di bawah tingkat pendapatan per kapita dan rata-rata regional.

348. Pemerintah pusat perlu melakukan reformasi lebih lanjut untuk menyesuaikan peranannya sesuai dengan reformasi awal pada sektor pemerintah dan sektor swasta yang baru saja muncul. Berikut ini adalah beberapa prioritas yang teridentifikasi:

- (i) Memperkuat kapasitas perencanaan pusat untuk reformasi kesehatan, yang meliputi beragam topik misalnya pengembangan sektor swasta, otonomi rumah sakit, kesehatan ekonomi, manajemen yang terdesentralisasi, dan pengembangan SDM.
- (ii) Memberi pelaksana kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten kerangka kerja nasional tentang tanggung jawab berbagai tingkat pemerintah yang terdesentralisasi, sekaligus tata kelola yang diperbaiki, standar pelayanan minimum; dan melakukan pembangunan kapasitas pada tingkat-tingkat tersebut.
- (iii) Bergerak menuju sistem anggaran berbasis kebutuhan dan hasil untuk memperbaiki efisiensi. Karena sumber daya yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten dan DPRD, kekuasaan negosiasi, bukannya kebutuhan perawatan kesehatan dan kinerja, yang menentukan besarnya paket sumber daya yang diterima setiap kabupaten. Selain itu, beberapa kabupaten

- yang lebih miskin tidak bisa mendapat paket sumber daya yang lebih besar, karena sumber daya tersebut tidak dipusatkan. Tambahan lagi, pemerintah pusat akan bergerak menuju sistem anggaran terpadu yang akan membantu perolehan efisiensi.
- (iv) Memperbaiki pengaturan agar pelayanan kesehatan menjadi semakin terjangkau oleh masyarakat miskin. Program ini meliputi perluasan dan perbaikan skema asuransi kesehatan sosial yang sudah disetujui tetapi belum dioperasikan.
  - (v) Mengembangkan rencana pengembangan SDM dalam hal besarnya tenaga kerja, penggabungan ketrampilan, diversifikasi dan distribusi staf, dan kualitas lembaga-lembaga pelatihan, dan manajemen HRD.
  - (vi) Secara bertahap mengalihkan pengeluaran pemerintah pusat kepada pelayanan kesehatan untuk kaum miskin, pelayanan dengan tingkat eksternalitas tinggi, dan barang-barang masyarakat, dan mendorong peningkatan kemitraan pemerintah-swasta, otonomi rumah sakit dan pengaturan lainnya untuk meningkatkan pendanaan bersama.
  - (vii) Diberi mandat untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan pada sektor swasta, memperkuat kebijakan, peraturan, strategi, standar perawatan, dan mekanisme kendali mutu untuk sektor swasta, dan juga memperkuat kapasitas mengatur diri sendiri bagi sektor swasta, misalnya, melalui asosiasi profesi atau mekanisme akreditasi.

## **11. Hasil dan Output Sektor Yang Diajukan untuk Didukung oleh ADB**

350. Mengidentifikasi (i) hasil-hasil pembangunan yang realistis pada akhir CSP (2009) – berdasarkan target-target pemerintah bila mungkin; (ii) indikator kemajuan hasil-hasil tersebut, dalam bentuk indikator kemajuan dan proses yang bisa diukur selama periode CSP (mungkin setiap tahun); dan (iii) definisi kontribusi ADB yang diharapkan untuk pencapaian hasil-hasil tersebut, indikator kemajuan dan proses. Mengidentifikasi tidak lebih dari satu atau dua indikator hasil kunci dan mungkin empat hingga lima indikator kemajuan dan proses.

351. Indikator-indikator kontribusi ADB harus bisa diukur pada tingkat keluaran di dalam kerangka kerja proyek/TA ADB. Pastikan bahwa kontribusi yang diajukan ADB mempertimbangkan hasil-hasil yang diharapkan selama periode CSP dari aktivitas-aktivitas yang sedang berjalan.

## **12. Aktivitas-ADB yang Diajukan**

352. ADB memiliki proyek pinjaman investasi yang sedang berjalan di sektor kesehatan senilai \$179 juta. DHS-II efektif pada tahun 2005. Melalui proyek-proyek tersebut, ADB mendukung pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan reformasi kelembagaan daerah. Bantuan teknis senilai \$2 juta yang melengkapinya membantu meningkatkan efisiensi dan menggerakkan reformasi pemerintah daerah.

353. Meskipun demikian, kesenjangan utama dirasakan pada reformasi kebijakan nasional, dan memperkuat lembaga-lembaga nasional. Karenanya, dalam tahun-tahun mendatang diajukan dua proyek:

- (i) Program Pengurangan Kemiskinan dan Akselerasi Millenium Development Goals (Proverty Reduction and Millenium Development Goals Acceleration/PRMAP) terutama akan mendukung upaya reformasi di sektor kesehatan dan pendidikan (pada pokoknya 50% untuk setiap sektor). Pinjaman program (OCR) diharapkan mencapai \$200 juta yang akan dikeluarkan pada tahun 2007, dan dengan pembangunan lanjutannya ditawarkan pinjaman program kedua dengan tambahan \$200 juta yang akan dikeluarkan pada tahun 2008.

- (ii) Untuk mendukung program tersebut, diajukan hibah bantuan teknis senilai \$ 10 juta. Sebanyak \$ 5 juta ditujukan untuk sektor kesehatan dengan jangka waktu 4 tahun. Tujuan bantuan teknis sektor kesehatan ini untuk mendukung Departemen Kesehatan dan lembaga-lembaga pemerintah pusat lainnya dalam mencapai reformasi kebijakan dan lembaga. Sumber bantuan teknis ini tidak dikonfirmasi, meskipun untuk bidang kesehatan, dan komunikasi berasal dari AusAID.
- (iii) Proyek Gizi Perkotaan (Urban Nutrition Project/UNP) diajukan untuk tahun 2006, dengan nilai \$50 juta dari sumber-sumber pinjaman ADF ADB. Ini merupakan pinjaman proyek investasi lima tahun untuk mendukung melaksanakan prioritas nasional dan mencapai MDG yang berkaitan dengan gizi.
- (iv) Diperlukan kerja sektor dan ekonomi tambahan untuk memahami berbagai permasalahan dengan lebih baik dan untuk memperkuat komitmen ADB untuk mendukung reformasi. Ini bukan kekuatan ADB, tetapi perlu diberi perhatian lebih besar oleh ADB.

## **J. Pertanian, Sumber Daya Alam (SDA), dan Lingkungan**

### **1. Latar Belakang**

354. Maksud dari dokumen ini adalah untuk menggambarkan masalah dan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam bidang pertanian, lingkungan, sumber daya alam, dan pembangunan pedesaan. Pada bagian ini akan dibahas: (1) Bagaimana pemerintah pusat menanggapi tantangan tersebut, dan (2) Bagaimana ADB mengusulkan proposal kerja sama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan tersebut selama periode 2006-2009. Perencanaan (peta jalan) ini merupakan hasil konsultasi dengan sejumlah lembaga pemerintahan dan para pemangku kepentingan dalam beberapa tahun terakhir, hasil temuan bantuan teknis (TA) ADB, analisis sektor dan tematik ADB, serta sejumlah proyek pinjaman.

### **2. Ikhtisar Analisis Situasi**

355. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang panjangnya melebihi 80.000 kilometer, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar sekaligus yang terkaya dari segi keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki tanah vulkanis yang subur, sumber air permukaan dan dalam tanah, penduduk yang terampil, dan iklim tropis yang mendukung panen sepanjang tahun. Selain itu, juga terdapat 500 sungai besar yang mengalir ke perairan lepas dan membentuk lembah-lembah sungai.

356. Sampai saat ini, sumber daya alam telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional dan akan terus demikian di masa yang akan datang. Subsektor kehutanan, pertanian, pesisir pantai dan kelautan, serta pertambangan memberikan kontribusi besar, yaitu sekitar seperempat dari PDB (penurunan yang besar jika dibandingkan dengan tahun 1970 ketika kontribusinya mencapai 50%). Akan tetapi, sektor ini tetap menjadi andalan bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan golongan ekonomi bawah. Sektor ini juga berperan penting dalam tujuan keseluruhan negara untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2002, penghasilan di sektor usaha dan pertanian berkontribusi 43% terhadap pendapatan rumah tangga di daerah pedesaan. Sektor ini juga mempekerjakan 45% dari seluruh tenaga kerja atau 67% dari kaum buruh di desa (BPS, Survei Tenaga Kerja Nasional) tahun 2002. Ketika terjadi

krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an, sektor ini juga berperan sebagai jaring pengaman dengan memberikan lowongan kerja dan penghasilan bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya di kota.

357. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, namun sumber daya alamnya sedang terancam. Pulau Jawa menjadi tempat tinggal 60% dari seluruh penduduk Indonesia, tetapi luasnya hanya 7% dari keseluruhan daratan Indonesia. Walau rata-rata kebutuhan air hanya mencapai 1,7% dari total aliran, konsentrasinya terpusat di Jawa dan pemanfaatan air di berbagai sungai yang kritis mendekati 50% setiap tahunnya. Daerah rawa-rawa dan tandus mencapai 50% dari keseluruhan daratan. Sementara itu, wilayah bagian timur tidak bisa mendukung pertanian akibat musim panasnya yang panjang. Penduduk yang menghuni daerah pesisir pantai mencapai 22% dan sekitar 60% tinggal di dataran pantai yang menjadi rumah perkampungan sekaligus lokasi industri dan produksi pertanian. Permasalahan di daerah pesisir semakin kompleks dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan masalah lingkungan seperti limbah pertanian dan industri. Sangat disayangkan, mengingat beberapa di antaranya merupakan daerah terkaya di dunia dari segi keanekaragaman hayati, bahkan tercatat di dunia internasional sebagai pusat terumbu karang. Negara ini juga rawan bencana alam, dengan dampak yang diperburuk oleh penebangan hutan secara liar dan praktik pertanian yang tidak tepat.

358. Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPMJ) mencantumkan bahwa SDA akan diolah untuk kesejahteraan penduduk dengan tetap menjaga kelestariannya. SDA memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai aset pertumbuhan ekonomi (ekonomi berbasis sumber daya alam) dan sebagai sistem pendukung kehidupan. Manajemen SDA yang efisien dan berjangka panjang adalah tantangan utama bagi pemerintah dan ADB. Kesuksesannya akan bermanfaat bagi pembangunan jangka panjang bagi sektor pertanian, perairan, perikanan, dan kehutanan, sekaligus mengurangi kemiskinan.

359. Sebelum krisis ekonomi, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling tersentralisasi di dunia. Namun sekarang sedang berubah menjadi salah satu yang paling terdesentralisasi. Akan tetapi, pemerintah kabupaten dan kota pada umumnya tidak siap menghadapi tantangan desentralisasi ini. Sekitar 77 juta penduduk tidak memiliki akses air bersih dan sistem sanitasi yang memadai. Negara yang dahulu mampu mandiri dalam produksi beras telah berubah menjadi negara importir beras. Penyebabnya adalah infrastruktur yang menurun, manajemen air yang buruk, dan rendahnya pengembangan sektor pertanian. Kompetisi antar subsektor SDA semakin meningkat – lagi-lagi merupakan akibat tata kelola yang buruk, serta rendahnya kapasitas dan motivasi. Kaitan yang erat antara pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, dan tata kelola yang baik secara bertahap diakui..

### **3. Isu Pembangunan dan Tantangan Utama**

360. Hingga sekarang, sektor pertanian menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional, dan akan terus menjadi penyokong dominan hingga jangka menengah. Perannya sangat penting untuk mencapai MDG 1 dan 7. Analisis dan kerja sektor yang didukung ADB mengidentifikasi tantangan strategis jangka menengah dan jangka panjang yang meliputi (i) rendahnya kapasitas pemangku kepentingan, terutama pemerintahan pusat dan masyarakat dalam memajemen sektor pertanian; (ii) peralihan menuju manajemen sumber daya air yang terintegrasi dan berjangka panjang, (iii) tuntutan kebutuhan sumber daya dan buruknya perawatan infrastruktur terkait, (iv) rendahnya partisipasi para pemakai SDA dalam melestarikan sumber daya air dan menjaga pengelolaan sistem irigasi, (v) ancaman terhadap sumber daya hutan, pantai, dan laut untuk menyangga mata pencaharian penduduk di desa

dan kawasan pesisir, (vi) kurangnya partisipasi pengguna SDA dalam pengelolaan SDA dan lemahnya manajemen sumber daya pantai dan laut, (vii) pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan di desa melalui peningkatan produktivitas subsektor kelautan, pertanian, dan perikanan, (viii) pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian dengan dilakukannya promosi agribisnis dan pengelompokan industri kecil, dan (ix) kurangnya akses penduduk desa ke pasar dan fasilitas. Strategi apa pun untuk mengatasi tantangan tersebut membutuhkan kerja sama yang aktif dan konstruktif antara tiga kelompok utama pemangku kepentingan: pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

#### 4. Kebijakan dan Program Pemerintah

**361. Manajemen Sumber Daya Air dan Irigasi.** Kebijakan Sumber Daya Air Nasional menggunakan pendekatan holistik terhadap manajemen sumber daya air agar air dapat digunakan secara berkelanjutan. Partisipasi sektor swasta menjadi bagian dari agenda pembangunan tersebut. Akan tetapi, di tengah iklim investasi saat ini, partisipasi sektor swasta tidak besar. Tujuan RPJM adalah untuk mengatasi kendala dalam sektor sumber daya air, seperti (i) degradasi daerah aliran sungai; (ii) lemahnya koordinasi sektor sumber daya air, organisasi dan lembaga administrasi di tingkat pusat, daerah sekitar sungai, kabupaten, dan masyarakat; (iii) lemahnya manajemen dalam menghadapi banjir dan kekeringan; (iv) ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan air, ditinjau dari segi lokasi maupun waktu; (v) meningkatnya konflik antar subsektor penyedia air yang meningkat; (vi) perawatan infrastruktur sistem irigasi yang tidak optimal; (vii) ketidaksetaraan akses masyarakat ke air; kurangnya kesadaran mengenai pentingnya kebersihan; (viii) rendahnya mutu manajemen data, sistem informasi serta penelitian dan pengembangan dan (ix) buruknya kinerja keuangan dengan pendanaan yang rendah, serta rendahnya tarif untuk membiaya sistem irigasi dan pembagian pendanaan yang tidak memadai.

**362. Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati.** RPJM 2004-2009 mengidentifikasi berbagai isu dan tantangan yang mengancam SDA (di luar sumber daya hutan, minyak bumi, gas alam, dan pertambangan) sebagai berikut: (i) memburuknya ekosistem pantai dan laut, (ii) ancaman terhadap keanekaragaman hayati, (iii) polusi air dan udara, (iv) konflik yang belum tuntas dengan negara tetangga menyangkut garis batas negara - menunjukkan lemahnya manajemen sumber daya laut, (v) belum optimalnya manajemen potensi sumber daya laut, (vi) semakin tingginya praktek penangkapan ikan secara liar dan merusak, (vii) belum optimalnya manajemen kepulauan kecil, (viii) belum berkembangnya sistem yang dapat mengantisipasi dampak bencana alam, (ix) tidak adanya manajemen pembuangan air yang terintegrasi, (x) belum sinerginya hukum dan peraturan menyangkut lingkungan alami, dan (ix) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.

**363. Pembangunan Sektor Pertanian dan Pedesaan.** RPJM 2004-2009 melihat bahwa perkembangan tingkat subsektor menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya: (i) tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan kaum petani dan nelayan, (ii) lemahnya lembaga dan kekuatan tawar menawar petani dan nelayan, (iii) tidak memadainya insentif untuk berinvestasi dalam peningkatan produksi, terkait dengan kebutuhan reformasi tanah dan akses ke modal; (iv) rendahnya intensitas transfer teknologi, menyebabkan rendahnya produktivitas, (v) perkembangan sektor budidaya air (*aquaculture*) yang tidak sesuai, (vi) ketidakseimbangan pemanfaatan stok ikan, (vii) tingginya ketergantungan terhadap konsumsi beras sebagai makanan pokok, (viii) tidak memadainya infrastruktur dan kurangnya akses ke pasar dan jasa. Sebagai bagian dari RPJM 2004-2009, pemerintah pusat telah memulai gerakan revitalisasi sektor pertanian, di antaranya sektor perikanan, dengan target tingkat pertumbuhan per tahun

sebesar 3,5% untuk periode 2006-2009 dan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan kaum petani. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menjalankan dua program yang fokus pada (i) peningkatan ketahanan pangan, (ii) pengembangan agribisnis, dan (iii) mengembangkan sumber daya ikan.

## 5. Kebijakan Kelembagaan

364. Lembaga-lembaga Pemerintah Pusat yang berurusan dengan subsektor terkait adalah Departemen Pertanian (Deptan), Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU), Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, serta BAPPENAS sebagai koordinator. Sesuai dengan UU No.32/2004 dan No.33/2004 pengelolaan SDA didesentralisasikan. Meskipun demikian, tingkat desentralisasinya dan wewenang untuk mengelola sumber daya alam berbeda-beda di antara subsektor.

365. **Manajemen Sumber Daya Air dan Irigasi.** Pembangunan dan manajemen sumber daya air dijalankan di tingkat pusat oleh Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU) di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga bertanggung jawab atas perencanaan dan penyusunan program; manajemen sumber daya air; irigasi; sungai; danau dan waduk; proyek pembangunan sistem irigasi dengan memanfaatkan rawa-rawa dan pesisir. Lembaga ini terbagi dalam lima fungsi direktorat — perencanaan badan sungai, perencanaan dan penyusunan program, pesisir dan rawa, daerah aliran sungai serat bendungan dan irigasi. NWL 7/2004 mensyaratkan pembentukan dewan sumber daya air di tingkat provinsi dan kabupaten, dan, dalam kasus tertentu, di kawasan daerah aliran sungai itu sendiri.

366. **Konservasi Lingkungan dan Keragaman Hayati.** Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup adalah lembaga-lembaga penting di tingkat subsektor sumber daya air. Departemen Kehutanan bertanggung jawab terhadap manajemen dan konservasi sumber daya hutan, termasuk hutan bakau. Departemen Kelautan dan Perikanan adalah lembaga nasional utama yang bertanggung jawab atas sumber daya pantai dan laut, dan menyusun kebijakan serta mendukung pemerintah kabupaten dalam mengendalikan dan memelihara kekayaan alam. Kementerian Lingkungan Hidup pusat juga terlibat dalam manajemen dan konservasi lingkungan dan keragaman hayati melalui sosialisasi strategi nasional untuk konseravsi bakau, bekerjasama dengan Yayasan Mangrove Indonesia, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, dan BAPPENAS.

367. **Pembangunan Sektor Pertanian dan Pedesaan.** Lembaga utama subsektor ini adalah Departemen Pertanian (Deptan), Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU), dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk tingkat nasional, serta pemerintah kabupaten dan provinsi untuk tingkat daerah. Dalam subsektor pertanian, Deptan bertugas untuk menyusun kebijakan, melakukan riset dan pengembangan, melakukan karantina agrikultur, distribusi dan koordinasi pangan. Sementara itu, pemerintah kabupaten bertugas memperluas pelayanan dan bertanggung jawab atas pengimplementasiannya. Dalam pembangunan desa, Departemen Pertanian (Deptan), Departemen Pekerjaan Umum (DPU), dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) secara aktif terlibat di tingkat subsektor dalam berkoordinasi dan mendukung pemerintah kabupaten dalam implementasi usulan yang berkaitan dengan kehidupan dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

## 6. Peranan Mitra Pembangunan Lainnya

368. Bank Dunia (pengelolaan sumber daya air dan irigasi, konservasi lingkungan dan keragaman hayati, dan pembangunan sektor pertanian dan desa), JBIC (manajemen sumber daya air dan irigasi, dan pembangunan desa), IFAD (pembangunan sektor pertanian dan desa), Pemerintah Belanda (manajemen sumber daya air dan irigasi), Australian Aid (pembangunan sektor pertanian dan desa), dan USAID (konservasi lingkungan dan keragaman hayati) telah aktif mendukung sektor ini. Awalnya, lembaga-lembaga ini memiliki fokus sektoral. Mereka bekerja melalui lembaga pemerintahan di berbagai tingkat dan lembaga pembangunan dalam hubungan bilateral. Sebagai contoh, Australian Aid mengadopsi pendekatan tematis yang fokus pada wilayah geografis.

## 7. Kapasitas dan Pendekatan Pengelolaan untuk Hasil di Sektor Ini

369. Indonesia telah memiliki sistem pelaporan yang baik untuk ekonomi secara keseluruhan maupun data statistik sektoral dan daerah. Di tingkat provinsi, badan statistik level sektor memegang fungsi menyerupai Biro Pusat Statistik (BPS) pada tingkat nasional. Pelaporan yang spesifik untuk sektor tertentu ditangani oleh departemen terkait, termasuk biro-biro yang bertanggung jawab untuk melaporkan informasi. BPS melakukan sejumlah survei, di antaranya SUSENAS dan PODES; yang melaporkan aspek sosial ekonomi. SUSENAS adalah pelaporan berdasarkan hasil survei, sementara PODES secara berkala melaporkan keadaan setiap desa yang ada di Indonesia.

370. Meskipun memiliki sistem pelaporan yang baik, terdapat kesenjangan waktu antara pengumpulan data dan kemungkinan penggunaannya. Untuk SUSENAS dan PODES, jangka waktunya 12 sampai 24 bulan. Jangka waktu yang terlalu lama untuk manajemen berdasarkan hasil. Selain itu, perlu ada perubahan fokus para manajer dari pengawasan berbasis keluaran (*output*) ke pengawasan berbasis hasil. Perubahan ini tentunya memerlukan waktu dan dukungan dari kementerian terkait. Selain itu juga dibutuhkan perubahan paradigma di mana target harus sudah jelas pada tahap perencanaan.

## 8. Keberhasilan dan Pengalaman ADB dalam Sektor Ini

371. Dari 48 proyek pertanian dan SDA yang disetujui sejak 1990, 34 di antaranya adalah untuk pertanian, termasuk perikanan, sementara 14 lainnya berorientasi pada manajemen SDA. PCR tersedia untuk 17 buah proyek, yang meliputi pengolahan hasil pertanian, dan subsektor irigasi, kelautan, dan pantai. Dari keseluruhan proyek, 90%-nya dinilai sukses secara keseluruhan atau sebagian. Proyek yang tidak berhasil adalah dalam bidang pengolahan hasil pertanian.

372. Country Assistance Program Evaluation (CAPE)<sup>3</sup> yang diselesaikan bulan Desember 2005, menunjukkan bahwa secara umum sejumlah proyek mengalami penundaan, terutama disebabkan oleh masalah desentralisasi, kompensasi, pendanaan, dan perekrutan tenaga konsultan. Pelajaran terpenting dari proyek-proyek yang berhasil maupun yang sedang berjalan adalah (i) kemitraan jangka panjang dengan pihak lain, terutama dalam subsektor yang oleh pemerintah program dan strateginya telah disusun dengan jelas dan berdampak besar pada pembangunan; (ii) potensi keberhasilan program manajemen SDA akan bertambah jika disertai dengan kepekaan terhadap masalah lingkungan dan sosial ekonomi serta jika dirancang dan diimplementasikan dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat dan pemerintah daerah; (iii) memberikan kontrak infrastruktur berskala kecil kepada masyarakat akan membuat masyarakat

<sup>3</sup> ADB, 2005. Indonesia Country Assistance Program Evaluation, Manila

tersebut mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi, efektivitas biaya, dan kualitas yang memuaskan; (iv) rencana pengelolaan aset infrastruktur pasca proyek harus diformulasikan secara partisipatif sebagai bagian dari implementasi proyek, dan perjanjian kemitraan harus mencantumkan dengan jelas batas tanggung jawab dari setiap pemangku kepentingan, (v) kampanye pendidikan dan informasi merupakan gerakan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dalam manajemen SDA; (vi) proyek tersebut harus mencakup kegiatan untuk meningkatkan dan memfasilitasi sector swasta dalam sejumlah bidang seperti penyedia jasa, mitra pengembangan, dan jalur pemasaran.

## 9. Operasi dan Komitmen ADB Saat Ini

373. Kekuatan strategi operasi sektor ADB telah berhasil mengurangi kemiskinan di pedesaan dengan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berkesinambungan dan merata. ADB dengan aktif mendukung pembangunan di subsektor yang berhubungan dengan produksi hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, agribisnis, perlindungan ekosistem, manajemen sumber daya alam yang terintegrasi, konservasi keanekaragaman hayati, subsektor perikanan, kehutanan, irigasi dan drainase, dan pengendalian banjir dan peternakan. Di akhir 2005, ADB memberikan 103 pinjaman senilai \$4.176,2 juta dan 151 TA senilai \$68,8 juta untuk pembangunan sektor pertanian dan daerah desa, termasuk pengembangan sistem irigasi, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pedesaan. Selama ini, ADB telah dengan selektif memberikan bantuan terhadap sektor tersebut, sambil berfokus pada peran yang memerlukan spesialisasi dan pengalaman yang tepat sehingga dapat membawa dampak yang signifikan. Sebagai contoh, keterlibatan ADB dalam subsektor kehutanan dan peternakan perlahan-lahan dikurangi, sementara untuk subsektor manajemen sumber daya air, irigasi, dan sumber daya laut dan pantai, ADB mampu untuk memegang posisi penting sebagai mitra pemerintah.

374. **Manajemen Sumber Daya Air dan Irigasi.** *Participatory Irrigation Sector Project*<sup>4</sup> (2064/2065-INO; PISP) mendukung pendekatan partisipatif dalam pengelolaan irigasi dan sumber daya air dalam lingkungan pemerintahan dan fiskal yang terdesentralisasi. Sistem irigasi yang mampu memfasilitasi 600.000 ha akan memberi manfaat bagi 1,5 juta keluarga petani di 25 kabupaten di provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Grant 0002-INO: Earthquake and Tsunami Emergency Support Project – Irrigation Component membantu rehabilitasi daerah seluas 70.000 ha. Program ini memfokuskan perbaikan pada daerah bencana sebagai prioritas dan melakukan evaluasi kebutuhan untuk mengembalikan sistem saluran air ke keadaan normal dengan melakukan perbaikan darurat, memulihkan mata pencaharian dan pendapatan, serta menyediakan makanan pokok untuk penduduk setempat.

375. **Konservasi Lingkungan dan Keragaman Hayati.** Proyek pinjaman yang sedang berlangsung di subsektor ini di antaranya adalah Marine and Coastal Resources Management Project<sup>5</sup> dan Coral Reef Rehabilitation and Development Project Phase II<sup>6</sup> yang menerapkan pendekatan terintegrasi untuk pengelolaan sumber daya pantai dan laut jangka panjang.

<sup>4</sup> ADB. 2003. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Proposed Loans to the Republic of Indonesia for the Participatory Irrigation Sector Project*. Manila. Loan 2064/2065-INO, disetujui pada tanggal 19 Desember 2003 untuk jumlah \$74 juta.

<sup>5</sup> ADB. 2005. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Proposed Loans to the Republic of Indonesia for the Marine and Coastal Resources Management Project*. Manila. Loan 1770(SF)-INO disetujui pada tanggal 26 Oktober 2000 untuk jumlah \$50 juta.

<sup>6</sup> ADB. 2002. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Proposed Loans to the Republic of Indonesia for the Coral Reef Rehabilitation and Development Project Phase II*. Manila. Loan 1962 disetujui pada tanggal 6 Desember 2002 untuk jumlah 33 juta.

Proyek-proyek multidisipliner yang terkait di antaranya adalah aktivitas pengembangan mata pencaharian dan aktivitas yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya laut, termasuk terumbu karang dan bakau. Melalui Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (Grant 0002-INO) dan berbagai proyek JFPR, ADB membantu pemerintah pusat dalam rehabilitasi sumber daya alam dan faktor pengembangan mata pencaharian dan infrastruktur, dan di saat yang sama menyediakan bantuan perencanaan rasional untuk proses rekonstruksi yang ramah lingkungan. Melalui TA 4551-INO, ADB juga menyediakan bantuan praktis untuk pemerintah pusat untuk pengembangan strategi dan rencana jangka panjang.

**376. Pembangunan Sektor Pertanian dan Pedesaan.** Proyek pinjaman yang sedang berjalan di subsektor ini di antaranya adalah Poor Farmers Income Improvement Through Innovation Project (Loan 1909-INO) yang bertujuan untuk mengatasi kendala yang petani di daerah marginal dan bercurah hujan rendah untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan akses menuju pelayanan jasa dengan melakukan investasi pada riset bidang pertanian dan sistem informasi, perluasan penyediaan jasa, dan pengembangan infrastruktur. Community Empowerment for Rural Development Project (Loan 1765/1766-INO) dan Rural Infrastructure Support Project (Loan 2221-INO) juga bertujuan untuk meningkatkan akses kaum miskin desa terhadap pelayanan dasar dengan melakukan spesifikasi sumbangan dana untuk pedesaan dan menyalurkannya untuk membangun infrastruktur yang menjadi prioritas penduduk. Tidak jauh berbeda, komponen pertanian yang terdapat dalam Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (Grant 0002-INO) bertujuan untuk memperbaiki produktivitas pertanian di daerah bencana dengan membangun kembali pusat pelayanan yang menyokong produksi dan memperbaiki lahan serta kapasitas pertanian.

## **10. Usulan Peran ADB Dalam Sektor Ini**

**377.** Strategi operasi sektor dalam jangka pendek dan menengah akan fokus membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan, dan secara khusus menargetkan golongan miskin dan lemah sebagai penerima manfaat utamanya, apabila layak.. ADB akan selektif dalam sektor yang dibantunya dan akan berkonsentrasi pada bidang-bidang strategis yang sudah memiliki keunggulan. Dalam bantuannya, ADB akan memfokuskan intervensinya pada (i) manajemen sumber daya air dan irigasi, (ii) konservasi lingkungan dan keragaman hayati, dan (iii) pembangunan desa.

**378. Manajemen Sumber Daya Air dan Irigasi.** Rencana Tindakan seperti secara rinci ditetapkan dalam National Water Sector (NWS) bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara konservasi air dan pemanfaatan air, dengan rekomendasi perencanaan ruang yang lebih baik dan rencana manajemen sumber daya yang lebih baik, dengan menggunakan pendekatan manajemen sumber daya air yang terpadu. Strategi ini fokus pada kelestarian sumber daya alam, lembaga, dan infrastruktur, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, dan sistem pendukung sosial yang akan meningkatkan rasa memiliki penerima manfaat. Dalam membantu, ADB akan memprioritaskan pada (i) pembangunan kapasitas implementasi dan pemantauan dalam menjalankan NWL 7/2004 dan peraturan yang mendukung; (ii) mendukung pengembangan SDM dan pembangunan kapasitas dalam semua aspek pembangunan dan pengelolaan sumber daya air; mendorong kemitraan antara pemerintah pusat, sektor swasta, pemangku kepentingan, dan WUAs; (iii) terus mendukung manajemen sumber daya air terpadu dan tata kelola yang baik dalam proyek pembangunan dan pengelolaan daerah aliran sungai, (v) terus mendukung pembangunan sistem irigasi yang partisipatif, (iv) menjalankan manajemen banjir berkelanjutan dan perencanaan ruang strategis untuk meminimalkan risiko banjir, dan pada saat yang sama menciptakan tempat penampungan air, daerah resapan, dan mengendalikan polusi. (v) membantu proyek pengolahan daerah rawa

dan perlindungan terhadap daerah rawa yang masih tersisa, dan (vi) pengembangan program strategis sumber daya air. Program yang diusulkan ADB untuk mendukung fokus strategis subsektor ini di antaranya adalah:

- (i) Citarum Integrated Water Resources Management Project (Proyek Manajemen Sumber Daya Air Citarum Terpadu) yang akan membantu implementasi rencana strategis untuk pembangunan dan pengelolaan daerah aliran sungai Citarum yang sifatnya berjangka panjang dan sebagai bagian dari program yang terintegrasi. Rencana ini akan membantu meningkatkan kualitas dan jumlah pemasokan air di Jakarta dan Bandung dan untuk para petani di Jawa Barat.
- (ii) Flood Management in Selected River Basin Project (Proyek Manajemen Banjir di Aliran Sungai Terpilih) akan membantu pelaksanaan program pemerintah pusat pada empat aliran sungai prioritas di empat daerah: provinsi Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- (iii) ADTA – "Capacity Building in Water Resources in the Decentralized Environment" dan RETA – Integrated Water Resources Management akan menyediakan sistem pendukung yang penting bagi kedua proyek tersebut di atas melalui pembangunan kapasitas untuk pengelolaan sumber daya air secara holistik.

**379. Konservasi Lingkungan dan Keragaman Hayati.** Isu lingkungan dan keragaman hayati digabungkan dalam proyek dan rencana strategis ADB (untuk sekarang dan seterusnya) untuk pengelolaan aliran sungai dan sumber daya pesisir dan laut. Dalam konteks subsektor tersebut, memperkuat tata kelola lingkungan dan sumber daya alam dan menyediakan mata pencaharian alternatif akan mendukung pelestarian lingkungan dan keragaman hayati. Strategi yang dijalankan akan disusun sedemikian rupa hingga dapat mencapai sejumlah sasaran seperti mengurangi kemiskinan, pengelolaan lingkungan jangka panjang, dan akan pula memenuhi prasyarat infrastruktur desa yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup dan memanfaatkan lingkungan demi pembangunan ekonomi. Kapasitas pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mengatur SDA secara efektif dan berjangka panjang juga akan ditingkatkan. Akan dilakukan pula sejumlah kegiatan dengan tujuan pelestarian hayati, dengan sebagian pendanaan berasal dari dana Global Environmental Facility. Program yang diusulkan ADB untuk mendukung fokus strategis subsektor ini di antaranya adalah:

- (i) Proyek Manajemen Sumber Daya Pantai Terpadu (2008) akan melanjutkan tujuan komitmen yang telah dan baru saja dibuat ADB dalam subsektor ini. Proyek ini juga akan melanjutkan sosialisasi manajemen jangka panjang sumber daya laut dan pantai, dan dengan begitu memperkenalkan pula rencana-rencana yang sukses dalam manajemen sumber daya, pada pembangunan daerah pantai pada khususnya, ataupun perencanaan dan manajemen pada umumnya.
- (ii) Proyek Rehabilitasi dan Manajemen Terumbu Karang Fase III, fase ketiga dan terakhir dalam program multi-donor demi pelestarian terumbu karang ini akan memfasilitasi manajemen masyarakat untuk terumbu karang dan sumber daya pantai lain yang menjadi prioritas.

**380. Pembangunan Sektor Pertanian dan Pedesaan.** ADB akan mendukung penerapan RPJM dalam vitalisasi pertumbuhan ekonomi pedesaan dan produksi hasil pertanian dengan menghadapi sejumlah tantangan yang dihadapi subsektor ini. Lebih spesifik lagi, bantuan ADB akan terus berfokus pada infrastruktur dasar di pedesaan, khususnya di daerah kumuh yang memiliki banyak kekurangan. Ini adalah bidang yang menjadi target program MDG dan pengentasan kemiskinan, sekaligus bidang di mana ADB telah membuktikan keunggulannya. ADB akan mempromosikan kemitraan pemerintah -swasta dalam mendukung pembangunan

desa di Indonesia. Mitra utama ADB adalah Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk tingkat nasional, dan pemerintahan kabupaten untuk implementasinya. ADB juga akan menjalin kerjasama dengan World Bank, JBIC, AusAid, dan lembaga bilateral lain yang telah aktif berkecimpung di sektor ini. Program yang diusulkan ADB untuk mendukung fokus strategis subsektor ini di antaranya adalah:

- (i) Proyek Budidaya Air Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan Dan Pengentasan Kemiskinan (Sustainable Aquaculture for Food Security and Poverty Reduction Project) membantu pemerintah pusat dalam mengatasi berbagai kendala dalam pembangunan akuakultur di enam kabupaten di lima propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.
- (ii) Bantuan Teknis Pembangunan Infrastruktur Pedesaan untuk Peningkatan Dampak (TA for Enhancing Impact of Rural Infrastructure Development) (tercantum dalam RISP II) akan membawa dampak positif bagi infrastruktur desa lewat kegiatan peningkatan kapasitas untuk EA dan pegawai kabupaten dalam sebuah pembangunan yang partisipatoris dan peningkatan pengawasan dan sistem evaluasi yang berakhir pada Departemen Pekerjaan Umum (DPU).

381. **Tema *Crosscutting*.** Dalam kegiatannya, ADB akan terus meningkatkan kapasitas dan memperbaharui kebijakan pada sektor yang untuk mendukung proses desentralisasi. Dukungan ADB dalam sektor ini akan ditandai dengan kegiatan *crosscutting*, di antaranya; (i) jender dan pembangunan; (ii) perbaikan pengaturan ekologi dengan adanya kerjasama masyarakat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemegang saham, dan (iii) maksimalisasi penyebaran program yang terbukti berdampak positif serta mempraktekannya sesuai dengan konteks lokal.

## 11. Hubungan Antara Tujuan Umum CSP dan Sektor/Area Tematis Lainnya

382. Hasil akhir dalam tingkat sektor akan secara langsung mendukung tujuan CSP di wilayah-wilayah penting dalam manajemen lingkungan dan SDA, cepatnya MDG dan pembangunan infrastruktur, yang nantinya akan berakhir pada meningkatnya tingkat ekonomi, peluang kerja, dan tercapainya MDG.

## 12. Isu Jender dan Lingkungan

383. Di sektor ini, permasalahan jender sifatnya penting. Kegiatan yang sedang dan akan dilakukan akan memastikan bahwa perempuan turut terlibat pada tahap konsultasi dan terlibat sepenuhnya pada tahap implementasi. Kegiatan yang diusulkan akan turut mempertimbangkan sejumlah hal, contohnya menyertakan perempuan dalam panitia level masyarakat yang bertanggung jawab atas perencanaan, penerapan, dan pengawasan kegiatan. Selain itu, juga akan dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap isu jender dalam rencana kegiatan, demi memastikan bahwa perempuan menerima akses yang adil terhadap sumber daya dan keuntungan-keuntungan yang ada.

## 13. Usul Kontribusi ADB dan Peluang Kerjasama (Termasuk Perjanjian Kofinansial)

328. Kegiatan di sektor ini sebagian besar akan memiliki modal dasar seperti pada umumnya. Tetapi, komponen memiliki target mengentaskan kemiskinan atau mencapai MDG juga dapat memperoleh bantuan dari ADF atau lembaga penyumbang lain. Indonesia adalah salah satu dari lima negara target dalam Program Pendanaan Air, dan bisa menggunakan sejumlah janji

pengucuran dana yang telah diberikan atas dasar komitmen terhadap pengembangan pengolahan sumber daya air. ADB memiliki SDM yang dapat menjalankan perencanaan, pengolahan, dan pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung ataupun yang baru diusulkan – dan jika perlu, memanfaatkan jasa konsultan yang ahli di bidangnya.

**Tabel. A4.14: Matriks Rencana dan Hasil Kerja**

Target Pembangunan Jangka Menengah untuk Sektor		Hasil CSP		
Target Sektor untuk Negara yang Terkait	Peluang dan Hambatan Utama	Hasil CSP dan Indikatornya	Indikator Perkembangan	Kegiatan
Pembangunan SDA dan infrastruktur yang terkait agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan	<p>Langkanya air di Kepulauan Jawa dan Kepulauan Timur, dan kompetisi antar sektor</p> <p>Manajemen lembah sungai yang kurang baik atau tidak terintegrasi</p> <p>Kurang dimanfaatkannya infrastruktur irigasi, akibat kondisinya yang buruk, yaitu sekitar 30% dari yang seharusnya.</p> <p>Koordinasi yang lemah antara institusi dan lembaga administrasi tingkat sektor</p>	<p>Mendukung terbentuknya manajemen sumber daya air yang terintegrasi, dengan prioritas investasi lembah sungai dan infrastruktur yang berhubungan dengan banjir</p> <p>Peningkatan kapasitas untuk manajemen sumber daya air.</p>	<p>Terjadi peningkatan tingkat produksi di bidang geografis (data statistik regional)</p> <p>Kerusakan akibat banjir yang berkurang jumlahnya (data statistik regional)</p> <p>Manajemen sumber daya air dan infrastruktur air yang dijalankan bersama oleh pemakai dan pemerintah</p>	<p><b>Sedang berjalan</b></p> <p>Parsipatoris</p> <p>Proyek sektor irigasi</p> <p><b>Diusulkan</b></p> <p>Proyek Manajemen Sumber Daya Air Citarum yang Terintegrasi</p> <p>Proyek Manajemen Banjir di Sejumlah Lembah Sungai</p> <p>Proyek Irigasi atas Inisiatif Masyarakat</p> <p>Program strategis untuk mendukung kebijakan pembangunan dan penerapannya</p> <p>AOTA – Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Air di Lingkungan yang Terdesentralisasi</p> <p>RETA – Manajemen Sumber Daya Air yang Terintegrasi</p>
Manajemen SDA yang berdasarkan pengolahan jangka panjang dengan memperhitungkan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan	<p>Kurang memadainya kapasitas manajemen SDA di tingkat lokal dan nasional</p> <p>Mandat dan fungsi lembaga pemerintah yang</p>	Perbaikan manajemen sumber daya pantai dan laut	<p>Manajemen sumber daya pantai dan laut yang terintegrasi di sejumlah kabupaten dan propinsi</p> <p>Perbaikan ko-manajemen</p>	<p><b>Sedang berjalan</b></p> <p>Proyek Manajemen Sumber Daya Laut dan Pantai</p> <p>Proyek Rehabilitasi dan Manajemen Terumbu Karang Fase II</p>

	<p>saling tumpang tindih</p> <p>Kurangnya kesadaran pemegang saham akan pentingnya manajemen sumber daya yang berkelanjutan</p> <p>Bertambahnya ancaman terhadap SDA dan peluang kerja</p>		<p>sumber daya pantai yang dilakukan masyarakat dan pemerintah daerah di sejumlah kabupaten dan propinsi</p> <p>Area pesisir dan laut yang terkontrol dengan baik</p>	<p><b>Diusulkan</b></p> <p>Proyek Manajemen Sumber Daya Pantai yang Terintegrasi</p> <p>Proyek Rehabilitasi dan Manajemen Terumbu Karang Fase III</p>
<p>Mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan produktivitas pertanian</p>	<p>Kurangnya infrastruktur dasar di daerah desa</p> <p>Ketidakadilan dalam akses menjangkau pasar dan penyedia jasa antara kawasan yang satu dengan yang lainnya</p>	<p>Perbaikan kesejahteraan dan usaha mengurangi tingkat kemiskinan di daerah-daerah yang terlibat</p>	<p>Meningkatnya akses masyarakat, dan infrastruktur dasar lainnya (PODES)</p> <p>Aktivitas dan tingkat pelestarian yang lebih baik (Budget Regional dan PODES)</p>	<p><b>Sedang berjalan</b></p> <p>Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa</p> <p>Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Miskin melalui Berbagai Inovasi</p> <p>Proyek Pendukung Infrastruktur Pedesaan</p> <p><b>Diusulkan</b></p> <p>Investasi untuk Spesifikasi dan Peningkatan Infrastruktur – Proyek Pendukung Infrastruktur Desa Fase II dan III</p>

Sumber: Asian Development Bank

## OPERASI SEKTOR SWASTA

### A. Operasi Sektor Swasta di Indonesia

#### 1. Pengantar

1. Untuk mencapai visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,5% menjadi 7,6% per tahun, disertai dengan upaya percepatan tindakan dan investasi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals /MDG*). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya (RPJM), pemerintah mengidentifikasi lima bidang prioritas yakni (i) program penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan; (ii) menjaga kestabilan ekonomi makro melalui harga yang stabil, kelangsungan fiskal dan reformasi sektor keuangan; (iii) percepatan investasi, ekspor, dan pariwisata melalui reformasi untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan pasar yang fleksibel; (iv) meningkatkan mutu dan akses untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan; dan (v) pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan efisiensi pelayanan yang ada dan mendorong partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta.

2. Private Sector Operations Department (PSOD) ADB, melalui divisi sektor infrastruktur (PSIF II) dan sektor keuangannya (PSCM), berkomitmen untuk menggunakan produk investasi dan pendanaan bersama/*cofinancing* (ekuitas, pinjaman, jaminan, skema pendanaan tambahan/*complementary financing scheme* (CFS), dan bantuan teknis) guna membantu Indonesia memobilisasi investasi sektor swasta dalam bidang infrastruktur dan sektor keuangan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam RPJM.

#### 2. Operasi Sektor Swasta di Bidang Infrastruktur Gambaran Umum

##### a. Gambaran Umum

3. Mengingat kemajuan konsolidasi fiskal akhir-akhir ini, ADB berpendapat bahwa pemerintah akan dapat meningkatkan investasinya, dan investasi di bidang infrastruktur seharusnya menjadi prioritas pertama pemerintah. Pemerintah memahami bahwa perluasan infrastruktur secara besar-besaran diperlukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan, mengatasi hambatan yang ada, dan menarik investasi yang akan membantu mencapai dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Untuk tahap awal, investasi sebesar 5% dari PDB per tahun dianggap sebagai besarnya investasi minimum yang dibutuhkan untuk memulihkan penyediaan infrastruktur seperti sebelum krisis ekonomi. Pemerintah memperkirakan akan dibutuhkan dana sekitar \$65 milyar untuk periode 2005-2009, dimana \$25 milyar (38%) akan dipenuhi dari anggaran pemerintah, \$14 milyar (22%) dari bank dalam negeri dan dana asuransi dan pensiun, \$10 milyar (15%) dari lembaga donor multilateral dan bilateral, dan \$16 milyar (25%) dari investor dalam dan luar negeri.

4. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus ada investasi yang memadai di bidang infrastruktur transportasi dan energi. Disamping itu, untuk mempercepat kemajuan pencapaian MDG, investasi di bidang infrastruktur untuk penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting. Oleh karena itu, kegiatan ADB di sektor swasta yang terkait dengan infrastruktur akan fokus pada tiga sektor tersebut di atas. Hal ini selaras dengan arah Strategi Jangka Menengah ADB yang ke II (MTS-II).

5. Akhir-akhir ini kinerja pemerintah tidak bagus dalam menarik sektor swasta untuk berinvestasi dalam bidang infrastruktur di sektor energi, transportasi, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Meskipun sistem peraturan yang terkait dengan pembangunan di bidang minyak dan gas serta infrastruktur transportasi gas telah ditingkatkan, di sektor listrik, struktur kontrak dan prosedur tender membuat para investor mundur. Di sektor jalan tol, model perjanjian konsesi yang memenuhi persyaratan perbankan belum dikembangkan sehingga menghambat minat para investor dan kreditor asing. Ini berarti bahwa proyek-proyek diberikan kepada perusahaan lokal yang tidak memiliki pengalaman atau sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Partisipasi sektor swasta di sektor penyediaan air bersih dan sanitasi sejauh ini masih belum signifikan, kecuali tiga konsesi untuk penyediaan air bersih (dua di Jakarta dan satu di Batam),.

6. Kerangka hukum yang lemah untuk pembebasan tanah dan pemindahan penduduk merupakan hambatan lain bagi sektor swasta untuk berinvestasi di semua sektor, dan hal ini perlu diatasi segera. Selain itu, tidak adanya *contractual counterparties* yang layak kredit di sektor-sektor utama, khususnya sektor listrik, telah membuat sektor swasta enggan berinvestasi dengan modal pinjaman dan penyertaan modalnya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia.

## b. Sektor Energi – Bahan Bakar Fosil

### i. Pengantar

7. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel A4, Indonesia memiliki cadangan minyak, gas alam, dan batu bara yang berlimpah. Indonesia dikaruniai sumberdaya gas alam dengan cadangan pasti lebih dari 90 triliun kaki kubik, yang merupakan cadangan gas alam terbesar ke-13 di dunia dan cadangan terbesar nomor satu di kawasan Asia dan Pasifik.

**Tabel A4: Cadangan Energi**  
(2004)

Jenis Energi	Unit	Jumlah	Cadangan / Rasio Produksi
Minyak	Milyar barel	4,72	11,5
Gas	Triliun kaki kubik	94,70	34,9
Batubara	Juta ton	4.968,00	38,0
Antrasit	Juta ton	740,00	
Sub-bituminus dan Lignit	Juta ton	4.228,00	

Sumber: Data Statistik Energi BP 2005, Migas.

8. UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Alam mengakui pentingnya sistem hukum yang pasti dan transparan bagi sektor minyak dan gas dan menuntut dibentuknya badan pengatur terpisah untuk sektor hilir dan sektor hulu. Oleh karena itu, peran pengawasan yang diemban oleh Pertamina untuk sektor hulu kini dihapus. BP Migas, yang merupakan badan usaha nirlaba milik negara, menggantikan Pertamina dalam kontrak bagi hasil yang ada dan akan mengadakan kontrak kerja sama dengan perusahaan berbadan hukum yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Indonesia.

9. UU tentang minyak dan gas alam ini juga mencabut monopoli Pertamina di sektor hilir dan membentuk BPH Migas yang berfungsi sebagai badan pengatur sektor hilir yang juga menangani urusan pemberian kontrak. BPH Migas memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengatur tarif transmisi dan distribusi gas melalui pipa, menentukan dan mengatur harga gas bagi konsumen rumah tangga dan usaha skala kecil, menyelesaikan persengketaan di antara pelaku usaha yang bergerak di bidang angkutan gas alam, serta memberi akses dan hak mengikuti tender untuk berpartisipasi dalam rencana umum penyediaan gas nasional.

## ii. Produksi Minyak dan Gas Sektor Hulu

10. Pada tahun 2005, akibat menurunnya produksi minyak dan naiknya permintaan dalam negeri akan minyak mentah dan hasil minyak, Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota OPEC yang menjadi negara pengimpor minyak bersih. Indonesia perlu mendorong produksi bahan bakar fosil dalam negeri dan sektor swasta bisa memainkan peran penting dalam proses ini.

11. Mengingat pentingnya manfaat yang diberikan bagi perekonomian Indonesia dengan meningkatkan penggunaan energi setempat dalam memenuhi berbagai jenis kebutuhan energi dalam negeri serta manfaat bagi lingkungan yang diperoleh dari penggunaan gas alam lokal, Departemen Operasi Swasta ADB secara aktif berusaha mendukung proyek-proyek penghasil minyak dan gas sektor hulu. ADB dan Pertamina saat ini sedang membahas tentang kemungkinan pendanaan proyek minyak Cepu di Jawa Tengah. Sejak disahkannya UU minyak dan gas yang baru, proyek-proyek penghasil minyak dan gas yang baru diwajibkan untuk meningkatkan penjualan hasil produksi mereka di pasar dalam negeri. ADB memperkirakan bahwa hal ini akan mendorong terjadinya kenaikan permintaan akan jaminan untuk mengurangi risiko politik di samping pinjaman dana langsung. Salah satu hambatan khusus dalam pendanaan proyek gas sektor hulu adalah banyak proyek yang didesain untuk menjual gas langsung kepada PLN. Sampai saat ini, mekanisme yang tepat untuk mendukung kewajiban pembayaran PLN belum dibentuk.

## iii. Produksi Batu Bara

12. Sektor produksi batu bara sebagian besar dimiliki oleh sektor swasta dan dapat didanai secara memadai oleh sumber dana komersial, seperti di masa lalu. Sampai saat ini belum ada proposal untuk perluasan bisnis yang signifikan kecuali kemungkinan untuk mendukung produsen listrik swasta dan kemungkinan untuk ekspor. Oleh karena itu, saat ini ADB tidak melihat adanya peran untuk mendanai produksi batu bara, meskipun kesempatan untuk memberikan pendanaan akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.

## iv. Penyulingan

13. Kedelapan kilang minyak yang ada di Indonesia, dengan kapasitas total gabungan sebesar 1,05 juta barel per hari, dimiliki sepenuhnya oleh Pertamina. Karena kapasitas pengolahan kilang tidak memadai, Pertamina saat ini mengimpor sekitar 400.000 barel hasil minyak per hari untuk menambah hasil kilangnya. Untuk meningkatkan kapasitas penyulingannya, Pertamina saat ini aktif membahas kemungkinan kerja sama membangun kilang baru dengan beberapa pihak. Pada bulan Mei 2006, Pertamina mengumumkan kemungkinan didirikannya perusahaan patungan dengan *Kuwait Petroleum Co.* dan sebuah perusahaan swasta Indonesia untuk membangun kilang minyak dengan kapasitas 250.000 barel per hari di pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Di bulan yang sama, Pertamina menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan *National Iranian Oil Co* untuk membangun

kilang minyak berkapasitas 300.000 barel per hari yang diperkirakan memakan biaya antara \$4 sampai dengan \$5 milyar. Kilang ini akan dibangun di Tuban, Jawa Timur atau Banten, Jawa Barat. Pembicaraan dengan calon mitra usaha patungan kilang minyak lainnya seperti Saudi Aramco, Sinopec dan International Petroleum Investment Company (IPIC) juga dilaporkan sedang berjalan. ADB akan mempertimbangkan kemungkinan untuk turut mendanai proyek pembangunan kilang minyak tergantung pada pengembangan struktur kredit yang dapat diterima bagi proyek tersebut.

#### v. **Peyimpanan Minyak**

14. Deregulasi sektor hilir minyak dan gas sektor serta pencabutan monopoli Pertamina dalam penjualan ritel bahan bakar minyak (BBM) telah membuka jalan bagi operator SPBU asing seperti Shell dan Petronas untuk memasuki pasar ritel BBM di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan infrastruktur tempat penyimpanan BBM swasta untuk mendukung masuknya operator SPBU independen. BPH Migas sampai saat ini telah mengeluarkan dua ijin bagi pengoperasian sarana penyimpanan BBM tersebut. Departemen Operasi Sektor Swasta ADB dan pengembang sektor swasta saat ini sedang membahas proyek sarana penyimpanan BBM yang berkapasitas 150 meter kubik per hari yang akan berlokasi di Jawa Barat.

#### vi. **Transmisi dan Distribusi Gas, termasuk Gas Alam Cair**

15. Pasar utama bagi produk-produk energi di Indonesia adalah pulau Jawa yang memiliki cadangan gas lebih sedikit daripada Kalimantan, Irian Jaya dan Sumatra, sehingga menjadikannya bergantung kepada pulau-pulau tersebut untuk pasokan gas alam. Oleh karena itu, perlu dibuat proyek-proyek pipanisasi utama dan/atau terminal gas alam cair (*liquefied natural gas* /LNG) untuk mengangkut gas alam ke pulau Jawa. Departemen Operasi Sektor Swasta ADB akan mendukung secara aktif pelaksanaan dan pendanaan proyek-proyek tersebut di sektor swasta. PSOD saat ini sedang memproses satu pinjaman langsung, disertai dengan pendanaan bersama, dengan nilai total sampai dengan \$150 yang akan disalurkan ke Perusahaan Gas Negara (PGN). Pinjaman ini berbasis *corporate* dan *non sovereign guarantee* dan akan digunakan untuk mendanai proyek pembangunan pipanisasi di Sumatra Selatan sampai dengan Jawa Barat Tahap II. Saat ini ADB dan PGN masih membicarakan tentang kemungkinan pendanaan proyek-proyek di masa yang akan datang, baik yang berbasis *project financing* ataupun yang berbasis *corporate*. PGN saat ini sedang mempertimbangkan struktur perusahaan patungan, mirip dengan struktur yang digunakan untuk proyek Transgasindo yang membangun pipanisasi di Sumatra Utara yang membentang dari wilayah Duri sampai ke Medan.

16. Departemen Operasi Sektor Swasta ADB juga akan berupaya untuk aktif mendukung proyek-proyek transmisi gas dan memantau secara aktif proyek pipanisasi gas Trans Jawa yang tendernya dimenangkan oleh Pertamina, dan pipanisasi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa yang ditenderkan oleh BPH Migas. Di samping itu, ADB akan mempertimbangkan kemungkinan untuk mendanai pembangunan jaringan distribusi gas, dimana distribusi gas dilaksanakan oleh PGN atau perusahaan swasta.

17. Ada beberapa proyek gas alam cair yang saat ini sedang dikembangkan, termasuk Proyek gas alam cair di Jawa Timur yang sedang dikembangkan oleh PGN dan Proyek gas alam cair Padang di Sumatra yang sedang dikembangkan oleh Pertamina, Medco dan LNGI.

Pada tanggal 14 Desember 2005, ADB menyetujui proyek LNG Tangguh senilai \$350 juta.<sup>1</sup> Pada tanggal 10 Agustus 2006, ADB menyetujui Proyek Pembangunan Pipanisasi Gas di Sumatera Selatan sampai Jawa Barat Tahap II sebesar \$75 juta.

### c. Sektor Energi - Listrik

18. Indonesia memiliki kapasitas terpasang pembangkit listrik sekitar 25.000 megawatt (MW). Dari kapasitas keseluruhan tersebut sekitar 21.800 MW darinya dimiliki oleh PLN sedangkan sekitar 3.400 MW dikontraskan ke produsen listrik swasta. Di samping itu ada banyak pembangkit tenaga listrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan (*captive power*) yang sebagian besar menggunakan tenaga diesel<sup>2</sup>. Namun setelah dihapusnya subsidi BBM diperlukan banyak biaya untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel tersebut. Permintaan akan listrik diperkirakan meningkat sebesar 6,6% per tahun sampai dengan tahun 2013.<sup>3</sup> Untuk memenuhi kenaikan permintaan tersebut, PLN perlu mengontrak produsen listrik swasta untuk memasok 1.000-2.000 MW setiap tahunnya. Program perluasan pembangkit listrik PLN terdiri dari tiga proyek dengan kapasitas total 2.660 MW yang akan dikontraskan selama periode 2006-2007<sup>4</sup> dan delapan proyek dengan kapasitas total 3.670 MW yang ditenderkan secara bertahap.<sup>5</sup> Kenyataan bahwa semua proyek tersebut kecuali yang di Cilegon akan dilaksanakan oleh produsen listrik swasta menekankan pentingnya partisipasi sektor swasta dalam memenuhi permintaan listrik di Indonesia.

19. Pada tahun 2002, UU baru tentang tenaga listrik (UU No. 20/2002) disahkan di Indonesia. Namun, UU ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga akibatnya sektor listrik mengalami ketidakstabilan. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan listrik dalam negeri melalui kontrak dengan produsen listrik swasta yang menjual listrik kepada PLN.

20. ADB sangat tertarik menyediakan bantuan kepada investor dan penyedia modal swasta untuk memasok kebutuhan listrik di Indonesia melalui pinjaman proyek langsung atau dengan menyediakan jaminan risiko politik. Namun, karena kondisi keuangan PLN yang lemah dan memburuk, ADB, seperti lembaga pemberi pinjaman lainnya, akan memerlukan dukungan pemerintah untuk menjamin bahwa PLN akan memenuhi kewajiban kontraknya dalam kaitannya dengan proyek-proyek baru. Sampai saat ini pemerintah tidak bersedia menyediakan dukungan tersebut.

21. Dalam transmisi dan distribusi listrik, PLN berencana untuk mendanai sebagian besar investasi barunya dengan basis *komersial*, dan ADB saat ini tidak tahu apakah ada proyek yang

<sup>1</sup> ADB. 2005. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Proposed Loan to the Republic of Indonesia for the Tangguh Liquefied Natural Project* (Laporan dan Rekomendasi Presiden ADB kepada Dewan Direktur tentang Usulan Pinjaman untuk Republik Indonesia untuk Proyek Gas Alam Cair Tangguh). Manila, disetujui pada tanggal 14 Desember 2005, dengan dana senilai \$350 juta.

<sup>2</sup> Sekitar 10.000 perusahaan memiliki sumber pembangkit listrik sendiri untuk menghindari risiko terkena pemadaman listrik. Kapasitas terpasang dari pembangkit listrik sendiri (*captive power*) ini diperkirakan mencapai 13.000-15.000 MW atau sekitar setengah dari kapasitas total PLN.

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi, 2004. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2004. Jakarta. Rencana pembangunan PLN yang terbaru untuk periode 2005-2015 dibuat berdasarkan pada kenaikan permintaan yang lebih tinggi yang mencapai 8,5% per tahun.

<sup>4</sup> Cilacap, Jawa Tengah (600 MW, batubara); Cilegon, Jawa Barat (740 MW, gas alam, dilaksanakan oleh PLN dengan pendanaan dari JBIC); dan Tanjung Jati B di Jawa Tengah (1.320 MW, batubara).

<sup>5</sup> Cirebon, Jawa Barat (600 MW, batubara, dikontraskan kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Marubeni); Jawa Tengah (1.200 MW, batu bara); Pasuruan, Jawa Timur (500 MW, gas alam); Paiton 3 dan 4 di Jawa Timur (800 MW, Batubara); Bali (200 MW, Batubara); Sibolga, Sumatera Utara (200 MW, batubara); Amurang, Sulawesi Utara (50 MW, batubara); dan Kalimantan Timur (120 MW, gas alam).

dipimpin oleh sektor swasta di subsektor ini. Jika terdapat peluang untuk terlibat dalam subsektor ini, ADB akan mempertimbangkan kemungkinan untuk menyediakan bantuan berdasarkan kasus per kasus, tergantung pada kriteria kelayakan finansial dan teknis serta dampak pembangunan yang diciptakan.

#### **d. Sektor Transportasi**

##### **i. Jalan Tol**

22. Sektor jalan tol selama ini didominasi oleh sektor pemerintah. Namun, pemerintah akhir-akhir ini membuka kembali peluang investasi jalan tol kepada sektor swasta, melanjutkan kebijakan yang dimulai pada tahun 1995 tapi terhenti oleh krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997/98. Namun, tender untuk pembangunan jalan tol baru akhir-akhir ini belum berhasil menarik minat investor atau pemberi pinjaman asing. Sebagian besar dari proyek-proyek ini diserahkan kepada perusahaan-perusahaan lokal yang tidak berpengalaman dan yang tidak dapat memperoleh dana yang diperlukan. Ada dua alasan utama yang melatari hal ini: (i) pemerintah tidak berhasil mengembangkan struktur konsesi yang bisa menjadi model perjanjian yang memenuhi syarat perbankan, dan (ii) pembebasan tanah yang diperlukan memberatkan dan memakan biaya. Departemen Operasi Sektor Swasta ADB berkoordinasi dengan Departemen Regional Asia Tenggara ADB, lembaga donor lainnya serta pihak pengembang, untuk membantu mengembangkan model perjanjian konsesi. Meskipun solusi permanen untuk persoalan pembebasan tanah masih belum ditemukan, Departemen Operasi Sektor Swasta ADB akan mengidentifikasi proyek-proyek pembangunan jalan tol swasta yang telah berhasil melakukan pembebasan tanah. Sebuah proyek percontohan dengan model perjanjian konsesi dan pembebasan tanah yang tidak membebani akan mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang lebih permanen untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Departemen Operasi Sektor Swasta ADB juga akan membantu PT. Jasa Marga, operator jalan tol milik negara, dengan memberi pinjaman langsung yang berbasis non-negara (*non-sovereign*) dibawah prakarsa baru ADB untuk inovasi dan efisiensi, atau pinjaman berbasis pendanaan proyek kepada proyek-proyek tertentu dimana PT. Jasa Marga berperan sebagai pengembang.

##### **ii. Kereta Api /Angkutan Perkotaan**

23. Sepanjang pengetahuan ADB, hanya ada beberapa proyek angkutan perkotaan saja yang sedang dikembangkan saat ini, dan sebagian besar berlokasi di Jakarta. Sampai saat ini ADB tidak terlalu tertarik untuk terlibat dalam proyek-proyek tersebut karena prihatin dengan kualitas dan komitmen para sponsor proyek serta prosedur lelang proyek yang diterapkan. Namun, ADB akan mengkaji kemungkinan untuk mendukung proyek-proyek yang ditawarkan ke sektor swasta melalui proses lelang yang kompetitif dan transparan dimana bisa diterapkan kesepakatan pembagian resiko serta pendanaan bersama antara pemerintah-swasta yang sesuai.

##### **iii. Pelabuhan dan Bandar Udara**

24. Karena sektor-sektor ini bukan prioritas utama strategi jangka menengah II ADB, maka ADB akan selektif dalam mendukung proyek-proyek di sektor-sektor ini dan akan menyediakan dukungan bagi proyek-proyek yang memiliki "*demonstration effect*" yang besar, inovatif dan memiliki terobosan baru, serta dapat direplikasi oleh ADB dan lembaga donor lain di Indonesia dan negara lain, atau yang dapat meningkatkan kerja sama regional dengan negara-negara tetangga.

## e. Sektor Air dan Limbah

### i. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

25. Di antara sektor-sektor infrastruktur di Indonesia, penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan infrastruktur yang paling parah kondisi teknis dan keuangannya. Hanya sekitar 35% dari 85 juta penduduk wilayah perkotaan mendapat pasokan air bersih dari PDAM. Sedangkan selebihnya tergantung pada air sumur, penyedia air berskala kecil, atau penjual air bersih, yang biasanya mahal. Di daerah pedesaan, kondisinya lebih memprihatinkan. Hanya sekitar 15% rumah tangga di pedesaan yang menerima pasokan air bersih dari ledeng atau pompa air, dimana PDAM hanya memasok setengah darinya. Sebagian besar rumah tangga di pedesaan masih mengandalkan air dari sumur dangkal atau tadahan air hujan, atau menggunakan air permukaan dari sungai atau sumber mata air terdekat. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan tingkat cakupan saluran pembuangan limbah perkotaan terendah. Hanya tujuh kota yang memiliki jaringan pembuangan limbah dan hanya 10% penduduk kota yang tercakup oleh jaringan pembuangan limbah tersebut. Lebih dari 70% rumah tangga di perkotaan memiliki sarana pembuangan limbah setempat, sebagian besar dalam bentuk septic tank yang tidak berfungsi secara efektif. Diperkirakan perlu investasi tahunan sekitar \$600 juta untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium di bidang penyediaan air bersih dan sanitasi.<sup>6</sup>

26. Kecuali tiga konsesi penyediaan air bersih (dua di Jakarta dan satu di Batam), partisipasi sektor swasta dalam bidang penyediaan air bersih dan sanitasi sejauh ini belum signifikan. ADB akan berupaya untuk mendukung proyek penyediaan air bersih dan sanitasi dengan partisipasi sektor swasta bilamana memungkinkan.

### ii. Penanganan Limbah

27. Sampai saat ini upaya untuk mengembangkan proyek-proyek di sektor pengelolaan limbah, khususnya proyek pembakaran sampah bersuhu tinggi dengan alat *incinerator*, masih terhambat karena instansi-instansi pemerintah tidak bersedia membayar tarif pengelolaan sampah dengan *incinerator* dan proyek-proyek pada umumnya dianggap tidak layak jika hanya mengandalkan keuntungan dari penjualan listrik hasil olahan sampah dan mekanisme pembangunan bersih (*clean development mechanism /CDM*). ADB akan mempertimbangkan untuk mendukung proyek-proyek tersebut jika perubahan pada sistem peraturan dan keuangan menjadikan proyek-proyek tersebut layak untuk dilaksanakan.

## f. Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

28. Prakarsa baru ADB untuk inovasi dan efisiensi (IEI) memungkinkan ADB untuk memberi pinjaman tanpa jaminan pemerintah kepada BUMN yang layak kredit dan memiliki kemampuan finansial jangka panjang yang memadai. Pemberian pinjaman oleh ADB kepada BUMN harus disertai dengan reformasi sektor dan perusahaan. Pada tanggal 10 Agustus 2006, ADB menyetujui pinjaman jangka panjang berbasis *komersial* kepada PGN senilai \$75 juta tanpa jaminan pemerintah. Pinjaman ini akan digunakan oleh PGN untuk menanggung sebagian biaya proyek pembangunan pipanisasi di Sumatra Selatan sampai ke Jawa Barat Tahap II. ADB akan mempertimbangkan untuk menyediakan pinjaman serupa kepada BUMN-BUMN lain yang

<sup>6</sup> Mengurangi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih sampai dengan separuhnya pada tahun 2015, dan memperbaiki kehidupan sedikitnya 100 juta penduduk daerah kumuh melalui sanitasi yang lebih baik dan program lainnya pada tahun 2020

memenuhi kriteria untuk mendapatkan pinjaman di bawah prakarsa baru ADB untuk inovasi dan efisiensi.

### 3. Operasi Sektor Swasta di Sektor Keuangan dan Pasar Modal

#### a. Pengantar

29. Indonesia berangsur-angsur pulih dari dampak parah krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia di tahun 1997/98 dan mempercepat restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan. Di puncak krisis, sekitar 75% utang swasta mengalami kemacetan. Rehabilitasi sektor perbankan mengharuskan penutupan dan/atau merger hampir 100 bank, peningkatan kerangka kerja hukum dan peraturan, serta penyuntikan dana oleh pemerintah melalui Dana Rekapitalisasi senilai Rp 430 triliun (US\$47.7 milyar).<sup>7</sup> Meskipun sektor keuangan pada akhirnya kembali ke level semula seperti sebelum krisis terjadi (sebagai persentase PDB), sektor ini tetap rentan karena kurangnya diversifikasi dan prinsip kehati-hatian sesuai standar internasional baru diterapkan akhir-akhir ini. Bank-bank terus mendominasi sektor keuangan, dengan memiliki hampir dua kali lipat nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Jakarta dan lima kali lipat aset lembaga keuangan non perbankan.

30. BUMN memegang peranan yang penting dalam sektor perbankan dengan menguasai sekitar 48% total aset perbankan.<sup>8</sup> Saham pemerintah mencapai 32% dari total kapitalisasi pasar BEJ.<sup>9</sup> Meskipun kepemilikan saham pemerintah di bank menurun dari puncaknya yang mencapai lebih dari 70% pada tahun 1999, dan direncanakan akan dilakukan swastanisasi lebih lanjut, alasan mengapa pemerintah masih memiliki saham minoritas di beberapa bank nasional tidak jelas.

31. Sektor lembaga keuangan non-bank di Indonesia terdiri dari perusahaan pembiayaan, reksadana, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan perusahaan pegadaian. Sektor ini tidak besar, hanya mewakili 11% dari total aset sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan asuransi menguasai mayoritas aset sektor lembaga keuangan non bank (32%). Penguatan lembaga-lembaga ini akan membantu mengurangi ketergantungan sektor swasta pada sektor perbankan untuk intermediasi sektor keuangan, mendorong jasa dan produk baru, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

32. Divisi Sektor Pasar Modal dan Keuangan dibawah Departemen Operasi Sektor Swasta ADB memiliki spesialisasi di bidang: (i) penyertaan modal (dana langsung dan melalui dana investasi); (ii) pinjaman (pinjaman subordinasi dan jangka panjang), dan yang terkait dengan proyek-proyek pasar modal; (iii) serta jaminan (peningkatan kredit) untuk mendorong sekuritisasi dan utang publik dan/atau pasar obligasi.

33. Secara umum, sektor swasta dan pasar keuangan bersifat dinamis, bergerak cepat, dan multi dimensi. Kedua sektor tersebut tidak boleh ditangani dengan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) yang kaku atau dengan rencana program yang disusun tanpa melibatkan pemangku kepentingan. Dalam kegiatannya sekarang dan di masa yang akan datang, Divisi Sektor Pasar Modal dan Keuangan akan menyeimbangkan antara aspek-aspek kehati-hatian

<sup>7</sup> Secara keseluruhan, 37 bank direkapitalisasi, termasuk 4 bank pemerintah, 21 bank swasta, dan 12 bank regional; dana tambahan sebesar Rp 220 trilyun disuntikkan ke BI untuk mendukung program rekapitalisasi perbankan secara umum.

<sup>8</sup> Penghitungan berdasarkan aset total bank-bank nasional dan regional dimana pemerintah memegang saham kepemilikan mayoritas dan tidak termasuk bank-bank lain dimana pemerintah memiliki saham kepemilikan minoritas.

<sup>9</sup> Di akhir tahun 2004.

komersial, dampak pembangunan, dan efisiensi kegiatan untuk meningkatkan sektor keuangan dan lembaga keuangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta membantu ADB mencapai misi intinya dalam mengurangi kemiskinan.

#### b. *Structured Finance*

34. Program *structured finance* Divisi Sektor Pasar Modal dan Keuangan fokus pada beberapa bidang penting berikut: (i) sekuritisasi; (ii) pendanaan penyelesaian kredit bermasalah; (iii) dan bidang *structured finance* lainnya (misalnya pendanaan akuisisi). Di Indonesia, dua bidang pertama tersebut diatas, khususnya sekuritisasi, saat ini menjadi fokus utama dari upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi pasar modal, terutama yang terkait dengan pengembangan pasar obligasi yang berfungsi dengan baik, likuid, dan mendalam.

35. Krisis ekonomi Asia mengukuhkan perlunya pengembangan pasar obligasi domestik jangka panjang di kawasan Asia. Meskipun tingkat tabungan tinggi, tabungan jangka panjang belum dimobilisasi secara efisien. Investasi sektor swasta dalam ekonomi baru yang berkembang cepat harus dibiayai dengan utang luar negeri jangka pendek. Untuk menghindari risiko kesenjangan tersebut, pemerintah di negara-negara berkembang anggota ADB selama ini berusaha mencari cara untuk menangani persoalan ini.

36. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pengembangan pasar sekuritisasi. Pertama, pengembangan pasar obligasi dan sekuritisasi akan mengurangi masalah pengetatan kredit, karena upaya pengembangan ini akan mendorong bank-bank nasional dan lembaga keuangan lainnya melepas dana yang terbatas sehingga memudahkan pemberian kredit baru. Kedua, dengan meningkatnya daya saing dan proses konsolidasi sektor keuangan dan korporasi, sekuritisasi akan memungkinkan bank-bank dan perusahaan pendanaan meningkatkan pendapatan mereka dengan menyalurkan kembali ekuitas yang sama. Sebuah lembaga keuangan dapat menawarkan kredit dengan suku bunga pasar, kemudian mensekuritisasi kumpulan kredit (*pool of loans*) dengan suku bunga yang lebih rendah karena diversifikasi dan efisiensi dalam *tranching cash flow*. Dengan meningkatnya kesadaran lembaga keuangan tentang biaya modal dan perlunya melakukan diversifikasi sumber dana mereka, sekuritisasi portofolio kredit akan menjadi alat utama dalam manajemen neraca keuangan. Ketiga, sekuritisasi akan menawarkan fungsi intermediasi kepada lembaga-lembaga keuangan dengan redistribusi risiko kredit, sama seperti penyedia asuransi mengumpulkan calon nasabah yang ingin melindungi diri mereka dari risiko kerugian dan kecelakaan. Dibawah model lama, bank-bank melakukan hal ini dengan menyamakan jumlah dana pinjaman dengan jumlah dana deposito. Dalam sekuritisasi, mereka mengemas paket-paket kredit untuk investor pasar modal daripada nasabah.

37. Sekuritisasi menawarkan cara yang efektif untuk meningkatkan tingkat kecukupan kebutuhan modal sektor perbankan dan keuangan. Kedua sektor ini merupakan elemen penting dalam meningkatkan kinerja sektor keuangan secara keseluruhan di Indonesia. Pengembangan pasar sekuritisasi akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar obligasi korporasi, terutama dalam hal-hal berikut:

- (i) **Budaya penilaian kredit.** Berdasarkan pengalaman negara-negara lain di masa lalu, sistem rating kredit yang independen merupakan komponen utama dalam pengembangan pasar obligasi korporasi yang berjalan dengan baik. Para investor/pemodal hanya bisa menilai dengan tepat risiko kredit yang sebenarnya dalam obligasi korporasi dan obligasi lainnya jika tersedia sistem penilaian kredit yang independen.

- (ii) **Proses penetapan harga kredit.** Penerbitan sekuritisasi juga akan mengembangkan kurva penetapan harga kredit. Sekuritisasi secara langsung menciptakan proses penetapan harga kredit yang canggih, konsisten, dan transparan.
- (iii) **Meningkatkan jumlah pemodal institusional.** Dengan tumbuhnya pasar sekuritisasi, lebih banyak pemodal institusi yang akan datang ke Indonesia, sehingga meningkatkan kompetisi dan likuiditas bagi pasar sekuritas secara keseluruhan.
- (iv) **Diversifikasi bagi pemodal.** Penerbitan sekuritisasi dan tersedianya beragam aset keuangan yang baru akan memungkinkan pemodal institusi menciptakan portofolio aset yang stabil dan terdiversifikasi yang menawarkan kesempatan yang lebih baik kepada mereka untuk mencapai tujuan dari manajemen risiko dan keuntungan mereka.

38. Dalam kaitannya dengan transaksi sekuritisasi di Indonesia, ADB akan mengikuti tiga jalur bisnis utama, yakni: ikut serta dalam pembentukan sarana sekuritisasi (*securitization vehicle*) dengan dokumentasi yang baku yang dapat digunakan oleh para kreditur awal di seluruh Asia;<sup>10</sup> (ii) menjamin *senior tranche* atau membeli *subordinated tranche* dari efek beragun aset (diterbitkan dalam sekuritisasi); dan (iii) menyediakan fasilitas likuiditas atau peningkatan kredit lainnya bagi sekuritisasi atau transaksi terstruktur lainnya (seperti *credit linked note*). Untuk melaksanakan strategi ini, PSOD telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa bank internasional terpilih. Transaksi pertama di bawah strategi ini, yakni sekuritisasi dua portofolio kredit kepemilikan motor oleh Deutsche Bank Cabang Jakarta dari PT. Summit OTO Finance di Indonesia, disetujui oleh Dewan ADB pada tanggal 26 Juli 2006.<sup>11</sup> Transaksi tersebut mencakup jaminan senilai \$9,8 juta dan investasi ekuitas senilai \$200.000. Jika transaksi percobaan ini berhasil dilaksanakan, Deutsche Bank AG dan ADB berencana untuk memperluas struktur ini dalam transaksi-transaksi lainnya.

### c. Dana Investasi

39. Tujuan utama kegiatan dana investasi ADB adalah untuk mengkatalisasi investasi dalam negeri dan asing menjadi pendanaan jangka panjang. Saat ini masih ada kesenjangan dalam pendanaan ekuitas jangka panjang bagi sebagian besar perusahaan, terutama UKM, karena investasi langsung asing sering ditujukan langsung pada anak perusahaan lokal dari perusahaan multinasional, sementara investor ekuitas lainnya fokus pada investasi jangka pendek di perseroan terbuka. Kredit berbasis agunan merupakan kredit yang biasanya ditawarkan oleh bank-bank. Hal ini otomatis membatasi akses UKM kepada pendanaan kecuali mereka bisa memperoleh pendanaan ekuitas jangka panjang, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kemampuan memperluas usaha dan memperoleh pendanaan utang tambahan.

40. Investasi penyertaan modal, yang disalurkan melalui dana investasi ADB, dapat memainkan peran yang penting dalam membantu UKM memulai upaya untuk menjadi perusahaan yang lebih besar karena alasan-alasan berikut:

<sup>10</sup> Serupa dengan model yang dibuat oleh Kreditanstalt für Wiederaufbau di Jerman ("*Promise and Provide*").

<sup>11</sup> ADB. 2006. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors for Financing and Partial Credit Guarantee Acquisition and Securitization of Motor Loan Portfolios by Deutsche Bank AG* (Laporan dan Rekomendasi Presiden ADB kepada Dewan Direksi tentang Pendanaan serta Akuisisi dan Sekuritisasi Jaminan Kredit Sebagian terhadap Portofolio Kredit Kepemilikan Motor oleh Deutsche Bank AG). Manila, Pinjaman 7239-INO, disetujui pada tanggal 26 Juli 2006, dengan nilai sebesar \$10 juta.

- (i) Pengelola dana yang melakukan investasi atas nama investor ekuitas swasta berpartisipasi dalam peningkatan potensi dan penurunan risiko di perusahaan penerima investasi, yang menunjukkan bahwa kepentingan mereka selaras dengan kemajuan yang dicapai perusahaan tersebut. Oleh karena itu, mereka memiliki insentif untuk memilih perusahaan-perusahaan dengan potensi paling menjanjikan untuk berkembang dan meningkatkan nilai tambah perusahaan pasangan usaha (*investee*).
- (ii) Pengelola dana melaksanakan berbagai fungsi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan portofolio mereka, seperti membantu merekrut personil kunci dan menyediakan nasihat strategis, mengembangkan struktur tata kelola perusahaan pasangan usaha, dan mengenalkan klien-klien baru.
- (iii) Investor ekuitas swasta dapat menggunakan jaringan mereka untuk meluncurkan perusahaan-perusahaan baru, dan melakukan pemisahan anak perusahaan (*spin off*) serta perluasan usaha dimana mereka melihat kesempatan usaha. Dengan peran ini, mereka dapat mempercepat tingkat pendirian usaha dan pembangunan ekonomi.
- (iv) Investasi ekuitas swasta memainkan peranan yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan melakukan diversifikasi sumber pendanaan bagi UKM. Disertakannya pendanaan ekuitas memungkinkan BUMN-BUMN non perbankan untuk membeli aset tetap dan menggunakannya sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit bank komersial guna mendongkrak perluasan usaha mereka. Dampak dari upaya perluasan ini menciptakan proses yang dinamis yang mendorong UKM tumbuh menjadi perusahaan yang lebih besar, sehingga menambah lapangan kerja dan produktifitas.

41. Kegiatan industri ekuitas swasta mendadak tersendat selama krisis ekonomi melanda kawasan Asia, namun perlahan-lahan pulih dalam beberapa tahun terakhir. Per Juni 2003, secara resmi tercatat 26 perusahaan modal ventura daerah, 20 perusahaan swasta nasional dan 14 perusahaan patungan. Namun menurut Departemen Keuangan, nilai aset dan investasi yang tercatat pada tahun 2002 masing-masing hanya \$240 juta dan \$164 juta. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mendirikan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan sebuah BUMN yang bergerak di bidang penyaluran modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Lembaga dengan modal disetor sebesar \$36 juta ini bertujuan memberdayakan UMKMK dengan menyuntikkan ekuitas ke perusahaan-perusahaan dalam negeri. Secara umum, total kumpulan modal ventura yang dimanfaatkan melalui dana resmi masih sedikit dibandingkan dengan perkonomian yang ada, dan industri modal ventura sektor swasta masih belum pulih kembali ke skala atau tingkat pertumbuhannya semula seperti sebelum krisis.

42. ADB membantu mengkatalisasi investasi jangka panjang ke Indonesia ketika ADB melakukan investasi di *Aureos South-East Asia Fund* (ASEAF) pada tahun 2005. Dengan dukungan ADB, ASEAF akan menunjukkan kredibilitas ekuitas swasta di wilayah ASEAN termasuk Indonesia. *Demonstration effects* yang diharapkan akan berhasil dicapai dengan memberi dukungan kepada tim ekuitas swasta lokal yang mampu menunjukkan bahwa investasi ekuitas swasta di Asia Tenggara dapat mewujudkan nilai investor melalui pertumbuhan UKM. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas tim investasi lokal menjadi tujuan utama ASEAF.

43. ASEAF akan menunjukkan kredibilitas ekuitas swasta di Indonesia dimana industri ekuitas swasta masih berada jauh dibawah level ekuitas swasta di Republik Korea dan

Singapura.<sup>10</sup> Seperti industri ekuitas swasta di Republik Korea, Singapura, dan Taipei (dibawah kedaulatan Cina selama tahun 1980-an), katalisasi investasi di dana ekuitas di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas manajemen perusahaan lokal dan menunjukkan kepada sektor swasta bahwa investasi di BUMN-BUMN non perbankan bisa mendatangkan perolehan yang memadai.

44. PSOD bermaksud untuk terus melakukan investasi dalam dana ekuitas swasta regional yang memiliki rekam jejak yang diakui dan fokus investasi yang jelas dimana Indonesia termasuk sebagai salah satu negara tujuan investasi. Saat ini ada beberapa program/kegiatan yang sedang dikaji.

#### d. Lembaga Keuangan

45. ADB menggunakan dua pendekatan yang berbeda dalam kerjasamanya dengan bank-bank, perusahaan asuransi, lembaga keuangan bukan bank, perusahaan sewa guna, bursa, dan lembaga penyimpanan. Pertama, ADB berupaya mengembangkan sektor keuangan untuk meningkatkan mobilisasi tabungan dan pemberian kredit. Intermediasi keuangan yang efektif dan efisien melalui lembaga keuangan merupakan persyaratan pokok dalam pembangunan sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, ADB berupaya menyalurkan dananya melalui berbagai lembaga keuangan kepada debitur kecil, mikro dan menengah yang tidak bisa dijangkau langsung oleh program-program ADB. Pendekatan ini memanfaatkan pengetahuan lembaga keuangan tersebut tentang pasar domestik dan infrastruktur .

46. Kegiatan ADB berkaitan dengan lembaga keuangan dilaksanakan melalui divisi sektor pemerintah dan swasta ADB. Kegiatan dan program yang dilakukan meliputi:

- (i) menciptakan lingkungan yang mendukung (misalnya peraturan, pengawasan, pengembangan kapasitas, dan infrastruktur keuangan);
- (ii) menyelesaikan masalah-masalah spesifik di lembaga-lembaga tertentu (misalnya, restrukturisasi, rekapitalisasi, dan swastanisasi);
- (iii) menghapus kesenjangan pasar dengan mendirikan lembaga-lembaga baru (misalnya, *specialized lender*, bursa, lembaga pemeringkat kredit, pusat informasi kredit, lembaga penyimpanan, dan sistem giro);
- (iv) menyediakan *regulatory capital* (misalnya ekuitas, utang subordinasi, dan instrumen modal lainnya) kepada lembaga-lembaga utama guna mendukung rasio modal dan perluasan aset;
- (v) menyediakan pendanaan (misalnya likuiditas tambahan, jangka waktu lebih lama, valuta asing) kepada lembaga-lembaga utama untuk memperluas aset dan meningkatkan *asset-liability management*; dan
- (vi) program penerusan pinjaman yang ditujukan kepada sektor-sektor prioritas seperti UKM, pertanian, infrastruktur, perumahan, pendanaan perdagangan (misalnya fasilitas utang dan jaminan kredit parsial).

47. Ada banyak kesempatan untuk menawarkan program-program bantuan melalui divisi swasta ADB di bawah butir (ii) dan (iv) diatas. Divisi Sektor Pasar Modal dan Keuangan juga bisa memberi kontribusi dalam dialog kebijakan di bawah butir (i). Program-program yang ditawarkan bisa berupa pemberian pinjaman (misalnya kredit dan obligasi), investasi

<sup>10</sup> Tingkat investasi ekuitas swasta sebagai bagian dari PDB pada tahun 2003 adalah: 0,59% di Singapura, 0,47% di Republik Korea, 0,31% di Indonesia. *Venture Capital Journal*. 2004. "The 2004 Guide to Venture Capital in Asia." Hong Kong, China; *World Bank*. 2004. *World Development Indicators*. Washington, DC.

penyertaan modal, *hybrid instrument* (misalnya, saham istimewa, utang subordinasi, utang konversi), jaminan kredit parsial dan jaminan asuransi risiko politik (dan instrumen lainnya yang sesuai) . Semua program yang ditawarkan didasarkan pada (i) “penilaian kebutuhan” umum dan (ii) kesempatan khusus untuk menawarkan program. Pemberian utang dilakukan berdasarkan persyaratan pasar, namun ADB membidik pangsa pasar tertentu dan kurang terlayani atau menjembatani kesenjangan yang terkait dengan masa jatuh tempo dan struktur.

48. Departemen Operasi Sektor Swasta ADB secara khusus akan mengkaji kemungkinan menyediakan pinjaman untuk intermediasi keuangan kepada Bank UKM lokal atau lembaga pendanaan bukan bank (LKNB) yang melayani UKM (yakni perusahaan sewa guna). Sasaran utama program bantuan ini adalah UKM yang belum memiliki akses kepada sumber pendanaan eksternal, atau UKM yang sudah meminjam dana tapi masih memerlukan pinjaman yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sektor UKM mewakili sekitar 57% perekonomian di Indonesia dan menyerap sekitar 60% tenaga kerja. ADB juga bermaksud untuk memperluas kegiatan pendanaan bersamanya di Indonesia, terutama kegiatan pemberian jaminan, yang selaras dengan strategi jangka menengah II ADB. Salah satu fokus dari kegiatan ini adalah penyediaan jaminan kredit untuk mendukung pasar modal, yakni menjamin penerbitan sekuritas, termasuk penerbitan obligasi korporasi atau efek beragun aset.

## Lampiran 6

**PLAFON DANA PENDAMPING DAN PARAMETER PENDANAAN LAINNYA**

<b>Butir</b>	<b>Parameter</b>	<b>Keterangan/Penjelasan</b>
<b>Plafon Dana Pendamping Pemerintah</b> untuk portofolio pinjaman selama periode CSP 2006-2009	Sampai dengan 70%	Ini merupakan lanjutan dari praktek yang ada selama ini. Rasa memiliki dan komitmen akan dikembangkan melalui proses alokasi anggaran, dan akan memungkinkan badan-badan pengawas untuk memastikan bahwa proyek-proyek disiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Persentase dana pendamping ini bisa bervariasi untuk setiap proyek, tergantung pada kebutuhan dan sifat proyek.
<b>Plafon Dana Pendamping di Indonesia</b> untuk portofolio bantuan teknis selama periode CSP 2006-2009	Sampai dengan 80%	Ini merupakan lanjutan dari praktek yang ada selama ini. Pemerintah secara rutin mengalokasikan dana pendamping dari anggaran sebesar 20% untuk proyek bantuan teknis yang meningkatkan rasa memiliki dan komitmen.
<b>Plafon Dana Pendamping</b> untuk semua sektor untuk portofolio pinjaman selama periode CSP 2006-2009	Sampai dengan 70%	Belum ada usulan untuk variasi bagi setiap sektor.
<b>Penyediaan Dana untuk Biaya Rutin.</b> Apakah ada batasan yang berlaku untuk jumlah total pengeluaran rutin yang dapat dibiayai oleh ADB?	Tidak ada selain batas plafon dana pendamping	Pemerintah telah beralih ke sistem anggaran gabungan, dimana tidak ada lagi perbedaan antara pengeluaran rutin dan non rutin. Secara resmi, unit pelaksana proyek sudah dihapus, meskipun penghapusan ini perlu waktu. Oleh karena itu, proyek-proyek akan terintegrasi sepenuhnya ke dalam sistem pemerintah selama pelaksanaan, sehingga meningkatkan kemungkinan berjalannya proyek-proyek tersebut secara berkelanjutan.
<b>Pajak dan cukai.</b> Apakah ada pajak dan cukai atas barang dan jasa yang dibiayai oleh ADB?	Tidak ada	Pajak dan cukai dianggap sesuai porsinya, dan tidak ada pajak dan cukai yang ditujukan khusus kepada proyek-proyek ADB. Di tingkat proyek, ADB akan mempertimbangkan apakah pajak dan cukai menjadi pos pengeluaran proyek yang tinggi. Pemerintah telah menyebutkan bahwa mereka tidak akan mengajukan pinjaman untuk memperoleh pemasukan pajak dan cukai.

CSP = Country Strategy and Program;  
 Sumber: Asian Development Bank

**KERTAS KERJA KONSEP UNTUK PRODUK-PRODUK PINJAMAN**

Lampiran ini memuat Kertas Kerja konsep untuk produk-produk pinjaman berikut:

- Tabel A7.1: Perikanan Budi Daya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan
- Tabel A7.2: Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah
- Tabel A7.3: Program Bantuan Pengembangan Kebijakan Tahap II dan III
- Tabel A7.4: Kelompok Program Pembangunan Infrastruktur (IRP)
- Tabel A7.5: Pelabuhan Antar Pulau
- Tabel A7.6: Proyek Pengelolaan Terpadu Sumber daya Air DAS Citarum
- Tabel A7.7: Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah
- Tabel A7.8: Peningkatan Efisiensi Distribusi Listrik dan Penghematan Energi Oleh Pemakai Akhir
- Tabel A7.9: Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial Tahap II dan III
- Tabel A7.10: Fasilitas Hipotik Sekunder
- Tabel A7.11: Proyek Peningkatan Gizi melalui Pemberdayaan Masyarakat
- Tabel A7.12: Program Pengurangan Kemiskinan dan Percepatan Pencapaian MDG

**Tabel A7.1: Kertas Kerja Konsep untuk Proyek Perikanan Budi Daya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan  
(Sustainable Aquaculture for Food Security and Poverty Reduction)**

Tanggal: 7 Agustus 2006

<p><b>1. Jenis /bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p>    <input type="checkbox"/> Dana Hibah ADF</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input type="checkbox"/> Non Pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Selain persiapan proyek</p> <p>        <input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, lintas sektor dan sektor</p> <p>        <input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p>        <input type="checkbox"/> Lainnya:</p>								
<p><b>2. Fokus Bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya: Sektor: Sumberdaya alam dan pertanian Subsektor: Perikanan</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p>    <input type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p>Tema:</p> <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan</td> <td><input type="checkbox"/> Kelestarian lingkungan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif</td> <td><input type="checkbox"/> Kerjasama regional</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tata kelola</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan</td> <td><input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</td> </tr> </table> <p>Subtema: Meningkatkan efisiensi ekonomi dan pasar yang mendukung, mendorong pembangunan infrastruktur fisik, kemitraan pemerintah-swasta</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	<input type="checkbox"/> Kelestarian lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif	<input type="checkbox"/> Kerjasama regional	<input type="checkbox"/> Tata kelola	<input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta	<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas
<input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	<input type="checkbox"/> Kelestarian lingkungan							
<input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif	<input type="checkbox"/> Kerjasama regional							
<input type="checkbox"/> Tata kelola	<input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta							
<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas							
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional                      <input type="checkbox"/> Subregional                      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>								
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Pertanian, Lingkungan dan Sumberdaya Alam, Departemen Wilayah Asia Tenggara ADB</p>								

**5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:** M. Jamilur Rahman

**6. Uraian tentang bantuan**

- a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Indonesia memiliki sumberdaya air tawar , air payau, dan laut yang melimpah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai perikanan budi daya. Indonesia memiliki berbagai jenis ikan yang bisa dibudi dayakan dan spesies air lainnya serta teknologi untuk mengembangkan perikanan budi daya air tawar, air payau, dan laut. Perikanan budi daya selama ini memberi kontribusi yang signifikan dalam menjamin ketersediaan pangan, menyediakan ketahanan pangan bagi masyarakat, mendatangkan devisa negara dan pendapatan dalam negeri, meningkatkan ekspor ikan dan komoditas lainnya yang dihasilkan dari perikanan budi daya, serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat miskin pedesaan. Namun, pengembangan perikanan budi daya masih terhambat oleh (i) pertumbuhan dan produktifitas yang rendah akibat sistem budi daya ikan yang buruk dan kurangnya benih udang dan ikan yang bermutu; (ii) kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan dan teknologi budi daya ikan yang buruk; (iii) tidak tersedianya kredit untuk petani tambak miskin atau berskala kecil; (iv) mahalnnya biaya sarana produksi impor; (v) tidak adanya persiapan sosial, pelayanan penyuluhan yang tidak efisien, dan tidak tersedianya fasilitas pasca panen dan infrastruktur pemasaran, terutama untuk digunakan oleh petani kecil; dan (vi) konflik dalam penggunaan air di wilayah perairan terbuka antara petani ikan dan pengguna lainnya. Proyek ini akan membantu pemerintah menangani isu-isu tersebut.
- b. Tujuan umum dan khusus:** Tujuan umum pembangunan yang hendak dicapai melalui proyek ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan melalui pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya adalah: (i) meningkatkan produksi ikan dan komoditas lainnya yang dihasilkan dari perikanan budi daya; (ii) meningkatkan pendapatan, gizi, dan pekerjaan para petani ikan dan masyarakat pantai; dan (iii) melindungi lingkungan di wilayah darat dan perairan pantai.
- c. Komponen dan hasil:** (i) peningkatan produksi perikanan budi daya, untuk meningkatkan kinerja berbagai macam sistem perikanan budi daya di wilayah proyek melalui manajemen berbasis masyarakat; (ii) sarana dan prasarana penunjang perikanan budi daya, untuk meningkatkan teknik panen dan mutu produk perikanan budi daya dengan memperkuat pelayanan penyuluhan dan teknik penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang lebih baik dengan bekerjasama dengan sektor swasta dan organisasi berbasis masyarakat; dan (iii) pengembangan kelembagaan dan manajemen proyek, untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan Direktorat Jendral Perikanan Budi Daya, Dinas Perikanan Kabupaten, petani tambak, organisasi berbasis masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan perikanan budi daya, termasuk perencanaan usaha, manajemen, peraturan dan pelaksanaan kegiatan.
- d. Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF:** Tidak ada.
- e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Proyek ini akan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan, pekerjaan dan ketahanan pangan. Proyek ini diharapkan meningkatkan pengeluaran masyarakat untuk bahan makanan dan non makanan serta

konsumsi ikan sebanyak 20% dan membantu 20.000 rumah tangga miskin keluar dari garis kemiskinan.

- f. Isu dan masalah sosial dan lingkungan:** Proyek ini berupaya meningkatkan pendapatan dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang terkait dengan infrastruktur, teknologi, lingkungan, dan akses ke pasar yang dialami oleh para petani ikan. Proyek ini akan menggunakan pendekatan partisipatif sepenuhnya dimana sebagian besar kegiatan perikanan budi daya dan perikanan berbasis budi daya untuk dilakukan langsung oleh masyarakat.

Kegiatan proyek diharapkan tidak menimbulkan dampak yang merugikan pada lingkungan. Oleh karena itu, desain proyek dibuat dengan menyertakan langkah-langkah penting untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan tersebut yang dikenal dengan perlindungan lingkungan

- g. Rencana sosialisasi informasi mengenai hasil proyek:** Proyek ini akan mendirikan satu sistem informasi pasar untuk memungkinkan para petani ikan, organisasi berbasis masyarakat, dan perusahaan swasta untuk mendapatkan akses kepada data terkini tentang harga, pasokan dan permintaan pasar, serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar untuk berbagai produk perikanan budi daya. Untuk meningkatkan konsumsi ikan air tawar, sebuah kampanye pemasaran melalui berbagai media akan diluncurkan di propinsi-propinsi yang menjadi wilayah proyek. Proyek ini akan menyelenggarakan lokakarya serta seminar nasional dan internasional untuk memastikan agar pengalaman serta pelajaran yang didapat dari proyek ini dapat disebarluaskan sehingga bisa digunakan dalam program-program di masa yang akan datang.

**7. Lembaga-lembaga Pelaksana Yang Diusulkan:** Direktorat Jendral Perikanan Budi daya, Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai instansi penanggung jawab; dan pemerintah daerah dimana proyek dilaksanakan sebagai instansi pelaksana.

**8. Keterlibatan pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:** Proyek ini dirancang dengan bekerjasama erat dengan instansi penanggung jawab dan pemerintah kabupaten dimana proyek dilaksanakan.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2001
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman: November 2006
  - Non-pinjaman
- c. Periode dan lamanya proyek bantuan
  - Pinjaman: 1 Juli 2007–30 Juni 2013 (6 tahun)
  - Non-pinjaman

## 10. Rencana Pembiayaan

a. Untuk pinjaman

- Ordinary capital resources:*  
 *Asian Development Fund/ADF* (pinjaman): \$40 juta  
 *Asian Development Fund/ADF* (hibah):  
 Lainnya:

Sumber	Jumlah (\$ juta)
Pembiayaan dari ADB	40,00
Pembiayaan dari Pemerintah	10,19
Pembiayaan dari sumber lainnya (masyarakat)	3,07
<b>Total dana</b>	<b>53,25</b>

Sumber: hasil perkiraan *Asian Development Bank*.

ADB = *Asian Development Bank*, CSP = *country strategy and program*, RCSP = *regional cooperation strategy and program*.

**Tabel A7.2: Kertas Kerja Konsep Proyek Pengembangan Madrasah  
(Madrasah Education Development Project)**

Tanggal: Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p>    <input type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Selain persiapan proyek</p> <p>        <input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p>        <input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p>        <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya: Bantuan teknis pendampingan untuk monitoring and evaluasi eksternal</p>								
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya:</p> <p>    Sektor: Pendidikan</p> <p>    Subsektor: Pendidikan dasar, pendidikan menengah umum</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan {pilih salah satu }</p> <p>    <input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p>    Tema:</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan</td> <td><input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif</td> <td><input type="checkbox"/> Kerja sama regional</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tata kelola</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan</td> <td><input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</td> </tr> </table> <p>    Subtema: Pembangunan manusia</p>	<input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	<input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan	<input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif	<input type="checkbox"/> Kerja sama regional	<input type="checkbox"/> Tata kelola	<input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta	<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas
<input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	<input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan							
<input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif	<input type="checkbox"/> Kerja sama regional							
<input type="checkbox"/> Tata kelola	<input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta							
<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas							
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>								
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Sektor Sosial, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB</p>								
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> W. Duncan</p>								

## 6. Uraian bantuan

- a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Fokus utama strategi pendidikan ADB adalah mendukung tujuan pemerintah dalam menyediakan pendidikan dasar yang bermutu bagi semua anak pada tahun 2009, dalam kerangka kerja sistem pendidikan nasional. Elemen penting dalam konsep sistem pendidikan nasional ini adalah kemitraan pemerintah dengan pihak swasta yang menyediakan pendidikan, termasuk kelompok masyarakat yang mengelola sekolah swasta dan kelompok agama yang mengelola madrasah. Untuk mengoptimalkan kemitraan dengan sektor pendidikan madrasah dan menjamin kesetaraan bagi semua peserta didik terlepas dari sistem pendidikan yang digunakan di sekolah mereka, madrasah-madrasah perlu ditingkatkan agar memenuhi standar mutu yang sama yang berlaku di sekolah-sekolah negeri pada umumnya.
- b. Tujuan umum dan khusus:** Dampak dari proyek ini diharapkan akan meningkatkan daya saing para lulusan madrasah, yang dibuktikan dengan lebih banyak lulusan madrasah aliyah yang memiliki ketrampilan yang lebih baik, lebih banyak lulusan madrasah yang melanjutkan ke perguruan tinggi terkenal, terutama perempuan, dan gaji yang lebih tinggi bagi lulusan madrasah. Hasil proyek yang diharapkan adalah meningkatnya mutu pendidikan madrasah di tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah sehingga meningkatkan hasil belajar para peserta didik di kelas 6 dan 9 dalam mata pelajaran inti, meningkatkan tingkat akreditasi madrasah-madrasah yang menjadi sasaran proyek; dan meningkatkan persepsi para pemangku kepentingan tentang mutu pendidikan madrasah.
- c. Komponen dan hasil:** Proyek ini akan membantu madrasah mencapai atau melampaui standar nasional pendidikan di bidang (i) profesionalisme guru (ii) sarana dan prasarana belajar-mengajar; (iii) efisiensi internal; dan (iv) tata kelola, manajemen, dan kesinambungan. Proyek ini akan menggunakan sebagian besar sumberdayanya untuk meningkatkan mutu madrasah dengan menawarkan pelatihan kualifikasi bagi guru; meningkatkan sarana dan prasarana kelas, perpustakaan dan laboratorium IPA; dan menyediakan bahan ajar bagi peserta didik dan guru. Proyek ini akan meningkatkan efisiensi internal madrasah-madrasah yang menjadi sasaran proyek dengan meningkatkan angka transisi dari madrasah ibtidaiyah ke madrasah tsanawiyah dengan mengurangi angka putus sekolah dan mengulang kelas, serta meningkatkan angka kelulusan di semua tingkatan madrasah melalui program remedial dan beasiswa, khususnya bagi santri perempuan dan yang kurang mampu. Tata kelola, manajemen, dan kesinambungan madrasah-madrasah yang menjadi sasaran proyek akan ditingkatkan melalui perencanaan dan manajemen berbasis kinerja, termasuk peningkatan transparansi dalam hal manajemen keuangan dan akuntabilitas, serta pelaksanaan program-program informasi dan advokasi untuk mendorong mobilisasi sumberdaya oleh madrasah-madrasah yang menjadi sasaran proyek guna meningkatkan kesinambungan mereka.
- d. Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF:** Tidak ada..
- e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Meningkatnya tingkat akreditasi madrasah-madrasah yang menjadi sasaran proyek, hasil belajar peserta didik, dan persepsi masyarakat tentang mutu pendidikan madrasah.
- f. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Tidak ada
- g. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Lokakarya nasional akan diadakan secara berkala untuk membahas kemajuan dan hasil yang dicapai proyek.

<p>Hasil-hasil positif akan disebarluaskan ke semua kabupaten dan propinsi dimana proyek dilaksanakan untuk menyoroti praktek-praktek baik yang diterapkan di madrasah yang terlibat dalam proyek dan meningkatkan citra pendidikan madrasah.</p> <p><b>Untuk bantuan teknis, metode yang dipakai untuk sosialisasi hasil kegiatan bantuan teknis:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Konferensi/lokakarya/pertemuan informal (peserta membawa sendiri makan siang)</p> <p><input type="checkbox"/> Publikasi artikel dalam jurnal eksternal atau buku</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Siaran Perske</i> kantor-kantor berita untuk kalangan luar, termasuk website ADB (<a href="http://www.adb.org">www.adb.org</a>)</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Siaran Persdi ADB Today</i> untuk kalangan internal</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Laporan hasil monitoring dan evaluasi eksternal lain.</p>
<p><b>7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:</b> Departemen Agama (Depag)</p>
<p><b>8. Keterlibatan pemerintah/penerima bantuan proyek dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:</b></p> <p>Pemilik dan pengelola madrasah banyak dilibatkan dalam kegiatan lapangan selama persiapan proyek dan ikut hadir dalam lokakarya-lokakarya nasional, termasuk tinjauan paruh waktu dan tinjauan final tripartit. Depag membentuk satu tim khusus yang terdiri dari staf Depag dan tiga pakar dari luar yang bekerja sama dengan erat. Ketiga pakar tersebut bertugas untuk memberi masukan-masukan yang terkait dengan isu-isu pendidikan kepada Depag.</p>
<p><b>9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan</b></p> <p>a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, <i>CSP Update</i>, RSCP, <i>RSCP Update</i>, atau rencana kerja Interregional: 2004</p> <p>b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan Pinjaman: 2006 Non pinjaman (persiapan proyek): Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): 2006</p> <p>c. Periode dan lamanya proyek bantuan Pinjaman: Jan 2007-Des 2011 Non pinjaman: Jan 2007-Des 2011</p>

## 10. Rencana Pembiayaan

### a. Untuk Pinjaman

- Asian Development Fund/ADF* (pinjaman): \$50 million  
 *Asian Development Fund/ADF* (hibah):  
 Lainnya:

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$15 juta, dari AusAID

Sumber	Jumlah (\$ juta)
Pembiayaan dari ADB	50.025
Pembiayaan dari pemerintah	21.404
Pembiayaan dari sumber lainnya	-
<b>Total Dana</b>	<b>71.429</b>

Sumber: hasil perkiraan *Asian Development Bank*.

### b. Untuk non pinjaman

- Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB  
 Anggaran administrasi ADB:  
 Dana Hibah Bantuan Teknis senilai \$1 juta  
 Lainnya:

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$\_\_\_\_, dari \_\_\_\_\_.

Sumber	Jumlah (\$)
Pembiayaan dari ADB	
Pembiayaan dari pemerintah	
Pembiayaan dari sumber lainnya	
<b>Total Dana</b>	

Sumber:

*ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, RCSP = regional cooperation strategy and program.*

**Tabel A7.3: Kertas Kerja Konsep untuk Program Bantuan Pengembangan Kebijakan Tahap II dan III (Development Policy Support Program/DPSP)**

Tanggal: 3 Agustus 2006

<p><b>1. Jenis /bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p><input type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Selain persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya</p> <p>Sektor: Hukum, manajemen ekonomi, dan kebijakan publik</p> <p>Subsektor: Administrasi pemerintah pusat</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p><input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p>Tema:</p> <p><input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p><input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola      <input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>Subtema: Tata kelola pemerintahan, pengembangan kelembagaan.</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Kantor Perwakilan ADB di Indonesia/Departemen Wilayah Asia Tenggara ADB</p>
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> R. Subramaniam</p>
<p><b>6. Uraian bantuan</b></p> <p><b>a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:</b> Usulan Program Bantuan Pengembangan Kebijakan (<i>Development Policy Support Program /DPSP</i>) Tahap II ikut disertakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. ADB</p>

membantu pelaksanaan reformasi perbaikan iklim investasi dan manajemen keuangan publik yang sangat penting melalui DPSP Tahap I – yang dibiayai bersama dengan proyek *Development Policy Loan /DPL Tahap II* dari *World Bank* – pada tahun 2005. DPSP Tahap II akan melanjutkan upaya reformasi tersebut, dan membantu mencapai tujuan umum RPJM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (menjadi 7% rata-rata pendapatan per tahun pada 2009, naik dari sekitar 4% sebelum tahun 2004), dan menurunkan kemiskinan hingga separuh dari 16,6% di tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009. Selama periode Februari-Juni 2006, pemerintah telah merumuskan (i) Paket Kebijakan Infrastruktur, untuk mempercepat investasi sektor publik dan swasta, (ii) Paket Perbaikan Iklim Investasi untuk meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan, dan (iii) Paket Kebijakan Sektor Keuangan untuk memperkuat lembaga keuangan perbankan dan non bank. Selain paket-paket kebijakan tersebut ada Paket Kebijakan UKM yang saat ini sedang disiapkan. ADB berencana untuk menyediakan dukungan sektoral untuk membantu melaksanakan Paket Kebijakan Infrastruktur (melalui Usulan Kluster Program Reformasi Infrastruktur) dan Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial (melalui Usulan Kluster Program Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial). Proyek DPSP mendukung langkah-langkah reformasi makroekonomi lintas sektor untuk meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan dan mendorong investasi sektor publik dan swasta. Semua bidang tersebut terkait erat dengan usulan program dan strategi ADB di Indonesia.

- b. Tujuan umum dan khusus:** Program ini berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui (i) iklim investasi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) yang lebih baik; pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik; dan (iii) penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat miskin yang lebih baik, yang pada gilirannya akan membantu pemerataan sumberdaya dan mendorong pertumbuhan.
- c. Komponen dan hasil:** DPSP merupakan pinjaman program yang dikucurkan satu kali sekaligus (*single tranche*). Masing-masing pinjaman program di bawah rangkaian proyek DPSP (yakni DPSP-I yang disetujui pada tahun 2005 dan DPSP-II yang diusulkan) memiliki empat bidang kebijakan inti yang selaras dengan rangkaian proyek DPL- *World Bank*. Keempat bidang tersebut mencakup (i) kelayakan kredit dan stabilitas makroekonomi; (ii) perbaikan iklim investasi; (iii) perbaikan kerangka kerja pengelolaan keuangan pemerintah dan antikorupsi; dan (iv) penyelenggaraan pelayanan umum yang lebih baik. Bidang yang pertama fokus untuk meningkatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan keuangan, meningkatkan manajemen utang, dan meningkatkan efisiensi kerangka kerja peraturan bagi penerusan pinjaman dan hibah untuk memastikan agar besarnya anggaran belanja pembangunan di kabupaten/kota dan kecamatan selalu memadai. Bidang yang kedua berupaya meningkatkan secara keseluruhan kerangka kerja peraturan untuk persetujuan investasi, meningkatkan administrasi pajak serta stabilitas sistem keuangan. Bidang yang ketiga berupaya meningkatkan pelaksanaan dan pelaporan anggaran, sedangkan bidang yang keempat mendukung pemerintah dalam mengawasi program-program yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Proyek DPSP diharapkan menciptakan stabilitas makro ekonomi dengan menekan defisit anggaran dibawah 1% selama periode RPJM, dan mengurangi utang publik hingga di bawah angka 45%. Untuk bidang investasi, Proyek DPSP tahap I dan II diharapkan mendorong kenaikan investasi sebanyak 3-5% poin dari PDB. Program ini juga akan membantu pemerintah mengkonsolidasi semua kegiatan pengelolaan kas negara kedalam rekening tunggal perbendaharaan negara (*Treasury single account /TSA*).
- f. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Dengan mendukung peningkatan penyelenggaraan pelayanan umum, proyek DPS I dan II akan membantu pemerintah meningkatkan stabilitas sosial dan mengurangi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM.

<p>Isu atau persoalan non lingkungan diantisipasi dalam proyek DPSP I dan II.</p> <p><b>g. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:</b> Ini akan dilakukan melalui proses konsultasi yang digunakan pemerintah untuk berbagai paket kebijakan seperti yang disebutkan diatas.</p>
<p><b>7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:</b> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kementrian Kesra); Departemen Keuangan (Depkeu); Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Bank Indonesia (BI).</p>
<p><b>8. Keterlibatan pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:</b> Pemerintah telah merumuskan beberapa paket kebijakan yang menjadi dasar bagi penyusunan DPSP. Pemerintah dengan tegas mendorong agenda reformasi secara keseluruhan yang didukung oleh program pinjaman pengembangan kebijakan dari World Bank dari tahun 2004 (yang dibiayai bersama oleh ADB melalui DPSP sejak 2005). Pemerintah terutama menunjukkan komitmen penuh dalam mengembangkan langkah-langkah masa depan sejak 2004.</p>
<p><b>9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan</b></p> <p>a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, CSP <i>Update</i>, RSCP, RSCP <i>Update</i>, atau rencana kerja Interregional: 2006</p> <p>b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan Pinjaman: November 2006 [ akan diikuti dengan DPSP-III yang diperkirakan mulai 2007] Non pinjaman (persiapan proyek): tidak berlaku Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): tidak berlaku</p> <p>c. Periode dan lamanya proyek bantuan Pinjaman: 2006 Non pinjaman: tidak berlaku</p>
<p><b>10. Rencana Pembiayaan</b></p> <p>a. Untuk pinjaman</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Ordinary capital resources</i>: \$200 juta</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Asian Development Fund/ADF</i> (pinjaman):</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Asian Development Fund/ADF</i> (hibah):</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p>

ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, RCSP = regional cooperation strategy and program.

**Tabel A7.4: Kertas Kerja Konsep untuk Kelompok Program  
Program Reformasi Infrastruktur  
(Infrastructure Reform Program/IRP Cluster)**

Tanggal: 3 Agustus 2006

<p><b>1. Jenis /bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p>    <input type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p><input type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p>        <input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p>        <input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p>        <input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya: Sektor: Multisektor Subsektor:</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok Tema:</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola      <input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p>    <input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>Subtema: Meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik, kemitraan pemerintah-swasta, mendorong efisiensi ekonomi dan pasar yang mendukung</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Kantor Perwakilan ADB di Indonesia/Departemen Asia Tenggara</p>
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> R. Subramaniam, <i>Principal Economist</i>, Indonesia Resident Mission.</p>

## 6. Uraian tentang bantuan

- a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Total investasi sektor publik dan swasta di bidang infrastruktur melampaui 5-6% dari PDB di pertengahan tahun 90-an. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 menyebabkan penurunan tajam dalam belanja pembangunan secara keseluruhan, terutama dalam investasi infrastruktur. Investasi sektor swasta menjadi tersendat-sendat dari tahun 1998 hingga kini. Disaat yang sama, pemerintah juga menyadari bahwa sektor publik menanggung sebagian besar risiko infrastruktur, dan berhenti menyediakan dukungan untuk *risk sharing*. Akibatnya, pasca krisis, Indonesia tidak lagi termasuk dalam jajaran negara terdepan di Asia Tenggara yang berhasil menyediakan infrastruktur. Dengan investasi infrastruktur hanya mencapai sekitar 2% dari PDB sejak 1998, masih ada 50 juta penduduk (atau lebih dari 20% dari total penduduk) yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan bersih, 90 juta penduduk tidak mendapatkan listrik, dan sekitar 200 juta penduduk tidak memiliki sambungan telpon. Masyarakat miskinlah yang menjadi korban dari minimnya akses ke pelayanan infrastruktur dasar seperti tersebut diatas. Ketersediaan pelayanan biasanya lebih rendah di daerah pedesaan, terutama yang berada di luar Jawa dan Bali, sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan yang besar antar daerah. Pemerintah memperkirakan diperlukan sekitar \$ 65 milyar dalam investasi infrastruktur selama 15 tahun ke depan, dimana \$25 milyar darinya (38%) akan diambil dari anggaran pemerintah, \$14 milyar (22%) dari bank dalam negeri dan dana asuransi dan pensiun, \$10 milyar (15%) dari lembaga donor multilateral dan bilateral, dan \$16 milyar (25%) dari investor dalam dan luar negeri.

Pemerintah mengakui bahwa partisipasi sektor swasta tidak bisa diharapkan kecuali jika reformasi struktural dan kelembagaan benar-benar perlu dilaksanakan dengan serius mengingat iklim investasi yang tidak mendukung. Pada bulan Januari 2005, pemerintah mengadakan KTT Infrastruktur (*Infrastructure Summit*). Dalam kesempatan itu, pemerintah mengumumkan komitmennya untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dan mengidentifikasi 91 proyek infrastruktur untuk masa yang akan datang. Sejak saat itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting untuk menguatkan kerangka kerja hukum dan kelembagaan untuk partisipasi sektor swasta. Sebagai bahan acuan, kerangka kerja ini menggunakan Paket Kebijakan Infrastruktur yang dikeluarkan pada Februari 2006 yang menjabarkan agenda reformasi di berbagai sektor infrastruktur. Program Reformasi Infrastruktur yang diusulkan, yang disusun atas permintaan pemerintah, dibuat berdasarkan paket kebijakan infrastruktur yang dikembangkan melalui konsultasi luas dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra pemerintah, termasuk ADB. Program Reformasi Infrastruktur berupaya mendukung reformasi infrastruktur selama periode 2005-2009, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pemerintah.

- b. Tujuan umum dan khusus:** Program Reformasi Infrastrukture yang diusulkan bertujuan meningkatkan penyediaan dan akses terhadap infrastruktur sehingga memperbaiki iklim investasi, yang pada gilirannya akan membantu mencapai tujuan jangka menengah pemerintah di bidang makro ekonomi, khususnya dalam mencapai angka pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6-7% dari PDB selama periode 2005-2009. Hasil yang diharapkan dari program reformasi infrastruktur ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur melalui partisipasi sektor swasta yang besar dan peningkatan belanja sektor publik.
- c. Komponen dan hasil:** Konsep Kluster Program Reformasi Infrastruktur terdiri dari tiga rangkaian subprogram untuk mendukung reformasi infrastruktur selama periode 2005-2009. Dewan Direktur ADB diperkirakan akan mempertimbangkan Subprogram 1 (SP1) pada bulan September 2006. Jarak waktu pelaksanaan antara satu subprogram dengan

subprogram berikutnya diperkirakan memakan waktu 14-18 bulan. Jika kemajuan yang dicapai dalam SP1 cukup memuaskan dan Dewan Direktur ADB memberikan persetujuannya pada akhir September 2006, SP2 akan diajukan ke Dewan Direktur ADB untuk dipertimbangkan dan disetujui paling lambat triwulan pertama 2008. SP2 akan diikuti oleh SP3 pada tahun 2009. Kluster Program Reformasi Infrastruktur secara keseluruhan terdiri dari tiga pilar:

(i) **Reformasi lintas sektor yang strategis**, yang akan menciptakan:

- (a) perbaikan kebijakan, kerangka kerja hukum dan kelembagaan untuk partisipasi sektor swasta yang lebih besar yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik;
- (b) kerangka kerja manajemen risiko yang jelas yang akan meningkatkan partisipasi sektor swasta;
- (c) percepatan mobilisasi sumber pembiayaan jangka panjang dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur melalui proyek-proyek kemitraan pemerintah-swasta; dan
- (d) kerangka kerja otonomi daerah yang lebih efisien, yang menjabarkan dengan jelas tanggung jawab fungsional pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur.

(ii) **Kebijakan khusus sektor, reformasi hukum dan kelembagaan di sektor transportasi; listrik; minyak dan gas; penyediaan air bersih dan sanitasi; serta telekomunikasi** yang akan mengarah kepada:

- (a) pengelolaan keuangan yang baik dan pelayanan infrastruktur yang berkesinambungan melalui penghasilan yang dapat mengembalikan biaya modal yang telah dikeluarkan sepenuhnya;
- (b) persaingan yang lebih besar yang akan menguntungkan pengguna jasa melalui pelayanan yang lebih baik dan tarif yang lebih rendah;
- (c) struktur peraturan independen yang memisahkan fungsi pemberian kontrak dan pelaksanaan;
- (d) iklim usaha yang sehat dan persaingan yang adil diantara para pelaku bisnis, dan mencegah timbulnya penyalahgunaan hak monopoli terhadap sumber daya alam; dan
- (e) pemenuhan kewajiban para penyedia pelayanan infrastruktur untuk memberikan pelayanan umum, selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan

(iii) **Persiapan dan pelaksanaan transaksi proyek yang terencana**, yang menghasilkan model-model proyek kemitraan pemerintah-swasta sektor yang dapat direplikasi.

**d. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Pelaksanaan kluster Program Reformasi Infrastruktur kemungkinan besar akan mempercepat investasi sektor publik dan swasta di bidang infrastruktur dengan signifikan. Pada tahun 2009, kluster program akan membantu pemerintah meningkatkan rasio investasi infrastruktur dari 2% dari PDB saat ini menjadi 5% pada tahun 2009. Selain itu, setidaknya sekitar 40 proyek kemitraan pemerintah-swasta yang memenuhi syarat akan diproses untuk ditenderkan. Proyek-proyek ini diperkirakan akan mendatangkan \$20 milyar dalam investasi baru pada tahun 2009.

**e. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Dengan meningkatkan penyediaan infrastruktur, kluster program reformasi kebijakan akan mempercepat pertumbuhan, meningkatkan iklim investasi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Hasil keuntungan

yang diperoleh ADB dari pinjaman program tidak akan digunakan untuk membiayai investasi dalam proyek. Namun standar dan pedoman pemerintah mengenai lingkungan akan digunakan dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek model kemitraan pemerintah-swasta yang didukung di bawah kluster program reformasi kebijakan.

**Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Ini akan dilakukan melalui proses konsultasi dan penyebaran informasi yang dilakukan pemerintah untuk paket kebijakan infrastruktur.

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) akan bertindak sebagai instansi penanggung jawab untuk kluster program reformasi infrastruktur. Pelaksanaan kluster program ini akan diawasi oleh Komite Nasional Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPI). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Keuangan (Depkeu), departemen-departemen lain yang terkait dengan infrastruktur (termasuk departemen perhubungan, departemen pekerjaan umum, departemen energi dan sumberdaya mineral, dan departemen komunikasi dan informasi), serta beberapa instansi pemberi kontrak dalam bidang infrastruktur akan melaksanakan berbagai komponen yang ada.

**8. Keterlibatan pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:** Pemerintah sepenuhnya memiliki kluster program reformasi kebijakan. Karena program ini dirancang berdasarkan paket kebijakan infrastruktur pemerintah, program ini mendapat dukungan dari departemen/kementerian pelaksana dan departemen/kementerian serta instansi lainnya yang terlibat. Pemerintah sepenuhnya terlibat dalam perumusan agenda reformasi yang didukung di bawah program reformasi kebijakan.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- Tahun yang dicantumkan dalam CSP, CSP *Update*, RSCP, RSCP *Update*, atau rencana kerja Interregional: 2006
- Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman: Sub Program 1 dari PPI pada bulan September 2006; Sub Program 2 di triwulan pertama 2008; dan Sub Program 3 di triwulan kedua dan ketiga 2009
  - Non pinjaman (persiapan proyek): tidak berlaku
  - Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): Sub Program 1 disertai bantuan teknis senilai \$1,8 juta untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur.
- Periode dan lamanya proyek bantuan
  - Pinjaman: 2006-2010
  - Non pinjaman: 2006-2010

#### **10. Rencana Pembiayaan**

- Untuk pinjaman
  - Ordinary capital resources*: Pemerintah telah meminta \$400 juta untuk mendanai Sub Program 1. Program-program yang dananya dikururkan satu kali sekaligus di bawah Sub Program 2 dan 3 masing-masing diperkirakan akan memerlukan dana sebesar \$300 juta.
  - Dana ADF (pinjaman):
  - Dana ADF (hibah):
  - Lainnya:

ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, RSCP = regional cooperation strategy and program.

**Tabel A7.5: Kertas Kerja Konsep untuk Pelabuhan antar Pulau  
(Interisland Port)**

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus Bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya</p> <p>Sektor: Transportasi dan komunikasi</p> <p>Subsektor: Pelabuhan, jalur air, dan pelayaran</p> <p>b. Untuk persiapan proyek dan pinjaman, klasifikasi</p> <p><input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p><input type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Key thematic areas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p><input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p><input type="checkbox"/> Tata kelola      <input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan</p> <p>Subtema: Meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input checked="" type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Infrastruktur, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB</p>
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> J. Miller</p>
<p><b>6. Uraian tentang bantuan</b></p> <p>a. <b>Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:</b> Sarana transportasi laut</p>

sangat penting di wilayah Indonesia bagian timur, terutama bagi pengangkutan kargo, meskipun industri jasa angkut penumpang mengalami penurunan akibat adanya kompetisi dari jasa angkutan udara. Pembangunan infrastruktur pelabuhan di koridor logistik utama diperlukan untuk merencanakan hirarki pelabuhan guna meningkatkan rantai logistik di wilayah Indonesia bagian timur. Perluasan pelabuhan juga diperlukan untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi pelabuhan, serta mengakomodasi naiknya permintaan akan jasa transportasi. Namun, pembangunan fisik hanya akan efektif jika pemerintah juga memperhatikan persoalan yang terkait dengan (i) kerangka kerja peraturan, hukum dan kelembagaan, termasuk mekanisme penetapan dan penyesuaian tarif pelabuhan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam investasi dan pengoperasian pelabuhan; (ii) sistem keamanan pelabuhan; dan (iii) reformasi sektor pelabuhan dan transportasi, terutama dalam menyediakan pedoman yang jelas bagi pemerintah, operator pelabuhan, pemerintah daerah, dan peran sektor swasta dalam membangun dan membiayai pelabuhan, serta mengoptimalkan penyelenggaraan jasa angkutan feri dan laut.

Pelabuhan yang ada di Balikpapan dan Jayapura tidak bisa menangani volume peti kemas untuk saat ini dan untuk jangka panjang. Di tingkat makro, pembangunan pelabuhan di Balikpapan dan Jayapura direkomendasikan oleh program bantuan teknis ADB untuk menyiapkan Proyek Transportasi Antar Pulau. Subproyek Pelabuhan Balikpapan merupakan prioritas karena (i) pelabuhan tersebut akan membantu meningkatkan pelabuhan-pelabuhan yang melayani koridor logistik di wilayah utara, dan (ii) kota Balikpapan dirancang sebagai pusat pertumbuhan zona pembangunan ekonomi terpadu Samarinda-Balikpapan, serta sebagai pelabuhan BIMP-EAGA. Pembangunan pelabuhan Jayapura dianggap perlu karena pelabuhan ini (i) memainkan peran yang penting dalam koridor logistik di wilayah utara, tengah dan selatan; dan (ii) akan mendukung perhubungan laut ke pelabuhan Sorong sebagai pintu masuk utama ke propinsi Papua. Proyek ini akan memberi kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan fokus strategis bantuan ADB bagi Indonesia.

- b. Tujuan umum dan khusus:** Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk (i) meningkatkan mobilitas kargo laut, (ii) meningkatkan kinerja dan produktifitas pelabuhan dengan memperluas dan memodernisasi infrastruktur pelabuhan di Balikpapan dan Jayapura, dan (iii) meningkatkan iklim bisnis pelabuhan. Proyek ini akan membantu pelaksanaan strategi pemerintah dalam meningkatkan subsektor transportasi laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur.
- c. Komponen dan hasil:** Proyek ini terdiri dari empat komponen, yaitu: (i) pembangunan pelabuhan, (ii) reformasi sektor pelabuhan, (iii) pengembangan kapasitas dan pelatihan, dan (iv) bantuan teknis untuk pelabuhan Banjarmasin. Komponen pembangunan pelabuhan meliputi pembangunan dan perluasan pelabuhan di Balikpapan dan Jayapura, termasuk pengadaan dan pengoperasian peralatan untuk menangani peti kemas. Skema partisipasi sektor swasta akan dikembangkan untuk mengadakan dan mengoperasikan peralatan untuk menangani peti kemas untuk pelabuhan di Balikpapan. Reformasi sektor pelabuhan akan mengidentifikasi kerangka kerja tindakan untuk perubahan kebijakan di sektor pelabuhan dan untuk mengoptimalkan pelayanan dan infrastruktur angkutan laut dan feri. Pengembangan kapasitas dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan, dan keamanan pelabuhan di Balikpapan dan Jayapura. Bantuan teknis akan disediakan untuk menyiapkan proyek pembangunan pelabuhan Banjarmasin.
- d. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Proyek ini akan (i) membangun terminal peti kemas

baru di pelabuhan Balikpapan dan perluasan terminal serbaguna di pelabuhan Jayapura; (ii) menciptakan pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan yang lebih baik ; (iii) mendukung investasi sektor swasta dalam pengoperasian pelabuhan; dan (iv) menciptakan pengoperasian pelabuhan yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan di pelabuhan Balikpapan dan Jayapura.

- e. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan: Lingkungan.** Proyek ini masuk dalam kategori A di bawah Pedoman Penilaian Lingkungan ADB (*ADB's Environmental Assessment Guidelines*, 2003). Proyek ini mencakup pembangunan sarana pelabuhan dan sarana dan peralatan penunjang lainnya. Pemerintah akan mengadakan penilaian dampak lingkungan terhadap kedua pelabuhan.
- Pembebasan tanah dan pemindahan penduduk.** Tanah untuk pelabuhan Balikpapan diperoleh pada tahun 1997; oleh karena itu pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan tidak diperlukan. Perluasan pelabuhan Jayapura tidak memerlukan pembebasan tanah dan pemindahan penduduk.
- f. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Akan diputuskan kemudian.

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Departemen Perhubungan

**8. Keterlibatan pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:** Bantuan teknis ADB untuk menyiapkan Proyek Transportasi Antar Pulau telah menghasilkan rencana induk transportasi antar pulau untuk wilayah Indonesia bagian timur dan memprioritaskan proyek-proyek untuk investasi berdasarkan kriteria yang disepakati. Lokakarya tingkat daerah dan nasional diselenggarakan untuk membahas hasil temuan kegiatan bantuan teknis dan menyepakati proyek-proyek yang diprioritaskan. Bantuan teknis ini juga menghasilkan penilaian ekonomi dan keuangan terhadap proyek-proyek prioritas dan memastikan kelayakannya untuk didanai oleh bantuan ADB. PELINDO IV, badan usaha milik pemerintah yang akan menjadi operator pelabuhan sesuai dengan UU yang berlaku, telah menyertakan rencana induk tersebut ke dalam rencana kerjanya. Menteri BUMN, yang menerima laporan pertanggung jawaban keuangan PELINDO IV, secara prinsip setuju bahwa proyek yang diusulkan akan dibiayai oleh pemerintah melalui skema pembiayaan bersama.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2004
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman: Oktober 2005
  - Non pinjaman (persiapan proyek):
  - Non pinjaman (selain dari persiapan proyek):
- c. Periode dan lamanya bantuan
  - Pinjaman: 2007–2011
  - Nomor pinjaman: 2003–2005

**10. Rencana Pembiayaan**

## a. Untuk pinjaman

- Ordinary capital resources*: \$47 juta  
 Asian Development Fund/ADF:  
 Lainnya:

<b>Sumber</b>	<b>Jumlah (\$ juta)</b>
Pembiayaan dari ADB	47.000.000
Pembiayaan dari pemerintah	21.500.000
Sumber pembiayaan lainnya	-
<b>Total dana</b>	<b>68.500.000</b>

Sumber: hasil penghitungan ADB.

## b. Untuk non pinjaman

- Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB  
 Anggaran administrasi ADB: \$  
 Dana hibah bantuan teknis  
 Lainnya:

<b>Sumber</b>	<b>Jumlah (\$)</b>
Pembiayaan dari ADB	1,000,000
Pembiayaan dari pemerintah	250,000
Sumber pembiayaan lainnya	
<b>Total dana</b>	<b>1,250,000</b>

Source: hasil penghitungan *Asian Development Bank*.

ADB = *Asian Development Bank*, CSP = *country strategy and program*, RCSP = *regional cooperation strategy and program*.

**Tabel A7.6: Kertas Kerja Konsep untuk Proyek Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air DAS Citarum (*Integrated Citarum Water Resources Project*)**

Tanggal: Februari 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lainnya: <i>MFF Pilot</i></p> <p><input type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus Bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya Sektor: Sumberdaya alam dan pertanian Subsektor: pengelolaan sumberdaya alam</p> <p>b. Untuk persiapan proyek dan pinjaman, klasifikasikan program bantuan</p> <p><input type="checkbox"/> program pengurangan kemiskinan inti</p> <p><input type="checkbox"/> program pengurangan kemiskinan</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif</p> <p><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input checked="" type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Pertanian, Lingkungan &amp; Sumberdaya Alam, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB</p>
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> C. I. Morris</p>
<p><b>6. Uraian tentang bantuan</b></p> <p>a. <b>Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:</b> Citarum adalah daerah aliran sungai (DAS) yang paling strategis di Indonesia. Dengan luas lebih dari 11.000.000 km<sup>2</sup>, DAS ini menjadi tempat tinggal bagi 9 juta penduduk, 390.000 hektar areal sawah, tiga bendungan utama dengan kapasitas terpasang 1.400</p>

megawatt, dan pusat-pusat industri utama yang tersebar di Bandung, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Sungai Citarum memasok 80% kebutuhan air baku kota Jakarta. Kemiskinan di DAS Citarum jauh diatas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan di 8 dari 11 kabupaten/kota yang ada di sepanjang DAS Citarum mencapai 25% atau lebih pada tahun 2000. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi yang tidak memadai, infrastruktur yang rusak, kebutuhan air yang meningkat di sektor pertanian, dan pertumbuhan perkotaan dan industri yang cepat telah menyebabkan krisis pasokan air dan kondisi lingkungan yang tidak sehat di sepanjang DAS Citarum.

Pengembangan sumberdaya air selama ini merupakan salah satu bidang utama yang menjadi fokus bantuan ADB kepada Indonesia dengan jumlah total mencapai \$ 1,5 milyar, baik dalam bentuk pinjaman maupun bantuan teknis. Selaras dengan kebijakan "Air bagi Semua" yang dianut ADB, upaya mendorong penggunaan sumberdaya air yang berkelanjutan menjadi elemen kunci dalam kemitraan antara ADB dengan Indonesia. Selama misi penyusunan program ADB di Indonesia pada tahun 2003, pemerintah meminta bantuan teknis untuk menyiapkan proyek pengelolaan terpadu sumberdaya air untuk DAS Citarum.

- b. Tujuan umum dan khusus:** Tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan ketersediaan air dan pengelolaan sumberdaya air yang terpadu.
- c. Komponen dan hasil:** Proyek ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu (i) perencanaan dan pengelolaan program; (ii) bantuan kepada instansi-instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS (dewan sumberdaya air, badan pengatur, dan pengelola) serta pengembangan kapasitas lembaga-lembaga dari sektor terkait dan pemerintah daerah; (iii) meningkatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat sipil; (iv) penyediaan air (peningkatan sistem pelayanan, pengembangan sumber air, peningkatan daerah resapan air, dan perbaikan lingkungan); dan (v) pelayanan air (modernisasi irigasi, listrik tenaga air, penyediaan air bersih dan sanitasi); (vi) penanganan bencana; dan (vii) pengembangan kemitraan pemerintah-swasta yang efektif.
- d. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Pengelolaan sumberdaya air dan tata kelola yang lebih baik, meningkatnya ketersediaan air baku, kondisi kesehatan dan kehidupan yang lebih baik, berkurangnya erosi tanah, meningkatnya hasil panen padi, listrik tenaga air, berkurangnya kerusakan akibat banjir dan tanah longsor, serta penanganan bencana yang lebih baik
- e. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Peningkatan kondisi sosial dan lingkungan secara umum. Sebagian kegiatan proyek perlu ditinjau kembali untuk memastikan agar kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ADB *safeguard policy*.
- f. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Diskusi tripartit, partisipasi pemangku kepentingan yang terkait dengan DAS Citarum akan disertakan dalam kegiatan tata kelola proyek pengelolaan terpadu sumberdaya air.

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Direktorat Jendral Sumberdaya Air,  
Departemen Pekerjaan Umum, dan pemerintah daerah sebagai instansi pelaksana

<p><b>8. Keterlibatan pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:</b> Melibatkan instansi penanggung jawab dan pemangku kepentingan lainnya di luar kalangan pemerintah dalam survei persiapan proyek, diskusi, lokakarya.</p>
<p><b>9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan</b></p> <p>a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, CSP <i>Update</i>, RSCP, RSCP <i>Update</i>, atau rencana kerja Interregional: 2004</p> <p>b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan Pinjaman: 2006 Non pinjaman (persiapan proyek): 2006 (tambahan)  Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): 2007</p> <p>c. Periode dan lamanya program bantuan Pinjaman: - Non pinjaman : 2007 sampai dengan 2022 (program 15 tahun)</p>
<p><b>10. Rencana Pembiayaan</b></p> <p>a. Untuk pinjaman  <input checked="" type="checkbox"/> <i>Ordinary capital resources</i>: MFF (15 tahun): \$500 juta; kucuran pertama: \$100 juta  <input type="checkbox"/> <i>Asian Development Fund/ADF</i>:  <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p>Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$50 juta dana hibah selama MFF; sumber pembiayaan bersama yang mungkin diperoleh: Belanda dan GEF. Jika diketahui, sebutkan estimasi biaya dan kesepakatan pembiayaan (misalnya total biaya, pembiayaan dari ADB, pembiayaan dari sumber lainnya, dan pembiayaan dari pemerintah):</p> <p>b. Untuk non pinjaman  <input type="checkbox"/> Tidak memerlukan sumberdaya apapun kecuali staf ADB  <input type="checkbox"/> Anggaran administrasi ADB:  <input checked="" type="checkbox"/> Dana hibah bantuan teknis \$1.000.000  <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p>Jika diketahui, sebutkan estimasi biaya dan kesepakatan pembiayaan (misalnya total biaya, pembiayaan dari ADB, pembiayaan dari sumber lainnya, dan pembiayaan dari pemerintah):</p>

ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, SCSP = subregional cooperation strategy and program.

**Tabel A7.7: Kertas Kerja Konsep untuk Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah  
(Senior Secondary Education Development Project)**

**Tanggal:** Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p>        <input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p>        <input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p>        <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya: Analisa dan Pengembangan Kebijakan untuk Sektor Pendidikan Menengah Umum</p>
<p><b>2. Fokus Bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya</p> <p>    Sektor: Pendidikan</p> <p>    Subsektor: Pendidikan menengah umum</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan {pilih salah satu }</p> <p>    <input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p>    Tema:</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p>    <input type="checkbox"/> Tata kelola      <input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p>    <input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>    Subtema: Pembangunan manusia, membangun daerah pedesaan</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Sektor Sosial, Departemen Wilayah Asia Tenggara ADB</p>

**5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:** Wendy Duncan

**6. Uraian tentang bantuan**

**a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Tenaga kerja Indonesia kalah saing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain dalam segala bidang. Banyak perusahaan besar yang mengeluh bahwa tingkat pendidikan dan ketrampilan pekerja yang tidak memadai menjadi hambatan besar dalam pengoperasian dan pertumbuhan usaha mereka dibandingkan dengan Filipina atau India (yakni 26% di Indonesia, 18% di Filipina dan 13% di India). Struktur industri masih tetap terfokus pada industri berteknologi rendah dan perakitan. Salah satu tujuan strategi pendidikan ADB untuk CSP 2005-2009 berupaya meningkatkan daya saing lulusan sekolah dan universitas, yang akan membantu meningkatkan iklim investasi dan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan mutu ketrampilan tenaga kerja.

**b. Tujuan umum dan khusus:** Tujuan umum proyek ini adalah menciptakan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif di dunia kerja internasional. Dibandingkan dengan tenaga kerja di negara-negara lain, kebanyakan tenaga kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan dan produktifitas yang lebih rendah. Salah satu alasannya adalah minimnya jumlah sekolah yang mampu menyediakan pendidikan yang bermutu tinggi. Kebijakan pemerintah baru-baru ini menekankan peningkatan sistem pendidikan menengah untuk menghasilkan lulusan bermutu tinggi dari sekolah menengah umum (SMU) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Salah satu elemen kunci dalam proses ini adalah UU tentang Pendidikan Nasional yang mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk mengembangkan sekolah bertaraf internasional. Tujuan khusus dari proyek ini adalah meningkatkan jumlah peserta didik sekolah menengah yang lulus dengan kualifikasi, ketrampilan, dan mutu yang lebih baik sehingga mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain. Oleh karena itu sekolah-sekolah yang terpilih dalam proyek ini diharapkan akan mendapatkan akreditasi internasional dan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan internasional, untuk memastikan agar kualifikasi lulusan mereka sesuai dengan standar internasional.

**c. Komponen dan hasil:** Proyek ini fokus untuk meningkatkan proses belajar-mengajar dan manajemen sekolah sesuai dengan target Depdiknas mengembangkan sekolah-sekolah bertaraf internasional. Proyek ini berupaya untuk (i) meningkatkan hasil belajar lulusan sekolah menengah; (ii) meningkatkan manajemen sekolah menengah dan jaminan mutu; (iii) meningkatkan kesetaraan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat; dan (iv) menciptakan dasar bagi peningkatan kebijakan dan perencanaan.

Proyek ini mencakup kegiatan-kegiatan yang akan menetapkan dan membantu melembagakan standar pendidikan yang tinggi yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu sekolah menengah. Kegiatan proyek utamanya ditujukan pada sekolah, meskipun diknas tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat juga akan memperoleh manfaat darinya.

**d. Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF:** Dana ADF akan digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah menengah, terutama sekolah kejuruan yang memiliki peserta didik dari keluarga miskin, serta meningkatkan akses ke sekolah bertaraf internasional bagi peserta didik yang berprestasi melalui beasiswa dan bantuan lainnya.

**e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Meningkatnya hasil belajar para lulusan, manajemen sekolah dan jaminan mutu, kesetaraan pendidikan dan penyediaan pelayanan khusus, dan dasar bagi kebijakan dan strategi yang ditetapkan

- f. **Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Tidak ada
- g. **Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Lokakarya nasional akan diadakan secara berkala untuk membahas kemajuan dan hasil yang dicapai proyek. Hasil-hasil positif akan disebarluaskan ke semua kabupaten dan propinsi dimana proyek dilaksanakan untuk menyoroti praktek-praktek yang baik yang dikembangkan dalam proyek ini. Lokakarya akan diselenggarakan untuk membahas hasil analisa dan kebijakan sektor.

**Untuk bantuan teknis, metode yang digunakan untuk sosialisasi informasi hasil proyek:**

- Konferensi/lokakarya/pertemuan informal (peserta membawa sendiri makan siang)
- Publikasi artikel dalam jurnal eksternal atau buku
- Siaran Pers* ke kantor-kantor berita untuk kalangan luar, termasuk website ADB ([www.adb.org](http://www.adb.org))
- Siaran Pers* di *ADB Today* untuk kalangan internal
- Lainnya (sebutkan) Laporan hasil analisa dan kebijakan sektor yang diterbitkan

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)

**8. Keterlibatan pemerintah/penerima bantuan proyek dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:** Tim bantuan teknis mengadakan berbagai kegiatan lapangan di 160 sekolah yang terpilih menjadi sekolah bertaraf internasional yang pertama. Para kepala sekolah dan guru yang bertugas di sekolah-sekolah tersebut, dengan dibantu komite sekolah, menyusun rencana pengembangan sekolah. Kerja tim yang teliti selama tahap penyusunan juga membuahkan hasil di Depdiknas, dimana Depdiknas memimpin dalam penetapan parameter dasar serta penjabaran detail pelaksanaan.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2003
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan  
Pinjaman: 2007  
Non pinjaman (persiapan proyek):  
Non pinjaman (selain dari persiapan proyek ): 2007  
Periode dan lamanya program bantuan  
Pinjaman: Jan 2008-Des 2013  
Non pinjaman: Jan 2008-Des 2013

**10. Rencana Pembiayaan** Akan ditetapkan kemudian

## a. Untuk pinjaman

- Ordinary Capital Resources*: \$50 juta  
 *Asian Development Fund/ADF*: \$50 juta  
 Lainnya:

Sumber	Jumlah (\$ juta)
Pembiayaan dari ADB	100
Pembiayaan dari pemerintah	43
Sumber pembiayaan lainnya	143
<b>Total Dana</b>	<b>286</b>

Sumber: hasil penghitungan *Asian Development Bank*.

## b. Untuk non pinjaman

- Tidak memerlukan sumberdaya apapun kecuali staf ADB  
 Anggaran administrasi ADB:  
 Dana hibah bantuan teknis: \$1 juta  
 Lainnya:

ADB = *Asian Development Bank*, CSP = *country strategy and program*, RCSP = *regional cooperation strategy and program*.

**Tabel A7.8: Konsep untuk Peningkatan Efisiensi Distribusi Listrik dan Penghematan Energi Oleh Pemakai Akhir**  
*(Improving Efficiency of Energy Distribution and End Use)*

Tanggal: 17 Maret 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p>    <input type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya: MFF (<i>Multi-tranche Financing Facility</i>) yang akan dikaji selama pemrosesan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p>        <input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p>        <input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p>        <input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus Bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya</p> <p>    Sektor: Energi</p> <p>    Subsektor: Transmisi dan Distribusi</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p>    Tema:</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input checked="" type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p>    <input type="checkbox"/> Tata kelola      <input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p>    <input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>    Subtema: Meningkatkan efisiensi ekonomi dan pasar yang mendukung; produksi yang lebih ramah lingkungan</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Infrastruktur, Departemen Asia Tenggara,</p>

ADB

5. **Pejabat proyek yang menjadi penanggung jawab:** Sohail Hasnie

6. **Uraian tentang bantuan**

- a) **Latar belakang/kaitan dengan CSP:** Kenaikan harga BBM akhir-akhir ini telah menyebabkan penggunaan energi yang tidak efisien menjadi bertambah mahal, dan karena itu, negara-negara berkembang terdorong untuk menjadikan efisiensi energi sebagai bagian dari perencanaan energi, seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju selama ini. Menghemat satu unit energi melalui produksi yang efisien atau pengiriman yang lebih ekonomis sama dengan memproduksi satu tambahan unit energi. Manfaat lain dari menghemat energi adalah meningkatnya kapasitas sistem untuk memasok lebih banyak pelanggan, serta mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang negatif, karena dengan menghemat pemakaian energi fosil berarti menghasilkan gas rumah kaca yang lebih sedikit.

Efisiensi energi telah menjadi tema pokok bagi sektor listrik di Indonesia karena tingginya biaya subsidi energi yang ditanggung APBN, tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi listrik, dan pasokan listrik yang terancam menurun di Jawa dan Bali. Kualitas listrik, terutama pasokan listrik yang sesuai dengan standar tegangan dan standar kelaikan internasional juga merupakan tema pokok yang akan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan efisiensi energi.

Tema-tema tersebut diatas juga sesuai dengan kebijakan energi ADB yang mendukung “penyusunan dan pelaksanaan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penyediaan dan penggunaan energi”. Proyek ini akan menjadi bagian dari CSP yang baru.

- b) **Dampak dan hasil yang diharapkan:** Dampak yang diharapkan dari proyek ini adalah timbulnya kesadaran untuk menjadikan efisiensi energi sebagai bagian dari perencanaan strategis untuk mengurangi biaya operasi jaringan distribusi bagi PLN dan pelanggannya; dan penyediaan listrik yang berkualitas tinggi (dengan fluktuasi tegangan yang lebih kecil dan gelombang harmonik yang lebih sedikit) dan lebih dapat diandalkan (gangguan lebih sebentar dan lebih jarang terjadi). Hasil utama yang diharapkan adalah jaringan distribusi listrik yang efisien (dengan rugi jaringan distribusi yang lebih kecil) dan efisiensi pengguna akhir yang lebih baik (mendorong konsumen untuk menggunakan peralatan yang efisien melalui insentif khusus).

Mekanisme pembangunan bersih (*clean development mechanism /CDM*) sesuai dengan Protokol Kyoto memungkinkan perusahaan-perusahaan di negara-negara maju untuk membeli kredit pengurangan emisi dari proyek-proyek pengurangan emisi di negara-negara berkembang, sebagai kompensasi pencemaran yang telah mereka lakukan atau untuk diperdagangkan kembali di pasar bebas. Kerugian dalam distribusi listrik PLN berhasil diturunkan dengan pengurangan emisi karbondioksida (CO<sub>2</sub>) yang signifikan yang dicapai melalui efisiensi energi. Pengurangan emisi tersebut kemudian disertifikasi melalui CDM Protokol Kyoto dan dikonversi ke dalam kredit karbon yang bisa dijual untuk meningkatkan angka perolehan finansial dari proyek-proyek efisiensi energi.

- c) **Komponen and hasil:** Proyek ini terdiri dari empat komponen: (i) perbaikan faktor

daya; (ii) perombakan jaringan distribusi; (iii) peningkatan keandalan penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan; dan (iv) manajemen di sisi permintaan (*demand side management*/DSM). Secara keseluruhan, keempat komponen tersebut akan memungkinkan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat tanpa perlu membangun pembangkit listrik dan jaringan distribusi yang baru; ini akan bisa tercapai karena keempat komponen tersebut akan memungkinkan PLN memenuhi permintaan listrik yang lebih sedikit (menurun karena DSM), dengan memasok listrik dari pembangkit yang sudah ada melalui jaringan distribusi yang lebih efisien.

Proyek ini akan mencakup seluruh sistem distribusi PLN di Jawa-Bali yang meliputi lima wilayah operasi: Jakarta Raya dan Tangerang, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

#### **Komponen A: Perbaikan faktor daya**

Jaringan distribusi PLN di Jawa-Bali banyak memiliki *penyulang* distribusi dengan panjang 40 km atau lebih, terutama diluar Jakarta dimana wilayah yang dipasok sebagian besar adalah daerah pedesaan dan semi pedesaan. Perbaikan faktor daya di wilayah tersebut tidak hanya meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari berkurangnya kerugian tapi juga akan meningkatkan kapasitas cadangan.

Untuk memperbaiki faktor daya PLN akan menggunakan bank kapasitor dalam jumlah besar yang akan dipasang di tiang listrik.

#### **Komponen B: Perombakan sistem distribusi**

Dalam beberapa tahun terakhir, PLN menunda investasi dalam jaringan distribusi karena ketiadaan dana, meskipun permintaan listrik dan jumlah pelanggan meningkat. Akibatnya jaringan yang ada harus menanggung beban diatas kapasitasnya dan kualitas listrik menjadi menurun. Kondisi ini mempercepat kerusakan pada aset distribusi tertentu, terutama distribusi bawah tanah di Bandung dan Jakarta. Komponen proyek ini akan mendukung perombakan dan penguatan jaringan untuk menghindari kerusakan jaringan melalui pemasangan pengatur tegangan, filter, dan peralatan lainnya.

#### **Komponen C: Meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan**

Komponen ini akan mencakup kawasan bisnis dengan beban listrik yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dimana keandalan penyediaan listrik yang rendah mengakibatkan kerugian yang tinggi bagi pelanggan. Subproyek-subproyek yang ada akan dirancang berdasarkan manfaatnya dalam mencegah timbulnya “kerugian akibat keandalan penyediaan tenaga listrik yang rendah”. Berdasarkan penilaian dan peninjauan terhadap kinerja sistem distribusi di wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekonomis tinggi, akan dibuat analisa penyulang menurut kualitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik berdasarkan *system average interruption-duration index* /SAIDI (lama gangguan per pelanggan per tahun), dan *system average interruption frequency index* /SAIFI (jumlah gangguan per pelanggan per tahun). Solusi akan dirancang untuk memperbaiki semua penyulang dengan kinerja buruk menurut kriteria biaya-manfaat secara ekonomis.

Pemasangan sistem kontrol termasuk *supervisory control and data acquisition* (SCADA), sistem telekomunikasi, relay, perlengkapan proteksi dan saklar akan dilakukan dalam komponen proyek ini.

#### **Komponen D: Manajemen Sisi Permintaan (*demand side management /DSM*)**

Program manajemen di sisi permintaan (DSM) mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan untuk mendorong pelanggan mengubah pola pemakaian listrik (menggeser pemakaian listrik ke luar waktu beban puncak) dan mengurangi jumlah pemakaian listrik (mengurangi beban). Program DSM dirancang untuk mengembangkan kapasitas dan energi yang hemat biaya dengan menunda kebutuhan akan sarana pembangkit (atau pembelian listrik), transmisi dan distribusi listrik yang baru. Program ini akan mencakup gedung-gedung komersial, pemerintah, industri dan daerah pemukiman, serta meliputi pemasangan peralatan hemat energi, peningkatan sistem, respon permintaan, dan proyek kogenerasi listrik dan uap.

Karena penggunaan lampu di rumah tangga merupakan pemakaian listrik terbesar pada waktu beban puncak (60-70%), kecuali di Jakarta dimana pemakai listrik terbesar adalah pelanggan bisnis, program DSM yang paling efektif untuk segera diterapkan adalah program lampu hemat energi. Program ini terdiri dari:

- Program Lampu Hemat Energi dengan Lampu CFL (*Compact Fluorescent Lamp*), untuk menggantikan lampu pijar yang kurang efisien dengan lampu hemat energi di wilayah pemukiman dan bisnis
- Program Lampu Hemat Energi dengan Lampu TL/Fluoresensi dalam bentuk lurus, untuk meningkatkan pemakaian lampu hemat energi jenis TL/Fluoresensi dalam bentuk lurus dengan ballast elektronik yang hemat dan berfrekuensi tinggi di wilayah pemukiman dan bisnis.
- Program Penerangan Jalan dengan Lampu Hemat Energi, untuk mendorong penggunaan lampu sodium tekanan tinggi menggantikan lampu merkuri

**d. Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF:** Tidak ada

**e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Berkurangnya rugi jaringan dalam distribusi, meningkatnya keandalan dan kualitas layanan listrik, menunda penambahan kapasitas distribusi, dan menurunkan biaya pelayanan listrik

**f. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Karena semua peralatan akan dipasang didalam gardu-gardu yang ada, dan unit perbaikan faktor daya akan dipasang di tiang-tiang listrik yang telah ada, tidak akan ada dampak sosial dan lingkungan tambahan yang merugikan yang ditimbulkan oleh proyek ini.

**g. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:**

**Untuk bantuan teknis, metode yang dipakai untuk sosialisasi hasil kegiatan**

**bantuan teknis:**

- Konferensi/lokakarya/pertemuan informal (peserta membawa sendiri makan siang)
- Publikasi artikel dalam jurnal eksternal atau buku
- Siaran Pers* ke kantor-kantor berita untuk kalangan luar, termasuk website ADB

([www.adb.org](http://www.adb.org))

- Siaran Pers* di *ADB Today* untuk kalangan internal  
 Lainnya (sebutkan) \_\_\_\_\_

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Perusahaan Listrik Negara (PLN)

**8. Keterlibatan pemerintah/penerima bantuan proyek dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:**

BAPPENAS, PLN Wilayah dan staf teknis di PLN Pusat

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2006
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan  
 Pinjaman: triwulan kedua, 2007  
 Non pinjaman (persiapan proyek): 2007  
 Non pinjaman (selain dari persiapan proyek):
- c. Periode dan lamanya program bantuan  
 Pinjaman: 36 bulan, 2007-2010  
 Non pinjaman:

**10. Rencana Pembiayaan**

- a. Untuk pinjaman  
 *Ordinary capital resources*: \$250 juta  
 *Asian Development Fund/ADF* (pinjaman): \$  
 *Asian Development Fund/ADF* (hibah): \$  
 sumber lainnya: \$

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$\_\_\_\_, dari \_\_\_\_\_.

Sumber	Jumlah (\$ juta )
Pembiayaan dari ADB	250
Pembiayaan dari pemerintah	110
Sumber pembiayaan lainnya	
<b>Total Dana</b>	<b>360</b>

Sumber: hasil penghitungan *Asian Development Bank*.

ADB = *Asian Development Bank*, CSP = *country strategy and program*, PLN = Perusahaan Listrik Negara, RCSP = *regional cooperation strategy and program*.

## 10. Rencana Pembiayaan

a. Untuk pinjaman

- Ordinary capital resources*: \$250 juta  
 *Asian Development Fund/ADF* (pinjaman): \$  
 *Asian Development Fund/ADF* (hibah): \$  
 sumber lainnya: \$

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$\_\_\_\_, dari \_\_\_\_\_.

Sumber	Jumlah (\$ juta )
Pembiayaan dari ADB	250
Pembiayaan dari pemerintah	110
Sumber pembiayaan lainnya	
<b>Total Dana</b>	<b>360</b>

Sumber: hasil penghitungan *Asian Development Bank*.

ADB = *Asian Development Bank*, CSP = *country strategy and program*, PLN = Perusahaan Listrik Negara, RCSP = *regional cooperation strategy and program*.

**Tabel A7.9: Kertas Kerja Konsep untuk Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial Tahap II dan III**  
**(Financial Governance and Sosial Security Reform Program)**

**Tanggal:** 3 Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p><input type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input type="checkbox"/> lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya</p> <p>    SeKtor: Keuangan</p> <p>    Subsektor: Sistem perbankan; pensiun, asuransi, jaminan sosial, dan tabungan dan asuransi pegawai (<i>contractual savings</i>)</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p><input type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p>Tema:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p><input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola      <input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>Subtema: Meningkatkan efisiensi ekonomi dan pasar yang mendukung, tata kelola keuangan dan ekonomi.</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> V. Subramanian</p>

## 6. Uraian tentang bantuan

**a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Sektor perbankan masih mendominasi sistem keuangan, dengan total aset hampir 80%. Sektor lembaga keuangan non bank skala kecil siap untuk berkembang. Pemerintah secara aktif membantu pertumbuhan lembaga keuangan non bank (LKNB) untuk meningkatkan mobilisasi dan intermediasi keuangan dan mengurangi ketergantungan pada sektor perbankan sebagai penyedia utama sumberdaya keuangan. Pasar modal termasuk kecil dalam hal kapitalisasi terhadap PDB, yakni sekitar 30% dibandingkan dengan sekitar 70% di Thailand dan 150% di Malaysia. Tunggakan surat utang atau obligasi pemerintah mencapai 19% dari PDB pada akhir 2005. Perdagangan obligasi selama ini sepi sebagian karena tidak adanya acuan bagi penetapan harga serta kurangnya transparansi dan penentuan harga pasar wajar. Peraturan-peraturan baru diterbitkan pada tahun 2004 untuk industri reksa dana tapi masih perlu ditingkatkan lagi agar memenuhi standar internasional tentang peraturan reksa dana. Industri asuransi tergolong kecil dalam hal rasio premi terhadap PDB, yakni sekitar hampir 2%, dengan total aset setara dengan 3% dari PDB. Secara finansial industri ini tidak sehat, dengan lima perusahaan asuransi non jiwa dan enam perusahaan asuransi jiwa yang pailit namun masih tetap beroperasi. Industri dana pensiun juga tergolong kecil dengan aset setara dengan 4,5% PDB. UU tahun 2004 tentang jaminan sosial membuka jalan bagi reformasi dana pensiun tapi pelaksanaannya masih berjalan lamban. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan. UU Pasar Modal, UU Asuransi, dan UU tentang Dana Pensiun saat ini sedang diubah, dan perlu dikembangkan lebih lanjut agar memenuhi standar internasional. Tujuan umumnya adalah untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini seharusnya sudah mulai berfungsi tahun 2003 namun ditunda sampai 2010.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sektor informal dan cenderung tidak berkembang ataupun menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, intervensi resmi yang berupaya mendukung mereka harus menganut visi jangka panjang yang fokus untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk tumbuh menjadi sektor yang lebih formal, dengan dasar hukum yang lebih kuat yang mendukung akses yang lebih baik kepada sumber pembiayaan.

Kegiatan ADB di sektor keuangan selama ini berawal dari krisis ekonomi. Bantuan segera yang diberikan tidak lama setelah krisis terjadi merupakan bagian dari paket multi-donor untuk membantu restrukturisasi sektor perbankan dan meningkatkan alokasi sumberdaya sektor publik dan sektor keuangan. Setelah paket bantuan awal multi donor tersebut, ADB terus menyediakan bantuan untuk mengembangkan lembaga keuangan non bank (LKNB), dan tidak lagi terlibat dalam sektor perbankan.

Penguatan dan pengembangan sektor keuangan adalah prioritas utama bagi pemerintah, dan pada bulan Juli 2006 pemerintah mengumumkan paket kebijakan sektor keuangan yang bertujuan untuk (i) menjamin stabilitas sistem keuangan, (ii) menguatkan lembaga perbankan, (iii) menguatkan lembaga keuangan non bank, (iv) mendorong pengembangan pasar modal, (vii) mengatasi persoalan penyimpangan pajak di seluruh instrumen keuangan, dan (viii) meningkatkan pembiayaan untuk ekspor dan memulai swastanisasi BUMN.

**b. Tujuan umum dan khusus:** Pinjaman program yang diusulkan berupa satu kluster yang terdiri dari dua program, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2009. Kedua

program ini akan membantu pemerintah mengembangkan dan melaksanakan visi dan tujuan umum jangka menengah untuk periode 2007-2011 untuk memajukan LKNB, termasuk jaminan sosial.

**c. Komponen and hasil:** Kedua program kluster tersebut diatas melanjutkan Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial Tahap I, yang disetujui pada tahun 2002, dan paket reformasi pemerintah (dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, kebijakan tata kelola keuangan, akunting, dan anti pencucian uang), serta pengembangan sistem jaminan sosial nasional. Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial Tahap II dan III akan berpegang pada paket kebijakan keuangan pemerintah dan memfasilitasi pelaksanaan bertahap paket kebijakan tersebut di sektor-sektor inti selain perbankan. Rekomendasi tentang reformasi kebijakan yang dihasilkan proyek bantuan teknis "TA 3850 : Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan" (yang mencakup dana pensiun, asuransi, manajemen risiko dalam industri sekuritas, pengaturan reksa dana, penegakan, pelatihan, dan reformasi hukum dan peraturan pasar modal) menyediakan dasar bagi komponen-komponen dalam Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial Tahap II dan III. Pengembangan pasar modal juga merupakan bidang utama yang menjadi fokus kedua program ini; pengembangan pasar sekuritas utang jangka panjang sangat penting untuk memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga telah mengajukan permintaan tak resmi kepada ADB untuk membantu pengembangan peraturan tentang pelayanan keuangan oleh lembaga keuangan syariah.

Komponen jaminan sosial meliputi penguatan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan dana pensiun di bawah Depkeu (Bapepam dan Taspen) dengan menyiapkan tata aturan; penguatan lembaga, dan pengembangan kapasitas, serta membantu menyiapkan program dana pensiun. Jika UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dilaksanakan, Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial Tahap II dan III akan membantu menyiapkan program dana pensiun multi pilar, selain meningkatkan tata kelola dan manajemen keuangan di industri dana pensiun.

Bantuan kepada industri pembiayaan mikro akan fokus untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan usaha kecil informal untuk tumbuh menjadi sektor yang lebih formal, dengan dasar kebijakan, hukum dan peraturan yang lebih kuat yang mendukung akses yang lebih baik kepada sumber pembiayaan.

**e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Pelaksanaan paket tindakan kebijakan dan reformasi untuk jangka menengah (2007-2011) yang mengarah kepada pengembangan sektor lembaga keuangan non bank yang kuat dan tangguh dengan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang lebih baik. Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial Tahap II akan menghasilkan (i) lembaga pengatur industri jasa keuangan non bank yang mengawasi pasar modal, industri asuransi dan dana pensiun, (ii) pengembangan pasar serta produk dan jasa yang meliputi pengelolaan dana hingga asuransi/sewa guna usaha, (iii) peningkatan penegakan peraturan dan pengawasan di seluruh sektor non perbankan, (iv) standar akunting yang selaras dengan standar tata kelola dan transparansi internasional, (v) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran investor, (vi) pengembangan pasar sekuritas utang, termasuk pasar surat utang negara/infrastruktur pasar/perdagangan sekunder, dan (vii) penguatan sektor asuransi melalui penguatan peraturan tentang dana cadangan, kebutuhan modal, reasuransi, dan manajemen investasi selaras dengan praktek-praktek terbaik di dunia internasional, (viii) reformasi industri dana pensiun dan peningkatan tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan manajemen keuangan dalam dana pensiun.

**f. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Isu-isu sektor sosial akan disikapi dalam konteks reformasi terhadap industri dana pensiun. Tidak ada isu atau persoalan lingkungan yang diperkirakan akan timbul dalam Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial Tahap II ini.

**Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Hal ini akan dilakukan melalui rangkaian lokakarya/seminar, forum sektor keuangan, dan website-website terkait.

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Departemen Keuangan (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), Bank Indonesia

**8. Keterlibatan pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:**

Melalui serangkaian konsultasi dengan semua kementerian dan departemen yang terlibat dalam sektor-sektor yang terkait dalam program yang diusulkan.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2006
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman: November 2007 dan 2009
  - Non pinjaman (persiapan proyek): tidak ada
  - Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): tidak ada
- c. Periode dan lamanya program bantuan
  - Pinjaman: 2007–2011
  - Non pinjaman: tidak ada

**10. Rencana Pembiayaan**

- a. Untuk pinjaman
  - Ordinary capital resources*: \$200 juta untuk Program Reformasi Tata Kelola Keuangan dan Jaminan Sosial Tahap II dan \$200 juta untuk Tahap III
  - Asian Development Fund/ADF* (pinjaman):
  - Asian Development Fund/ADF* (hibah):
  - Lainnya:

ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, RCSP = regional cooperation strategy and program.

**Tabel A7.10: Kertas Kerja Konsep Pembiayaan Sekunder Perumahan  
(Secondary Mortgage Facility)**

**Tanggal:** 3 Agustus 2006

**1. Jenis/bentuk bantuan**

- Pinjaman
  - Pinjaman proyek
  - Pinjaman program
  - Pinjaman sektoral
  - Pinjaman program pembangunan sektor
  - Dana ADF
  - Lainnya
- Non pinjaman
  - Persiapan proyek
  - Selain dari persiapan proyek
    - Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor
    - Pengembangan kelembagaan
    - Lainnya:

**2. Fokus bantuan**

- a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya  
 Sektor: Keuangan  
 Subsektor: Pembiayaan perumahan
- b. Klasifikasi program bantuan  
 Program bantuan khusus  
 Program bantuan umum
- c. Bidang yang menjadi tema pokok  
 Tema:
- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan               |
| <input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif                  | <input type="checkbox"/> Kerjasama regional                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola                            | <input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta |
| <input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan                            | <input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas               |
- Subtema: Meningkatkan efisiensi ekonomi dan pasar yang mendukung, tata kelola keuangan dan ekonomi.

**3. Cakupan**

- Nasional       Subregional       Interregional
- Pengembangan kebijakan dalam negeri

**4. Divisi/departemen penanggung jawab** Divisi Tata Kelola, Keuangan dan Perdagangan, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB

**5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab : V. Subramanian**

**6. Uraian tentang bantuan**

- a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Strategi Pengurangan Kemiskinan Nasional mengidentifikasi akses untuk mendapatkan perumahan yang memadai sebagai satu dari 10 hak dasar yang masih belum terpenuhi. Dengan upaya pemerintah akhir-akhir ini dalam konsolidasi fiskal, sumberdaya sektor publik hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan masyarakat bawah. Meskipun terjadi penurunan dalam kredit perumahan segera setelah krisis ekonomi menghantam Asia, pasar mengalami kenaikan dalam portofolio kredit perumahan selama 6 tahun terakhir. Tunggakan kredit perumahan mencapai Rp 56 trilyun di tahun 2005, dibandingkan dengan tunggakan pada tahun 1997 yang hanya mencapai Rp 20 trilyun. Namun, persentase kredit perumahan terhadap total kredit terus menurun. Tunggakan kredit untuk kepemilikan perumahan atau apartemen hanya mencakup 8,1% dari total aset kredit sektor perbankan per Desember 2005. Akses kepada sumber pembiayaan jangka panjang menjadi kendala besar bagi bank-bank untuk meningkatkan portofolio kredit perumahan mereka, disamping tidak adanya prosedur penjaminan yang baku.

Tunggakan pembayaran surat utang pemerintah mencapai 19% dari PDB di akhir 2005. Kapitalisasi pasar obligasi naik menjadi Rp 466 trilyun pada bulan Desember 2005, dimana 87% diantaranya merupakan obligasi pemerintah. Penerbitan obligasi korporasi selama ini hanya berada pada kisaran Rp 50 trilyun. Pendirian pasar sekunder dan penerbitan *mortgage backed securities* telah diterapkan di pasar sekuritas utang di negara-negara maju untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang industri pembiayaan perumahan. Pembiayaan perumahan menyumbang 30-40% dari PDB di perekonomian negara-negara maju.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji dalam program 100-hari pertamanya untuk meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau. Pada bulan Februari 2005, beliau mengeluarkan Keppres tentang pembiayaan sekunder perumahan untuk memfasilitasi pembiayaan jangka panjang bagi kredit perumahan melalui sekuritisasi. PT Sarana Multigriya Financial (PT SMF) didirikan pada tahun 2005 di bawah ketentuan Keppres tersebut sebagai BUMN. Modal bagi PT. SMF ditetapkan sebanyak Rp 4 trilyun, dimana Rp 1 trilyun darinya merupakan investasi dari pemerintah. ADB membantu pendirian PT. SMF melalui bantuan teknis TA 4715, yang akan membantu menetapkan pedoman operasional, menstandarisasi dokumentasi, dan mengembangkan kapasitas PT.SMF dalam penjaminan dan manajemen risiko. Bantuan teknis tersebut diharapkan untuk membantu Depkeu dan ADB mengembangkan bantuan keuangan untuk mendukung PT. SMF melaksanakan fungsinya. Pada tahap awal, PT.SMF akan menyediakan pinjaman jangka panjang kepada lembaga-lembaga perbankan yang akan menggunakan standar mereka untuk dokumentasi dan penjaminan kredit perumahan. Lembaga-lembaga perbankan akan mendapatkan dana segar dari PT.SMF atas penjualan aset KPR yang mereka terbitkan. PT.SMF sendiri akan melakukan sekuritisasi atas aset keuangan yang dibeli dengan menerbitkan surat partisipasi atau surat utang jangka panjang yang dikenal dengan *Mortgage Backed Securities* (MBS). Perusahaan ini juga dapat bertindak sebagai penjamin bagi penerbitan MBS.

- b. Tujuan umum dan khusus:** Pemerintah telah meminta ADB untuk membantu PT. SMF

mengoperasikan pasar sekuritisasi dan meningkatkan penyediaan perumahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Bantuan pembiayaan ADB yang akan dikucurkan dalam beberapa tahap diharapkan berlangsung selama periode 4-5 tahun untuk membantu PT. SMF menjadi lembaga pembiayaan kredit perumahan yang berkelanjutan dan mengembangkan pasar sekuritisasi untuk piutang KPR serta menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk perumahan yang berkelanjutan.

- c. Komponen dan hasil:** Bantuan ADB berupa fasilitas pembiayaan yang dikucurkan bertahap selama periode 4-5 tahun. Meskipun bentuk bantuan dan pengucuran dana akan difinalisasikan kemudian dalam satu kesepakatan dengan pemerintah, untuk tahap awal PT. SMF diperkirakan akan membutuhkan pembiayaan dalam rupiah yang setara dengan \$50 juta pada tahun 2007, didukung dengan jaminan dari pemerintah bahwa PT. SMF akan mampu mengumpulkan piutang KPR yang pada akhirnya memenuhi syarat untuk disekuritisasi. Ini akan diikuti oleh *possible guarantees* sebagai sarana peningkatan kredit (*credit enhancement*) – yang akan disediakan oleh ADB secara bertahap jika diperlukan – diperkirakan sekitar \$150 juta- \$200 juta untuk mendukung penerbitan surat utang oleh PT. SMF. Perlu-tidaknya pemerintah memberikan *government counter-guarantee* untuk bantuan jaminan ADB yang diusulkan tergantung pada kredibilitas PT.SMF pada saat itu. Bantuan ADB yang diusulkan diharapkan akan menguatkan kegiatan PT.SMF dan membantu mengembangkan pasar pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan melalui pengembangan pasar sekuritisasi untuk piutang KPR. Bantuan ini juga akan memudahkan pengembangan pasar obligasi serta mengembangkan sektor keuangan.
- e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Proyek ini berupaya mengembangkan sektor keuangan dengan meningkatkan akses kepada dana jangka panjang melalui pasar obligasi. Proyek ini akan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan kepada lembaga pemberi kredit KPR dengan menciptakan pasar sekunder dan pasar *mortgage-backed securities*. Proyek ini dirancang untuk membantu mengembangkan PT. SMF menjadi lembaga keuangan yang mapan dalam pembiayaan KPR dan sekuritisasi. ADB akan menyediakan fasilitas pembiayaan sebesar \$250 juta yang akan dikucurkan secara bertahap disertai dengan produk-produk jaminan dan pinjaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan KPR bagi masyarakat kelas menengah ke bawah selama beberapa (5-7) tahun pertama pengoperasian PT. SMF.
- f. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Meskipun tidak ada isu atau persoalan sosial atau lingkungan yang diperkirakan timbul dalam proyek ini, jika ada isu-isu sosial yang timbul kemudian, maka isu-isu tersebut akan ditangani selama pemrosesan pinjaman.

**Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Ini akan dilakukan melalui rangkaian lokakarya/seminar, forum sektor keuangan, dan website- website terkait.

7. **Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Departemen Keuangan (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan /Bappepam), PT. Sarana Multigriya Finansial), Bank Indonesia

8. **Keterlibatan pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:**

Melalui serangkaian konsultasi dengan semua kementerian dan departemen yang terlibat dalam sektor-sektor yang terkait dalam program yang diusulkan .

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, CSP *Update*, RSCP, RSCP *Update*, atau rencana kerja Interregional: 2006
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman: November 2007
  - Non pinjaman (persiapan proyek) : tidak ada
  - Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): Bantuan yang diusulkan setelah tahun 2007 diperkirakan akan disediakan dalam bentuk jaminan pada tahun 2009, 2010-2012. Proposal akan diserahkan di tahun 2007, 2009, 2010.
- c. Periode dan lamanya program bantuan
  - Pinjaman: 2007-2008
  - Non pinjaman: 2009, 2010-2012

**10. Rencana Pembiayaan**

a. Untuk Pinjaman

- Ordinary capital resources*: \$50 juta
- Asian Development Fund/ADF* (pinjaman): \$
- Asian Development Fund/ADF* (hibah): \$
- Lainnya :- produk-produk jaminan ADB senilai \$150 juta–\$200 juta yang diberikan selama periode 4-5 tahun

ADB = *Asian Development Bank*, CSP = *country strategy and program*, RCSP = *regional cooperation strategy and program*..

**Tabel A7.11: Kertas Kerja Konsep untuk Proyek Peningkatan Gizi Melalui Pemberdayaan Masyarakat**  
**(Nutrition Improvement Through Community Empowerment/NICE)**

Tanggal: 27 Juli 2006

**1. Jenis/bentuk bantuan**

- Pinjaman
  - Pinjaman proyek
  - Pinjaman program
  - Pinjaman sectoral
  - Pinjaman program pembangunan sektor
  - Dana ADF
  - Lainnya:
- Non pinjaman
  - Persiapan proyek
  - Selain dari persiapan proyek
    - Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor
    - Pengembangan kelembagaan
    - Lainnya:

**2. Fokus bantuan**

- a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya:  
 Sektor: Kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial  
 Subsektor: Gizi
- b. Klasifikasi program bantuan
- Program bantuan khusus
  - Program bantuan umum
- c. Bidang yang menjadi tema pokok
- Tema:
- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      | <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif | <input type="checkbox"/> Kerjasama regional                |
| <input type="checkbox"/> Tata kelola                                 | <input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jender dan pembangunan           | <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas |
- Subtema: Pembangunan manusia, kelompok masyarakat rentan lainnya

**3. Cakupan**

- Nasional       Subregional       Interregional
- Pengembangan kebijakan dalam negeri

**4. Divisi/departemen penanggung jawab:** Divisi Sektor Sosial, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB

## 5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab: B. Lochmann

### 6. Uraian tentang bantuan

- a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Gizi buruk menggoyahkan pertumbuhan ekonomi dan melestarikan kemiskinan. Gizi buruk merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals /MDGs*). Gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di daerah perkotaan dan pedesaan. Prevalensi balita dengan berat badan kurang naik dari 16,8% pada tahun 2000 menjadi 19,0% pada tahun 2003<sup>1</sup>. Ini berarti bahwa fungsi kognitif dan perilaku sekitar 8 juta balita akan terancam oleh gizi buruk. Berat badan kurang pada balita dan anak usia dini tidak hanya menghambat perkembangan kognitif dan perilaku tapi juga menyebabkan penurunan pada angka partisipasi sekolah. Prevalensi anemia akibat kekurangan zat besi mencapai 63% pada ibu hamil, yang menyebabkan bayi yang dikandung mereka lahir dengan berat badan rendah dan menyebabkan 25% kematian ibu melahirkan. Sekitar 55% anak usia pra-sekolah menderita anemia karena mutu makanan tambahan yang tidak memenuhi standar gizi dan pemberian makanan yang tidak memadai. Akibatnya mereka memiliki berat badan dibawah normal. Terdapat kesenjangan yang besar dalam hal derajat kesehatan dan gizi antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan, antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, dan antara kelompok masyarakat dengan status sosial-ekonomi tinggi dengan yang rendah. Kesenjangan dalam hal jumlah balita dengan berat badan kurang antar propinsi sangat besar, yakni dari persentase terendah sebesar 17,9% di Bali sampai dengan 42,% di Gorontalo. Situasi ini menghambat tercapainya Tujuan Pertama dari, yang berupaya “Menghapus kemiskinan dan kelaparan”. Rencana Pembangunan Pemerintah Jangka Menengah /RPJM (2004-2009) menjabarkan kerangka kerja kebijakan pembangunan strategis 5 tahun. RPJM mengidentifikasi upaya penurunan angka kasus gizi kurang sebanyak 20% dan gizi buruk sebanyak 5% pada tahun 2009 sebagai prioritas utama dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Sebagai respon terhadap krisis gizi di awal 2005, Depkes mengembangkan Rencana Tindakan Nasional untuk Pencegahan Gizi Buruk (2005-2009)<sup>2</sup>. Proyek ini selaras dengan CSP 2009 yang diusulkan untuk mempercepat pencapaian MDG.
- b. Tujuan umum dan khusus:** Tujuan umum proyek ini adalah meningkatkan status gizi, terutama pada balita dan ibu hamil dan menyusui dari keluarga miskin. Hasil dari proyek ini adalah meningkatnya akses kepada pelayanan gizi serta meningkatnya status gizi dan perilaku hidup bersih masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas pemerintah propinsi dan kabupaten/kota untuk merencanakan, mengelola dan memantau pelayanan dan program gizi; memobilisasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan menganut pendekatan berbasis kebutuhan dan masyarakat; serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi cukup dan perilaku hidup bersih.
- c. Komponen dan hasil:** Proyek ini dirancang untuk menghasilkan empat hasil: (i) peningkatan kemampuan kelembagaan untuk mengembangkan kebijakan tentang gizi, perencanaan dan pengelolaan program gizi; (ii) peningkatan akses bagi kelompok masyarakat berisiko kepada pelayanan gizi melalui mobilisasi masyarakat; (iii) peningkatan peraturan tentang penambahan zat gizi pada makanan; dan (iv)

<sup>1</sup> Moderate underweight from 16.8% to 19.0% and severe underweight from 7.8% to 8.8% in 2000–2003.

<sup>2</sup> Rencana Tindakan Nasional tentang Pencegahan Gizi Buruk. Departemen Kesehatan, 2005.

peningkatan upaya berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan gizi buruk dan pencegahannya serta manfaat penambahan zat gizi pada makanan. Selaras dengan hasil-hasil tersebut diatas, cakupan proyek ini dibagi ke dalam komponen-komponen berikut: (i) pengembangan kelembagaan untuk kebijakan, program, dan pengawasan gizi; (ii) pelayanan gizi berbasis masyarakat; (iii) penambahan zat gizi pada makanan; dan (iv) penyuluhan dan komunikasi tentang gizi.

**d. Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF:** Proyek ini akan fokus pada penduduk yang berisiko menderita gizi buruk, balita rentan, dan ibu hamil dan menyusui yang tinggal di wilayah pemukiman masyarakat kelas ekonomi bawah.

**e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Proyek ini akan menciptakan (i) peningkatan kapasitas; (ii) peningkatan efisiensi penyelenggaraan pelayanan gizi, khususnya bagi ibu dan balita dari keluarga miskin; (iii) penyelenggaraan program penambahan zat gizi kedalam makanan yang efisien melalui peningkatan jaminan mutu makanan dengan tambahan zat gizi; dan (iv) meningkatnya pengetahuan dan perilaku yang terkait dengan pencegahan gizi buruk oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

**f. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Tidak ada

**g. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:**

**Untuk bantuan teknis, metode yang dipakai untuk sosialisasi hasil kegiatan**

**bantuan teknis:**

- Konferensi/lokakarya/pertemuan informal (peserta membawa sendiri makan siang)
- Publikasi artikel dalam jurnal eksternal atau buku
- Siaran Pers* ke kantor-kantor berita untuk kalangan luar, termasuk website ADB ([www.adb.org](http://www.adb.org))
- Siaran Pers* di *ADB Today* untuk kalangan internal
- Lainnya (sebutkan) website Depkes

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Departemen Kesehatan

**8. Keterlibatan mana pemerintah/penerima bantuan proyek dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:**

Proyek ini akan fokus pada pelayanan berbasis masyarakat dan melibatkan organisasi berbasis masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2006
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan  
Pinjaman: 2007  
Non pinjaman (persiapan proyek):  
Non pinjaman (selain dari persiapan proyek):
- c. Periode dan lamanya bantuan  
Pinjaman: 2007-2013  
Non pinjaman:

## 10. Rencana Pembiayaan

### a. Untuk Pinjaman

- Ordinary capital resources:*  
 *Asian Development Fund/ADF* (pinjaman): \$50 juta  
 *Asian Development Fund/ADF* (hibah):  
 Lainnya: JSF/TASF \$1,5 juta

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$, \_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_

Sumber	Jumlah (\$ juta)
Pembiayaan dari ADB	50,00
Pembiayaan dari pemerintah	21,40
Sumber pembiayaan lainnya	
<b>Total Dana</b>	<b>71.40</b>

Sumber: Hasil penghitungan *Asian Development Bank*.

ADB = *Asian Development Bank*, CSP = *country strategy and program*, RCSP = *regional cooperation strategy and program*.

**Tabel A7.12: Kertas Kerja Konsep untuk Program Pengurangan Kemiskinan dan Percepatan Pencapaian MDG  
(Poverty Reduction and MDG Acceleration Program)**

Tanggal: 4 Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya Sektor: Multisektor, termasuk pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial; hukum, manajemen ekonomi, dan kebijakan publik Subsektor: Pendidikan dasar, sistem kesehatan, manajemen dan pengeluaran keuangan pemerintah</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p><input type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p>Tema:</p> <p><input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola      <input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>Subtema: Pembangunan manusia, tata kelola publik, tata kelola keuangan dan ekonomi, dan pengembangan kelembagaan</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Sektor Sosial Asia Tenggara/ Departemen</p>

Wilayah Asia Tenggara

**5. Staf yang menjadi penanggung jawab:** A. Perdiguero

**6. Uraian tentang bantuan**

**a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Pada KTT Milenium (*Millennium Summit*) di bulan September 2000, pemerintah menyatakan komitmennya pada kemitraan global untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kesetaraan jender dan pelestarian lingkungan. Sebagai penandatanganan Deklarasi Milenium, Indonesia berkomitmen untuk mencapai MDG nasionalnya pada tahun 2015. Kemajuan yang diraih secara umum di tingkat nasional dalam mencapai sebagian besar MDG mengaburkan kesenjangan besar yang ada diantara propinsi dan kabupaten/kota, daerah perkotaan dengan pedesaan, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah, dan jender. Meskipun Indonesia berhasil meningkatkan akses kepada pendidikan dasar bagi anak usia 7 sampai 12 tahun, kesempatan yang diperoleh anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan untuk mendaftar dan tetap bersekolah 20% lebih sedikit daripada kesempatan yang tersedia bagi anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Banyak anak tidak pernah melanjutkan pendidikan mereka dari sekolah dasar (SD) ke sekolah menengah pertama (SMP). Sebagian dari target kesehatan tidak tercapai, dengan 582.000 kasus baru TB (tuberculosis) diperkirakan muncul setiap tahunnya dan angka kematian ibu masih tetap berada pada level yang tinggi. Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dengan penghasilan rendah selama beberapa dekade terakhir, meskipun krisis ekonomi di Asia telah menimbulkan banyak rintangan. Jumlah penduduk miskin berpenghasilan rendah yang diukur dengan garis kemiskinan terus turun sejak tahun 1999. Pada tahun 2004, tingkat kemiskinan turun di bawah tingkat kemiskinan sebelum krisis terjadi, yakni 16,7% dari total penduduk atau sama dengan 36,1 juta penduduk. Namun demikian, masih banyak penduduk lainnya yang tetap rentan terhadap kemiskinan.

Kurangnya akses kepada pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Akses kepada pendidikan dasar yang tidak memadai telah menurunkan produktifitas dan pendapatan perorangan secara signifikan, sehingga banyak keluarga yang terseret dalam kemiskinan. Keluarga miskin juga merasakan dampak langsung dari kurang memadainya pelayanan kesehatan dan menurunnya derajat kesehatan mereka. Kualitas hidup (kondisi kesehatan dan harapan hidup) serta pendapatan mereka menjadi turun, dan penghasilan mereka menjadi tidak stabil. Semuanya ini disebabkan oleh penyakit yang sering menyerang mereka. Belanja pembangunan turun dari 8% dari PDB di awal tahun 90-an hingga sedikit diatas 2% pada tahun 2004, sebagian besar karena kehati-hatian fiskal, otonomi daerah, dan meningkatnya beban yang ditanggung pemerintah untuk menyediakan subsidi BBM. Menurunnya belanja pembangunan telah menyebabkan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda dalam pencapaian MDG di seluruh propinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah perlu menargetkan investasinya dengan lebih efisien dan efektif di sektor-sektor sosial utama untuk mempercepat pencapaian MDG. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah harus bergerak lebih cepat lagi untuk melakukannya.

**b. Tujuan umum dan khusus:** Program Pengurangan Kemiskinan dan Percepatan Pencapaian MDG ini berupaya mempercepat kemajuan dalam pencapaian MDG nomor

dua di bidang pendidikan, kesehatan (Tujuan MDG nomor empat, lima dan enam), pengurangan kemiskinan (Tujuan MDG nomor satu), dan kesetaraan jender (MDG nomor tiga), serta mengurangi kesenjangan sosial antar daerah. Program ini akan mendorong re-orientasi, pengembangan, dan peningkatan belanja sosial pemerintah dengan meningkatkan akses, kesetaraan, mutu, tata kelola, dan monitoring penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

- c. Komponen dan hasil:** program pembangunan sektor yang diusulkan terdiri dari dua komponen utama:

**i. Komponen I— pemberian pinjaman berbasis kebijakan** yang ditujukan pada reformasi sektor untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan sosial, khususnya di sektor-sektor dan program-program pengeluaran pemerintah yang didukung oleh komponen II dan III. Program ini akan mendukung reformasi dan tindakan kebijakan sektor untuk meningkatkan mutu dan akses kepada pendidikan, kesehatan dan gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi. Reformasi sektor dibuat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tindakan nasional. Pemerintah akan meningkatkan alokasi sumberdaya dengan menyisihkan sebagian *local currency proceeds* dari pinjaman program untuk *earmarked basis* kepada pemerintah daerah. Program ini akan mendukung mekanisme transfer antar pemerintah daerah, termasuk penggunaan *block grant* dan/atau peningkatan Dana Alokasi Khusus untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan umum.

**ii. Komponen II – Bantuan teknis bersifat hibah.** Hasil pembangunan jangka menengah dari bantuan teknis ini, yang diberikan di 15 kabupaten/kota terpilih, meliputi: (i) peningkatan akses kepada pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan memprioritaskan dan melakukan re-orientasi belanja publik untuk mempercepat pencapaian MDG; (ii) peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan; (iii) peningkatan tata kelola dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan; dan (iv) peningkatan sistem monitoring dan evaluasi di sektor kesehatan dan pendidikan. Hasil jangka panjang mencakup peningkatan manajemen sektor kesehatan dan pendidikan yang terdesentralisasi.

**Hasil-hasil yang diharapkan meliputi:**

**i. Prioritasasi dan re-orientasi belanja publik untuk mempercepat pencapaian MDG.** Peningkatan jumlah, cakupan dan penetapan target di sektor kesehatan dan pendidikan, pengembangan kerangka kerja untuk perencanaan pengeluaran dan anggaran berbasis kinerja jangka menengah untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

**ii. Peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan sosial.** Akan ditingkatkan melalui reformasi kelembagaan dan kebijakan tingkat sektor, dan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan serta untuk menyelaraskan insentif lokal dengan prioritas MDG nasional.

**iii. Peningkatan tata kelola dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.** Akan ditingkatkan dengan menyediakan dukungan bagi manajemen dan kontrol fidusia yang lebih baik, termasuk mekanisme audit, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, termasuk dukungan untuk sistem sosialisasi informasi dan pemberian umpan balik.

**iv. Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.** Program Pengurangan Kemiskinan dan Percepatan Pencapaian MDG ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi untuk membantu pemerintah kabupaten/kota (dan mungkin juga propinsi dan pusat), dan

masyarakat penerima manfaat (*beneficiary*) untuk mengkaji alokasi dan penggunaan belanja pemerintah, ketersediaan dan mutu pelayanan sosial, serta hasil-hasil yang dicapai program-program pemerintah yang didukung oleh Program Pengurangan Kemiskinan dan Percepatan Pencapaian MDG, khususnya untuk memonitor kemajuan dalam mencapai target MDG.

- d. Dampak dan hasil yang diharapkan.** Peningkatan akses dan mutu pelayanan sosial dasar yang didukung oleh Program Pengurangan Kemiskinan dan Percepatan Pencapaian MDG, yang akan memiliki dampak positif pada indikator MDG yang terkait.
- e. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Tidak ada
- f. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Akan ditetapkan sesuai dengan tujuan program dalam meningkatkan manajemen fidusia, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

**8. Keterlibatan pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:**

Konsultasi awal diadakan dengan BAPPENAS, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, dan Departemen Agama. Desain program dibuat berdasarkan permintaan pemerintah kepada ADB untuk menyediakan bantuan untuk mempercepat pencapaian MDG. Program ini akan menggunakan pendekatan yang akan mengembangkan dan meningkatkan rencana belanja pemerintah. Pendekatan ini memastikan agar kegiatan program selaras dengan prioritas pemerintah.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2006
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan  
Pinjaman: 2007 (Subprogram 1)  
Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): 2007
- c. Periode dan lamanya program bantuan  
Pinjaman: 2007-2008  
Non pinjaman: 2007-2008

**10. Rencana Pembiayaan**

- a. Untuk pinjaman
- Ordinary capital resources*: \$ 200 juta
  - Asian Development Fund/ADF* (pinjaman):
  - Asian Development Fund/ADF* (hibah):
  - Lainnya:
- b. Untuk non pinjaman
- Tidak memerlukan sumberdaya apapun kecuali staf ADB
  - Anggaran administratif ADB:
  - Dana Hibah Bantuan Teknis: \$ 2 juta

Lainnya:

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: Ya, perlu pembiayaan bersama (jumlah akan ditetapkan)

*ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, RCSP = regional cooperation strategy and program.*

## Lampiran 8

**KERTAS KERJA KONSEP UNTUK PRODUK-PRODUK NON PINJAMAN**

**Lampiran ini memuat Kertas Kerja konsep untuk produk-produk non pinjaman berikut:**

- (i). Tabel A8.1: Pengembangan Kapasitas untuk Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Kerangka Kerja Desentralisasi
- (ii). Tabel A8.2: Peningkatan Kualitas Udara Wilayah Perkotaan (Tambahan)
- (iii). Tabel A8.3: Kerangka Kerja Hukum dan Administratif untuk Pembebasan Lahan dan Pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan
- (iv). Tabel A8.4: Penguatan Kapasitas untuk Meningkatkan Efektivitas Bantuan
- (v). Tabel A8.5: Jalan Daerah
- (vi). Tabel A8.6: Penanganan Banjir di DAS Terpilih di Pulau Jawa (Tambahan)
- (vii). Tabel A8.7: HIV di Sektor Transportasi
- (viii). Tabel A8.8: Proyek Penanganan Lingkungan Pemukiman Kumuh Berbasis Masyarakat Tahap II (NUSSP II)
- (ix). Tabel A8.9: Kluster Reformasi Iklim Investasi, Keuangan, dan Kemiskinan
- (x). Tabel A8.10: Kluster Pembangunan Infrastruktur Fisik
- (xi). Tabel A8.11: Bantuan untuk Mengembangkan Manajemen Risiko Bencana
- (xii). Tabel A8.12: Bantuan untuk Manajemen Berbasis Hasil dalam Perencanaan Nasional

**Tabel A8.1: Kertas Kerja Konsep untuk Pengembangan Kapasitas untuk Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Kerangka Kerja Desentralisasi (Capacity Building for Water Resources Management under Decentralization Framework)**

<p><b>1. Jenis /bentuk bantuan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lainnya: Lingkungan</p>										
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya Sektor: Pertanian, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Subsektor: Pengelolaan Sumberdaya Air</p> <p>b. Untuk persiapan proyek dan pinjaman, klasifikasikan program bantuan</p> <p><input type="checkbox"/> Program pengurangan kemiskinan inti</p> <p><input type="checkbox"/> Program pengurangan kemiskinan</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi</td> <td><input type="checkbox"/> Pembangunan manusia</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan</td> <td><input type="checkbox"/> Tata kelola yang baik</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Perlindungan lingkungan</td> <td><input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kerjasama regional</td> <td><input type="checkbox"/> Perlindungan sosial</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lainnya:</td> <td></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi	<input type="checkbox"/> Pembangunan manusia	<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input type="checkbox"/> Tata kelola yang baik	<input checked="" type="checkbox"/> Perlindungan lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta	<input type="checkbox"/> Kerjasama regional	<input type="checkbox"/> Perlindungan sosial	<input type="checkbox"/> Lainnya:	
<input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi	<input type="checkbox"/> Pembangunan manusia									
<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input type="checkbox"/> Tata kelola yang baik									
<input checked="" type="checkbox"/> Perlindungan lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta									
<input type="checkbox"/> Kerjasama regional	<input type="checkbox"/> Perlindungan sosial									
<input type="checkbox"/> Lainnya:										
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional      <input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>										
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Pertanian, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB</p>										
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> C. Morris</p>										
<p><b>6. Uraian tentang bantuan</b></p> <p>a. <b>Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional</b></p> <p>Reformasi di bidang administratif dan keuangan (di bawah UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU. No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan) serta reformasi sektor air yang sedang berjalan saling menguatkan satu sama lain (baik dalam hal konsep maupun waktu pelaksanaan) dan memberi peluang untuk mengubah pendekatan terhadap pengelolaan sumberdaya air. Namun, keberhasilan pelaksanaan reformasi sektor akan memerlukan penguatan lembaga di daerah. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, termasuk sumberdaya air, merupakan bidang prioritas dalam strategi</p>										

operasional ADB, dan dukungan ADB untuk bantuan teknis yang diusulkan akan membantu melaksanakan strategi ini.

**b. Tujuan umum dan khusus**

Tujuan jangka panjang program ini adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah mengembangkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sumberdaya air yang efektif untuk digunakan oleh berbagai sektor.

**c. Komponens dan hasil**

Bantuan teknis ini akan membantu mengadakan penilaian menyeluruh tentang pembagian fungsi dan tanggung jawab pengelolaan sumberdaya air diantara instansi dalam era desentralisasi, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan langkah-langkah khusus untuk mengembangkan lembaga-lembaga sektor yang efisien, akuntabel dan transparan.

**d. Dampak dan hasil yang diharapkan**

Akan ditentukan kemudian

**e. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan (jika ada)**

Tidak ada isu sosial atau lingkungan yang diperkirakan akan timbul.

**f. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek**

Akan dikembangkan pada waktu penilaian menyeluruh dilaksanakan.

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:**

Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri

**8. Keterlibatan mana pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan**

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, CSP *Update*, RSCP, RSCP *Update*, atau rencana kerja Interregional : 2003

b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan

Pinjaman

Non pinjaman (persiapan proyek) - 2006

Non pinjaman (selain dari persiapan proyek)

c. Periode dan lamanya program bantuan

Pinjaman

Non pinjaman – 2006–2007

CSP = *country strategy and program*,

SCSP = *subregional cooperation strategy and program*.

**10. Rencana Pembiayaan**

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya:

Jika diketahui, sebutkan estimasi biaya dan kesepakatan pembiayaan.

a. Untuk non pinjaman

Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB

Anggaran administratif ADB:

Dana hibah bantuan teknis: \$1 juta

**Tabel A8.2: Kertas Kerja Konsep untuk Peningkatan Kualitas Udara Wilayah Perkotaan  
(Urban Air Quality Improvement)  
(Tambahan)**

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p>										
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya Sektor: Pertanian dan sumberdaya alam Subsektor: Lingkungan dan keanekaragaman hayati</p> <p>b. Untuk persiapan proyek dan pinjaman, klasifikasikan program bantuan</p> <p><input type="checkbox"/> Program pengurangan kemiskinan inti</p> <p><input type="checkbox"/> Program pengurangan kemiskinan</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok:</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi</td> <td><input type="checkbox"/> Pembangunan manusia</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan</td> <td><input type="checkbox"/> Tata kelola</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Perlindungan lingkungan</td> <td><input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kerjasama regional</td> <td><input type="checkbox"/> Perlindungan sosial</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lainnya:</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi	<input type="checkbox"/> Pembangunan manusia	<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input type="checkbox"/> Tata kelola	<input checked="" type="checkbox"/> Perlindungan lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta	<input type="checkbox"/> Kerjasama regional	<input type="checkbox"/> Perlindungan sosial	<input type="checkbox"/> Lainnya:	
<input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi	<input type="checkbox"/> Pembangunan manusia									
<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input type="checkbox"/> Tata kelola									
<input checked="" type="checkbox"/> Perlindungan lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta									
<input type="checkbox"/> Kerjasama regional	<input type="checkbox"/> Perlindungan sosial									
<input type="checkbox"/> Lainnya:										
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p>										
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi infrastruktur, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB</p>										
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> Yue-Lang Feng</p>										
<p><b>6. Uraian tentang bantuan</b></p> <p><b>a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:</b> Urbanisasi yang cepat dan tidak tersedianya mekanisme dan strategi penegakan peraturan yang memadai membuat pencemaran udara menjadi ancaman kesehatan yang signifikan bagi penduduk kota, terutama bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas udara di wilayah perkotaan merupakan bidang utama yang menjadi fokus dari program pengelolaan</p>										

lingkungan ADB. Upaya peningkatan kualitas udara memerlukan peningkatan tata kelola, klarifikasi kerangka kerja kebijakan dan peraturan, dan penegakan hukum. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam sektor terkait dan pemerintah daerah untuk upaya perlindungan lingkungan juga merupakan elemen penting.

Pemerintah memberlakukan PP No.41 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di tahun 1999, dan mengeluarkan beberapa program, SK atau standar yang terkait dengan penanganan kualitas udara, untuk mengendalikan emisi dari kendaraan (sumber bergerak) dan sumber tidak bergerak. Pemerintah meluncurkan Program Langit Biru pada tahun 1996, yang meliputi kegiatan untuk mengendalikan emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. Untuk sumber tidak bergerak, tahap awal program udara bersih tersebut fokus pada pabrik semen, industri besi dan baja, bubur kertas dan kertas, dan pembangkit listrik tenaga batu bara, dan menargetkan lima kota terbesar di Indonesia: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan.

Namun, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan peraturan dan program, dan dalam mengkaji hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan kualitas udara. Tantangan tersebut sebagian besar disebabkan oleh tidak memadainya kapasitas kelembagaan, tidak tersedianya database tentang lingkungan yang lengkap, dan terbatasnya sumberdaya manusia yang mereka miliki. Meskipun UU No.22 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25 tentang Perimbangan Keuangan tahun 1999 akhirnya mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, tidak tersedianya kerangka kerja pelaksanaan dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penanganan kualitas udara melemahkan penegakkan peraturan tentang penanganan kualitas udara sehingga mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Standar untuk ambang batas baku mutu udara ambien untuk sumber bergerak dan tidak bergerak yang diundang-undangkan pada pertengahan tahun 90-an mungkin perlu dikaji ulang dan diubah untuk memastikan bahwa standar tersebut memenuhi tujuan pemerintah untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia serta melindungi makhluk hidup lainnya. Emisi zat pencemar udara diperkirakan akan meningkat pesat seiring dengan tumbuhnya ekonomi jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan.

**b. Tujuan umum dan khusus:**

Program yang diusulkan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen A: BBM Ramah Lingkungan untuk Langit Biru, dan komponen B: Program Pengembangan Sektor Peningkatan Kualitas Udara di Wilayah Perkotaan, yang akan meliputi pinjaman berbasis kebijakan, pinjaman proyek, dan kredit melalui intermediasi keuangan. Tujuan umum dari komponen A adalah untuk meningkatkan penggunaan *compressed natural gas* (CNG), yang merupakan salah satu dari Bahan Bakar Gas (BBG), dalam rangka mengurangi emisi kendaraan. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk membantu Perusahaan Gas Negara (PGN) dan sektor swasta membangun infrastruktur CNG dan mengembangkan kendaraan berbahan bakar gas serta membantu Kementrian Lingkungan Hidup dalam mengembangkan rencana tindakan untuk mengurangi emisi kendaraan. Tujuan umum dari komponen B adalah untuk mendorong reformasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas udara melalui pengurangan pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Tujuan khusus dari komponen ini adalah membantu pemerintah mengembangkan kerangka kerja kebijakan dan peraturan, meningkatkan fasilitas dan strategi dan pelaksanaan, serta menguatkan kapasitas kelembagaan dan penegakan peraturan di pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas udara dengan cara yang efektif dan berkesinambungan. Wilayah yang menjadi fokus dari program ini adalah DKI Jakarta

dan kota-kota di sekitarnya (Jakarta, Bogor, Tangerang, and Bekasi, atau JABOTABEK). JABOTABEK sementara dipilih sebagai wilayah kerja program karena wilayah ini kemungkinan besar berada dalam satu wilayah yang memiliki pola pergerakan udara yang sama mengingat keadaan topografinya. Mobilitas pekerja dan penduduk yang cukup tinggi di wilayah tersebut menyebabkan zat pencemar udara pindah dari satu kota ke kota lainnya. Hal ini bisa menjadi isu penting yang mungkin perlu ditangani dengan pendekatan wilayah. Wilayah kerja program ini akan diputuskan setelah diadakan konsultasi dengan pemerintah dalam tahap persiapan program.

**c. Komponen dan hasil:**

Komponen A terdiri dari komponen investasi yang ditujukan untuk (i) mendorong penggunaan BBG guna mengurangi pencemaran udara akibat emisi kendaraan sehingga membantu meningkatkan kualitas udara, dan (ii) meningkatkan kerangka kerja uji emisi dan pengawasannya. Komponen A juga akan menyediakan bantuan teknis untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan rencana tindakan untuk mengurangi emisi kendaraan.

Sub komponen dan hasil dari komponen B adalah sebagai berikut. Pinjaman kebijakan akan mendukung reformasi kebijakan pemerintah tentang peningkatan kualitas udara dan penguatan kelembagaan. Pinjaman proyek dan pemberian kredit akan menyediakan dana untuk sektor publik dan swasta di JABOTABEK untuk mengembangkan dan meningkatkan sarana perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan untuk menegakkan peraturan tentang peningkatan kualitas udara dan kepatuhan terhadapnya. Ada beberapa elemen yang mungkin diikuti sertakan seperti pengembangan kapasitas untuk penegakan peraturan, jaringan untuk memantau kualitas udara, survei tentang sumber pencemaran udara bergerak dan tidak bergerak dan pangkalan datanya, peningkatan kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan oleh sektor industri dan transportasi, dsb.

**d. Dampak dan hasil yang diharapkan:**

Komponen A akan menyediakan dana kepada PGN dan sektor swasta untuk membangun (i) pipa transmisi gas alam, (ii) jaringan distribusi gas dan jalur penghubung ke stasiun pengisian BBG, (iii) stasiun pengisian dan penyimpanan BBG, (iv) *converter kit* untuk mobil-mobil berbahan bakar bensin yang ada, (v) bus-bus baru berbahan bakar gas, dan (vi) stasiun-stasiun untuk memantau baku mutu udara ambien dan emisi kendaraan.

Pinjaman berbasis kebijakan dari komponen B akan membantu pemerintah mengkaji dan mengusulkan amendemen terhadap PP tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Program Langit Biru. Standar yang terkait dengan emisi dan kualitas udara serta spesifikasi bahan bakar juga akan dikaji. Pengkajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah mencapai tujuannya dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan lingkungan hidup. Kerangka kerja kelembagaan untuk penegakan PP tentang Pengendalian Pencemaran Udara di JABOTABEK akan dikaji dan ditingkatkan. Pinjaman proyek dan pemberian kredit akan membantu sektor publik dan swasta membeli peralatan baru dan tambahan serta menciptakan pangkalan data yang diperlukan bagi upaya peningkatan kualitas udara, dan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan lainnya. Pengalaman yang didapat dari program ini akan diperluas di propinsi-propinsi lain.

**e. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:**

Program ini akan meningkatkan kebijakan pemerintah dan kemampuan untuk menegakan peraturan tentang penanganan kualitas udara. Disamping itu, program ini juga akan meningkatkan kualitas udara di wilayah perkotaan dan industri, yang akan memberikan manfaat bagi penduduk perkotaan, khususnya masyarakat miskin. Penggunaan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan akan meningkatkan produktifitas masyarakat, dan kualitas udara yang lebih baik juga akan meningkatkan kesehatan masyarakat.

**f. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Akan ditetapkan kemudian.**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:**

Instansi Penanggung Jawab: MIGAS (komponen A), BAPPENAS/Kementrian Lingkungan Hidup (komponen B)

Instansi Pelaksana: PGN (komponen A), Pemerintah daerah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, serta instansi-instansi dari sektor terkait (komponen B)

**8. Keterlibatan mana pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:**

Program ini akan disusun berdasarkan Program Langit Biru yang telah berjalan selama ini. Konsultasi dengan para pemangku kepentingan akan diadakan selama tahap persiapan.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2003
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman: 2008
  - Non pinjaman (persiapan proyek): 2006
  - Non pinjaman (selain dari persiapan proyek):
- c. Periode dan lamanya bantuan
  - Pinjaman: 2008-2011
  - Non pinjaman: 2007, 6 bulan

**10. Rencana Pembiayaan** (Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang dibutuhkan dan darimana sumbernya, estimasi biaya, dan kesepakatan pembiayaan)

- a. Untuk pinjaman
  - Ordinary capital resources:*
  - Asian Development Fund/ADF:*
  - Lainnya :
- b. Untuk non pinjaman
  - Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB
  - Anggaran administratif ADB:
  - Dana hibah bantuan teknis: TASF \$300,000
  - Lainnya:

ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, SCSP = subregional cooperation strategy and program.

**Tabel A8.3: Kertas Kerja Konsep untuk Kerangka Kerja Hukum dan Administratif untuk Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali**  
**(Legal and Administrative Framework for Land Acquisition and Resettlement)**

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya  Sektor: Hukum, manajemen ekonomi, dan kebijakan publik  Subsektor: Administrasi pemerintah pusat dan daerah</p> <p>b. Untuk persiapan proyek dan pinjaman, klasifikasikan program bantuan</p> <p><input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p><input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p><input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola <input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan</p> <p>Subtema: Tata kelola</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional <input type="checkbox"/> Subregional <input type="checkbox"/> Interregional <input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Infrastruktur, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB</p>
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> M. Huddleson</p>
<p><b>6. Uraian tentang bantuan</b></p> <p>a. <b>Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:</b>  Bantuan teknis ini melengkapi program bantuan ADB di Indonesia dalam meningkatkan tata kelola, termasuk reformasi hukum dan sistem peradilan, membangun sumberdaya manusia, dan meningkatkan efektivitas bantuan ADB, dalam konteks desentralisasi. Bantuan teknis ini juga melengkapi program regional ADB untuk wilayah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kerangka kerja kebijakan, hukum dan administratif untuk pemindahan penduduk. Bantuan teknis ini merupakan lanjutan program bantuan teknis regional RETA 5935 (2000-2002), dimana Indonesia termasuk salah satu negara</p>

peserta. Proses desentralisasi yang mulai berjalan sejak tahun 2001 juga meliputi pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan. Upaya perencanaan, pembiayaan, persetujuan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan di tingkat daerah perlu dilakukan dengan hati-hati agar proyek-proyek infrastruktur ADB (dan proyek-proyek investasi lainnya) dapat berjalan tanpa hambatan dan penundaan. Untuk itu diperlukan analisa yang mendalam tentang pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan. Dalam desentralisasi, pemerintah pusat tetap memiliki hak untuk mengatur dan menetapkan hak-hak atas tanah, melaksanakan pembaruan agraria, dan merumuskan kerangka kerja dasar nasional untuk pajak bumi dan bangunan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditugasi pemerintah untuk merevisi tiga UU tentang pertanahan, termasuk UU tentang Pembebasan Lahan dan UU Pokok Agraria. Daerah akan membuat peraturan sendiri tentang penggunaan lahan dan aturan tentang pendaftaran tanah dan hal-hal lainnya, dan sepertinya daerah juga akan bertugas untuk melakukan pembebasan lahan, kompensasi, dan pembiayaan. Daerah akan memerlukan bantuan untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk merencanakan, menganggarkan dan menyelenggarakan pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan.

**b. Tujuan umum dan khusus:**

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan standar hidup dan mengurangi risiko kemiskinan yang diakibatkan oleh pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan untuk proyek pembangunan. Tujuan ini akan dicapai dengan penyusunan standar yang terbukti berhasil di negara-negara lain, didukung dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Tujuan khusus program ini adalah untuk membantu BPN dan pemerintah daerah mengembangkan dokumen hukum dan peraturan tentang manajemen lahan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan, dalam konteks desentralisasi, serta mengembangkan kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan dan menyelenggarakan pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kemiskinan dan memastikan agar persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur baru atau rehabilitasi fisik baik yang didanai oleh ADB, pemerintah, maupun donor lainnya menjadi lebih efisien.

**c. Komponen dan hasil:**

Bantuan teknis ini pertama akan mendukung pelaksanaan kerangka kerja untuk perencanaan dan penyelenggaraan pembebasan lahan dalam era desentralisasi dengan membantu pemerintah pusat meningkatkan kebijakan dan standar nasional yang diperlukan untuk proyek-proyek di daerah. Hal ini meliputi finalisasi dan penyetujuan UU tentang pembebasan lahan, yang telah disetujui oleh BPN, melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama di tingkat pusat dan daerah. Kedua, bantuan teknis ini akan memfasilitasi perubahan fungsi, organisasi, staf, dan kemampuan yang dibutuhkan di tingkat daerah guna membantu pemerintah daerah melaksanakan tugas mereka di bidang pertanahan seperti yang diamanatkan oleh UU. Ketiga, bantuan teknis ini akan meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengawasi kebijakan dan kerangka kerja peraturan yang telah direvisi. Keempat, bantuan teknis ini akan mengembangkan kapasitas universitas, pusat penelitian dan LSM untuk melakukan survei sosial dan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan serta monitoring dan evaluasi proyek-proyek yang

didanai ADB selama tahap persiapan dan pelaksanaan. Bantuan teknis ini akan menguatkan kapasitas pengawasan pemerintah daerah dan membantu mencapai tujuan strategis pemerintah.

**d. Dampak dan hasil yang diharapkan:**

Merevisi dan melaksanakan UU tentang Pembebasan Lahan, sesuai dengan UU No.22 dan No.25/1999 serta UU dan peraturan terkait lainnya, melalui konsultasi dan lokakarya dengan pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya.

Peraturan tentang penerbitan pedoman pelaksanaan yang akan digunakan untuk mengembangkan perencanaan dan penyelenggaraan pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan di tingkat daerah.

Menyusun dan melaksanakan strategi untuk pengembangan kapasitas guna meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola dan mengawasi kegiatan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, dan untuk menyusun dan mengawasi kontrak konsultan untuk jasa ahli, sesuai dengan UU yang baru serta peraturan dan pedoman pelaksanaan lainnya.

Bantuan teknis ini juga mengembangkan kapasitas LSM, universitas, dan pusat penelitian untuk melakukan survei sosial dan lingkungan dan menyusun sistem monitoring dan evaluasi rencana pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan.

**e. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:**

Bantuan teknis ini menerapkan strategi pengurangan kemiskinan ADB, yang sangat penting bagi strategi program bantuan ADB di Indonesia, dengan mengurangi risiko kemiskinan dalam pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan. Bantuan teknis ini juga akan mendukung kebijakan upaya perlindungan sosial " ADB tentang pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan. Bantuan teknis ini mengatasi kesenjangan penting antara kebijakan dan kerangka kerja hukum yang ada untuk pembebasan lahan dengan kebijakan ADB tentang pemindahan penduduk, yang didasarkan pada standar internasional. Keppres No.55/1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan dan PP No.51/1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup tidak mencakup sepenuhnya prinsip-prinsip biaya penggantian atas hilangnya aset yang dimiliki akibat proyek (survei NJOP dan pemerintah daerah bisa menghasilkan nilai kompensasi yang jauh di bawah harga pasar); survei sosial ekonomi sebagai dasar untuk menyiapkan rencana; pilihan pemukiman kembali penduduk yang dipindahkan dan rehabilitasi, terutama bagi masyarakat rentan atau yang terkena dampak parah; cakupan kompensasi bagi warga terkena proyek yang mempunyai sertifikat sah, girik atau hak adat, atau belum memiliki bukti kepemilikan yang sah; konsultasi, monitoring dan evaluasi; dan cakupan untuk proyek-proyek sektor swasta.

**f. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** BPN di tingkat nasional dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan UU, peraturan, dan pedoman yang dikembangkan dalam kegiatan bantuan teknis. Instansi-instansi yang terlibat dalam kegiatan pengembangan kapasitas juga akan mensosialisasikan dokumen-dokumen penting melalui kegiatan pelatihan dan pertemuan.

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Badan Pertanahan Nasional.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2002
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman:
  - Non pinjaman (persiapan proyek):
  - Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): 2004
- c. Periode dan lamanya bantuan
  - Pinjaman:
  - Non pinjaman: 2004, 6 bulan

**10. Rencana Pembiayaan**

- a. Untuk pinjaman
  - Ordinary capital resources*:
  - Asian Development Fund/ADF*:
  - Lainnya: pembiayaan bersama berbasis hibah \$ -

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya:

Jika diketahui, sebutkan estimasi biaya dan kesepakatan pembiayaan (misalnya total biaya, pembiayaan dari ADB, pembiayaan dari sumber lainnya, dan pembiayaan dari pemerintah):

- b. Untuk non pinjaman
  - Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB
  - Anggaran administratif ADB: \$
  - Dana hibah bantuan teknis: \$ 600,000

ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, RSCP = regional cooperation strategy and program.

**Tabel A8.4: Kertas Kerja Konsep untuk Penguatan Kapasitas untuk Meningkatkan Efektivitas Bantuan**  
**(Strengthening Capacity to Improve Aid Effectiveness)**

Tanggal: Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p>    <input type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p>        <input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p>        <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p>        <input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya</p> <p>    Sektor: Hukum, Manajemen Ekonomi, dan Kebijakan Publik</p> <p>    Subsektor: Keuangan Publik dan Manajemen Pengeluaran</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p>    Tema:</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola      <input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p>    <input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>    Subtema: Pengembangan kelembagaan</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> <i>Indonesia Resident Mission</i></p>
<p><b>6. Uraian tentang bantuan</b></p>

**a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Portofolio bantuan pembangunan dari luar negeri meliputi 182 program dan proyek dengan total dana yang disediakan mencapai \$15,3 milyar. Namun dari jumlah dana tersebut masih ada \$ 9 milyar lebih yang belum dikucurkan sampai dengan akhir 2005. Sementara berupaya mengurangi utang nasional dari 50,0% dari PDB menjadi 31,8% dari PDB di tahun 2009, pemerintah akan meningkatkan kemitraan dengan lembaga donor bilateral dan multilateral untuk mencapai tujuan umum rencana dan strategi pembangunan nasional. Pemerintah berencana untuk memfokuskan bantuan asing pada empat bidang tema yang ada dalam rencana pembangunan nasional, yakni: (i) pendidikan dan kesehatan; (ii) penciptaan lapangan kerja, investasi, dan ekspor (termasuk pembangunan infrastruktur); (iii) revitalisasi pertanian, perikanan dan pembangunan pedesaan; dan (iv) pengurangan kemiskinan.

BAPPENAS memainkan peran yang penting dalam mengkoordinasi proses perencanaan pembangunan serta monitoring dan evaluasi. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberi BAPPENAS mandat untuk berfungsi sebagai lembaga utama pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan. UU tersebut juga menyediakan kewenangan kelembagaan bagi BAPPENAS untuk membantu Presiden, gubernur, dan bupati untuk merumuskan strategi pembangunan nasional dan daerah serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya. Strategi dan rencana pembangunan nasional merupakan acuan pokok dalam menyelaraskan bantuan asing dengan prioritas nasional serta meningkatkan rasa memiliki pemerintah sesuai dengan Deklarasi Paris.

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 menetapkan peran, tanggung jawab, dan mekanisme kelembagaan untuk pengkoordinasian pinjaman dan bantuan hibah luar negeri. Meskipun departemen-departemen dari sektor terkait dilibatkan dalam pelaksanaan program dan proyek yang didukung oleh bantuan luar negeri, BAPPENAS dan Departemen Keuangan memainkan peran koordinasi dalam siklus program untuk semua bantuan luar negeri. Pemerintah perlu meningkatkan pendekatan untuk koordinasi bantuan luar negeri di tingkat nasional dan membentuk satu sistem informasi untuk menyediakan informasi kepada pengambil keputusan tentang program pembangunan tepat pada waktunya.

**b. Tujuan umum dan khusus:** Tujuan umum: Meningkatkan efektivitas bantuan luar negeri sesuai dengan Deklarasi Paris. Tujuan khusus: Membantu pemerintah menyelaraskan bantuan luar negeri dengan prioritas pemerintah, membantu dalam menguatkan kaitan antara perencanaan dengan penyusunan anggaran, dan meningkatkan monitoring & evaluasi proyek-proyek yang didanai oleh bantuan luar negeri.

**Komponen dan hasil:** (i) Satu rencana kerja untuk meningkatkan efektivitas bantuan. Rencana kerja ini akan disusun berdasarkan serangkaian analisa mendalam tentang peraturan, prosedur, dan praktek yang ada yang digunakan dalam siklus program/proyek bantuan luar negeri. (ii) Kerangka kerja penilaian kinerja yang berorientasi hasil dan sistem informasi manajemen. (iii) Pelatihan singkat di dalam dan luar negeri, dan lokakarya.

**c. Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF :** Tidak ada.

**d. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Satu rencana kerja 5 tahun untuk meningkatkan efektivitas bantuan, yang memuat kegiatan-kegiatan khusus beserta jadwal pelaksanaannya yang disusun bersama oleh BAPPENAS dan departemen-departemen utama yang terkait. Satu pedoman lengkap yang memuat semua tahapan yang ada dalam siklus proyek, pangkalan data untuk memudahkan pemantauan proyek, kader staf yang

telah dilatih dan mampu menggunakan pedoman dan pangkalan data tersebut diatas dengan efektif.

**d. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:**Tidak ada

**e. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:**

**Untuk bantuan teknis, metode yang dipakai untuk sosialisasi hasil kegiatan**

**bantuan teknis:**

- Konferensi/lokakarya/pertemuan informal (peserta membawa sendiri makan siang)
- Publikasi artikel dalam jurnal eksternal atau buku
- Siaran Perske* kantor-kantor berita untuk kalangan luar, termasuk website ADB ([www.adb.org](http://www.adb.org))
- Siaran Persdi ADB Today* untuk kalangan internal
- Lainnya (sebutkan)

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** BAPPENAS, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral

**8. Keterlibatan mana pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:**

Konsep dikembangkan oleh IRM bersama dengan BAPPENAS. IRM telah mengadakan berbagai lokakarya dan seminar dengan BAPPENAS untuk mendapatkan dukungan penuh.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2006
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman:
  - Non pinjaman (persiapan proyek):
  - Nonl pinjaman (selain dari persiapan proyek): Triwulan ke-4, 2006
- c. Periode dan lamanya program bantuan
  - Pinjaman:
  - Non pinjaman: 18 bulan

## 10. Rencana Pembiayaan

Untuk non pinjaman

- Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB
- Anggaran administratif ADB:
- Dana hibah bantuan teknis
- Lainnya:

Sumber	Jumlah (\$)
Pembiayaan dari ADB	800,000
Pembiayaan dari pemerintah	200,000
Pembiayaan lainnya	0
<b>Total Dana</b>	<b>1,000,000</b>

Sumber: Hasil penghitungan *Asian Development Bank*.

ADB = *Asian Development Bank*, CSP = *country strategy and program*, RCSP = *regional cooperation strategy and program*.

**Tabel A8.5: Kertas Kerja Konsep untuk Jalan Lintas Daerah  
(Regional Road)**

Tanggal: 10 Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: Pengembangan kapasitas</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya Sektor: Transportasi dan komunikasi Subsektor: Jalan raya dan jalan tol</p> <p>b. Untuk persiapan proyek dan pinjaman, klasifikasikan program bantuan</p> <p><input type="checkbox"/> Program pengurangan kemiskinan inti</p> <p><input type="checkbox"/> Program pengurangan kemiskinan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p><input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input checked="" type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p><input type="checkbox"/> Tata kelola      <input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input checked="" type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Infrastruktur /Departemen Wilayah Asia Tenggara</p>
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> J. M. Miller</p>
<p><b>6. Uraian tentang bantuan</b></p> <p><b>a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:</b> Jalan darat merupakan jalur transportasi utama yang digunakan untuk jasa angkutan barang dan penumpang antar kota, dan cakupan serta kondisinya sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Kepadatan ruas jalan (yakni jumlah ruas</p>

jalan dalam 1 km<sup>2</sup>) di Indonesia hanya 0,19 km<sup>2</sup>, atau sama dengan 1,7 km per 1.000 orang. Oleh karena itu Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki kepadatan ruas jalan terendah di Asia Tenggara. Meskipun ada banyak investasi besar dalam perbaikan dan perluasan jalan di tahun 80-an dan 90-an, pengeluaran untuk sektor ini menurun tajam sejak krisis ekonomi di Asia, dari tingkat puncak yang mencapai sekitar 22% dari total anggaran publik di pertengahan tahun 90-an menjadi sekitar 10% dalam beberapa tahun terakhir. Jalan arteri nasional berada dalam kondisi yang cukup baik, namun hampir separuhnya mengalami kemacetan sehingga menaikkan biaya bagi dunia industri dan perdagangan, dan jaringan ini hanya terdiri dari 600 km jalan tol. Jalan-jalan provinsi secara umum berada dalam kondisi yang baik, namun jalan kabupaten dan kota berada dalam kondisi yang memprihatinkan, dimana hampir 30% jalan tersebut masih belum diaspal sehingga susah untuk dilalui pada musim hujan. Pemerintah pusat berupaya membelanjakan anggaran yang cukup memadai untuk merawat jalan arteri nasional, namun investasi dalam perbaikan dan perluasan jaringan jalan masih mengalami kemacetan. Situasi di tingkat daerah justru kebalikannya. Anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah untuk merawat jalan terlalu sedikit. Akibatnya dampak yang ditimbulkan oleh alokasi biaya perawatan yang tidak memadai lebih merugikan daripada dampak yang ditimbulkan oleh alokasi biaya pembangunan jalan yang sedikit.

Secara umum, jumlah jalan yang tersedia tidak memadai, dan jumlah jalan kabupaten/pedesaan jauh dari memadai dan kondisinya sangat memprihatinkan. Meskipun ketersediaan jalan nasional juga tidak memadai, kualitas jalan yang baru dibangun atau dirawat secara rutin cukup lumayan. Tidak memadainya jumlah dan mutu jalan mengakibatkan kemacetan, keterlambatan, biaya operasional yang tinggi, dan keselamatan yang mengkhawatirkan. Masalah utama terletak pada kurangnya perawatan rutin jalan. Penyebab lainnya adalah kendaraan dengan muatan yang melebihi batas, ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan kapasitas jalan, kurangnya dana, kurangnya produktifitas dan manajemen, serta lemahnya kapasitas instansi-instansi terkait dan minimnya koordinasi diantara mereka.

**b. Tujuan umum dan khusus:** Tujuan umum bantuan teknis ini adalah menyiapkan proyek yang akan menyediakan infrastruktur untuk memfasilitasi arus angkutan barang dan penumpang di ruas jalan tol nasional.

**c. Komponen dan hasil:** Hasil proyek ini terdiri dari (i) analisa sosial-ekonomi tentang daerah yang akan menjadi wilayah proyek; (ii) kajian tentang arus kendaraan; (iii) desain awal jalan daerah; studi kelayakan ekonomi tentang pembangunan jalan yang diusulkan; (iv) penilaian terhadap kapasitas instansi penanggung jawab; (v) penilaian sosial/kemiskinan, rencana pembebasan lahan dan pemindahan penduduk, serta rencana pengembangan bagi penduduk asli; (vi) analisis mengenai dampak lingkungan, dan (viii) persiapan dokumentasi pemrosesan proyek.

**d. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Proyek ini akan menciptakan investasi dan pengoperasian jalan lintas daerah yang lebih baik, efisien dan berkelanjutan.

**e. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Akan ditangani selama pelaksanaan bantuan teknis

**f. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Pertemuan tripartit, website ADB

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Departemen Pekerjaan Umum

**8. Keterlibatan mana pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:**

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2006
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman:
  - Non pinjaman (persiapan proyek): 2007
  - Non pinjaman (selain dari persiapan proyek):
- c. Periode dan lamanya bantuan
  - Pinjaman:
  - Non-pinjaman: 2007–2008

**10. Rencana Pembiayaan**

- a. Untuk non pinjaman
  - Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB
  - Anggaran administratif ADB: \$
  - Dana hibah bantuan teknis
  - Lainnya:

Sumber	Jumlah (\$)
Pembiayaan dari ADB	700,000
Pembiayaan dari Pemerintah	100,000
Sumber pembiayaan lainnya	
<b>Total Dana</b>	<b>800,000</b>

Sumber: Hasil penghitungan *Asian Development Bank*.

ADB = *Asian Development Bank*, CSP = *country strategy and program*, RCSP = *regional cooperation strategy and program*.

**Tabel A8.6 Pengelolaan Banjir di DAS Terpilih di Pulau Jawa  
(Tambahan)**

Tanggal:

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: {sebutkan, misalnya persiapan untuk proyek yang didanai dengan pinjaman, pelaksanaan proyek, atau kegiatan bantuan teknis }</p> <p><input type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: {sebutkan}</p>										
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya Sektor: Pertanian dan sumberdaya alam, dan Lingkungan. Subsektor: Pengelolaan sumberdaya air.</p> <p>b. Untuk persiapan proyek dan pinjaman, klasifikasikan program bantuan</p> <p><input type="checkbox"/> Program pengurangan kemiskinan inti</p> <p><input type="checkbox"/> Program pengurangan kemiskinan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lembaga donor lainnya</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok {boleh pilih lebih dari satu }</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi</td> <td><input type="checkbox"/> Pembangunan manusia</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan</td> <td><input type="checkbox"/> Tata kelola</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Perlindungan lingkungan</td> <td><input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kerjasama regional</td> <td><input type="checkbox"/> Perlindungan sosial</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lainnya: {sebutkan }</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi	<input type="checkbox"/> Pembangunan manusia	<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input type="checkbox"/> Tata kelola	<input checked="" type="checkbox"/> Perlindungan lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta	<input type="checkbox"/> Kerjasama regional	<input type="checkbox"/> Perlindungan sosial	<input type="checkbox"/> Lainnya: {sebutkan }	
<input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi	<input type="checkbox"/> Pembangunan manusia									
<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input type="checkbox"/> Tata kelola									
<input checked="" type="checkbox"/> Perlindungan lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta									
<input type="checkbox"/> Kerjasama regional	<input type="checkbox"/> Perlindungan sosial									
<input type="checkbox"/> Lainnya: {sebutkan }										
<p><b>3. Cakupan:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional      <input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>										
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Pertanian, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB.</p>										
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> C. Morris</p>										
<p><b>6. Uraian tentang bantuan</b></p>										

**a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:**

Peristiwa banjir besar di pulau Jawa meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan telah mengakibatkan kerugian yang besar terhadap perekonomian. Upaya pengendalian banjir yang setengah-setengah terbukti tidak efektif, oleh karena itu diperlukan pendekatan terpadu untuk menangani banjir di wilayah DAS. Selain mengurangi debit banjir agar tidak melebihi kapasitas sungai dan melindungi lokasi-lokasi rawan banjir dari ancaman erosi melalui langkah-langkah struktural, perlu dilakukan pengkajian tentang dampak penggundulan DAS dan hilangnya daerah resapan air, dan jalur drainase ke saluran drainase dan infrastruktur perkotaan dan industri. Di samping itu, tindakan korektif juga perlu dimasukkan kedalam rencana penanganan banjir.

Kegiatan persiapan yang dimulai oleh Direktorat Sumberdaya Air saat ini sedang dalam tahap awal survei DAS berdasarkan hasil pengambilan foto satelit. ADB terlibat dalam pengembangan sumberdaya air, termasuk pengendalian banjir di beberapa DAS utama di pulau Jawa.

**b. Tujuan umum dan khusus:**

Proyek ini akan mendukung persiapan dan pelaksanaan bertahap program penanganan banjir yang menyeluruh, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang kegiatan pembangunan yang ada dan yang akan datang di wilayah DAS.

**c. Komponen dan hasil:** Akan ditetapkan kemudian**d. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Akan ditetapkan kemudian**e. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:**

Kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan di DAS oleh masyarakat setempat, dan isu-isu hukum dan pengelolaan yang terkait dengan lahan yang dialokasikan untuk HPH.

**f. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Akan ditentukan kemudian**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:**

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Sumberdaya Air

**8. Keterlibatan mana pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:** Konsultasi diadakan dengan pemerintah pusat, kabupaten, dan anggota masyarakat.**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, CSP *Update*, RSCP, RSCP *Update*, atau rencana kerja Interregional: 2002
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman: 2008
  - Non pinjaman (persiapan proyek):
  - Non pinjaman (tambahan): 2007
- c. Periode dan lamanya bantuan
  - Pinjaman: 2008-2011
  - Non pinjaman: 2004-2006.

**10. Rencana Pembiayaan**

## a. Untuk pinjaman

- Ordinary capital resources:*
- Asian Development Fund/ADF:* \$
- Lainnya:

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya:

Jika diketahui, sebutkan estimasi biaya dan kesepakatan pembiayaan (misalnya total biaya, pembiayaan dari ADB, pembiayaan dari sumber lainnya, dan pembiayaan dari pemerintah)

## b. Untuk non pinjaman

- Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB
- Anggaran administrative ADB: \$
- Dana hibah bantuan teknis: \$1,200,000

**Tabel A8.7: Kertas Kerja Konsep untuk Program HIV di Sektor Transportasi  
(HIV In the Transport Sector)**

Tanggal: 7 Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya:</p>								
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya Sektor: Transportasi dan Komunikasi; kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial Subsektor: pelabuhan, jalur laut, dan pelayaran; jalan dan jalan tol; pelayanan kesehatan sosial yang menyertai program-program yang lebih luas.</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p><input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok Tema:</p> <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan</td> <td><input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif</td> <td><input type="checkbox"/> Kerjasama regional</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tata kelola</td> <td><input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Jender dan pembangunan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</td> </tr> </table> <p>Subtema: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Fisik, Prakarsa Jender Regional, Pengembangan Kelembagaan</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	<input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif	<input type="checkbox"/> Kerjasama regional	<input type="checkbox"/> Tata kelola	<input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta	<input checked="" type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas
<input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	<input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan							
<input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif	<input type="checkbox"/> Kerjasama regional							
<input type="checkbox"/> Tata kelola	<input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta							
<input checked="" type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas							
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>								
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Kantor Perwakilan ADB Di Indonesia</p>								
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> Lisa Kulp</p>								
<p><b>6. Uraian tentang</b></p> <p>a. <b>Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:</b> CSP fokus pada percepatan pencapaian MDG dan pembangunan infrastruktur. Tujuan MDG Nomor 6</p>								

berupaya memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya. Pengurangan penyebaran HIV/AIDS adalah salah satu isu utama yang diidentifikasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007. Para pekerja yang bekerja dengan mobilitas tinggi termasuk pekerja bangunan merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap HIV/AIDS. Pekerja bangunan mencakup 5% total tenaga kerja. Mereka pada umumnya tidak dapat dijangkau oleh program kesehatan berbasis masyarakat yang diselenggarakan Depkes. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bertugas mengembangkan strategi penanggulangan HIV/AIDS. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) telah mengeluarkan SK mengenai kesadaran tentang HIV/AIDS di tempat kerja. Namun Departemen Pekerjaan Umum mengatur kegiatan konstruksi dan memiliki kewenangan untuk mengatur kondisi dan standar kerja untuk pekerja bangunan yang bekerja di proyek-proyek pemerintah dan swasta. Pekerja bangunan, yang jumlahnya begitu besar dan merupakan kelompok berisiko tinggi dapat dijangkau melalui Departemen Pekerjaan Umum dengan mengembangkan kapasitas Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumberdaya Manusia ((BPKSDM) untuk meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS sebagai bagian dari standar kesehatan dan keselamatan kerja dan pelatihan bagi pekerja bangunan.

**b. Tujuan umum dan khusus:** Tujuan umum: Meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS diantara para pekerja yang bekerja dengan mobilitas tinggi. Tujuan khusus: Membantu Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen PU dalam menyertakan dan melaksanakan Pelatihan mengenai Peningkatan Kesadaran tentang HIV/AIDS sebagai bagian dari akreditasi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelatihan kesehatan bagi proyek konstruksi yang berpotensi memiliki risiko tinggi untuk penyebaran HIV. Proyek-proyek berisiko tinggi ini mencakup proyek padat karya, proyek padat modal yang besar, dan proyek di daerah terpencil.

**c. Komponen:** Komponen 1: menyusun kerangka kerja kelembagaan dan kebijakan; Komponen 2: Pengembangan kapasitas BPKSDM untuk meningkatkan dan melaksanakan pelatihan tentang HIV/AIDS sebagai bagian dari pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja bagi Staf Departemen PU dan penyedia jasa konstruksi (perusahaan, staf, dan buruh); Komponen 3: Pelaksanaan uji coba pelatihan peningkatan kesadaran tentang HIV/AIDS.

**d. Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF:** Tidak ada

**e. Dampak dan hasil yang diharapkan:**

BPKSDM memiliki kewenangan dan kapasitas untuk melaksanakan pelatihan peningkatan kesadaran tentang HIV/AIDS: SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Strategi untuk Meningkatkan Kesadaran tentang HIV/AIDS di Sektor Jasa Konstruksi, modul pelatihan, Pelatihan untuk Pelatih, program pelatihan untuk 2007 dan 2008 untuk melatih staf PU dan pekerja sektor konstruksi dalam hal Kesadaran tentang HIV/AIDS.

Meningkatkan kesadaran diantara staf Departemen PU yang bertanggung jawab atas proyek-proyek konstruksi dan diantara penyedia jasa konstruksi dan pekerjanya: pelatihan bagi staf Departemen PU, penyedia jasa konstruksi beserta pekerja dan buruhnya.

**f. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Tidak ada

**g. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:**

**Untuk bantuan teknis, metode yang digunakan untuk sosialisasi informasi hasil**

<p><b>proyek</b></p> <p>siang)</p> <p>ADB</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Konferensi/lokakarya/pertemuan informal (peserta membawa sendiri makan</p> <p><input type="checkbox"/> Publikasi artikel dalam jurnal eksternal atau buku</p> <p><input type="checkbox"/> Siaran Pers <i>melalui</i> kantor-kantor berita untuk kalangan luar, termasuk website (<a href="http://www.adb.org">www.adb.org</a>)</p> <p><input type="checkbox"/> Pengumuman di <i>ADB Today</i> untuk kalangan internal</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan) _ Hasil bantuan teknis dimasukkan dalam Paket Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk Penyedia Jasa Konstruksi yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum.</p>
<p><b>7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:</b> Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum</p>	
<p><b>8. Keterlibatan mana pemerintah/penerima bantuan proyek dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:</b> Diskusi mendalam dengan Departemen Pekerjaan Umum, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Yayasan Kusuma Buana, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, DKT International, ILO.</p>	
<p><b>9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan</b></p> <p>a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, <i>CSP Update</i>, RSCP, <i>RSCP Update</i>, atau rencana kerja Interregional: 2006</p> <p>b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan Pinjaman: Non pinjaman (persiapan proyek): Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): Triwulan pertama 2007</p> <p>c. Periode dan lamanya program bantuan Pinjaman: Non pinjaman: 24 bulan</p>	

## 10. Rencana Pembiayaan

### a. Untuk pinjaman

- Ordinary capital resources:*
- Asian Development Fund/ADF (pinjaman):*
- Asian Development Fund/ADF (hibah):*
- Lainnya:

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$\_\_\_\_, dari \_\_\_\_\_.

Sumber	Jumlah (\$ juta)
Pembiayaan dari ADB	
Pembiayaan dari Pemerintah	
Sumber pembiayaan lainnya	
<b>Total Dana</b>	

Sumber:

### b. Untuk non pinjaman

- Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB
- Anggaran administratif ADB:
- Dana hibah bantuan teknis
- Lainnya:

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$\_\_\_\_, dari \_\_\_\_\_.

Sumber	Jumlah(\$ juta)
Pembiayaan dari	800.000
Pembiayaan dari pemerintah	200.000
Sumber pembiayaan lainnya	0
<b>Total Dana</b>	<b>1.000.000</b>

Source:

ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, RCSP = regional cooperation strategy and program.

**Tabel A8.8: Kertas Kerja Konsep untuk Proyek Sektor Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman Berbasis Masyarakat Tahap II (Second Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project/NUSSP II)**

Tanggal: 10 Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p>        <input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p>        <input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p>        <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan yang dibiayai oleh JFICT atau JFPR</p>										
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya</p> <p>    Sektor: Industri dan Perdagangan</p> <p>    Subsektor: Pembangunan Perumahan</p> <p>b. Untuk persiapan proyek dan pinjaman, klasifikasikan program bantuan,</p> <p>    <input type="checkbox"/> Program pengurangan kemiskinan inti</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Program pengurangan kemiskinan</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan manusia</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola yang baik</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pelindungan lingkungan</td> <td><input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kerjasama regional</td> <td><input type="checkbox"/> Perlindungan sosial</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lainnya:</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi	<input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan manusia	<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola yang baik	<input type="checkbox"/> Pelindungan lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta	<input type="checkbox"/> Kerjasama regional	<input type="checkbox"/> Perlindungan sosial	<input type="checkbox"/> Lainnya:	
<input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi	<input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan manusia									
<input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan	<input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola yang baik									
<input type="checkbox"/> Pelindungan lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta									
<input type="checkbox"/> Kerjasama regional	<input type="checkbox"/> Perlindungan sosial									
<input type="checkbox"/> Lainnya:										
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>										
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Sektor Sosial, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB</p>										
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> F. Steinberg, A. Weitz</p>										
<p><b>6. Uraian tentang bantuan</b></p> <p>a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional: Bantuan teknis ini akan</p>										

fokus pada upaya pengurangan kemiskinan dengan merancang proyek penanganan pemukiman melalui bantuan yang meningkatkan infrastruktur masyarakat dan dukungan berkelanjutan bagi sistem pembiayaan perumahan yang ditujukan bagi masyarakat miskin perkotaan. Bantuan teknis ini juga akan merancang pemberian bantuan untuk mengembangkan kapasitas lembaga keuangan untuk melayani segmen pasar penduduk miskin yang tinggal di pemukiman informal, tidak mendapatkan berbagai pelayanan, tanpa kepastian sampai kapan mereka bisa menggunakan lahan yang mereka tempati, dan tanpa kemudahan akses kepada pembiayaan untuk perbaikan rumah.

**b. Tujuan umum dan khusus:** Proyek ini mendukung strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di wilayah perkotaan dengan menciptakan mekanisme yang berkelanjutan untuk (i) menyediakan sumberdaya bagi pemerintah daerah, dan dalam kemitraan dengan masyarakat meningkatkan pelayanan dan infrastruktur di wilayah pemukiman informal dan mengatasi persoalan tentang hak penggunaan lahan; (ii) memperluas akses bagi masyarakat pemukiman informal untuk mendapatkan kredit mikro untuk pembiayaan perumahan; dan (iii) memfasilitasi perencanaan partisipatif berbasis masyarakat dengan meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat penerima manfaat, pemerintah daerah, dan Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum untuk memenuhi tanggung jawab masing-masing. Proyek ini juga akan membantu dalam menciptakan kebijakan serta lingkungan peraturan dan kelembagaan yang kondusif untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di pemukiman kumuh.

**c. Komponen dan hasil:** Bantuan teknis ini akan melakukan pengkajian sektor, dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam proyek NUSPP Tahap I, dan merekomendasikan reformasi struktural yang tepat, dan menyediakan bantuan lebih lanjut kepada instansi-instansi yang telah mulai melaksanakan proyek NUSPP. Bantuan teknis ini akan mengusulkan seberapa besar bantuan ADB yang akan ditawarkan dan apa saja yang tercakup didalamnya.

**d. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Proyek ini akan mendukung tujuan pengurangan kemiskinan pemerintah dan ADB, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di pemukiman informal. Dalam subproyek-subproyek penanganan pemukiman kumuh yang diusulkan, isu-isu seputar hak kepemilikan tanah akan diselesaikan dan hak kepemilikan perorangan atau alternatif hak penggunaan lahan akan disediakan. Masyarakat disekitar proyek akan memperoleh manfaat dari penyediaan fasilitas pembuangan limbah terpusat (*off-site infrastructure*), termasuk fasilitas perlindungan banjir, jalan raya, dan sistem drainase utama. Proyek peningkatan lingkungan pemukiman kumuh yang serupa di tempat lain terbukti meningkatkan nilai tanah di pasaran sebanyak sekitar 200-700%. Perolehan yang signifikan akan diraih oleh instansi-instansi pelaksana (dalam bentuk pendapatan yang meningkat dari pajak bumi dan bangunan) dan masyarakat penerima manfaat (dalam bentuk status sosial, finansial, dan ekonomi yang lebih baik).

**e. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Kondisi lingkungan di pemukiman yang lebih baik akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat penerima manfaat.

**f. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:** Proyek ini, yang merupakan tahap ke II dari proyek NUSPP, berupaya memberi kontribusi dalam cakupan nasional penanganan lingkungan pemukiman kumuh berbasis masyarakat.

#### 7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:

Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum (PU)

**8. Keterlibatan mana pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:** Akan ditetapkan kemudian

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2007
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan  
Pinjaman:  
Non pinjaman (persiapan proyek): 2008/2009  
Non pinjaman (selain dari persiapan proyek):  
Kegiatan yang didanai oleh JFICT atau JFPR:
- c. Periode dan lamanya program bantuan  
Pinjaman:  
Non pinjaman: 2007  
Kegiatan yang didanai oleh JFICT atau JFPR:

**10. Rencana Pembiayaan** (Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang dibutuhkan dan darimana sumbernya, estimasi biaya, dan kesepakatan pembiayaan)

- b. Untuk non pinjaman
- Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB
- Anggaran administratif ADB: \$
- Dana hibah bantuan teknis
- TA Special Fund/TASF* (Dana Khusus Bantuan Teknis): \$1.000.000
- Japan Special Fund*: \$
- Lainnya (sebutkan, misalnya dana *trust funds* bilateral dan multilateral):

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya:

Jika diketahui, sebutkan estimasi biaya dan kesepakatan pembiayaan (misalnya total biaya, pembiayaan dari ADB, pembiayaan dari sumber lainnya, dan pembiayaan dari pemerintah):

ADB = *Asian Development Bank*, CSP = *country strategy and program*, JFICT = *Japan Fund for Information and Communication Technology*, JFPR = *Japan Fund for Poverty Reduction*, SCSP = *subregional cooperation strategy and program*.

**Tabel A8.9: Kertas Kerja Konsep untuk Kelompok Reformasi Iklim Investasi, Keuangan, dan Kemiskinan**  
*(Investment Climate, Finance, and Policy Reform Cluster)*

Tanggal: 9 Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p>    <input type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p>        <input checked="" type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p>        <input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya          Sektor: Multisektor: keuangan, hukum, manajemen ekonomi, dan kebijakan public.          Subsektor: Pembangunan sektor keuangan, administrasi pemerintahan pusat, administrasi pemerintahan daerah.</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok          Tema:</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola      <input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p>    <input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>Subtema: Meningkatkan efisiensi ekonomi dan pasar yang mendukung, tata kelola keuangan dan ekonomi, tata kelola pemerintah, reformasi kebijakan/kelembagaan/hukum/peraturan, investasi sektor swasta</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Tata kelola, Keuangan, dan Perdagangan, Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB</p>
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> V. Subramanian</p>

## 6. Uraian tentang bantuan

### a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional

Indonesia harus meningkatkan tingkat investasi secara signifikan dan mengupayakan alokasi modal yang lebih efisien jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan meraih kemajuan yang nyata dalam pengurangan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah perlu menangani secara efektif isu-isu yang terkait dengan iklim investasi secara keseluruhan (hasil survei rutin menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia tidak mendukung dibandingkan dengan iklim investasi di negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara) serta mengembangkan sektor keuangan agar lebih mampu memobilisasi modal dengan efektif dan mengalokasikannya dengan efisien (Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sektor keuangan yang paling kecil dalam hal rasio terhadap PDB). CSP 2006-2009 mengidentifikasi bahwa (i) sektor keuangan kurang berkembang dan terdiversifikasi, dan (ii) iklim investasi yang tidak mendukung merupakan hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bantuan teknis ini akan menyediakan dukungan untuk (i) mengidentifikasi isu-isu pokok, pemangku kepentingan utama, dan kepentingan dalam kedua bidang ini; (ii) mengembangkan strategi yang logis dan realistis untuk menangani isu-isu tersebut; dan (iii) menerjemahkan strategi tersebut ke dalam proposal paket reformasi kebijakan yang bertahap.

**b. Tujuan umum dan khusus:** Dengan bekerjasama dengan pemerintah, bantuan teknis ini akan mengidentifikasi paket reformasi jangka pendek dan menengah yang ditujukan untuk menaikkan tingkat investasi serta efisiensi alokasinya melalui pembangunan sektor keuangan (khususnya lembaga keuangan non bank) dan meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan.

**c. Komponen dan hasil:** (i) Kertas Kerja pengantar yang mengidentifikasi isu-isu pokok, pemangku kepentingan, dan kepentingan; (ii) Kertas Kerja strategi yang mengidentifikasi reformasi penting yang diperlukan untuk menangani isu-isu pokok tersebut dan pilihan-pilihan yang realistis untuk mencapainya, (iii) lokakarya yang ditujukan untuk menggalang dukungan pemangku kepentingan terhadap reformasi yang diusulkan; dan (iv) proposal untuk paket reformasi kebijakan yang bertahap.

**d. Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF:** Tidak ada

**e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Proposal yang fokus pada paket reformasi yang logis dan bertahap guna mencapai tujuan umum dan khusus (seperti tercantum dalam butir b), yang dapat dilaksanakan selama periode jangka pendek sampai menengah.

**f. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Tidak ada

**g. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:**

**Untuk bantuan teknis, metode yang dipakai untuk sosialisasi hasil kegiatan**

**bantuan teknis:**

- Konferensi/lokakarya/pertemuan informal (peserta membawa sendiri makan siang)
- Publikasi artikel dalam jurnal eksternal atau buku
- Siaran Perske* kantor-kantor berita untuk kalangan luar, termasuk website ADB ([www.adb.org](http://www.adb.org))
- Siaran Persdi ADB Today* untuk kalangan internal
- Lainnya (sebutkan)

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Instansi Pelaksana: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Instansi pelaksana: Bapepam-LK,

Departemen Industri, Departemen Dalam Negeri

**8. Keterlibatan mana pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:** Bantuan teknis ini akan mendukung dua prioritas pemerintah yang telah diidentifikasi dengan jelas: (i) meningkatkan iklim investasi, dan (ii) membangun sektor keuangan.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, CSP *Update*, RSCP, RSCP *Update*, atau rencana kerja Interregional: 2007
- b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan
  - Pinjaman:
  - Non pinjaman (persiapan proyek): Februari 2007
  - Non pinjaman (selain dari persiapan proyek):
- c. Periode dan lamanya bantuan
  - Pinjaman:
  - Non pinjaman: 12 bulan. Maret 2007 – Februari 2008

**10. Rencana Pembiayaan**

a. Untuk pinjaman

- ordinary capital resources:*
- Asian Development Bank Fund/ADF (pinjaman):*
- Asian Development Bank Fund/ADF (hibah):*
- Lainnya:

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$\_\_\_\_\_, dari \_\_\_\_\_.

b. Untuk non pinjaman

- Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB
- Anggaran administratif ADB
- Dana hibah bantuan teknis: \$800.000
- Lainnya:

ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, RCSP = regional cooperation strategy and program.

**Tabel A8.10: Kertas Kerja Konsep untuk Kluster Pembangunan Infrastruktur Fisik  
(Physical Infrastructure Development Cluster)**

Tanggal: 10 Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p>    <input type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p>        <input checked="" type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p>        <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya</p> <p>    Sektor: Multi Sektor</p> <p>    Subsektor:</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p>    Tema:</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p>    <input type="checkbox"/> Tata kelola      <input checked="" type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p>    <input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>    Subtema: Meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Infrastruktur/Departemen Wilayah Asia Tenggara, ADB</p>

## 6. Uraian tentang bantuan

**a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Perekonomian Indonesia siap untuk tumbuh pada kisaran 6-7%, namun infrastruktur fisik yang tidak memadai akan menjadi salah satu kendala yang menghadang. Kebutuhan investasi di bidang infrastruktur sampai dengan tahun 2010 diperkirakan mencapai lebih dari \$140 milyar. Sebagian besar investasi tersebut harus berasal dari sektor swasta. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan sumberdayanya yang terbatas untuk menarik investasi sektor swasta di sektor-sektor yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan-tujuan CSP, ADB perlu terlibat dalam kegiatan di sektor infrastruktur untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi sektor publik dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi sektor swasta.

Masalah-masalah kelembagaan di sektor perhubungan meliputi kurangnya koordinasi sektor baik di tingkat internal maupun dengan sektor lain, kapasitas dan lembaga yang lemah, dan tidak tersedianya UU dan peraturan yang tepat. Ketumpang-tindihan tanggung jawab untuk mengembangkan dan merawat aset jalan antara Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan perlu ditangani. Meskipun kapasitas pengelolaan aset telah dikembangkan di tingkat pusat, kapasitas untuk perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Kapasitas dan kinerja instansi-instansi daerah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan koordinasi antar instansi tergolong lemah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan biasanya memakan banyak biaya namun kualitasnya rendah, dan kolusi diantara para kontraktor sudah menjadi hal yang lumrah. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan kinerja lembaga-lembaga pusat dan industri jasa konstruksi perlu diperbaiki, dan kapasitas instansi daerah perlu ditingkatkan. Penegakan peraturan untuk menertibkan kendaraan yang memiliki muatan melebihi kapasitas perlu ditingkatkan, dan program keselamatan jalan yang komprehensif perlu dilaksanakan.

Pemerintah mengakui perlunya menyiapkan penganggaran berbasis kinerja (PBB) di sektor infrastruktur untuk memastikan perencanaan dan penyusunan program pembangunan infrastruktur yang efektif, termasuk menilai proyek-proyek yang diajukan ke BAPPENAS untuk "Buku biru". Sektor perhubungan telah mengembangkan cetak biru subsektor di bawah Program Reformasi Infrastruktur namun koordinasi dan penilaian belum berjalan dengan efektif, dan perlu dilakukan perbandingan antara berbagai metode dan proyek untuk pembangunan. Direktorat Transportasi BAPPENAS bermaksud untuk menerapkan PBB melalui pembentukan *multimodal coordination database system* (MCDS) yang akan memungkinkan manajemen dan penyusunan prioritas investasi infrastruktur transportasi untuk proyek pemerintah dan kemitraan antara pemerintah dan swasta.

**b. Tujuan umum dan khusus:** Tujuan umum dari bantuan teknis ini adalah untuk memberi kontribusi dalam perbaikan infrastruktur dan pelayanan infrastruktur, dengan meningkatkan investasi sektor publik dan swasta. Tujuan dari MCDS yang diusulkan adalah untuk menciptakan instrumen perencanaan di Direktorat Transportasi BAPPENAS yang akan digunakan untuk menilai kelayakan proyek-proyek transportasi, menilai perkembangan transportasi multi-moda yang ada di koridor transportasi serta mengembangkan indikator transportasi di tingkat pemerintah pusat dan propinsi. MCDS akan menyediakan data dasar (*baseline*) untuk memungkinkan monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap hasil proyek transportasi dengan indikator transportasi yang berkelanjutan.

**c. Komponen dan hasil:** Bantuan teknis ini terdiri dari kluster-kluster besar berikut: kluster I – bantuan dalam melaksanakan aturan-aturan untuk SK/Keppres dan peraturan tentang infrastruktur yang ada, dan menyediakan masukan-masukan untuk peraturan-

peraturan baru, misalnya, strategi terpadu untuk pengembangan gas metana batubara (*coal bed methane /CBM*);

kluster II – mendukung pengembangan alternatif energi baru, misalnya, pengembangan program bahan bakar bio dan bahan bakar terbarukan di Indonesia dan CBM;

kluster III – mengidentifikasi proyek-proyek yang memberi kontribusi dalam sistem infrastruktur regional yang efisien, misalnya pipanisasi antar wilayah, jalur transmisi dan jalan-jalan yang memberi kontribusi dalam pembangunan grid infrastruktur ASEAN;

kluster IV – pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan bagi lembaga-lembaga utama pemerintah untuk memfasilitasi investasi sektor swasta.

kluster V – pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan bagi lembaga-lembaga sektor transportasi untuk meningkatkan koordinasi sektor baik di tingkat internal maupun dengan sektor lain, kapasitas pengelolaan aset, perencanaan pembangunan, keselamatan jalan, serta praktek dan manajemen bisnis.

kluster VI –MCDS, termasuk (i) menyediakan peralatan piranti lunak dan piranti keras kepada BAPPENAS; (ii) meningkatkan sistem berbasis komputer yang ada seperti sistem manajemen jalan terpadu (*integrated road management system/IRMS*); (iii) meningkatkan sistem tingkat departemen lainnya; dan (iv) penguatan kelembagaan bagi staf BAPPENAS, departemen perhubungan dan BUMN untuk pengoperasian MCDS.

**d. Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF:** Tidak berlaku

**e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Bantuan teknis ini akan dikembangkan dengan bekerjasama secara erat dengan pemerintah, untuk memastikan agar pemerintah punya rasa memiliki dan menyadari pentingnya proyek yang diusulkan.

Hasil yang diharapkan antara lain meliputi:

- kebijakan dan strategi untuk produksi dan pengangkutan CBM;
- pengembangan program bahan bakar bio;
- penetapan harga energi yang kompetitif dan efisien;
- pengembangan kapasitas badan pengatur sektor infrastruktur dan pembagian tanggung jawab yang jelas;
- identifikasi dan pengusulan proyek-proyek infrastruktur antar wilayah yang saling menguntungkan;
- peningkatan koordinasi sektor transportasi, kapasitas pengelolaan aset, perencanaan pembangunan, keselamatan jalan, serta praktek dan manajemen bisnis;
- MCDS, yang memungkinkan BAPPENAS untuk merencanakan dan memprioritaskan investasi infrastruktur di sektor transportasi dengan lebih efektif, menyediakan dasar untuk menilai PSP dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi, serta menyediakan instrumen untuk menilai dan menyetujui proyek- proyek infrastruktur transportasi, termasuk proyek-proyek yang diajukan kepada lembaga donor.

**f. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Bantuan teknis ini juga akan fokus pada tinjauan dan penilaian terhadap lingkungan, persoalan sosial dan keselamatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.

**g. Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:**

**Untuk bantuan teknis, metode yang dipakai untuk sosialisasi hasil kegiatan bantuan teknis:**

Konferensi/lokakarya/pertemuan informal (peserta membawa sendiri makan siang)

<input type="checkbox"/> Publikasi artikel dalam jurnal eksternal atau buku <input type="checkbox"/> <i>Siaran Perske</i> kantor-kantor berita untuk kalangan luar, termasuk website ADB ( <a href="http://www.adb.org">www.adb.org</a> ) <input checked="" type="checkbox"/> <i>Siaran Persdi ADB Today</i> untuk kalangan internal <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan) __Program Pelatihan_____
<p><b>7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:</b> Instansi-instansi yang terkait dengan infrastruktur seperti badan pengatur minyak dan gas ((BPH Migas and BP Migas), Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi, PLN, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan.</p>
<p><b>8. Keterlibatan mana pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:</b> Konsultasi dengan pemerintah termasuk BAPPENAS, Departemen Keuangan, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Perhubungan selama konsultasi CSP.</p>
<p><b>9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan</b></p> <p>a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, <i>CSP Update</i>, RSCP, <i>RSCP Update</i>, atau rencana kerja Interregional: 2006</p> <p>b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan  Pinjaman:  Non pinjaman (persiapan proyek):  Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): April 2007</p> <p>c. Periode dan lamanya bantuan  Pinjaman:  Non pinjaman: Juni 2007 – Mei 2009 (24 bulan)</p>
<p><b>10. Rencana Pembiayaan</b></p> <p>a. Untuk pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Ordinary capital resources</i>: \$  <input type="checkbox"/> <i>Asian Development Fund/ADF</i> (pinjaman): \$  <input type="checkbox"/> <i>Asian Development Fund/ADF</i> (hibah): \$  <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p>Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$____, dari _____.</p> <p>b. Untuk non pinjaman</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB  <input type="checkbox"/> Anggaran administrative ADB:  <input checked="" type="checkbox"/> Dana hibah bantuan teknis: \$2,000,000  <input type="checkbox"/> Lainnya:</p> <p>Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$____, dari _____.</p>

ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, RCSP = regional cooperation strategy and program.

**Tabel A8.11: Kertas Kerja Konsep Bantuan untuk Mengembangkan Manajemen Risiko Bencana**  
*(Support for Developing Disaster Risk Management)*

Tanggal: Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman sektoral</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pinjaman program pembangunan sektor</p> <p>    <input type="checkbox"/> Dana ADF</p> <p>    <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman</p> <p>    <input type="checkbox"/> Persiapan proyek</p> <p>    <input type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek</p> <p>        <input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor</p> <p>        <input type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan</p> <p>        <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya: ADTA – bantuan nasihat teknis kepada pemerintah</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya</p> <p>    Sektor: Hukum, Manajemen Ekonomi, Kebijakan Publik</p> <p>    Subsektor: Administrasi Pemerintahan Pusat, Administrasi Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Program bantuan khusus</p> <p>    <input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok</p> <p>    Tema:</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input checked="" type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan</p> <p>    <input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional</p> <p>    <input type="checkbox"/> Tata kelola      <input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta</p> <p>    <input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>    Subtema: Konservasi sumberdaya alam; pengembangan organisasi; hubungan dengan klien, jaringan kerja, dan pengembangan kemitraan</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembangan kebijakan dalam negeri</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Divisi Pembangunan dan Tata kelola,</p>

**5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:** N. Britton

**6. Uraian tentang bantuan**

- a. **Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:** Kebijakan yang terkait dengan pembangunan dan penanganan bencana sebagian besar fokus pada upaya tanggap darurat, dengan investasi yang minim dalam upaya pencegahan dan pengurangan bahaya bencana alam. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi kerugian akibat bencana alam adalah memasukkan risiko bencana kedalam proses ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan – yakni menjadikan manajemen risiko bencana (*Disaster Risk Management /DRM*) sebagai bagian dari perencanaan. Manajemen Risiko Bencana akhir-akhir ini dilihat sebagai salah satu hal utama yang menjadi perhatian pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah 2007 untuk pertama kalinya memasukkan pengurangan bahaya bencana dan penanganan bencana sebagai satu dari sembilan bidang prioritas. RUU yang diajukan diharapkan akan disahkan tahun ini. RUU tersebut mengusulkan pembentukan badan penanganan bencana yang akan memastikan agar Sekretariat BAKORNAS PBP (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi) yang ada menjadi pusat operasional dan kebijakan tingkat nasional yang pertama di Indonesia. Saat ini sedang disusun rencana pengurangan bencana nasional yang mengantisipasi penyelarasan fungsi-fungsi dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ada anggapan umum bahwa lembaga-lembaga donor akan membantu pemerintah beralih dari sikap yang hanya “merespon bencana” ke pendekatan “pengurangan risiko bencana”. ADB siap membantu pemerintah dalam hal ini. Salah satu elemen Kebijakan Bantuan Bencana dan Bantuan Darurat ADB adalah melembagakan Manajemen Risiko Bencana dengan mengidentifikasi risiko-risiko bencana selama periode penyusunan program di Indonesia, dan mengembangkan kapasitas pemerintah untuk menangani bahaya dan bencana.
- b. **Tujuan umum dan khusus:** Proyek ini akan membantu BAKORNAS PBP memulai peralihan dengan menyediakan masukan dan pengalaman praktis dari negara-negara lain yang memiliki pengalaman serupa dalam melakukan peralihan dari pendekatan pasif yang hanya merespon bencana ke pendekatan aktif yang mengurangi risiko bencana. Tujuan khusus dari bantuan teknis ini adalah (i) menyediakan bantuan dalam mengembangkan kebijakan dan memberi masukan di tingkat pusat dan daerah untuk melembagakan manajemen risiko, dan (ii) menyelenggarakan studi kasus tentang teknik-teknik penanggulangan bahaya dalam situasi tertentu untuk menunjukkan penerapannya.
- d. **Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF:** Tidak ada
- e. **Dampak dan hasil yang diharapkan:** Proyek ini akan menyediakan (i) tuntunan, umpan balik, lokakarya dan pedoman kepada BAKORNAS tentang pilihan-pilihan untuk mengembangkan manajemen risiko bencana dalam lingkup dan antar lembaga pusat dan daerah (ii) penilaian dan pelatihan langsung di lokasi (*on site*) untuk meningkatkan ketahanan dalam teknik konstruksi yang digunakan masyarakat dalam membangun rumah/bangunan; dan (iii) penilaian langsung ke lokasi, pilihan-pilihan dan pedoman untuk mengenalkan program penanggulangan multi bahaya untuk lokasi tertentu.

<p>f. <b>Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:</b> Akan ditetapkan selama tahap kegiatan penemuan fakta</p> <p>g. <b>Rencana untuk sosialisasi informasi tentang hasil proyek:</b> Konsultasi, lokakarya, program pelatihan di tingkat daerah</p> <p>Untuk bantuan teknis, metode yang dipakai untuk sosialisasi hasil kegiatan bantuan teknis: Akan ditetapkan kemudian.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Konferensi/lokakarya/pertemuan informal (peserta membawa sendiri makan siang)</p> <p><input type="checkbox"/> Publikasi artikel dalam jurnal eksternal atau buku</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Siaran Perske</i> kantor-kantor berita untuk kalangan luar, termasuk website ADB (<a href="http://www.adb.org">www.adb.org</a>)</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Siaran Persdi ADB Today</i> untuk kalangan internal</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)</p>
<p>7. <b>Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:</b> Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (BAKORNAS PBP)</p>
<p>8. <b>Keterlibatan pemerintah/penerima bantuan proyek dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:</b></p> <p>ADB mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga utama pemerintah (BAKORNAS, BAPPENAS, Divisi Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri) selama proses CSP dan menerima pesan yang sama bahwa pemerintah mengharapkan lembaga donor membantu peralihan dari pendekatan merespon bencana ke pendekatan pengurangan/pencegahan bencana yang lebih proaktif. Proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan kapasitas diharapkan untuk memiliki komponen manajemen resiko bencana.</p>
<p>9. <b>Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan</b></p> <p>a. Tahun yang dicantumkan dalam CSP, <i>CSP Update</i>, RSCP, <i>RSCP Update</i>, atau rencana kerja Interregional: 2006</p> <p>b. Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan</p> <p>Pinjaman: Non pinjaman: Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): 2007</p> <p>c. Periode dan lamanya program bantuan</p> <p>Pinjaman: Non pinjaman: 6 bulan</p>

## 10. Rencana Pembiayaan

## a. Untuk non pinjaman

- Tidak memerlukan sumberdaya apapun, kecuali staf ADB  
 Anggaran administratif ADB:  
 Dana hibah bantuan teknis  
 Lainnya:

Jika dibutuhkan pembiayaan bersama, sebutkan jumlah dana yang diperlukan dan darimana sumbernya: \$\_\_\_\_, dari \_\_\_\_\_.

Sumber	Jumlah (\$ juta)
Pembiayaan dari ADB	600.000
Pembiayaan dari Pemerintah	150.000
Sumber pembiayaan lainnya	0
<b>Total Dana</b>	<b>750.000</b>

Sumber: Hasil penghitungan *Asian Development Bank*.

ADB = Asian Development Bank, CSP = country strategy and program, RCSP = regional cooperation strategy and program.

**Tabel A8.12: Kertas Kerja Konsep untuk Bantuan untuk Manajemen Berbasis Hasil dalam Perencanaan Nasional (Support for Result Management in National Planning)**

**Tanggal:** Agustus 2006

<p><b>1. Jenis/bentuk bantuan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non pinjaman  <input type="checkbox"/> Persiapan proyek  <input checked="" type="checkbox"/> Selain dari persiapan proyek  <input type="checkbox"/> Kegiatan ekonomi, tematik dan sektor  <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kelembagaan  <input type="checkbox"/> Lainnya:</p>
<p><b>2. Fokus bantuan</b></p> <p>a. Jika bantuan fokus pada satu sektor atau subsektor tertentu, sebutkan sektornya  Sektor: Hukum, Manajemen Ekonomi, dan Kebijakan Publik  Subsektor: Manajemen Keuangan dan Pengeluaran Publik</p> <p>b. Klasifikasi program bantuan  <input type="checkbox"/> Program bantuan khusus  <input checked="" type="checkbox"/> Program bantuan umum</p> <p>c. Bidang yang menjadi tema pokok  Tema:  <input type="checkbox"/> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan      <input type="checkbox"/> Pelestarian lingkungan  <input type="checkbox"/> Pembangunan sosial yang inklusif      <input type="checkbox"/> Kerjasama regional  <input checked="" type="checkbox"/> Tata kelola      <input type="checkbox"/> Pembangunan sektor swasta  <input type="checkbox"/> Jender dan pembangunan      <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan kapasitas</p> <p>Sub-tema: Pengembangan kelembagaan</p>
<p><b>3. Cakupan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nasional      <input type="checkbox"/> Subregional      <input type="checkbox"/> Interregional</p>
<p><b>4. Divisi/departemen penanggung jawab:</b> Kantor Perwakilan ADB di Indonesia</p>
<p><b>5. Staf ADB yang menjadi penanggung jawab:</b> Barend Frielink</p>
<p><b>6. Uraian tentang bantuan</b></p> <p><b>a. Latar belakang/kaitan dengan strategi nasional / regional:</b> Indonesia telah berhasil melakukan peralihan dari negara otoriter dengan sistem perekonomian yang tersentralisasi ke negara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Mengingat lamanya waktu yang diperlukan untuk mewujudkan proses peralihan tersebut, terutama dalam mengembangkan kerangka kerja hukum dan peraturan yang diperlukan, tidaklah mengherankan jika pelaksanaan reformasi tersebut dan terutama pengembangan kapasitas yang diperlukan akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Namun, Indonesia benar-benar</p>

siap untuk mengenalkan elemen-elemen penting dalam manajemen berbasis hasil. Komitmen terhadap manajemen berbasis hasil jelas tersirat dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang merupakan UU pertama yang menyediakan dasar hukum bagi orientasi kinerja dalam manajemen sumberdaya sektor publik di Indonesia. Tujuan utama dari UU tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara. UU tersebut berupaya mengintegrasikan perencanaan makroekonomi dan perumusan kebijakan fiskal, disamping meningkatkan akuntabilitas proses penyusunan anggaran secara keseluruhan. UU ini mengharuskan setiap departemen dan lembaga negara menyerahkan rencana kerja bersama dengan proposal anggarannya. Tidak lama setelah diterbitkannya UU No.17/2003, DPR juga mengesahkan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut berpotensi untuk mencakup aspek-aspek sebelum dan setelah dari siklus anggaran. Namun sayangnya, norma dan nilai untuk melaksanakan ketiga UU tersebut tidak tersedia, karena dinas-dinas tidak mengalami reformasi yang serupa dan tetap melaksanakan fungsi mereka “seperti biasanya”, dan hampir tak ada insentif bagi mereka untuk berubah. Penggunaan sistem manajemen berbasis kinerja sepenuhnya merupakan sebuah tugas yang sulit, bahkan di negara-negara maju pun manajemen berbasis kinerja masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, upaya Indonesia untuk memulai transisi menuju manajemen berbasis kinerja patut dipuji. Meskipun departemen-departemen diwajibkan untuk menyerahkan rencana kerja tahunan, kualitas dan detil dari rencana kerja tersebut berbeda-beda antara satu departemen dengan departemen lainnya. Transisi menuju manajemen berbasis kinerja tampaknya akan menjadi satu perjalanan panjang.

Di tingkat daerah, standar kinerja telah diterbitkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kewenangan wajib yang dilimpahkan ke pemerintah daerah. ADB mendukung proses pengembangan SPM tersebut,<sup>1</sup> yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya meskipun proses desentralisasi telah berjalan lima tahun. UU No.32/2004 menetapkan bahwa kewenangan wajib yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah perlu dievaluasi berdasarkan standar pelayanan minimal. Pembagian fungsi yang tidak jelas dan kekhawatiran tentang hambatan fiskal yang dapat menghalangi pencapaian SPM segera setelah SPM tersebut diberlakukan, telah menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan standar tersebut. Hal ini juga karena SPM pada awalnya dilihat sebagai standar administratif yang tidak ada kaitannya dengan anggaran.

**b. Tujuan umum dan khusus:** Tujuan umum: Untuk mengenalkan sistem perencanaan berbasis hasil. Tujuan khusus: Untuk membantu pemerintah mengembangkan proses yang memfasilitasi perencanaan berbasis hasil, yang pada akhirnya akan diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.

**c. Komponen dan hasil:** (i) Kajian dan analisis kesenjangan; (ii) penyusunan proyek uji coba di satu atau dua sektor; dan (iii) lokakarya, dan pelatihan singkat di dalam dan luar negeri

**d. Alasan dasar dan tujuan pemberian dana hibah ADF :** Tidak berlaku

**e. Dampak dan hasil yang diharapkan:** Dokumen perencanaan yang dirumuskan dalam bentuk hasil dan dampak, yang berkaitan jelas dengan input dan biaya, dan dengan

<sup>1</sup> TA 3967-INO: Penyediaan Pelayanan Dasar Minimum bagi Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Daerah senilai \$750,000.

indikator-indikator monitoring. Dokumen ini hanya fokus pada satu atau dua sektor saja sebagai uji coba.

**f. Isu dan persoalan sosial dan lingkungan:** Tidak ada

**g. Rencana sosialisasi informasi hasil proyek:**

Untuk bantuan teknis, metode yang dipakai untuk sosialisasi hasil kegiatan bantuan teknis

Konferensi/lokakarya/pertemuan informal (peserta membawa sendiri makan siang)

**7. Instansi Penanggung Jawab/Pelaksana Yang Diusulkan:** Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

**8. Keterlibatan pemerintah/masyarakat penerima bantuan dalam mengidentifikasi atau menyusun konsep bantuan:**

Konsep program bantuan dikembangkan oleh Kantor Perwakilan ADB di Indonesia bersama dengan BAPPENAS.

**9. Jadwal untuk penyusunan desain, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan**

- Tahun yang dicantumkan dalam CSP, *CSP Update*, RSCP, *RSCP Update*, atau rencana kerja Interregional: 2006
- Tanggal penyerahan proposal untuk mendapatkan persetujuan Non pinjaman (selain dari persiapan proyek): Triwulan ke-4, 2007
- Periode dan lamanya bantuan Non pinjaman: 24 bulan

**10. Rencana Pembiayaan**

Untuk non pinjaman

Dana hibah bantuan teknis

<b>Sumber</b>	<b>Jumlah (\$ juta)</b>
Pembiayaan dari ADB	1.000.000
Pembiayaan dari Pemerintah	250.000
Sumber pembiayaan lainnya	
<b>Total Dana</b>	<b>1,250,000</b>

Sumber: Hasil penghitungan *Asian Development Bank*.